



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015 (AUDITED)





**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 2380/-1.713
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Representasi Manajemen

Jakarta, 30 Mei 2016

Kepada

Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

Sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015, Neraca per 31 Desember 2015, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2015, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan hormat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat representasi ini disampaikan terbatas pada hal-hal yang sifatnya material, tanpa melihat besarnya nilai atau volume, namun juga menyangkut kekeliruan dan kesalahan penyajian informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.
2. Berdasarkan keyakinan dan pengetahuan, representasi berikut ini telah disampaikan kepada Tim BPK-RI selama pemeriksaan, yaitu :
 - a. laporan keuangan yang disebut di atas telah saya sajikan sesuai dengan SAP;
 - b. telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI;
 - c. seluruh transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
 - d. rekening yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semuanya sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
 - e. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
 - f. adanya tindakan pelanggaran hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan masih dalam tahap diteliti;

- g. pada dasarnya semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
 - h. tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
 - i. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi semua aspek Perjanjian Kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
 - j. tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2015 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
 - k. tidak terdapat kecurangan material baik berupa kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan serta kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern; dan
 - l. saya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
3. Efektivitas sistem pengendalian intern yang telah dilakukan dalam hal penilaian :
- a. keandalan laporan keuangan : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 - b. ketaatan pada peraturan perundang-undangan : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
4. Kelemahan-kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan material, telah disampaikan secara menyeluruh.
5. Identifikasi dan pengungkapan seluruh peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan, termasuk kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga saya bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.

Demikian surat representasi ini saya sampaikan sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 30 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama



LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015 AUDITED

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2016**



LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015 AUDITED

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2016**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 2015	Realisasi Audited 2015	(%)	Realisasi Audited 2014
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	32.581.650.000.000	29.076.926.598.506	89,24	27.050.949.023.586
4	Pendapatan Retribusi Daerah	610.000.000.000	459.459.498.063	75,32	515.162.936.406
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	640.000.000.000	527.280.486.037	82,39	465.979.962.538
6	Lain-lain PAD yang sah	4.133.966.304.000	3.622.510.233.102	87,63	3.242.123.963.189
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	37.965.616.304.000	33.686.176.815.708	88,73	31.274.215.885.719
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	12.894.962.912.000	5.751.741.852.400	44,60	9.279.068.989.723
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	100.503.013.000	135.525.792.297	134,85	312.478.953.549
13	Dana Alokasi Umum	-	-	~	85.985.282.000
14	Dana Alokasi Khusus	-	-	~	-
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	12.995.465.925.000	5.887.267.644.697	45,30	9.677.533.225.272
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	~	-
19	Dana Penyesuaian	2.759.513.671.000	2.755.110.753.389	99,84	2.482.936.697.000
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	2.759.513.671.000	2.755.110.753.389	99,84	2.482.936.697.000
21	Total Pendapatan Transfer (15 + 20)	15.754.979.596.000	8.642.378.398.086	54,85	12.160.469.922.272
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	2.588.642.100.000	1.880.682.954.789	72,65	389.614.752.674
25	Pendapatan Dana Darurat	-	-	~	-
26	Pendapatan Lainnya	-	-	~	-
27	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)	2.588.642.100.000	1.880.682.954.789	72,65	389.614.752.674
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)	56.309.238.000.000	44.209.238.168.583	78,51	43.824.300.560.665
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	19.505.273.188.832	17.312.344.016.739	88,76	12.604.588.791.793
32	Belanja Barang	16.421.400.772.993	10.633.820.105.891	64,76	12.624.396.750.887
33	Bunga	46.070.052.873	5.478.639.527	11,89	1.218.528.851
34	Subsidi	940.000.000.000	659.081.781.344	70,12	-
35	Hibah	1.785.249.464.211	1.717.428.915.536	96,20	1.462.044.387.771
36	Bantuan Sosial	2.088.011.505.000	2.087.123.200.000	99,96	680.155.340.000
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)	40.786.004.983.909	32.415.276.659.037	79,48	27.372.403.799.302
38					
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	7.357.852.305.531	3.451.775.763.772	46,91	1.754.586.883.131
41	Belanja Peralatan dan Mesin	3.218.039.451.093	2.002.190.574.946	62,22	4.062.228.522.758
42	Belanja Gedung dan Bangunan	3.414.624.665.827	2.063.978.323.661	60,45	2.589.956.270.028
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.334.484.447.777	2.685.243.694.385	61,95	1.599.630.901.228
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	100.711.708.033	40.828.352.444	40,54	404.715.813.104
45	Belanja Aset Lainnya	-	-	~	-
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	18.425.712.578.261	10.244.016.709.208	55,60	10.411.118.390.249
47					
48	BELANJA TAK TERDUGA				
49	Belanja Tak Terduga	72.656.043.103	877.074.802	1,21	2.136.402.124
50	Jumlah Belanja Tak Terduga (49)	72.656.043.103	877.074.802	1,21	2.136.402.124
51	Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)	59.284.373.605.273	42.660.170.443.047	71,96	37.785.658.591.675
52					
53	TRANSFER				
54	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	-	~	-
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	~	-
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-	~	-
58	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)	-	-	~	-
59					
60	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN				
61	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	401.179.003.960	371.152.504.510	-	14.005.706.784
62	Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	~	-
63	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (61 s/d 62)	401.179.003.960	371.152.504.510	92,52	14.005.706.784
64	Jumlah Transfer (58 + 63)	401.179.003.960	371.152.504.510	92,52	14.005.706.784
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 64)	59.685.552.609.233	43.031.322.947.557	72,10	37.799.664.298.459
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (28 - 65)	(3.376.314.609.233)	1.177.915.221.026		6.024.636.262.206

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 2015	Realisasi Audited 2015	(%)	Realisasi Audited 2014
68					
69	PEMBIAYAAN				
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
71	Penggunaan SILPA	9.160.897.609.233	9.160.897.609.233	100,00	7.593.994.776.473
72	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	298.570.000.000	48.884.300.406	16,37	-
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
83	Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)	9.459.467.609.233	9.209.781.909.639	97,36	7.593.994.776.473
84					
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
86	Pembentukan Dana Cadangan	-	78.999.209.715	-	73.101.911.062
93	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.079.053.000.000	5.371.093.824.789	88,35	4.370.626.071.289
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	4.100.000.000	4.084.644.411	99,63	8.169.288.822
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-
94	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	4.819.060.710
96	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
97	Jumlah Pengeluaran (86 s/d 96)	6.083.153.000.000	5.454.177.678.915	89,66	4.456.716.331.883
98	PEMBIAYAAN NETO (83 - 97)	3.376.314.609.233	3.755.604.230.724		3.137.278.444.590
100	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 98)		4.933.519.451.750		9.160.897.609.233

Jakarta, 30 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,

 Basuki T. Purnama



**LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2015
AUDITED**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2016**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Saldo Anggaran Lebih Awal	9.160.897.609.233,00	7.593.994.776.473,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(9.160.897.609.233,00)	(7.593.994.776.473,00)
Subtotal	-	-
Pendapatan	44.209.238.168.583,00	43.824.300.560.665,00
Belanja	(43.031.322.947.557,00)	(37.799.664.298.459,00)
Surplus	1.177.915.221.026,00	6.024.636.262.206,00
Penerimaan Pembiayaan	9.209.781.909.639,00	7.593.994.776.473,00
Pengeluaran Pembiayaan	(5.454.177.678.915,00)	(4.456.716.331.883,00)
Pembiayaan Netto	3.755.604.230.724,00	3.137.278.444.590,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	4.933.519.451.750,00	9.161.914.706.796,00
Subtotal	4.933.519.451.750,00	9.161.914.706.796,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-lain	-	(1.017.097.563,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	4.933.519.451.750,00	9.160.897.609.233,00

Jakarta, 30 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Basuki T. Purnama



LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015 AUDITED

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2016**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2015
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Daerah		
Pendapatan Pajak Daerah	5.3.1.1.1.1	30.021.691.108.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.3.1.1.1.2	414.943.915.696,00
Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.1.3	15.363.325.157,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.1.4	9.194.970.401.858,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		39.646.968.750.711,00
Pendapatan Transfer		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
Bagi Hasil Pajak		11.327.202.422.389,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		11.327.202.422.389,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
Dana Penyesuaian		2.755.110.753.389,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		2.755.110.753.389,00
Jumlah Pendapatan Transfer		14.082.313.175.778,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.3.1.1.3	
Pendapatan Hibah		1.910.504.881.067,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		1.910.504.881.067,00
JUMLAH PENDAPATAN		55.639.786.807.556,00
<u>BEBAN</u>		
Beban Operasi		
Beban Pegawai	5.3.1.2.a	17.451.577.953.165,00
Beban Persediaan	5.3.1.2.b	2.537.304.538.469,00
Beban Barang	5.3.1.2.c	2.010.889.393.803,00
Beban Jasa	5.3.1.2.d	3.786.735.915.447,00
Beban Pemeliharaan	5.3.1.2.e	1.335.308.308.102,00
Beban Perjalanan Dinas	5.3.1.2.f	50.471.093.060,00
Beban Bunga	5.3.1.2.g	5.294.660.335,00
Beban Subsidi	5.3.1.2.h	659.081.781.344,00
Beban Hibah	5.3.1.2.i	1.717.428.915.536,00
Beban Bantuan Sosial	5.3.1.2.j	2.087.123.200.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.1.2.k	4.651.850.075.752,00
Beban Penyisihan Piutang	5.3.1.2.l	437.667.615.684,00
Beban Lain-lain	5.3.1.2.m	564.544.439.618,00
Jumlah Beban Operasi		37.295.277.890.315,00
Beban Transfer	5.3.1.2.n	
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		371.152.504.510,00
Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		371.152.504.510,00
JUMLAH BEBAN		37.666.430.394.825,00
JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL		17.973.356.412.731,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2015
<u>SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>		
Surplus Non Operasional		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		84.210.305.562,00
Jumlah Surplus Non Operasional		84.210.305.562,00
Defisit Non Operasional		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		373.516.220,00
Jumlah Defisit Penjualan Aset Non Lancar		373.516.220,00
JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		83.836.789.342,00
SURPLUS SEBELUM POS LUAR BIASA		18.057.193.202.073,00
<u>POS LUAR BIASA</u>		
Pendapatan Luar Biasa		
Pendapatan Luar Biasa		-
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		-
Beban Luar Biasa		
Beban Luar Biasa		1.582.441.003,00
Jumlah Beban Luar Biasa		1.582.441.003,00
POS LUAR BIASA		(1.582.441.003,00)
SURPLUS		18.055.610.761.070,00

Jakarta, 30 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,

 Basuki T. Purnama



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN ANGGARAN 2015 AUDITED

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2016**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2015
EKUITAS AWAL	5.4.1	424.776.006.494.695,00
KOREKSI EKUITAS	5.4.2	
Koreksi Penambahan Ekuitas		4.102.871.354.386,00
Kurang Catat Aset Tahun 2014		3.816.941.573.612,00
Lebih Catat Utang Tahun 2014		25.883.411.917,00
Pembatalan Penyisihan atas Piutang yang Telah Terbayar		260.046.368.857,00
Koreksi Pengurangan Ekuitas		(882.863.701.760,00)
Lebih Catat Aset Tahun 2014		(644.736.801.668,00)
Kurang Catat Utang Tahun 2014		(120.308.375.049,00)
Kurang Catat Penyisihan Piutang Tak Tertagih s.d. Tahun 2014		(27.621.298.251,00)
Koreksi Pendapatan Pajak - LO		(83.528.053.265,00)
Lebih Catat Pendapatan Tahun 2014		(6.669.173.527,00)
Jumlah Koreksi Ekuitas		3.220.007.652.626,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	5.4.3	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap s.d. Tahun 2014		(24.737.392.389.270,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Fasos Fasum s.d. Tahun 2014		(1.100.232.508.224,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dijual		(41.835.372.724,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud s.d. Tahun 2014		(67.352.851.866,00)
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan		(25.946.813.122.084,00)
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL	5.4.4	18.055.610.761.070,00
EKUITAS AKHIR		420.104.811.786.307,00

Jakarta, 30 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama



NERACA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 AUDITED

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2016**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2015 (Audited)	31 DESEMBER 2014 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1	4.447.646.232.438,00	9.069.887.775.249,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.2	816.807.645.256,00	404.746.053.001,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.3	-	23.308.500,00
Kas dan Setara Kas BLUD	5.5.1.1.4	1.017.491.155.074,00	984.007.705.203,00
Piutang Pajak	5.5.1.1.5.1	6.310.691.128.624,00	5.459.957.134.383,00
Penyisihan Piutang Pajak		(2.735.632.100.316,00)	(2.579.100.761.179,00)
Piutang Retribusi	5.5.1.1.5.2	31.195.082.860,00	78.689.895.378,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(22.518.014.465,00)	(9.943.467.597,00)
Piutang BLUD	5.5.1.1.5.3	356.383.764.220,00	233.460.046.307,00
Penyisihan BLUD		(40.002.354.569,00)	(5.101.783.507,00)
Piutang Dana Transfer	5.5.1.1.5.4	5.459.274.194.651,00	-
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	5.5.1.1.5.5	17.103.762.096,00	16.145.560.786,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi		(5.198.326.738,00)	(5.175.429.900,00)
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	5.5.1.1.5.6	971.534.331,00	971.534.331,00
Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan		(4.857.672,00)	-
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	5.5.1.1.5.7	20.501.789.384,00	39.240.912.984,00
Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset		(593.443.678,00)	-
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	5.5.1.1.5.8	100.749.956.231,00	100.518.114.851,00
Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset		(592.332.844,00)	-
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	5.5.1.1.5.9	44.114.013.599,00	46.499.582.131,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	5.5.1.1.5.10	3.674.517.300,00	3.632.571.620,00
Piutang Lainnya	5.5.1.1.5.11	731.164.994.198,00	176.698.039.421,00
Penyisihan Piutang Lainnya		(11.578.943.046,00)	(4.832.223.926,00)
Aset Lancar Lainnya	5.5.1.1.7	158.298.034.978,00	228.768.215.755,00
Persediaan	5.5.1.1.8	750.543.243.114,00	633.043.730.336,00
Jumlah Aset Lancar		17.450.490.675.026,00	14.872.136.514.127,00
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Nonpermanen	5.5.1.2.1	409.862.523.178,00	403.394.131.382,00
Investasi dalam Dana Bergulir		897.187.591.237,00	897.187.591.237,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(487.325.068.059,00)	(493.793.459.855,00)
Investasi Permanen	5.5.1.2.2	22.098.228.136.608,00	15.697.899.274.250,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		22.508.090.659.786,00	16.101.293.405.632,00
Aset tetap	5.5.1.3	363.584.467.256.156,00	341.982.544.524.372,00
Tanah		284.068.689.312.488,00	273.519.641.092.661,00
Peralatan dan Mesin		18.986.813.894.851,00	17.190.097.083.385,00
Gedung dan Bangunan		24.169.792.568.590,00	17.384.759.492.812,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		32.306.882.017.848,00	29.731.234.210.492,00
Aset Tetap Lainnya		1.422.710.645.797,00	1.361.719.093.920,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		2.629.578.816.582,00	2.795.093.551.102,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.5.1.3.1	(29.181.425.283.107,00)	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(8.720.575.513.975,00)	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(9.252.509.523.776,00)	-
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		(11.208.289.041.206,00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(51.204.150,00)	-
Jumlah Aset tetap		334.403.041.973.049,00	341.982.544.524.372,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2015 (Audited)	31 DESEMBER 2014 (Audited)
Dana Cadangan	5.5.1.4	1.046.215.749.016,00	967.216.539.301,00
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.5.1	50.949.015.300,00	56.147.710.109,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.5.1.5.2	-	964.201.310,00
Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih		-	(4.821.007,00)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.3	6.554.369.249.425,00	3.578.851.777.917,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(278.165.572.423,00)	
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.4	200.362.096.132,00	191.045.494.586,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.5	(102.917.195.195,00)	-
Aset Lain-lain	5.5.1.5.6	40.223.272.327.802,00	47.603.405.573.354,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(994.319.774.387,00)	-
Jumlah Aset Lainnya		45.653.550.146.654,00	51.430.409.936.269,00
JUMLAH ASET		421.061.389.203.531,00	425.353.600.919.701,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang PFK	5.5.2.1.1	328.601.120.662,00	302.606.765.141,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga	5.5.2.1.2.a	-	183.979.192,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok	5.5.2.1.2.b	-	4.084.644.411,00
Pendapatan Diterima di Muka	5.5.2.1.3	82.396.090.395,00	19.492.721.268,00
Utang Belanja	5.5.2.1.4	342.052.450.888,00	239.294.214.510,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.5	5.819.970.609,00	11.932.100.484,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		758.869.632.554,00	577.594.425.006,00
Kewajiban Jangka Panjang	5.5.2.2		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.2.2.1.1	169.192.675.455,00	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.5.2.2.2	28.515.109.215,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		197.707.784.670,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN		956.577.417.224,00	577.594.425.006,00
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	-	9.160.897.609.233,00
Pendapatan Ditangguhkan	-	-	981.632.154.253,00
Cadangan Piutang	-	-	3.551.659.726.083,00
Cadangan Persediaan	-	-	633.043.730.336,00
Jangka Pendek	-	-	(261.459.346.539,00)
Cadangan Aset Lancar Lainnya	-	-	228.768.215.755,00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		-	14.294.542.089.121,00
EKUITAS DANA INVESTASI			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	16.101.293.405.632,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-	341.982.544.524.372,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-	51.430.409.936.269,00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		-	409.514.247.866.273,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2015 (Audited)	31 DESEMBER 2014 (Audited)
EKUITAS DANA CADANGAN			
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		-	967.216.539.301,00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		-	967.216.539.301,00
JUMLAH EKUITAS	5.5.3	420.104.811.786.307,00	424.776.006.494.695,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		421.061.389.203.531,00	425.353.600.919.701,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 30 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta



Basuki T. Purnama

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2015 (Audited)	31 DESEMBER 2014 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	6.281.945.032.768,00	10.458.664.841.953,00
Kas di Kas Daerah	4.447.646.232.438,00	9.069.887.775.249,00
Kas Daerah	4.118.062.593.224,00	8.785.926.290.869,00
Potongan Pajak dan Jamsostek	324.469.034.806,00	272.029.383.896,00
Kas Transitoris	5.114.604.408,00	11.932.100.484,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	816.807.645.256,00	404.746.053.001,00
Sisa Belanja yang Belum Disetor	813.781.599.291,00	374.971.318.364,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	20.400.493,00	679.988,00
Pajak di SKPD yang Belum Disetor	3.005.645.472,00	29.687.950.334,00
Uang Titipan	-	86.104.315,00
Kas di Bendahara Penerimaan	-	23.308.500,00
Pendapatan yang Belum Disetor	-	23.308.500,00
Kas dan Setara Kas BLUD	1.017.491.155.074,00	984.007.705.203,00
Kas Tunai	2.521.825.239,00	2.961.908.748,00
Kas di Bank	1.012.718.896.555,00	829.611.721.688,00
Kas Transitoris BLUD	-	149.034.535.329,00
Pajak di BLUD yang Belum Disetor	871.302.184,00	561.255.396,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	1.366.064.096,00	1.838.284.042,00
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	13.067.000,00	-
Piutang Pajak	6.310.691.128.624,00	5.459.957.134.383,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	50.386.958.545,00	20.138.230.486,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	238.627.010,00	238.833.010,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.095.221.225,00	3.737.829.340,00
Piutang Pajak Air Tanah	83.087.525.295,00	73.416.317.820,00
Piutang Pajak Hotel	17.476.631.388,00	27.172.627.475,00
Piutang Pajak Restoran	129.880.233.572,00	117.185.517.942,00
Piutang Pajak Hiburan	67.165.075.129,00	46.304.754.264,00
Piutang Pajak Reklame	210.655.068.042,00	220.442.896.236,00
Piutang Pajak Parkir	2.794.391.418,00	5.005.935.702,00
Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	17.841.149.604,00	17.914.660.837,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	5.727.070.247.396,00	4.928.399.531.271,00
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih	(2.735.632.100.316,00)	(2.579.100.761.179,00)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(6.547.112.108,00)	(3.615.968.146,00)
Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(186.711.910,00)	(178.017.510,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(1.870.701.629,00)	(18.689.146,00)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(41.969.850.401,00)	(30.984.586.612,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(9.813.638.292,00)	(10.381.703.028,00)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(65.890.159.837,00)	(61.906.240.104,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(26.886.062.252,00)	(25.431.024.908,00)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(33.739.336.882,00)	(32.024.742.330,00)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(1.255.719.083,00)	(1.691.854.261,00)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(16.027.168.610,00)	(13.322.868.482,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	(2.531.445.639.312,00)	(2.399.545.066.652,00)
Piutang Pajak Netto	3.575.059.028.308,00	2.880.856.373.204,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2015 (Audited)	31 DESEMBER 2014 (Audited)
Piutang Retribusi	31.195.082.860,00	78.689.895.378,00
Piutang Retribusi Jasa Umum	1.249.583.586,00	33.879.539.886,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	7.793.183.800,00	15.986.860.628,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	22.152.315.474,00	28.823.494.864,00
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	(22.518.014.465,00)	(9.943.467.597,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(792.491.386,00)	(4.853.717,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(4.490.104.994,00)	(9.356.268.265,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(17.235.418.085,00)	(582.345.615,00)
Piutang Retribusi Netto	8.677.068.395,00	68.746.427.781,00
Piutang BLUD	356.383.764.220,00	233.460.046.307,00
Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	1.062.215.500,00	1.400.614.750,00
Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	4.980.000,00	22.435.000,00
Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452,00	1.944.556.802,00
Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda	93.985.512,00	93.985.512,00
Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	28.104.300.997,00	27.271.180.217,00
Piutang BLUD RSUD dan RSKD	302.837.407.777,00	202.068.779.525,00
Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	664.800.000,00	636.675.000,00
Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I	11.361.478.169,00	-
Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II	1.230.225.416,00	-
Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III	10.281.296.896,00	-
Piutang Ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway	21.819.501,00	21.819.501,00
Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih	(40.002.354.569,00)	(5.101.783.507,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	(7.759.203,00)	(7.003.075,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	(112.175,00)	(112.175,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	(721.254.452,00)	-
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda	(93.985.512,00)	(71.030.418,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	(26.797.727.992,00)	-
Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD	(10.752.836.240,00)	(5.020.345.366,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	(127.500.000,00)	(3.183.375,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I	(1.084.995.293,00)	-
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II	(35.175.269,00)	-
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III	(380.899.335,00)	-
Penyisihan Piutang Ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway	(109.098,00)	(109.098,00)
Piutang BLUD Netto	316.381.409.651,00	228.358.262.800,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2015 (Audited)	31 DESEMBER 2014 (Audited)
Piutang Dana Transfer	5.459.274.194.651,00	-
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	5.385.395.888.600,00	-
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	73.878.306.051,00	-
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	17.103.762.096,00	16.145.560.786,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi	(5.198.326.738,00)	(5.175.429.900,00)
Piutang Tuntutan Ganti Rugi Netto	11.905.435.358,00	10.970.130.886,00
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	971.534.331,00	971.534.331,00
Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	(4.857.672,00)	-
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan Netto	966.676.659,00	971.534.331,00
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	20.501.789.384,00	39.240.912.984,00
Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	(593.443.678,00)	-
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Netto	19.908.345.706,00	39.240.912.984,00
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	100.749.956.231,00	100.518.114.851,00
Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	(592.332.844,00)	-
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Netto	100.157.623.387,00	100.518.114.851,00
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	44.114.013.599,00	46.499.582.131,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	3.674.517.300,00	3.632.571.620,00
Piutang Lainnya	731.164.994.198,00	176.698.039.421,00
Piutang Dividen/Kontribusi	485.014.572,00	505.030.866,00
Piutang Jasa Giro	-	480.390,00
Piutang Bunga Deposito	11.850.068.493,00	31.465.205.480,00
Piutang Sanksi Pajak	127.794.691.906,00	127.794.691.906,00
Piutang Denda Retribusi	4.601.240.773,00	7.335.317.989,00
Piutang Tunjangan	4.419.140.000,00	4.419.140.000,00
Piutang Tagihan Listrik dan Air	-	2.290.167.270,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	1.675.259.235,00	2.095.480.363,00
Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi	1.013.415.790,00	792.525.157,00
Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan	579.326.163.429,00	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya	(11.578.943.046,00)	(4.832.223.926,00)
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(4.260.820.891,00)	(203.535.890,00)
Penyisihan Piutang Tunjangan	(4.419.140.000,00)	(4.419.140.000,00)
Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(2.351.338,00)	(209.548.036,00)
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan	(2.896.630.817,00)	-
Piutang Lainnya Netto	719.586.051.152,00	171.865.815.495,00
Aset Lancar Lainnya	158.298.034.978,00	228.768.215.755,00
Belanja Dibayar di Muka	24.556.101.071,00	11.523.076.509,00
Asuransi Dibayar di muka	21.994.670.871,00	11.482.165.550,00
Sewa Dibayar di muka	2.561.430.200,00	40.910.959,00
Uang Muka Kerja	133.741.933.907,00	217.245.139.246,00
Uang Muka Kerja di SKPD	133.414.843.537,00	217.008.616.905,00
Uang Muka Kerja di BLUD	327.090.370,00	236.522.341,00
Persediaan	750.543.243.114,00	633.043.730.336,00
JUMLAH ASET LANCAR	17.450.490.675.026,00	14.872.136.514.127,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2015 (Audited)	31 DESEMBER 2014 (Audited)
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	409.862.523.178,00	403.394.131.382,00
Investasi dalam Dana Bergulir	897.187.591.237,00	897.187.591.237,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(487.325.068.059,00)	(493.793.459.855,00)
Investasi Permanen	22.098.228.136.608,00	15.697.899.274.250,00
Penyertaan Modal pada BUMD	2.142.266.203.893,00	2.009.706.683.105,00
Penyertaan Modal PD Dharma Jaya	70.432.916.065,00	31.290.376.574,00
Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya	1.046.058.060.401,00	996.313.841.000,00
Penyertaan Modal PD Pasar Jaya	509.599.788.856,00	546.145.326.811,00
Penyertaan Modal PD PAL Jaya	516.175.438.571,00	435.957.138.720,00
Penyertaan Modal pada PT Patungan	19.955.961.932.715,00	13.688.192.591.145,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya	1.942.067.255.754,00	1.619.697.432.096,00
Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang	49.234.489.310,00	51.784.025.304,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	161.799.741.564,00	151.413.977.298,00
Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk	222.250.087.306,00	198.713.889.941,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol	1.211.045.540.918,00	1.093.370.327.584,00
Penyertaan Modal PT Ratax Armada	-	26.323.830,00
Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara	209.692.695.000,00	209.692.695.000,00
Penyertaan Modal PT Cemani Toka	27.059.360.000,00	27.059.360.000,00
Penyertaan Modal PT Pakuan International	1.345.900.000,00	1.345.900.000,00
Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya	3.951.000.000,00	3.951.000.000,00
Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida	8.680.000.000,00	8.680.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo	4.322.661.011.016,00	2.836.036.293.236,00
Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta	5.884.333.774.627,00	4.355.118.692.024,00
Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo	484.300.436.222,00	484.908.999.744,00
Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji	51.157.222.000,00	51.157.222.000,00
Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta	3.759.293.639.511,00	1.807.668.373.052,00
Penyertaan Modal PT Transportasi Jakarta	1.481.923.171.895,00	693.537.815.322,00
Penyertaan Modal PT Penjamin Kredit Daerah	95.791.607.592,00	54.655.264.714,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	22.508.090.659.786,00	16.101.293.405.632,00
ASET TETAP	363.584.467.256.156,00	341.982.544.524.372,00
Tanah	284.068.689.312.488,00	273.519.641.092.661,00
Peralatan dan Mesin	18.986.813.894.851,00	17.190.097.083.385,00
Gedung dan Bangunan	24.169.792.568.590,00	17.384.759.492.812,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	32.306.882.017.848,00	29.731.234.210.492,00
Aset Tetap Lainnya	1.422.710.645.797,00	1.361.719.093.920,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.629.578.816.582,00	2.795.093.551.102,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(29.181.425.283.107,00)	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.720.575.513.975,00)	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9.252.509.523.776,00)	-
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(11.208.289.041.206,00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(51.204.150,00)	-
JUMLAH ASET TETAP	334.403.041.973.049,00	341.982.544.524.372,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	1.046.215.749.016,00	967.216.539.301,00
JUMLAH DANA CADANGAN	1.046.215.749.016,00	967.216.539.301,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2015 (Audited)	31 DESEMBER 2014 (Audited)
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	50.949.015.300,00	56.147.710.109,00
Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun	50.949.015.300,00	56.147.710.109,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	959.380.303,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	964.201.310,00
Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Tak Tertagih	-	(4.821.007,00)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	6.554.369.249.425,00	3.578.851.777.917,00
Bangun Guna Serah (<i>Build, Operate and Transfer</i> /BOT)	3.050.991.629.572,00	339.015.103.572,00
Bangun Serah Guna (<i>Build, Transfer and Operate</i> /BTO)	1.122.210.704.808,00	995.642.946.132,00
Kerjasama Operasi (KSO)	268.354.876.000,00	268.354.876.000,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	2.112.812.039.045,00	1.975.838.852.213,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(278.165.572.423,00)	-
Akumulasi Penyusutan Bangun guna serah (<i>Build, Operate and Transfer</i> /BOT)	(57.537.301.683,00)	-
Akumulasi Penyusutan Bangun serah guna (<i>Build, Transfer and Operate</i> /BTO)	(85.094.846.465,00)	-
Akumulasi Penyusutan Kerjasama Operasi (KSO)	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	(135.533.424.275,00)	-
Aset Tidak Berwujud	97.444.900.937,00	191.045.494.586,00
Aset Tidak Berwujud	200.362.096.132,00	-
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(102.917.195.195,00)	-
Aset Lain-Lain	40.223.272.327.802,00	47.603.405.573.354,00
Aset Rusak Berat	709.243.641.668,00	622.938.807.168,00
Aset Belum Validasi	14.517.766.519.533,00	24.664.472.715.762,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	135.809.000,00	135.809.000,00
Aset Lain-Lain BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
Kas Dikonsinyasikan	131.470.023.862,00	125.724.781.862,00
Aset Fasos dan Fasum	24.840.502.577.896,00	22.173.252.162.900,00
Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya	108.531.052,00	108.531.052,00
Aset di BP THR Lokasari	13.224.373.345,00	13.224.373.345,00
Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya	7.272.459.181,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(994.319.774.387,00)	476.784.010.855.970,00
Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum	(994.319.774.387,00)	-
JUMLAH ASET LAINNYA	45.653.550.146.654,00	51.430.409.936.269,00
JUMLAH ASET	421.061.389.203.531,00	425.353.600.919.701,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2015 (Audited)	31 DESEMBER 2014 (Audited)
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	328.601.120.662,00	302.606.765.141,00
Utang PFK di PPKD	324.469.034.806,00	272.029.383.896,00
Utang PFK di SKPD	4.132.085.856,00	30.577.381.245,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	4.268.623.603,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga	-	183.979.192,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok	-	4.084.644.411,00
Pendapatan Diterima di Muka	82.396.090.395,00	19.492.721.268,00
Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda oleh Pihak III	22.875.263.546,00	6.970.338.958,00
Pendapatan Diterima di Muka Kontribusi BOT/BTO	8.336.729.911,00	8.570.285.768,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD	1.555.283.283,00	1.838.284.042,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemda	15.283.850.000,00	2.113.812.500,00
Pendapatan Retribusi Diterima di Muka	14.203.442.632,00	-
Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	19.339.416.959,00	-
Pendapatan Pajak Diterima di Muka	802.104.064,00	-
Utang Belanja	342.052.450.888,00	239.294.214.510,00
Utang Belanja Pegawai	157.429.357.293,00	3.400.887.570,00
Utang Belanja TALI	747.924.806,00	6.494.146.647,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD	63.239.308.201,00	51.704.008.153,00
Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS	4.686.258.162,00	6.104.955.893,00
Utang Belanja BLUD	65.304.595.501,00	112.673.016.826,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	50.645.006.925,00	58.640.105.981,00
Utang Belanja Lainnya	-	277.093.440,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.819.970.609,00	11.932.100.484,00
Utang Jaminan	5.114.604.408,00	11.932.100.484,00
Utang Restitusi Pajak	705.366.201,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	758.869.632.554,00	577.594.425.006,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	169.192.675.455,00	-
Utang Proyek JEDI	169.192.675.455,00	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	28.515.109.215,00	-
Utang Jangka Panjang di BLUD	28.515.109.215,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	197.707.784.670,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN	956.577.417.224,00	577.594.425.006,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2015 (Audited)	31 DESEMBER 2014 (Audited)
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	9.160.897.609.233,00
Pendapatan Ditangguhkan	-	981.632.154.253,00
Cadangan Piutang	-	3.551.659.726.083,00
Cadangan Persediaan	-	633.043.730.336,00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang	-	(261.459.346.539,00)
Cadangan Aset Lancar Lainnya	-	228.768.215.755,00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	-	14.294.542.089.121,00
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	16.101.293.405.632,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	341.982.544.524.372,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	51.430.409.936.269,00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	-	409.514.247.866.273,00
EKUITAS DANA CADANGAN		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	967.216.539.301,00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	-	967.216.539.301,00
JUMLAH EKUITAS	420.104.811.786.307,00	424.776.006.494.695,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	421.061.389.203.531,00	425.353.600.919.701,00

Jakarta, 30 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Basuki T. Purnama



LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2015 AUDITED

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2016**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

URAIAN	Catatan	31 Desember 2015 Audited (Rp)	31 Desember 2014 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.a	29.076.926.598.506,00	27.050.949.023.586,00
Penerimaan Retribusi daerah	5.6.1.1.b	459.459.498.063,00	515.162.936.406,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.c	527.280.486.037,00	465.979.962.538,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.6.1.1.d	3.530.447.056.431,00	3.226.559.653.992,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1.e	5.751.741.852.400,00	9.279.068.989.723,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.1.1.f	135.525.792.297,00	312.478.953.549,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1.g	0,00	85.985.282.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.1.1.h	2.755.110.753.389,00	2.482.936.697.000,00
Penerimaan Hibah	5.6.1.1.i	10.589.130.000,00	10.133.196.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		42.247.081.167.123,00	43.429.254.694.794,00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.a	17.312.344.016.739,00	12.604.588.791.793,00
Pembayaran Barang	5.6.1.2.b	10.584.935.805.485,00	12.582.041.265.502,00
Pembayaran Bunga	5.6.1.2.c	5.478.639.527,00	1.218.528.851,00
Pembayaran Subsidi	5.6.1.2.d	659.081.781.344,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.6.1.2.e	1.717.428.915.536,00	1.462.044.387.771,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.f	2.087.123.200.000,00	680.155.340.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.g	371.152.504.510,00	14.005.706.784,00
Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.h	877.074.802,00	2.136.402.124,00
Jumlah Arus Kas Keluar		32.738.421.937.943,00	27.346.190.422.825,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		9.508.659.229.180,00	16.083.064.271.969,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk :	5.6.2.1		
Penjualan atas Tanah		78.888.677.000,00	210.000.000,00
Penjualan atas Brandgang		0,00	3.550.000.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		7.617.870.887,00	11.642.922.097,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		5.556.628.784,00	161.387.100,00
Jumlah Arus Kas Masuk		92.063.176.671,00	15.564.309.197,00
Arus Kas Keluar :	5.6.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.2.2.a	78.999.209.715,00	73.101.911.062,00
Perolehan Tanah		3.451.775.763.772,00	1.754.586.883.131,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		2.002.190.574.946,00	4.062.228.522.758,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		2.063.978.323.661,00	2.589.956.270.028,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.685.243.694.385,00	1.599.630.901.228,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		40.828.352.444,00	404.715.813.104,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.6.2.2.c	3.501.000.000.000,00	4.033.500.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.6.2.2.d	0,00	4.819.060.710,00
Jumlah Arus Kas Keluar		13.824.015.918.923,00	14.522.539.362.021,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		(13.731.952.742.252,00)	(14.506.975.052.824,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk :			
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2014)	5.6.3.1	374.971.318.364,00	456.708.189.369,00
Jumlah Arus Kas Masuk		374.971.318.364,00	456.708.189.369,00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.3.2.a	4.084.644.411,00	8.169.288.822,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2015)	5.6.3.2.b	813.781.599.291,00	374.971.318.364,00
Jumlah Arus Kas Keluar		817.866.243.702,00	383.140.607.186,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		(442.894.925.338,00)	73.567.582.183,00

URAIAN	Catatan	31 Desember 2015 Audited (Rp)	31 Desember 2014 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Uang Jaminan	5.6.4.1	74,679,500.00	967,244,261.00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran	5.6.4.2	399,754,105.00	459,869,244.00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.3	368,891,709,589.00	2,195,517,949,604.00
Jumlah Arus Kas Masuk		369,366,143,194.00	2,196,945,063,109.00
Arus Kas Keluar :			
Hasil Eksekusi atas Jaminan		6,892,175,576.00	0.00
Penyetoran Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran ke Kas Daerah		399,754,105.00	459,869,244.00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.3	316,452,058,679.00	2,081,441,143,565.00
Jumlah Arus Kas Keluar		323,743,988,360.00	2,081,901,012,809.00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		45,622,154,834.00	115,044,050,300.00
KOREKSI SILPA		0.00	(1,017,097,563.00)
KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK		(1,675,259,235.00)	0.00
Kenaikan (Penurunan) Kas	5.6.5	(4,622,241,542,811.00)	1,763,683,754,065.00
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		9,069,887,775,249.00	7,306,204,021,184.00
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah		4,447,646,232,438.00	9,069,887,775,249.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0.00	23,308,500.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		816,807,645,256.00	404,746,053,001.00
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD		1,017,491,155,074.00	984,007,705,203.00
Saldo Akhir Kas		6,281,945,032,768.00	10,458,664,841,953.00

Jakarta, 30 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.



Basuki T. Purnama



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 AUDITED

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2016**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Lampiran.....	vii
Daftar Grafik.....	viii
 BAB I Pendahuluan.....	 I - 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	I - 4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	I - 7
 BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian	
Target Kinerja APBD.....	II - 1
2.1 Ekonomi Makro.....	II - 1
2.2 Kebijakan Keuangan.....	II - 20
 BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	 III - 1
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	III - 1
 BAB IV Kebijakan Akuntansi.....	 IV - 1
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	IV - 4
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	IV - 5
4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.....	IV - 5
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	IV - 52
 BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI	 V - 1
Jakarta	
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	V - 1
5.1.1 Pendapatan Daerah.....	V - 1
5.1.2 Belanja Daerah.....	V - 97
5.1.4 Pembiayaan Daerah	V - 167

5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	V	-	177
5.3	Laporan Operasional.....	V	-	178
5.3.1	Kegiatan Operasional.....	V	-	178
5.3.1 1	Kegiatan Non Operasional.....	V	-	213
5.3.1 1	Pos Luar Biasa.....	V	-	217
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas.....	V	-	218
5.5	Neraca	V	-	223
5.5.1	Aset.....	V	-	223
5.5.2	Kewajiban.....	V	-	380
5.5.3	Ekuitas.....	V	-	397
5.6	Laporan Arus Kas.....	V	-	399
5.6.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	V	-	399
5.6.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi.....	V	-	407
5.6.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.....	V	-	410
5.6.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris.....	V	-	412
5.6.5	Kenaikan (Penurunan) Kas.....	V	-	413
BAB VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan	VI	-	1
BAB VII	Penutup.....	VII	-	1

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
1.	Tabel 2.1	Ekspor Produk-produk DKI Jakarta menurut Negara Tujuan	II - 4
2.	Tabel 2.2	Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut Golongan Barang HS 2 Diji	II - 5
3.	Tabel 2.3	Nilai Impor Melalui DKI Jakarta menurut Golongan Barang HS 2 Diji	II - 8
4.	Tabel 2.4	Impor Melalui DKI Jakarta menurut Negara	II - 8
5.	Tabel 2.5	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	II - 14
6.	Tabel 2.6	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	II - 15
7.	Tabel 2.7	Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)	II - 15
8.	Tabel 2.8	PDRB – Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)	II - 18
9.	Tabel 2.9	PDRB – Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	II - 19
10.	Tabel 3.1	Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015	III - 5
11.	Tabel 5.1	Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2014	V - 2
12.	Tabel 5.2	Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014	V - 3
13.	Tabel 5.3	Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014	V - 31
14.	Tabel 5.4	Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2015	V - 32
15.	Tabel 5.5	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2015	V - 45
16.	Tabel 5.6	Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2015	V - 59
17.	Tabel 5.7	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2015	V - 64
18.	Tabel 5.8	Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2015	V - 65
19.	Tabel 5.9	Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2015	V - 66

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
20.	Tabel 5.10	Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2015	V - 67
21.	Tabel 5.11	Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2015	V - 69
22.	Tabel 5.12	Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015	V - 77
22.	Tabel 5.13	Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2015	V - 83
23.	Tabel 5.14	Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2015	V - 85
24.	Tabel 5.15	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014	V - 91
25.	Tabel 5.16	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	V - 98
26.	Tabel 5.17	Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2015	V - 131
27.	Tabel 5.18	Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014	V - 173
28.	Tabel 5.19	Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah Tahun Anggaran 2015	V - 180
29.	Tabel 5.20	Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2015	V - 180
30.	Tabel 5.21	Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah -LO Tahun Anggaran 2015	V - 181
31.	Tabel 5.22	Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2015	V - 187
32.	Tabel 5.23	Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO (Dividen) Tahun Anggaran 2015	V - 190
33.	Tabel 5.24	Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Tahun Anggaran 2015	V - 192
34.	Tabel 5.25	Rekapitulasi Beban Operasi Tahun Anggaran 2015	V - 206
35.	Tabel 5.26	Kas di Bank Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 224
36.	Tabel 5.27	Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2015	V - 248
37.	Tabel 5.28	Saldo Piutang BLUD Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 248
38.	Tabel 5.29	Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 250

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
39.	Tabel 5.30	Piutang BLUD RSUD dan RSKD Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 251
40.	Tabel 5.31	Perhitungan Akrua! Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2015	V - 260
41.	Tabel 5.32	Perhitungan Piutang Bunga Deposito Per 31 Desember 2015	V - 262
42.	Tabel 5.33	Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2014	V - 279
43.	Tabel 5.34	Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2015	V - 281
44.	Tabel 5.35	Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK BPMPKB Per 31 Desember 2015	V - 282
45.	Tabel 5.36	Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2015	V - 284
46.	Tabel 5.37	Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	V - 286
47.	Tabel 5.38	Penyertaan Modal dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 310
48.	Tabel 5.39	Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2015	V - 352
49.	Tabel 5.40	Aset Lainnya Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 353
50.	Tabel 5.41	Aset Lain-lain Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 364
51.	Tabel 5.42	Kewajiban Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 380
52.	Tabel 5.43	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 380
53.	Tabel 5.44	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di PPKD Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	V - 381
54.	Tabel 5.45	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di SKPD Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 382
55.	Tabel 5.46	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di SKPD Tiga Terbesar Per 31 Desember 2015	V - 383
56.	Tabel 5.47	Rincian Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 385

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
57.	Tabel 5.48	Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS) Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 390
58.	Tabel 5.49	Rincian Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2015	V - 391
59.	Tabel 5.50	Utang Belanja BLUD Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 392
60.	Tabel 5.51	Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 394
61.	Tabel 5.52	Rincian Utang Jangka Panjang di RSUD Cengkareng Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 396
62.	Tabel 5.53	Rincian Utang Jangka Panjang di RSUD Pasar Rebo Per 31 Desember 2015 dan 2014	V - 439
63.	Tabel 5.54	Arus Kas Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	V - 400
64.	Tabel 5.55	Arus Kas Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	V - 408
65.	Tabel 5.56	Arus Kas Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014	V - 411
66.	Tabel 5.57	Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2015	V - 413
67.	Tabel 6.1	Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2015	VI - 28
68.	Tabel 6.2	Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015	VI - 32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015
Lampiran	2	Daftar Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2015
Lampiran	3	Rekapitulasi Daftar Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2015
Lampiran	4	Daftar Piutang Kerjasama atas Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015
Lampiran	5	Daftar <i>Stock Opname</i> Persediaan di SKPD per 31 Desember 2015
Lampiran	6	Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015
Lampiran	7	Daftar Mutasi Aset Tetap Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015
Lampiran	8	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015
Lampiran	9	Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT, BTO dan KSO Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015
Lampiran	10	Daftar Utang PFK di SKPD per 31 Desember 2015
Lampiran	11	Pendapatan Diterima di muka atas Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Sewa per 31 Desember 2015
Lampiran	12	Pendapatan Diterima di muka atas Kontribusi BOT/ BTO per 31 Desember 2015
Lampiran	13	Pendapatan Diterima di muka atas Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemda Per 31 Desember 2015
Lampiran	14	Daftar Utang Pegawai dan Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD per 31 Desember 2015
Lampiran	15	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah-Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas
Lampiran	16	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah-Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi)
Lampiran	17	Daftar Rekapitulasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Per 31 Desember 2015
Lampiran	18	Daftar Sertifikat Hak Pengelola Lahan yang beratasnama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

DAFTAR GRAFIK

No.	Grafik	Keterangan	Halaman
1.	Grafik 2.1	Ekspor Melalui DKI Jakarta Tahun 2015	II - 2
2.	Grafik 2.2	Ekspor Produk DKI Jakarta Tahun 2015	II - 3
3.	Grafik 2.3	Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta Bulan Januari-Desember 2013, 2014 dan 2015	II - 6
4.	Grafik 2.4	Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2015	II - 7
5.	Grafik 2.5	Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2009-2015	II - 7
6.	Grafik 2.6	Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari-Desember 2014 dan Januari-Desember 2015	II - 9
7.	Grafik 2.7	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke DKI Jakarta Tahun 2015	II - 10
8.	Grafik 2.8	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke DKI Jakarta Tahun 2009-2015	II - 10
9.	Grafik 2.9	Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2009-2015	II - 11
10.	Grafik 2.10	Inflasi DKI Jakarta dan Nasional	II - 13
11.	Grafik 2.11	PDRB - Harga Berlaku	II - 13
12.	Grafik 2.12	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	II - 16
13.	Grafik 2.13	PDRB – Harga Konstan	II - 17
14.	Grafik 2.14	PDRB Per Kapita atas dasar Harga Konstan 2010	II - 19



BAB I

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2015 AUDITED**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi

penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 adalah berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama Tahun Anggaran 2015 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun

jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2015.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010);
 23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 25. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
27. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
29. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;
30. Peraturan Gubernur Nomor 1745 Tahun 2015 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015.



BAB II

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2015 AUDITED**

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah.

Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah:

1. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan simulasi pada komponen pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah) dengan menggunakan model Statistika. Dalam simulasi tersebut, variabel-variabel penjelas/penentu (*exogeneous*) yang diperkirakan mempengaruhi besaran pendapatan daerah dimasukkan ke dalam model untuk memperkirakan masing-masing komponen pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan daerah dengan menggunakan persamaan simultan.
2. Adanya stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang lebih baik, sehingga kondisi ini diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta.

Dari asumsi tersebut diatas dapat digambarkan kondisi ekonomi Jakarta tahun 2015 sebagai berikut:

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Ekpor Melalui DKI Jakarta

Nilai ekspor melalui DKI Jakarta periode Januari-Desember 2015 mencapai 46.347,11 juta US \$ atau lebih rendah 3,60 persen dari periode yang sama tahun 2014 yakni sebesar 48.079,48 juta US \$.

Sepanjang periode 2015 tercatat nilai ekspor melalui DKI Jakarta tertinggi terjadi pada bulan Juni (4.216,67 juta US \$) dan terendah terjadi di bulan Juli (3.297,64 juta US \$). Menurunnya nilai ekspor melalui DKI Jakarta ini disebabkan belum pulihnya kondisi perekonomian global. Nilai ekspor melalui DKI Jakarta bulan Juli 2015 mencapai 3.297,21 juta dollar Amerika, turun 21,81 persen dari nilai ekspor bulan Juni 2015 yang mencapai 4.216,67 juta dollar Amerika, dan juga lebih rendah 10,80 persen dibandingkan Juli 2014. Hal ini sejalan dengan ekspor nasional yang juga mengalami penurunan pada bulan Juli 2015 sebesar 15,53 persen dibandingkan bulan Juni 2015, dan juga lebih rendah 19,23 persen dibandingkan Juli 2014.

Grafik 2.1

Ekspor Melalui DKI Jakarta 2015 (Juta US\$)



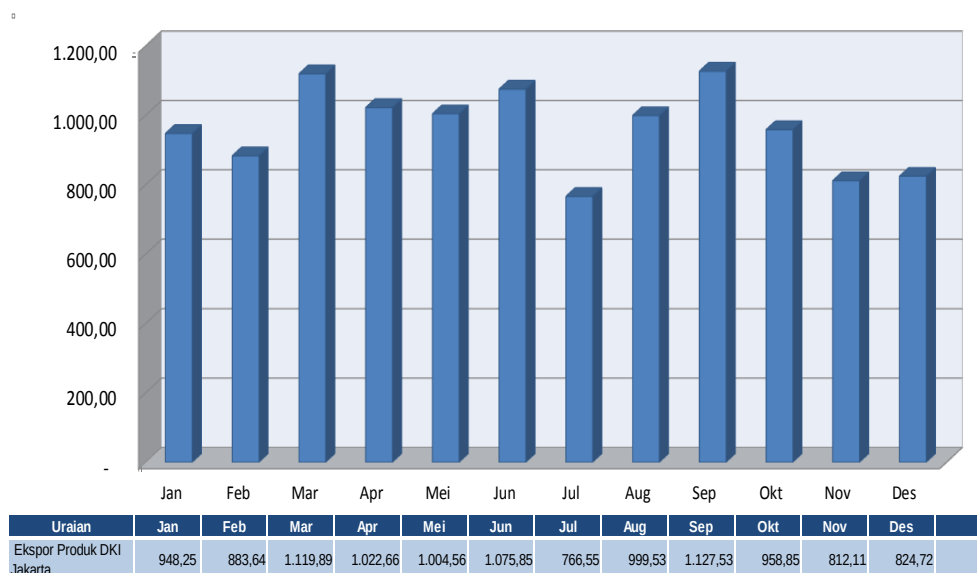
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

2) Ekspor Produk DKI Jakarta

Nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta pada tahun 2015 mencapai 11.544,14 juta US \$, lebih rendah 0,02 persen bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2014. Pada tahun 2014 nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta sebesar 11.546,19 juta US \$.

Ekspor ini mempunyai pengaruh langsung terhadap perekonomian Jakarta karena dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Persentase ekspor produk DKI Jakarta terbesar pada tahun 2015 dicapai pada bulan September yaitu sebesar 1.127,53 juta US \$, atau naik sebesar 12,81 persen dibandingkan bulan Agustus 2015. Komoditas yang paling banyak diekspor pada bulan ini adalah golongan barang kendaraan dan bagiannya, perhiasan dan permata. Kedua jenis barang ini berkontribusi sebesar 43,65 persen terhadap total ekspor produk DKI Jakarta. Dan terendah pada bulan Juli yaitu sebesar 766,55 juta US \$. Produk kendaraan dan bagiannya merupakan produk unggulan bagi DKI Jakarta. Secara grafis ekspor produk DKI Jakarta dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut.

Grafik 2.2
Ekspor Produk DKI Jakarta 2015 (Juta US\$)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

Adapun ekspor produk – produk DKI Jakarta menurut negara tujuan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Ekspor Produk-produk DKI Jakarta menurut Negara Tujuan

NEGARA TUJUAN		NILAI CIF (JUTA US\$)
ASEAN		4.498,54
1	Singapore	1.726,22
2	Philippines	900,78
3	Thailand	695,68
4	Malaysia	654,65
5	Vietnam	413,65
	Asean Lainnya	107,56
ASIA		4.170,97
6	Saudi Arabia	949,18
7	China	580,68
8	India	542,57
9	Japan	469,50
10	Hongkong	404,78
	Asia Lainnya	1.224,26
Australia dan Oceania		310,29
11	Australia	254,23
	Australia dan Oceania lainnya	56,06
Amerika		1.412,30
12	United States	1.011,23
	Amerika Lainnya	401,07
Total 12 Negara		8.603,15
Lainnya		2.941,00
Total		11.544,15

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

Sedangkan nilai ekspor produk DKI Jakarta menurut golongan barang dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

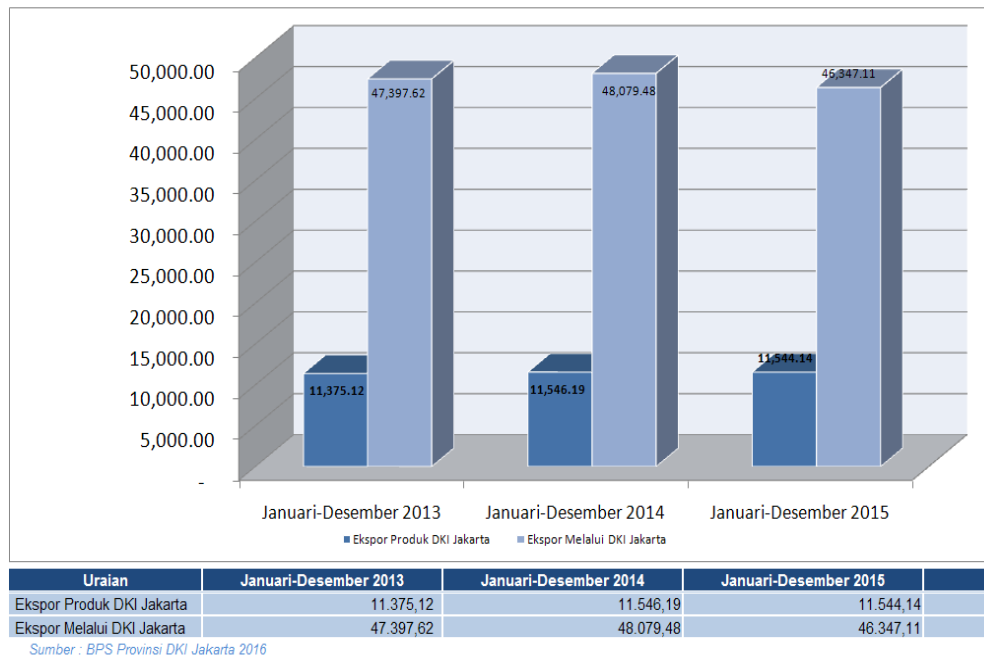
Tabel 2.2
Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut Golongan Barang HS 2 Diji

GOLONGAN BARANG		NILAI CIF (JUTA US\$)
1	Kendaraan dan Bagiannya	3.179,15
2	Perhiasan/Permata	1.860,28
3	Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik	891,82
4	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	638,30
5	Ikan dan Udang	618,35
6	Mesin/Peralatan Listrik	560,43
7	Barang-barang Rajutan	411,75
8	Tembaga	247,58
9	Plastik dan Barang dari Plastik	244,01
10	Lemak & Minyak Hewan/Nabati	225,74
Total 10 Komoditi		8.877,41
Lainnya		2.666,74
Total Ekspor Produk DKI Jakarta		11.544,15

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

Sementara itu jika dilihat dari negara tujuan, diketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir Singapura menjadi negara tujuan utama ekspor produk DKI Jakarta, begitu pula pada tahun 2014. Sementara bila ditinjau menurut komoditi, ekspor produk DKI Jakarta yang terbesar selama periode Januari – Desember 2015 adalah kendaraan dan bagiannya.

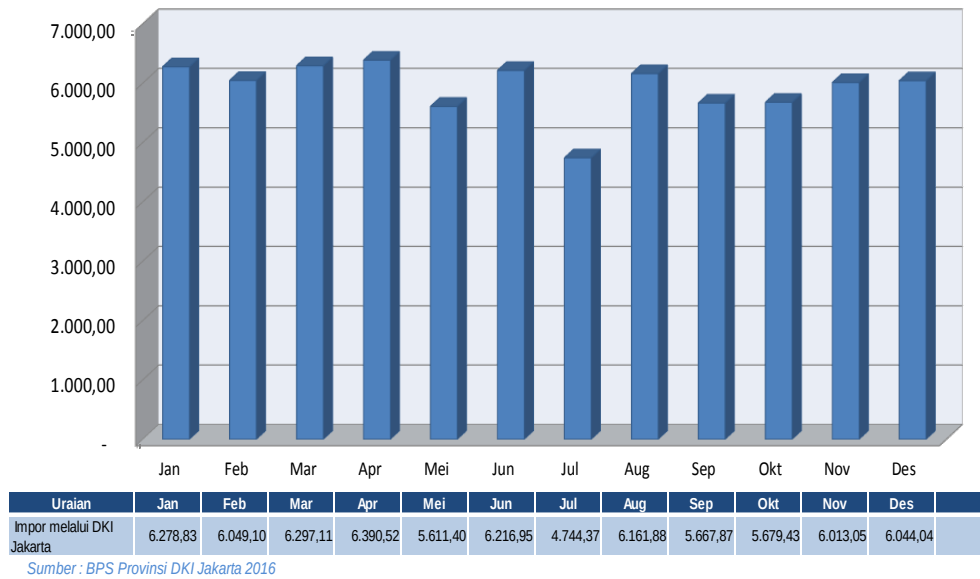
Grafik 2.3
Nilai Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta
Bulan Januari-Desember 2013, 2014 dan 2015



3) Impor

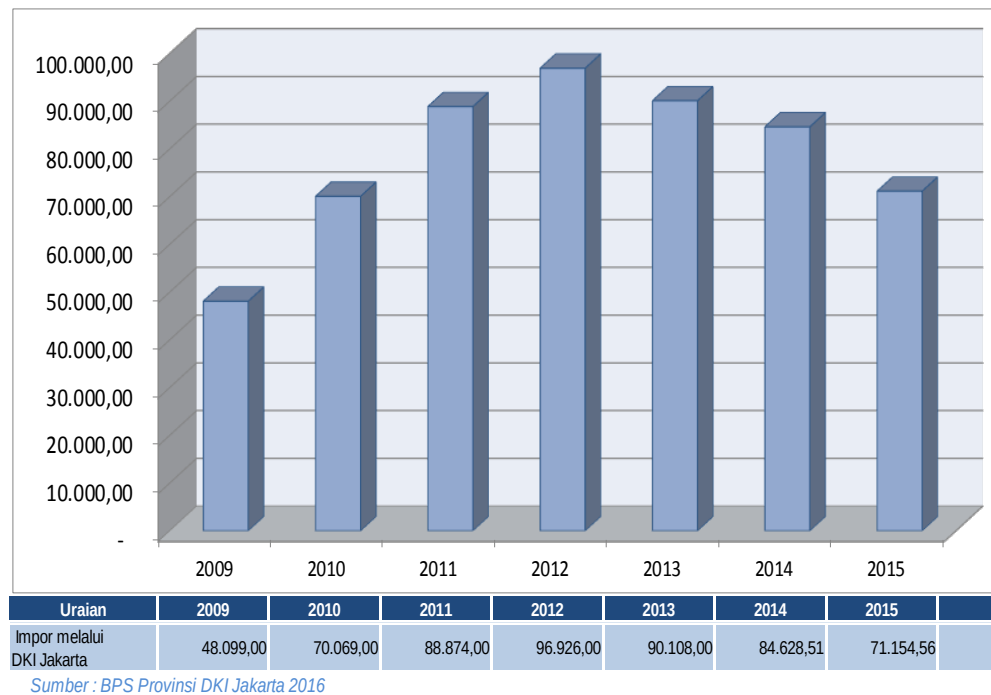
Nilai impor melalui DKI Jakarta periode Januari-Desember 2015 mencapai 71.154,56 juta US \$ atau lebih rendah 15,92 persen dari periode yang sama tahun 2014 yakni sebesar 84.628,51 juta US \$. Sepanjang periode 2015 tercatat nilai impor melalui DKI Jakarta tertinggi terjadi pada bulan April (6.390,52 juta US \$) dan terendah terjadi di bulan Juli (4.744,37 juta US \$). Berdasarkan golongan penggunaan barang atau Broad Economic Category, nilai impor Januari-Desember 2015 untuk seluruh golongan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Januari-Desember 2014. Golongan penggunaan barang konsumsi mengalami penurunan 13,64 persen, penggunaan barang bahan baku dan penolong mengalami penurunan 14,08 persen dan penggunaan barang modal mengalami penurunan 21,48 persen.

Grafik 2.4
Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2015 (Juta US\$)



Adapun impor yang dilakukan melalui DKI Jakarta dapat dilihat pada Grafik 2.5 berikut.

Grafik 2.5
Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2009 – 2015 (Juta US\$)



Sedangkan nilai impor melalui DKI Jakarta menurut golongan barang dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Nilai Impor Melalui DKI Jakarta menurut Golongan Barang HS 2 Dijiit

GOLONGAN BARANG		NILAI CIF (JUTA US\$)
1	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	13.169,04
2	Mesin/Peralatan Listrik	11.090,61
3	Kendaraan dan Bagiannya	4.682,01
4	Plastik dan Barang dari Plastik	4.444,29
5	Besi dan Baja	3.578,94
6	Bahan Bakar Mineral	2.409,41
7	Bahan Kimia Organik	2.002,22
8	Perangkat Optik	1.567,84
9	Kapas	1.472,93
10	Benda-benda dari Besi dan Baja	1.339,32
Total 10 Komoditi		45.756,61
Lainnya		25.397,95
Total Impor Melalui DKI Jakarta		71.154,56

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

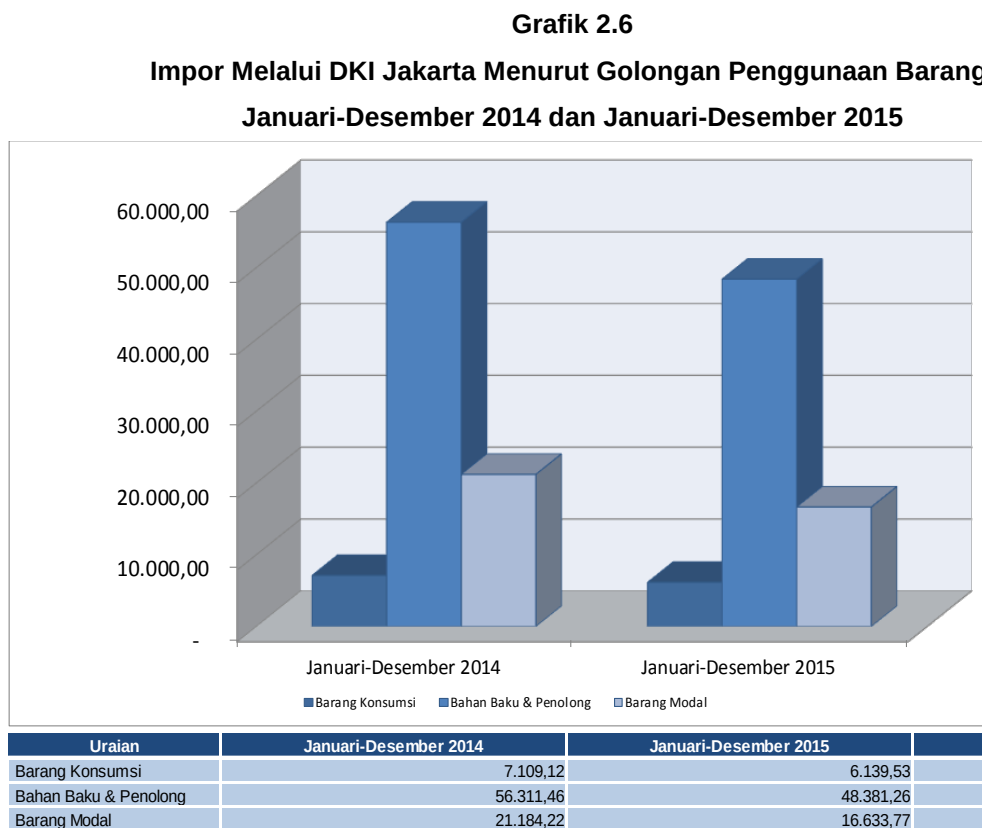
Selanjutnya impor melalui DKI Jakarta menurut negara dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4
Impor Melalui DKI Jakarta menurut Negara

NEGARA ASAL		NILAI CIF (JUTA US\$)
ASEAN		17.254,99
1	Singapore	5.216,71
2	Thailand	5.717,84
3	Malaysia	2.707,20
4	Vietnam	2.314,30
Asean Lainnya		1.298,94
ASIA		38.381,74
5	China	17.063,49
6	Japan	10.540,44
7	Korea, Republic Of	5.005,14
8	Taiwan, Province Of China	2.107,39
9	Hongkong	1.352,45
Asia Lainnya		2.312,83
AUSTRALIA dan OCEANIA		2.292,97
10	Australia	1.855,24
Australia dan Oceania Lainnya		437,73
AMERIKA		5.706,10
11	United States	4.115,88
Amerika Lainnya		1.590,22
EROPA		7.619,66
12	Germany	2.180,35
Eropa Lainnya		5.439,31
Total 12 Negara		60.176,43
Lainnya		10.978,13
Total		71.154,56

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

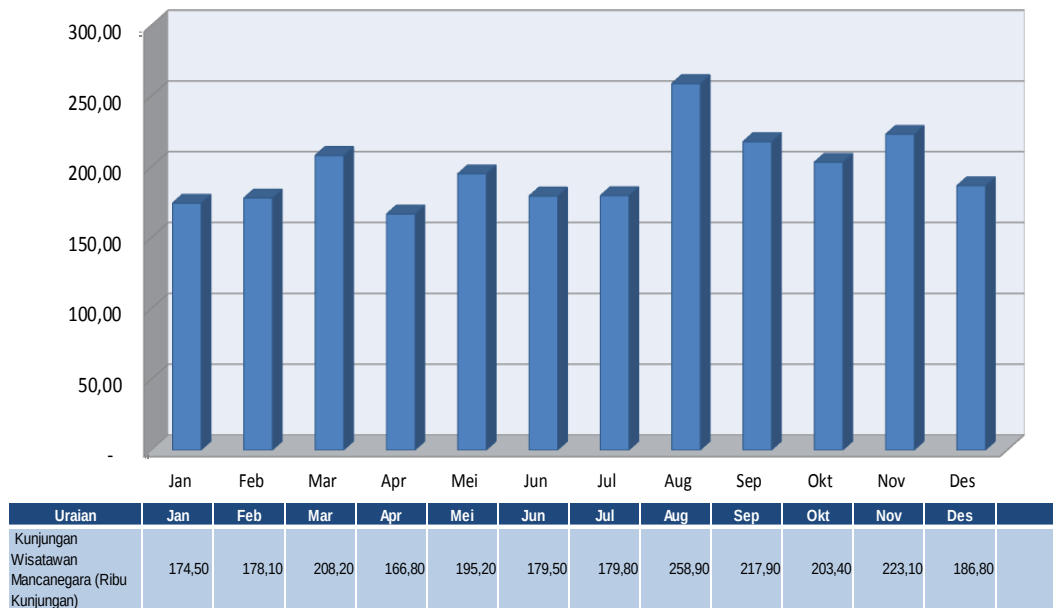
Selanjutnya Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan Barang dapat dilihat pada Grafik 2.6 berikut.



Selain ekspor dan impor, potensi daerah juga dapat dilihat dari gambaran tingkat pariwisata. Sebagai kota tujuan wisata, DKI Jakarta memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti hotel, tempat pembelanjaan dan objek wisata yang beragam. Disamping itu *event-event* nasional-internasional seperti konferensi dan pameran turut mendorong tingginya wisman yang datang ke DKI Jakarta.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke DKI Jakarta pada tahun 2015 meningkat sebesar 2,16 persen yaitu sebesar 2,37 juta kunjungan jika dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 2,32 juta kunjungan. Secara grafis kunjungan wisatawan mancanegara dapat dilihat pada Grafik 2.7 berikut.

Grafik 2.7
Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung
ke DKI Jakarta Tahun 2015 (Juta Kunjungan)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

Adapun jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DKI Jakarta dapat dilihat pada Grafik 2.8 berikut.

Grafik 2.8
Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung
ke DKI Jakarta Tahun 2009 - 2015 (Juta Kunjungan)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

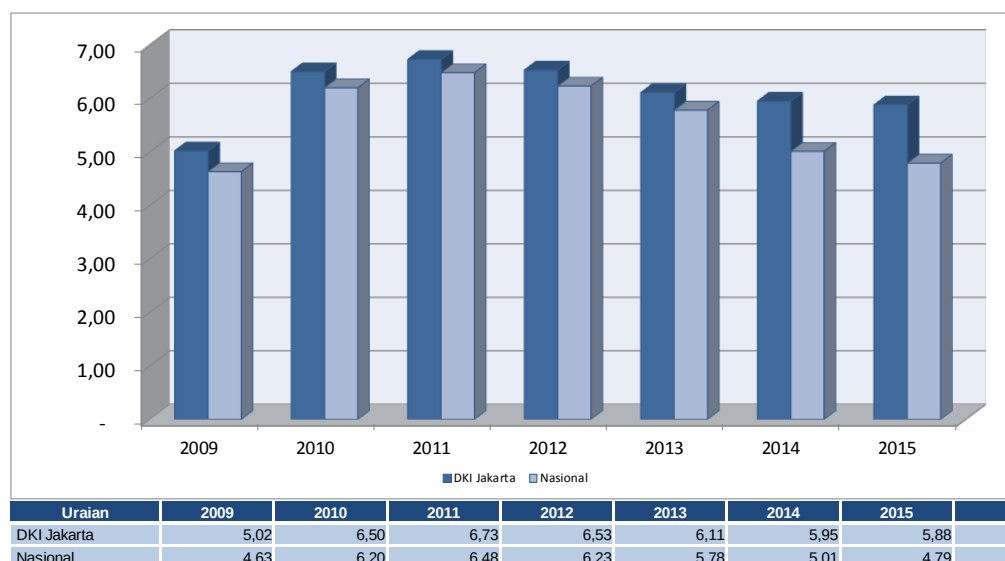
b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DKI Jakarta tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (tahun dasar 2010) mencapai Rp 1.983,42 triliun dan PDRB perkapita per tahun mencapai Rp 194,87 juta. Ekonomi DKI Jakarta tahun 2015 tumbuh sebesar 5,88 persen, melambat dibanding tahun 2014 sebesar 5,95 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa-jasa merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,29 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 14,71 persen dan Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan sebesar 13,90 persen.

Struktur perekonomian DKI Jakarta menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan (36,27 persen); Perdagangan, Hotel dan Restoran (21,99 persen); Industri Pengolahan (13,84 persen) dan Konstruksi (13,16 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2015, Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,47 persen; diikuti Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 1,22 persen; dan Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 0,72 persen.

Grafik 2.9

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional 2009-2015 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

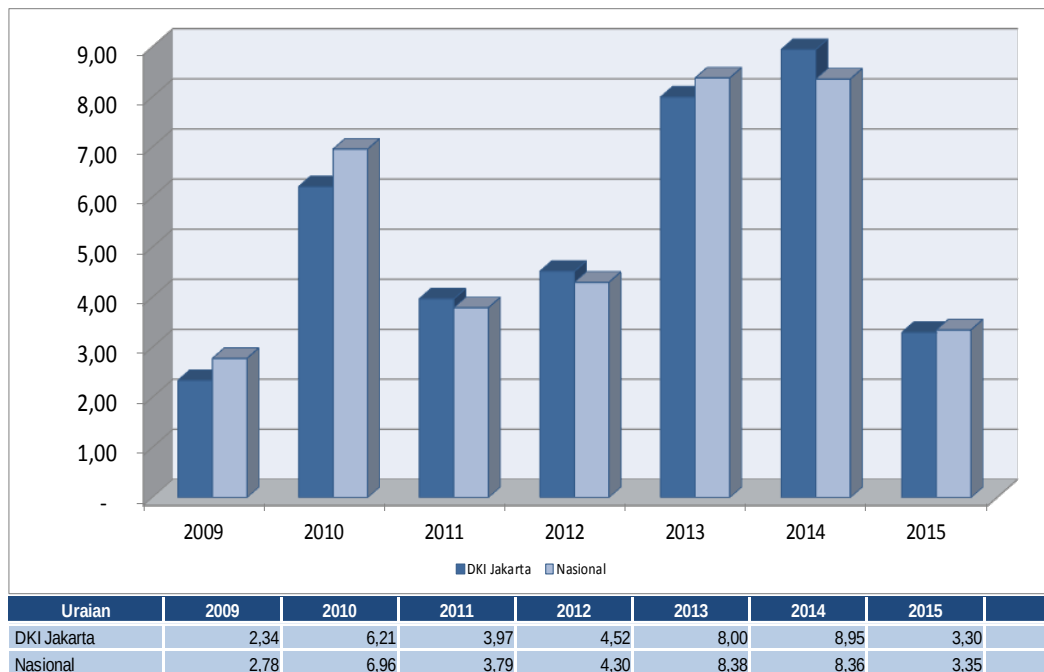
c. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2015 adalah sebesar 3,35 persen, lebih rendah dari inflasi tahun 2014 yaitu 8,95 persen. Serta berada dalam kisaran sasaran inflasi 2015 yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar empat plus minus satu persen (yoy).

Pencapaian sasaran inflasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pengendalian inflasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, melalui Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Melalui peningkatan produksi dan memperbaiki distribusi serta meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan. Dan didukung oleh reformasi subsidi berupa penyesuaian harga bahan bakar minyak dan LPG 12 kilogram serta penyesuaian tarif listrik, di tengah menurunnya harga minyak dan gas global. Selain itu, inflasi DKI Jakarta tahun 2015 ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,35 persen. Yang didorong oleh lebih rendahnya harga komoditas kelompok administered prices, terutama untuk komoditas yang terkait dengan energi, seperti bensin, solar, dan bahan bakar rumah tangga. Perkembangan ini juga berdampak pada turunnya tarif dalam subkelompok transportasi, terutama pada angkutan udara dan angkutan antarkota. Relatif lebih rendahnya inflasi 2015 dari 2014 juga didorong oleh aktivitas perekonomian Jakarta yang juga lebih rendah dari tahun sebelumnya yang disebabkan terbatasnya tekanan inflasi dari sisi permintaan masyarakat.

Grafik 2.10
Inflasi DKI Jakarta dan Nasional (%)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

d. Struktur Ekonomi

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 mencapai Rp 1.983,42 triliun, sedangkan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.761,41 triliun yang berarti terjadi peningkatan sebesar Rp 222,01 triliun atau sebesar 12,60%.

Grafik 2.11
PDRB - Harga Berlaku (Triliun Rp)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

*) Atas Tahun Dasar 2010

2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) tercermin dari struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha). Sekitar 72,31 persen PDRB Jakarta berasal dari sektor tersier (perdagangan, keuangan, jasa, dan pengangkutan), sebesar 27,34 persen berasal dari sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi, dan listrik-gas-air bersih) dan hanya sebesar 0,35 persen dari sektor primer (pertanian dan pertambangan).

Tabel 2.5

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun						Struktur (%)
	2010	2011	2012	2013*)	2014*)	2015*)	2015*)
Pertanian	847	919	968	1.618	1.711	1.867	0,09%
Pertambangan dan Penggalian	3.701	4.934	5.182	4.288	4.541	5.033	0,25%
Industri Pengolahan	135.615	153.621	172.335	209.779	239.597	274.492	13,84%
Listrik Gas dan Air Bersih	8.880	95.884	10.234	5.749	6.285	6.775	0,34%
Konstruksi	98.425	112.056	126.274	210.651	234.184	261.074	13,16%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	178.357	204.474	224.043	340.870	397.029	436.202	21,99%
Pengangkutan dan Komunikasi	87.688	101.102	114.229	160.071	183.233	206.909	10,43%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	239.222	271.632	305.618	367.616	413.594	719.345	36,27%
Jasa-jasa	109.254	124.211	140.811	246.396	281.233	71.724	3,62%
Produk Domestik Regional Bruto	861.992,09	982.533,60	1.103.692,66	1.547.037,80	1.761.407,10	1.983.420,53	100,00%
PDRB Tanpa Migas	858.290,96	977.599,23	1.098.510,57	1.542.749,80	1.756.866,10	1.978.387,80	99,75%

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

*) Atas Tahun Dasar 2010

3) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku

Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama tahun 2015 terbesar ada pada komponen konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 65,74 persen, meningkat bila dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 60,72 persen. Kontribusi terbesar kedua ada pada investasi yakni komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 45,90 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 41,16 persen. Sedangkan kontribusi terkecil ada pada

komponen perubahan inventori yang hanya 0,32 persen selama tahun 2015.

Tabel 2.6
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Pengeluaran	Tahun					
	2010	2011	2012	2013*)	2014*)	2015*)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	488.283,47	560.065,23	627.777,28	943.845,00	1.069.514,00	1.157.939,53
Pengeluaran Konsumsi LNPRT				26.805,00	35.404,00	35.719,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	80.888,21	97.222,26	106.134,94	211.845,00	220.735,00	240.119,62
Pembentukan Modal Tetap Bruto	309.491,06	375.731,85	426.812,14	683.499,00	725.064,00	808.551,79
Perubahan Inventori				3.685,00	3.489,00	5.556,04
Ekspor Barang dan Jasa	452.123,46	540.935,50	620.131,70	272.126,00	298.308,00	329.760,73
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	468.794,11	591.421,24	677.163,40	964.203,00	1.164.992,00	951.755,60
Net Ekspor Antar Daerah				369.436,00	573.885,00	357.529,42
Produk Domestik Regional Bruto	861.992,10	982.533,60	1.103.692,66	1.547.038,00	1.761.407,00	1.983.420,53

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

*) Atas Tahun Dasar 2010

Tabel 2.7
Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)

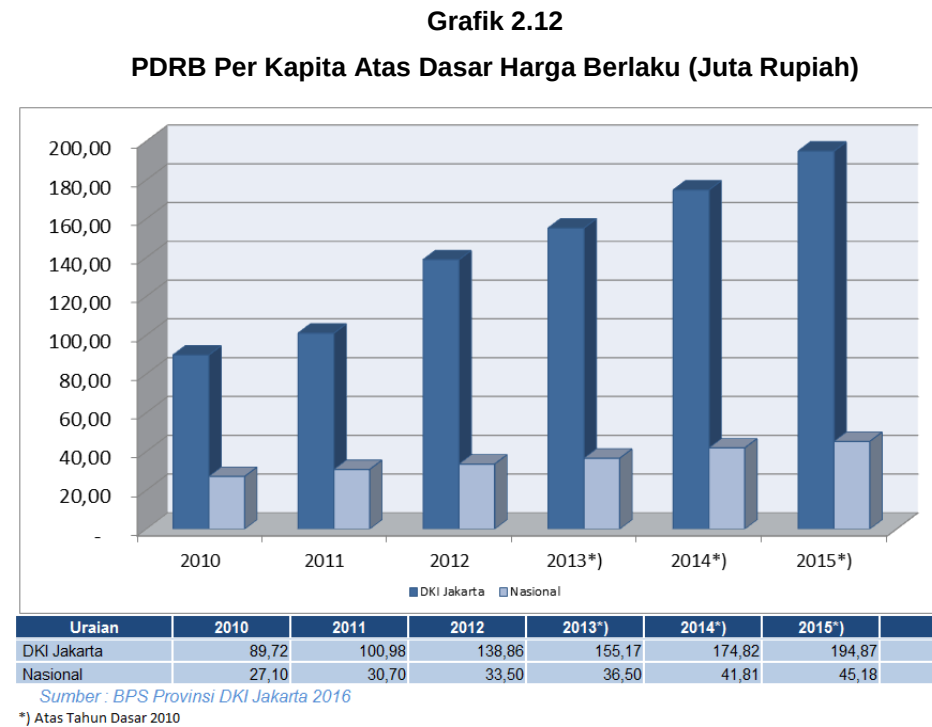
Pengeluaran	Tahun					
	2010	2011	2012	2013*)	2014*)	2015*)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56,65%	57,00%	56,88%	61,01%	60,72%	58,38%
Pengeluaran Konsumsi LNPRT				1,73%	2,01%	1,80%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,38%	9,90%	9,62%	13,69%	12,53%	12,11%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	35,90%	38,24%	38,67%	44,18%	41,16%	40,77%
Perubahan Inventori				0,24%	0,20%	0,28%
Ekspor Barang dan Jasa	52,45%	55,06%	56,19%	17,59%	16,94%	16,63%
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	54,38%	60,19%	61,35%	62,33%	66,14%	47,99%
Net Ekspor Antar Daerah				23,88%	32,58%	18,02%
Produk Domestik Regional Bruto	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

*) Atas Tahun Dasar 2010

4) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 mencapai 194,87 juta rupiah atau meningkat 11,47 persen dibanding tahun 2014 (174,82 juta rupiah).



5) PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Besaran PDRB DKI Jakarta tahun 2015 atas dasar harga konstan mencapai Rp 1.454,10 triliun naik 79,75 triliun rupiah dibandingkan tahun 2014 (sebesar 1.374,35 triliun rupiah), sehingga secara total pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 5,80 % sedikit lebih lambat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5,95 %.

Grafik 2.13
PDRB – Harga Konstan (Triliun Rp)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

Tahun 2009-2012 menggunakan Tahun Dasar 2000

**) Tahun 2013-2015 menggunakan Tahun Dasar 2010*

6) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

Sumbangan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 13,31 persen diberikan oleh sektor keuangan-real estate-jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 54,83 persen sepanjang tahun 2015. Sumbangan pertumbuhan kedua terbesar diberikan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 1,22 persen dengan laju pertumbuhan 9,81 persen. Sedangkan untuk sektor-sektor yang kontribusinya terhadap PDRB dibawah 1 persen seperti, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Sedangkan sektor pertanian, sektor pertambangan-penggalan dan sektor listrik-gas-air bersih menyumbang pertumbuhan sangat kecil yakni kurang dari 0,1 poin.

Tabel 2.8

PDRB – Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Nilai (Milyar Rp)			Laju Pertumbuhan Tahun 2015	Sumber Pertumbuhan (%)
	2013*)	2014*)	2015*)		
Pertanian	1.345	1.355	1.375	1,51%	0,00%
Pertambangan dan Penggalian	3.003	2.977	2.951	-0,89%	0,00%
Industri Pengolahan	168.791	178.117	186.803	4,88%	0,63%
Listrik Gas dan Air Bersih	4.289	4.376	4.415	0,89%	0,00%
Konstruksi	179.201	187.587	195.742	4,35%	0,59%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	283.242	297.813	307.455	3,24%	0,70%
Pengangkutan dan Komunikasi	152.483	170.348	187.055	9,81%	1,22%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	314.970	333.653	516.586	54,83%	13,31%
Jasa-jasa	189.871	198.123	51.720	-73,89%	-10,65%
Produk Domestik Regional Bruto	1.297.195	1.374.349	1.454.102	5,80%	5,80%
PDRB Tanpa Migas	1.294.192	1.371.372	1.451.152	5,82%	

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

*) Atas Tahun Dasar 2010

7) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan

Dilihat dari laju pertumbuhannya, secara umum selama tahun 2015 naik 5,80 persen. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah komponen perubahan inventori yang naik sebesar 59,56 persen. Terbesar kedua dan ketiga adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang masing-masing naik sebesar 5,58 persen dan 3,44 persen. Sedangkan yang terkecil adalah komponen net ekspor antar daerah yang menurun sebesar minus 21,41 persen.

Tabel 2.9
PDRB – Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)

Pengeluaran	Tahun (Milyar Rp)			Pertumbuhan (%)		
	2013*)	2014*)	2015*)	2013*)	2014*)	2015*)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	762.773	804.186	849.062	2,91%	3,19%	5,58%
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	24.282	28.382	26.911		0,32%	-5,18%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	170.161	173.547	179.519	0,17%	0,26%	3,44%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	619.718	638.375	657.105	1,72%	1,44%	2,93%
Perubahan Inventori	2.172	1.819	2.902		-0,03%	59,56%
Ekspor Barang dan Jasa	232.771	231.532	230.271	1,40%	-0,10%	-0,54%
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	796.344	786.935	714.439	0,65%	0,73%	-9,21%
Net Ekspor Antar Daerah	281.662	283.443	222.771		0,14%	-21,41%
Produk Domestik Regional Bruto	1.297.195	1.374.349	1.454.102	6,11%	5,95%	5,80%

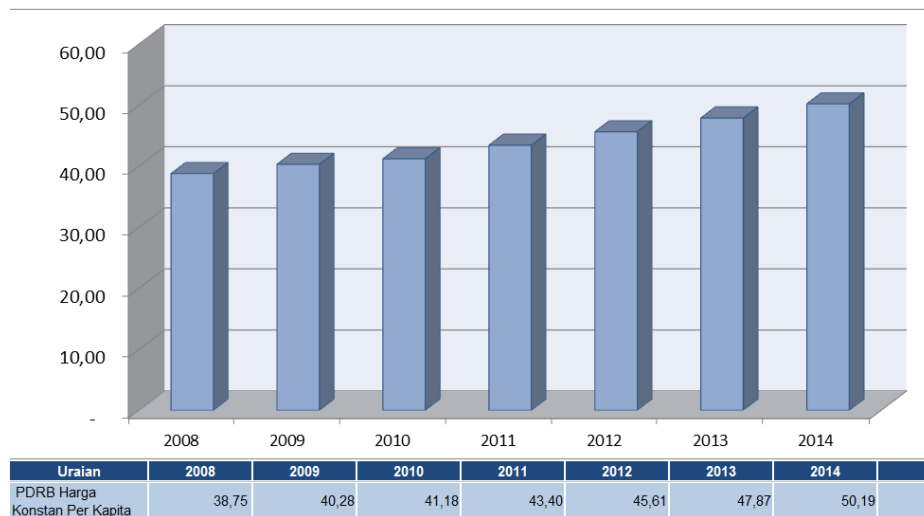
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016

*) Atas Tahun Dasar 2010

8) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan

PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kapita secara riil. Pada tahun 2015 PDRB per kapita meningkat 4,74 persen, yaitu dari Rp 142,87 juta di tahun 2015 menjadi Rp 136,41 juta di tahun 2015.

Grafik 2.14
PDRB – Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2015

9) Investasi

Realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 45,24,- Triliun. Sedangkan realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 15,51,- Triliun.

2.2 Kebijakan Keuangan

Untuk tahun 2014, kebijakan fiskal yang merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. dan tetap mengupayakan stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber pembiayaan yang tersedia.

Mengacu pada tantangan-tantangan tersebut, strategi kebijakan fiskal pada tahun 2015 tetap difokuskan pada langkah-langkah antara lain : (1) meningkatkan efisiensi pengelolaan Pendapatan Daerah; (2) meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Dana Perimbangan yang lebih rasional dan proporsional; (3) meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan pokok di bidang pendapatan daerah dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan di tahun 2015. Kebijakan ini selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2015 dilakukan dengan memperhatikan kebijakanyang ada pada RPJMD 2013 – 2017 dan RKPD tahun 2015. Kebijakan pendapatan daerah terdiridari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut telah dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut :

1. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Melakukan perubahan tarif pajak progresif untuk Kendaraan Bermotormilik pribadi;
- b. Memperhitungkan dampak kebijakan Pemerintah pusat atas penghapusanBBM bersubsidi secara bertahap;
- c. Memperhitungkan dampak kebijakan Pemerintah pusat atas peningkatanTarif Dasar Listrik (TDL);
- d. Melakukan penyesuaian nilai Zona Nilai Tanah (ZNT) dan pemuktahiranbasis data PBB P2;
- e. Meningkatkan tarif pajak hiburan terhadap jenis hiburan tertentu;
- f. Meningkatkan jumlah wajib pajak yang dapat dimonitor secara *Online*;
- g. Menyempurnakan landasan hukum serta *law enforcement* bagi pengenaanpajak dan retribusi;
- h. Memonitor dan mengevaluasi secara optimal semua jenis pajak.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- d) Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*.

3. Kebijakan Dana Perimbangan

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi akan Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan DAU dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi.

4. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum lain-lain pendapatan yang sah difokuskan untuk melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah MRT sesuai perjanjian perubahan (*amandemen*) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2015 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu, peningkatan

alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan dari tingkat kota/kabupaten administrasi ke bawah terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dimaksud. Arah kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat

a. Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :

- 1) Menaikan gaji pokok berdasarkan gaji dan tunjangan 2015 serta *acress* sebesar 2,5 persen;
- 2) Menaikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang berbasis kinerja individu berdasarkan *merit point – reward and punishment*;

b. Memenuhi Belanja Bunga dan mengalokasikan untuk :

- 1) Pembayaran *Tipping Fee* Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang;
- 2) Pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU);
- 3) Pembayaran belanja telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) untuk 12 bulan secara hemat dan efisien, serta pengalokasian untuk Belanja Pengolahan Air Limbah di setiap gedung Pemda.

B. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi Dan Misi RPJMD

- 1) Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD.
- 2) Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
- 3) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (*Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environtment*, MDG's dan MP3EI) serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.

- 4) Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.
- 5) Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijarah melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
- 6) Mengakomodir kegiatan-kegiatan aspirasi masyarakat dan Pokok-pokok Pikiran DPRD pada kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, gedung sekolah, puskesmas; pengadaan truk dan alat berat; serta pembebasan lahan untuk RTH, ruang interaksi publik dan infrastruktur lainnya
- 7) Meningkatkan Kerjasama Jabodetabek antara lain meliputi: pembebasan lahan Waduk, pengelolaan sampah dan pengamanan ketersediaan pangan.
- 8) Meningkatkan Kerjasama Jabodetabek antara lain meliputi :
 - 1) Pembebasan lahan untuk Waduk;
 - 2) Pembangunan infrastruktur terkait penanganan banjir, penanganan transportasi dan pengelolaan sampah;
- 9) Meningkatkan peran Jakarta sebagai Ibukota Negara antara lain meliputi :
 - 1) Pengembangan Transportasi;
 - 2) Penanganan Banjir;
 - 3) Pengembangan Perumahan Rakyat;
 - 4) Penataan Air Bersih dan Air Limbah;
 - 5) Penyediaan Energi;

C. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD / UKPD.
- 2) Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi, termasuk

penguatan Kecamatan dan Kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW.

- 3) Mendelegasikan sebagian tugas-tugas Provinsi ke Kota/Kabupaten antara lain melalui pengaturan pelaksanaan tugas-tugas pemeliharaan khususnya terkait pemeliharaan jalan, saluran, penanganan kebersihan, perbaikan taman dan penerangan jalan umum;
- 4) Memaksimalkan kegiatan-kegiatan dilaksanakan dengan mekanisme swakelola;
- 5) Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan publik dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang berorientasi untuk kepentingan aparatur dengan:
 - 1) Tidak menganggarkan pemberian honorarium kepada PNS kecuali untuk Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan Pegawai Non PNS.
 - 2) Tidak menganggarkan Biaya Pengendalian Teknis.

D. Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

Memenuhi Belanja untuk pengalokasian hibah dan bantuan sosial serta bantuan keuangan dan belanja tak terduga sesuai dengan tingkat rasionalitas.

Untuk melihat perkembangan Belanja Daerah dapat dilihat ringkasan rencana dan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2012-2015 berikut:

No.	Uraian	2012		2013		2014		2015	
		Penetapan	Realisasi	Penetapan	Realisasi	Penetapan	Realisasi	Penetapan	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	11.507,41	11.673,11	14.968,96	13.148,63	17.125,17	12.634,34	22.980,20	20.711,97
2.	Belanja Langsung	22.319,62	19.885,59	31.609,90	25.145,76	46.524,35	25.167,77	36.705,35	22.325,83
JUMLAH BELANJA DAERAH		30.922,35	33.827,03	46.578,86	38.294,39	63.649,52	37.802,11	59.685,55	43.037,81

Sumber : BKPD Provinsi DKI Jakarta 2015

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, juga terdapat komponen pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul antara lain karena ada selisih pendapatan dan belanja.

Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Program Unggulan

1. PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain:

1) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan, berupa :

- a) Pengadaan Mobil Derek Dinas Perhubungan dan Transportasi sebanyak 32 unit;
- b) Perencanaan Perhubungan di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan *Jetty*(dermaga) di Pelabuhan Muara Angke, DED Pembangunan *Sheet pile* dan Peningkatan Jalan Pelabuhan Muara Angke, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Inventarisasi Alur Pelayaran, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), dan Dermaga Kepulauan Seribu, Kajian Jaringan Lintas di Provinsi DKI Jakarta, Kajian Perencanaan Bisnis Angkutan Perairan Kepulauan Seribu, Pemeliharaan

Website Dinas Perhubungan, Perencanaan Pembangunan Perhubungan dan Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Publikasi Informasi Perhubungan;

- c) Penyelesaian Revitalisasi Terminal Rawamangun;
- d) Pemeliharaan Terminal berupa Pemeliharaan bangunan Terminal Kampung Melayu, Pulogadung, Tanjung Priok, Jakarta Kota, Manggarai, Grogol, dan Senen. Kegiatan pemeliharaan ini meliputi pemeliharaan bangunan terminal, emplasemen, rambu dan marka, serta saluran terminal;
- e) Pemeliharaan Bangunan Terowongan Penyeberangan Orang di Jakarta Kota untuk meningkatkan kenyamanan pada fasilitas pelayanan publik;
- f) Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Angkutan Sekolah meliputi kegiatan Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah, Pengadaan Fasilitas Pendukung di Pool dan Bus Sekolah, Pengadaan GPS Bus Sekolah, Pembaruan GPRS serta Perawatan Halte Bus Sekolah;
- g) Perhitungan Rupiah/km, Validasi Rute Angkutan Sekolah, Evaluasi Pelayanan, Perencanaan Program UP. Angkutan Sekolah, termasuk evaluasi pelayanan angkutan bus sekolah. Dari kegiatan tersebut dapat diketahui hal-hal yang belum optimal dalam pelaksanaan pelayanan Angkutan Sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan angkutan sekolah yang lebih optimal;
- h) Layanan Informasi Angkutan Bus Sekolah berupa kegiatan sosialisasi mengenai adanya layanan angkutan sekolah kepada sekolah-sekolah yang dilalui Angkutan Sekolah;
- i) Kajian model operasional bus sekolah dalam rangka efisiensi dan optimalisasi APBD Provinsi DKI Jakarta meliputi kajian rute, jam operasional, dan jumlah layanan. Dari kajian tersebut dihasilkan model operasional yang paling efisien

untuk Pelayanan Angkutan Sekolah;

- j) Pembangunan sistem operasional dan maintenance (perawatan dan pemeliharaan) bus sekolah untuk mempermudah pengelolaan armada angkutan sekolah sehingga dapat diketahui record perawatan dan data mengenai seluruh armada.
- k) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang meliputi Pengamanan Terminal Terpadu Pulo Gebang dalam rangka Angkutan Lebaran 2015, Natal dan Tahun Baru 2016, serta Pemindahan Angkutan Umum ke Terminal Terpadu Pulo Gebang. Hasil kegiatan tersebut berupa terwujudnya keamanan dan ketertiban Terminal Terpadu Pulo Gebang.
- l) Peningkatan Fasilitas Terminal Terpadu Pulo Gebang meliputi pembangunan Marka Jalan, Pembangunan Saluran Dalam, Pembangunan Taman Pot Terminal dan Pemeliharaan Pos Jaga;
- m) Pengadaan Tanah Akses Terminal Terpadu Pulo Gebang meliputi Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal untuk fasilitas akses keluar-masuk Terminal sebanyak 1 Bidang Tanah seluas 678 m² dan Pembebasan Tanah Frontage (jalan sejajar jalan tol) Tol Akses menuju Terminal Pulo Gebang sebanyak 3 bidang seluas 2.643 m².

2) Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel, berupa :

- a) Pembebasan Tanah MRT di Lebak Bulus untuk depo MRT sebanyak 1 bidang seluas 120 m²; dan
- b) Pembebasan Tanah untuk Koridor MRT sepanjang Jl. Lebak Bulus-Bunderan Senayan sebanyak 74 Bidang dengan Luas 4.380 m²

3) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

- a) Pembangunan Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (segmen Marunda-Raya Bekasi) seluas 1.078 m² dengan

panjang jalan 490 m (pada sisi timur dan barat)

- b) Pembangunan Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Raya Bekasi - Cipinang) seluas 8.460 m² dengan panjang jalan 355 m (pada sisi timur dan barat)
- c) Pembangunan Akses Terminal Pulo Gebang berupa 1 Fly Over (FO Ramp Masuk dan Ramp Keluar Terminal Pulo Gebang) dan 4 Jembatan (2 Jembatan Ramp BKT sisi Timur dan 2 Jembatan Ramp BKT sisi Barat)
- d) Pembangunan/Peningkatan Pedestrian di Provinsi DKI Jakarta, meliputi:
 - Jl Diponegoro Sisi Utara/Depan RSCM dan Jl Salemba Raya Sisi Timur depan RS Carolus seluas 2.570 m² dengan panjang 430 m
 - Kawasan Kota Tua seluas 1.703 m² dengan panjang 490 m
 - Kawasan Waduk Setiabudi dan sekitarnya seluas 2.065 m² dengan panjang 590 m
 - Jl. Sejajar Cengkareng Drain seluas 267 m² dengan panjang 267 m
- e) Peningkatan Jalan, meliputi:
 - Perkerasan Aspal Jalur Cepat seluas 34.860 m² dengan panjang 4.648 m dan Jalur Lambat seluas 4.883 m² dengan panjang 683 m di Jl. Suprpto,
 - Perkerasan Aspal seluas 27.508 m² dengan panjang 3.838 m di Jl Cempaka Putih,
 - Pembangunan Median dan Trotoar Jalan seluas 3.000 m² dengan panjang 1500 m' dan Marka Jalan seluas 1.250 m² di Jl. Suprpto dan Jl Cempaka Putih,
 - Pekerjaan Aspal seluas 162.700 m² dengan panjang 13.016 m di Jalan Pemuda-Pramuka,
 - Pekerjaan *Cold Mix Recycling Foam Bitumen* (CMRFB) seluas 29.979,56 m² dengan panjang 1.394 m, Aspal seluas 76.781 m² dengan panjang 3.571 m, Trotoar

- seluas 1.734 m² dengan panjang 652 m serta Marka Jalan seluas 1.872 m² di Jalan Caringin-Tomang-Biak
- f) Pembangunan/Peningkatan Jalan-jalan strategis di Prov.DKI Jakarta, meliputi:
- Jl. Daan Mogot Cs seluas 160.262 m² dengan panjang 8.903 m
 - Jl Pluit Samudera, Jl Lodan seluas 18.600 m² dengan panjang 2.240 m
 - Jl Cideng-Tomang-Biak, CMRFB seluas 36.998 m² dengan panjang 2.055 m
 - Jl Tembus Asia Afrika, Jl. Dwikora seluas 2.213 m²
 - Jl DI Panjaitan/Ahmad Yani seluas 49.022 m² dengan panjang 6.787 m
 - Akses Rusun Daan Mogot berupa CMRFB seluas 11.200 m² dengan panjang 700 m dan Perkerasan Aspal seluas 10.228 m² dengan panjang 730,64 m
 - Jl Setiabudi dan Jl Casablanka seluas 11.256 m² dengan panjang 1.608 m
 - Jl Fachruddin CS seluas 13.534 m² dengan panjang 966,77 m
 - Jl Casablanka Sisi Selatan seluas 2.790 m² dengan panjang 465 m
 - Jl Arafuru seluas 6.230 m² dengan panjang 890 m
 - Pekerjaan Marka Jalan 8.988 m
- g) Pembangunan *Fly Over* Kuningan Sisi Selatan sebanyak 1 Unit *Fly Over* seluas 681m x 9m = 6.129 m²
- h) Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Permata Hijau sebanyak 1 Unit *Fly Over* seluas 600m x 10m = 6.000 m²
- i) Pembangunan Jalan Layang Busway Kapten Tendean - Blok M – Cileduk target selesai tahun 2016 melalui Program *Multiyearsprogress* sampai dengan akhir Bulan Desember 2015 sebesar 43,42 % dari target rencana sebesar 38,12 %,

- j) Peningkatan Jalur Busway seluas 23.957 m² dengan panjang 7,98 Km dengan *Beton Speed Creete* pada Koridor 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, serta Separator Busway sepanjang 20.604 m' pada koridor 6, 8, 9
- k) Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan dan Trotoar di Seluruh Koridor Busway seluas 4.784,56 m² dengan panjang 1,60 Km menggunakan *Beton Speed Creete* di lokasi Simpang Kebon Nanas dan Coca-Cola, serta seluas 49.345,40 m² dengan panjang 16,45 Km menggunakan Aspal di Lokasi Jl. Senen Raya, Gn. Saharidan Jl. Soepono-Kebayoran
- l) Perencanaan Simpang Tak Sebidang di Jalan Cakung (Rel KA) sebanyak 1 Dokumen dan Pulogadung (Pertigaan) sebanyak 1 Dokumen
- m) Perencanaan DED Penyempurnaan Simpang Sebidang (x-1) Tahun 2016 di DKI Jakarta sebanyak 1 Dokumen
- n) Perencanaan Simpang Tak Sebidang (x-1) sebanyak 1 Dokumen
- o) Perencanaan Jalan Sejajar Sungai dan Rel Kereta Api Tahun 2016 di DKI Jakarta sebanyak 1 Dokumen
- p) Perencanaan DED Jalan Tembus Jl. Panjang - Jl. Kapuk Raya sebanyak 1 Dokumen
- q) Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jembatan di Prov. DKI Jakarta, meliputi:
 - Peningkatan Jembatan Teluk Gong seluas 197 m²
 - Pekerjaan *Speed Creete* seluas 467,93 m² dengan lokasi : Jembatan Mangga Dua Square, Pintu Air Mangga Dua, Jl. Samanhudi, Bermis, Halte Halimun, dan Jl. Zainal Arifin
- r) Pemeliharaan Jalan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Timur, meliputi:
 - Pekerjaan Aspal seluas 215.926 m² dengan panjang 19.712,93 m dengan Lokasi : Jl. Kramat Raya , Jl. Salemba Raya, Jl. Danau Sunter Utara dan Selatan , Jl.

Puri Indah, Jl. Panjang, Jl. Kembangan Murni Barat dan
Jl. Puri Kembangan Barat, Jl. Mampang Prapatan, Jl.
Rasuna Said, Jl. Bekasi Timur dan Jl. I Gusti Ngurah Rai

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan pada isu pengembangan sistem transportasi disebabkan oleh gagal lelang, terjadinya peralihan hak guna lahan, keterlambatan penyerahan berkas ke pengadilan untuk proses konsinyasi

- 1) Untuk Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan khususnya :
 - a) kegiatan Survey Capaian SPM PT. Transportasi Jakarta tidak dapat terlaksana di tahun 2015 dikarenakan gagal lelang oleh karena tidak adanya peminat, walaupun sudah dilakukan lelang ulang beberapa kali.
 - b) Kegiatan Pembangunan Hanggar dan Instalasinya tidak terealisasi dikarenakan adanya peralihan hak guna lahan berikut sarana prasarana yang ada di pool hek
- 2) Untuk Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel khususnya :
 - a) Kegiatan Pembebasan Tanah MRT di Lebak Bulus untuk depo MRT hanya terlaksana sebagian dikarenakan terlambatnya penyerahan berkas ke pengadilan untuk proses konsinyasi
 - b) Persiapan Pembangunan Kereta Api Ringan/LRT, tidak dapat dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi untuk melakukan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dianggarkan kembali pada Tahun 2016.
- 3) Untuk Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan khususnya:
 - a) Pembangunan Underpass (cendrawasih dan kartini), Simpang Tak Sebidang (Bintaro Permai - Rel KA, Cipinang Lontar dan Jl. Panjang) yang sedianya dilaksanakan secara

multiyears tidak terealisasi dikarenakan APBD yang ditetapkan melalui Pergub sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dianggarkan kembali di tahun 2016

- b) Pembangunan JPO Kanal Barat Pasar Tanah Abang tidak terealisasi dikarenakan akan dilaksanakan oleh PD Pasar Jaya mengingat JPO multi fungsi sebagai area perdagangan sedangkan pembangunan JPO Taman Penjaringan tidak direalisasikan karena adanya kesepakatan Dinas Bina Marga dengan Dinas Perhubungan terkait kewenangan pembangunan JPO.
- c) Penataan Jalur Pedestrian tidak terealisasi pada tahun anggaran 2015, dikarenakan adanya kegagalan lelang sehingga diprogramkan kembali sebagai kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2016 dan pelaksanaannya didorong melalui e-katalog/e-purchasing
- d) Pembangunan Jembatan Jl. Boulevard Timur - Jl. Pegangsaan Dua tidak terserap karena gagal lelang.
- e) Terkait Pembebasan Tanah di Dinas Bina Marga tidak terserap optimal dikarenakan tidak ada kesepakatan harga dan ketidaklengkapan berkas pendukung

2. ANTISIPASI BANJIR, ROB DAN GENANGAN

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain:

1) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir

- a) *Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) Dredging and Embankment of Ciliwung-Gunung Sahari Drain & Waduk Melati Sub Project ICB Package No JUFMP-1* meliputi :
Pekerjaan di Waduk Melati :
 - Pemancangan *sheet pile* CCSP type W450 L 12 m : sepanjang 11.508 m

- Pemancangan *sheet pile* CCSP type W450 L 10 m : sepanjang 2.690 m
- Pengerukan waduk dengan volume lumpur yang dikeruk 80.220,62 m³
- Pembangunan pompa dengan kapasitas sebesar 4 m³/detik

Pekerjaan di Kali Ciliwung Gunung Sahari :

- Pemancangan *sheet pile* CCSP type W450 L 17 m : 3.995 m
 - Pemancangan *sheet pile* CCSP type W450 L 14 m : 812 m
 - Pemancangan *sheet pile* CCSP type W450 L 12 m : 17.244 m
 - Pengerukan sungai dengan volume lumpur yang dikeruk 171.630,97 m³
 - Pembuatan saluran gendong sejajar kali dengan Uditch uk. (1.00 x 1.00 x 1.20) m sepanjang 2.184 m'
 - Pembangunan kontruksi jalan orang / pedestrian dengan *paving block* seluas 4.548,34 m² lebar 1,60 m
 - Pembuatan dan pemasangan pintu air dengan ukuran (b : 1.00 x h : 2.00 x h : 3,60) m sebanyak 2 unit dan ukuran (b : 1.00 x h : 2.00 x h : 4,05) m sebanyak 2 unit
- b) Pembangunan Tanggul Ase panjang 1950 m' di Muara Baru Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk mendukung NCICD berupa tanggul di pinggir pantai.
- c) Jakarta *Urgent Flood Mitigation Project* (JUFMP) *Dredging and Embankment of Grogol-Sekretaris Drain*, Pakin-Kali Besar-Jelangeng Drain, Krukut Cideng *Drain*& Krukut Lama *Drain Sub-Project ICB Package* No JUFMP-7, meliputi :
- Pemancangan *sheet pile* sepanjang 6.204 m' di Kali Krukut Cideng, Kali Jelangeng dan Kali Grogol Sekretaris

- Pengerukan lumpur sebesar 5.253,3 m³ di Kali Besar, Kali Jelangkeng dan Kali Grogol Sekretaris
- d) Pembangunan Parkir Air (Reservoar Air), Sumur Resapan, Imbuhan dan Pengisian (*Recharge*) Air Tanah berupa sumur resapan sebanyak 1243 titik yang berlokasi di DAS Mampang Timur sebanyak 593 Titik dan DAS Mampang Barat sebanyak 650 titik

2) Program Pengembangan Sistem Drainase

- a) Pembangunan Sistem Telemetry Sumur Pantau berupa pengadaan alat telemetry AWLR Sumur Pantau sebanyak 20 buah di 8 titik lokasi yaitu Cipayung (Jl. Bina Marga No. 2), Pluit (Kantor Kel. Pluit Jl. Karang Permai), Pegadungan (di RM. Suku Dinas Kebersihan Jl. Bambu Larangan), Pasar Minggu (Jl. Ragunan Raya No. 29), Pulo Gebang (Jl. Raya Pulo gebang No. 2), Rusun Pesakih (Jl. Daan Mogot), Semanan (Kantor Lurah) dan kantor Walikota Jakarta Utara
- b) Pengadaan dan pemasangan meter air sebanyak 865 buah yang terdiri dari:
 - Pengadaan meter air sebanyak 733 unit terdiri dari 1 inch sebanyak 443 unit, 1,5 inch sebanyak 50 unit, 2 semi baling-baling sebanyak 200 unit, dan 3 semi baling-baling sebanyak 40 unit
 - Pemasangan meter air sebanyak 132 unit terdiri dari Pemasangan baru sebanyak 25 unit dan Pergantian unit rusak sebanyak 107 unit
- c) Pengadaan *Remote Hydrographic Survey* berupa pengadaan 1 (satu) unit perahu remote control untuk kebutuhan pengukuran kontur dan endapan di bawah air pada waduk/sungai.
- d) Pengadaan Perlengkapan Pendukung pengukuran kontur dan endapan berupa Handy Talkie sebanyak 7 Unit dan Bak Ukur Geodesi sebanyak 20 unit.
- e) Pengadaan Alat Ukur GPS Geodetik sebanyak 3 unit untuk

melakukan pengukuran elevasi dan koordinat di lokasi yang sulit dijangkau dan memerlukan ketelitian tinggi.

- f) Pengadaan Alat Geodesi sebanyak 11 unit terdiri dari 10 unit Digital Level dan 1 unit Total Station
- g) Pengadaan Alat Test Debit Air untuk melakukan pengetesan debit air pada kali/sungai/saluran phb sebanyak 3 unit
- h) Perencanaan dasar pembangunan sistem pompa dan *longstorage* sunter hilir
- i) Jakarta *Urgent Flood Mitigation Project* (JUFMP) *Dredging and Embankment of Sentiong-Sunter Drain*, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan & Waduk Sunter Timur III Sub-projects ICB Package No. JUFMP-4 dengan total volume pengerukan sebesar 270.000 m³ serta perbaikan tanggul sepanjang 151.998 m'
- j) Pendampingan Jakarta *Emergency Dredging Initiative* (JEDI) *Project* (Administrasi & Lelang) menghasilkan Kontrak JEDI Paket 4 (Sentiong-Sunter *Drain*, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan & Waduk Sunter Timur III) & Paket 7 (Grogol-Sekretaris *Drain*, Pakin-Kali Besar-Jelangkeng *Drain*, Krukut Cideng *Drain* & Krukut Lama)
- k) Pendampingan appraisal bidang sumber daya air guna menentukan harga tanah untuk waduk, situ, embung, kali, dan saluran menghasilkan sebanyak 20 lokasi dengan luas sekitar ± 652.431 m²
- l) Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah terhadap pemilik ijin sebanyak 253 ijin terdiri dari:
 - Surat Ijin Bor (SIB) sebanyak 46 ijin
 - Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Bor Baru sebanyak 18 ijin
 - Pantek Baru sebanyak 18 ijin
 - Bor Perpanjangan sebanyak 126 ijin
 - Pantek Perpanjangan sebanyak 35 ijin
 - *Dewatering* sebanyak 9 ijin

- Pengembalian Berkas sebanyak 1 ijin
- m) Normalisasi Sungai/Kali di Provinsi DKI Jakarta berupa pemasangan *sheet pile* sepanjang 1.826 m' terdiri dari :
 - Aliran Barat: Lokasi di Kali Sekretaris (Mulai dari Sodetan Grogol sekretaris sampai Tanjung Duren) sepanjang 708 m.
 - Aliran Tengah : Lokasi Kali Ciliwung lama sepanjang 1.118 m

3) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

- a) Pengerukan Kali/Saluran/Waduk/Situ Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta dengan total volume sebanyak $\pm 160.000 \text{ m}^3$ di 13 lokasi yaitu Kali Pademangan, Waduk Pulomas (Ria Rio), Inlet Pompa Ancol, Kali Utan Kayu, Sand Trap KBT, Waduk Sunter Timur III (Rawa Badak), Saluran Penghubung (PHB) IKIP, Kali Betik, Inlet Pompa Sunter Utara, Waduk Sunter Utara, Waduk Halim, Kali Item, Waduk Arta Gading
- b) Pengerukan Kali/Saluran/Waduk/Situ Aliran Tengah Provinsi DKI Jakarta dengan total volume sebanyak $\pm 10.926,53 \text{ m}^3$ di 4 lokasi yaitu Kali Bandengan, Ciliwung Lama, Kali Ancol *Flushing* dan Waduk Muara Angke
- c) Pengerukan Kali/Saluran/Waduk/Situ Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta dengan total volume sebanyak $\pm 30.000 \text{ m}^3$ di 3 lokasi yaitu Waduk Tomang, Kali Grogol dan Kali Kamal

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan pada isu antisipasi banjir, rob dan genangan antara lain :

- 1) Pembangunan dan Perbaikan Fisik *Benchmark Peil* Priok di Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Belanja Jasa Konsultan Penelitian dan Belanja Modal Jasa Konstruksi tidak dilaksanakan karena gagal lelang akibat tidak adanya penyedia yang

memasukkan penawaran. Untuk itu telah dianggarkan kembali di tahun 2016 dan dilakukan proses pelelangan lebih awal.

- 2) Pembangunan Tanggul A NCICD tidak dapat dilaksanakan karena Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terlambat menyerahkan DED Pembangunan Tanggul Adi wilayah Aliran Timur dan Aliran Barat sehingga waktu tidak mencukupi. Untuk itu telah dianggarkan kembali di tahun 2016 dan akan dilaksanakan sesuai DED yang diterima.
- 3) Pembangunan Pelindung Tebing Bantaran di KBT tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat izin dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk selanjutnya pembangunan pelindung tebing akan dikoordinasikan dengan BBWSCC.
- 4) Pengadaan Perlengkapan Pendukung Pengukuran tidak dapat terlaksana secara optimal karena adanya kenaikan harga pasar akibat fluktuasi kurs dolar. Untuk itu telah dilakukan penyesuaian harga komponen eBudgeting bersama BPKAD.
- 5) Normalisasi Sungai/Kali di Provinsi DKI Jakarta sebagian tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. Untuk itu telah dianggarkan kembali di tahun 2016 dan dilakukan proses pelelangan lebih awal.

3. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Penyediaan Perumahan Rakyat

- a) Pembangunan Rumah Susun sebanyak 6 tower dan 18 blok dengan total volume 2.478 unit / struktur, yang terdiri dari Rusun KS Tubun 3 tower (524 unit), Rusun Semper 1 tower (270 unit), Rusun Cakung Barat 4 blok (300 unit), Rusun

Rawa Bebek 4 blok (400 unit), Rusun Jatinegara Kaum 3 blok (300 unit), Rusun Jl. Bekasi Km.2 sebanyak 2 blok (200 unit), Rusun Pinus Elok 1 blok (100 unit) dan Rusun Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya 2 tower (384 unit).

- b) Perancangan Dasar Rusun sebanyak 14 tower dan 10 blok dengan total volume 3.323 unit/struktur, yang terdiri dari Rusun BLK Pasar Rebo 2 tower (336 unit), Rusun Daan Mogot 2 tower (460 unit), Rusun Lokasi Binaan Rawa Buaya 2 tower (384 unit), Rusun Lokbin Tegal Alur 1 tower (90 unit), Rusun Nagrak 10 blok (510 unit), Rusun Pengadegan 1 tower (188 unit), Rusun Penjaringan 2 tower (424 unit), Rusun Pulo Gebang 3 tower (676 unit) dan Rusun Rawa Bebek 1 tower (255 unit).
- c) Perancangan Dasar Rumah Susun Kompleks Rusun Pondok Pinang Jakarta Selatan (Eks UPT Kayu) sebanyak 1 Tower (164 Unit / Struktur)

2) Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung

Perbaikan Rumah Susun Cakung Barat terdiri dari : Perbaikan *Waterproofing* 1448,16 m², Perbaikan Kamar Mandi 60 Unit, Penambahan kanopi 667 m², dan Pekerjaan *Paving* halaman 272 m².

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan pada isu peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota antara lain :

- 1) Pembangunan pagar lahan Ciangir tidak dapat dilaksanakan karena belum jelasnya batas luar lahan Ciangir. Untuk itu akan dilaksanakan pengukuran ulang batas lahan Ciangir terlebih dahulu sebelum dilakukan pemagaran.

4. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

- a) Pengadaan Alat - Alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan sebanyak 36 unit, terdiri dari *Bulldozer* (2 unit), *Escavator* (5 unit), *Crane* (2 unit), *Tyre Roller* (1 unit), *Cold Milling* (1 unit), *Tandem Roller* (1 unit), *Asphalt Finisher* (2 unit), *Self Loader* (2 unit), *Shovel Loader* (1 unit) dan alat Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) (19 unit).
- b) Perawatan Rutin Prasarana Jalan dan Jembatan di Prov. DKI Jakarta berupa Pekerjaan Aspal dengan volume seluas 196.989,88 m² dan panjang 25.545,54 m pada lokasi : Kawasan Hotel Grand Melia, Kawasan Gedung KPK, Jl. Galunggung, Jl. Halimun, Jl. Sultan Agung, Jl. Latuharhari, Jl. Soepono, Jl. Saharjo, Jl. Cikini Raya, Jl. Surabaya, Jl. Diponegoro, Jl. Percetakan Negara, Jl. Meruya Utara, Jl. Moch. Mansyur, Jl. Pesanggrahan, Jl. Boulevard Barat, Jl. Mas Mansyur, Jembatan Kemayoran, Cakung Drain (Jl. Cilincing) dan Jembatan Galur
- c) Pengadaan Alat Berat Tata Air berupa *amphibi excavator* ukuran besar (8 unit), *amphibi excavator* ukuran kecil (5 unit), *watermaster* (2 unit), *trailer dolly* (3 unit), *self loader* (2 unit), *mobile crane* (1 unit)
- d) Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Data & Informasi berupa penambahan Stasiun Telemetry sebanyak 5 lokasi di Waduk Pluit, Yos Sudarso, Karet, Cideng dan Pintu Air Marina
- e) Pengadaan Peralatan CCTV sebanyak 7 unit dengan lokasi di jaringan Cempaka Mas – Pedongkelan (2 Unit), Jaringan Balaikota - Robinson (2 Unit), Jaringan Balaikota – Pantai

Mutiara (2 Unit) dan Gedung Dinas Tata Air (1 unit)

- f) Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan melalui Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) sebanyak 176 unit terdiri dari 53 unit alat berat, 117 unit angkutan sampah dan 6 unit *Mobile Toilet*.
- g) Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Kebersihan berupa Compactor SPA Sunter, Kendaraan *Typer* Sampah (3 unit), Instalasi Air, Genset dan Area Hopper SPA Sunter, Bus Toilet (6 unit) dan Toilet *Container* (4unit)
- h) Perbaikan Sarana Kebersihan berupa *Compact Container* (4unit), Kendaraan *Arm Roll* (4 unit) dan rekondisi *Container* SPA Sunter (6 unit)
- i) Pengadaan alat angkut kebersihan sebanyak 1.255 unit terdiri dari Dump Truck Besar (435 unit), Dump Truck Kecil (341 unit), Truk Arm Roll Besar + bak kontainer (65 unit), Truk *Arm Roll* Kecil + bak kontainer (63 unit), *Dump Truck* Tronton (29 unit), Kendaraan Pengangkut alat berat (1 unit), Kendaraan Derek (4 unit), *Dump Pick-up* Angkutan Sampah (40 unit), Kendaraan Operasional Lintas (77 unit) dan Gerobak Motor (200 unit)
- j) Pengadaan Alat Berat Kebersihan sebanyak 47 unit terdiri dari *Wheel Loader* (39 unit), *Excavator* (1 unit), *Spider Excavator* (1 unit) dan *Road Sweeper* (6 unit)
- k) Pengadaan *Container* Sampah sebanyak 20 unit terdiri dari *Container* Sampah Besar (10 unit) dan *Container* Sampah Kecil (10 unit)
- l) Pengadaan *Mobile Toilet* sebanyak 11 unit

2) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a) Penanganan sampah Pesisir dan Pantai Utara Jakarta, muara 13 sungai di Teluk Jakarta dan Pantai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu oleh 241 petugas
- b) Penanganan sampah Badan Air, Taman dan Jalur Hijau wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta

Selatan dan Jakarta Timur oleh 4.316 petugas

- c) Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang dengan volume rata-rata 6.411 ton/hari
- d) Penyusunan Regulasi Masterplan Pengelolaan Sampah 1 dokumen

3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- a) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kebersihan berupa antara lain :
 - Gerakan Tidak Buang Sampah Sembarangan melalui kampanye kebersihan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di 5 wilayah kota
 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 3R dan Bank Sampah di 5 wilayah kota
 - Pemasangan Iklan Nomor Telepon Pengaduan Masyarakat melalui media cetak sebanyak 15 terbitan
 - Penyebarluasan informasi kebersihan melalui pembagian 1.800 buah kalender duduk dan 500 buku sakuserta poster *art paper* 1.750 eksemplar, leaflet *art paper* 1.500 eksemplar, *roll banner* 100 buah dan pin 1.500 buah kepada masyarakat serta dialog Interaktif melalui 3 stasiun radio sebanyak 12 kali siaran
 - Penyebarluasan informasi kebersihan kepada pengelola kawasan, yaitu kawasan komersial, permukiman dan industri
 - Pembinaan dan Edukasi kali bersih kepada masyarakat.
- b) Dukungan Pelayanan Toilet Berjalan sebanyak 456 event antara lain: Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Wisata Balaikota, HUT RI, HUT DKI dan event-event Pemprov lainnya serta pelayanan bantuan kebencanaan.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan pada isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

- 1) Layanan Kalibrasi Peralatan Pengukuran, Lapangan dan Laboratorium tidak dapat dilaksanakan karena belum selesainya proses administrasi aset paska perubahan struktur organisasi UPT Pengelola Penyelidikan dan Pengukuran Dinas Pekerjaan Umum. Untuk itu layanan akan diberikan setelah adanya kejelasan status aset Dinas Bina Marga dan Dinas Tata Air
- 2) Pengadaan Kendaraan *Dump Truck* Besar hanya terlaksana sebanyak 435 unit dari target sebanyak 512 unit dikarenakan keterbatasan kemampuan perusahaan karoseri. Untuk itu telah dianggarkan kembali di tahun 2016.
- 3) Pengadaan Kendaraan *Compactor* ramah lingkungan tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang. Untuk itu telah dianggarkan kembali di tahun 2016 sebanyak 91 unit dan akan dilakukan persiapan lelang lebih awal.
- 4) Pengadaan *Tracking Truck* Dinas Kebersihan sebanyak 151 set tidak terlaksana dikarenakan gagal lelang. Untuk itu telah dianggarkan kembali di tahun 2016 dan akan dilakukan persiapan lelang lebih awal.
- 5) Gerakan Jakarta Bersih tidak terserap karena pada saat pelaksanaan terdapat perusahaan-perusahaan yang bersedia untuk turut serta dalam gerakan ini melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

5. PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS RTH

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain:

- 1) **Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman**
 - a) Pembangunan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Ujung

Menteng RW 01, Cakung Jakarta Timur seluas 5.638 m²

- b) Pembangunan Taman Jalur Hijau seluas 3.929,72 m² yang berlokasi di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan seluas 500 m² dan Jalan Tubagus Angke, Jakarta Utara seluas 3.429,72 m²
- c) Pembebasan Lahan untuk RTH sebanyak 64 lokasi seluas 504.484 m² yang terdiri dari lahan PHU sebanyak 60 lokasi seluas 476.176 m² dan makam sebanyak 4 lokasi seluas 28.308 m².

2) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman

- a) Lomba Taman dan Penghijauan Lingkungan RT Tahun 2015 di 5 wilayah kota Jakarta
- b) Penyelenggaraan Pameran Flora dan Fauna (FLONA) Tahun 2015
- c) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Green School 2015 melalui Pembuatan Taman Percontohan di 3 lokasi SMAN 25 Jakpus, SMKN 28 Jaksel dan SMAN 95 Jakbar
- d) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penghijauan Lingkungan melalui pemberian bibit tanaman hias di 4 lokasi yaitu Taman Manggar, Pondok Kelapa (50 orang), Rusunawa Jatinegara (100 orang), RW. 01 Pela Mampang (50 orang) dan RW.02 Menteng (50 orang)

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan pada isu peningkatan kualitas dan kuantitas RTH antara lain :

- 1) Pembangunan Taman RTH Jl. Ujung Menteng RW 01, Cakung Jakarta Timur, hanya terealisasi sebesar 60% dari luas Taman dikarenakan terdapat *force majeure* di lapangan (Banjir), sehingga waktu pengerjaan tidak mencukupi.

6. PENGURANGAN KETIMPANGAN EKONOMI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM

- a) Pengadaan Gerobak untuk Pedagang Kaki Lima sebanyak 100 unit yang diberikan kepada pedagang di Kawasan Kota Tua
- b) Pengadaan sarana dan prasarana PKL di Jakarta Timur berupa penyediaan 80 etalase, 70 meja kursi kafe, 50 *showcase cooler* untuk PKL di 7 kecamatan Jakarta Timur.
- c) Pengadaan sarana dan prasarana PKL di Jakarta Utara berupa rambu darat, tong sampah, papan himbauan, pakaian kerja lapangan, belanja kamera, *handycam*, di 17 lokasi PKL
- d) Rehab lokasi binaan Rorotan, Jakarta Utara dan Munjul, Jakarta Timur
- e) Perawatan lokasi binaan Muria Dalam, Jakarta Selatan serta Jl Nusa 1 dan Cililitan, Jakarta Timur

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

- a) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - Pembinaan terhadap Pengelola Pusat Pelatihan Kerja (PPK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 75 Lembaga yang terdiri dari 7 PPK Pemerintah Daerah dan 68 LPK Swasta
 - Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka penentuan Upah Minimum Provinsi
 - Penempatan Transmigran sebanyak 25 KK ke 5 lokasi transmigrasi (Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah, Sulawesi Selatan dan Nanggroe Aceh Darussalam)

- Pelaksanaan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja sebanyak 4.080 orang dari 7 PPK dan PPKD yang terdiri dari kejuruan Telematika, *Baby Sitter*, Garmen, Perhotelan, Rias Pengantin, SPA dan Tata Rias
 - Pelatihan Asesor sebanyak 50 asesor yang terdiri dari Asesor Akreditasi sebanyak 25 asesor dan Asesor Kompetensi sebanyak 25 asesor
 - Pelatihan dan Pemagangan ke Seoul (*Sister City*) sebanyak 15 orang selama 9 bulan
 - Pelatihan dan Seleksi Magang *International Manpower Development of Medium and Small Enterprises* (IMM) ke Jepang sebanyak 56 orang selama 2 tahun
 - Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebanyak 400 orang terdiri dari Pekerja Juru Ikat *Crane (Rigger)*, Bekerja pada Ketinggian, Ruang Terbatas dan Teknisi Perancah
 - Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) sebanyak 1.610 kasus di Perusahaan, terdiri dari perselisihan tentang Hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Serikat Pekerja (SP) / Serikat Buruh (SB) dalam satu perusahaan, dan Mogok Kerja / Unjuk Rasa
- b) Penyediaan Informasi Pasar Kerja *off-line* dan *on-line* berupa *job-fair* dengan melibatkan 195 perusahaan, 63.004 lowongan kerja dan menghasilkan 16.125 penempatan tenaga kerja

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan pada isu pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja antara lain :

- 1) Minimnya jumlah maupun kualitas instruktur PNS pelatihan kerja di PPK Daerah dikarenakan salah satunya instruktur PNS yang

ada sudah mencapai usia pensiun. Untuk itu, diperlukan adanya pengalokasian PNS potensial untuk di didik menjadi instruktur yang memenuhi standar kurikulum yang ada serta merekrut instruktur yang berasal dari kalangan profesional.

7. PEMBANGUNAN BUDAYA MULTI-KULTUR

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

- a) Pengadaan tanah di Zona A beserta area pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan betawi di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi seluas 5.299 .
- b) Konservasi Museum Joang '45 serta pembuatan tanggul pengaman pantai di Pulau Onrusy, Pulau Kelor dan Pulau Cipir.

2) Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan

Penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat Nasional di Jakarta, antara lain Festival Kuliner Betawi, Festival Teater, Pemilihan Abang-None Jakarta, Lomba Karya Cipta Tari Betawi, Partisipasi Festival Reog, Apresiasi dan kompetisi seni bagi pelajar provinsi DKI Jakarta, Lebaran Betawi, Jakarta *Bienalle* 2015, Jakarta Carnaval (Jakarnaval), Festival Ramadhan, Festival Kota Tua dan *Batavia art festival*

3) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan,

- a) Perlindungan dan pengembangan kebudayaan Betawi diantaranya melalui Ekperimentasi Seni Budaya Betawi dan Kajian Akademis tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA)
- b) Pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 wilayah dan kepulauan seribu pada 21 lokasi Pusat Kebudayaan diantaranya : Pusat Kesenian Jakarta – Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM),

Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Miss Tjitjih, Gedung Wayang Orang Bharata, Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Setu Babakan, Pusat Pelatihan Seni Budaya di 5 Wilayah, Gedung Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII, Rumah Si Pitung Jakarta Utara, dan Kawasan Kota Tua.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan pada isu pembangunan budaya multi-kultur antara lain :

- 1) Makin menipisnya penggunaan dan pemanfaatan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam menghidupkan dan melestarikan tradisi di masyarakat antara lain melalui pelaksanaan pertunjukan kesenian secara reguler di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.
- 2) Belum memadainya sarana prasarana kebudayaan yang ada. Untuk itu perlu dilakukannya pembangunan dan pengembangan gedung-gedung pertunjukan kesenian dengan fasilitas modern sesuai standar internasional, berkapasitas besar, lengkap dan nyaman. Salah satu kegiatannya adalah penataan Gedung Kesenian Jakarta, rehab gedung Kesenian Wayang Orang Bharata dan gedung Miss Tjitjih

8. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain :

- 1) Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah**
 - a) Pengembangan Sistem Pajak *Online* untuk 4 jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, dan Parkir, dengan volume sebanyak 5.238 Wajib Pajak.
 - b) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Teknologi Pelayanan Pajak Daerah dengan merehabilitasi Ruang Server beserta

Pengadaan Server Sentralisasi Database Pajak Daerah sebanyak 6 unit server dan Disk *Storage Server* sebanyak 21 unit dengan total kapasitas sebesar 25,2 TB dan masing-masing sebesar 1,2 TB.

- c) Integrasi Sistem Informasi Pajak Daerah; dengan mengintegrasikan Sistem Pembayaran Pajak *Online* (Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, dan Parkir), Sistem Pendataan Objek Pajak di tingkat Kelurahan, *Dashboard* Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem E-Kinerja Statis Dinas Pelayanan Pajak.
- d) Operasional Sistem Aplikasi Pajak Daerah, yang terdiri dari Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) serta Sistem Pajak Online untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Air Tanah, Reklame, Restoran, Hotel, Hiburan, dan Parkir dalam rangka penyempurnaan aplikasi.

2) Program peningkatan Investasi

Pelaksanaan *Business Forum* dan Promosi Investasi

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a) Bimbingan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan menghasilkan peningkatan kompetensi SDM aparat sebesar 93,35 %.
- b) Pengendalian dan evaluasi penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan ditindaklanjutinya seluruh pengaduan/keluhan
- c) Pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi pelayanan publik berupa pengembangan Layanan *Hotline* 164 (layanan *Customer Service*) dan website <http://pelayanan.jakarta.go.id> yang berisi informasi jenis-jenis, prosedur dan persyaratan perizinan.
- d) Monitoring dan evaluasi operasional sistem teknologi Informasi penyelenggaraan PTSP dengan melakukan

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) online melalui pelayanan.jakarta.go.id

- e) Pemberian pelayanan online untuk pengurusan :
 - Ijin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) :
Pertamananpemakaman.jakarta.go.id
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP):
pelayanan.jakarta.go.id
 - Pembayaran Retribusi (e-Ret) :
e-retribusi.jakarta.go.id.
- f) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik sebesar 89%
- g) Program *One Day Service* (ODS) dan *Drive Thru* untuk penyelesaian perizinan dan non perizinan tertentu dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Program ODS Terdapat pada 318 service point yang tersebar di seluruh DKI Jakarta. Program ODS dipadukan dengan pelayanan *Drive Thru*, yaitu pelayanan prioritas bagi pemohon yang mengurus perizinannya sendiri (tanpa calo) dengan waktu penyelesaian maksimal 1 jam. Jenis Layanan perizinan/non perizinan yang dapat dilayani pada ODS adalah:
 - Legalisir (seluruh perizinan)
 - Rekomendasi Penelitian
 - Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) / Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
 - Bidang Perhubungan (Surat Ijin Usaha Jasa Penyelenggaraan Transportasi (SIUJPT), SK Izin Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Umum, Rekomendasi Penghitaman/Balik Nama/Peremajaan, Scrapping, Rekomendasi Mutasi Mobil Barang Umum (MBU)

9. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain:

1) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

- a) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKN dan SLBN bagi 1.927 siswa dengan total anggaran Rp 4.519.609.617,- yang terdiri dari BOP TKN sejumlah 622 siswa dengan anggaran Rp.549.160.000 dan BOP SLBN sejumlah 1.305 siswa dengan anggaran Rp.3.970.449.617, dengan rincian :

- a) TKLBN sejumlah 87 peserta didik dengan anggaran Rp. 138.272.900,-
- b) SDLBN sejumlah 697 peserta didik dengan anggaran Rp.1.867.820.408,-
- c) SMPLBN sejumlah 285 peserta didik dengan anggaran Rp. 841.275.541,-
- d) SMALBN sejumlah 236 peserta didik dengan anggaran Rp. 1.123.080.768,-

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) jenjang SDN/MIN, SMPN/MTsN dan SMAN/SMKN/MAN bagi ... siswa dengan total anggaran Rp 1.534.150.511.534,- dengan rincian:

- e) Kota Adm. Jakarta Pusat sejumlah 107.981 siswa dengan anggaran Rp 175.872.842.575,-
- f) Kota Adm. Jakarta Utara sejumlah 142.188 siswa dengan anggaran Rp 217.274.111.480,-
- g) Kota Adm. Jakarta Barat sejumlah 225.252 siswa dengan anggaran Rp 272.663.693.313,-
- h) Kota Adm. Jakarta Selatan sejumlah 242.857 siswa dengan anggaran Rp 357.201.434.975,-
- i) Kota Adm. Jakarta Timur sejumlah siswa dengan anggaran Rp 501.474.464.338,-

- j) Kab. Adm. Kep. Seribu sejumlah 5.105 siswa dengan anggaran Rp 9.663.964.853,-
- b) Pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu sebanyak 561.407 peserta didik dengan total anggaran Rp 187.052.445.000,-
dengan rincian:
 - k) tingkat SD/MI sebanyak 314.695 peserta didik dengan total anggaran Rp 76.190.720.000,- terdiri dari 236.966 peserta didik SD/MI Negeri dengan anggaran Rp 49.762.860.000,- dan 77.729 peserta didik SD/MI Swasta dengan anggaran Rp 26.427.860.000,-
 - l) tingkat SMP/MTs sebanyak 136.897 peserta didik dengan total anggaran Rp 47.384.590.000,- terdiri dari 67.536 peserta didik SMP/MTs Negeri dengan anggaran Rp 17.559.360.000,- dan 69.361 peserta didik SMP/MTs Swasta dengan anggaran Rp 29.825.230.000,-
 - m) tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 109.275 peserta didik dengan total anggaran Rp 63.477.135.000,- terdiri dari 23.532 peserta didik SMA/SMK/MA Negeri dengan anggaran Rp 9.024.030.000,- dan 85.743 peserta didik SMA/SMK/MA Swasta dengan anggaran Rp 54.453.105.000,-

2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

- a) Penyelesaian rehabilitasi total gedung sekolah sebanyak 51 Sekolah yang terdiri dari 32 SDN, 16 SMPN, 2 SMAN dan 1 SMKN, serta Rehab/Perawatan Berat sebanyak 207 gedung sekolah terdiri dari 56 gedung sekolah di Jakarta Pusat, 24 gedung sekolah di Jakarta Utara, 61 gedung sekolah di Jakarta Barat, 25 gedung sekolah di Jakarta Selatan dan 41 gedung sekolah di Jakarta Timur.
- b) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 4 Sekolah yang terdiri dari 2 SMPN, 1 SMAN dan 1 SMKN
- c) Penyelesaian Pembangunan Sarana Penunjang SMKN

Terpadu Bambu Apus, Asrama SMKN 61 Kep. Seribu dan Sekolah Terpadu Rusun Marunda

3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

- a) Penyelenggaraan rangkaian Ujian Nasional dan Ujian Sekolah pada jenjang pendidikan : UNPK Paket A/Ula, Paket B/Wustha dan Paket C dengan peserta sebanyak 16.557 peserta didik.
- b) Penyelenggaraan rangkaian Ujian Nasional dan Ujian Sekolah pada jenjang pendidikan : SD, SMP, SMA dan SMK.
- c) Sosialisasi dan Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP, Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/M-BD) SD Tingkat Kota, Tryout dan Ujian Sekolah (US) SD serta Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- d) Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Peserta Didik antara lain berupa Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional, Pemusatan Latihan Peserta Lomba Siswa Pendidikan Khusus/Layanan Khusus (PK/LK) Pendidikan Dasar dan Menengah Tingkat Nasional, Pembinaan Olimpiade Sains SD Menuju Lomba Tingkat Nasional, Pembinaan Indonesia Sains Festival (ISF) menuju Tingkat Nasional, Pembinaan Dokter Kecil Siswa SD Tingkat Provinsi dan Pembinaan Kader Kesehatan Remaja (KKR) Bagi Pelajar SMA dengan volume total sebesar 145.623 peserta didik.
- e) Pembinaan Kompetensi Guru antara lain berupa kegiatan Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Ujian Nasional SMP, Workshop Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Ujian Nasional SMA Program Matematika, IPA, Bahasa dan Program Sosial, Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar dan Penilik dengan volume total sebesar 4.100 Guru.
- f) Bimtek Penguatan Implementasi Kurikulum 2013

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk mata pelajaran tingkat SMP dan SMA dengan volume total sebesar 1.440 Guru.

- g) Penyelenggaraan dan Partisipasi Lomba Pendidikan yang melibatkan 431 peserta didik antara lain melalui Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Provinsi menuju Tingkat Nasional.
- h) Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Pendidikan yang melibatkan 2.850 siswa antara lain melalui Kegiatan FLS2N dan Olimpiade Olahraga Siswa (O2SN) SMK.
- i) Seleksi dan Pemusatan Latihan Olimpiade Tingkat Nasional yang melibatkan 2.240 peserta didik tingkat SMP/MTs dan SMA/MA antara lain melalui Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP/MTs pada 4 Mata Pelajaran (Matematika, Fisika, Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial), OSN SMA/MA pada 9 Mata Pelajaran (Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Komputer, Astronomi, Ekonomi, Kebumihan dan Geografi), dan Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Jenjang SMA.
- j) Pembinaan dan pengiriman peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing Siswa SMK Tingkat Nasional dengan jumlah peserta sebanyak 14 peserta didik yang terdiri dari 3 orang Bahasa Indonesia, 3 orang Bahasa Inggris, 2 orang Bahasa Mandarin, 2 orang Bahasa Jepang, 2 orang Bahasa Jerman dan 2 orang Bahasa Perancis.
- k) Pengadaan raport siswa SD dan SMP dengan total 400.000 buku yang terdiri dari 300.000 buku raport SD dan 100.000 buku raport SMP.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan dalam program peningkatan kualitas pendidikan antara lain :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan dan Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota Adm. Jakarta Timur tidak dapat dilaksanakan karena waktu Pelaksanaan kegiatan yang sudah lewat (kegiatan lomba yang berjenjang).
- 2) Terjadi gagal lelang, karena :
 - a) Peserta lelang yang tidak memenuhi syarat
 - b) Tidak ada peserta lelang yang mendaftar
 - c) Keterlambatan dalam proses penayangan
- 3) Tidak cukup waktu dalam pelaksanaan (kegiatan fisik) diantaranya :
 - a) Kegiatan Perawatan Gedung SMAN 103 Lanjutan pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b) Kegiatan Perawatan Berat SDN Kramat Jati 25 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c) Kegiatan Revitalisasi Gedung SKB Jakarta Selatan dan Gedung PAUD pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) P3PAUDNI;
- 4) Pencetakan raport PLB tidak dilaksanakan, dikarenakan memakai Kurikulum 2013 (efisiensi).
- 5) Solusi :
 - a) Perlunya koordinasi dan perencanaan yang lebih sinergis antara Dinas Pendidikan dengan Pusat sehingga tidak ada lagi duplikasi kegiatan maupun kode rekening yang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan.
 - b) Percepatan pelaksanaan untuk kegiatan fisik.

10. PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain:

1) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

- a) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kepulauan Seribu
- b) Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah sebesar Rp. 807.450.000.000,- untuk 2.871.565 peserta
- c) Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diluar kuota dan benefit Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 300.000.000.000,-
- d) Sosialisasi dan Promosi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
- e) Validasi Data Kepesertaan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

- a) Penyelesaian 4 Puskesmas Rawat Inap Selain RB yaitu Puskesmas Kecamatan Pulogadung, Matraman, Cakung dan Makasar.
- b) Penyelesaian rehab Total 5 Puskesmas Kelurahan yaitu Puskesmas Kelurahan Rawa Bunga, Penggilingan PIK, Jati I, Halim II dan Kampung Dukuh.
- c) Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- d) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di 15 RSU Kecamatan.
- e) Pengadaan alat kamar operasi di 15 RSU Kecamatan berupa *Electro Cauter*, Lampu Operasi, *Major Set Surgery*, Meja Operasi, Mesin *Anesthesi*, *Minor Set Surgery*, Patient Monitor, *Ventilator* dan *Suction*.

3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan

- a) Pelaksanaan pembinaan upaya pelayanan kesehatan melalui Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit, Pelaksanaan

Sistem Rujukan Puskesmas dan Evaluasi Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK).

- b) Promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) melalui Pembinaan tenaga penyuluh kesehatan, Penilaian pelaksanaan PHBS dan posyandu, Promosi kesehatan melalui media cetak, elektronik dan pameran serta Peningkatan Pengetahuan tentang HIV/AIDS dalam rangka menunjang kelurahan siaga aktif.

4) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

- a) Pengendalian Penyakit antara lain melalui penatalaksanaan imunisasi, pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD dan TB serta peningkatan kesehatan anak.
- b) Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan antara lain melalui peningkatan kualitas program surveilans, penyehatan kualitas air bersih/air minum, pembinaan tempat umum, tempat penjual makanan, rumah sehat dan lingkungan sekolah sehat serta pengelolaan limbah medis.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan pada isu pembangunan budaya multi-kultur antara lain :

- 1) Masih rendahnya pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS pada penduduk usia 15-24 tahun baru mencapai 37% dari target 95%. Untuk itu, diperlukan peningkatan efektifitas koordinasi lintas sektor bersama mitra Pemerintah yaitu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan kegiatan.

2.3.2 Program Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan

1. URUSAN PENDIDIKAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan pendidikan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp11.107.143.458.283,00 dengan total penyerapan sebesar Rp9.134.721.293.653,00 atau 82,24%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini**
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun**
sudah dijelaskan pada program unggulan
- 3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal**
Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal.
- 4) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**
Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidikan**
sudah dijelaskan pada program unggulan
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan**
sudah dijelaskan pada program unggulan
- 7) Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan**
 - a) Penyediaan Biaya Operasional Dewan Pendidikan
 - b) Pendistribusian dan Penghapusan Blanko Ijazah dan SKHUN

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan, antara lain:

- 1) Persentase Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK adalah sebagai berikut :
 - a) SD/MI : 105,71%
 - b) SMP/MTs : 99,97%
 - c) SMA/SMK/MA : 89,33%

- 2) Persentase Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK adalah sebagai berikut :
 - a) SD/MI : 96,50%
 - b) SMP/MTs : 84,46%
 - c) SMA/SMK/MA : 63,75%
- 3) Persentase angka putus sekolah:
 - a) Semakin kecilnya persentase peserta didik putus sekolah tingkat SD sebesar 0,0246% pada tahun 2015.
 - b) Semakin kecilnya persentase peserta didik putus sekolah tingkat SMP sebesar 0,1275% pada tahun 2015.
 - c) Semakin kecilnya persentase peserta didik putus sekolah tingkat SMA/SMK sebesar 0,4142% pada tahun 2015.
- 4) Besar anggaran Program KJP tahun 2015 senilai Rp.2.304.886.914.000,00 terbagi untuk 561.408 Peserta Didik Penerima KJP tahun 2015, sebagai berikut :
 - a) Negeri : 328.183 siswa (58,5%)
 - b) Swasta : 233.225 siswa (41,5%)
- 4) Besar anggaran Program BOP tahun 2015 senilai Rp.1.711.000.000.000,00
- 5) Rerata Nilai UN/USBD tahun 2015 :
 - a) SD : 7,15
 - b) SMP : 7,49
 - c) SMA : 6,94
 - d) SMK : 6,56
- 6) Prestasi Sekolah di tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a) SDN Rawamangun 12: Medali Emas Olimpiade Matematika Internasional
 - b) SMPN 107 : Juara Nasional Sekolah Sehat
 - c) SMP : Juara Umum OSN Tingkat Nasional
 - d) SMAN 3 : Medali Emas Sinematografi ILO
 - e) SMAN 8 : Medali Emas Olimpiade Geografi Internasional
 - f) SMAN 28 : Juara Nasional dan Internasional Robotik

- g) SMAN 3 : Medali Emas Olimpiade Kebumihan Internasional
 - h) SMAN 78 : Medali Emas Paduan Suara se-Asia
 - i) SMANU MHT : Juara Astronomi Tingkat International
 - j) SMK : Juara Umum LKS Tingkat Nasional
 - k) SMK : Juara Umum Debat Bahasa Asing Tingkat Nasional
- 5) Persentase peserta didik penerima BOP Sekolah Negeri sebesar 98,6% di tahun 2015
 - 6) Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar sebesar 100% pada tahun 2015
 - 7) Menurunnya persentase angka buta aksara dari 0.65% pada tahun 2014 menjadi 0,41% pada tahun 2015
 - 8) Dipertahankannya persentase lembaga keterampilan non formal dan informal yang dibina sebesar 100%
 - 9) Meningkatnya jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi baik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK dari 376 sekolah pada tahun 2014 menjadi 372 sekolah pada tahun 2015 yang terdiri dari :
 - a) TK : 9 Sekolah
 - b) SD : 259 Sekolah
 - c) SMP : 73 Sekolah
 - d) SMA : 16 Sekolah
 - e) SMK : 15 Sekolah
 - 10) Persentase kelulusan sekolah
 - a) Dipertahankannya tingkat kelulusan SMP sebesar 99.99 %
 - b) Dipertahankannya tingkat kelulusan SMA sebesar 99.99 %
 - c) Dipertahankannya tingkat kelulusan SMK sebesar 99.99 %
 - 11) Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN)
 - a) Meningkatnya rata-rata nilai UN tingkat SMP/MTs 7,35 pada tahun 2014 menjadi 7,49 di tahun 2015.
 - b) Meningkatnya rata-rata nilai UN tingkat SMA di atas 6.70 pada tahun 2014 menjadi 6,94 di tahun 2015.

- c) Menurunnya rata-rata nilai UN tingkat SMK sebesar 6.90 pada tahun 201 menjadi 6,56 di tahun 2015.
- 12) Meningkatnya persentase jumlah sekolah ramah anak dari 42% di tahun 2014 menjadi 99% pada tahun 2015.
- 13) Dipertahankannya target perbandingan penerimaan peserta didik baru (PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI sebesar Lokal = 45%, Umum = 45%, Prestasi = 5% dan Luar DKI = 5%.
- 14) Persentase gedung sekolah yang berfungsi dengan layak di tahun 2015 sebesar 51,81%.
- 15) Meningkatnya persentase sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dari 95% di tahun 2014 menjadi 99% pada tahun 2015.

2. URUSAN KESEHATAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan kesehatan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp6.705.666.390.381,00 dengan total penyerapan sebesar Rp5.150.287.412.782,00 atau 76,81%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Sudah dijelaskan pada program unggulan

2) Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan pengembangan gizi masyarakat, melalui :

- a) Bimtek PONEB bagi tenaga kesehatan
- b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi
- c) Peningkatan wawasan petugas kesehatan tentang manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK)
- d) Bimtek dan Monev Perawatan Balita Gizi Buruk

- e) Pembinaan Petugas Klinik Gizi
- f) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
- g) Supervisi dan Monev Terkait Program Gizi
- h) Pelaksanaan PONEK dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
- i) Senam Ibu Hamil
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan**
Sudah dijelaskan pada program unggulan
- 4) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah**
Sudah dijelaskan pada program unggulan
- 5) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan**
Sudah dijelaskan pada program unggulan
- 6) Program Kefarmasian, Alat kesehatan dan Makanan & Minuman**
 - a) Pengadaan Obat, Alat dan Bahan Laboratorium serta Pemeliharaan Alat Uji Laboratorium dan Kalibrasi Alat Pengukuran
 - b) Pengadaan Bahan Reagen, Alat dan Bahan Kesehatan Pakai Habis, Obat-obatan, Alat Kedokteran Gigi dan Alat Kesehatan
 - c) Pengadaan Alat Kesehatan, Medis, Non Medis dan Farmasi
 - d) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
 - e) Penyediaan Obat Buffer
 - f) Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan Farmasi
- 7) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan**
Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, melalui :
 - a) Peningkatan dan penilaian kompetensi serta kualitas sumber daya manusia Kesehatan
 - b) Sertifikasi tenaga kesehatan dan penyusunan standar kompetensi tenaga kesehatan

- c) Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan
 - d) Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kesehatan
 - e) Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi Tk Provinsi
 - f) Penyusunan Standar Kompetensi Bidan di Puskesmas
 - g) Penyusunan Standar Kompetensi Dokter Umum di Puskesmas
 - h) Kesesuaian Penerapan Akreditasi ISO 17025
 - i) Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit
- 8) Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana**
- a) Pelayanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Dukungan Kesehatan untuk Event Nasional dan Internasional
 - b) Kepesertaan Pelatihan Antisipasi Penanggulangan Bencana dan Kegawatdaruratan Medik

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan, antara lain:

- 1) Tersedianya dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah untuk 2.871.565 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi DKI Jakarta
- 2) Dipertahankannya cakupan masyarakat miskin dan rentan yang ber-KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan sebesar 100%
- 3) Meningkatnya persentase Kelurahan Siaga Aktif dari 77,53% di tahun 2014 menjadi 78 % di tahun 2015
- 4) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 59,07/1000 di tahun 2014 menjadi 56,54/1000 kelahiran di tahun 2015
- 5) Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2014 sebesar 4,18/1000 menjadi 4,61/1000 Kelahiran Hidup tahun 2015
- 6) Meningkatnya jumlah pasar yang menyediakan pelayanan

kesehatan dari 19 pasar di tahun 2014 menjadi 34 pasar di tahun 2015

- 7) Meningkatnya jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan dari 14 rusun di tahun 2014 menjadi 41 rusun di tahun 2015
- 8) Jumlah Puskesmas rawat inap selain rumah bersalin yang telah ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Umum tingkat Kecamatan sebanyak 15 Puskesmas dari total 26 Puskesmas (57,69%)
- 9) Meningkatnya jumlah tempat tidur kelas tiga di RSUD dari 1.546 unit di tahun 2014 menjadi 2.566 unit di tahun 2015
- 10) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit DBD dari 84,14/100.000 pada tahun 2014 menjadi 49,44 /100.000 pada tahun 2015
- 11) Persentase kasus baru TB paru BTA positif dari 69% tahun 2014 menjadi 80,81% tahun 2015
- 12) Meningkatnya persentase cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA dari 50% di tahun 2014 menjadi 68,2% di tahun 2015
- 13) Dipertahankannya persentase cakupan *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 100%
- 14) Dipertahankannya jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan penyakit tidak menular (PTM) sebanyak 44 Puskesmas.
- 15) Meningkatnya persentase obat generik yang digunakan oleh Puskesmas dari 88% di Tahun 2014 menjadi 91,82% di tahun 2015
- 16) Meningkatnya persentase Obat Rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah sebanyak 65% di tahun 2014 menjadi 98,4% di tahun 2015
- 17) Meningkatnya jumlah pengujian produk makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran dari 15 item di tahun 2014 menjadi 32 item di tahun 2015
- 18) Meningkatnya jumlah SDM Kesehatan non PNS yang

kompetendari 518 orang pada tahun 2014 menjadi 790 orang pada tahun 2015

- 19) Dipertahankannya *response time* penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana, yaitu 15 menit.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan pekerjaan umum, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp9.697.960.178.858,00 dengan total penyerapan sebesar Rp5.346.476.172.975,00 atau 55,13%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan**
Sudah dijelaskan pada Program Unggulan
- 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**
 - a) Pemeliharaan Jalan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur
 - b) Pemeliharaan simpang sebidang dan jalan tak sebidang di Prov. DKI Jakarta
 - c) Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Jembatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**
Sudah dijelaskan pada Program Unggulan
- 4) Program Pengembangan Sistem Drainase**
Sudah dijelaskan pada Program Unggulan
- 5) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**
 - a) Perencanaan Tata Air antara lain : Perencanaan Sodetan Kampung Melayu-KBT, Perencanaan x-1 Aliran Timur dan

Tengah, Studi perluasan Waduk Kelapa Dua Wetan kearah selatan serta Study Potensi Waduk Ciracas Jakarta Timur

- b) Refungsi Sungai/ Kali Sistem Aliran Timur, Tengah dan Barat
- c) Pengerukan Kali/Saluran/Waduk/Situ Aliran Timur, Tengah dan Barat Provinsi DKI Jakarta

6) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

7) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Drainase

- a) Optimalisasi Penggunaan Kendaraan dan Alat-alat berat untuk mendukung Peningkatan kapasitas waduk/kali/saluran
- b) Pemeliharaan *Reservoir Osmosis* (RO) Tahun 2015
- c) Pemeliharaan Peralatan Pengukuran
- d) Pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Laboratorium
- e) Pemeliharaan Rutin dan infrastruktur di Kanal Banjir Timur (KBT)
- f) Monitoring evaluasi pemeliharaan dan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah/*Automatic Water Level Recorder* (AWLR)
- g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Drainase Aliran Timur, Tengah dan Barat
- h) Pembangunan, Penggantian, Peningkatan dan Perbaikan Sistem Pompa Pengendali Banjir, Pintu Air dan Kelengkapannya untuk Aliran Timur, Tengah dan Barat
- i) Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Minyak Pelumas untuk pompa, pintu air dan saringan sampah di Aliran Timur, Tengah dan Barat
- j) Pembangunan Sarana dan Prasarana pengendali banjir yang telah dibebaskan/ditertibkan pada Aliran Tengah dan Barat
- k) Pemeliharaan dan pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, Pintu Air dan kelengkapannya untuk Aliran Timur, Tengah dan Barat

- l) Peninggian Gardu dan Perbaikan Rumah Pompa Aliran Timur, Tengah dan Barat
- m) Pelaksanaan kegiatan Karya Bakti pada Sistem Aliran Tengah
- 8) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan**
Sudah dijelaskan pada Program Unggulan
- 9) Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an**
Sudah dijelaskan pada Program Unggulan
- 10) Program Pengurangan Timbunan Sampah di Sumber**
 - a) Pelayanan Kebersihan Lingkungan, Saluran, Taman dan Makam di 5 wilayah kota dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Kebersihan
 - b) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kebersihan Jakarta melalui Kampanye Gerakan Tidak Buang Sampah Sembarangan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB)
 - c) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) dan Bank Sampah di 5 Wilayah Kota
 - d) Pengelolaan Sampah di 5 Wilayah Kota melalui Gerakan Pungut Sampah sehari Jum'at
- 11) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah**
 - a) Pemilihan dan Persiapan Pembangunan IPAL Domestik Komunal Permukiman Percontohan di Provinsi DKI Jakarta
 - b) Peningkatan Kompetensi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - c) Pembangunan sarana sanitasi pengelolaan air limbah di permukiman
 - d) Pemeliharaan/Perbaikan dan Pengelolaan IPAL di Provinsi DKI Jakarta
 - e) Penilaian Teknis Kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah
 - f) Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal Instalasi Pengolahan Limbah *Septictank* Pulo Gebang dan Duri Kosambi

g) Pelayanan dan Pengoperasian Pengelolaan Limbah
Septictank

**12) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan**

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

**Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan
pekerjaan umum, antara lain :**

- 1) Terpeliharanya simpang sebidang dan jalan tak sebidang di Prov. DKI Jakarta melalui pekerjaan aspal dengan luas 113.838,4 m² dan panjang 16.262,62 m dilokasi FO Daan Mogot, FO. Cideng, FO. Pesanggrahan 1, FO. Pesanggrahan, FP Grogol (Kupingan), FO. R.E. Martadinata, FO. Yos Sudarso, FO. Lapangan Ross, FO. Kampung Melayu, FO. Pahlawan Revolusi, FO. Kembang Kerep, FO. Kebon Jeruk, FO. Pramuka Stage 1, FO. Senen, FO. Karet Mas Mansyur, FO. Galur, FO. Latuharhary 1, FO. Latuharhary 2, FO. Cempaka Putih (Kupingan), FO. Rawamangun (Kupingan)
- 2) Terpeliharanya jalan di 5 wilayah kota melalui pekerjaan aspal dengan luas 215.926 m² dan panjang 19.712,93 m dilokasi : Jl. Kramat Raya , Jl. Salemba Raya, Jl. Danau Sunter Utara dan Selatan , Jl. Puri Indah, Jl. Panjang, Jl. Kembangan Murni Barat dan Jl. Puri Kembangan Barat, Jl. Mampang Prapatan, Jl. Rasuna Said, Jl. Bekasi Timur dan Jl. I Gusti Ngurah Rai
- 3) Terlaksananya pembebasan tanah untuk MRT, Koridor Jl. Lebak Bulus - Bundaran Senayan seluas 4.391 m²
- 4) Terlaksananya pembebasan tanah untuk jalan, jembatan dan FO/UP di Jakarta Timur seluas 8.158 m² meliputi Frontage Tol Akses menuju Terminal Pulo Gebang (2.643 m²), Persimpangan Jembatan & Trace Jalan / Simpang Susun & Kupingannya dari Sentra Primer ke Pulo Gebang - Bojong Rangkong (440 m²), KBT Koridor Wilayah Timur (4.910 m²) dan Jl. Kalibata (165 m²)
- 5) Terlaksananya pembebasan tanah untuk jalan, jembatan dan FO/UP di Jakarta Pusat yang berlokasi di Jl. Bungur Besar Raya

seluas 667 m²

- 6) Terlaksananya pembebasan tanah untuk jalan, jembatan dan FO/UP di Jakarta Barat seluas 1.252 m² untuk pelebaran Jl. Joglo Raya dari Jl. Pos Pengumben seluas 1.066 m² dan pembangunan Jl. Arjuna Selatan seluas 186 m²
- 7) Terlaksananya pembebasan tanah untuk jalan, jembatan dan FO/UP di Jakarta Utara seluas 20.690 m² meliputi Jalan Tembus dari Jl. Kelapa Gading Timur - Terminal Pulo Gadung (1.357 m²), Pembangunan/pelebaran *Trace* Jl. Bekasi Raya (1.907 m²), *Trace* Koridor BKT & Fasilitasnya dari Kali Cipinang s.d Laut Jawa di Kelurahan Marunda (13.174 m²) dan Kelurahan Rorotan (4.219 m²), Jalan Tembus dari Jl. Kompi Udin - Jl. Akordion (33 m²)
- 8) Terlaksananya pembebasan tanah untuk jalan dari Jl. Mabes Hankam - Jl. Raya Setu seluas 1.240 m² di Kelurahan Bambu Apus (696 m²) dan Kelurahan Setu (544 m²)
- 9) Terbangunnya sarana sanitasi pengelolaan air limbah permukiman di kawasan Kebagusan 3 Kelurahan Kebagusan dan Rusun Semper Kelurahan Semper Barat;
- 10) Meningkatnya persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu dari 82,07% tahun 2014 menjadi 82,77% tahun 2015
- 11) Bertambahnya jumlah TPS yang mengarah pada TPS standard ramah lingkungan yang tersedia menjadi 43 TPS di tahun 2014 menjadi 47 TPS di tahun 2015
- 12) Terpeliharanya sistem jaring sampah (*trap*) di pesisir 10 pulau berpenghuni dan 3 pulau tidak berpenghuni sepanjang 7.500 m¹
- 13) Diterapkannya sistem jaring sampah (*trap*) di 101 titik lokasi pada 14 sistem sungai/kali
- 14) Terlaksananya pembebasan lahan untuk TPS di Kelurahan Senen seluas 953 m²
- 15) Meningkatnya pelayanan kebersihan, lingkungan, taman dan makam di 5 Wilayah Kota dari 178,37 ton/hari atau 65.103,52 ton/tahun pada tahun 2014 menjadi sebanyak 193,67 ton/hari

atau 70.688,71 ton/tahun pada tahun 2015

- 16) Meningkatnya jumlah sampah yang terangkut ke TPST Bantar Gebang dari 5.664,48 ton/hari atau 2.067.534,86 ton/tahun pada tahun 2014 menjadi sebanyak 6.419,14 ton/hari atau 2.342.987,41 ton/tahun pada tahun 2015.
- 17) Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kegiatan *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) di 5 wilayah kota administrasi dan kabupaten Kepulauan Seribu dan Bank Sampah di 5 Wilayah Kota sebanyak 26 bank sampah

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan perumahan rakyat, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp3.347.554.408.362,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.991.869.723.424,00 atau 59,50 %

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman

- a) Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rusun
- b) Penguatan Masyarakat Penghuni Rusun
- c) Pemberdayaan Masyarakat Penghuni Rusun
- d) Pengelolaan Perumahan dan Rumah Susun
- e) Penyelenggaraan dan Partisipasi *Event* Perumahan

2) Program Penyediaan Perumahan Rakyat

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat

- a) Pembangunan dan Penyelesaian Masjid, Musholla dan Sarana Prasarana Penunjang di Rusun
- b) Pematangan Tanah, Turap dan Pagar Lokasi Rumah Susun
- c) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Rusun
- d) Pembangunan Sumur Air Tanah Dalam (*deep well*) di Rusun

- e) Pemberdayaan Warga Rusunawa DKI Jakarta melalui pemberian keterampilan
- f) Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah susun
- 4) Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun**
 - a) Penyiapan dan relokasi warga yang terkena program sarana dan prasarana kota
 - b) Pemberdayaan Warga Rusunawa DKI Jakarta melalui pelatihan keterampilan
- 5) Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun**

Perbaikan Rumah Susun di Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur
- 6) Program Koordinasi Serah Terima Rusun Yang dibangun Oleh APBN**

Pada tahun 2014 terdapat 518 unit rumah susun yang dibangun oleh APBN untuk Provinsi DKI Jakarta, namun belum diserahkan.
- 7) Program Pembangunan Gedung Pemda**
 - a) Pembangunan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Pembangunan Masjid Raya Jakarta dan Masjid di Lingkungan Kantor Pemda
 - c) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang keamanan Ibukota
 - d) Pembangunan dan Penyelesaian 6 Gedung Kantor UPPD
- 8) Program Pemeliharaan Gedung Pemda**
 - a) Rehab Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Rehab Gedung Penunjang Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
 - c) Rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang keamanan Ibukota
 - d) Rehab Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Selatan

- e) Rehab 2 Gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah tingkat kota
- f) Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Pemda
- 9) Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda**

Pembinaan dan Sosialisasi Perumahan dan Gedung Pemda melalui pendampingan kegiatan Adiupaya Puritama

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan rakyat, antara lain :

- 1) Terlaksananya Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat (640 Unit)
- 2) Terlaksananya Penguatan Masyarakat Rumah Susun Jati Rawasari
- 3) Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Rumah Susun Cakung Barat
- 4) Terlaksananya Pembinaan Penghunian Rumah Ber-SIP/Rumah VB (Rumah Peninggalan Belanda)
- 5) Terlaksananya Pameran Pekan Rakyat Jakarta 2015
- 6) Terbangunnya Masjid, Musholla dan Sarana Prasarana Penunjang di Rusun Pulo Gebang dan Musholla Rusun Komarudin sebanyak 3 unit
- 7) Terbangunnya Tempat Pengolahan Sampah Rusun Pulo Gebang dan Rusun Cakung Barat
- 8) Terbangunnya Sumur Air Tanah Dalam (*deep well*) di Rusun Tambora dan Rusun Flamboyan
- 9) Terlaksananya Pematangan Tanah dan Turap Lokasi Rusun Blok Nagrak, Rusun Penggilingan dan Rusun Rawa Bebek
- 10) Terlaksananya Pematangan Tanah, Turap dan Pagar Lokasi Rumah Susun Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara
- 11) Terlaksananya Pemagaran Lokasi Rumah Susun di lokasi Kel. Pulo Gebang, Kel. Penggilingan, Jl. Tengki Kel. Cipayung dan Kel.

Cakung

- 12) Terlaksananya Pemberdayaan Warga Rusunawa DKI Jakarta melalui pemberian keterampilan pengolahan ikan , membuat cap, menjahit, membuat kue dan setir mobil
- 13) Terlaksananya Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah susun di Kel. Pondok Kopi (Jakarta Timur), Kel. Cengkareng Barat (Jakarta Barat) dan Jl. Yos Sudarso (Jakarta Utara)
- 14) Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun Kapuk Muara dan Penjaringan Jakarta Utara
- 15) Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun Bulak Wadon, Jakarta Barat
- 16) Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun Pulo Jahe dan Cipinang Muara Jakarta Timur
- 17) Terbangunnya Gedung Dinas Teknis Jatibaru, Gedung BPMPKB, Gedung KONI, Gedung Pemda Daan Mogot serta Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 18) Terbangunnya Masjid Raya Jakarta, Masjid Dinas Kesehatan, Masjid dan Renovasi Blok D Balaikota
- 19) Terbangunnya prasarana lapangan tembak group 3 Kopassus Cijantung serta Mess dan GOR TNI AU di Halim
- 20) Terlaksananya Rehab Asrama Group 3 Kopassus Cijantung
- 21) Terlaksananya Pembangunan dan Penyelesaian Gedung Kantor UPPD Penjaringan, Mampang Prapatan, Pesanggrahan, Kelapa Gading, Grogol Petamburan dan Koja
- 22) Terlaksananya Rehab Total Kantor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 23) *Basic Design* Wisma Pondok Karya Pembangunan
- 24) Terlaksananya Rehab Gedung PPMKRI, VIP/VVIP Gedung Suma I s/d IV dan Yayasan Santi Rama
- 25) Terlaksananya Rehabilitasi Asrama AURI Halim Perdana Kusuma dan Rutan Pondok Bambu
- 26) Terlaksananya Rehab Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Selatan

- 27) Terlaksananya Rehab Gedung KPUD Jakarta Utara dan KPUD Jakarta Barat
- 28) Terlaksananya Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Pemda
- 29) Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Perumahan dan Gedung Pemda melalui pendampingan kegiatan Adipura Puritama

5. URUSAN PENATAAN RUANG

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan penataan ruang, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp245.409.889.829,00 dengan total penyerapan sebesar Rp220.728.243.828,00 atau 89,94%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Tata Ruang

- a) Penyempurnaan Masterplan KEK Marunda
- b) Pengumpulan Data Pendukung RDTR dan Peraturan Zonasi
- c) Panduan Rancang Kota Kawasan TOD Manggarai
- d) Analisis Kebutuhan Ruang Tiap Zona Peruntukan Lahan Wilayah Utara dan Selatan
- e) Pencetakan Peraturan Daerah RDTR dan Peraturan Zonasi dan Lampirannya

2) Program Peningkatan Pelayanan Ketataruangan

Penyusunan *Trace* Infrastruktur dan Utilitas

3) Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan

- a) Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan
- b) Penegakan sanksi peraturan Dinas Penataan kota (Perda No 1 Tahun 2014 Tentang RDTR & PZ dan Perda No 7 Tahun Tentang Bangunan Gedung)
- c) Pelaksanaan justisi dan operasi justisi bangunan

- 4) **Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang**
Pendataan Ruang Kota 3D Wilayah Utara dan Selatan
- 5) **Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung**
Pelaksanaan Sidang Konsultasi Bidang Perencanaan Bangunan Gedung Oleh Tim Ahli (TPAK,TPKB dan TPIB)
- 6) **Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang**
Penyusunan Profil Jakarta Membangun Tingkat Kecamatan
- 7) **Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang**
 - a) Pengadaan Peralatan Ukur
 - b) Pembuatan Peta *Bathymetri* Pulau Permukiman
 - c) Pemuktahiran Peta Dasar Pulau Permukiman di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 8) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Penataan Ruang**
Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pelatihan Arc GIS)
- 9) **Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Penataan Ruang**
 - a) Updating Peta Dasar
 - b) Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan penataan ruang, antara lain :

- 1) Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci Tata Ruang, peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dalam bentuk :
 - a) Dokumen Rancangan Penyempurnaan Masterplan KEK Marunda.
 - b) Dokumen Pengumpulan Data Pendukung RDTR dan Peraturan Zonasi

- c) Panduan Rancang Kota Kawasan TOD Manggarai
 - d) Dokumen Analisis Kebutuhan Ruang Tiap Zona Peruntukan Lahan Wilayah Utara dan Selatan
- 2) Tersedianya buku Peraturan Daerah RDTR dan Peraturan Zonasi DPK sebanyak 500 buku.
 - 3) Bertambahnya jumlah bangunan gedung yang dibongkar karena melakukan pelanggaran melalui kegiatan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan. Jumlah bangunan yang dibongkar pada tahun 2015 sebanyak 986 bangunan
 - 4) Tersedianya Database ruang kota 3D dan Peta visualisasi untuk $\pm$ 600 bangunan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Selatan
 - 5) Tersedianya buku dan video tentang potensi peruntukan dan konsep pengembangan daerah di kelurahan Rawa Buaya
 - 6) Meningkatnya persentase rencana pembangunan gedung yang lulus sidang tim ahli melalui kegiatan Pelaksanaan Sidang Konsultasi Bidang Perencanaan Bangunan Gedung Oleh Tim Ahli (TPAK, TPKB dan TPIB). Jumlah berkas yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 381 berkas dan berkas yang lulus sebanyak 195 berkas sehingga persentase rencana pembangunan gedung yang lulus sidang tim ahli adalah 51,18% dibandingkan pada tahun 2015 jumlah berkas yang masuk sebanyak 515 sedangkan berkas yang lulus sebanyak 359 berkas sehingga persentase rencana pembangunan yang lulus sidang tim ahli adalah 69,71% atau meningkat 18,53%
 - 7) Tersedianya alat ukur Distometer sebanyak 60 unit untuk pengawasan bangunan
 - 8) Tersedianya 2 peta *Bathymetri* untuk Pulau Untung Jawa dan Pulau Tidung dan 3 Peta dasar untuk Pulau Untung Jawa, Pulau Pari serta Pulau Tidung melalui kegiatan Pelayanan Ketatakotaan Kepulauan Seribu
 - 9) Bertambahnya SDM Dinas Penataan Kota dengan kompetensi

yang semakin meningkat melalui kegiatan Pengembangan SDM
Jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam pelatihan GIS tingkat basic 40 orang, tingkat advance sebanyak 20 orang dan tingkat custom 12 orang pada tahun 2015

- 10) Terupdatenya jumlah lembar peta dasar melalui kegiatan Updating Peta Dasar

Jumlah lembar peta dasar untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang terupdate pada tahun 2015 adalah sebanyak 237 blad

- 11) Terdatanya jumlah kelurahan yang terdata P4T melalui kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan

Jumlah kelurahan yang terdata pada tahun 2014 adalah sebanyak 199 Kelurahan sedangkan pada tahun 2015 adalah sebanyak 8 kelurahan sehingga total keseluruhan kelurahan yang terdata sampai dengan tahun 2015 adalah 207 Kelurahan

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan perencanaan pembangunan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp112.122.214.401,00 dengan total penyerapan sebesar Rp90.502.708.380,00 atau 80,72 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

- a) Pelaksanaan Peningkatan Perencanaan dan Monev Pembangunan Bidang Perekonomian
- b) Perencanaan Perekonomian Daerah

2) Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan Peningkatan Perencanaan dan Monev Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

3) Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur

Pelaksanaan Peningkatan Perencanaan dan Monev
Pembangunan Bidang Pemerintahan

4) Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Diklat Internship Intergrated Urban Water Management (*sister city* Jakarta - Rotterdam)

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan

- a) Pelaksanaan Peningkatan Perencanaan dan Monev Pembangunan Bidang Keuangan
- b) Pelaksanaan Evaluasi, Pengendalian dan Laporan Pembangunan
- c) Penyusunan Dokumen Perencanaan
- d) Penyelesaian Dokumen Lampiran RAPBD Tahun 2015
- e) Penyusunan Dokumen RAPBD P 2015
- f) Penyusunan Dokumen RAPBD 2016
- g) Penyusunan Review Perda RPJMD DKI Jakarta
- h) Penyelenggaraan Musrenbang
- i) Penyiapan *Masterplan Smart City*

6) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Koordinasi dan Monev Perencanaan Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

7) Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Perencanaan Pembangunan

- a) Pengembangan dan Penyediaan Dukungan Sistem Informasi Perencanaan
- b) Penyediaan Dukungan Data dan Informasi (*Open Data*) Perencanaan Pembangunan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan, antara lain:

- 1) Termanfaatkannya hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian sebesar 85%.
- 2) Dipertahankannya persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang perekonomian sebesar 100%.
- 3) Tersusunnya asumsi ekonomi makro yang mendasari penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2015 dan Tahun 2016, serta bahan masukan perencanaan pembangunan terkait perekonomian daerah.
- 4) Termanfaatkannya hasil koordinasi rencana pembangunan kesejahteraan rakyat sebesar 85%.
- 5) Dipertahankannya persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat sebesar 100%.
- 6) Termanfaatkannya hasil koordinasi rencana pembangunan pemerintahan sebesar 85%.
- 7) Dipertahankannya persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang pemerintahan sebesar 100%.
- 8) Meningkatnya kompetensi SDM perencana dan organisasi perencana sebesar 75%.
- 9) Termanfaatkannya hasil koordinasi rencana pembangunan keuangan sebesar 85%.
- 10) Dipertahankannya persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang keuangan sebesar 100%.
- 11) Dipertahankannya persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen rencana pembangunan sebesar 100%.
- 12) Dipertahankannya persentase ketepatan waktu penyampaian APBD sebesar 100%.
- 13) Dipertahankannya persentase kualitas perencanaan dan pengendalian perencanaan sebesar 100%.
- 14) Dipertahankannya persentase sistem informasi perencanaan pembangunan sebesar 100%.

- 15) Dipertahankannya persentase implementasi rencana pembangunan sebesar 100%.
- 16) Tersusunnya RKPD Tahun 2016 dengan turut melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.
- 17) Meningkatnya usulan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan Tahun 2016 yang terakomodir sebesar 45,44% dari target yang ditetapkan sebesar 34%.
- 18) Tersusunnya Rencana Induk pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta yang sistematis, logis dan kondisional sebagai acuan dan pedoman bagi perencanaan.
- 19) Termanfaatkannya hasil koordinasi rencana pembangunan prasarana sarana kota dan lingkungan hidup sebesar 85%.
- 20) Dipertahankannya persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang prasarana sarana kota dan lingkungan hidup sebesar 100%.

7. URUSAN PERHUBUNGAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan perhubungan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp1.123.592.619.721,00 dengan total penyerapan sebesar Rp681.665.804.908,00 atau 60,67%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan**
Sudah dijelaskan pada program unggulan
- 2) Program Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan**
 - a) Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b) Pengendalian Lalu Lintas Pada Kegiatan *Car Free Day*.
 - c) Pengendalian Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
 - d) Pengadaan Unit Lampu Lalu Lintas Jenis LED

- e) Pembayaran Biaya Listrik Lampu Lalu Lintas dan Perangkat Elektronik Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta untuk 171 titik lampu lalu lintas, 41 CCTV dan 3 VMS (*Variable Message Sign*)
- f) Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta
- g) Peningkatan Lampu Lintas Kebutuhan *Emergency*
- 3) Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan**
 - a) Pengadaan Mobil dan Sepeda Motor Patroli
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
 - c) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada UP PKB Cilincing, Ujung Menteng dan Pulogadung
 - d) Perawatan, Perbaikan, kalibrasi dan sertifikasi alat uji PKB Pada UP PKB Cilincing, Ujung Menteng dan Pulogadung.
 - e) Penyediaan Spare Parts dan Penunjang Alat Uji PKB pada UP PKB Cilincing, Ujung Menteng dan Pulogadung
- 4) Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan**
Pembangunan Jalur Sepeda di Jakarta Pusat
- 5) Program Pembangunan Transportasi Perairan**
 - a) Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Laut/Air
 - b) Revitalisasi Kapal Ojeg Kepulauan Seribu
 - c) Penyediaan BBM, Docking dan Pelayanan Kapal Patroli 3
 - d) Pelayanan Perairan dan Pelabuhan
 - e) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan
 - f) Docking Kapal Catamaran 2 dan 3
 - g) Docking Kapal Patroli 1, 4 dan Kerapu 1
 - h) Perbaikan dan Peningkatan Fasilitas Dermaga
- 6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**
 - a) Pengadaan Sarana Prasarana Perhubungan
 - b) Pengadaan Mobil Panggung

- c) Pengadaan Stok Material Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung
- d) Penggantian dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
- e) Pembangunan Guard Rail di Wilayah DKI Jakarta
- f) Pembangunan Pagar Penunjang Keselamatan di Koridor Busway dan Wilayah DKI Jakarta

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan, antara lain :

- 1) Terlaksananya Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap 120.895 kendaraan yang melanggar selama tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut: 55.670 Kendaraan yang ditilang, 51.584 Kendaraan Roda 2 dan 4 terkena Operasi Cabut Pentil, 8.609 Kendaraan yang diderek, 1.318 Kendaraan yang diangkut, 3.714 Kendaraan Stop Operasi.
- 2) Terlaksananya Pengendalian Lalu Lintas Pada Kegiatan Car Free Day di 5 Wilayah Kota.
- 3) Terlaksananya Pengendalian Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
- 4) Terlaksananya Pengadaan sebanyak 97 Unit Lampu Lalu Lintas Jenis LED.
- 5) Terpenuhinya Pembayaran Biaya Listrik Lampu Lalu Lintas dan Perangkat Elektronik Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta untuk 171 titik lampu lalu lintas, 41 CCTV dan 3 VMS (*Variable Message Sign*)
- 6) Terpeliharanya Lampu Lalu Lintas sebanyak 460 titik di 5 wilayah Kota
- 7) Terlaksananya Peningkatan Lampu Lintas Kebutuhan Emergency sebanyak 3 sistem di 19 titik untuk 5 wilayah Kota.
- 8) Terlaksananya Pengadaan Sepeda Motor Patroli sebanyak 143 unit
- 9) Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Mobil Rescue sebanyak 1 Unit.

- 10) Terlaksananya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Pada UP PKB Cilincing, Ujung Menteng dan Pulogadung
- 11) Terlaksananya Perawatan, Perbaikan, kalibrasi dan sertifikasi alat uji PKB Pada UP PKB Cilincing, Ujung Menteng dan Pulogadung.
- 12) Tersedianya Spare Parts dan Penunjang Alat Uji PKB Pada UP PKB Cilincing, Ujung Menteng dan Pulogadung
- 13) Tersedianya BBM, Docking dan Pelayanan Kapal Patroli 3
- 14) Terpenuhinya Pelayanan Perairan dan Pelabuhan sebanyak 121 penumpang per hari oleh 6 Kapal Dinas Perhubungan dan Transportasi
- 15) Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan
- 16) Terlaksananya Docking Kapal Catamaran 2 dan 3
- 17) Terlaksananya Docking Kapal Patroli 1, 4 dan Kerapu 1
- 18) Terlaksananya Perbaikan dan Peningkatan Fasilitas Dermaga di Kabupaten Kepulauan Seribu.
- 19) Terlaksananya Pengadaan Mobil Panggung sebanyak 1 (satu) Unit
- 20) Terlaksananya Pengadaan Stok Material Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung
- 21) Terlaksananya Penggantian dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta
- 22) Terlaksananya Penggantian dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas, Jenis Rambu Perintah, Rambu Petunjuk, Rambu Larangan dan Rambu Peringatan di Jalur Busway sebanyak 175 Unit
- 23) Terlaksananya Pembangunan Guard Rail di Wilayah DKI Jakarta sepanjang 2.044 m'.
- 24) Terlaksananya Pembangunan Pagar Penunjang Keselamatan di Koridor Busway dan Wilayah DKI Jakarta sepanjang 457 m'

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan lingkungan hidup, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp6.188.035.122.779,00 dengan total penyerapan sebesar Rp3.850.616.853.520,00 atau 62,23%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- a) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Limbah B3
- b) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pencemaran Udara dan Air
- c) Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan
- d) Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Penataan Hukum Lingkungan
- f) Pengendalian Amdal, UKL-UPL dan SPPL

2) Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lingkungan Hidup

3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a) Partisipasi Event Lingkungan Hidup
- b) Penghargaan Lingkungan Hidup.

4) Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan

- a) Pemeliharaan Hutan Kota dan Hutan Mangrove
- b) Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota Interaktif di Jakarta Timur
- c) Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

- d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Hutan Kota dan Hutan Mangrove
 - e) Peningkatan Penghijauan RTH dalam rangka Asean Games
 - f) Pengadaan Lahan untuk Hutan Kota di Jakarta
 - g) Perencanaan Penurapan dan Pengerukan Danau Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat
 - h) Perencanaan Perluasan Hutan Kota Rawa Buaya
 - i) Perencanaan Pagar Pengamanan dan Gapura Hutan Kota Kel. Cipayung
- 5) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
- 6) Program Konservasi Flora dan Fauna**
Pembangunan Pengamanan Sampah di *Ecomarine*
- 7) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Kelautan**
Rehabilitasi Ekosistem Laut
- 8) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup**
- a) Pemeliharaan Kios dan Food Court Sentraflora Semanan
 - b) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana BPP Kembangan
 - c) Pengamanan dan Kebersihan Sentraflora Semanan
 - d) Pengadaan Sarana Prasarana Pemakaman Jakarta Pusat
- 9) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman**
Sudah dijelaskan pada program unggulan.
- 10) Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman**
- a) Pelaksanaan Penertiban Taman dan Makam
 - b) Pembangunan Taman Interaktif/Terpadu PKK 5 Wilayah Kota
 - c) Pemeliharaan/ Penataan Taman dan Jalur Hijau 5 Wilayah Kota
 - d) Penanganan Segera Pertamanan dan Pemakaman

- e) Pembuatan Sertifikasi Tanah Aset Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- f) Pelayanan Pemakaman
- g) Pemeliharaan dan Penataan Pemakaman di 5 Wilayah Kota
- h) Pembayaran Hutang Pihak ke-3 untuk Kegiatan Perbaikan Pagar Taman Tebet Sisi Utara dan Sisi Selatan, Jakarta Selatan.

11) Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota

- a) Pembangunan dan Penataan Ornamen Keindahan Kota
- b) Pemeliharaan Air Mancur dan Ornamen kota, jam kota dan lampu taman, sarana penyiraman
- c) Pemeliharaan Tanaman Dekorasi, Tanaman pada Kerombong, *Green Wall* dan *Green Column*

12) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman

Sudah dijelaskan pada program unggulan.

13) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman

Pengadaan Sarana Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup, antara lain :

- 1) Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya sebanyak 80 Titik Pantau pada 2015 dari 80 titik pantau pada 2014 di 5 wilayah Kota
- 2) Meningkatnya pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebanyak 138 pada tahun 2015 dari 43 kasus pengaduan pada tahun 2014.
- 3) Termonitornya 581 kegiatan usaha yang memenuhi baku mutu air limbah atau sebesar 290 % dari total target pada RPJMD

sebanyak 200 kegiatan usaha pada 2015 meningkat dari 193 kegiatan usahayang termonitor pada tahun 2014

- 4) Penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan sebanyak 114 ijin pembuangan air limbah, 157 ijin tempat pembuangan sementara limbah B3 dan 543 ijin pemanfaatan air tanah pada tahun 2014
- 5) Meningkatnya proses Penegakan hukum lingkungan hidup yang tertangani sebanyak117 kasus pada tahun 2014 menjadi 510 kasus pada tahun 2015 yang terdiri dari 125 kasus penanganan sanksi administrasi, 17 kasus pidana lingkungan dan 324 lokasi Kawasan Dilarang Merokok.
- 6) Meningkatnya informasi kualitas udara ambient dari 24 pemantauan pada tahun 2014 menjadi 36 kali pemantauan pada tahun 2015 yang terdiri dari 9 stasiun pemantauan kualitas udara dalam 4 periode pengukuran di 5 wilayah Kota.
- 7) Meningkatnya pemantauan kualitas air tanah dari 150 titik lokasi pada tahun 2014 menjadi200 titik lokasi pada tahun 2015 yang meliputi kualitas air laut/ muara teluk Jakarta dan kualitas situ/waduk
- 8) Meningkatnya objek baku mutu emisi sumber tidak bergerak (cerobong) yang termonitor dari 241 kegiatan usaha pada tahun 2014 menjadi 340 kegiatan usaha pada tahun 2015(113 %)
- 9) Termonitornya baku mutu emisi sumber bergerak (kendaraan bermotor) sebanyak 7.500 kendaraan bermotor dari total target 6.000 kendaraan bermotor (125 %) dari kondisi 9.577 kendaraan pada tahun 2014
- 10) Terlaksananya pemantauan kualitas udara pada pelaksanaan HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor)sebanyak 78 kali pada tahun 2015 dan tahun 2014
- 11) Penuhnya dunia usaha dalam pengolahan limbah B3 dengan 157 ijin yang diterbitkan pada tahun 2014
- 12) Meningkatnya pengendalian pencemaran limbah B3 dari 129 kegiatan usaha pada tahun 2014 menjadi364 kegiatan usaha pada tahun 2015

- 13) Meningkatnya jumlah dokumen rekomendasi lingkungan (AMDAL) yang diterbitkan dari 91 dokumen pada tahun 2014 menjadi 120 dokumen pada tahun 2015
- 14) Terlaksananya pengawasan implementasi dokumen Lingkungan pada tahap konstruksi dan operasi sebanyak 1.143 dokumen pada tahun 2015.
- 15) Pengelolaan dampak kegiatan pembangunan sebanyak 844 dokumen pengelolaan lingkungan kegiatan usaha pada tahun 2014 menjadi
- 16) Penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan pada 2 lokasi kegiatan reklamasi di Pantura Jakarta pada tahun 2014
- 17) Ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam mengelola kinerja IPAL nya sebanyak 114 ijin pada tahun 2014
- 18) Monitoring pemanfaatan air tanah pada 85 sumur pantau /AWLR, 4.447 pelanggan air tanah, 41 lokasi pemboran, dan 150 lokasi sumur eksisting pada tahun 2014 (Dinas Tata Air)
- 19) Terlaksananya peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 3 kelompok (5 Kota Administrasi Peserta Adipura, 16 sekolah peserta Adiwiyata dan 7 peserta Kalpataru) pada tahun 2015
- 20) Terlaksananya peran serta dunia usaha dalam ketaatan pengelolaan lingkungan melalui Program Peringkat Perusahaan (PROPER) sebanyak 104 kegiatan usaha pada tahun 2015
- 21) Meningkatnya pemantauan pengelolaan limbah lingkungan terhadap 19 Usaha Skala Kecil (USK) pada tahun 2014 menjadi 143 USK pada tahun 2015.
- 22) Pencemaran air limbah *domestic* di 10 kelurahan pada tahun 2014
- 23) Konservasi air tanah dengan pengadaan meter air sebanyak 1.092 unit dan membangun 2 unit sumur pantau pada tahun 2014
- 24) Meningkatnya sarana laboratorium lingkungan dengan pengadaan 10 peralatan laboratorium, 100 jenis reagen dan

tertanganinya IPAL dan Limbah B3 Laboratorium BPLHD pada tahun 2015 dari kondisi pengadaan 10 peralatan laboratorium, 92 jenis reagen dan tertanganinya IPAL dan Limbah B3 Laboratorium BPLHD pada tahun 2014

- 25) Pelaksanaan Pengamanan Taman di 5 Wilayah Kota Administrasi (Jakarta Barat, Timur, Pusat, Selatan dan Utara),
- 26) Pelaksanaan Patroli Penertiban Taman dan Makam di Provinsi DKI Jakarta dan Pelaksanaan Penertiban TPU di Wilayah Jakarta Timur (TPU Pengiilingan dan TPU Prumpung)
- 27) Penanganan Segera Penertiban dan Pengamanan ;
 - a) Taman hadiah utama jakbar,
 - b) Kali sekretaris, latumenten, jakbar,
 - c) Penertiban JH Jl. Kramat Jati,
 - d) JH Hijau Jl. UKA.
- 28) Pembangunan Taman Interaktif/Terpadu PKK 5 Wilayah Kota sebagai berikut:
 - a) Pembangunan RTH Baru sebagai berikut Jl. Bina Warga, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan(6,578m²), Jl. Danau Sunter Selatan RT 017/05 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tj. Priok, Jakarta Utara (1,989m²), Jl. Manunggal II Komp. Kodam Jaya Kelurahan Cipinang Kecamatan Makassar, Jakarta Timur (1.524,88m²), Jl. Menteng RW 06 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan (2,428m²), Jl. Pondok Kelapa Raya (Palem Indah Raya) Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (1,626m²), Jl. PPA Depsos I Bambu Apus(3,428m²) dan Jl. TB Simatupang TJ. Barat(2,106 m²)
 - b) Pembangunan Taman Interaktif Jagakarsa, Jakarta Selatan (8,533 m²) dan Jl. Kalibaru Timur VI Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (511,81 m²)
 - c) Pembangunan Taman RTH Jl. Centex Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur(544m'), Jl. Giri Kencana Kelurahan Cilangkap,

Jakarta Timur(620m'), Jl. Gunung Balong Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan (169m'), Jl. Jati Murni, Jakarta Selatan (179m'), Jl. Kahfi II, Jakarta Selatan(294m'), Jl. Kampung Dukuh Kelurahan Dukuh, Jakarta Timur (213m'), Jl. Kramat Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan(239,50m'), Jl. Madrasah Bawah Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan (195,00m'), Jl. Raya Jembatan Tiga Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara (1.250m'), Jl. Tol Lingkar Luar (133m'), Kampung Cipadak, Jakarta Selatan (205m') dan Kelurahan Cipadak RT 012 RW 01, Jakarta Selatan (418m')

- d) Peningkatan Taman Duri Pulo, Jakarta Pusat(2.252m²), Peningkatan Taman Sena Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (6.617 m²) dan Peningkatan Taman Walang Baru Kecamatan Koja, Jakarta Utara(3.375 m²)
- 29) Pemeliharaan/Penataan Taman dan Jalur Hijau 5 Wilayah Kota, sebagai berikut:
 - a) Pemeliharaan Taman seluas 1.628.181,47 m²
 - b) Pengadaan Tanaman sebanyak 68.678 pot jenis palm kuning, palm camedoria, bromelia, sirih gading dan bougenville.
- 30) Penanganan Segera Pertamanan dan Pemakaman berupa
 - a) Pemberdayaan Asuransi Akibat Bencana sebanyak 29 klaim
 - b) Pembuatan Dekorasi Umum untuk Acara Gubernur, Acara Kepala Negara, Hari Raya Nasional, Apel Karyawan, Acara Dharma Wanita di 4 lokasi
 - c) Penopangan/Pemangkasan/Perawatan Pohon dan Penanganan Pohon Tumbang sebanyak 3.340 pohon
 - d) Perbaikan dan Peningkatan Kerombong, Green Wall dan Green Column sebanyak 4 jenis
 - e) Perbaikan dan Peningkatan Ornamen Kota, Air Mancur, Sarana Penyiraman, Jam Kota dan Lampu Taman sebanyak 5 jenis
 - f) Perbaikan/Penggantian Tanaman dan Sarana Kelengkapan

Jalur Hijau Kota di 23 lokasi

- g) Perbaikan/Penggantian Tanaman dan Sarana Kelengkapan Taman Kota di 18 lokasi
 - h) Penopongan Pohon Bidang Taman di 32 lokasi
 - i) Penanganan Segera Taman Kota di 13 lokasi
- 31) Pembuatan Sertifikasi Tanah Aset Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- Lokasi pensertifikatan aset tanah sebanyak 7 bidang:
- 3 Bidang Tanah RTH di Jl. Kampung Baru Kel. Kembangan Utaraseluas 8.878 m²
 - 1 Bidang Tanah RTH Jl. Mangga XIV Kel. Duri Kepa seluas 3.009 m²
 - 3 Bidang Tanah TPU Tegal Alur seluas 16.219 m²
- 32) Pelayanan Pemakaman
- a) Pengukuran dan pembuatan peta lokasi perpetakan tanah makam di TPU Semper, Jakarta Utara seluas 1.5 Ha
 - b) Pelayanan Angkutan dan Perawatan Jenazah Terlantar / Tunawan dari TKP ke RSCM , Panti, RSCM dan RSUD ke TPU kepada 215 orang
 - c) Penyediaan Konsumsi Piket Pelayanan Pemulasaraan dan Angkutan Jenazah Terlantar sebanyak 2.196 boks
 - d) Penyediaan Upah/Jasa Petugas Pelayanan Angkutan dan Perawatan Jenazah Terlantar kepada 48 orang
 - e) Penyediaan Upah/Jasa Operasional Pengemudi dan Pembantu Pengemudi Kendaraan Jenazah Ke Luar Kotasejauh 5.989 km
- 33) Pemeliharaan dan Penataan Pemakaman di 5 Wilayah Kota yang terdiri dari :
- a) Pembangunan Jalan seluas 906 m² dan Saluran Air sepanjang 135 m di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat
 - b) Penataan RTH Makam Area TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur seluas 394 m²
 - c) Peningkatan Sarana dan Prasarana TPU Penggilingan,

- Jakarta Timur berupa jalan beton seluas 235 m², jalan interblok seluas 357 m², pagar seluas 54 m², saluran *box culvert* sepanjang 16 m dan saluran u ditch sepanjang 60 m
- d) Pembangunan Saluran Air di TPU Tegal Alur Unit Kristen, Jakarta Barat sepanjang 500 m
 - e) Plaketisasi petak makam di TPU Karet Pasar Baru Barat, Jakarta Pusat sebanyak 602 unit dan TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan sebanyak 545 unit
- 34) Pembangunan dan Penataan Ornamen Keindahan Kota yang terdiri dari :
- a) Pembangunan Kerombong di Jalan Panjang sebanyak 1 unit
 - b) Pembangunan Lampu Taman di Jakarta sebanyak 152 unit terdiri dari Jakarta Pusat (18 unit), Jakarta Utara (2 unit), Jakarta Selatan (92 unit) dan Jakarta Timur (40 unit)
 - c) Pembangunan 3 lokasi *vertical garden* di wilayah DKI Jakarta pada FO Matraman, Pramuka dan Suprpto
 - d) Rehabilitasi Air Mancur sebanyak 9 unit terdiri dari Taman Ayodia (1 unit), Taman Kodok (2 unit), TPU Kampung Kandang (3 unit), TPU Tegal Alur (1 unit), TPU Pondok Rangon (1 unit) dan TPU Karet Bivak (1 unit)
- 35) Pemeliharaan Air Mancur dan Ornamen kota, jam kota dan lampu taman, sarana penyiraman terdiri dari :
- a) Pemeliharaan Patung di 27 lokasi sebanyak 27 patung
 - b) Pemeliharaan Jam Kota di 19 lokasi sebanyak 19 unit
 - c) Pemeliharaan Lampu Taman di 5 wilayah kota sebanyak 2492 lampu
 - d) Pemeliharaan Sarana Penyiraman di 35 lokasi sebanyak 8744 unit
 - e) Pemeliharaan Air Mancur di 17 lokasi sebanyak 35 air mancur
- 36) Pemeliharaan Tanaman Dekorasi, Tanaman pada Kerombong, *Green Wall* dan *Green Column* terdiri dari :
- a) Pemeliharaan Kerombong sebanyak 15 unit

- b) Pemeliharaan *Green Column* sebanyak 27 unit
 - c) Pemeliharaan *Green Wall* sebanyak 5 unit
 - d) Pemeliharaan Pot Tanaman di 7 lokasi sebanyak 121 pot
- 37) Jumlah RTH yang dikembangkan oleh masyarakat terdiri dari
- a) Penataan & Pemeliharaan Taman oleh PT. GA Tiga Belas d/a Gunung Agung (Taman Gunung Agung, Jl. Kwitang Raya) dan PT. Binara Guna Mediktama d/a RS. Pondok Indah Group (Taman Puspita Indah)
 - b) Pembuatan Taman Interaktif oleh PT. Arion Indonesia Transport (Pegangsaan Dua),
 - c) Pemasangan Sarana Internet (Wifi) oleh PT. Supra Primatama Nusantara d/a Biznet (Taman Kodok, Taman Situlembang, Taman Mataram, Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Blok E RW 13, Taman Komplek Setneg, Taman Blok B Komplek DKI, Taman Blok G RW 13, Taman Langsung, Taman Bumi Perkemahan Ragunan, Taman Lapangan Banteng, Taman Melawai, Taman Stasiun Kota, Taman Ayodia, Taman Tebet, Karet Bivakls, Karet Pasar Baru Is, Tanah Kusir Utara, dan Jeruk Purut Is),
 - d) Peningkatan Fungsi oleh Workout Embassy (Taman Mataram),
 - e) Sumbangan dan Penanaman Pohon oleh Ranch Market (Taman Cattleya, Taman GOR Cengkareng, Taman Bluntas, Taman Bambu, Taman Kumis Kucing, Taman Langsung, Mataram, Taman Rawa Badak, Taman Danau Damplas, Taman Tanah Abang Timur, Taman Tanah Abang III, Taman Rusun Marunda, JH Jalan Cipeucang, THKP, Pinggir Kali Cengkareng, Pinggir Kali Daan Mogot dan Pemakaman Tegal Alur),
 - f) Pembangunan Sarana Olahraga Luar Ruang dan Lap. Bulutangkis oleh PT. Coca Cola Indonesia (Taman Tebet, Taman Buni, Taman Gandaria Tengah, Taman Kaliandra, Taman Amir Hamzah, Taman Langsung dan Taman Kembang

Sepatu) dan Pembuatan Perpustakaan Mini dan Ornamen Taman oleh Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta dan Holcim(Taman Ayodya)

- 38) Luas tanah RTH pertanaman dan pemakaman yang dikelola 10.18 ha pada tahun 2015
- 39) Meningkatnya luas tanah RTH Taman dan makam yang dibebaskan 13,75 ha pada tahun 2014 menjadi 50,49 ha pada tahun 2015
- 40) Luas Tanah Hutan Kota yang dikembangkan yaitu 5 lokasi pada tahun 2015
- 41) Jumlah Pohon yang Ditanam Pada Kawasan Hutan Mangrove, Hutan Kota, Pesisir dan Permukiman sebanyak 45.420 pohon pada tahun 2015
- 42) Jumlah Lokasi RTH Kebun yang dikembangkan sebagai Agrowisata yaitu 10 lokasi pada tahun 2015
- 43) Jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang dikembangkan sebagai Ekowisata/ Interaksi Publik yaitu 21 lokasi pada tahun 2015
- 44) Jumlah spesies / jenis flora dan fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota yaitu 150 flora dan 113 fauna pada tahun 2015.
- 45) Luas kawasan yang dapat direhabilitasi dan dikonservasi yaitu 140,34 ha pada tahun 2015 yang terdiri dari:
 - a) Transplantasi karang dengan media PVC berbentuk piramida dengan ukuran 1 m x 1 m x 0,7 m sebanyak 6 unit dengan jumlah bibit 34 buah (Dinas)
 - b) Transplantasi karang dengan media rak besi sebanyak 2200 rak dengan ukuran 1 m x 1 m x 0,5 m dengan jumlah bibit 20 / rak (marinir TNI AL)
 - c) Transplantasi karang dengan media rak besi sebanyak 86 rak dengan ukuran 1 m x 1 m x 0,5 m dengan jumlah bibit 20 / rak (PT. Kharisma Surya Lestari)
 - d) Pengadaan bibit transplantasi karang sebanyak 7500 batang

yang penanamnya bekerjasama dengan TNI AL (Sudin)

- 46) Pemeliharaan Hutan Kota dan Hutan Mangrove berupa 30 PHL di 21 lokasi
- 47) Pembebasan Lahan untuk Pengembangan Hutan Kota seluas 4,83 Ha terdiri dari :
 - a) Interaktif di Jl. Kav DKI I RT 007 RW 01 Kel. Cipayung, Kec. Cipayung Jakarta Timur luas 1,3267 Ha
 - b) Jl. Centex RT 006 RW 03 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur luas tanah 1,3147 Ha
 - c) Pedongkelan RT 002 RW 09 Kel. Cilicing Kec. Cilincing Jakarta Utara Luas tanah 1,0039 Ha,
 - d) Jl. Pulogebang RT 003 RW 04 Kel. Pulogebang Kec. Cakung Jakarta Timur luas tanah 1,1809 Ha
- 48) Pembangunan Sarana dan Prasarana Hutan Kota dan Hutan Mangrove berupa paving blok seluas 500 m², 3 pos jaga seluas 15 m², 3 bangunan sanitasi seluas 24 m², pagar sepanjang 500 m', perahu karet dan motor tempel sebanyak 2 unit
- 49) Peningkatan Penghijauan RTH dalam rangka Asean Games berupa tertanamnya *venue* Asian Games di 2 Lokasi
- 50) Pengadaan Lahan untuk Hutan Kota di Jakarta seluas 2 Ha.
- 51) Perencanaan Penurapan dan Pengerukan Danau Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat yang akan dilaksanakan di 2016 seluas 2 Ha
- 52) Perencanaan Perluasan Hutan Kota Rawa Buaya yang akan dilaksanakan di 2016 seluas 2 Ha
- 53) Perencanaan Pagar Pengamanan dan Gapura Hutan Kota Kel. Cipayung yang akan dilaksanakan di 2016 seluas 2 Ha
- 54) Pembangunan Pengamanan Sampah di *Ecomarine* berupa terbangunnya jaring penahan sampah yang terbuat dari kawat harmonika sepanjang 210 m dan dibangunnya saluran inlet sepanjang 170 m dari laut di Muara Angke

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Pembayaran Hutang Pihak ke-3 Tahun 2014 untuk Kegiatan Perbaikan Pagar Taman Tebet Sisi Utara dan Sisi Selatan, Jakarta Selatan tidak dapat dilaksanakan

2) Solusi

Belum masuk ke dalam neraca Keuangan Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Setelah masuk dalam neraca, maka dilaporkan ke BPKAD dan masuk dalam Hutang Pihak ke-3

9. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan kependudukan dan catatan sipil, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp237.020.533.698,00 dengan total penyerapan sebesar Rp213.991.877.428,00 atau 90,28%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kependudukan dan Catatan Sipil
- b) Sewa License Perangkat Lunak *Anti Virus*, Sistem Operasi dan Database Kependudukan
- c) Sewa Jaringan dan DRC (*Disaster Recovery Center Colocation*)
- d) Pelaksanaan Aplikasi Sistem Pelayanan Informatika Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2) Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Perencanaan Kependudukan dan Catatan Sipil
- b) Penyelenggaraan Koordinasi Tugas dan Fungsi Kependudukan dan Catatan Sipil

- c) Koordinasi Data Perkawinan dan Perceraian dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) di 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten Kep. Seribu
- d) Pengelolaan dan Perawatan Arsip Register Akta Catatan Sipil di 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten Kep. Seribu
- 3) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat**
 - a) Partisipasi dan Penyelenggaraan Event Kependudukan dan Catatan Sipil
 - b) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- 4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Peningkatan Administrasi Perkantoran
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Pembinaan dan Pengendalian Kependudukan dan Catatan Sipil

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain:

- 1) Terpenuhinya regulasi/kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 dalam bentuk 2 sub aplikasi SIAK (KTP-elektronik dan Pencatatan Sipil Online)
- 2) Meningkatnya persentase penerbitan Kartu Keluarga (KK) dari 95,59% (2014) menjadi 96,26% (2015), penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari 96,83% (2014) menjadi 98,51% (2015), penerbitan kutipan Akta Kelahiran dari 82,68% (2014) menjadi 89,24% (2015), penerbitan kutipan Akta Kematian dari 14,8% (2014) menjadi 17,07% (2015)
- 3) Termanfaatkannya database penduduk bagi instansi vertikal maupun horizontal sebanyak 20 instansi, antara lain :

- a) Kepolisian Daerah, dalam rangka Samsat Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor)
 - b) Dinas Pendidikan, dalam rangka Program Kartu Jakarta Pintar dan Penerimaan Siswa Baru
 - c) Dinas Kesehatan, dalam rangka Program Kartu Jakarta Sehat
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dari 77,00% (2014) menjadi 84,00% (2015)
 - 5) Meningkatnya pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan dari 98,00% (2014) menjadi 99,20% (2015)
 - 6) Meningkatnya pembinaan administrasi kependudukan rentan administrasi kependudukan (adminduk) di 30 lokasi binaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan hasil penerbitan dokumen Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT) dari 1.096 SKOT pada tahun 2014 menjadi 1166 SKOT pada tahun 2015.
 - 7) Terlayannya Pengajuan dokumen Akta Kematian sebesar 18.51% pada tahun 2014 menjadi sebesar 20.91% pada tahun 2015
 - 8) Meningkatnya SDM aparat yang kompeten menjadi 90%
 - 9) Tersedianya Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi berupa Toner KTP-elektronik dan lainnya sebanyak 25 Jenis
 - 10) Tersedianya Barang Cetak Khusus (Security Printing dan Formulir) sebanyak 9 Jenis dalam bentuk Blanko KTP reguler, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Domisili Sementara
 - 11) Tersedianya Suku Cadang Komputer pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 10 Jenis
 - 12) Terlaksananya Sewa Lisensi Perangkat Lunak Anti Virus, serta Sewa Jaringan dan DRC (Disaster Recovery Center) Colocation
 - 13) Tersedianya Annual Technical Support (ATS) Aplikasi Perekaman Sidik Jari (Aplikasi KTP-el)
 - 14) Terlaksananya Monitoring Teknis Operasional SIAK, KTP-el dan e-AKTA

- 15) Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pendukung Pencetakan KTP-el serta Aplikasi Pelayanan Pencatatan Sipil Online
- 16) Terlaksananya Apel Siaga dalam rangka Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri
- 17) Terlaksananya Pembersihan Data Hasil Registerasi Penduduk
- 18) Terlaksananya Pendataan dan pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan
- 19) Terlaksananya Penjilidan Register Akta Pencatatan Sipil
- 20) Terlaksananya Penyusunan/Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan Tahunan
- 21) Terlaksananya Asistensi Pelayanan Terpadu Dengan Kemendagri, Dukcapil, BRI dan BPJS
- 22) Terlaksananya Dialog Interaktif Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- 23) Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Serta Kawin Campur Bagi Masyarakat Melalui Media Cetak dan Elektronik
- 24) Terlaksananya Pelayanan Bina Kependudukan (Biduk) dan Pendataan Pendatang Baru di 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten Kep. Seribu
- 25) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Secara Mobile (Keliling) dan Pelayanan Prima (Jemput Bola) Akta Kelahiran dan Kematian di 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten Kep Seribu.
- 26) Terpeliharanya Hardware, Software dan Database Data Centerserta Jaringan LAN Komputer Tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas Rumah Bersalin dan RSUD
- 27) Terlaksananya dan tersusunnya Pengadaan Buku Himpunan, Leaflet dan Booklet, serta Data Statistik Vital
- 28) Terlaksananya Pelatihan dan Workshop Pengembangan Wawasan terhadap Pengelolaan KTP-el, e-AKTA dan SIAK bagi Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan

- 29) Tersedianya Aplikasi Penyajian Data Kependudukan Berbasis *Geographic Information System (GIS)*

10. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp29.445.382.769,00 dengan total penyerapan sebesar Rp5.647.154.844,00 atau 19,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Pembinaan dan Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

2) Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak

Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan

a) Pembinaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

b) Pembangunan Rumah Aman, dan Gedung Women and Child Development Center

c) Dukungan pembentukan ruang publik terpadu rumah anak (RPTRA) di 6 wilayah Kota/Kabupaten

4) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Pembinaan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain:

- 1) Meningkatnya persentase SKPD/UKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dari 30% pada tahun 2014 menjadi 70,15% pada tahun 2015.
- 2) Meningkatnya jumlah lembaga peduli perempuan dan anak yang aktif dari 65 lembaga pada tahun 2014 menjadi 67 lembaga di tahun 2015.
- 3) Terlaksananya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2014 sebesar 65% menjadi 100% pada tahun 2015.
- 4) Meningkatnya *pilot project* Kota Layak Anak dari 6 Kelurahan di tahun 2014 menjadi 73 Kelurahan di tahun 2015.
- 5) Meningkatnya jumlah *stakeholder* yang telah mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengarus Utamaan Gender dari 235 *stakeholder* di tahun 2014 menjadi 310 *stakeholder* di tahun 2015.

11. URUSAN KELUARGA BERENCANA (KB) DAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp23.418.773.511,00 dengan total penyerapan sebesar Rp16.903.037.230,00 atau 72,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) **Program Keluarga Berencana**
Pelayanan Keluarga Berencana

2) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan

Pembinaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana

3) Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Keluarga Berencana Kepulauan Seribu

4) Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, antara lain :

- 1) Dipertahankannya *Total Fertility Rate* (TFR) pada tahun 2015 sebesar 2,2%.
- 2) Meningkatnya persentase cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun pada tahun 2014 sebesar 3,6% menjadi 1,07% pada tahun 2015.
- 3) Meningkatnya cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif dari 1.108.841 peserta tahun 2014 menjadi 1.082.195 peserta tahun 2015.
- 4) Menurunnya cakupan Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB dari 11,64% pada tahun 2014 menjadi 12,06% pada tahun 2015.
- 5) Menurunnya persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun dari 3,5% pada tahun 2014 menjadi 3,4% pada tahun 2015.
- 6) Terpenuhinya Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) sebanyak 2 (Dua) orang Petugas Penyuluh Keluarga Berencana di setiap Kelurahan di tahun 2014.
- 7) Terpenuhinya Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) per RW 1 orang per RW, dengan jumlah total 2.708 PPKB RW di tahun 2014

- 8) Dipertahankannya persentase institusi masyarakat yang melaksanakan KIE di atas 80% sejak tahun 2012.
- 9) Dipertahankannya persentase masyarakat yang memahami program KB dan Kependudukan di atas 60% sejak tahun 2012.
- 10) Dipertahankannya persentase cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan KIE Pencegahan penularan Virus HIV/AIDS dari Ibu Hamil untuk bayinya sebanyak 33.219 orang di tahun 2014.
- 11) Meningkatnya Cakupan anggota Bina Keluarga yang ber-KB sebesar 68,36% pada tahun 2014 menjadi 78,68% pada tahun 2015.
- 12) Jumlah Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB dari 84,58% di tahun 2014 menjadi 82,70% pada tahun 2015.

12. URUSAN SOSIAL

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan sosial, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp620.544.663.279,00 dengan total penyerapan sebesar Rp533.035.253.406,00 atau 85,90%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

- a) Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial PMKS Non Potensial
- b) Pelayanan, Perlindungan dan Pengendalian Sosial PMKS Jalanan
- c) Kajian tentang Upaya Penanganan Masalah Sosial Secara Komprehensif dan Berkelanjutan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial

- a) Rehab 6 Tempat Pelatihan Loka Bina Karya (LBK), Rumah Perlindungan Bhakti Kasih Jakarta Utara, serta 12 Panti Sosial
- b) Perawatan Mekanikal Elektrikal Kantor Dinas Sosial dan Pemeliharaan gedung Dinas Sosial

3) Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

- a) Penyelenggaraan dan Partisipasi Event, dan Pengelolaan Sistem Informasi
- b) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kemitraan Dunia Usaha dan Undian Gratis Berhadiah

4) Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Penguatan Kemandirian PMKS Potensial

5) Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Peningkatan Penanggulangan Bencana Provinsi dan Kepulauan Seribu
- b) Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan
- c) Pengelolaan Program Keluarga Harapan dan Asuransi Kesejahteraan Sosial
- d) Asistensi Orang Dengan HIV/AIDS dan Pelayanan Sosial Orang Terlantar

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial, antara lain :

- 1) Meningkatnya persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 55% di tahun 2014 menjadi 60% (dari populasi 28.091 orang) di tahun 2015

- 2) Meningkatnya persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial sebanyak sebanyak 14,5% di tahun 2014 menjadi 15,4% (dari populasi PMKS 38.732 orang) di tahun 2015
- 3) Menurunnya persentase populasi PMKS jalanan sebanyak 25% dari jumlah populasi PMKS jalanan sebanyak 10.292 orang melalui penanganan titik rawan PMKS jalanan. Jumlah titik rawan PMKS sebanyak 48 titik rawan pada tahun 2012, menjadi 35 titik rawan pada tahun 2013, menjadi 16 titik rawan tahun 2014 dan menjadi 13 titik rawan pada tahun 2015.
- 4) Meningkatnya jumlah gedung panti sosial yang layak sebanyak 20 panti (34 lokasi) di tahun 2014 menjadi 22 panti sosial (40 lokasi) di tahun 2015
- 5) Meningkatnya gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang dapat difungsikan sebanyak 77 SKKT di tahun 2014 menjadi 87 SKKT di tahun 2015.
- 6) Meningkatnya jumlah lembaga sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan sosial sebanyak 1.016 lembaga di tahun 2014 menjadi 1.502 lembaga di tahun 2015.
- 7) Meningkatnya jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan urusan sosial sebanyak 11.000 orang di tahun 2014 menjadi 13.987 orang di tahun 2015
- 8) Meningkatnya persentase keluarga miskin yang dapat hidup mandiri sebanyak 21.224 keluarga di tahun 2014 menjadi 26.644 keluarga di tahun 2015
- 9) Meningkatnya jumlah PMKS potensial yang dapat hidup mandiri sebanyak 6.895 orang di tahun 2014 menjadi 9.005 orang di tahun 2015
- 10) Dipertahankannya *Response Time* penanggulangan bencana selama 3 jam
- 11) Dipertahankannya persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial sebanyak 100%
- 12) Meningkatnya jumlah PMKS non potensial yang mendapat jaminan sosial sebanyak 690 orang di tahun 2014 menjadi 882

orang di tahun 2015

13. URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp370.492.462.364,00 dengan total penyerapan sebesar Rp282.845.990.445,00 atau 76,34%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja**
sudah dijelaskan pada program unggulan
- 2) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja**
 - a) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b) Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - c) Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan
 - d) Pelatihan keterampilan kerja & pemagangan bagi Pencari Kerja
 - e) Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja berkebutuhan khusus/ Penyandang Disabilitas Bidang Batik
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**
 - a) Kalibrasi alat kesehatan dan alat laboratorium
 - b) Layanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja
- 4) Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Pelatihan Kerja**
Pengadaan Peralatan Pelatihan PPKD
- 5) Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian**
Pengadaan alat praktik kerja

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, antara lain :

- 1) Terlaksananya Pelatihan Calon SATPAM, Keterampilan Digital Printing, pembuatan Kue Kering dan Kue Basah, Reparasi HP sebanyak 170 peserta
- 2) Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Balai Latihan Kerja – Luar Negeri (BLK-LN) yang dimiliki oleh swasta sebanyak 25 lembaga berupa pembinaan tentang perijinan, kelembagaan, dan sertifikasi.
- 3) Terlaksananya Pembinaan Manajemen Lembaga Pelatihan Kerja – Swasta (LPK-S) sebanyak 25 lembaga
- 4) Terlaksananya Pelatihan Teknik Negosiasi Hubungan Industrial bagi Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB), Pengusaha dan Organisasi Pengusaha sebanyak 200 peserta
- 5) Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pramuwisma sebanyak 60 lembaga
- 6) Terlaksananya Pembinaan Management K3 pada Perusahaan sebanyak 100 perusahaan
- 7) Terlaksananya pemeriksaan norma ketenagakerjaan dan Monitoring Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebanyak 100 perusahaan
- 8) Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Produktif sesuai fungsi PKK, sebanyak 100 orang di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 9) Terciptanya Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja di 5 wilayah kota dengan membentuk WiraUsaha Baru (WUB) sebanyak 305 pencari kerja
- 10) Terlaksananya Pelatihan keterampilan kerja bagi pencari kerja sebanyak 95 orang, terdiri dari: Calon Pengemudi SIM A, Calon Satuan Pengamanan
- 11) Terlaksananya Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja berkebutuhan khusus / Penyandang Disabilitas Bidang Batik sebanyak 100 orang di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- 12) Terlaksananya Kalibrasi alat kesehatan dan alat laboratorium sebanyak 51 jenis alat.
- 13) Terlaksananya Layanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja sebanyak 35 perusahaan
- 14) Terlaksananya Pengadaaan Peralatan Pelatihan PPKD di 5 wilayah kota terdiri dari : 20 unit Perkakas Bengkel Kerja, 6 unit Perkakas Bengkel Service, 1 unit Perkakas Bengkel Listrik, 6 unit Mesin Praktikum, 20 unit Perkakas Khusus, 4 unit Mesin Las.
- 15) Terlaksananya Pengadaan alat praktik kerja berupa kendaraan mobil sampling sebanyak 1 unit

14. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp295.815.286.649,00 dengan total penyerapan sebesar Rp191.886.124.657,00 atau 64,87%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Usaha Koperasi

- a) Keikutsertaan pada Kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah/Lembaga Lainnya
- b) Partisipasi Lebaran Betawi
- c) Penyelenggaraan Pekan Raya Koperasi dan Penilaian Koperasi, dan Temu Permodalan Koperasi.

2) Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi

- a) Partisipasi HARKOPNAS Expo 2015
- b) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

3) Program Pemberdayaan UMKM

- a) Penyelenggaraan Batu Mulia dan Jewelry Jakarta Expo
- b) Penyelenggaraan Gelar Kuliner Khas Betawi
- c) Pembuatan Peta Potensi PKL di DKI Jakarta
- d) Penyelenggaraan Usaha Mikro Kecil Menengah Award

- e) Promosi UKM di Cilandak Town Square untuk UKM
 - f) Partisipasi pada Jakarta Night Festival, HUT Jakarta, dan Event Tahun Baru, serta Event UMKM
 - g) Sertifikasi Kehalalan Produk dan Pendampingan Standar Mutu, Sistem HAKI, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) bagi PKL/UKM Provinsi DKI Jakarta
 - h) Penataan dan Relokasi PKL di DKI Jakarta.
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM**
- Sudah dijelaskan dalam program unggulan*

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, antara lain :

- 1) Meningkatnya jumlah koperasi aktif dari sebanyak 5.645 koperasi pada tahun 2014 menjadi sebanyak 5.841 koperasi pada tahun 2015
- 2) Meningkatnya jumlah volume usaha koperasi meningkat dari sebesar Rp 15,7 Trilyun pada Tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 18,1 Trilyun pada tahun 2015.
- 3) Meningkatnya jumlah koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan koperasi PKL yang berfungsi dari sebanyak 158 koperasi pada tahun 2014 menjadi sebanyak 161 koperasi pada tahun 2015.
- 4) Meningkatnya jumlah koperasi baru sebanyak 7.928 koperasi pada tahun 2014 menjadi sebanyak 8.024 koperasi pada tahun 2015.
- 5) Meningkatnya jumlah UMKM Mandiri yang dibina dari sebanyak 128.766 UMKM pada tahun 2014 menjadi sebanyak 131.317 UMKM pada tahun 2015.
- 6) Terlaksananya pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengelola koperasi sebanyak 330 koperasi dan pengelola UKM sebanyak 160 UKM pada tahun 2015.

15. URUSAN PENANAMAN MODAL

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan penanaman modal, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp29.243.082.391,00 dengan total penyerapan sebesar Rp26.148.493.992,00 atau 89,42%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pengadaan bahan, sarana dan Informasi Promosi berupa :

- a. Pengadaan Alat Pendukung Promosi
- b. Pengelolaan Data BUMD dan Penanaman Modal
- c. Penyediaan Bahan Promosi
- d. Penyempurnaan sistem aplikasi data Penanaman Modal
- e. Penyusunan Profil Investasi
- f. Sinkronisasi Data Investasi di Provinsi DKI Jakarta

2) Program Peningkatan Kinerja BUMD

Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Penanaman Modal.

- a. Evaluasi dan Rekrutmen Pengurus BUMD
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Business Forum BUMD
- c. Pendirian PT *Holding Company* BUMD
- d. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Pengembangan Kerjasama Antar BUMD di Indonesia
- f. Pengukuran Penilaian Kinerja (*Key Performance Indicator*) Pengurus BUMD
- g. Penyusunan Faktor Rata-Rata Industri Untuk Mengukur Kinerja BUMD DKI Jakarta
- h. Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD
- i. Sosialisasi dan *Workshop* Kebijakan Penanaman Modal

3) Program Peningkatan Investasi

Sudah dijelaskan pada program unggulan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanaman modal, antara lain :

- 1) Jumlah proyek (PMDN/PMA) sebanyak 108 proyek PMDN dan 2.519 proyek PMA pada tahun 2014 menjadi 4.463 proyek PMDN dan 316 proyek PMA pada tahun 2015.
- 2) Jumlah setoran PAD dari BUMD Rp. 463.909.888.402,00 di Tahun 2014 menjadi 527.790.700.702 di tahun 2015.
- 3) Realisasi investasi sebanyak Rp. 37,65 Triliun PMA dan Rp. 10,54 Triliun PMDN pada tahun 2014 menjadi Rp. 45.242.875.000,00 PMA dan Rp. 15.512.660.000,00 PMDN pada tahun 2015
- 4) Jumlah perusahaan yang ditinjau penggunaan perizinannya dari 1.811 perusahaan pada tahun 2014 menjadi 1.825 perusahaan pada tahun 2015.

16. URUSAN KEBUDAYAAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan kebudayaan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp804.390.913.726,00 dengan total penyerapan sebesar Rp580.994.440.385,00 atau 72,23%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

- a) Gebyar Museum Sejarah Jakarta
- b) Partisipasi Museum Kesenjarian Jakarta dalam kegiatan DKI Jakarta, Dalam Daerah dan Luar Daerah
- c) Pekan Museum Joang 45 dan Pekan Museum M.H Thamrin
- d) Penanaman Nilai-Nilai Kejoangan dan Perjuangan Bagi Pelajar dan Generasi Muda

- e) Promosi Unit Pengelola Museum Joang 45 dalam kegiatan Kebudayaan
- 2) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan**
Sudah dijelaskan pada program unggulan
- 3) Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan**
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Budaya, melalui Pelatihan Seni Rupa, Pelatihan Seni Musik, Pelatihan Seni Tari, Pelatihan Seni Teater, dan Pelatihan Kesenian bagi Guru.
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan**
Sudah dijelaskan pada program unggulan
- 5) Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan**
Sudah dijelaskan pada program unggulan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kebudayaan, antara lain :

- 1) Meningkatnya upaya perlindungan dan pengembangan kebudayaan Betawi secara adaptif menjadi 4 Jenis.
- 2) Dipertahankannyapemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu menjadi 21 pusat kebudayaan.
- 3) Meningkatnya jumlah pelaku seni budaya yang mendapat pelatihan di Balai Latihan Kesenian 5 wilayah sebanyak 1.210 pelaku seni dan 19 jenis pelatihan yang terdiri dari :
 - a) Pelatihan Seni Rupa yaitu Membatik, Tata Rias,
 - b) Pelatihan Seni Musik yaitu Karawitan, Gambang Kromong, Samrah, Arumba, Rampak Gendang, Gesek Betawi, Marawis, Qasidah dan Nasyid
 - c) Pelatihan : Seni Tari yaitu Tari Betawi, Tari Melayu, Tari Daerah,
 - d) Pelatihan Seni Teater yaitu Teater Tradisi, Teater Sastra, Teater Penyutradaraan,
 - e) Pelatihan Kesenian bagi Guru yaitu Guru TK dan Guru SD.

- 4) Terlaksanya pemeliharaan kawasan Situs Marunda di Jakarta Utara
- 5) Meningkatnya jumlah bangunan yang terkonserasi dan termanfaatkan sebanyak 4 bangunan.
- 6) Meningkatnya jumlah event seni budaya yang diselenggarakan sebanyak 15 event.

17. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan pemuda dan olahraga, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp408.273.110.817,00 dengan total penyerapan sebesar Rp301.248.535.311,00 atau 73,79%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- a) Kegiatan Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Kepemudaan, yang terdiri dari :
 - *Jakarta Youth Festival*
 - Keikutsertaan Dinas Olahraga dan Pemuda pada Pameran HUT DKI Jakarta
 - Partisipasi pada JAKARNAVAL
- b) Kegiatan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan, yang terdiri dari :
 - Pendampingan Peserta Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) Penempatan Provinsi DKI Jakarta
 - Seleksi Calon PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta
 - Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional dan Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
 - Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)

- c) Kegiatan Penyelenggaraan Event Kepemudaan, yang terdiri dari :
 - Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta
 - Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2015
- d) Kegiatan Penyelenggaraan Event PMR, yang terdiri dari:
 - Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta
 - Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta
- e) Kegiatan Penyelenggaraan Event Kepramukaan, yang terdiri dari :
 - Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran
 - Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan (KPL) dan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)
 - Lomba Gudep Tergiat dan Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta
 - Perkemahan Minat Saka Pramuka
- f) Kegiatan Pembinaan Paskibraka, yang terdiri dari :
 - Lomba Formasi Tata Upacara Bendera (TUB) Tingkat Provinsi DKI Jakarta
 - TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, yang terdiri dari :
 - Dukungan dan Asistensi Persiapan Pelaksanaan ASIAN Games 2018
 - Monitoring, evaluasi dan pemantauan kontingen POPNAS XIII dan XIV tahun 2015 Provinsi DKI Jakarta
 - Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada POPNAS XIII/2015 di Provinsi Jawa Barat
 - Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Provinsi DKI

Jakarta pada POMNAS XIV/2015 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo International Football
- Pembinaan Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas dan olahraga prestasi melalui pembinaan PPLP Provinsi DKI Jakarta
- Penyediaan Piala Gubernur dan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Persiapan Penyelenggaraan 6th World Sport For All Games 2016 di Jakarta

b) Kegiatan Penyelenggaraan Invitasi Olahraga, yang terdiri dari :

- Invitasi Cabang Olahraga Atletik Jakarta Open, Sepatu Roda, Renang dan Squash Pelajar Provinsi DKI Jakarta
- Invitasi Cabang Olahraga Gulat, Kempo, Taekwondo, Judo, Karate, Pencak Silat Provinsi DKI Jakarta
- Invitasi Cabang Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta
- Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA/K Provinsi DKI Jakarta
- Invitasi Cabang Olahraga Senam
- Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Invitasi Sepakbola Antar Klub Usia 13 Tahun Provinsi DKI Jakarta

c) Kegiatan Penyelenggaraan Turnamen Olahraga, yang terdiri dari :

- *Enjoy Jakarta Anniversary Volleyball Tournament*
- *Enjoy Jakarta World Junior Golf Tournament*
- *Jakarta Marathon III/2015*
- Lomba Lari Jakarta Internasional 10 K
- Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Angkat Besi dan Panahan Provinsi DKI Jakarta

- Turnamen *Bowling, Squash*, dan Tennis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
 - Turnamen Polo Air Betawi Cup dan Invitasi Cabang Olahraga *Aquatic* (Renang Indah dan Loncat Indah)
 - Turnamen Tennis Junior Internasional Piala Thamrin
 - d) Kegiatan Penyelenggaraan Liga Olahraga Pelajar dan Mahasiswa, yang terdiri dari :
 - Liga Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
 - Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Sepaktakraw dan Tenis Meja Provinsi DKI Jakarta
 - Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Provinsi DKI Jakarta
 - e) Kegiatan Pelatihan, Pembinaan dan Seleksi Atlet, yang terdiri dari :
 - Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar dan Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta
 - Permakanan Atlet PPLP Provinsi DKI Jakarta
 - Seleksi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta
 - Seleksi dan Pembinaan Olahraga Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta
 - f) Kegiatan Pemberian Penghargaan Atlet Berprestasi, yang terdiri dari :
 - Pemberian penghargaan Kontingen POMNAS XIII dan XIV tahun 2015 Provinsi DKI Jakarta
 - Penghargaan Bagi Atlet Berprestasi Berkebutuhan Khusus DKI Jakarta
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda**
- a) Pembangunan Fasilitas Olahraga Jalan Alamanda Kelurahan Sunter Jaya
 - b) Pembangunan Ramp, Ruang Multifungsi dan fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kecamatan Ciracas

- c) Pembangunan Fasilitas Luar dan Pengadaan Genset Gelanggang Remaja Kecamatan Tanah Abang
- d) Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan
- e) Pengadaan Perlengkapan Kontingen dan Peralatan Olahraga PON XIX/2016 di Jawa Barat
- f) Pengadaan Perlengkapan Kontingen POPNAS dan POMNAS
- g) Pembangunan Fasilitas Luar Ruang Gelanggang Remaja Kecamatan Tambora
- h) Pembangunan Fasilitas Luar Ruang dan pengadaan meubelair, peralatan kantor dan interior Gelanggang Remaja Kecamatan Koja
- i) Pembangunan Fasilitas Luar Ruang Gelanggang Remaja Kecamatan Koja
- j) Rehabilitasi Pagar Keliling UPT Cendrawasih
- k) Pemagaran Taman BMW

4) Program Pengembangan Olahraga

- a) Kegiatan Partisipasi Kejuaraan Olahraga, yang terdiri dari :
 - Monitoring, evaluasi dan pemantauan kontingen Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS) DKI Jakarta tahun 2015
 - Pekan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta
 - Pembinaan dan Pengiriman Atlet Tunarungu Provinsi DKI Jakarta pada 8th *Asia Pacific Deaf Games*
 - Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) DKI Jakarta Tahun 2015
 - Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Tunagrahita Provinsi DKI Jakarta pada Special Olympic World Summer Games th 2015
 - Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Tenis Meja Pelajar menuju *Asia Junior Sports Exchange*
 - Pengiriman Atlet Sepakbola Pelajar Provinsi DKI Jakarta menuju *Beijing Cup Football Tournament*

- Pengiriman Atlet Tunadaksa Provinsi DKI Jakarta pada table tennis Paragames
 - Pengiriman Kontingen Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta menuju Kejuaraan Nasional Mahasiswa
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Pelajar, yang terdiri dari :
- Kejuaraan Atletik, Catur, Renang, dan Panahan Pelajar Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Bulutangkis, Bola Voli, Futsal Tunarungu Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Cabang Olahraga Bocce, Atletik, dan Sepakbola Tunagrahita Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Catur dan Tenis Meja Tunanetra Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Olahraga Antar Binaan Gelanggang Remaja Provinsi DKI Jakarta Tahun
 - Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar DKI Jakarta (Pencak Silat, Judo, Kempo, Tinju dan Gulat)
 - Kejuaraan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Renang Berkebutuhan Khusus Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Sepakbola Usia 15 Tahun Provinsi DKI Jakarta
 - Kejuaraan Tenis Lapangan Kursi Roda Tunadaksa Provinsi DKI Jakarta
 - Pekan Paralypik Provinsi DKI Jakarta 2015
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Event Olahraga Non Prestasi, yang terdiri dari :
- Festival Olahraga Taman Kanak-Kanak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
 - Gebyar Olahraga Rekreasi dan Festival Pencak Silat Betawi
 - Gerak Jalan Sehat Provinsi DKI Jakarta, Gerak Jalan Tradisional Bogor - Jakarta, dan Gerak Jalan Proklamasi

- Lomba SKJ, Line Dance, Senam Lansia, Senam Kreasi Jakarta Provinsi DKI Jakarta
- POR Organisasi Wanita DKI Jakarta
- Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta
- Tes Kesegaran Jasmani Karyawan dan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemuda dan olahraga, antara lain:

- 1) Meningkatnya persentase pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing sebanyak 357.242 (14%) pemuda dari 2.551.728 pemuda yang dilatih pada tahun 2014 menjadi sebanyak 387.008 (15,1%) pemuda dari 2.580.302 pemuda yang dilatih pada tahun 2015 dengan persentase peningkatan 1,11% sebanyak 29.766 pemuda.
- 2) Meningkatnya jumlah pemuda yang aktif dalam kepramukaan sebanyak 569.765 orang pada tahun 2014 menjadi 1.135.522 orang pada tahun 2015
- 3) Jumlah gugus depan pramuka yang terdaftar pada tahun 2014 dan 2015 sebanyak 8.893 gugus depan. Pada tahun 2014 yang aktif sebanyak 6.187 (70%) gugus depan dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 7.071 (80%) gugus depan atau peningkatan sebanyak 884 gugus depan (10%)
- 4) Juara 1 Kewirausahaan Tingkat Nasional
- 5) 10 (sepuluh) Besar Tingkat Nasional Pemuda Pelopor
- 6) Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan terdiri dari 21 jenis barang dan 2.515 jumlah barang, yang diperuntukkan untuk permintaan masyarakat Jakarta
- 7) Pemagaran Taman BMW sepanjang 1.946,84 m', pekerjaan pemagaran ini meliputi perbaikan pagar yang rusak dan pembangunan pagar baru di area lahan Taman BMW
- 8) Terpilihnya 3 (tiga) orang Pemuda Alumni Jakarta Sister City menjadi perwakilan Indonesia dalam rangka program UNESCO

yaitu *World Youth Forum United Nation* di Paris

- 9) Prestasi olahraga dan pemuda yang diraih DKI Jakarta pada *single event* dan *multi event* antara lain :
- a. Juara Umum POMNAS XIV Tahun 2015 di Banda Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan perolehan medali 68 emas 37 perak dan 27 perunggu
 - b. Juara Umum Kejuaraan Nasional Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Cabang Olahraga Atletik di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam dengan meraih medali 7 Emas 3 Perak dan 3 Perunggu.
 - c. Juara Umum Kejuaraan Nasional PPLP Cabang Olahraga Pencak Silat di Maluku Utara dengan meraih medali 3 Emas 2 Perak.
 - d. Juara Umum Kejuaraan Nasional PPLP Cabang Olahraga Senam di DKI Jakarta dengan meraih medali 23 Emas 7 Perak 2 Perunggu
 - e. Juara I Tim Putra Kejuaraan Nasional PPLP Cabang Olahraga Bola Voli Pasir di D.I. Yogyakarta dengan meraih Medali Emas.
 - f. Juara II POPNAS XIII Tahun 2015 di Bandung Provinsi Jawa Barat dengan perolehan medali 57 emas 40 perak dan 40 perunggu
 - g. Juara I Kejuaraan Nasional Mahasiswa Cabang Olahraga Futsal Putri Brawijaya Futsal National Cup Tahun 2015 dengan meraih medali emas.
 - h. Juara III Tim Putri Kejuaraan Nasional PPLP Cabang Olahraga Bola Voli Pasir di D.I. Yogyakarta dengan meraih medali perunggu.
 - i. Meraih medali 3 emas dan 2 perak pada 8th Asia Pasific Deaf Games 2015 di Taiwan
 - j. Meraih 1 medali emas, 1 perunggu dan masuk 8 Besar pada Bayreuth Open Table Tennis Paragames ke III Tahun 2015 di Bayreuth Jerman;
 - k. Meraih medali 19 emas, 12 perak dan 5 perunggu pada

Special Olympic World Summer Games tahun 2015 di Los Angeles, Amerika Serikat;

- l. Meraih medali 6 Emas dan 3 Perunggu pada mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) di Bandung Jawa Barat;
 - m. Meraih peringkat 9 dari 16 peserta pada Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo International Football;
- 10) Melaksanakan Jakarta International 10 K yang diikuti oleh atlet Elite Nasional, Elite Internasional, Pelajar dan Masyarakat Umum dengan 35.000 peserta dari dalam dan luar negeri.
 - 11) Melaksanakan Jakarta Marathon III/2015 yang diikuti oleh atlet Elite Nasional, Elite Internasional dan Masyarakat Umum dengan 14.000 peserta dari dalam dan luar negeri;
 - 12) Peringkat I Tingkat Nasional Wirausaha Muda Pemula Berprestasi atas nama Umar Sa'ad;
 - 13) Meraih Juara harapan 2 Tingkat Nasional Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) Berprestasi atas nama Nurwahida, S.Pd;
 - 14) Partisipasi Jakarta pada Program Pemuda Pelopor Tingkat Nasional sebanyak 5 orang;
 - 15) Pengiriman 1 Pasang (2 Orang) Paskibraka ke Tingkat Nasional pada Upacara Pengibaran Bendera 17 Agustus di Istana Negara dalam rangka HUT Republik Indonesia.
 - 16) Meningkatnya jumlah pengguna fasilitas olahraga dan pemuda dari 4.530.425 orang pada tahun 2014 menjadi 4.825.381 orang pada tahun 2015;
 - 17) Dipertahankannya Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Provinsi DKI Jakarta sebesar 34%;
 - 18) Frekuensi event olahraga Rekreasi selama tahun 2015 dilaksanakan 8 kali dalam sebulan;
 - 19) Jumlah Gelanggang Olahraga yang memiliki fasilitas sesuai standar Internasional sebanyak 4 Gelanggang Olahraga yaitu

Gelanggang Olahraga Kecamatan Pulo Gadung, Gelanggang Olahraga Ciracas, Gelanggang Olahraga Kecamatan Tanjung Priok dan Gelanggang Olahraga Judo Kelapa Gading Jakarta Utara.

- 20) Jumlah pelaku pengembangan olahraga penerima penghargaan 773 atlet dan official pada tahun 2015.

18. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp74.399.210.947,00 dengan total penyerapan sebesar Rp62.356.897.364,00 atau 83,81%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan Pemahaman Pengembangan Wawasan Kebangsaan, melalui

- a. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- b. Fasilitasi Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (FPPWK)
- c. Pelatihan Pelopor Wawasan Kebangsaan dan Pelopor Pembauran Kebangsaan dan Penggerak Pembauran Bangsa
- d. Pemahaman Tentang Komponen Cadangan Dalam Upaya Bela Negara
- e. Penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan
- f. Peningkatan Pemahaman Pancasila Bagi Generasi Muda

2) Program Pendidikan Politik Masyarakat

- a) Pendidikan Politik Masyarakat, melalui :
 - Dialog Interaktif Dalam Rangka Pengembangan Demokrasi
 - Fasilitasi Pokja Indeks Demokrasi Indonesia
 - Jurnal Demokrasi
 - Pemantapan dan Implementasi Budaya Politik dan

Pemahaman Hak Sipil dan Politik

- Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik Dalam Rangka Kesetaraan Gender
- Peningkatan Kemitraan dengan Partai Politik
- Peran Parpol Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia
- Sosialisasi pentingnya fungsi kemitraan eksekutif dan legislatif dengan masyarakat

b) Pengembangan Budaya Demokrasi

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

a) Pencegahan dan Penanggulangan Konflik, melalui

- Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
- Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing
- Pemantauan Ipoleksosbud
- Peningkatan Kapasitas Pemantauan Situasi dan Kondisi Daerah
- Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Terorisme dan Gerakan Radikalisme
- Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini
- Penyempurnaan Peta Kawasan Rawan Konflik
- Penyusunan Strategi Penurunan Daerah Rawan Konflik Lokasi Matraman dan Menteng Tenggulun
- Sarasehan Isu Politik Yang Berdampak Terhadap Konflik Horizontal
- Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Bagi Masyarakat

b) Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

4) Program Penguatan Hubungan Kelembagaan

Penguatan hubungan Kelembagaan, melalui :

- a. Fasilitasi Pemuda Dalam Rangka Peningkatan Seni dan Budaya Lokal di Provinsi DKI Jakarta
- b. Forum Silaturahmi Orsospol
- c. Membangun Toleransi Pendirian Rumah Ibadah di Daerah

Rawan Konflik

- d. Pendataan Ulang dan Verifikasi Ormas dan LSM
- e. Peningkatan Kemampuan Kemandirian Ormas dan LSM
- f. Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Antar Kelompok Suku/Etnis
- g. Peningkatan Penanganan Kesenjangan Perekonomian di Provinsi DKI Jakarta
- h. Rakor Kerukunan Menjelang Natal dan Tahun Baru

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, antara lain:

- 1) Cakupan Ormas etnis dan keagamaan serta sekolah yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan 50 Sekolah, 72 Ormas Etnis, dan 10 Ormas Keagamaan di tahun 2015.
- 2) Meningkatnya Indeks Demokrasi di Provinsi DKI Jakarta menjadi 84,70 poin
- 3) Menurunnya potensi konflik di kalangan masyarakat dari 19 konflik pada tahun 2014 menjadi menjadi 13 konflik pada tahun 2015.
- 4) Jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdaftar dan mandiri yaitu 5 dari 370 Ormas, dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar di tahun 2015.
- 5) Cakupan penduduk DKI Jakarta yang memiliki hak pilih memperoleh informasi penyelenggaraan Pemilu sebanyak 3700 orang dari jumlah pemilih pemula $\pm$ 5000 orang
- 6) Cakupan fasilitasi partai politik yang mendapatkan kuota kursi di legislatif terdapat 10 partai yang terfasilitasi dari 10 partai yang mendapat kursi di tahun 2015.

19. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp15.308.510.588.909,00 dengan total penyerapan sebesar Rp12.135.023.601.158,00 atau 79,27%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

- a) Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- b) Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda tentang Perdagangan dan Ranperda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

2) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian

- a) Koordinasi dan Monev Bagian Kelautan, Pertanian dan Pangan (Muara Angke, Agrowisata, Raskin, Pangan Strategis, dll)
- b) Koordinasi dan Monev Bagian Koperasi dan UMKM, Industri, Energi dan Perdagangan (Industri Kreatif, PKL, Night Market, Energi, dll)
- c) Koordinasi dan Monev Bagian Penanaman Modal, Promosi dan BUMD (KEK dan lain-lain)
- d) Koordinasi dan Monev Bagian Perhubungan, Pariwisata dan Naker (LRT, Monorel, MRT, ERP)
- e) Koordinasi dan Monev Sektor Badan Usaha Daerah
- f) Koordinasi dan Monev Sektor Ekonomi Daerah
- g) Koordinasi dan Monev Sektor Perdagangan dan Perpasaran

- h) Koordinasi Pengembangan perekonomian dan ketenagakerjaan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
- i) Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah
- j) Monitoring Pelaksanaan perizinan/non perizinan bidang perekonomian pada PTSP di DKI Jakarta
- k) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perekonomian
- 3) Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyempurnaan Naskah Akademis dan Draft RUU Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
 - b) Peningkatan peran dan kapasitas Camat dan Lurah
- 4) Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia**
 - a) Pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Biro Hukum
 - b) Pengurusan Perkara di Pengadilan serta Sengketa Pertanahan
- 5) Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial**
 - a) Evaluasi Kinerja Program Usaha Kesehatan Sekolah
 - b) Koordinasi Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Pasca Banjir
 - c) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kawasan Dilarang Merokok (KDM)
 - d) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Klinik di Pasar atau Rumah Susun
 - e) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Provinsi DKI Jakarta
 - f) Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penyakit Menular
 - g) Monitoring dan Evaluasi Program RW Siaga
 - h) Pembinaan dan Verifikasi Kota Sehat Tingkat Provinsi dan Nasional
 - i) Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta
 - j) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Masalah Kesehatan

- k) Penyusunan Kebijakan Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta
 - l) Penyusunan Kebijakan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - m) Perumusan Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan
 - n) Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah
 - o) Rapat Koordinasi Sistem Rujukan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta
 - p) Koordinasi TKPK Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Klaster I)
 - q) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - r) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - s) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Penyusunan Kebijakan KB
 - t) Koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan penyusunan kebijakan bantuan dan pemberdayaan sosial
 - u) Koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan penyusunan kebijakan pelayanan dan fasilitas sosial
 - v) Survey, Koordinasi dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
- 6) Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri**
- a) Sosialisasi, dialog dan lokakarya bidang kerjasama
 - b) Penguatan tugas dan fungsi Bidang Kerjasama Luar Negeri/Internasional
- 7) Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Spiritual**
- a) Koordinasi, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Pendidikan serta Penyusunan Kebijakan Kependidikan Keperpustakaan dan Kearsipan

- b) Koordinasi, Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Penyusunan Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Mental Spiritual dan Penyelenggaraan Haji Daerah
- c) Koordinasi, Pembinaan, Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Keolahragaan dan Kepemudaan

8) Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota

- a) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Struktur Ruang Kota, melalui :
 - Koordinasi Pengembangan Sistem Prasarana Jalan
 - Koordinasi Sistem dan Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara
 - Koordinasi Sistem dan Jaringan Transportasi Perkeretaapian
 - Koordinasi Sistem dan Jaringan Utilitas Perkotaan
 - Koordinasi Sistem Prasarana Sumber Daya Air
- b) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pola Ruang Kota, melalui :
 - Koordinasi Sistem Prasarana Sumber Daya Air
 - Fasilitasi Implementasi Pengembangan Kawasan
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta
 - Koordinasi Pembangunan Kawasan Pemukiman
 - Koordinasi Pemenuhan Kewajiban Membangun Fisik Rumah Susun Murah / Sederhana
 - Pendalaman Substansi Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dengan Para Pemegang SIPPT
 - Penyusunan SK Gubernur Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- c) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau, melalui :

- Evaluasi Pencapaian Program MDGs Pokja IV Kelestarian Lingkungan dan Kemiskinan
- Peningkatan Fasilitas Strategi Mitigasi
- Peningkatan Fasilitas Strategi Pengembangan RTH
- d) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sanitasi dan Pencemaran, melalui :
 - Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Air Limbah
 - Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Kebersihan
- e) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kota, melalui :
 - Fasilitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta
 - Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan IUJK di 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di 9 SKPD di Bawah Koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
 - Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum Para Pemegang SIPPT
 - Pengendalian Penyelesaian Sanksi SP3L
 - Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Masyarakat Penyelenggara Jasa Konstruksi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

9) Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah

- a) Peningkatan administrasi Kantor Biro Umum
- b) Pendayagunaan Pekerja Harian Lepas (PHL) Biro Umum
- c) Biaya Makan dan Minum Petugas Pengamanan pada Aksi Unjuk Rasa
- d) Penilaian dan Transfer Arsip ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
- e) Pengadaan data base pengendalian pelaksanaan kegiatan
- f) Pembinaan dan Pengendalian
- g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

- h) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung
 - i) Implementasi Sistem Administrasi Surat-Menyurat di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - j) Pekerjaan Instalasi baru panel listrik Gedung Blok H
- 10) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur**
- a) Sosialisasi kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Penyusunan kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 11) Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah**
- a) Peningkatan pelayanan keprotokolan dan tamu Pimpinan daerah
 - b) Pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dan pelayanan pimpinan daerah
- 12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**
- a) Pelayanan tugas dan fungsi penyusunan produk bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - b) Pelayanan tugas dan fungsi komisi dan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 13) Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten**
- a) Partisipasi dan Penyelenggaraan Event Perekonomian di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur
 - b) Koordinasi Pembangunan Perekonomian di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur
 - c) Pengendalian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jakarta Selatan
- 14) Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten**
- a) Koordinasi Pembangunan Pemerintahan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 - b) Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Jakarta Pusat

- c) Pengadaan Lahan Kantor Lurah Galur Jakarta Pusat dan Kantor Lurah Rawasari Jakarta Pusat
 - d) Penyelenggaraan Kegiatan Anggota Dewan Kota di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Selatan
 - e) Koordinasi Tata Pemerintahan Kota di Jakarta Timur
- 15) Program Peningkatan Bantuan dan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten**
- Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur
- 16) Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten**
- Koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan
- 17) Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten**
- a) Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Mental Spiritual di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat
 - b) Pembinaan Peserta MTQ Tingkat Kota Jakarta Pusat
 - c) Pelaksanaan MTQ berjenjang tingkat Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat
 - d) Koordinasi Pembangunan Pendidikan dan Mental Spiritual di Jakarta Selatan dan Kab. Adm. Kepulauan Seribu
- 18) Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten**
- a) Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Kota di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan
 - b) Pembangunan kantor lurah dan camping Ground di Kab. Adm. Kepulauan Seribu
- 19) Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten**
- a) Koordinasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan

- b) Koordinasi Penataan Kota dan Lingkungan Hidup di Jakarta Timur
- 20) Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten**
 - a) Pemeliharaan Gedung, Fasilitas, dan Rumah dinas Walikota Jakarta Pusat
 - b) Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
 - c) Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
 - d) Penyelenggaraan Kegiatan Bagian Keuangan
- 21) Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan**
 - a) Pembangunan Kantor Lurah
 - b) Rehab Kantor Lurah
 - c) Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Lurah
 - d) Rehab Gedung Kantor Lurah dan Camat
- 22) Program Peningkatan Kapasitas KORPRI**
 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota KORPRI Provinsi, 5 wilayah Kota dan Kab. Adm. Kepulauan Seribu
- 23) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyelenggaraan Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan
 - b) Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kas Akhir Tahun
 - c) Reviu dan Evaluasi Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 24) Program Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan / Pemeriksaan**
 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tahun 2014 dan Tahun sebelumnya
- 25) Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

- a) Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2015
 - b) Pembinaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
 - c) Pembinaan dan pengelolaan keuangan BLUD
- 26) Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah**
- a) Pengasuransian Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Evaluasi Lanjutan Hasil Sensus Barang Milik Daerah
 - c) Pengamanan secara Fisik/Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Utara dan Jakarta Barat
 - d) Pengamanan Aset secara Fisik/Pemasangan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di 5 (lima) wilayah kota
- 27) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
- a) Penyediaan Tenaga Ahli/Nara Sumber untuk pengadaan barang/Jasa yang bersifat Khusus serta pre-audit proses pengadaan
 - b) Sosialisasi Peraturan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa SKPD/UKPD
- 28) Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah**
- a) Pelaksanaan Perencanaan Potensi Penerimaan dan Pengembangan Pajak Daerah
 - b) Pelaksanaan Sensus Pajak Daerah
 - c) Pelaksanaan Jakarta *Reward*
- 29) Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah**
- Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pajak
- 30) Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah**
- Penyusunan Regulasi, Sosialisasi dan Sengketa Hukum Pajak Daerah

31) Program Pelayanan Pajak Daerah

- a) Pelaksanaan Pelayanan Pajak
- b) Pelaksanaan Penagihan Piutang Pajak Daerah

32) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan dan Pendayagunaan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- b) Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Statistik Kepegawaian

33) Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

34) Program Pendidikan dan Pelatihan

- a) Penyelenggaraan Fungsi Diklat
- b) Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Kediklatan
- c) Partisipasi Penyelenggaraan Kerjasama Kediklatan dan Penjaminan Mutu

35) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

- a) Penyelenggaraan Diklat Peningkatan Kapasitas Penjenjangan Dasar, Menengah dan Lanjutan
- b) Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kapasitas Fungsional dan Teknis
- c) Pengembangan Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Sertifikasi

36) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI

Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Disiplin dan Kinerja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

37) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Karier Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- b) Pengembangan dan Pengelolaan Kompetensi Manajerial Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

38) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pembinaan dan Pengembangan SDM Inspektorat

39) Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana

Pembinaan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

40) Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi Pelaporan Bencana

- a) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
- b) Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah

41) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran

- a) Kajian Daerah Rawan Kebakaran
- b) Pembangunan tandon air
- c) Pembinaan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- d) Pengadaan dan Pengisian APAR dan kelengkapannya
- e) Pembinaan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

42) Program Penanggulangan Kebakaran

- a) Penyediaan Jasa Sewa Jaringan Komunikasi Data
- b) Antisipasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan TA. 2015
- c) Pengelolaan Dokumentasi Kebakaran

43) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

- a) Pengadaan Mobil Pompa 10.000 Liter (*High Pressure*)
- b) Pengadaan Mobil Pompa 4.000 Liter (*Medium Pressure*)
- c) Pengadaan Mobil Pompa dan Kelengkapannya untuk kawasan rawan kebakaran
- d) Pengadaan sarana UPT Bengkel Induk
- e) Pengelolaan dan perawatan Sistem *Command Centre*

44) Program Penyelamatan

Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

45) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a) Koordinasi penyusunan kebijakan dan standarisasi pelayanan publik
- b) Monitoring dan evaluasi bidang pembinaan
- c) Bimbingan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan
- d) Pengelolaan pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- e) Koordinasi penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan perizinan dan non perizinan
- f) Pengendalian dan Evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- g) Koordinasi pelaksanaan dan peningkatan pelayanan Administrasi perizinan dan non perizinan
- h) Penyediaan Jasa dan peralatan pendukung penelitian teknis
- i) Pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi pelayanan publik
- j) Pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi pelayanan publik
- k) Monitoring dan evaluasi operasional sistem teknologi Informasi penyelenggaraan PTSP
- l) Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- m) Peningkatan kompetensi pegawai dalam penerapan sistem teknologi informasi
- n) Digitalisasi Arsip Perizinan dan Non Perizinan
- o) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- p) Pengadaan Komputer PC Kebutuhan PTSP
- q) Pengadaan Printer Kebutuhan PTSP
- r) Pengadaan Scanner Kebutuhan PTSP

46) Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- a) Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Satpol PP
- b) Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

47) Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan

Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Satpol PP

48) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, antara lain:

- 1) Terselenggaranya evaluasi 3 Peraturan Daerah terdiri dari :
 - a) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
 - b) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 - c) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
- 2) Laporan mingguan tentang perkembangan harga pangan strategis.
- 3) Laporan perkembangan (Penataan PKL, Distribusi LPG 3kg dan Penghematan Energi dan Air)
- 4) Laporan revitalisasi/pembangunan pasar tradisional yang dikelola oleh PD. Pasar Jaya dan pelaksanaan CMS
- 5) Monitoring pelaksanaan kegiatan angkutan Umum.
- 6) Laporan tersedianya data kinerja BUMD yang mendapat PMP.

- 7) Termonitornya kondisi makro ekonomi DKI Jakarta dan pelaksanaan penerapan anggaran SKPD/UKPD bidang Ekonomi.
- 8) Kebijakan perpasaran (revisi Perda No.2 tahun 2012 tentang Perpasaran Swasta), dan pengendalian minuman beralkohol.
- 9) Monitoring diklat ketenagakerjaan
- 10) Laporan perkembangan inflasi daerah setiap bulannya.
- 11) PTSP berupa hasil monitoring dan evaluasi perijinan/nonperijinan di bidang ekonomi pada PTSP DKI Jakarta.
- 12) Pengurusan 44 Perkara di Pengadilan, terdiri dari : 37 perkara perdata dan 7 perkara TUN
- 13) Pembinaan Kelompok Kadarkum bagi Organisasi Wanita dan Karang Taruna, 200 peserta
- 14) Terselenggaranya mediasi sengketa pertanahan dan asset di luar pengadilan sebanyak 437 sengketa di Provinsi DKI Jakarta
- 15) Terselenggaranya Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat yang diikuti 600 peserta
- 16) Evaluasi Kinerja Program Usaha Kesehatan Sekolah, berupa Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi yang akan diajukan ke Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2016 Data yang dikirim dari tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 22 sekolah. Yang terbaik 4 Sekolah:
 - a) TK Al Ikhsan
 - b) SD Kelapa Dua Wetan 01
 - c) SMP 28
 - d) SMK 28
- 17) Koordinasi Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Pasca Banjir, berupa:
 - a) Terlaksananya Koordinasi SKPD/UKPD dalam penanganan masalah kesehatan lingkungan dan pengendalian masalah kesehatan pasca banjir
 - b) Tersosialisasinya informasi terkait penanganan masalah kesehatan pasca kepada SKPD/UKPD, Dinas, Biro dan Kecamatan Kelurahan

- c) Tersosialisasinya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terkait penanganan masalah kesehatan paska banjir kepada SKPD/UKPD, Dinas, Biro, Kecamatan dan Kelurahan
- 18) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kawasan Dilarang Merokok (KDM), berupa terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kawasan dilarang merokok pada SKPD/UKPD tingkat Provinsi.
- 19) Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Klinik Di Pasar atau Rumah Susun, berupa :
 - a) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan pada 5 Puskesmas Kecamatan, 5 Pasar, dan 5 Rusun.
 - b) Teridentifikasinya permasalahan pelayanan kesehatan seperti : kurangnya sarana prasarana di Pasar dan Rusun.
 - c) Kurang memadainya sarana prasarana Puskesmas Kelurahan.
 - d) Tersedianya rekomendasi untuk meningkatkan dan memperbaiki fasilitas/sarana prasarana pelayanan kesehatan di Rusun, Pasar dan Puskesmas
- 20) Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Provinsi DKI Jakarta, berupa terlaksananya monitoring di 6 RSUD dan 1 RSKD sehingga dapat teridentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas kesesuaian Standar Pelayanan Rumah Sakit
- 21) Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penyakit Menular, berupa terlaksananya koordinasi SKPD/UKPD dalam pengendalian penyakit menular yang pada tahun ini difokuskan pada HIV dan TB.
- 22) Monitoring dan Evaluasi Program RW Siaga, berupa :
 - a) Adanya gambaran Pelaksanaan program RW Siaga di Provinsi DKI Jakarta
 - b) Teridentifikasinya peran dan fungsi RW Siaga di Kelurahan, dan diketahui belum semua kelurahan menjadi Kelurahan Siaga Aktif.

c) Jumlah RW siaga di DKI Jakarta :

	RW Siaga Madya	RW Siaga Pratama	RW Siaga Purnama	RW Siaga Mandiri
Jakarta Pusat	44	0	0	0
Jakarta Utara	19	214	79	86
Jakarta Barat	39	0	26	0
Jakarta Selatan	15	21	23	5
Jakarta Timur	90	0	12	0

- 23) Pembinaan dan Verifikasi Kota Sehat Tingkat Provinsi dan Nasional, berupa terlaksananya pembinaan untuk Kota Administrasi dan verifikasi Kota Sehat tingkat nasional.
- 24) Penyusunan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Di Provinsi DKI Jakarta, berupa tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Standart Pelayanan Minimal pada RSUD dan RSKD
- 25) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Masalah Kesehatan, berupa terlaksananya penyusunan Instruksi Gubernur, Keputusan Gubernur, atau Peraturan Gubernur terkait Pengendalian Masalah Kesehatan, yaitu:
 - a) Pergub Nomor 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan kota Administrasi/Kabupaten
 - b) Ingub Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kewaspadaan dan pencegahan Penyakit DBD
 - c) Ingub Nomor 214 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan Komprehensif pada Penduduk usia 15 sampai 24 Tahun
- 26) Penyusunan Kebijakan Tenaga Kesehatan Di Provinsi DKI Jakarta, berupa tersusunnya Draft Peraturan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) sebagai tindak lanjut dari perintah Undang-undang 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- 27) Penyusunan Kebijakan Upaya Kesehatan Masyarakat, berupa Pergub RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif (Perbal sedang berjalan)

- 28) Perumusan Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan, berupa *Blue Print* Sistem Informasi Kesehatan di layanan kesehatan
- 29) Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, berupa diharapkan percepatan pelaksanaan program UKS
- 30) Rapat Koordinasi Sistem Rujukan Kesehatan Di Provinsi DKI Jakarta, berupa terkoordinasinya Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2015 kepada RSUD RSKD, Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan. Supaya Pelayanan kesehatan berjalan secara berjenjang dan teratur.
- 31) Koordinasi TKPK Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Klaster I), berupa :
 - a) Belum semua keluarga miskin mendapat bantuan sosial keluarga.
 - b) Temuan dari BPKP agar pengelolaan raskin dialihkan dari Biro Perekonomian ke Biro Kesejahteraan Sosial.
 - c) Telah dibuat Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Distribusi Raskin.
 - d) Telah dibuat Kepgub tentang Tim Distribusi Raskin
- 32) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, berupa :
 - Telah dibuat Pergub Nomor 155 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)
- 33) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berupa terkoordinasinya dengan SKPD/UKPD dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 34) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Penyusunan Kebijakan KB, berupa:
 - a) Para petugas pelayanan KB di Klinik / puskesmas maupun Rumah Sakit telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Pergub Nomor 47 Tahun 2014
 - b) Alat Kontrasepsi maupun pendukungnya sudah mencukupi

- c) Formulir pelaporan sudah mencukupi
 - d) Calon Akseptor yang datang dapat dilayani sesuai keinginan akseptor
- 35) Koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan penyusunan kebijakan bantuan dan pemberdayaan social, berupa:
- a) Teridentifikasinya peran dan fungsi serta aktivitas Karang Taruna
 - b) Tersedianya rekomendasi dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Karang Taruna
- 36) Koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan penyusunan kebijakan pelayanan dan fasilitas sosial, berupa :
- a) Rekomendasi Monev Standar Pelayanan Panti
 - b) Rekomendasi Monev Penanganan PMKS
 - c) Rekomendasi Monev Sarana dan Prasarana Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
 - d) Instruksi Gubernur No. 288 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan
- 37) Survey, Koordinasi dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, berupa:
- a) Terverifikasinya 52 lembaga calon penerima bantuan sebagai bahan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Terevaluasinya lembaga penerima bantuan sosial tahun sebelumnya sebagai bahan masukan kebijakan lebih lanjut.
- 38) 8 Produk Hukum (3 Pergub dan 5 KepGub) hasil program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Spiritual
- 39) Rapat Kerja Forum Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) Provinsi DKI Jakarta
- 40) Pertemuan Ulama/Umaro
- 41) Monitoring dan Dukungan Pelaksanaan STQ Tingkat Nasional berupa Prov. DKI Jakarta sebagai Juara Umum STQ Nasional

- 42) Penyediaan/Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD). Pada saat pelaksanaan Haji Tahun 2015 terdapat 15 orang jamaah haji asal DKI Jakarta yang meninggal dunia.
- 43) Rekomendasi perijinan rumah ibadah sebanyak 16 rumah ibadah
- 44) Proses Pergub percepatan pembangunan Velodrom dengan Pergub No. 14 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan *Indoor Velodrome* dan Pengembangan Equestrian
- 45) Peningkatan administrasi Kantor Biro Umum berupa penyediaan air minum untuk pegawai Biro Umum.
- 46) Pendayagunaan Pekerja Harian Lepas (PHL) Biro Umum sebanyak 45 orang K2
- 47) Biaya Makan dan Minum Petugas Pengamanan pada Aksi Unjuk Rasa untuk TNI/Polri pada 2015 dimana terdapat 7-8 kali unjuk rasa dalam 1 bulan
- 48) Penilaian dan Transfer Arsip ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, berupa pemilahan arsip dari Biro-Biro yang berada dibawah Setda untuk dipilah dan diarsipkan di BPAD
- 49) Pengadaan data base pengendalian pelaksanaan kegiatan, berupa updating database surat, barcode aset biro umum, kepegawaian
- 50) Pembinaan dan Pengendalian berupa pembekalan bimtek tata naskah dinas di 125 SKPD/UKPD
- 51) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung berupa alat ukur, perencanaan pengadaan cctv, alat keselamatan kerja, bendera, solar untuk genset, access door, gembok dan rantai, sarana pengadaan *Mechanical Electrical, AC Split, backdrop*, perlengkapan petugas ekspedisi, pengadaan pompa *portable* dan penggantian *jacketing* pipa *chiller* dan pengecatan tangga.
- 52) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung berupa : audit instrumen ME Blok G; audit instrumen ME Blok H; Data Base ME Gd. Balikpapan; Jasa Konsultasi Pengawasan Instalasi Listrik Gd. Blok; Jasa konsultasi pengawasan pekerjaan pengadaan CCTV;

Jasa konsultasi penggantian travo listrik Gd. Blok G; Jasa Pembersihan pesawat telepon; Pekerjaan Mekanik Listrik & Instalasi yang sifatnya tidak terduga di Gd. Komplek Balaikota DKI Jakarta dan Rumah Dinas; Pemeliharaan/Perawatan Instalasi ME Balairung, Balai Agung dan Blok B Komplek Balaikota; Pemeliharaan/Perawatan terpadu instalasi ME di Rumah Dinas; Pekerjaan pengadaan dan pemeliharaan Calspray Gd. Balaikota; Pekerjaan pengendalian Hama Terpadu Gd. Komplek Balaikota; Pekerjaan Sipil yang sifatnya mendesak di kompleks balaikota; Pekerjaan Sipil yang sifatnya mendesak di Rumah Dinas Pimpinan; Pembuangan Limbah Khusus di Gd. Komplek Balaikota; Pemeliharaan alat komunikasi yang sifatnya mendesak; Pemeliharaan layanan kebersihan balairung dan balai agung; Pemeliharaan layanan kebersihan Blok B' Komplek Balaikota; Pemeliharaan layanan kebersihan Blok H kompleks Balaikota; Pemeliharaan layanan kebersihan Blok D,E,F Komplek Balaikota; Pemeliharaan layanan kebersihan Gd. Blok G Komplek Balaikota; Pemeliharaan layanan kebersihan Halaman Balaikota; Pemeliharaan Lift Blok B'; Pemeliharaan/Perawatan Mesin-mesin Mikrofilm; Pemeliharaan/Perawatan Mesin Penggandaan; Pemeliharaan Terpadu Mekanikal Elektrikal Gd. Blok E, F dan G; Pemeliharaan Key Telepon; Pemeliharaan Konverter Modem; Pemeliharaan/Perawatan Mesin Penggandaan; Penataan Ruang Kerja Biro Umum; Pengendalian Sampah/Barang-barang Inventaris Bekas di Gedung Komplek Balaikota; Perawatan Faksimile; Perawatan Lift Mitsubishi Gedung Blok G dan H Balaikota; Perawatan STLO Kap. 250 s.d. 2500 Ext; Perawatan STLO Kap. 250 s.d. 2500 Ext; Perbaikan *Chiller* 500TR

- 53) Implementasi Sistem Administrasi Surat-Menyurat di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (dimatikan karena sesuai Pergub 193 Tahun 2015, petugas magang dari SMK/SMEA tidak boleh diberikan makan/minum)

- 54) Pekerjaan Instalasi baru panel listrik gedung blok H akibat kebakaran di bulan Oktober 2014
- 55) Biro umum mendukung pelaksanaan wisata balaikota yang diadakan pada setiap hari sabtu & minggu. Mulai launching pada tgl 12 September 2015, dukungannya berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 185 Tahun 2015 dan disempurnakan kembali Instruksi Gubernur Nomor 227 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Wisata Balaikota, dengan melibatkan beberapa SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah pekerja yang stand by untuk satu hari berjumlah 20 orang x 32 minggu (per 12 september hingga Desember 2015) = 640 orang
- 56) Tersusunnya Rapergub dari :
- a) RSUD Pasar Minggu,
 - b) Masa Transisi Pembubaran Taman Hiburan Rakyat Lokasi Jakarta;
 - c) Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Unit Pengelola Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
 - d) Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengelola Data Informasi Keuangan dan Aset Daerah;
 - e) Pembubaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ);
 - f) Perubahan atas Pergub Nomor 227 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPMPKB;
 - g) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan pelatihan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - h) Dewan Transportasi Kota,
 - i) Dinas Kesehatan,
 - j) Dinas Pelayanan Pajak,
 - k) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
 - l) Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan,
 - m) Unit Pengelola Ambulans Gawat Darurat,

- n) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan,
 - o) Unit Pelayanan Pajak Daerah
 - p) Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta,
 - q) Unit Pengelola Perpustakaan
 - r) Kecamatan
 - s) Kelurahan
- 57) Tersusunnya standarisasi peralatan teknis SKPD sebanyak 9 Rakepgub pada Dinas Penataan Kota, Dinas Kebersihan, BPLHD, Dinas Bina Marga, Kantor Taman Margasatwa Ragunan, Dinas Tata Air, Inspektorat, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman
- 58) Tersusunnya SP (Standar Pelayanan) di Kelurahan, Kecamatan dan UPT
- 59) Tertatanya peringkat jabatan, kelas jabatan dan harga jabatan 39 SKPD/UKPD (*Job Class*) dirinci formasi pegawai 40 SKPD
- a) Sekretariat Daerah
 - b) Inspektorat
 - c) Bappeda
 - d) Dinas Tenaga Kerja
 - e) Dinas Sosial
 - f) Dinas Tata Air
 - g) Dinas Perumahan dan Gd, Pemda
 - h) Dinas Pertamanan dan pemakaman
 - i) Dinas Perindustrian dan Energi
 - j) Dinas Perhubungan dan Tranpostasi
 - k) Dinas Pendidikan
 - l) Dinas Penataan kota
 - m) Dinas Pariwisata dan kebudayaan
 - n) Dinas pelayanan Pajak
 - o) Dinas Olahraga dan pemuda
 - p) Dinas KUMKM serta Perdagangan
 - q) Dinas Komunikasi, Informatika dan kehumasan
 - r) Dinas Kesehatan

- s) Dinas Kelautan, pertanian dan Ketahananpangan
 - t) Dinas Kebersihan
 - u) Dinas Bina Marga
 - v) Dinas penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan
 - w) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - x) Satuan Polisi Pamong Praja
 - y) BKD
 - z) BPBUMD dan PM
 - aa) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - bb) Badan Pendidikan dan pelatihan
 - cc) BPLHD
 - dd) BPKAD
 - ee) BPTSP
 - ff) BPPBJ
 - gg) BPMPKB
 - hh) BPAD
 - ii) Sekretariat DPRD
 - jj) Kota Administasi
 - kk) Kabupaten Administrasi
 - ll) KPK Monas
 - mm) Kecamatan
 - nn) Kelurahan
- 60) Tersusunnya SPM sebagai tindak lanjut Permendagri 6 / 2007
 - 61) Tersusunnya SOP sebagai tindak lanjut Pergub 24 /2014
 - 62) Terfasilitasinya pelaksanaan reses DPRD yaitu 3 (tiga) kali reses
 - 63) Terselenggaranya pembahasan 6 Rancangan Peraturan Daerah pada Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta.
 - 64) Terfasilitasinya pelaksanaan Pansus DPRD sebanyak 9 Pembahasan Pansus
 - 65) Pembinaan Peserta MTQ
 - a) Jakarta Pusat : 70 peserta, Jakarta Selatan : 60 peserta, Jakarta Utara : 23 Peserta
 - b) Juara MTQ Tingkat Provinsi : Jakarta Barat

- 66) Hasil Juara Lomba
- a) Jakarta Utara : Lomba Kota Sehat memperoleh Tanda Penghargaan “SWASTI SABA WISTARA” dan Juara IV MTQ dan Juara III STQ Tingkat Provinsi
 - b) Jakarta Selatan : MTQ: Juara ke 2 Tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan, Kota Sehat: Penghargaan Swasti Sabha Wiwerda, Adipura: Penghargaan untuk Kategori Hutan Kota dan Kadarkum: Juara ke 2 Tingkat Provinsi
- 67) Koordinasi Pembangunan Perekonomian
- a) Jakarta Utara, Penataan JU yang merupakan salah satu target RPJMD, hasilnya adalah 6 JU telah ditata selama tahun 2015 dimana target RPJMD hanya 4 JU
 - b) Jakarta Selatan, Koordinasi dan Monitoring Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta Selatan: 3 Lokasi Binaan yaitu Bintaro, Muria Dalam dan Pasar Minggu.
- 68) Koordinasi Pembangunan Pemerintahan
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW) dimana dalam kegiatan tersebut disosialisasikan Pergub 168/2014 tentang Pedoman RT dan RW. Point yang disampaikan antara lain :
- a) Persyaratan pendidikan sebagai Ketua RT minimal SMP dan sebagai Ketua RW minimal SMA
 - b) Jumlah minimum pembentukan RT dimana sebelumnya 30-60 KK menjadi 80-160 KK.
 - c) Lurah berwenang memberhentikan pengurus RT dan RW
 - d) Periode RT dan RW maksimal 2 Periode berturut-turut
- 69) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
- a) Jakarta Utara, Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum. Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Adm. Jakarta Utara dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Materi yang disampaikan antara lain Perda tentang ketertiban umum, UU Perlindungan Anak dan Perempuan, serta Program 5 Tertib. Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk

penilaian Kelurahan Sadar Hukum tingkat Provinsi DKI Jakarta. Untuk Jakarta Utara sampai dengan tahun 2015 sudah terpilih sebanyak 23 Kelurahan yang telah meraih predikat Kelurahan Sadar Hukum. Pada tahun 2015 terpilih 4 Kelurahan yang meraih predikat Kelurahan Sadar Hukum yaitu : Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelurahan Tugu Utara, Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Kapuk Muara. Kelurahan tersebut mendapatkan piagam penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Menteri Hukum dan HAM dan akan dikukuhkan bulan Maret 2016.

- b) Jakarta Selatan, Penanganan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota/Kab: Hasil 25 perkara terselesaikan
- 70) Koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial
 - a) Jakarta Utara, Pelaksanaan Kota Sehat yang merupakan salah satu target RPJMD, hasilnya Jakarta Utara memperoleh Tanda Penghargaan “SWASTI SABA WISTARA”
 - b) Jakarta Selatan : Presentase Tatanan Kota Sehat di Kota Adm Jaksel: Realisasi 100%, Presentase RTS yang Menerima Raskin: Dari 100% terealisasi 67,50%
- 71) Koordinasi Pembangunan Pendidikan dan Mental Spiritual
 - a) Jakarta Utara Pelaksanaan MTQ dan STQ tingkat Provinsi dimana pada acara itu Jakarta Utara Mendapat Juara IV MTQ dan Juara III STQ Tingkat Provinsi
 - b) Jakarta Selatan Persentase Koordinasi Pelaksanaan BOP dan BOS: Dari 100% terealisasi 89,84%
- 72) Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Kota

Koordinasi dan Monitoring Kewajiban Pengembang. Pada tahun 2015 jumlah pengembang pemegang SIPPT yang telah di BAPF atas kewajiban sebanyak 8 yaitu : PT. Graha Cipta Propertindo, PT. Gamma Investa Lestari, PT. BinaKarya Bangun Propertindo, PT. Giri Selo Indah, PT. Sinar Grahamas Lestari, Rusun Muara

Baru / Agung Sedayu Group, PT. Gading Selaras dan PT. Grahatama Persada Realty.

- 73) Koordinasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Monitoring Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
Pada tahun 2015 telah terlaksana 25 kali kegiatan rapat dan monitoring kerja bakti dengan menghasilkan volume sampah sebanyak 13.745,40 M².
- 74) Koordinasi Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
 - a) Kota Jakarta Selatan meraih penghargaan Adipura dalam kategori Hutan Kota
 - b) Persentase Koordinasi Kewajiban Fasos Fasum Untuk Ruang Terbuka Hijau: Target 25 Berita Acara Penelitian Fisik terealisasi 19 Berita Acara Penelitian Fisik
- 75) Perencanaan Pembangunan Gedung Lurah di :
 - a) Jakarta Utara: Kel. Kelapa Gading Barat dan Kel. Kapuk Muara,
 - b) Jakarta Timur: Kel Cipinang Besar Selatan dan Kel. Pulo Gebang
- 76) Perencanaan Rehab Total Gedung Lurah Jakarta Timur di Kel Pondok Kopi
- 77) Rehab Ringan Gedung Lurah Jakarta Pusat di Kel Galur
- 78) Rehab Sedang Gedung Lurah di
 - a) Jakarta Pusat : Kel. Gelora, Kel. Kebon Kacang, Kel. Kebon Kelapa dan Kel. Utan Panjang
 - b) Jakarta Timur : Kel Pisangan Baru dan Kel Malaka Jaya,
- 79) Rehab Berat Gedung Lurah Jakarta Pusat di Kel Kwitang
- 80) Rehab Total Gedung Lurah di
 - a) Jakarta Pusat : Kel Gondangdia dan Kel. Kenari,
 - b) Jakarta Utara : Kel. Koja, Kel. Kelapa Gading Barat dan Kel. Kapuk Muara,
 - c) Jakarta Barat : Kel. Kapuk, Kel. Kedoya Utara, Kel. Kembangan Utara, Kel. Pekojan, Kel. Tanjung Duren

Selatan, Lanjutan: Kel. Kali Anyar, Kel. Rawa Buaya, Kel. Tambora dan Kel. Tegal Alur

- d) Jakarta Selatan : 4 Kelurahan
- 81) Pembangunan Kelurahan Kab. Kep. Seribu di Kel. P. Kelapa
- 82) Rehab Sedang Gedung Kecamatan di
 - a) Jakarta Pusat : Kec Tanah Abang ,
 - b) Jakarta Timur : Kec Matraman
- 83) Rehab Total Gedung Kecamatan
 - a) Jakarta Barat : Lanjutan: Kec Palmerah
 - b) Jakarta Timur : Kec Ciracas dan Makasar
- 84) Dialog Interaktif Etika Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan hasilnya memacu para peserta untuk lebih kritis terhadap isu-isu yang disampaikan dalam kegiatan ini Jumlah peserta 500 orang Topiknya Hakekat Revolusi Mental untuk Mewujudkan Sikap Excellent Service Kepada Masyarakat.
- 85) Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Anggota Korpri Berapa konsultasi yang terlayani sebanyak 10 orang dengan topik pemahaman hukum bagi anggota KORPRI bukan hanya dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan, juga sangat berguna untuk perspektif kehidupan dalam masyarakat
- 86) Pembekalan Managemen Keuangan Keluarga dan Kewirausahaan Anggota Korpri Provinsi DKI Jakarta hasilnya dengan pengelolaan keuangan keluarga yang terencana, para anggota KORPRI dapat hidup sejahtera, termasuk setelah tiba pada masa pensiun Jumlah peserta 180 orang untuk topiknya Meningkatkan pemahaman, teknik pengelolaan dalam merencanakan pengelolaan keuangan keluarga dan Terwujudnya jiwa kewirausahaan dan jejaring usaha bagi anggota KORPRI yang memasuki masa pensiun.
- 87) Pembinaan dan Pelatihan Kerohanian bagi ASN Pemprov. DKI Jakarta. Untuk kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena terdapat kesalahan kode rekening. Di DPA, tidak tertulis kode

rekening untuk honorarium narasumber, tapi hanya ada kode rekening untuk transport peserta

- 88) Pembinaan Olah Raga bagi Pegawai ASN Provinsi DKI Jakarta hasilnya berupa tersedianya atlet KORPRI Provinsi DKI Jakarta untuk cabang olahraga pertandingan guna mempersiapkan pada pengiriman ke tingkat nasional Jumlah peserta 100 orang dan topiknya menyediakan fasilitas berolahraga kepada anggota KORPRI, sehingga memberikan manfaat kesehatan jasmani dan terjalannya silaturahmi antar anggota KORPRI
- 89) Pendalaman materi ke-Korpri-an di DKI Jakarta hasilnya untuk memberikan wawasan bagi anggota KORPRI Jumlah peserta 150 orang dan topiknya Eksistensi organisasi KORPRI sebagai Wadah berhimpunnya PNS dan UU Aparatur Sipil Negara serta Bantuan dan konsultasi hukum bagi anggota KORPRI
- 90) Pengiriman Peserta Pendidikan Khusus Profesi Advocat hasilnya mereka diharapkan mampu dan mau melakukan pendampingan dan pembelaan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta Jumlah peserta 5 orang dan topiknya permasalahan hukum yang berkaitan dengan extraordinary crime seperti terorisme, narkoba, dan korupsi.
- 91) Peningkatan Soliditas dan Solidaritas anggota Korpri DKI Jakarta, hasil dari kegiatan untuk merekatkan ikatan silaturahmi jumlah peserta sebanyak 1500 orang dan topiknya untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan menguatkan ikatan soliditas antar Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta yang sepanjang tahun telah bekerja secara formal melaksanakan tupoksi masing-masing.
- 92) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan hasilnya mewujudkan keimanan dan ketaqwaan bagi anggota KORPRI DKI Jakarta jumlah peserta 500 orang topiknya menciptakan anggota KORPRI yang berbartabat dan berkualitas dalam menjalani amanah di Pemerintahan.
- 93) Penyelenggaraan Hiburan Anggota Korpri Provinsi DKI Jakarta dan keluarga, hasilnya demi menjalin rasa kebersamaan antar

anggota KORPRI DKI Jakarta dan peserta yang hadir 3000 orang dengan topik Meningkatkan motivasi kerja bagi anggota KORPRI dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dan Meningkatkan tali silaturahmi dan keakraban antara pimpinan dan anggota KORPRI dan keluarganya

- 94) Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan, hasilnya menjalin talisilaturahmi antar umat beragama Jumlah peserta 500 topiknya untuk membangun jiwa yang kuat daalam menjalani amanah di dalam Pemerintahan.
- 95) Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta hasilnya menjalin talisilaturahmi antar umat beragama Jumlah peserta 500 orang Topiknya Dengan Semangat Idul Fitri Kita Bangun Sumber Daya Aparatur yang Amanah dan Ketauladanan Nabi ismail AS Kita Amalkan dalam Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat
- 96) PORSENIBUD anggota Korpri Provinsi DKI Jakarta hasil dari pelaksanaan beberapa pertandingan olahraga (futsal, catur, tenis meja, tenis lapangan, voli, bulu tangkis) dan satu perlombaan seni (paduan suara) Jumlah peserta 500 peserta dan topiknya dengan memperkuat netralitas dan profesionalitas, KORPRI siap mensukseskan program nawa cita melalui gerakan ayo kerja menuju terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- 97) Peningkatan Tugas-tugas Koordinasi Pengawasan merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi Inspektorat diantaranya penyediaan tenaga ahli/ narasumber sebagai second opinion dalam pengawasan/ pemeriksaan, pendampingan/ joint audit dan kunjungan kerja.
- 98) Pra Pemuktahiran Data Aparat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (TLHP APIP) dan Pemuktahiran Data Aparat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (TLHP APIP) tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal Inspektorat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri yaitu pada tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri. Pada tahun 2015 Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu dari enam provinsi yang telah berhasil menyelesaikan TLHP secara tuntas hingga mencapai (100%).

- 99) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten pada Tahun 2015 telah melaksanakan pengawasan reguler dengan target sebanyak 233 objek pengawasan dan realisasi sebanyak 183 objek pengawasan. Untuk Inspektorat Provinsi telah menerbitkan 46 laporan hasil pengawasan sedangkan Inspektorat Pembantu Kota / Kabupaten Administrasi telah menerbitkan 137 laporan hasil pengawasan yang diterbitkan.
- 100) Pengawasan Kas Akhir Tahun Anggaran 2015 beserta Stock Opname di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara serentak oleh Inspektorat Provinsi beserta Inspektorat Wilayah dengan jumlah obyek pemeriksaan 709 SKPD / UKPD.
- 101) Evaluasi Laporan Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pada Tahun 2015 Inspektorat Provinsi telah melakukan evaluasi pada 13 SKPD dan seluruhnya telah dilaporkan. Dari hasil evaluasi tersebut telah diperoleh data SKPD dengan nilai tertinggi dan terendah sebagaimana tabel berikut:

NO	SKPD	NILAI (%)
1	Dinas Pendidikan	47,62
2	Dinas Sosial	61,27
3	Dinas Perindustrian dan Energi	47,62
4	Dinas Perumahan dan Gedung	67,86
5	Dinas Kelautan dan Pertanian	57,52
6	BPLHD	49,54
7	Dinas Pelayanan Pajak	53,96
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47,60

NO	SKPD	NILAI (%)
9	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	54,78
10	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	47,62
11	Dinas Kebersihan	74,71
12	Dinas Pendidikan	47,62
13	Dinas Pemuda dan Olah Raga	47,60

- 102) Tiap tahunnya Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 2 kegiatan reviu yaitu Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 2015 dengan 1 Laporan dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 dengan 1 Laporan. Tujuan dilaksanakannya reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sedangkan sasaran Reviu adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan keuangan dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dari reviu tersebut didapat hasil bahwa beberapa SKPD / UKPD yang belum sesuai sistem pengendalian intern (SPI) dan pengelolaan keuangan atau aset dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 103) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2014 dan tahun sebelumnya telah 100% selesai.
- 104) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI tahun 2004 – 2014 (akumulasi dari tahun 2004 – 2014 merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti dan Inspektorat harus memantau dari tahun 2004) adalah sebesar 3,8 %.
- 105) Capaian indikator kinerja Persentase atas tindak lanjut atas Pengawasan/ Pemeriksaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 (tahun 2015 masih dalam proses

pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan tindaklanjutnya mulai tahun 2016) yang telah selesai sebanyak 97% dari jumlah rekomendasi.

- 106) Diasuransikannya aset gedung dan bangunan sebanyak 1.031 unit dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 9.599.656.861,69,00 dan aset kendaraan dinas operasional sebanyak 1.208 unit dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 12.304.394.929,61,00. Permasalahan kurangnya pemahaman SKPD terhadap pengasuransian aset dan data permohonan dari SKPD/UKPD kurang lengkap, Solusi diberikan sosialisasi dan penjelasan terkait pengasuransian aset.
- 107) Penyelesaian sertifikat tanah milik/dikuasai Pemprov. DKI Jakarta pada tahun :
- a) 2013 Dalam status Pengukuran sebanyak 66 bidang dan telah diterbitkan sertifikat kepemilikannya sebanyak 18 bidang.
 - b) 2014 Dalam status Pengukuran sebanyak 316 bidang dan telah diterbitkan sertifikat kepemilikannya sebanyak 0 bidang.
 - c) 2015 Dalam status telah diterbitkan sertifikat kepemilikannya sebanyak 2 bidang.
- 108) Pada tahun 2015 terdapat 99 tanah yang digugat/diklaim dari masyarakat dengan total luas 3.464.734 m² dengan rincian sebagai berikut:
- a) Jakarta Pusat, 14 lokasi dengan luas tanah 54.823 m²
 - b) Jakarta Utara, 10 lokasi dengan luas tanah 737.880 m²
 - c) Jakarta Barat, 17 lokasi dengan luas tanah 1.784.519 m²
 - d) Jakarta Selatan, 16 lokasi dengan luas tanah 202.162 m²
 - e) Jakarta Timur, 42 lokasi dengan luas tanah 685.353 m²
- 109) Penerimaan aset dari pihak ketiga tahun 2015 sebagai berikut :
- a) Inventarisasi aset fasos fasum yang berasal dari pihak ketiga di 75 lokasi terdiri dari 67 permohonan pada tahun 2015 dan

8 tindak lanjut permohonan pada tahun 2014 di 5 wilayah Kota Adm. Jakarta

- b) Penyelesaian BAST Aset Fasos Fasum / Hibah Aset dari pihak ketiga di 41 lokasi terdiri dari 33 BAST permohonan pada tahun 2015 dan 8 BAST Tindak lanjut permohonan pada tahun 2014 yang terdiri dari : SIPPT dan PKS sebanyak 38 BAST dan Hibah sebanyak 3 BAST
- 110) Perencanaan dan pengendalian potensi penerimaan pendapatan daerah dari Pajak dan Retribusi berupa:
- a) Implementasi elektronik retribusi pada SKPD/UKPD pada 17 SKPD dan 57 UKPD
 - b) Pelaksanaan dan evaluasi perjanjian kerjasama penerima pajak daerah dan retribusi daerah sebanyak 13 PKS yang terdiri dari 12 Bank dan 1 PT POS Indonesia
- 111) Barang/Jasa yang bersifat Khusus serta pre-audit proses pengadaan sebanyak 8 orang dalam kegiatan antara lain Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ), Probity Audit (Inspektur), E-Planning (Bappeda), Standar Satuan Harga, harga satuan pokok kegiatan, Analisis Satuan biaya, dan SOP E-Budgeting (BPKAD dan Konsultan), Program Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa (Milinium Challenge Account Indonesia (MCAI), SPSE dan SIRUP (LPSE), Strategi percepatan pengadaan barang/jasa dan perencanaan pengadaan (LKPP) dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak dan Permasalahannya (LKPP)
- 112) Sosialisasi Peraturan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa SKPD/UKPD yang terbagi dalam 4 angkatan dengan total peserta sebanyak 886 orang
- 113) Sosialisasi Peraturan Terkait Pengadaan Barang/Jasa, dan Penyelenggaraan sistem layanan pengadaan barang/jasa terealisasi 49,08%
- 114) Peningkatan Administrasi Kantor di Unit BPPBJ terealisasi 66,68%

- 115) Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dan E-Purchasing terealisasi 27,12%
- 116) Tersusunnya 4 (empat) dokumen laporan yang sesuai dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a) Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Klasifikasi Bumi dan Bangunan
 - b) Penyusunan Metode Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
 - c) Penyusunan Perhitungan NJKB yang Tidak Tercantum dalam Pergub tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - d) Perumusan Penerapan Kebijakan Permendagri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
- 117) Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pengawasan Hiburan Malam Tahun Baru 2016.
- a) Diperolehnya data ijin penyelenggara Hiburan Malam Tahun Baru dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.DKI Jakarta
 - b) Terekamnya omset dan pajak hiburan pada malam tahun baru 2016 sebesar Rp. 1.602.702.017,00
 - c) Optimalisasi Pemungutan Penerimaan Pajak Hiburan
- 118) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah sebanyak 1 (satu) Rapergub
- 119) Pencanangan Penyampaian PBB oleh Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah sebanyak 1 (satu) kali pelaksanaan
- 120) Sosialisasi Pajak Daerah melalui berbagai event dan media, yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) event untuk 13 jenis Pajak Daerah
- 121) Pelaksanaan Layanan di Gerai Pajak pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di 5 wilayah Kota , yaitu : Gerai Pajak Mal Thamrin City Jakarta Pusat, Gerai Pajak Mal Artha Gading Jakarta Utara, Gerai Pajak Mal Taman Palem dan Jakarta Barat, Gerai Pajak

Gandaria City Jakarta Selatan, Gerai Pajak Tamini Square Jakarta Timur.

- 122) Penertiban dan Pembongkaran Reklame di 43 UPPD Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
- 123) Pekan Panutan PBB di 5 Wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu
- 124) Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak Daerah di 5 Wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu
- 125) Pendataan dan Penertiban Reklame di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak di 5 Wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu
- 126) Penyusunan *Bezzeting* dan Pengembangan Formasi Kebutuhan Pegawai kepada 61 SKPD di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta.
- 127) Seleksi ASN dari Luar Pemerintah dan Mutasi Antar SKPD. "Seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Luar Pemerintah dan Mutasi Antar SKPD" sebanyak 167 pegawai.
- 128) Seleksi Calon Praja IPDN dan Supervisi Praja IPDN. Seleksi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Supervisi Praja IPDN dengan hasil seleksi 14 orang
- 129) Pembangunan Sistem Layanan Kepegawaian berupa aplikasi hukuman disiplin
- 130) 2 (dua) kali Pelaksanaan Kegiatan Donor Darah dan 43 (empat puluh tiga) kali Monitoring Pelaksanaan SKJ
- 131) Proses Penyelesaian Pemberian Uang Duka Wafat Bagi CPNS, PNS dan PTT Beserta Keluarga di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 21 SK Kepala BKD
- 132) Jumlah pegawai mengikuti program Pegawai Tugas Belajar Dalam Negeri sebanyak 194 orang
- 133) Terselenggaranya Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana bagi 60 orang
- 134) Terselenggaranya Diklat Bendaharawan Penerimaan bagi 120 orang

- 135) Terselenggaranya Diklat Bendaharawan Pengeluaran bagi 120 orang
- 136) Terselenggaranya Diklat Pelayanan Prima bagi 150 orang
- 137) Terselenggaranya Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi 90 orang
- 138) Terselenggaranya Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi 90 orang
- 139) Terselenggaranya Diklat Pengelolaan Barang Daerah bagi 180 orang
- 140) Terselenggaranya Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta Estate Management bagi 150 orang
- 141) Terselenggaranya Diklat Manajemen Sekolah bagi 240 orang
- 142) Terselenggaranya Workshop Resolusi Mental bagi 3000 orang
- 143) Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi 90 orang
- 144) Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi 120 orang
- 145) Terselenggaranya Diklat PPNS Satpol PP bagi 121 orang
- 146) Terselenggaranya Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi 60 orang
- 147) Jumlah pegawai mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II sebanyak 370 orang
- 148) Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III sebanyak 540 orang
- 149) Sertifikasi Program Diklat Prajabatan Gol I, II, III, dan diklat Kepemimpinan tingkat III dan IV
- 150) Pelayanan sistem informasi kediklatan, pendataan online berbasis web, *elearning* dan *distance learning*, *Computer Assessment Test*
- 151) Seleksi pegawai tugas belajar 250 orang
- 152) Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Kinerja kepada 66 SKPD/UKPD dan terbitnya 1 Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.
- 153) Penegakan Disiplin PNS/CPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan terbitnya 60 SK Hukuman Disiplin dan 50 SK Ijin Perceraian.

- 154) Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 847 SK.
- 155) Updating Data dan Digitalisasi Arsip Hasil Uji *Assessment*/Psikolog sebanyak 2.191 berkas Hasil Uji *Assessment*/Psikologi.
- 156) Terpenuhinya SDM Aparatur melalui sistem e-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test) sesuai formasi jabatan sebanyak 4.618
- 157) Tersedianya sistem promosi dan mutasi pegawai secara terbuka 3 orang kandidat lulus seleksi deputi, 30 orang kandidat lulus seleksi eselon II tahap I, 80 orang kandidat lulus seleksi eselon II tahap 2, 95 orang lulus seleksi calon lurah
- 158) Jumlah pegawai yang menerima penghargaan sebanyak 2630 pegawai Penghargaan Satyalencana 1470 pegawai, Masa Kerja Gubernur 1.160 pegawai
- 159) Terpenuhinya kuantitas dan kualitas pegawai yang sesuai kebutuhan organisasi dan terlaksananya pengembangan kompetensi pejabat/pegawai potensial sebanyak 857 orang pejabat/pegawai potensial di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 160) Tersedianya data potret dan peta kompetensi dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 857 orang pejabat/pegawai dengan 1 peta standar kompetensi seluruh pegawai
- 161) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kebijakan TKD sebanyak 1 kali yang menghasilkan 1 kajian kebijakan TKD, kajian poin TKD
- 162) Jumlah pensiun yang tepat waktu dan tepat bayar sebanyak 2.173 pegawai
- 163) Terselenggaranya prosesi penandatanganan dokumen penetapan kinerja seluruh SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 dokumen

- 164) Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi jabatan sebanyak 857 pegawai
- 165) Persentase Jabatan Struktural yang memenuhi standar kompetensi sebanyak 82 %
- 166) Jumlah rumpun jabatan fungsional yang dibina sebanyak 7 rumpun jabatan fungsional
- 167) Terlaksananya sistem peringatan dini di 8 lokasi, yang terdiri dari 2 alat *Automatic Water Level Recording* (AWLR) di Kelurahan Kapuk Muara dan Pulau Tidung, serta 6 alat Early Warning System (EWS) di 5 wilayah kota administrasi dan 1 di Pulau Tidung;
- 168) Terselenggaranya penetapan kawasan evakuasi bencana minimal berdaya tampung 100 orang pengungsi dengan luas minimal 1000 m² di 56 titik evakuasi bencana yang sesuai standar;
- 169) Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) berjumlah 6.430 orang yang terdiri dari Kader Tk Provinsi maupun 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten.
- 170) Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah, berupa :
- a) Pembentukan Kader Penanggulangan Bencana sebanyak 14.000 kader terdiri dari Provinsi (160 kader), Jakarta Pusat (400 kader), Jakarta Utara (10.000 kader) Jakarta Barat (1.000 kader), Jakarta Selatan (1.200 kader), Jakarta Timur (1.000 kader), dan Kabupaten Kepulauan Seribu (240 kader)
 - b) Peningkatan Kapasitas bagi Penyandang Disabilitas sebanyak 30 penyandang disabilitas
 - c) Peningkatan Wawasan Pengelola Gedung dan Petugas Pelaksana Teknis Gedung Bertingkat Di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 500 orang dari 10 gedung
- 171) Peningkatan Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- a) Dukungan Operasional Penanganan Bencana Daerah selama 12 bulan di 5 wilayah dan 1 kabupaten

- b) Dukungan Pelaksanaan Tim Assessment dan Penanganan Psikososial di lokasi rawan bencana maupun dampak bencana yang meliputi TK, PAUD, dan Rusunawa.
 - c) Operasional Gudang Buffer Stock Penanggulangan Bencana Daerah (anggaran dimatikan karena keberaddaan wilayah kota dan kabiupaten terdapat gudang buffer stock)
 - d) Pelayanan Pengendalian Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta operasional Pusat pengendalian Operasional (Pusdalops) sebanyak 21 orang tenaga kontrak.
 - e) Pengadaan Bufferstock Logistik Penanggulangan Bencana dengan 4 (empat) jenis terdiri dari Sarung, Terpal Gulung, Pakaian Seragam dan Matras gulung
 - f) Pengadaan Tenda Penanggulangan Bencana (tidak terserap dikarenakan pihak penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dan kualitas tenda yang tidak memungkinkan untuk pengungsi, solusi diadakan kembali tahun berikutnya)
 - g) Piket siaga bencana dilakukan di Tingkat Provinsi, 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten pada bulan Januari – Maret dan November-Desember dengan petugas piket yang dibantu oleh relawan penanggulangan bencana seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI), Resimen Mahasiswa (Menwa) dan termasuk TNI/Polri
- 172) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, berupa Penyusunan Rencana Kontijensi tingkat Provinsi merupakan panduan para pemangku kepentingan Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan Rencana Operasi pada fase siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat banjir Tahun 2016 sehingga dapat mengurangi korban dan kerugian.
- 173) Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah, berupa Kajian Kawasan Evakuasi Bencana untuk menentukan titik evakuasi bencana yang merupakan target RPJMD dengan

daya tampung 100 orang pengungsi dengan luasan 100 m² berdasarkan Peraturan Gubernur No. 145 Tahun 2015 tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Minimal Pelayanan Bidang Penanggulangan Bencana.

- 174) Untuk gedung baru, pengawasan dan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam rangka rekomendasi teknis instalasi dan persetujuan SLF 1, gedung yang diperiksa sebanyak 142 gedung. Yang mendapatkan rekomendasi SLF sebanyak 24 gedung. Sedangkan untuk gedung lama (eksisting) yang akan memperpanjang SLF dalam kegiatan pelayanan permohonan pemeriksaan berkala pada bangunan existing dalam rangka sertifikasi keselamatan kebakaran (SKK) gedung yang diperiksa sebanyak 226 gedung. Yang mendapatkan sertifikat keselamatan kebakaran sebanyak 220 gedung dan yang tidak mendapatkan sertifikat keselamatan kebakaran sebanyak 6 gedung.
- 175) Jumlah kebakaran dini yang dapat diatasi masyarakat sebanyak 67 kasus
- 176) Jumlah bangunan yang mendapatkan rekomendasi SLF sebanyak 24 gedung
- 177) Jumlah bangunan yang memenuhi sertifikat keselamatan kebakaran (SKK) berjumlah 220 gedung
- 178) Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit mencapai 100%
- 179) Persentase jumlah mobil pompa yang siap dioperasikan adalah 99%
- 180) Persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamatan mencapai 97%
- 181) Terselenggaranya pengadaan mobil pompa 10.000 liter (High Pressure) sebanyak 5 (lima) unit.
- 182) Terselenggaranya pengadaan mobil pompa 4.000 liter (Medium Pressure) sebanyak 10 (sepuluh) unit

- 183) Terselenggaranya pengadaan mobil pompa dan kelengkapannya untuk kawasan rawan kebakaran sebanyak 15 (lima belas) unit.
- 184) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan bagi 137 orang terdiri dari Diklat Damkar I sebanyak 40 Peserta, Diklat Operator Unit Pompa Kebakaran Tingkat I sebanyak 90 Peserta dan Pemusatan Latihan Skill Kompetisi di Singapura sebanyak 7 peserta.
- 185) Pemusatan Latihan Skill Kompetisi di Singapura sebanyak 7 peserta
- a) 1 Emas : Kasno / NIP 198704232011011008 Jenis Lomba *Individual Challenge, Braveheart Challenge* (Penyelamatan di Ketinggian)
 - b) 1 Perak : Supriyanto / NIP 198703232011011010 Jenis Lomba *Individual Challenge, Braveheart Challenge* (Penyelamatan di Ketinggian)
 - c) 2 Perunggu : Yohanes Andrianus Atib / NIP 199201202011011001, Junaidi Abdillah / NIP 198307152009041004 (*Global Challenge / Mixed Team Challenge - Stronger, Faster, Higher*) (Penyelamatan Korban pada Bangunan Runtuh)
- 186) BPTSP memiliki 318 service point yang tersebar di seluruh DKI Jakarta mulai dari tingkat 1 Provinsi, 5 Kota, 1 Kabupaten, 44 Kecamatan hingga 267 Kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk menjangkau lebih dekat dengan masyarakat (pemohon).
- 187) Program *One Day Service* (ODS) dan Drive Thru merupakan program penyelesaian perizinan dan non perizinan tertentu dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Program ODS Terdapat pada seluruh *Service Point* PTSP. Program ODS dipadukan dengan pelayanan *Drive Thru*, yaitu pelayanan prioritas bagi pemohon yang mengurus perizinannya sendiri (tanpa calo) dengan waktu penyelesaian maksimal 1 jam. Jenis Layanan perizinan/non perizinan yang dapat dilayani pada ODS adalah:

- a) Legalisir (seluruh perizinan)
 - b) Rekomendasi Penelitian
 - c) Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) / Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - d) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
 - e) Bidang Perhubungan (Surat Ijin Usaha Jasa Penyelenggaraan Transportasi (SIUJPT), SK Izin Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Umum, Rekomendasi Penghitaman/Balik Nama/Peremajaan, *Scrapping*, Rekomendasi Mutasi Mobil Barang Umum (MBU))
- 188) BPTSP memberikan pelayanan online untuk pengurusan Ijin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) (pertamananpemakaman.jakarta.go.id), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (pelayanan.jakarta.go.id) dan Pembayaran Retribusi (e-Ret) melalui website e-retribusi.jakarta.go.id. Selain itu, BPTSP juga melakukan evaluasi pelayanan kepada masyarakat dengan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) online melalui website pelayanan.jakarta.go.id.
- 189) Mengembangkan Layanan Hotline 164 (layanan *Customer Service*), baik untuk informasi perizinan dan pengaduan
- 190) BPTSP mengembangkan website <http://pelayanan.jakarta.go.id> yang selalu diperbaharui, yang berisi informasi perizinan termasuk didalamnya jenis-jenis perizinan, prosedur perizinan dan persyaratan perizinan. Selain itu, website BPTSP juga telah dikembangkan untuk dapat mencari berkas perizinan pemohon dengan layanan “cari berkas”.
- 191) Setiap service point PTSP dilengkapi dengan Katalog Perizinan yang memuat semua jenis izin dan non izin dilengkapi dengan persyaratan dasar dan persyaratan khusus. Katalog perizinan diperbaharui setiap 6 (enam) bulan sekali.

- 192) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik dari 0 % di tahun 2014 menjadi 89% di tahun 2015
- 193) Meningkatnya persentase pengaduan/keluhan ditindaklanjuti tepat waktu dari 0 % di tahun 2014 menjadi 100% di tahun 2015
- 194) Meningkatnya persentase SDM aparat yang kompeten dari 0% di tahun 2014 menjadi 100% di tahun 2015.
- 195) Realisasi tingkat penyelesaian pengaduan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) mencapai 70%.
- 196) Bersama tim terpadu melaksanakan kegiatan penertiban tempat usaha hiburan pada hari-hari besar keagamaan sebanyak 2.325 tempat usaha
- 197) Dukungan Pelaksanaan Jakarta Maraton 2015 berupa pengamanan di sepanjang Jl Thamrin – Sudirman
- 198) Koordinasi Penyelesaian dan Penertiban Sengketa Tanah dan Bangunan sebanyak 12 pengaduan masyarakat
- 199) Pendataan Dan Pengawasan Rumah Kos di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 265 rumah kos
- 200) Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional sebanyak 15 kali
- 201) Pengamanan Lokasi Daerah Rawan Gangguan Sosial dan Gangguan Bencana sebanyak 551 kejadian yang terdiri dari 4 kejadian banjir, 321 kejadian kebakaran dan 26 kejadian lainnya
- 202) Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Masyarakat di Jalan Protokol sebanyak 7 titik lokasi di Jalan protokol dari Patung Tani hingga perempatan Jl Asemka
- 203) Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri sebanyak 799 tempat usaha di 5 wilayah Kota
- 204) Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Non Industri sebanyak 984 tempat usaha di 5 wilayah Kota
- 205) Pengawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebanyak 48 hari di 6 titik lokasi Provinsi dan 5 Wilayah Kota

- 206) Pengawasan Penertiban dan Pemusnahan Minuman Beralkohol di Provinsi DKI Jakarta sebanyak $\pm$ 13.000 botol Minuman Beralkohol
- 207) Pengawasan PMKS, PK-5 dan PSK di jalan Protokol dan Jalur Busway di 6 lokasi Provinsi dan 5 Wilayah Kota
- 208) Penindakan Penyegehan Tempat Usaha yang Melanggar Ketentuan (Perda 15 Tahun 2011 dan Perda 10 Tahun 2004) sebanyak 6 Tempat Usaha
- 209) Penjangkauan keamanan, ketentraman dan ketertiban Tempat Usaha Hiburan sebanyak 2.287 Tempat Usaha Hiburan
- 210) Wastib Taman dan Jalur Hijau, Angkutan Liar dan Terminal Bayangan, serta Media Informasi dan Promosi pada jalan protokol dan fasilitas umum di sebanyak 1.378 media informasi
- 211) Korps Building Jambore Satpol PP Se-Indonesia sebanyak 30 peserta
- 212) Pembinaan Mental, Fisik, Disiplin Anggota Satpol PP sebanyak 300 peserta
- 213) Pemetaan Pos Kamling sebanyak 131 Pos Kamling di 21 Kecamatan
- 214) Pendataan dan Pembinaan Anggota Linmas RT/RW dan Matrik Objek Vital sebanyak 5.045 anggota Linmas

20. URUSAN KETAHANAN PANGAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan Ketahanan Pangan, padatahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp77.914.380.097,00 dengan total penyerapan sebesar Rp48.980.367.559,00 atau 62,86%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Pengamanan Ketersediaan Pangan, Pengendalian Akses, Harga, Promosi dan Distribusi/Pemasaran**
Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Ketahanan

Pangan

- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian tingkat provinsi dalam rangka mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan produk Pertanian dalam rangka mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- Pengembangan Sistem Distribusi
- Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran dalam rangka mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- Penyelenggaraan Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional

2) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian, melalui

- Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian
- Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Jakarta Barat
- Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pusat Pengembangan Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Kehutanan
- Pembuatan Instalasi Penyiraman di Kebun Bibit Cibubur, Kelapa Dua Wetan dan Sumur Dalam di Kebun Bibit Cilangkap
- Pemeliharaan Alat Mesin Pertanian dan Laboratorium
- Pemeliharaan Bibit dan Pohon Induk

3) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan

- a) Penanganan Jaminan Pengujian Mutu
- b) Pengadaan Sarana Prasarana

4) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hewan (kesmavet)

Penjaminan Produk Hewan ASUH dan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan pada Hari Besar Keagamaan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketahanan pangan, antara lain :

- 1) Dipertahankannya jumlah ketersediaan pangan pada tahun 2015 yaitu:
 - a) Persentase pasokan beras sebesar 100% (Ketersediaan beras per hari 3.185 ton, sedangkan kebutuhan beras per hari 2.712 ton)
 - b) Persentase daging sebesar 100% (Ketersediaan daging sapi per hari 242 ton, sedangkan kebutuhan daging sapi per hari 165 ton)
 - c) Persentase pusat distribusi ikan sebesar 100 % (Ketersediaan ikan per hari 3326 ton, sedangkan kebutuhan ikan per hari 1013 ton)
 - d) Persentase pusat distribusi ayam sebesar 100 % (Ketersediaan ayam per hari 2290 ton, sedangkan kebutuhan ayam per hari 933 ton)
 - e) Persentase pusat distribusi telur dan susu sebesar 100 % (Ketersediaan telur per hari 1593 ton, sedangkan kebutuhan telur per hari 268 ton, Ketersediaan susu per hari 593 ton, sedangkan kebutuhan susu per hari 165 ton)
 - f) Persentase pusat distribusi sayur mayur sebesar 100 % (Ketersediaan sayur mayur per hari 1698 ton, sedangkan kebutuhan sayur mayur per hari 1687 ton)
 - g) Persentase pusat distribusi buah-buahan sebesar 100 % (Ketersediaan buah-buahan per hari 1534 ton, sedangkan kebutuhan buah-buahan per hari 1177 ton)
- 2) Persentase buah dan sayur di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya sebesar 90,279 % baik/aman pada tahun 2014 menjadi 95,90% di tahun 2015
- 3) Jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman pangan dan hortikultura yang dikeluarkan 1.426 sertifikat pada tahun 2014 dan 4.233 sertifikat pada tahun 2015.

- 4) Meningkatnya jumlah sertifikat hasil uji hasil perikanan yang di keluarkan yaitu 10.639 sertifikat pada tahun 2014 menjadi 10.991 sertifikat pada tahun 2015
- 5) Persentase daging dan olahannya yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya 92 % baik/aman pada tahun 2014 dan 93 % baik/aman pada tahun 2015
- 6) Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan menjadi 15.103 sertifikat pada tahun 2014 dan 15.768 sertifikat pada tahun 2015
- 7) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Ketahanan Pangan berupa :
 - a) Pembinaan kepada 140 orang (100 orang petugas dan 40 orang anggota kelompok tani),
 - b) Pembinaan kepada 170 (110 anggota TP PKK DKI Jakarta dan 60 orang pedagang di Pasar Kramat Jati.
 - c) Pengambilan Sampel Sayuran dan Buah di :
 - Pasar Induk Kramat Jati sebanyak 7 x
 - Pasar Tradisional di 5 wilayah kota sebanyak 1 x
 - Lahan petani di 5 wilayah kota sebanyak 1 x
- 8) Subsidi daging sapi Rp. 40.000/kg sebanyak 30.000 kg dan Rp. 15.000/ekor sebanyak 14.500 ekor ayam
- 9) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian berupa pembinaan terhadap 536 orang (petani, petugas, anggota kelompok tani, anggota saka taruna bumi pertanian) dalam 5 kegiatan
- 10) Penanganan Jaminan Pengujian Mutu berupa Pengakuan formal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), Terlaksananya sistem manajemen mutu yang sesuai dengan SNI-17025 dan SNI 17020 sehingga tercipta laboratorium yang sejajar dengan laboratorium di negara maju, meningkatnya kemampuan dan keterampilan analis yang mampu bersaing dengan hasil uji yang valid dan akurat serta terciptanya berlaboratorium yang baik, Sistem mutu 17025 dan sistem mutu 17020 yang terbaru dan sesuai dengan

perkembangan teknologi dan pengetahuan (Audit Internal penerapan SNI ISO/ EIC 17020 :2012 dan 17025 : 2008, Kaji Ulang penerapan SNI ISO/ EIC 17020 :2012 dan 17025 : 2008, Kalibrasi Peralatan Pengujian, *Official Control* produk perikanan, Penerapan Pengolahan Produk Perikanan, pengembangan sistem informasi pengawas mutu, Penyediaan Jasa IPAL, Pest Control, Surveillance lab dan lembaga inspeksi oleh KAN, Swabbing, Monitoring Perairan, Raw Material, Bahan Pembantu, Bahan Penunjang di Sentra Produksi dan Pengelolaan/Pengangkutan Limbah Laboratorium, Uji Coba pengolahan Hasil Perikanan, Uji Profisiensi laboratorium Penguji, Validasi, Verifikasi dan Kompetensi Laboratorium)

- 11) Pengadaan Sarana Prasarana berupa tersedianya peralatan gelas baik volumetrik dan analitik yang sesuai dengan jumlah dan spesifikasi untuk dipergunakan dalam proses pengujian laboratorium, Pemenuhan ketersediaan media, biakan murni, reagensia dan baku standar untuk parameter pengujian organoleptik, mikrobiologi dan kimia sesuai dengan kebutuhan customer dan Negara mitra, Penguatan laboratorium pengujian mutu dalam hal pengujian laboratories terutama pengembangan kemampuan uji metode pengujian kimia
- 12) Penjaminan Produk Hewan ASUH dan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan pada Hari Besar Keagamaan berupa penerbitan sertifikat NKV sebanyak 70 sertifikat sebanyak 70 buah,terlaksananya pengawasan kesehatan hewan pada tempat penampungan sebanyak : 21.975 ekor sapi,345 ekor kerbau,61.813 ekor kambing dan 4.888 ekor domba, terlaksananya pengawasan pemotongan dan pemeriksaan kesehatan daging pada tempat pemotongan sebanyak 9.675 ekor sapi, 304 ekor kerbau, 23.113 ekor kambing dan 1.496 ekor domba.

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp311.815.048.627,00 dengan total penyerapan sebesar Rp256.627.655.362,00 atau 82,30%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

- a) Pengadaan/Penyediaan sarana dan prasarana Kantor, Rumah Tangga dan Gudang
- b) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- c) Peningkatan sanitasi masyarakat melalui Program Sanimas IDB

2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui :

- Fasilitasi Kemitraan Usaha Masyarakat dengan sektor industri/BUMN/BUMD/Bank/CSR
- Gelar, Kemitraan dan Partisipasi Pameran TTG Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Nasional
- Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok usaha Wartek
- Pemanfaatan sumber daya alam melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- Penyusunan Profil TTG Provinsi DKI Jakarta
- Rakortek dalam rangka Pengembangan Sumber Daya dan Usaha Masyarakat
- Rakortek Perencanaan Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi
- TOT TTG bagi Kader Posyantek dan Wartek
- Pindah Kantor BPMPKB Provinsi DKI Jakarta

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat

- a) Pengadaan Sarana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
- b) Penyempurnaan Pembangunan Kantor

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain :

- 1) Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dikembangkan dimasyarakat sebanyak 16 alat pada tahun 2014
- 2) Masyarakat pengguna teknologi tepat guna (TTG) yang mandiri dari 60% pada tahun 2014 menjadi 65 % pada tahun 2015.
- 3) Persentase pemanfaat Bina Sosial PPMK yang sudah berusaha/bekerja setelah mendapatkan pelatihan dari 30% pada tahun 2014 menjadi 37 % pada tahun 2015.
- 4) Cakupan anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan yang aktif terlibat dalam penggerakan kegiatan gotong royong 1.207orang Tahun 2014 Menjadi 1.473 orang di tahun 2015.
- 5) Jumlah sarana yang dibangun/direhab melalui dana Bina Fisik Lingkungan PPMK dari 23.738sarana pada tahun 2014 menjadi 23.600 sarana fisik pada tahun 2015.

22. URUSAN STATISTIK

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan statistik, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp449.076.666,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp136.351.388,00 atau 30,36 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

Program Statistik Daerah

- 1) Penyusunan Kajian Technopark Jakarta

- 2) Penyelenggaraan Pengembangan Perencanaan dan Inovasi Daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan statistik, antara lain:

- 1) Terciptanya kebijakan, program dan kegiatan yang saling mendukung dari pemangku kepentingan pada Jakarta Technopark dalam jangka pendek (2016/2017) dan jangka menengah (s/d 2019 selaras dengan RPJMN) untuk meningkatkan produktifitas masyarakat dan daya saing perekonomian Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM dan kelembagaan Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan statistik dalam mengambil kebijakan yang inovatif di Provinsi DKI Jakarta.

23. URUSAN KEARSIPAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan kearsipan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp49.534.963.578,00 dengan total penyerapan sebesar Rp5.772.370.417,00 atau 11,65%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

- a) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
 - Penyusunan Master Plan Pengembangan Kearsipan
 - Optimalisasi Sistem Informasi dan Database Kearsipan
 - Pengadaan lemari simpan arsip
- b) Pembinaan, pelestarian dan penyelamatan arsip daerah
 - Penelusuran arsip tempo dulu
 - Pengadaan boks dan map arsip

- Pengembangan Alih Media Arsip
 - Perekaman peristiwa/Fenomena di Jakarta
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kearsipan meliputi :
- Pengadaan Sarana Prasarana Kearsipan Dinamis
 - Rehab Gedung Depo Arsip Pulomas Blok B dan D
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah**
Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor BPAD Pulo Mas.
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Arsip**
Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan Kearsipan meliputi :
- Akuisisi kearsipan
 - Asistensi kearsipan
 - Penataan dan Penyusutan Arsip Daerah
 - Penyusunan dan Revisi Peraturan Bidang Kearsipan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kearsipan, antara lain:

- 1) Jumlah arsip daerah yang diselamatkan dari 129.890 boks pada tahun 2014 menjadi 161.230 pada tahun 2015.
- 2) Jumlah peristiwa / tokoh / pengkisah yang diliput / diwawancara dari 750 pada tahun 2014 menjadi 1.198 pada tahun 2015.
- 3) Jumlah gedung / depo arsip yang dibangun, yaitu sebanyak 5 depo di tahun 2014 menjadi 6 depo di tahun 2015, yaitu depo arsip di Jakarta Selatan.
- 4) Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar dari 457 ruangan pada tahun 2014 menjadi 724 ruangan di tahun 2015.
- 6) Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dari 1.430 SKPD/UKPD di tahun 2014 menjadi 2.413 SKPD/UKPD di tahun 2015.
- 5) Jumlah SKPD/UKPD yang menerapkan Sistem Informasi

Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (SIKD dan JIKD) sebanyak 1 SKPD dan 5 UKPD.

24. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan komunikasi dan informatika, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp308.868.013.136,00 dengan total penyerapan sebesar Rp 215.356.028.450,00 atau 69,72%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a) Pemeliharaan Pusat Data dan Perangkat Teknologi Informasi
- b) Penataan dan Pengembangan Sistem Aplikasi
- c) Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem Aplikasi
- d) Pengadaan Software Interkoneksi Pemprov DKI Jakarta
- e) Implementasi Pergub No.39 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
- f) Pelaksanaan Rekomendasi kegiatan berbasis TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2) Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik

- a) Pembinaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Kehumasan
- b) Penyiapan Materi dan Dokumentasi Kehumasan Pemprov DKI Jakarta
- c) Pengelolaan Informasi Publik
- d) Penerbitan dan Media Luar Ruang
- e) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Publik
- f) Penyelenggaraan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta
- g) Pengelolaan Jakarta *Smart City*
- h) Pengelolaan Perangkat Monitoring dan Analisis Berita di

Media Massa dan Media Sosial

- i) Pembuatan SOP Jakarta *Smart City*
- j) Pengadaan Mebeulair Jakarta *Smart City*

3) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a) Penyediaan Sarana Telekomunikasi Datadan Lisensi Perangkat Lunak
- b) Pengelolaan Perangkat Teknologi Informasi, Data Center dan DRC
- c) *Tuning Relation database management system* (RDBMS)
- d) Pengembangan dan pengelolaan Teknologi dan Pengamanan Jaringan Komunikasi Data

4) Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi

- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
- b) Pemeliharaan / Perawatan / Penggantian Suku Cadang Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
- c) Pengelolaan BTS *Trunking* (BHP Frekuensi, Listrik, dan Sewa Lokasi)

5) Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta Pelaksanaan *e-Procurement* Sistem Nasional dan Aplikasi Lainnya

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika, antara lain:

- 1) Meningkatnya pendayagunaan teknologi informasi pada pelayanan publik seluruh SKPD berupa Integrasi sistem informasi perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan pengelolaan pembangunan
- 2) Meningkatnya kualitas layanan data dan informasi publik dengan tersedianya sarana informasi kepada masyarakat berupa Media

Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website dan Media Sosial

- 3) Bertambahnya jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun dari 180 titik tahun 2014 menjadi 216 titik tahun 2015.
- 4) Terpeliharanya titik lokasi jaringan komunikasi (*Fiber Optic*) yang terhubung dan berfungsi sebanyak 401 titik
- 5) Jumlah *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* (DRC) yang berfungsi 1 DRC
- 6) Tersedianya sarana komunikasi Radio *Trunking* berupa HT dari 2.068 unit tahun 2014
- 7) Meningkatnya jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlatih dari 761 orang tahun 2014 menjadi 970 orang tahun 2015
- 8) Berfungsinya aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis teknologi informasi untuk mendukung 518 jenis perizinan dan non perizinan
- 9) Terbangunnya sistem informasi rekomendasi berbasis TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 10) Terlaksananya penataan dan pengembangan Aplikasi e-Absensi dan e-TKD, Aplikasi PTSP, Aplikasi SIPKD serta Sistem E-Kinerja Pendukung Kebijakan Remunerasi.
- 11) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang Jakarta *Smart City*
- 12) Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Media Online sebanyak 2.548 Berita, terdiri dari 2.006 Berita melalui Media Cetak dan 542 Berita melalui Media Online
- 13) Tersedianya data dan informasi Pemprov DKI Jakarta melalui website “www.jakarta.go.id” dan www.beritajakarta.com
- 14) Tersedianya saluran aspirasi atau keluhan warga Jakarta melalui beberapa media (*channel*) seperti media cetak, elektronik, serta media jejaring sosial. Adapun jumlah aspirasi yang masuk dan direspon sebagaimana tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah Aspirasi Masuk	Jumlah yang Direspon
1	2011	995	34%
2	2012	3.824	39%
3	2013	14.137	52%
4	2014	20.554	55%
5	2015	13.148	55%

- 15) Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional

25. URUSAN PERPUSTAKAAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan perpustakaan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp 227.415.442.214,00 dengan total penyerapan sebesar Rp 117.112.561.944,00 atau 51,50%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program pengembangan Budaya Baca

- a) Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Perpustakaan dan Arsipantara lain :
 - Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA)
 - Pemilihan Abang dan None Buku (ABNONKU) serta Pemberdayaan Ikatan Abang dan None Buku (IKANOBUBU)
- b) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) berupa karpet, kipas angin, dan buku umum

2) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan antara lain :

- Pengadaan koleksi perpustakaan dan pengelolaan Karya Cipta Karya Rekam (KCKR)
- Penyediaan layanan perpustakaan pada hari Sabtu dan Minggu

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

- a) Pengembangan layanan Perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan dan KPAK Kepulauan Seribu
- b) Pengadaan buku elektronik

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan perpustakaan, antara lain:

- 1) Jumlah perpustakaan yang memiliki sertifikat ISO sebanyak 2 perpustakaan sejak tahun 2014.
- 2) Perpustakaan kecamatan dan kelurahan yang berfungsi optimal sebanyak 38 perpustakaan.

26. URUSAN PERTANIAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan pertanian, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp61.551.964.696,00 dengan total penyerapan sebesar Rp38.911.412.531,00 atau 63,22%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a) Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Proteksi Tanaman
- b) Pelayanan Promosi dan Pemasaran Hortikultura
- c) Promosi/publikasi Layanan Laboratorium
- d) Partisipasi Pameran dalam rangka menunjang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- e) Penyelenggaraan dan partisipasi event Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan
- f) Monitoring Ketersediaan Pangan dan Harga

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan

- a) Pemeliharaan dan Perawatan Ternak Unggas, Ruminansia dan Ternak Harapan
- b) Pengadaan Pakan Ternak Percontohan di 4 Taman Ternak
- c) Pembinaan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan
- d) Peningkatan Kesehatan Petugas/Penguji
- e) Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesmavet
- f) Pelayanan Pos Kesehatan Hewan
- g) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan, Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan

3) Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis

- a) Pencegahan dan Penanganan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis
- b) Pengendalian penyakit hewan menular strategis, zoonosis (Rabies, AI, Anthrax, Brucellosis)
- c) Pemeliharaan dan Perawatan Alat-alat Produksi dan Cold Storage Rumah Potong Hewan (RPH)
- d) Pengadaan Sarana Prasarana RPH dan Pengendalian Zoonosis dalam rangka mendukung Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- e) Pelayanan kesehatan hewan pada hari besar keagamaan

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Promosi dan Pemasaran Hortikultura
- b) Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Promosi dan Pemasaran Hortikultura melalui Festival Buah dan Anggrek, Gebyar Bunga, Flona, Jakarta Karnaval dan PF2N

- c) Pelaksanaan Penyesuaian Dokumen Sistem Mutu, Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman
- d) Pembinaan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan dan hortikultura
- e) Pembinaan mutu dan keamanan pangan hasil peternakan
- f) Pembinaan pasar bebas formalin ayam pedaging
- g) Pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan
- h) Pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan
- i) Pengembangan Pertanian Perkotaan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanian, antara lain :

- 1) Meningkatnya jumlah promosi dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, hasil perikanan dan produk hewan dari 60 kali pada tahun 2014 menjadi 61 kali pada tahun 2015.
- 2) Meningkatnya volume pemasaran Daun Pelengkap, Bunga Potong, Bunga Rampai, Bibit Tanaman Anggrek, Tanaman Hias, Bibit Tanaman Buah dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Volume	
		Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Daun Pelengkap (ikat)	808.887	893.856
2.	Bunga Potong (ikat)	1.208.559	1.136.077
3.	Bunga Rampai (bungkus)	449.341	543.213
4.	Bibit Tanaman Anggrek (pohon)	304.130	329.477
5.	Tanaman Hias (pohon)	1.012.843	1.114.358
6.	Bibit Tanaman Buah (pohon)	167.462	184.794

- 3) Meningkatnya omset pemasaran Daun Pelengkap, Bunga Potong, Bunga Rampai, Bibit Tanaman Anggrek, Tanaman Hias,

Bibit Tanaman Buah sebesar Rp. 104,012 M pada tahun 2014 menjadi 112,9 M pada tahun 2015

- 4) Penyebaran Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis) yaitu hanya 2 kasus Avian Influenza pada tahun 2014 dan 5 kasus Avian Influenza dan 1 kasus Brucellosis pada tahun 2015
- 5) Dipertahankannya pengendalian penyakit anthrax (0 kasus) pada tahun 2015
- 6) Meningkatnya jumlah/volume daging hewan yang dipantau kesehatannyadari 197.644 ton pada tahun 2014menjadi201.338 ton pada tahun 2015
- 7) Meningkatnya jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura meliputi padi, buah-buahan dan tanaman hiasdengan rincian sebagai berikut

No	Produksi Tanaman	Volume	
		Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Padi (ton)	-	46.361
2.	Buah-buahan (bibit)	40.020	193.629
3.	Tanaman Hias (bibit)	15.000	300.454

- 8) Jumlah produksi tanaman hortikultura ramah lingkungan berupa sayuran 15.315 ton dan buah-buahan 417.946 pohon
- 9) Terlaksananya Pelayanan dan Pengelolaan Proteksi Tanaman melalui pengadaan obat/pestisida, pengadaan discmill dan pengendalian alat buah di kepulauan seribu
- 10) Terlaksananya promosi dan publikasi Layanan Laboratorium sebanyak 2 kali
- 11) Terselenggaranyapartisipasi event Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan di Festival Pesisir,Lebaran Betawi dan Flona, untuk 6 jenis makanan (nugget, abon, aquarium, daging sapi, daging ayam dan sembako)
- 13) Dipertahankannya jumlah ketersediaan pangan pada tahun 2015 yaitu:

- a) Persentase pasokan beras sebesar 100% (Ketersediaan beras per hari 3.185 ton, sedangkan kebutuhan beras per hari 2.712 ton)
 - b) Persentase daging sebesar 100% (Ketersediaan daging sapi per hari 242 ton, sedangkan kebutuhan daging sapi per hari 165 ton)
 - c) Persentase pusat distribusi ikan sebesar 100 % (Ketersediaan ikan per hari 3.326 ton, sedangkan kebutuhan ikan per hari 1.013 ton)
 - d) Persentase pusat distribusi ayam sebesar 100 % (Ketersediaan ayam per hari 2.290 ton, sedangkan kebutuhan ayam per hari 933 ton)
 - e) Persentase pusat distribusi telur dan susu sebesar 100 % (Ketersediaan telur per hari 1.593 ton, sedangkan kebutuhan telur per hari 268 ton, Ketersediaan susu per hari 593 ton, sedangkan kebutuhan susu per hari 165 ton)
 - f) Persentase pusat distribusi sayur mayur sebesar 100 % (Ketersediaan sayur mayur per hari 1.698 ton, sedangkan kebutuhan sayur mayur per hari 1.687 ton)
 - g) Persentase pusat distribusi buah-buahan sebesar 100 % (Ketersediaan buah-buahan per hari 1.534 ton, sedangkan kebutuhan buah-buahan per hari 1.177 ton)
- 12) Terselenggaranya Pelayanan Pos Kesehatan Hewan berupa sterilisasi 604 ekor kucing pemilik lokal, pemeriksaan hewan qurban sebanyak 13.978 ekor di 38 kecamatan, pemeriksaan dan pengobatan hewan kecil sebanyak 3.868 ekor dan ternak besar 312 ekor, pemeriksaan surveilans rabies sebanyak 1.043 sampel, avian influenza sebanyak 1.288 sampel dan brucella sebanyak 1.079 sampel
- 13) Terlaksananya pengawasan produk pertanian dan mutu keamanan pangan dan hortikultura yang beredar di Jakarta Timur sebanyak 200 sampel dan terlaksananya pengujian produk segar pertanian sebanyak 21 jenis komoditi

- 14) Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan daging sapi dan ayam di Jakarta Timur pada 25 pasar tradisional dan 22 pasar swalayan.
- 15) Terperiksa serta terjaminnya keamanan pangan khususnya konsumsi daging unggas dan daging sapi di Jakarta Timur sebanyak 74 lokasi
- 16) Terlaksananya pengambilan 70 sampel hasil perikanan di 5 pasar percontohan Jakarta Timur
- 17) Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis di Jakarta Pusat sebanyak 2.045 ekor
- 18) Terlaksananya Pengendalian penyakit hewan menular strategis, zoonosis Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berupa Vaksinasi Rabies sebanyak 8.984 ekor, Vaksinasi SE sebanyak 1.244 ekor sapi, Vaksinasi Brucellosis sebanyak 3.945 ekor sapi, Vaksinasi Anthrax sebanyak 2.803 ekor dan Sertifikasi Kesehatan Unggas (SKU) sebanyak 5.671 ekor.
- 19) Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis berupa Pelaksanaan vaksinasi serentak di 5 wilayah pada bulan Oktober 2015 sebanyak 889 ekor HPR (Hewan Penular Rabies), Pelaksanaan vaksinasi rabies pada World Rabies Day sebanyak 203 ekor, Pengawasan obat hewan di 5 wilayah kota
- 20) Terlaksananya pengembangan usaha anggrek dan keterampilan merangkai bunga
- 21) Terlaksananya partisipasi Jakarnaval, Gebyar bunga, Flona 2015, Festival buah dan anggrak 2015 dan PF2N
- 22) Terbangunnya 15 Green House dalam rangka Pengembangan Pertanian Perkotaan yang berlokasi di Lanud Halim Perdana Kusuma(5 unit), POMAL Kelapa Gading (1 unit), Perbekalan Angkatan Darat (2 unit), Kantor PKK Provinsi DKI Jakarta (1 unit) dan Rusun (5 unit)

27. URUSAN KEHUTANAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan kehutanan pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp6.807.091.176,00 dengan total penyerapan sebesar Rp5.422.269.183,00 atau 79,66%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

- 1) Pengawasan Hutan Kota dan Peredaran Hasil Hutan
- 2) Pemeliharaan Tanaman Buah
- 3) Pemeliharaan Hutan Kota

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kehutanan, antara lain :

- 1) Dipertahankannya Jakarta bebas dari pelanggaran peredaran hasil hutan.
- 2) Terlaksananya patroli 10 hutan kota serta 10 perusahaan penimbunan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan

28. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan energi dan sumber daya mineral, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp 26.827.821.723,00 dengan total penyerapan sebesar Rp9.201.421.542,00 atau 34,08%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral**
 - a) Perbaikan dan Pemeliharaan *Reverse Osmosis* (RO)
 - b) Pelaksanaan Piket Posko dan survei malam hari

- c) Pembangunan Implementasi Penggunaan *Solar Cell* untuk Penerangan Jalan dan atau Tempat Umum di Wilayah Jakarta Barat
- d) Rekomendasi sistem laik operasi instalasi PJU existing
- e) Penatacahayaan Event di 5 Wilayah Kota
- f) Pemberdayaan Petugas Kelistrikan dan Air Bersih
- g) Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perindustrian dan Energi

2) Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota

- a) Pembangunan / Peningkatan Kualitas Penerangan Jalan Umum pada Jalan Lokal/MHT di 16 Kecamatan
- b) Pembangunan Sistem Monitoring PJU Berbasis IT
- c) Pembangunan Lampu PJU LED Jalan Inspeksi (Sejajar Kali)
- d) Penataan/Relokasi Sarana dan Prasarana PJU Akibat Kegiatan Instansi Terkait dan Lainnya
- e) Pemeliharaan/Perawatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 31 Kecamatan
- f) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum Jaringan PJU
- g) Piket posko dan survey malam hari
- h) Pengadaan Komponen Lepas Cover Atlas D.60, Cover Ampora, Armatur HPS 70 dan 150 Watt (Lampu, *Ballast* dan *Capasitor*), MC dan HPIT serta Armatur MC 250 Watt (Lampu, Ballast dan Cafasitor),
- i) Pengadaan Armature Lengkap HPS 70 Watt dan HPS 150 Watt, LED 40 watt, 90 watt, 120-130 watt, dan 200 watt
- j) Pengadaan Armatur Lengkap LED Jalan Lingkungan, MHT, Arteri, dan Kolektor serta Lampu LED Indoor
- k) Penatacahayaan Event di 5Wilayah Kota
- l) Pembangunan/Peningkatan Kualitas Penerangan Jalan MHT/Lingkungan di 5 wilayah kota
- m) Pemeliharaan/Perawatan Pencahayaan di 5 wilayah kota

- n) Pengadaan Mobil Tangga serta Mobil Pengendalian dan Pengawasan
- o) Pekerjaan Kabel NYFGBY dan *twisted* dalam Penyeimbangan Daya Fasa R, S, T di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
- p) Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota Sepanjang Jalan Perbatasan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral, antara lain :

- 1) Meningkatnya jumlah lampu PJU pada jalan protokol, arteri, kolektor, lingkungan/gang MHT, dan fasilitas umum yang dibangun/ditingkatkan dari 16.134 titik lampu PJU tahun 2014 menjadi 36.145 titik lampu PJU tahun 2015
- 2) Normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi sebanyak 32 kWh Meter pada tahun 2014 menjadi 74 kWh Meter tahun 2015.
- 3) Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan *Reverse Osmosis* (RO) di Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Cilincing
- 4) Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa sepanjang 22 Km (Depok – Blok M) dan pembangunan pipa gas sepanjang 44 Km (Tanjung Barat – Plumpang) pada tahun 2014 dan pembangunan pipa gas oleh PT Pertagas dan PT PGN (Persero) melalui jalur Muara Karang – Muara Tawar sepanjang 25 km dengan penyiapan 3 titik *future connection*
- 5) Beroperasinya SPBG sebanyak 14 SPBG dan MRU (*Mobile Refueling Unit*) sebanyak 6 MRU serta terlaksananya proses perijinan untuk pembangunan SPBG sebanyak 8 SPBG
- 6) Terlaksananya koordinasi pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh PT PLN (Persero), antara lain:

- a) PLTGU Jawa 1 (2×800 MW) untuk menambah kapasitas PLTGU Muara Tawar
 - b) PLTGU Jawa 2 Priok (1×800 MW) untuk menambah kapasitas PLTGU Muara Karang (1×500 MW) dan PLTU Lontar (1×315 MW)
 - c) Pembangunan Gardu Induk (GI) 500 V atau 5000 MVA sebanyak 7 gardu
 - d) Pembangunan GI 150 kV atau 3.780 MVA sebanyak 81 gardu
 - e) Pembangunan transmisi 500 kV sepanjang 154 Km, 150 kV sepanjang 968 Km dan 20 kV sepanjang 600 Km
- 7) Terlaksananya implementasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan melalui pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di Pulau Sebir sebesar 50 KWP

29. URUSAN PARIWISATA

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan pariwisata, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp216.374.183.364,00 dengan total penyerapan sebesar Rp161.506.205.484 atau 74,64%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- a) Partisipasi Event Pariwisata Dalam Negeri dan Jakarta Marathon
- b) Penyelenggaraan Event Musik, Film, Teater, Seni, Budaya, Museum, Heritage, Festival Internasional dan Pariwisata Dalam Negeri

2. Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

- a) Penyelenggaraan Badan Promosi Pariwisata Jakarta dan Jakarta *Convention and Exhibition Bureau* (JCNEB)

- b) Promosi Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta
 - c) Pembuatan *Calender of Event*
 - d) Partisipasi Pada Kegiatan Hello Indonesia 2015 di London Inggris, Otdykh Leisure di Moskow Rusia, Indonesia Culture Week di Roma, World Expo di Milan Italia dan Festival Indonesia di Jepang
- 3. Program Peningkatan Industri Kepariwisataan**
- a) Pembinaan dan Pengendalian Kepariwisataan
- 4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata**
- a) Rehab Berat Gedung Anjungan TMII dan Gedung Sangkrini TMII
 - b) Rehab Gedung Graha Wisata Ragunan
 - c) Perencanaan Pariwisata Dan Kebudayaan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pariwisata, antara lain :

- 1) Jumlah tenaga SDM profesi pariwisata sebanyak 822 orang pada tahun 2014 dan sebanyak 341 orang pada tahun 2015. melalui 12 pelatihan yang terdiri dari pelatihan: Pelatihan Profesi *Life Guard* untuk Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan; Pelatihan Profesi *Bell Boy, Waiter/Waiterss, Room Attendant, Juru Masak, Receptionist* untuk Jenis Usaha Sarana Pariwisata; Pelatihan Profesi Pramuwisata Muda, Tour Planer/Travel Consultan, Pemijat Spa untuk Jenis Usaha Pariwisata; Pelatihan Profesi Security Hotel dan Cafe, MICE untuk Jenis Usaha Jasa Terkait; dan Bahasa Inggris bagi tenaga kerja pariwisata untuk Jenis Pelatihan TOT Industri Pariwisata.
- 2) Jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata Nasional dan Internasional sebanyak 9 lembaga pada tahun 2014 dan sebanyak 6 lembaga pada tahun 2015 terdiri dari :
 - a) Keanggotaan *International Association of Golf Tour Operator* (IAGTO),

- b) Keanggotaan *International Congress and Convention Association* (ICCA),
 - c) Keanggotaan *Pacific Asia Travel Association Indonesia Chapter* (PATA Indonesia Chapter),
 - d) Keanggotaan *Pacific Asia Travel Association* (PATA),
 - e) Keanggotaan *Tourism Promotion Organization* (TPO),
 - f) Keanggotaan *World Tourism Cities Federation* (WTCTF)
- 3) Meningkatnya jumlah event pariwisata unggulan Nasional dan Internasional sebanyak 12 kegiatan pada tahun 2014 menjadi 17 kegiatan pada tahun 2015 terdiri dari :
- a) Partisipasi Event Pariwisata Dalam dan Luar Negeri pada kegiatan Event Jakarta, Turnamen Golf Internasional Jakarta, *New Cities Summit* 2015, Festival Reog, Pengiriman Tim Kesenian Festival Budaya Luar Daerah, *Otdykh Leisure* di Moskow Rusia; *Indonesia Culture Week* di Roma dan Expo di Milan Italia
 - b) Penyelenggaraan Event Musik, Film, Teater, Seni dan Budaya melalui : Lomba Karya Cipta Tari Betawi, Apresiasi dan Kompetisi Seni bagi pelajar provinsi DKI Jakarta, Festival Teater, Jakarta Jazz Festival (Jak Jazz), Jakarta Music Festival, Jakarta Night Festival (Festival Kebduri), Kompetisi Nuasa Islami, Pagelaran Kesenian Terpilih, Festival Ramadhan, Festival Sentra Barat Fair, Festival Rawa Belong, Festival Industri Pariwisata Pasar Baru dan Jalan Jaksa, Gebyar Pariwisata Jakarta Timur.
- 4) Meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (wisman) pada tahun 2014 sebanyak 2.319.295 wisman menjadi sebanyak 2.372.396 wisman pada tahun 2015;
- 5) Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (wisnus) pada tahun 2014 sebanyak 41.871.178 dan pada tahun 2015 sebanyak 29.713.103 wisnus.
- 6) Meningkatnya jumlah kapasitas dan fasilitas MICE sebanyak 3 (tiga) lokasi pada Jakarta Convention Center (JCC), Ciputra World

Jakarta, Jakarta International Expo (JIE expo) Kemayoran.

- 7) Rata-rata lama tinggal 2,32/2,6 hari.
- 8) Jumlah Industri Pariwisata yang terdaftar sebanyak 4.819 Industri Pariwisata.

30. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan kelautan dan perikanan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp670.333.037.950,00 dengan total penyerapan sebesar Rp498.021.128.952,00 atau 74,29%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Peningkatan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Berkelanjutan

Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kelautan dan Perikanan meliputi

- a) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- b) Pengembangan Perikanan Budidaya

2) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

- a) Pendataan dan Penandaan Kapal perikanan
- b) Pengadaan Sarana Penunjang Dermaga P. Tidung Kecil
- c) Pengembangan Sarana Prasarana Dermaga Tipe T Muara Angke
- d) Penyelesaian pembuatan *sheet pile*
- e) Rehab Bangunan Eks Pasar Pelelangan Ikan di Pasar Ikan (Cagar Budaya)
- f) *Updating* Sistem Informasi Perikanan
- g) Revitalisasi Kios Pedagang Ikan di TPI Kamal Muara dan Alat Penangkap Ikan

3) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- a) Pembinaan dan Pengembangan Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
- b) Promosi Pusat Budidaya Perikanan
- c) Rehab sarana pemasaran hasil perikanan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan, antara lain :

- 1) Jumlah produksi perikanan budidaya:
 - a) Pada Tahun 2015 ikan hasil tangkap sebanyak 213.614,83 ton, ikan hasil budidaya sebanyak 7.959,32 ton dan ikan hias sebanyak 22.263,492 ekor
 - b) Pada tahun 2014, ikan hasil tangkap sebanyak 258.025 ton, dan ikan hias sebanyak 17.661.943 ekor.
- 2) Terlaksananya kegiatan kampanye gemarikan kepada 250 orang siswa SD;
- 3) Terselenggaranya pertemuan Pembinaan Mutu bagi 30 orang Pembina Mutu di DKI Jakarta;
- 4) Terselenggaranya Pameran Produk Hasil Perikanan di JIExpo Kemayoran;
- 5) Terlaksananya pengawasan mutu di sentra masuk ikan di Muara Angke sebanyak 3 kali dalam tahun 2015
- 6) Terlaksananya pengadaan perlengkapan pengawas mutu sebanyak 13 jenis perlengkapan, yang dibagikan untuk pengawas mutu di 5 Wilayah Kota/Kabupaten Adm P. Seribu, Unit Pelabuhan dan Bidang Perikanan Dnas KPKP
- 7) Terlaksananya pendataan dan penandaan kapal perikanan berupa Buku Kapal Perikanan sebanyak 1.300 Buku Asli dan 1.300 Buku Duplikat
- 8) Terlaksananya pembangunan *sheetpile* dermaga P. Tidung Kecil sepanjang 189 M'
- 9) Terlaksananya pembangunan dermaga tipe T Muara Angke seluas 96 M'
- 10) Terlaksananya pembangunan *sheet pile* sepanjang 176 M'

- 11) Terlaksananya updating sistem informasi perikanan
- 12) Terlaksananya pengadaan mesin kapal 7 PK = 250 Unit, 16 PK = 151 Unit dan 24 PK = 85 Unit
- 13) Terlaksananya peningkatan kemampuan dan keterampilan pengawas mutu dan penguji mutu dalam melakukan tugas pengawasan serta melakukan uji coba pengolahan perikanan

31. URUSAN PERDAGANGAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan perdagangan, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp29.029.169.199,00 dengan total penyerapan sebesar Rp10.537.312.815,00 atau 36,29%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri**
 - a) Pelayanan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
 - b) Forum Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA) Tahun 2015.
- 2) Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri**

Partisipasi Promosi dan Eksportir Pada Event Dalam Negeri Bertaraf Nasional/Internasional
- 3) Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan**

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan berupa Pengawasan dan penegakan hukum Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian**
 - a) Peningkatan Administrasi Perkantoran UPT Balai Metrologi

- b) Penyediaan Media Uji dan Pemeliharaan Alat-alat Berat/Genset
- c) Partisi Interior Ruang Rapat dan Ruang Kepala Balai Metrologi
- d) Partisipasi Pertemuan Teknis Kemetrolagian dan Peningkatan Sarana Pelayanan Kemetrolagian
- e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrolagian

32. URUSAN PERINDUSTRIAN

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi

Untuk urusan perindustrian, pada tahun 2015 dialokasikan APBD sebesar Rp1.355.978.865.405,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.077.536.180.067,00 atau 79,47%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pengembangan dan Pengendalian Industri

Penyelenggaraan dan Partisipasi Event Perindustrian meliputi Gelar Produk Unggulan IKM pada Pameran di Dalam Daerah dan di Jakarta

2) Program Peningkatan Kualitas Produk Industri

Pengembangan dan Peningkatan Laboratorium meliputi : Akreditasi Laboratorium Kalibrasi, Jasa Kalibrasi Peralatan Laboratorium UIB2T, Jasa Konsultansi Penerapan ISO 17025, Jasa Konsultansi Penerapan ISO 17067 : 2013 dan Pengadaan Alat Lab dan Alat Bengkel

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri

Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan perindustrian, antara lain :

- 1) Terlaksananya pembinaan terhadap 121 Industri perbengkelan yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan
- 2) Meningkatnya jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar sebanyak 38 unit pada tahun 2014 menjadi sebanyak 145 unit peralatan laboratorium yang telah terkalibrasi dan 6 unit peralatan pengujian pada tahun 2015
- 3) Pembinaan terhadap pelaku usaha di Sentra Batu Aji Rawa Bening
- 4) Meningkatnya jumlah produk industri yang memenuhi standar sebanyak 1.573 produk pada tahun 2014 menjadi 3.729 produk melalui pembinaan industri dan pengujian produk industri pada tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1.092 produk industri yang dibina oleh Dinas Perindustrian dan Energi
 - b) 52 produk industri yang dibina oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - c) 31 produk industri yang dibina oleh Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur
 - d) 1.206 pengujian yang dilakukan oleh Unit Industri Bahan dan Barang Teknik
 - e) 1.136 pengujian emas yang dilakukan oleh Unit Industri Kerajinan dan Tekstil
 - f) 212 pengujian sepatu/kulit yang dilakukan oleh Unit Industri Kerajinan dan Tekstil.



BAB III

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2015 AUDITED**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pada Tahun 2012 Pemerintah DKI Jakarta telah menganut anggaran defisit.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tergambarkan pada Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditargetkan sebesar Rp56.309.238.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 tercatat sebesar Rp44.209.238.168.583,00 atau 78,51%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak dapat diserap sebesar Rp12.099.999.831.417,00 atau 21,49%.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp43.824.300.560.665,00,

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp384.937.607.918 00 atau 0,88%.

3.1.2 Belanja Daerah Dan Transfer

Belanja Daerah Dan Transfer Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp59.685.552.609.233,00. Realisasi Belanja Daerah Dan Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp43.031.322.947.557,00 atau 72,10%. Dengan demikian dari anggaran belanja daerah dan transfer yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp16.654.229.661.676,00 atau 27,90%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Dan Transfer Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat Rp37.799.664.298.459,00, terlihat realisasi Belanja Daerah Dan Transfer Tahun Anggaran 2015 naik sebesar Rp5.231.658.649.098,00. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah Dan Transfer Tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja dan transfer mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Dilihat dari ketentuan tersebut APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 mengalami surplus. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp44.209.273.998.583,00 sedangkan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp43.031.322.947.557,00 sehingga kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2015 mengalami surplus sebesar Rp1.177.915.221.026,00.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2014 yang tercatat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sebesar Rp9.160.897.609.233,00 dan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp48.884.300.406,00. Sehingga total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp9.209.781.909.639,00 atau 97,36%. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.454.177.678.915,00 atau 89,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.083.153.000.000,00. Dengan demikian realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.755.604.230.724,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan terealisasi pada tahun 2015 sebesar Rp78.999.209.715,00 yang diperoleh dari jasa giro atas pengelolaan Dana Cadangan.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Target yang ditetapkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada anggaran tahun 2015 sebesar Rp6.079.053.000.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.371.093.824.789,00 atau 88,35%.

3. Pembayaran Pokok Utang

Target yang ditetapkan untuk Pembayaran Pokok Utang pada anggaran tahun 2015 sebesar Rp4.100.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.084.644.411,00 atau 99,63%. Dengan demikian target

anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp15.355.589,00 atau 0,37%.

Dari gambaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tersebut dapat dilihat posisi SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan yang tidak mencapai Rp 12.099.999.831.417,00 target di Tahun Anggaran 2015
2. Sisa anggaran belanja dan Rp 16.654.229.661.676,00 transfer yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015
3. Pembiayaan yang melebihi target Rp 379.289.621.491,00

Dengan demikian jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2015 tercatat sebesar Rp4.933.519.451.750,00.

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlihat pada ringkasan realisasi APBD dalam tabel 3.1.

TABEL 3.1
RINGKASAN REALISASI APBD PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	Δ%	Realisasi 2014
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PENDAPATAN	56.309.238.000.000,00	44.209.238.168.583,00	78,51	43.824.300.560.665,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	37.965.616.304.000,00	33.686.176.815.708,00	88,73	31.274.215.885.719,00
1.2	Pendapatan Transfer	15.754.979.596.000,00	8.642.378.398.086,00	54,85	12.160.469.922.272,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.588.642.100.000,00	1.880.682.954.789,00	72,65	389.614.752.674,00
2	BELANJA & TRANSFER	59.685.552.609.233,00	43.031.322.947.557,00	72,10	37.799.664.298.459,00
2.1	Belanja Operasi	40.786.004.983.909,00	32.415.276.659.037,00	79,48	27.386.409.506.086,00
2.2	Belanja Modal	18.425.712.578.261,00	10.244.016.709.208,00	55,60	10.411.118.390.249,00
2.3	Belanja Tak Terduga	72.656.043.103,00	877.074.802,00	1,21	2.136.402.124,00
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	401.179.003.960,00	371.152.504.510,00	92,52	14,005,706,784
Surplus/Defisit		(3.376.314.609.233,00)	1.177.915.221.026,00		1.216.041.614.931,00
3	PEMBIAYAAN	3.376.314.609.233,00	3.755.604.230.724,00	111,29	3.137.278.444.590,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	9.459.467.609.233,00	9.209.781.909.639,00	97,36	7.593.994.776.473,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.083.153.000.000,00	5.454.177.678.915,00	89,66	4.456.716.331.883,00
4	SiLPA		4.933.519.451.750,00		9.160.897.609.233,00
	Total APBD	65.768.705.609.233,00			



BAB IV

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2015 AUDITED**

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 709 SKPD/UKPD. Selanjutnya, sejumlah 709 Laporan Keuangan SKPD digabung menjadi 52 entitas akuntansi penggabung. Laporan Keuangan SKPD entitas akuntansi penggabung merupakan gabungan dari laporan keuangan UKPD dibawahnya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi/Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas. Khusus untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas juga menggabungkan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas. Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1745 Tahun 2015 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. SKPD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan UKPD yang secara organisatoris berada dibawahnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada

tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan

4.3.1.1 Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai

dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

4.3.1.2 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Suatu pengeluaran belanja akan dikapitalisasi sebagai aset jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan

- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

*) Khusus pengadaan buku yang menjadi koleksi pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta buku materi ajar pada

SD/SMTP/SLTA batas kapitalisasi ditetapkan sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Pengeluaran belanja barang pakai habis yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan. Persediaan sebagaimana dimaksud dapat dipilah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- (a) Persediaan pakai habis; dan
- (b) Persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (*ekstra komtabel*).

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai penambah aset tetap (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah, terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud. Sebagai dasar

hukum penerapan penyusutan aset dan dan amortisasi aset tidak berwujud telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - 2) berupa kas dan setara kas.Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
- b. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur,

bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;

- 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.

e. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Pos-pos piutang antara lain bagian lancar piutang, piutang dari pungutan pendapatan daerah, piutang dari perikatan, piutang dari transfer antar pemerintahan, piutang dari kerugian daerah dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
- c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama

piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

- a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
- b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.
- c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
 - (1) Menilai kualitas piutang;
 - (2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- d) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - (1) Jatuh tempo piutang; dan
 - (2) Upaya penagihan.
- e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - (1) Kualitas lancar;

- (2) Kualitas kurang lancar;
 - (3) kualitas diragukan; dan
 - (4) kualitas macet.
- f) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.
- g) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

- Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- h) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- i) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan;
 - (3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan; dan
 - (4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan.
- j) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- (1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - (3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- k) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:

- (1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - (2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - (3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- l) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- m) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - (2) Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
- 3) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4.3.5.2 Investasi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah

kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo oleh pemerintah daerah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang Tidak Tertagih dilakukan dengan penetapan umur investasi Non Permanen Dana Bergulir (*aging schedule*):

- Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
- Umur Investasi Dana Bergulir 1-2 tahun ditetapkan sebesar 10%;
- Umur Investasi Dana Bergulir 2-5 tahun ditetapkan sebesar 50%; dan
- Umur Investasi Dana Bergulir lebih dari 5 tahun ditetapkan sebesar 100%,

- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) pada perusahaan daerah, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.

PMP dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

c. Metode Penilaian Investasi

1) Investasi Non Permanen

Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

2) Investasi Permanen

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (*cost method*)

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (*equity method*)

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai

investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Penggunaan kedua metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*);
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas (*equity method*); dan
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga

obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

4.3.5.3 Aset Tetap

a. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b. Aset tetap terdiri dari:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, irigasi dan jaringan;
- 5) Aset tetap lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan.

c. Penilaian Aset Tetap

Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun Anggaran 2015 dinilai dengan menghitung biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan

dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

- 3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan

secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

4.3.5.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - 1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;

- 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Retensi.

4.3.5.5 Penyusutan Aset

1. Penyusutan Pertama Kali Aset Tetap dapat dilakukan terhadap :
 - a. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan (Aset yang diperoleh pada tahun 2015).
 - b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan (Aset yang diperoleh pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014).
 - c. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal (sebelum tahun 2008).
2. Aset Tetap yang dilakukan penyusutan pertama kali berupa :
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. gedung dan bangunan; dan
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan.
3. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
4. Aset Tetap Fasos Fasum
5. Penyusutan pertama kali tidak dilakukan terhadap :
 - a. Aset Tetap berupa tanah;
 - b. Aset Tetap lainnya berupa buku/barang perpustakaan, hewan ternak dan tumbuhan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan dan benda-benda bersejarah;
 - c. Aset Tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan;
 - d. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan/atau diproses Tuntutan Ganti Rugi; dan

- e. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah direklasifikasi ke dalam aset lainnya.
6. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2015. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Nilai Barang Daerah Dalam Rangka Sensus Barang Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008. Dalam hal terdapat aset yang berasal dari perbaikan/renovasi/rehab yang tercatat secara terpisah dalam KIB, disusutkan secara terpisah atas tiap-tiap aset.

Penetapan masa manfaat aset tetap pada penyusutan pertama kali sebagai berikut :

NO	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
2	PERALATAN DAN MESIN	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Pertenakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5

3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20

Tahun pertama kali penyusutan aset tetap adalah tahun 2015.

7. Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan Per Tahun} = \frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times \text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}$$

8. Perhitungan dan Pencatatan

Perhitungan penyusutan aset untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan.

Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, yaitu aset yang diperoleh pada tahun 2015. Contoh perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Umur (Masa Manfaat)	Penyusutan
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aset A	2015	680.000.000	20	34.000.000

Keterangan:

Kolom 0 : Diisi dengan nama aset

Kolom 1 : Diisi dengan tahun perolehan

Kolom 2 : Diisi dengan nilai perolehan

Kolom 3 : Diisi dengan masa manfaat

Kolom 4 : Diisi dengan nilai penyusutan dengan

rumus :

$$\text{Beban penyusutan per tahun} = \frac{1}{\text{kolom 3}} \times \text{kolom 2}$$

Pencatatan/Jurnal :

Beban Penyusutan	Rp 34.000.000	
Akumulasi Penyusutan		Rp 34.000.000

- b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan adalah aset yang diperoleh tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Contoh perhitungan penyusutannya adalah :

Nama Aset	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat	Penyusutan Per Tahun	Masa Manfaat s.d Tahun 2014	Penyusutan		
						Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2014	Beban Penyusutan Tahun 2015	Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2015
(0)	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) / (3)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)	(8) = (6) + (7)
Aset A	2008	160.000.000	8	20.000.000	7	140.000.000	20.000.000	160.000.000
Aset B	2009	90.000.000	5	18.000.000	6	90.000.000	0	90.000.000
Aset C	2010	125.000.000	5	25.000.000	5	125.000.000	0	125.000.000
Aset D	2011	150.000.000	8	18.750.000	4	75.000.000	18.750.000	93.750.000
Aset E	2012	160.000.000	10	16.000.000	3	48.000.000	16.000.000	64.000.000
Aset F	2013	180.000.000	5	36.000.000	2	72.000.000	36.000.000	108.000.000
Aset G	2014	680.000.000	20	34.000.000	1	34.000.000	34.000.000	68.000.000
Jumlah						584.000.000	124.750.000	708.750.000

Keterangan:

Kolom 0 : Diisi dengan nama aset

Kolom 1 : Diisi dengan tahun perolehan

Kolom 2 : Diisi dengan nilai perolehan

Kolom 3 : Diisi dengan masa manfaat

Kolom 4 : Diisi dengan nilai penyusutan dengan rumus :

$$\text{Beban penyusutan per tahun} = \frac{1}{\text{kolom 3}} \times \text{kolom 2}$$

Kolom 5 : Diisi dengan masa manfaat s.d Tahun 2014, dengan rumus :

$$\text{Masa Manfaat} = (2014 - \text{kolom 1}) + 1$$

Kolom 6 : Diisi dengan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014, dengan rumus :

$$\text{Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2014} = \text{kolom 4} \times \text{kolom 5}$$

Kolom 7 : Diisi dengan beban penyusutan tahun 2015, dengan rumus Jika kolom 5 sama dengan atau lebih besar dari kolom 3, maka kolom 7 diisi berjumlah 0 Jika kolom 5 lebih kecil dari kolom 3, maka kolom 7 diisi dengan jumlah sesuai kolom 4.

Kolom 8 : Diisi dengan akumulasi penyusutan s.d tahun 2015, dengan rumus :

$$\text{Jumlah penyusutan} = \text{kolom 6} + \text{kolom 7}$$

Pencatatan/Jurnal :

a. Jurnal untuk mencatat penyusutan sampai dengan Tahun 2014

Ekuitas	Rp 584.000.000	
Akumulasi Penyusutan		Rp 584.000.000

b. Jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2015

Beban Penyusutan	Rp 124.750.000	
Akumulasi Penyusutan		Rp 124.750.000

- c. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal

Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal adalah aset yang diperoleh sampai dengan Tahun 2007.

Tahap penghitungan penyusutan adalah sebagai berikut :

1. Menentukan sisa masa manfaat pada saat neraca awal yaitu masa manfaat aset tetap dikurangi periode penggunaan aset sampai dengan akhir Tahun 2007.
2. Penghitungan penyusutan per tahun yaitu nilai aset dibagi dengan sisa masa manfaat.
3. Penghitungan akumulasi penyusutan aset sampai dengan 31 Desember 2014 yaitu beban penyusutan per tahun sebagaimana dimaksud dalam point 2 dikali periode penggunaan aset antara Tahun 2008 sampai Tahun 2014.
4. Pengakuan beban penyusutan Tahun 2015 sebesar sebagaimana dimaksud point 2.

Contoh perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Tahun Perolehan	Tahun Neraca awal	Nilai	Masa Manfaat	Masa Manfaat s.d. Tahun 2007	Sisa Masa Manfaat saat Neraca Awal	Beban Penyusutan Per Tahun	Sisa Masa Manfaat s.d Tahun 2014	Penyusutan		
									Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2014	Beban Penyusutan Tahun 2015	Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2015
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aset A	1995	2008	130.000.000	5	13	0	26.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000
Aset B	2006	2008	180.000.000	10	2	8	22.500.000	7	157.500.000	22.500.000	180.000.000
Aset C	2007	2008	150.000.000	5	1	4	37.500.000	4	150.000.000	0	150.000.000
Jumlah									437.500.000	22.500.000	460.000.000

Keterangan :

Kolom 0 : Diisi dengan nama aset

Kolom 1 : Diisi dengan tahun perolehan

Kolom 2 : Diisi dengan tahun penyusunan neraca awal

Kolom 3 : Diisi dengan nilai perolehan

Kolom 4 : Diisi dengan masa manfaat

Kolom 5 : Diisi dengan masa manfaat s.d Tahun 2007, dengan rumus

$$\text{Masa Manfaat} = (2007 - \text{kolom 1}) + 1$$

Kolom 6 : Diisi dengan sisa masa manfaat s.d penyusunan neraca awal dengan rumus

- Jika masa manfaat pada kolom 5 lebih besar dari kolom 4, maka kolom 6 diisi dengan nilai 0
- Jika masa manfaat kolom 5 lebih kecil dari kolom 4, maka diisi dengan rumus:

$$\text{sisa masa manfaat saat neraca awal} = \text{kolom 4} - \text{kolom 5}$$

Kolom 7 : Diisi dengan beban penyusutan per tahun, dengan rumus

- Jika hasil kolom 6 senilai 0, maka

$$\text{Beban Penyusutan Pertama} = \frac{1}{\text{kolom 4}} \times \text{kolom 3}$$

- Jika hasil kolom 6 senilai lebih dari 1, maka

$$\text{Beban Penyusutan Pertama} = \frac{1}{\text{kolom 6}} \times \text{kolom 3}$$

Kolom 8 : Diisi dengan sisa masa manfaat s.d 31 Desember 2014, dengan rumus :

$$\text{Sisa Masa Manfaat s.d 31 Des 2014} = \text{tahun 2014} - \text{tahun kolom 2}$$

Kolom 9 : Diisi dengan akumulasi penyusutan s.d tahun 2014, dengan rumus

- Jika hasil kolom 6 senilai 0, maka

Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2014 = kolom 4 X kolom 7

- Jika hasil kolom 6 senilai lebih dari 1, maka

Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2014 = kolom 7 X kolom 8

Kolom 10 : Diisi dengan beban penyusutan tahun 2015, dengan rumus

- Jika kolom 8 senilai sama dengan kolom 6, maka kolom 10 berjumlah 0
- Jika kolom 8 senilai kurang dari kolom 6, maka kolom 10 berjumlah senilai kolom 7

Kolom 11 : Diisi dengan akumulasi penyusutan s.d tahun 2015, dengan rumus

Jumlah penyusutan = kolom 9 + kolom 10

Pencatatan/Jurnal tahun 2015

a. Jurnal untuk mencatat penyusutan sampai dengan Tahun 2014

Ekuitas	Rp 437.500.000	
Akumulasi Penyusutan		Rp 437.500.000

b. Jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2015

Beban Penyusutan	Rp 22.500.000	
Akumulasi Penyusutan		Rp 22.500.000

d. Aset yang tidak diketahui tahun perolehan

Dalam hal aset tidak diketahui tahun perolehan, SKPD/UKPD dapat menentukan tahun perolehan berdasarkan kajian teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD dan/atau menggunakan tahun neraca awal (tahun 2008). Setelah diketahui tahun perolehan, SKPD/UKPD melakukan penghitungan aset berdasarkan tata cara perhitungan sebagaimana angka 8 huruf a, b dan c.

e. Aset yang tidak diketahui nilai perolehan

Untuk aset yang tidak diketahui nilai perolehannya, SKPD/UKPD dapat menentukan nilai perolehan dengan cara:

a) Aset yang perolehannya sebelum tahun 2008

Dalam hal aset diperoleh sebelum tahun 2008, nilai perolehan aset dapat mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Barang Daerah Dalam Rangka Sensus Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008.

b) Aset yang perolehannya tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan.

Untuk aset yang perolehannya tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan, penilaian atas aset tetap dilakukan berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan, dengan ketentuan tata cara penilaian barang sebagai berikut :

No	Golongan	Kriteria	Metode Penilaian Harga
1.	Bangunan/ Jalan/ Saluran	Pengadaan Tahun 2008 s.d Tahun Berjalan	Berdasarkan perkiraan sesuai harga bangunan aset Pemprov yang dikeluarkan oleh Kementerian PU/ Dinas Perumahan dan Gedung Pemda/ Dinas PU/ Kantor Pelayanan Pajak PBB/ berdasarkan bukti-bukti perolehan.
		Pengadaan Sebelum Tahun 2008 yang belum disensus	Berdasarkan bukti-bukti perolehan/ Pergub 132 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Nilai Barang Daerah Dalam Rangka Sensus Barang Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008
2.	Kendaraan	Pengadaan Tahun 2008 s.d Tahun Berjalan	Berdasarkan harga kendaraan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan tahun berjalan/ tahun perolehan/ berdasarkan bukti bukti perolehan.
		Pengadaan sebelum Tahun 2008 yang belum disensus	Berdasarkan harga kendaraan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan Tahun 2007 sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.51 Tahun 2007.

No	Golongan	Kriteria	Metode Penilaian Harga
3.	Barang lainnya	Pengadaan Tahun 2008 s.d Tahun Berjalan	Berdasarkan harga perolehan, jika tidak ditemukan maka berdasarkan taksiran dengan membandingkan harga barang sejenis.
		Pengadaan sebelum Tahun 2008 yang belum disensus	Berdasarkan bukti-bukti perolehan/ taksiran yang wajar.

9. Penyajian Dan Pengungkapan

Penyusutan aset tetap pertama kali disajikan sebagai :

- a. Akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2014 disajikan sebagai pengurang ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.
- b. Beban penyusutan Tahun 2015 disajikan dalam Laporan Operasional (LO) Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.
- c. Akumulasi penyusutan sampai dengan Tahun 2015 disajikan dalam Neraca Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat:

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa Manfaat; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan namun masih dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan

menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

Dalam hal setelah dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan atas perhitungan penyusutan pertama kali maka dilakukan penyesuaian dalam Ekuitas.

4.3.5.6 Amortisasi Aset

1. Obyek penyusutan aset tidak berwujud dapat dilakukan terhadap:
 - Aset tidak berwujud yang diperoleh pada tahun dimulainya amortisasi (aset yang diperoleh pada tahun 2015)
 - Aset tidak berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2015 sampai dimulainya penerapan amortisasi aset tidak berwujud
 - Amortisasi dilakukan untuk aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas
 - Amortisasi tidak dilakukan terhadap aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll).
2. Nilai yang dapat disusutkan adalah :
 - Nilai yang dapat di amortisasi pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam laporan keuangan tahun 2015
 - Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.
3. Masa manfaat dan tahun pertama kali amortisasi adalah:
Penetapan masa manfaat aset tidak berwujud pada amortisasi pertama kali adalah 5 (lima) tahun kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud, amortisasi dilakukan selama masa manfaat tercantum dalam

dokumen perolehan aset. tahun pertama kali amortisasi adalah tahun 2015.

4. Metode amortisasi aset tidak berwujud adalah;

- Amortisasi pertama kali dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat amortisasi dari aset tidak berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
- Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Amortisasi Per Tahun	=	$\frac{1}{\text{Masa Manfaat}}$	x	Nilai Yang Dapat Diamortisasikan
----------------------	---	---------------------------------	---	----------------------------------

5. Perhitungan amortisasi aset tidak berwujud untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- Aset tidak berwujud yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan amortisasi aset tidak berwujud yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan amortisasi, yaitu aset yang diperoleh pada tahun 2015. contoh perhitungan amortisasinya adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Umur (Masa Manfaat)	Amortisasi
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aset A	2015	50.000.000	5	10.000.000

Keterangan:

Kolom 0 : Diisi dengan nama aset

Kolom 1 : Diisi dengan tahun perolehan

Kolom 2 : Diisi dengan nilai perolehan

Kolom 3 : Diisi dengan masa manfaat

Kolom 4 : Diisi dengan nilai penyusutan dengan rumus

Beban Amortisasi Per Tahun	=	$\frac{1}{\text{Kolom 3}}$	x	Kolom 2
----------------------------	---	----------------------------	---	---------

Pencatatan/Jurnal

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp10.000.000	
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud		Rp10.000.000

- Aset tidak berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2015 sampai dimulainya penerapan amortisasi aset tidak berwujud

Contoh perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca (Sebelum Amortisasi)	Masa Manfaat	Amortisasi Per Tahun	Masa Manfaat s.d Tahun 2014	Amortisasi		
						Akumulasi Amortisasi s.d Tahun 2014	Beban Amortisasi Tahun 2015	Akumulasi Amortisasi s.d Tahun 2015
0	1	2	3	(4) = (2) / (3)	5	(6) = (4) x (5)	7	(8) = (6) + (7)
Aset E	2008	160.000.000	5	32.000.000	7	160.000.000	0	160.000.000
Aset F	2013	180.000.000	5	36.000.000	2	72.000.000	36.000.000	108.000.000
Aset G	2014	680.000.000	5	136.000.000	1	136.000.000	34.000.000	170.000.000
Jumlah						368.000.000	70.000.000	438.000.000

Keterangan:

Kolom 0 : Diisi dengan nama aset

Kolom 1 : Diisi dengan tahun perolehan

Kolom 2 : Diisi dengan nilai perolehan

Kolom 3 : Diisi dengan masa manfaat

Kolom 4 : Diisi dengan nilai penyusutan dengan rumus

Beban Amortisasi Per Tahun	=	$\frac{1}{\text{Kolom 3}}$	x	Kolom 2
----------------------------	---	----------------------------	---	---------

Kolom 5 : Diisi dengan masa manfaat s.d Tahun 2014, dengan rumus

Masa Manfaat	=	(2014 - Kolom 1) + 1
--------------	---	----------------------

Kolom 6 : Diisi dengan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014, dengan rumus

Akumulasi Amortisasi s.d Tahun 2014	=	Kolom 4 x Kolom 5
-------------------------------------	---	-------------------

Kolom 7 : Diisi dengan beban amortisasi tahun 2015, dengan rumus

- Jika kolom 5 sama dengan atau lebih besar dari kolom 3, maka kolom 7 diisi berjumlah 0
- Jika kolom 5 lebih kecil dari kolom 3, maka kolom 7 diisi dengan jumlah sesuai kolom 4

Kolom 8 : Diisi dengan akumulasi penyusutan s.d tahun 2015, dengan rumus

Jumlah Penyusutan	=	Kolom 6 + Kolom 7
-------------------	---	-------------------

Pencatatan/Jurnal :

a. Jurnal untuk mencatat penyusutan sampai dengan Tahun 2014

Ekuitas	Rp368.000.000	
Akumulasi Penyusutan		Rp368.000.000

b. Jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2015

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp70.000.000	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		Rp70.000.000

- Aset tidak berwujud yang tidak diketahui tahun perolehan

Dalam hal aset tidak berwujud tidak diketahui tahun perolehan, SKPD/UKPD dapat menentukan tahun perolehan berdasarkan kajian teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD dan/atau menggunakan tahun neraca awal (tahun 2008).

Setelah diketahui tahun perolehan, SKPD/UKPD melakukan penghitungan aset berdasarkan tata cara perhitungan sebagaimana bagian 5 poin 1 dan 2.

- Aset tidak berwujud yang tidak diketahui nilai perolehan. Untuk aset yang tidak diketahui nilai perolehannya, SKPD/UKPD dapat menentukan nilai perolehan dengan cara:

a. Aset tidak berwujud yang perolehannya sebelum tahun 2008. Dalam hal aset tidak berwujud

diperoleh sebelum tahun 2008, nilai perolehan aset tidak berwujud dilakukan dengan menggunakan nilai wajar

- b. Aset tidak berwujud yang perolehannya tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan. Untuk aset tidak berwujud yang perolehannya tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan, penilaian atas aset tidak berwujud dilakukan berdasarkan nilai berdasarkan bukti perolehan.

6. Penyajian dan pengungkapan aset tidak berwujud, yaitu:

- Amortisasi aset tidak berwujud pertama kali disajikan sebagai :
 - a. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sampai dengan tahun 2014 disajikan sebagai pengurang ekuitas dalam laporan perubahan ekuitas (lpe) entitas akuntansi/entitas pelaporan.
 - b. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2015 disajikan dalam laporan operasional (lo) entitas akuntansi/entitas pelaporan.
 - c. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sampai dengan tahun 2015 disajikan dalam neraca entitas akuntansi/entitas pelaporan.
- Informasi mengenai Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pertama Kali diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat:
 - a. nilai amortisasi;
 - b. metode amortisasi yang digunakan;
 - c. masa Manfaat; dan
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.
- Aset tidak berwujud yang seluruh nilainya telah disusutkan namun masih dimanfaatkan tetap disajikan

di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi amortisasinya.

- Dalam hal setelah dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan atas perhitungan amortisasi pertama kali maka dilakukan penyesuaian dalam Ekuitas.

4.3.5.7 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset nonlancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset di BP THR Lokasari
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga, yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pihak ketiga ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- d. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

4.3.5.8 Pengakuan penghentian/penghapusan Aset

- a. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

4.3.6 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4.3.7 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

- a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang baik pokok maupun bunganya, Pendapatan diterima dimuka, Utang Belanja seperti utang telepon, air, dan listrik (TAL), Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo, Utang Jangka Pendek Lainnya seperti utang kepada pihak ketiga, utang jaminan.

2) Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.
- c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.
- 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- 5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.

- 6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
- 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

f. Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.7 Ekuitas

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 - 1) Ekuitas awal
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

4.3.8 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dalam masa transisi penerapan SAP Berbasis Akrua, penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada Instruksi Gubernur Nomor 284 Tahun 2015 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2015 Berbasis Akrua.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai

dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “*adjustment*” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “*auditable*” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).



BAB V

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2015 AUDITED**

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1245 Tahun 2015 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp56.309.238.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 Rp44.209.238.168.583,00 atau 78,51% dari target.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp33.686.176.815.708,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp8.642.378.398.086,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

sebesar Rp1.880.682.954.789,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat digambarkan pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2015 Tahun Anggaran 2014

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2015			Tahun Anggaran 2014
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Pendapatan Asli Daerah	37.965.616.304.000	33.686.176.815.708	88,73	31.274.215.885.719
2	Pendapatan Transfer	15.754.979.596.000	8.642.378.398.086	54,85	12.160.469.922.272
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.588.642.100.000	1.880.682.954.789	72,65	389.614.752.674
Jumlah		56.309.238.000.000	44.209.238.168.583	78,51	43.824.300.560.665

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp29.076.926.598.506,00 atau 89,24% dari target yang ditetapkan sebesar Rp32.581.650.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.025.977.574.920,00 atau 7,49% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp27.050.949.023.586,00.

Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 digambarkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2015			Tahun Anggaran 2014
		Target	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5(4:3)	8
1	Pajak Kendaraan Bermotor	6,050,000,000,000	6.090.200.500.774	100,66	4.979.110.607.650
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4,600,000,000,000	4.685.403.450.610	101,86	5.526.393.737.100
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,350,000,000,000	1.232.836.931.554	91,32	1.170.105.269.170
4	Pajak Air Tanah	95,000,000,000	105.115.871.134	110,65	101.880.754.052
5	Pajak Hotel	1,500,000,000,000	1.276.285.658.514	85,09	1.384.103.823.437
6	Pajak Restoran	2,100.000.000.000	2.290.255.418.530	109,06	1.822.769.015.911
7	Pajak Hiburan	550,000,000,000	608.799.682.079	110,69	502.472.929.949
8	Pajak Reklame	1,800,000,000,000	714.967.327.356	39,72	850.675.199.089
9	Pajak Penerangan Jalan	710,000,000,000	729.884.587.778	102,80	655.713.255.150
10	Pajak Parkir	425,000,000,000	450.941.851.356	106,10	406.919.978.742
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5,881,650,000,000	3.609.336.161.480	61,37	3.700.938.580.712
12	Pajak Rokok	420,000,000,000	475.058.548.175	113,11	292.728.166.410
13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7,100,000,000,000	6.807.840.609.166	95,89	5.657.137.706.215
	JUMLAH	32.581.650.000.000	29.076.926.598.506	89,24	27.050.949.023.586

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah, berikut ini tarifnya:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi
 - a. Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp6.090.200.500.774,00 atau 100,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.050.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.111.089.893.124,00 atau 22,32% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp4.979.110.607.650,00. Salah satu faktor penyebab kenaikan realisasi pajak tersebut adalah karena adanya penjualan kendaraan bermotor berupa mobil murah pada periode Januari - Desember 2015, yang merupakan kebijakan LCGC *Low Cost Green Car* oleh Pemerintah Pusat.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target realisasi pendapatan pajak pada semester II Tahun Anggaran 2015 antara lain:

- a) Melakukan penagihan terhadap kendaraan-kendaraan yang masih belum daftar ulang, khususnya terhadap kendaraan yang memiliki potensi piutang yang besar;
- b) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) melalui pemberian pelayanan antara lain:
 - *Drive Thru* di 4 (empat) wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan,
 - Samsat Keliling sebanyak 5 (lima) kendaraan untuk 5 (lima) wilayah Kota Administrasi,
 - Gerai Samsat sebanyak 4 (empat) yang berlokasi di Mal PGC, Mal Taman Palem, Mal Artha Gading, dan Mal Taman Mini Square.
- c) Menerapkan pajak progresif yang diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2011 sebagai tindak lanjut Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB serta Peraturan Gubernur Nomor 140 tahun 2010 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
Sunset Policy Programme, penghapusan sanksi administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2829 Tahun 2015 dan Nomor 2885 Tahun 2015.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp4.685.403.450.610,00 atau 101,86% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.600.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp840.990.286.490,00 atau 15,22% jika dibandingkan dengan realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp5.526.393.737.100,00. Penurunan realisasi pajak tersebut adalah karena adanya penurunan penjualan mobil bekas akibat adanya penjualan mobil murah.

Langkah-langkah dan upaya intensif yang telah dilakukan pada semester I tahun 2015, antara lain:

- a) Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB-BBNKB;
- b) Pengumpulan data dan hasilnya digunakan untuk menentukan harga pasaran umum (HPU) kendaraan bermotor di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- c) Pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif baik dengan instansi terkait maupun dengan pihak swasta seperti ATPM/pemilik showroom/Asosiasi Importir dan GAIKINDO;

- d) Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pembayaran BBN-1 (kendaraan baru);
Penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2829 Tahun 2015).

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.232.836.931.554,00. atau 91,32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.350.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp62.731.662.384,00 atau 5,36% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.170.105.269.170,00. Peningkatan realisasi pendapatan pajak ini diantaranya disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar kendaraan bermotor dan meningkatnya konsumsi bahan bakar oleh masyarakat di DKI Jakarta.

Adapun penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebagai berikut:

- a) Menurunnya daya beli masyarakat khususnya kemampuan untuk membeli kendaraan bermotor baru. Tercatat pada tahun 2015, tingkat penjualan kendaraan bermotor menurun sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan konsumsi bahan bakar kendaraan

- bermotor secara tidak langsung ikut menurun;
- b) Beralihnya mode transportasi masyarakat yang semula menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan transportasi masal. Hal ini dapat terlihat dengan tumbuh pesatnya jasa transportasi online yang memungkinkan masyarakat mencapai tujuan dengan biaya yang minimal. Sebagai akibat dari pertumbuhan mode transportasi tersebut maka konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor mengalami penurunan;
 - c) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) masih didasarkan atas pemanfaatan bahan bakar kendaraan bermotor dimaksud, dengan kata lain para penyedia bahan bakar kendaraan bermotor (Wajib Pajak) akan memungut dan menyetorkan PBB-KB atas transaksi penjualan bahan bakar kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah pemanfaatan bahan bakar kendaraan bermotor dimaksud meskipun transaksinya di wilayah berbeda;
 - d) Berdasarkan pendapat dari Polda Metro Jaya, banyak kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang ditarik karena kredit macet akibat krisis ekonomi sehingga mempengaruhi jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.

Upaya yang dilakukan agar tercapainya target penerimaan PBB-KB tahun anggaran 2015, antara lain:

- a) Pendataan wajib pajak PBB-KB sebagai upaya ekstensifikasi penerimaan PBB-KB, dimana jumlah wajib pajak PBB-KB bertambah 9 wajib pajak baru atau mengalami peningkatan sebesar 26% dari semula 35 wajib pajak pada tahun 2014 menjadi 44 wajib pajak pada tahun 2015;
- b) Intensifikasi penerimaan PBB-KB dengan menghimbau para wajib pajak PBB-KB untuk menyampaikan data

delivery order (DO) sebagai upaya peningkatan fungsi pengawasan terhadap penerimaan PBB-KB;

- c) Merubah pengenaan PBB-KB sektor industri dan pertambangan menjadi sesuai yang tercantum di Peraturan Daerah;
 - d) Melakukan koordinasi dengan BPH Migas terkait dengan permohonan data alokasi bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta;
 - e) Menginventarisasi dan meneliti perusahaan penyedia bahan bakar yang telah mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum (IUNU) dari Kementerian ESDM RI untuk diterbitkan NPWPD bagi perusahaan baru yang akan melakukan penyaluran bahan bakar di Provinsi DKI Jakarta;
 - f) Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam rangka menguji kepatuhan dan kewajiban membayar PBB-KB;
- Mengkaji dan menganalisis dampak kenaikan harga bahan bakar kendaraan bermotor terhadap rencana dan realisasi penerimaan PBB-KB tahun 2015.

4. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana

dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Realisasi Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp105.115.871.134,00 atau 110,65% dari target yang ditetapkan sebesar Rp95.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.235.117.082,00 atau 3,18% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp101.880.754.052,00. Peningkatan realisasi pendapatan pajak dapat tercapai karena adanya upaya penagihan atas tunggakan Pajak Air Tanah dan penjangkaran meter air baru sebagai objek Pajak Air Tanah, yang bekerjasama dengan Dinas Tata Air dan PT Aetra/PT Palyja.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- a. Berkoordinasi dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan inventarisasi dan penggantian terhadap meteran air yang rusak dan berumur lebih dari 4 tahun.
- b. Melakukan inventarisasi dan penutupan sumur pada pelanggan tidak aktif dan pelanggan yang kebutuhan

air bersihnya sudah dapat tercukupi dari air perpipaan PAM Jaya.

- c. Melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran pajaknya baik untuk tahun berjalan (tahun 2015) atau tahun sebelumnya.

5. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, sertarumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.276.285.658.514,00 atau 85,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp107.818.164.923,00 atau 7,79% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.384.103.823.437,00.

Adapun penyebab tidak tercapainya penerimaan Pajak Hotel yaitu:

- a) Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang melarang instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan di Hotel;
- b) Adanya penurunan omset dan pembayaran Pajak Hotel dari beberapa Hotel Bintang Lima Berlian sebagai pembayar Pajak Hotel terbesar yang disebabkan adanya penurunan tamu hotel yang menginap, renovasi dan tutup;
- c) Adanya perpindahan tamu yang menginap ke Hotel Budget (Lebih Murah);
- d) Adanya pemisahan objek Pajak Hotel menjadi Pajak Hiburan;

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan Pajak Hotel antara lain :

- a) Penjaringan Wajib Pajak Baru melalui Pendataan Rumah Kos;
- b) Pemberitahuan Kepada Wajib Pajak atas Pembayaran Setoran masa yang mengalami

penurunan untuk dihimbau melakukan perbaikan setoran;

- c) Pencairan Tunggakan atas Kekurangan Pajak yang belum dibayarkan;
- d) Penerapan *online system* dalam pembayaran pajak;
- e) Penghapusan sanksi administrasi dan bunga keterlambatan pajak hotel pada SKPD yang terbit bulan Januari 2014 s.d. Desember 2014 dan bulan Januari 2015 s.d. November 2015.

6. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp2.290.255.418.530,00 atau 109,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.100.000.000.000,00.

Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp467.486.402.619,00 atau 25,65% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.822.769.015.911,00.

Langkah dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2015 antara lain:

- a) Penjaringan Wajib Pajak Baru melalui Pendataan;
- b) Pemeriksaan Wajib Pajak oleh Tim Gabungan yang dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2015 dengan jumlah wajib pajak 687 WP dan yang telah dilakukan closing sebanyak 259 WP;
- c) Pemberitahuan Kepada Wajib Pajak atas Pembayaran Setoran masa yang mengalami penurunan untuk dihimbau melakukan perbaikan setoran;
- d) Pencairan Tunggakan atas Kekurangan Pajak yang belum dibayarkan;
- e) Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak restoran khususnya untuk penerapan pembayaran pajak secara online.

7. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan boling;

- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp608.799.682.079,00 atau 110,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp550.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp106.326.752.130,00 atau 21,16% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp502.472.929.949,00.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2015 antara lain:

- a) Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dari unit terkait lainnya untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan hiburan insidental yang

pada umumnya mengalami peningkatan disetiap akhir tahun.

- b) Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c) Berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BNNP DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya dalam melakukan mekanisme pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan malam.
- d) Terus melakukan sosialisasi agar wajib pajak menerapkan pembayaran pajak secara online.

8. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek Pajak Reklame meliputi:

- a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp714.967.327.356,00 atau 39,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.800.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp135.707.871.733,00 atau 15,95% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp850.675.199.089,00.

Adapun penyebab tidak tercapainya penerimaan Pajak Reklame yaitu:

- a) Kenaikan tarif pajak reklame yang berpedoman pada nilai NSR (Nilai Sewa Reklame) dan pemilahan jenis reklame produk atau non produk;
- b) Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendorong reklame jenis papan atau billboard beralih menjadi jenis *Light Emitting Diode* (LED);
- c) Terjadinya peningkatan yang sangat tinggi pada pemasangan reklame berjenis kain dibandingkan papan, LED, stiker dan lain sebagainya pada tahun 2015 dimana pemasangan reklame jenis kain pada umumnya memiliki lama tayang yang bersifat mingguan atau bulanan dan sedikit dalam tahunan;
- d) Penurunan belanja iklan yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi yang ditandai dengan memburuknya kurs tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan penurunan pembelian atas produk;
- e) Pelayanan perizinan reklame pada BPTSP secara efektif menekan adanya pungutan liar. Namun di sisi lain, memperlambat proses pelayanan terhadap pemungutan pajak, karena lamanya waktu penyelesaian perizinan;
- f) Adanya media luar ruang/reklame yang terkena proyek pengembangan sarana transportasi massal/*Mass Rapid Transportation* (MRT) pada beberapa wilayah;
- g) Pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang yang berlaku pada tanggal 13 Januari 2015.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Pajak Reklame pada tahun 2015 antara lain:

- a) Percepatan penerbitan SKPD berdasarkan penerbitan perizinan;
- b) Pembukaan gerai pajak pada pusat perbelanjaan bekerja sama dengan manajemen pusat perbelanjaan;
- c) Melakukan penertiban terhadap reklame yang habis masa izinnya di 5 (lima) wilayah kota DKI Jakarta, khususnya reklame yang berukuran diatas 24 m²;
- d) Melakukan penertiban terhadap reklame dinding oleh semua Suku Dinas di 5 (lima) wilayah kota DKI Jakarta dan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan;
- e) Dengan terbentuknya UPPD di setiap kecamatan diharapkan dapat menggali potensi Pajak Reklame;
- f) Adanya *law enforcement* berupa penagihan dan pembongkaran papan reklame yang menunggak pajaknya;
- g) Meningkatkan pelayanan pendaftaran reklame di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi dan UPPD dengan menghilangkan pungutan liar dan mempercepat proses pelayanan perizinan reklame.

9. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:

- a. Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp729.884.587.778,00 atau 102,80% dari target yang ditetapkan sebesar Rp710.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp74.171.332.628,00 atau 11,31% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp655.713.225.150,00. Peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat tercapai karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan tarif listrik secara progresif atas Jenis klasifikasi pelanggan tertentu.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2015 antara lain:

- a. Percepatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) hasil pemeriksaan Tim Gabungan bersama BPKP;
- b. Rapat koordinasi dengan PLN dan instansi terkait.
- c. Melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang melalui rapat-rapat koordinasi antara Dinas Pelayanan Pajak dengan PT PLN dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Pemantauan pembayaran Pajak Penerangan Jalan setiap bulan pada BPKD dan PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang.

10. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara

tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir, tarifnya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp450.941.851.356,00 atau 106,10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp425.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp44.021.872.614,00 atau 10,82% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp406.919.978.742,00.

Langkah dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2015 antara lain:

- a) Penjaringan Wajib Pajak Baru melalui Pendataan;
- b) Pemberitahuan Kepada Wajib Pajak atas Pembayaran Setoran masa yang mengalami penurunan untuk dihimbau melakukan perbaikan setoran;
- c) Pencairan Tunggakan atas Kekurangan Pajak yang belum dibayarkan;
- d) Melakukan pemeriksaan terhadap semua wajib pajak parkir dengan membentuk Tim Gabungan bersama BPKP Perwakilan DKI Jakarta;
- e) Melakukan Online Sistem terhadap wajib pajak parkir;
- f) Dengan terbentuknya UPPD pada setiap kecamatan diharapkan potensi-potensi terhadap pajak parkir dapat lebih optimal.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum mencukupi.

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011. Dalam surat keputusan tersebut mengatur mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara pelaporan dan sanksi.

Realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.609.336.161.480,00 atau 61.37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.881.650.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp91.602.419.232 atau 2,48% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.700.938.580.712,00.

Adapun penyebab tidak tercapainya penerimaan BPHTB yaitu :

- a) Menurunnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat;
- b) Kecenderungan konsumen menyimpan uang dan memprioritaskan pembelian untuk barang-barang yang primer yang menyebabkan pembelian unit properti menurun drastis;
- c) Kebijakan Bank Indonesia dalam menerapkan *Ratio Loan to Value (LTV)* atau *Ratio Financing to Value*

(FTV) yang ditujukan untuk lebih meningkatkan aspek kehati-hatian bank (gagal bayar/kredit macet) dalam peyaluran kredit properti;

- d) Adanya ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sehingga banyak peralihan aset tanpa akta tidak dapat dipungut BPHTB-nya;
- e) Notaris/PPAT dalam melaporkan atau menghitung BPHTB harus dibayarkan oleh Wajib Pajak masih belum sesuai dimana terkadang nilai jual beli untuk pembayaran BPHTB lebih rendah daripada nilai jual beli sebenarnya.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan BPHTB antara lain:

- a) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional secara rutin;
- b) Pelayanan *one day service* terhadap validasi BPHTB; Pendekatan pelayanan BPHTB kepada wajib pajak di setiap kecamatan melalui UPPD.

12. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Objek pajak rokok merupakan konsumsi rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Adapun peraturan mengenai pengelolaan Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp475.058.548.175,00 atau 113,11% dari target yang ditetapkan sebesar Rp420.000.000.000,00.

Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp182.330.381.765,00 atau 62,29% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun 2014 sebesar Rp292.728.166.410,00.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan pajak rokok adalah dengan melakukan koordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk memperoleh data wajib pajak dan optimalisasi pembayarannya.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi PBB-P2 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp6.807.840.609.166,00 atau 95,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.100.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.150.702.902.951,00 atau 20,34% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp5.657.137.706.215,00.

Adapun penyebab tidak tercapainya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu :

- a) Adanya pengajuan pengurangan PBB dari masyarakat atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015;
- b) Masih terdapat SPPT-PBB yang belum seluruhnya tersampaikan kepada pemilik tanah akibat tidak diketahuinya alamat pemilik sebenarnya.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain :

- a) Melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk himbauan percepatan pembayaran PBB;
- b) Melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
- c) Membentuk petugas penilai PBB untuk melakukan penilaian atas objek bumi dan bangunan;
- d) Penghapusan sanksi administrasi dan bunga keterlambatan PBB-P2;
- e) Pelaksanaan pelayanan PBB-P2 pada malam hari dan hari sabtu/minggu serta pelaksanaan jemput bola pembayaran PBB-P2 di kelurahan;
- f) Melakukan pemasangan stiker atau papan pemberitahuan/plang menunggak pajak pada ojek PBB-P2 yang memiliki tunggakan.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- c. Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak pada peralihan pungutan Pendapatan Asli Daerah terutama Retribusi Daerah dari SKPD Pemungut lama ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 semula ditargetkan Rp600.000.000.000,00 setelah perubahan target tersebut naik sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 1,67 % menjadi sebesar Rp610.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp459.459.498.063,00 atau 75,32%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah belum mencapai target sebesar Rp150.540.501.937,00 atau 24,68%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2015 dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp515.162.936.406,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp55.703.438.343,00 atau 10,81%.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;

2. Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
3. Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
4. Peningkatan pengawasan di lapangan;
5. Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait.

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tergambar pada tabel 5.3.

Tabel 5.3
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
I	Retribusi Jasa Umum	184.302.327.300	90.398.166.389	49,05	63.824.046.979
II	Retribusi Jasa Usaha	80.197.672.700	93.304.141.810	116,34	69.809.050.577
III	Retribusi Perizinan Tertentu	345.500.000.000	275.757.189.864	79,81	381.529.838.850
Jumlah		610.000.000.000	459.459.498.063	75,32	515.162.936.406

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2015 semula ditetapkan sebesar Rp271.360.304.000,00 turun menjadi sebesar Rp184.302.327.300,00 atau 0,32% pada perubahan anggaran Tahun 2015. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp90.398.166.389,00 atau 49,05%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tidak mencapai target sebesar Rp93.904.160.911,00 atau 50,95%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat Rp63.824.046.979,00, terlihat penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2015 naik sebesar Rp26.574.119.410,00 atau 41,64%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2015 pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	84.027.533.700	38.469.556.040	45,78	43.381.107.500
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	2.000.000.000	1.850.574.618	92,53	346.128.730
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.985.000.000	4.179.939.400	69,84	4.655.704.350
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan	50.000.000	131.300.000	262,60	51.000.000
5	Retribusi Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil	-	-	~	600.000
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.472.500.000	802.822.604	54,52	993.213.732
7	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	-	20.539.632	~	40.263.986
8	Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	-	228.912.486	~	621.622.924
9	Retribusi Pemanfaatan Air Bersih	-	-	~	7.745.250

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
10	Retribusi Persampahan/Kebersihan	27.000.000.000	29.271.917.576	108,41	4.410.227.750
11	Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman	16.200.000.000	11.906.216.400	73,50	9.118.236.000
12	Retribusi Pelayanan Kesehatan	44.162.698.600	3.536.387.633	8,01	104.284.418
13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.500.000.000	-	0,59	93.912.339
14	Retribusi Pelayanan Pasar	1.904.595.000	-	-	-
Jumlah		184.302.327.300	90.398.166.389	49,05	63.824.046.979

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk kendaraan bermotor di air. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetakan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp84.027.533.700,00. Realisasinya mencapai Rp38.469.556.040,00 atau 45,78% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mencapai target sebesar Rp45.557.977.660,00 atau 54,22%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp43.381.107.500,00, maka penerimaan tahun 2015 turun sebesar Rp4.911.551.460,00 atau 11,32%.

Tidak tercapainya target penerimaan retribusi ini, utamanya disebabkan oleh penurunan volume pengujian terhadap kendaraan mobil barang, bus dan kendaraan khusus dan mobil berpenumpang umum. Penurunan tersebut terjadi karena banyak kendaraan yang dimutasi ke daerah sehingga kendaraan-kendaraan tersebut tidak melakukan pengujian.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem *Drive Thru* dalam pengujian kendaraan bermotor dengan cepat dan mudah.
- 2) Peningkatan koordinasi dengan Kepolisian.
- 3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum.
- 4) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp1.850.574.618,00 atau 92,53% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak memenuhi target sebesar Rp149.425.382,00 atau 7,47%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp346.128.730,00, maka penerimaan tahun 2015 naik sebesar Rp1.504.445.888,00 atau 434,65%.

c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya retribusi pelayanan tera ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp5.985.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2015 mencapai Rp4.179.939.400,00 atau 69,84% dari target yang ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak dapat mencapai target sebesar Rp1.805.060.600,00 atau 30,16%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.655.704.350,00, maka penerimaan tahun 2015 turun sebesar Rp475.764.950,00 atau 10,22%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pendapatan retribusi ini antara lain:

- 1) Mempromosikan mesin sarana produksi kepada pengrajin di sekitar lokasi.
- 2) Pengawasan secara intensif terhadap Wajib Retribusi (SPBU, Kwh Listrik, Tera Timbangan).
- 3) Melaksanakan pelayanan *one day service* SIUP di pusat perbelanjaan dan perkantoran.

d. Retribusi Pelayanan Pendidikan (Ketenagakerjaan)

Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2015 mencapai Rp131.300.000,00 atau 262,60% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan telah melampaui target sebesar Rp81.300.000,00 atau 162,60%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp51.000.000,00, maka penerimaan tahun 2015 naik sebesar Rp80.300.000,00 atau 157,45%.

Realisasi tersebut merupakan Retribusi penyelenggaraan pelatihan hygiene, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan, dengan tarif Rp.1.000.000,00/paket/orang, yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

e. Retribusi Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Retribusi Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil Tahun Anggaran 2015 tidak ditargetkan lagi karena sesuai program pemerintah bahwa seluruh retribusi yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tidak dipungut biaya. Hal ini mengacu kepada Undang Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal Pasal 79A “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”.

f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan kebakaran. Retribusi ini diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran. Jumlah retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp1.472.500.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp802.822.604,00 atau 54,52% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan

retribusi ini belum mencapai target sebesar Rp669.677.396,00 atau 45,48%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp993.213.732,00, maka penerimaan tahun 2015 turun sebesar Rp190.391.128,00 atau 19,17%.

Hambatan tidak tercapainya target pendapatan dari Retribusi ini antara lain, retribusi yang menjadi kewajiban permohonan rekomendasi pengujian akhir proteksi kebakaran tidak terlalu signifikan jumlahnya.

g. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah satunya Retribusi Pengujian Kapal Perikanan yang tidak dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2015, namun terdapat realisasi sebesar Rp20.539.632,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kapal Perikanan Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp40.263.986,00, maka penerimaan tahun 2015 turun sebesar Rp19.724.354,00 atau 48,99%.

h. Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan

Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan merupakan retribusi pelayanan pertanian dan kehutanan

yang diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan volume hasil hutan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah satunya Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yang tidak dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2015, namun terdapat realisasi sebesar Rp228.912.486,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kapal Perikanan Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp621.622.924,00, maka penerimaan tahun 2015 turun sebesar Rp392.710.438,00 atau 63,18%

i. Retribusi Pemanfaatan Air Bersih

Retribusi Pemanfaatan Air Bersih merupakan retribusi atas pelayanan pertambangan dan energi yang diukur berdasarkan risiko, volume, dan kualitas air dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan kualitas air, biaya operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya sosialisasi, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi.

Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah satunya Retribusi Pemanfaatan Air Bersih yang tidak dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2015.

Tidak ada realisasi Retribusi Pemanfaatan Air Bersih pada Tahun Anggaran 2015.

j. Retribusi Persampahan/Kebersihan

Retribusi Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan.

Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp27.000.000.000,00

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp29.271.917.576,00 atau 108,41% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi

penerimaan retribusi ini Melampaui target sebesar Rp2.271.917.576,00 atau 8,41%.

Realisasi Retribusi ini diperoleh antara lain dari, pengangkutan sampah industri, pengangkutan sampah pedagang kaki lima dan penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.410.227.750,00, maka penerimaan tahun 2015 naik sebesar Rp24.861.689.826,00 atau 563,73%.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan antara lain:

- 1) Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi;
- 2) Intensifikasi melalui sosialisasi dan penyuluhan yang intensif oleh masing-masing Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan secara rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;
- 3) Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank.
- 4) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- 5) Pemberdayaan RT/RW lebih optimal dalam pemungutan retribusi sampah.

k. Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman

Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman merupakan retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur

berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu sewa tempat pemakaman dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp16.200.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp11.906.216.400,00 atau 73,50% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp4.293.783.600,00 atau 26,50%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp9.118.236.000,00, maka penerimaan tahun 2015 naik sebesar Rp2.787.980.400,00 atau 30,58%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank;
- 2) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan yayasan yang bergerak di

bidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

I. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ini pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang di antaranya diperoleh dari Retribusi Rawat Jalan Kesehatan, dan Retribusi Kamar Gawat Darurat di RSUD Kepulauan Seribu dan Rumah Sakit Umum Kecamatan yang baru dibentuk.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp44.162.698.600,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp3.536.387.633,00 atau 8,01% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak memenuhi target sebesar Rp40.626.310.967,00 atau 91,99%.

Tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi kesehatan karena mulai bulan Juli untuk mekanisme pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dikelola melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat Rp104.284.418,00 maka penerimaan tahun 2015 naik sebesar Rp3.432.103.215,00 atau 3.291,10%.

m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pengelolaan atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Tahun Anggaran 2015 retribusi ini ditargetkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan tidak ada realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015. Hal ini dikarenakan adanya keberatan para penyelenggara telekomunikasi (operator) atas dasar perhitungan retribusi pengendalian menara yaitu 2% $\times$ NJOP.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat Rp93.912.339,00 maka penerimaan tahun 2015 turun sebesar 100%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp80.197.672.700,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp93.304.141.810,00 atau 116,34%, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target sebesar Rp13.106.469.110,00 atau 16,34%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp69.809.050.577,00 terlihat

realisasi retribusi ini di tahun 2014 naik sebesar Rp23.495.091.233,00 atau 33,66%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2015 disajikan lebih rinci pada tabel 5.5.

Tabel 5.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	39.902.071.750	62.103.035.128	155,64	39.018.712.032
b	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	3.060.000.000	4.305.481.626	140,70	3.756.070.834
c	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	-	-	~	34.418.000
d	Retribusi Tempat Rekreasi	-	-	~	10.637.844.500
e	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	17.062.663.700	17.066.770.983	100,02	4.875.087.500
f	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	493.282.250	512.468.225	103,89	609.501.800
g	Retribusi Potong Hewan	995.000.000	360.195.982.00	36,20	717.500.125
h	Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah	-	-	~	583.540.000
i	Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan	-	-	~	132.095.000
j	Retribusi Penyedotan Kakus	-	1.334.897.275	~	1.237.180.000
k	Retribusi Jasa Terminal	8.800.000.000	6.738.370.591	76,57	5.906.060.286
l	Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian	1.000.000.000	495.288.000	49,53	163.842.500
m	Retribusi Jasa Perhubungan Udara	6.500.000.000	387.634.000	5,96	2.137.198.000
n	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.384.655.000	-	-	-
	Jumlah	80.197.672.700	93.304.141.810	116,34	69.809.050.577

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2015 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah.

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp39.902.071.750,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp62.103.035.128,00 atau 155,64% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp22.200.963.378,00 atau 55,64%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp39.018.712.032,00, maka penerimaan tahun 2015 naik sebesar Rp23.084.323.096,00 atau 59,16%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- 1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi;

- 2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan alat berat dan penunjangnya;
- 3) Optimalisasi jasa layanan penggunaan alat berat dan atau penunjangnya;
- 4) Optimalisasi koordinasi dengan unit satuan kerja terkait.
- 5) Promosi kawasan monas sebagai lokasi *shooting* ke berbagai *production house*.

b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Tempat Pelelangan Ikan diukur berdasarkan persentase volume dan harga transaksi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Di Provinsi DKI Jakarta terdapat 2 (dua) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang melakukan aktifitas pelelangan yaitu TPI Muara Baru yang dikerjasamakan dengan Koperasi Mina Baruna dan Koperasi Mina Muara Makmur serta TPI Muara Angke yang dikerjasamakan dengan Koperasi Mina Jaya. Sedangkan TPI Kali Baru, TPI Cilincing, dan TPI Kamal Muara tidak melakukan aktifitas lelang karena sedimentasi pantai yang tinggi sehingga tidak memungkinkan bagi kapal nelayan untuk melakukan kegiatan bongkar.

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp3.060.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp4.305.481.626,00 atau 140,70% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target sebesar Rp1.245.481.626,00 atau 40,70%.

Pelampauan target retribusi tersebut disebabkan terjadinya peningkatan produksi dan mutu sehingga terjadi peningkatan harga jual.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp3.756.070.834,00, maka penerimaan tahun 2015 naik sebesar Rp549.410.792,00 atau 14,63%.

c. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Pendaratan Kapal adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya pembinaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Tempat Pendaratan Kapal diukur berdasarkan Berat Kapal (GT) dan waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Pertanian yang dikenakan pada kapal penangkap ikan yang bersandar atau berlabuh.

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal tidak ditargetkan di Tahun Anggaran 2015.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi retribusi Tempat Pendaratan Kapal Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp34.418.000,00, maka penerimaan tahun 2015 turun sebesar Rp34.418.000,00 atau 100%. Tidak terdapat realisasi untuk Retribusi Tempat Pendaratan Kapal di tahun Anggaran 2015.

d. Retribusi Tempat Rekreasi

Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya pembinaan. Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis pemakaian, jenis pertunjukan, jenis kendaraan dan jumlah orang. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi diperoleh dari tempat rekreasi kebudayaan dan permuseuman, Taman Marga Satwa Ragunan dan pertunjukan Planetarium dan Observatorium.

Retribusi Tempat Rekreasi tidak ditargetkan pada Tahun Anggaran 2015.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp10.637.844.500,00, maka penerimaan tahun 2015 turun sebesar 100% karena tidak terdapat realisasi untuk Retribusi Tempat Rekreasi di tahun Anggaran 2015.

e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olah raga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olah raga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Olah Raga dan Pemuda.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp17.062.663.700,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp17.066.770.983,00 atau 100,02% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp4.107.283,00 atau 0,02%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian kolam renang, gedung olah raga dan stadion olah raga.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp4.875.087.500,00, maka penerimaan tahun 2015 naik sebesar Rp12.191.683.483,00 atau 250,08%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank;
- 2) Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut retribusi melalui monitoring pembayaran retribusi.

f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp493.282.250,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp512.468.225,00 atau 103,89% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp19.185.975,00 atau 3,89%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp609.501.800,00, maka penerimaan tahun 2015 turun sebesar Rp97.033.575,00 atau 15,92%.

g. Retribusi Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Potong dan Retribusi Pemakaian Fasilitas Penampungan dan Fasilitas Pemotongan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam) rumah Potong Hewan terdiri dari 3 (tiga) Rumah Potong Unggas (berlokasi di Rawa Kepiting, Petukangan Utara, dan Kalideres) dan 3 (tiga) Rumah Potong Hewan yang berlokasi di Kapuk (Rumah Potong Babi), di Cakung dan Pulogadung (Rumah Potong Sapi, Kambing, dan Kerbau).

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan dan pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan peternakan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Potong Hewan Tahun Anggaran 2015, ditargetkan sebesar Rp995.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp360.195.982,00 atau 36,20% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini

tidak dapat mencapai target sebesar Rp634.804.018,00 atau 63,80%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Potong Hewan Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp717.500.125,00, maka penerimaan tahun 2015 turun sebesar Rp357.304.143,00 atau 49,80%.

Hambatan pencapaian retribusi ini diantaranya:

1. Faktor lokasi rumah potong hewan yang rendah dan rawan banjir setiap awal tahun sehingga mengganggu kegiatan rumah potong hewan;
2. Menurunnya penerimaan jumlah unggas dan ternak dari daerah;
3. Menurunnya daya beli masyarakat

Adapun strategi yang dapat dilakukan agar target retribusi rumah potong hewan tercapai adalah memperlancar distribusi pemasukan unggas dan ternak dari daerah ke Provinsi DKI Jakarta.

h. Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah

Tingkat penggunaan Jasa Fasilitas Akomodasi Milik Daerah diukur berdasarkan jumlah orang, klasifikasi fasilitas tempat, dan waktu pemakaian.

Target Penerimaan Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah Tahun Anggaran 2015 dialihkan ke rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sehingga tidak ada target penerimaan dari Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah.

Rincian kode rekening yang dialihkan ke rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Kode Rekening	
	Lama	Baru
Pemakaian penginapan Graha Wisata TMII	4.1.2.02.09.002	4.1.2.02.01.130
Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan	4.1.2.02.09.003	4.1.2.02.01.131
Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata TMII	4.1.2.02.09.005	4.1.2.02.01.132
Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan	4.1.2.02.09.006	4.1.2.02.01.133

i. Retribusi Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyedotan Kakus adalah dengan memperhatikan biaya penyedotan, biaya pembuangan/pengolahan, biaya pengadaan dan perawatan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kebersihan.

Pada Tahun Anggaran 2015 tidak ada target penerimaan untuk Retribusi Penyedotan Kakus karena sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2014 tentang masa transisi Pengalihan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Dinas Kebersihan kepada PD.

PAL Jaya. Selama masa transisi di tahun 2015 retribusi penyedotan Kakus masih dilakukan oleh Dinas Kebersihan.

Realisasi Retribusi Penyedotan Kakus sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp1.334.897.275,00. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp1.237.180.000,00, maka penerimaan tahun 2015 naik sebesar Rp97.717.275,00 atau 7,90%.

j. Retribusi Jasa Terminal

Retribusi Jasa Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp8.800.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp6.738.370.591,00 atau 76,57% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp2.061.629.409,00 atau sebesar 24,23%.

Target yang tidak dapat dicapai pada retribusi ini antara lain pemakaian fasilitas di terminal penumpang, pemakaian fasilitas terminal mobil barang dan pemakaian pangkalan taksi.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp5.906.060.286,00, maka penerimaan tahun 2015 naik sebesar Rp832.310.305,00 atau 14,09%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain:

- 1) Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- 2) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
- 3) Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal;
- 4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

k. Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian dan Perkapalan

Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian, dan Perkapalan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian, dan Perkapalan Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp495.288.000,00 atau 49,53% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak memenuhi target sebesar Rp504.712.000,00 atau 49,53%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian, dan Perkapalan Tahun Anggaran 2014

yang tercatat sebesar Rp163.842.500,00, maka penerimaan tahun 2015 naik sebesar Rp331.445.500,00 atau 202,30%.

Kenaikan realisasi retribusi ini disebabkan meningkatnya kuantitas kapal yang berlabuh dan menggunakan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dikelola, dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

I. Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan

Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan Tahun Anggaran 2015, ditargetkan sebesar Rp6.500.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp387.634.000,00 atau 5,96% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp6.112.366.000,00 atau sebesar 94,04%. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp2.137.198.000,00, maka penerimaan tahun 2015 turun sebesar Rp1.749.564.000,00 atau 81,86%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp345.500.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp275.757.189.864,00 atau 79,81%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak memenuhi target sebesar Rp69.742.810.136,00 atau 20,19%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp381.529.838.850,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2015 turun sebesar Rp105.784.523.986,00 atau 27,73 %.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2015 disajikan lebih rinci pada tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	4	5	6 (5:4)	7
1	Retribusi Izin Trayek	1.500.000.000	994.577.000	66,31	901.075.000
2	Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan	-	43.817.780	~	-
3	Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian	-	1.270.831	~	-
4	Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	-	3.750.000	~	-
5	Izin Gangguan Undang-Undang Gangguan	12.700.000.000	25.372.894.127	199,79	17.984.596.250
6	Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan	-	-	~	1.702.500.000
7	Retribusi Perizinan Bidang Peternakan	-	-	~	297.683.00
8	Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga	-	45.779.000	~	-
9	Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman	-	-	~	2.380.000
10	Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan	-	-	~	32.000.000
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	270.000.000.000	246.407.800.126	91,26	356.100.952.917
12	Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap	-	-	~	4.805.937.000
13	Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Badan Jalan	-	250.000	~	-
14	Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan	-	-	~	100.000
15	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	60.000.000.000	1.397.076.000	2,33	-
16	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1.300.000.000	1.489.975.000	114,61	-
	Jumlah	345.500.000.000	275.757.189.864	79,81	381.529.838.850

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2015 antara lain:

a. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka

waktu. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp994.577.000,00 atau 66,31%, dengan demikian tidak mencapai target sebesar Rp505.423.000,00 atau 33,69 %.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp901.075.000,00, terlihat mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar Rp93.502.000,00 atau 10,38%.

b. Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan

Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan merupakan retribusi pelayanan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang diukur berdasarkan perkalian luas areal usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, dan jenis usaha. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp12.700.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp25.372.894.127,00 atau 199,79%, dengan demikian melampaui target sebesar Rp12.672.894.127,00 atau 99,79%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp17.996.471.250,00, terlihat mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar Rp7.376.422.877,00 atau 40,99%.

c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp270.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp246.407.800.126,00 atau 91,26%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak memenuhi target sebesar Rp23.592.199.874,00 atau 8,74%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp356.100.952.917,00, retribusi ini di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp109.693.152.791,00 atau 30,80%.

d. Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap

Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap merupakan retribusi atas pelayanan penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas yang diukur berdasarkan lokasi, jenis, ketinggian dan waktu dengan memperhatikan biaya transportasi, biaya survei, biaya pengawasan dan pengendalian serta pembinaan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasinya di Tahun Anggaran 2015. Adapun realisasi Retribusi Izin Penempatan jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp4.805.937.000,00.

e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp60.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp1.397.076.000,00 atau 2,33%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak memenuhi target sebesar Rp58.602.924.000,00 atau 97,67%.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2014 tidak terdapat realisasi karena Peraturan Daerah mengenai Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) belum

disahkan, sehingga Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) masih disetor ke rekening bendahara DKPTKA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

f. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp1.300.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp1.489.975.000,00 atau 114,61%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp189.975.000,00 atau 14,61%.

Pada Tahun Anggaran 2014 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol masih tercatat pada rekening Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dengan realisasi sebesar Rp1.702.500.000,00.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2015, ditetapkan sebesar Rp640.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp527.280.486.037,00 atau 82,39%, dengan demikian realisasi penerimaan tersebut tidak mencapai target sebesar Rp112.719.513.963,00 atau 17,61%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp465.979.962.538,00, terlihat pendapatan di tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp61.300.523.499,00 atau 13,16%.

Rekapitulasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2015 digambarkan pada tabel 5.7.

Tabel 5.7
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	99.000.000.000	82.309.399.188	83,14	65.494.870.566
2	Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga	540.000.000.000	444.066.056.849	82,23	400.168.850.472
3	Badan Pengelola	1.000.000.000	905.030.000	90,50	316.241.500
Jumlah		640.000.000.000	527.280.486.037	82,39	465.979.962.538

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2015, ditargetkan sebesar Rp99.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp82.309.399.188,00 atau 83,14%.

Apabila Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun 2014 yang jumlahnya sebesar Rp65.494.870.566,00 maka terlihat pendapatan di tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp16.814.528.622,00 atau 25,67%.

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat digambarkan pada 5.8.

Tabel 5.8
Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PDAM Jaya	23.000.000.000	22.810.000.000	99,17	17.600.000.000
2	PD Dharma Jaya	-	-	0,00	-
3	PD Pasar Jaya	36.000.000.000	30.578.225.355	84,94	28.078.870.388
4	PD Pembangunan Sarana Jaya	25.000.000.000	17.431.388.498	69,73	12.417.758.336
5	PD PAL Jaya	15.000.000.000	11.489.785.335	76,60	7.398.241.842
Jumlah		99.000.000.000	82.309.399.188	83,14	65.494.870.566

2. Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2015, ditargetkan sebesar Rp507.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 Rp444.066.056.849,00 atau 82,23%, dengan demikian penyertaan modal tidak melampaui target sebesar Rp95.933.943.151,00 atau 17,77%.

Apabila Realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga Tahun Anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga tahun 2014 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp400.168.850.472,00, terlihat pendapatan di tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar Rp43.897.206.377,00 atau 10,97%.

Rincian lebih lanjut realisasi Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2015 dapat di lihat pada tabel 5.9.

Tabel 5.9
Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah
Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Pembangunan Jaya	25.000.000.000	19.600.000.000	78,40	13.600.000.000
2	PT Food Station Tjipinang	10.000.000.000	5.577.520.286	55,78	2.000.000.000
3	PT JIEP	10.000.000.000	6.385.101.177	63,85	8.321.062.630
4	PT Delta Jakarta	60.000.000.000	25.224.084.000	42,04	48.346.161.000
5	PT Pembangunan Jaya Ancol	80.000.000.000	74.879.999.935	93,60	57.023.999.951
6	PT Ratax Armada	-	-	0,00	-
7	PT Kawasan Berikat Nusantara	15.000.000.000	10.626.074.894	70,84	1.131.385.196
8	PT Asuransi Bangun Askrida	5.000.000.000	3.852.236.557	77,04	2.744.847.231
9	PT Jakarta Propertindo	50.000.000.000	33.000.000.000	66,00	22.500.000.000
10	PT Bank DKI	275.000.000.000	263.121.040.000	95,68	180.000.000.000
11	PT Jakarta Toursindo	5.000.000.000	1.800.000.000	36,00	4.500.000.000
12	Jakarta international Expo	5.000.000.000	-	0,00	1.312.500.000
Jumlah		507.000.000.000	400.168.850.472	82,23	341.479.956.008

3. Badan Pengelola (BP)

Realisasi Badan Pengelola Tahun Anggaran 2015 merupakan bagi hasil laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari BP THR Lokasari, ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp905.030.000,00 atau 90,50%, dengan demikian terlihat realisasi penerimaan tidak mencapai target sebesar Rp94.970.000,00 atau 9,50%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp316.241.500,00, terlihat realisasi penerimaan dari Badan Pengelola di tahun 2015 naik sebesar Rp588.788.500,00 atau 186,18%.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp4.133.966.304.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp3.622.510.233.102,00 atau 87,63%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD tidak mencapai target sebesar Rp511.456.070.898,00 atau 12,37%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp3.242.123.963.189,00 terlihat pendapatan di tahun 2015 naik sebesar Rp380.386.269.913,00 atau 11,73%.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2015, digambarkan pada tabel 5.10.

Tabel 5.10
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	37.460.000.000	92.038.176.671	245,70	15.564.309.197
2	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	320.000.000.000	237.668.902.983	74,27	212.159.078.081
3	Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah	90.000.000.000	47.518.696.753	52,80	22.615.499.092
4	Hasil Lelang Titik Reklame	60.000.000.000	16.328.700.000	27,21	2.923.467.000
5	Klaim Asuransi Aset	2.000.000.000	781.745.729	39,09	-
6	Jasa Giro	190.742.173.960	157.796.050.966	82,73	167.598.079.081
7	Pendapatan Bunga	775.000.000.000	1.020.372.682.026	131,66	838.840.172.108
8	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	79.200.000.000	116.361.201.326	146,92	82.960.835.319
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.700.000.000	6.892.175.576	36,86	5.327.365.367
10	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	5.400.000.000	5.977.671.406	110,70	5.756.651.445

No	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
11	Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah	1.648.218.881.883	1.456.518.285.286	88,37	1.400.456.687.118
12	Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar jam kerja (Premi)	-	-	-	8.462.062.982
13	Sumbangan dari Perum Jasa Raharja	-	-	-	15.700.000
14	Hasil Tagih Eks BPPN	-	2.385.568.532	-	15.688.587.687
15	Nilai Strategis Reklame	51.000.000.000	21.126.917.628	41,43	47.624.275.545
16	Hasil Kerja Sama Aset Daerah	6.480.777.000	8.200.318.794	126,53	3.213.848.201
17	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	9.000.000.000	9.044.126.408	100,49	-
18	Pendapatan Lain-lain	-	101.769.275.861	-	75.980.116.292
19	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.076.000.000	10.256.322.383	101,79	43.740.569.824
20	Pendapatan Sanksi Pajak	767.639.920.157	250.018.154.621	32,68	243.420.178.844
21	Pendapatan Denda Retribusi	52.850.000.000	60.654.992.957	114,77	49.090.807.467
22	Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	10.198.551.000	800.267.196	7,85	685.532.538
Jumlah		4.133.966.304.000	3.622.510.233.102	87,63	3.242.123.963.189

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2015 antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp37.460.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp92.038.176.671,00 atau 245,70%, dengan demikian realisasi penerimaannya melebihi target sebesar Rp54.578.176.671,00 atau 145,70%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp15.564.309.197,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2014 meningkat sebesar Rp76.473.867.474,00 atau 491,34%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2015 diperoleh dari upaya antara lain:

- a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
- b. Penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai;
- c. Penerimaan dari hasil penjualan brandgang yang penggunaannya diberikan kepada masyarakat dengan membayar biaya kompensasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2015 digambarkan pada tabel 5.11.

Tabel 5.11

Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan
Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	3	5	6 (5:4)	7
1	Pelepasan Hak Atas Tanah	20.000.000.000	78.863.677.000	394,32	210.000.000
2	Penjualan Brandgang	5.000.000.000	-	-	3.550.000.000
3	Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor tidak terpakai	50.000.000	-	-	-
4	Penjualan Mesin / Alat-alat berat tidak Terpakai	200.000.000	-	-	-
5	Penjualan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.000.000.000	7.617.870.887	380,89	11.642.922.097
6	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	200.000.000	-	-	5.180.000
7	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	10.000.000.000	5.556.628.784	55,57	156.207.100
8	Penjualan Alat-alat Kesehatan tidak terpakai	10.000.000	-	-	-
Jumlah		37.460.000.000	92.038.176.671	245,70	15.564.309.197

Selama tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pelepasan hak atas tanah dan badan jalan MHT yang terletak di Jalan Jamblang Kelurahan Duri Selatan senilai Rp2.117.500.000,00 (sesuai dengan SK Gubernur Nomor 258/2015), tanah dan badan jalan MHT yang terletak di Jalan Kebon Sirih Barat IX Kelurahan Kebon Sirih senilai Rp4.149.000.000,00 (sesuai dengan SK Gubernur Nomor 971/2015), pergeseran saluran di Jalan Genteng Ijo Kelurahan Karet Kuningan sebesar Rp5.006.200.000,00 (sesuai SK Gubernur Nomor 2464/2015), tanah dan badan jalan MHT di Jalan H. Cokong Kel Karet sebesar Rp40.903.567.000,00 (sesuai SK Gubernur Nomor 2852/2015), tanah dan badan jalan MHT di Jalan Casablanca sebesar Rp7.802.410.000,00 (sesuai SK Gubernur Nomor 2773/2015), dan pergeseran saluran di Jalan MT Haryono Kav 21 sebesar Rp18.885.000.000,00 (sesuai SK Gubernur Nomor 2851/2015). Atas pembebasan lahan di 6 (enam) lokasi tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp78.863.677.000,00.

2. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2015 merupakan hasil penerimaan atas Rekomendasi HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp320.000.000.000,00. Realisasi

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 yang diperoleh dari Rekomendasi HGB/HPL dan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana atau Murah mencapai Rp237.668.902.983,00 atau 74,27%. Realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp82.331.097.017,00 atau 25,73%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp212.159.078.081,00. Penerimaan di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp25.509.824.902,00 atau 12,02%.

3. Hasil Sewa Aset Daerah

Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp90.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp47.518.696.753,00 atau 52,80%.

Realisasi penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp47.518.696.753,00 terdiri dari:

- a. Hasil Sewa Tanah sebesar Rp31.818.973.067,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Hasil Sewa Gedung sebesar Rp15.459.425.608,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Hasil Sewa Rumah Panggung sebesar Rp240.298.078,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi sewa tahun 2015 dibandingkan dengan realisasi yang sama ditahun 2014 sebesar

Rp22.615.499.092,00. Realisasi di tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp24.903.197.661,00 atau 110,12%.

4. Hasil Lelang Titik Reklame

Hasil Lelang Titik Reklame Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp60.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp16.328.700.000,00 atau 27,21% merupakan Hasil lelang titik reklame atas aset Pemda. Dengan demikian realisasi penerimaan Hasil Lelang Titik Reklame tidak dapat mencapai target sebesar Rp43.671.300.000,00 atau 72,79% karena disebabkan oleh belum adanya kegiatan lelang mengingat kebijakan penyelenggaraan reklame di Provinsi DKI Jakarta sedang dilakukan revisi terutama pembatasan ukuran luas bidang reklame dan pengurangan jumlah lokasi penyelenggaraan reklame. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Hasil Lelang Titik Reklame tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp2.923.467.000,00, maka realisasi di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp13.405.233.000,00 atau 458,54%.

5. Klaim Asuransi Aset

Klaim Asuransi Aset merupakan pendapatan yang diterima atas aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kerusakan dan klaimnya ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp781.745.729,00 atau 39,09%.

Realisasi Klaim Asuransi Aset Tahun Anggaran 2015 mengalami peningkatan yang signifikan jika

dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 yang tidak terdapat realisasinya.

6. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp190.742.173.960,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp157.796.050.966,00 atau 82,73%, dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp32.946.122.994,00 atau 17,27%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp157.796.050.966,00 terdiri dari:

- 1) Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp144.196.128.550,00;
- 2) Jasa Giro Pemegang Kas pada rekening SKPD sebesar Rp13.200.168.311,00;
- 3) Jasa Giro Kas Non Anggaran sebesar Rp399.754.105,00.

Apabila realisasi Jasa Giro tahun 2015 dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp167.598.079.081,00, terlihat realisasi di tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp9.802.028.115,00 atau 5,85%.

7. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2015 ditargetkan Rp775.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp1.020.372.682.026,00 atau 131,66%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga melebihi target sebesar Rp245.372.682.026,00 atau 31,66%. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga deposito milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi Pendapatan Bunga tahun 2015 dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp838.840.172.108,00, terlihat realisasi di tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp181.532.509.918,00 atau 21,64%.

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa penghasilan yang diperoleh dari Investasi atas Dana Cadangan Daerah secara otomatis akan digunakan untuk menambah Pokok Dana Cadangan Daerah. Penghasilan yang diperoleh dari investasi diatas DCD dan penambahan Pokok DCD dicatat melalui mekanisme APBD.

Penerimaan bunga deposito yang diperoleh dari Dana Cadangan Daerah Periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp78.999.209.715,00 tersebut dicatat sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Akun Pembentukan Dana Cadangan Daerah (menambah Pokok Dana Cadangan Daerah).

8. Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2015 ditargetkan Rp79.200.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp116.361.201.326,00 atau 146,92%, realisasi penerimaan TGR melebihi target sebesar Rp37.161.201.326,00 atau 46,92%.

Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diperoleh dari:

- a. Pengembalian Kerugian Uang Daerah sebesar Rp709.664.131,00;

- b. Pengembalian Kerugian Barang Daerah sebesar Rp43.925.000,00;
- c. Pengembalian Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler sebesar Rp115.607.612.195,00 terdiri atas:
 - 1) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat sebesar Rp7.374.403.520,00;
 - 2) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Itjen Kemendagri sebesar Rp303.390.000,00; dan
 - 3) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler BPK sebesar Rp107.929.818.675,00.

Apabila realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp82.960.835.319,00, maka di Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp33.400.366.007,00 atau 40,26%.

9. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2015 ditargetkan Rp18.700.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp6.892.175.576,00 atau 36,86%, realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tidak mencapai target sebesar Rp11.807.824.424,00 atau 63,14%.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tersebut diperoleh dari Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame sebesar Rp6.892.175.576,00.

Apabila realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp5.327.365.367,00, maka di Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp1.564.810.209,00 atau 29,37%.

10. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Tahun Anggaran 2015 ditargetkan Rp5.400.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.977.671.406,00 atau 110,70%.

Realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan sebesar Rp5.977.671.406,00 tersebut diperoleh dari:

- a. Sewa Beli Rumah Susun sebesar Rp5.912.948.651,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Cicilan Uang Muka Rumah Susun sebesar Rp64.722.755,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp5.756.651.445,00 maka di Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp221.019.961,00 atau 3,84%.

11. Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan

kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp1.648.218.881.883,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.456.518.285.286,00 atau 88,37%, dengan demikian realisasi BLUD di tahun 2015 tidak mencapai target sebesar Rp191.700.596.597,00 atau 11,63%.

Apabila realisasi BLUD tersebut dibandingkan dengan realisasi BLUD Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp1.400.456.687.118,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2015 naik sebesar Rp56.061.598.168,00 atau 4,00%.

Realisasi penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel 5.12 berikut ini.

Tabel 5.12
Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pendapatan dari BLUD Kesehatan Masyarakat	396.007.161.000	292.743.737.717	73,92	218.304.410.628
2	Pendapatan dari BLUD RSUD	1.133.295.000.000	1.079.001.212.256	95,21	798.854.030.985
3	Pendapatan dari BLUD Perhubungan	42.000.000.000	36.179.858.785	86,14	48.938.094.436
4	Pendapatan dari BLUD Olahraga dan Pemuda	-	-	-	2.006.807.565
5	Pendapatan dari BLUD Pengelolaan Kawasan dan Rekreasi	28.500.000.000	22.401.437.477	78,60	25.542.203.739
6	Pendapatan dari BLUD Sarana Pendidikan	3.300.000.000	3.138.325.628	95,10	2.992.607.343

No	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
7	Pendapatan dari BLUD Pengembangan Ekonomi Masyarakat	11.800.000.000	6.456.478.975	54,72	12.407.418.483
8	Pendapatan dari BLUD Fasilitas Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	11.490.000.000	10.503.862.152	91,42	9.367.553.635
9	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rumah Susun Wilayah I	6.941.000.000	2.186.528.195	31,50	-
10	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rumah Susun Wilayah II	6.658.954.883	1.880.849.625	28,25	-
11	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rumah Susun Wilayah I	8.226.766.000	2.025.994.476	24,63	696.913.000
12	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rumah Susun Wilayah II	-	-	-	465.438.580
13	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rumah Susun Wilayah III	-	-	-	941.014.772
14	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Transjakarta Busway	-	-	-	279.940.193.952
Jumlah		1.648.218.881.883	1.456.518.285.286	88,37	1.400.456.687.118

Pada realisasi Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah belum termasuk komponen Pendapatan Operasional BLUD yang dicatat sebesar belanja yang belum disahkan melalui mekanisme SP2D Nihil. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dicatat sebesar Belanja Operasional Layanan Umum.

Pendapatan yang Belum Disahkan merupakan pendapatan operasional BLUD yang pada akhir Bulan Desember 2015 belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah. Saldo Pendapatan yang Belum Disahkan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp176.137.294.129,00 dan Rp149.034.535.329,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Pendapatan Belum Disahkan per 31 Desember 2014	Pendapatan Belum Disahkan per 31 Desember 2015
1	RSUD Pasar Rebo	22.020.372.294	56.438.880.484
2	BLUD RS Tarakan	39.148.584.356	50.451.282.197
3	BLUD RS Cengkareng	33.472.671.521	35.280.497.137
4	UPK PPUMKMP Pulogadung	16.881.743.513	16.881.743.513
5	RSUD Duren Sawit	-	7.510.554.141
6	RSUD Koja	36.194.859.667	7.160.476.470
7	BLUD lainnya di bawah 3 Miliar Rupiah	1.316.303.978	2.413.860.187
	Jumlah	149.034.535.329	176.137.294.129

Saldo pendapatan operasional BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung yang belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah per 31 Desember 2015 sama dengan saldo per 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp16.881.743.513,00.

Atas pendapatan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung yang belum dilakukan proses pengesahan tersebut, telah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam laporan nomor LHV-140/PW09/3/2013 tanggal 21 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Verifikasi atas Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Unit UPK PPUMKMP Pulogadung Tahun 2010 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut.

Tahun Anggaran	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Belanja Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja yang Tidak Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja Tanpa Bukti Pendukung
2010	7.279.996.932,66	5.259.241.278,66	768.529.772,00	1.252.225.882,00
2011	4.672.272.382,51	2.796.186.961,51	1.579.736.874,00	296.348.547,00
1 Jan-31 Maret 2012	4.557.849.577,00	3.018.294.331,00	1.539.555.246,00	0,00
Jumlah	16.510.118.892,17	11.073.722.571,17	3.887.821.892,00	1.548.574.429,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih melakukan upaya penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan Unit UPK PPUMKMP Pulogadung sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar jam kerja (Premi)

Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar kerja (Premi) Tahun Anggaran 2015 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasinya.

Hal ini disebabkan kode rekening Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar kerja (Premi) sudah tidak aktif, dan pada tahun ini penerimaan dari Bagi Hasil Premi Asuransi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 ditempatkan pada akun Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah.

Sebagai catatan, realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp8.462.062.982,00.

13. Sumbangan dari Perum Jasa Raharja

Sumbangan dari Perum Jasa Raharja Tahun Anggaran 2015 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasinya.

Apabila realisasi Sumbangan dari Perum Jasa Raharja tahun 2015 dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp15.700.000,00 terlihat realisasi di

tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp15.700.000,00 atau 100,00%.

14. Penerimaan Pemakaian Rumah Kaca

Penerimaan Pemakaian Rumah Kaca pada Tahun Anggaran 2015 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya sampai dengan 31 Desember 2015. Pada tahun 2014, terdapat Penerimaan Pemakaian Rumah Kaca sebesar Rp140.000,00.

15. Hasil Tagih Eks BPPN

Hasil Tagih timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Hasil Tagih Tahun Anggaran 2015 tidak ditargetkan. Namun, terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.385.568.532,00.

Apabila realisasi Hasil Tagih Tahun Anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp15.688.587.687,00 terlihat pada realisasi di tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp13.303.019.155,00 atau 84,79%.

16. Nilai Strategis Reklame

Pendapatan Nilai Strategis Reklame Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp51.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp21.126.917.628,00 atau 41,43%, dengan demikian realisasi Nilai Strategis Reklame di tahun 2015

tidak mencapai target sebesar Rp29.873.082.372,00 atau 58,57%.

Nilai Strategis Reklame tersebut diperoleh dari:

- a. Nilai Strategis Reklame di Persil Swasta sebesar Rp7.677.867.199,00;
- b. Nilai Strategis Reklame di Aset Pemda sebesar Rp189.820.988,00; dan
- c. Nilai Strategis Reklame di Non Aset Pemda sebesar Rp13.259.229.441,00

Apabila realisasi Nilai Strategis Reklame tersebut dibandingkan dengan realisasi Nilai Strategis Reklame Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp47.624.275.545,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2015 turun sebesar Rp26.497.357.917,00 atau 55,64%.

17. Hasil Kerjasama Aset Daerah

Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp6.480.777.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp8.200.318.794,00 atau 126,53%, dengan demikian realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah di tahun 2015 yang melebihi target sebesar Rp1.719.541.794,00 atau 26,53%.

Penerimaan ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Apabila realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp3.213.848.201,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2015 naik sebesar Rp4.986.470.593,00 atau 155,16%.

Sumber realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, sebagaimana pada tabel 5.13.

Tabel 5.13
Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Langgeng Ayom Lestari	250.000.000	250.000.000	100,00	500.000.000
2	Yayasan Sapta Nawami	-	-	-	-
3	PT Hotel Cikini Realty	1.353.600.000	1.350.000.000	99,73	-
4	PT Duta Pertiwi	252.000.000	252.000.000	100,00	252.000.000
5	PT Gerak Maju Abadi	57.225.000	-	-	-
6	PT Bakrie Investindo	150.000.000	150.000.000	100,00	150.000.000
7	PT Dharma Alumas Sakti	183.181.000	183.181.021	100,00	183.181.021
8	PT Jaya Real Propertindo	135.000.000	-	-	126.000.000
9	PT Rointa Eka Jaya	14.400.000	-	-	-
10	PT Pasifik Bangun Mas	116.600.000	-	-	-
11	PT Duta Masa Nusa	500.000.000	-	-	-
12	PT Perwita Margasakti	104.200.000	82.000.000	78,69	54.000.000
13	PT Wahana Cipta Sejahtera	570.250.000	500.000.000	87,68	-
14	PT AGB Tuna	121.850.000	-	-	-
15	PT Pasifik Prima Buana Mas	179.868.000	-	-	-
16	PT Pesona Marga Mandiri	317.814.000	-	-	296.450.000
17	Yayasan Dharma Bhakti Mahaka	-	-	-	-
18	PT Metropolitan Kencana Tbk.	851.152.000	771.000.000	90,58	735.000.000
19	PT Gama Investa Lestari	60.000.000	60.000.000	100,00	60.000.000
20	PT Fajar Setia Mandiri	412.488.000	270.000.000	65,46	-
21	Yayasan Patmos	80.526.000	80.525.500	100,00	73.205.000
22	Yayasan Katholik Mardi Luhur	145.933.000	-	-	-
23	Yayasan Tiara Kasih	22.500.000	22.500.000	100,00	22.500.000
24	Yayasan Tunas Muda	36.603.000	50.000.000	136,60	54.023.750
25	Yayasan Pelatihan E dan P	77.812.000	77.812.273	100,00	70.738.430
26	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	121.275.000	-	-	320.250.000
27	PT Grand Indonesia	366.500.000	366.500.000	100,00	316.500.000
28	Yayasan Bina Tugasku	-	3.599.800.000	-	-
29	PT Gading Raya Propertindo	-	-	-	-
30	PT Jaya Real Property	-	135.000.000	-	-
Jumlah		6.480.777.000	8.200.318.794	126,53	3.213.848.201

18. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp9.044.126.408,00 atau 100,49%. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah merupakan Penerimaan Komisi atas Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar kerja (Premi) merupakan pendapatan Bagi Hasil Premi Asuransi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012.

19. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain terealisasi sebesar Rp101.769.275.861,00 pada Tahun Anggaran 2015. Penerimaan ini merupakan penerimaan daerah yang tidak terdapat dalam kode rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Daftar Susunan Rekening Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

20. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2015 ditargetkan Rp10.076.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp10.256.322.383,00 atau 101,79%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan melampaui target sebesar Rp180.322.383,00 atau 1,79%.

Apabila realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2015 dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp43.740.569.824,00, terlihat realisasi di tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp33.484.247.441,00 atau 76,55%.

Sumber Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, sebagaimana pada tabel 5.14.

Tabel 5.14

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bidang Pendidikan	50.000.000	8.306.740	16,61	129.311.254
2	Bidang Kesehatan	10.000.000	60.879.482	608,79	40.916.745
3	Bidang Pekerjaan Umum	10.000.000.000	10.032.953.067	100,33	43.116.801.811
4	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	191.964.740
5	Bidang Penataan Ruang	15.000.000	33.142.292	220,95	155.262.094
6	Bidang Perencanaan Pembangunan	1.000.000	115.327.159	11.532,72	49.183.713
7	Bidang Perhubungan	-	5.713.643	-	37.615.735
8	Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	19.513.732
JUMLAH		10.076.000.000	10.256.322.383	101,79	43.740.569.824

21. Pendapatan Sanksi Pajak

Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp767.639.920.157,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp250.018.154.621,00 atau 32,57%, dengan demikian realisasi penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp517.621.765.536,00 atau 67,43%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp243.420.178.844,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2015 naik cukup signifikan sebesar Rp6.597.975.777,00 atau 2,71%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2015 tersebut terdiri atas:

- a. Pendapatan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp126.761.122.193,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp50.846.244.260,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp75.914.877.933,00.
- b. Pendapatan Sanksi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.828.759.055,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.869.210.080,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp959.548.975,00.
- c. Pendapatan Sanksi Pajak Pajak Air Tanah sebesar Rp844.141.232,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Air Tanah sebesar Rp649.942.396,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp194.198.836,00.
- d. Pendapatan Sanksi Pajak Hotel sebesar Rp2.530.154.778,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hotel sebesar Rp2.042.777.240,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hotel sebesar Rp293.798.429,00;

- 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hotel sebesar Rp193.579.109,00.
- e. Pendapatan Sanksi Pajak Restoran sebesar Rp8.181.752.428,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Restoran sebesar Rp6.274.384.732,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Restoran sebesar Rp1.436.423.489,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Restoran sebesar Rp470.944.207,00.
- f. Pendapatan Sanksi Pajak Hiburan sebesar Rp2.798.893.120,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hiburan sebesar Rp2.106.322.487,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hiburan sebesar Rp580.931.144,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hiburan sebesar Rp111.639.489,00.
- g. Pendapatan Sanksi Pajak Reklame sebesar Rp32.879.234.896,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Reklame sebesar Rp6.506.741.873,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Reklame sebesar Rp26.372.493.023,00.
- h. Pendapatan Sanksi Pajak Parkir sebesar Rp1.101.873.617,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Parkir sebesar Rp798.286.175,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Parkir sebesar Rp110.269.819,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Parkir sebesar Rp193.317.623,00;
- i. Pendapatan Sanksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp67.825.686,00 yang merupakan

Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- j. Pendapatan Sanksi Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp1.250.430.104,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp36.216.233,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp83.150.432,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp1.131.063.439,00;
- k. Pendapatan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp70.773.967.512,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp69.425.544.627,00; dan
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.348.422.885,00.

22. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp52.850.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp60.654.992.957,00 atau 114,77%, dengan demikian realisasi penerimaan yang melebihi target sebesar Rp7.804.992.957,00 atau 14,77%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2015 tersebut terdiri atas perolehan:

- a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp9.667.440.658,00;

- b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp47.183.495,00;
- c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp50.940.368.804,00.

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp49.078.932.467,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2015 naik sebesar Rp11.576.060.490,00 atau 23,59%.

23. Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp10.198.551.000. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp800.267.196,00 atau 7,85%, dengan demikian realisasi penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp9.398.283.804,00 atau 92,15%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 tersebut terdiri atas:

- a. Denda Keterlambatan Hasil Sewa Aset Daerah sebesar Rp96.499.240,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Denda Keterlambatan Sewa Tanah sebesar Rp41.552.565,00;
 - 2) Denda Keterlambatan Sewa Gedung sebesar Rp54.946.675,00.
- b. Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah sebesar Rp703.767.956,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 2) Denda Keterlambatan Pembangunan sebesar Rp679.867.956,00;
 - 3) Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi sebesar Rp23.900.000,00.

Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp685.532.538,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2015 naik sebesar Rp114.734.658,00 atau 16,74%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2015 semula ditargetkan sebesar Rp15.754.979.596.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp8.642.378.398.086,00 atau 54,85%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2015 disajikan pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Target	Realisasi		
1	2	4	5	6 (5:4)	7
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	12.995.465.925.000	5.887.267.644.697	45,30	9.677.533.225.272
1.1	Bagi Hasil Pajak	12.894.962.912.000	5.751.741.852.400	44,60	9.279.068.989.723
a	Pajak Bumi dan Bangunan	179.671.350.000	135.610.649.500	75,48	117.153.096.984
b	Pajak Penghasilan	12.715.291.562.000	5.616.131.202.900	44,17	9.161.915.892.739
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	100.503.013.000	135.525.792.297	134,85	312.478.953.549
a	Provisi Sumber Daya Hutan	-	94.308.708	~	2.559.665
b	Dana Reboisasi	-	22.963.374	~	-
c	Pungutan Hasil Perikanan	914.875.000	1.016.606.397	111,12	2.299.094.566
d	Pertambangan Minyak Bumi	93.998.662.000	130.479.280.618	138,81	290.515.003.518
e	Pertambangan Gas Bumi	5.589.476.000	3.912.633.200	70,00	19.662.295.800
1.3	Dana Alokasi Umum	-	-	-	85.985.282.000
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	2.759.513.671.000	2.755.110.753.389	98,84	2.482.936.697.000
2.1	Dana Penyesuaian	2.759.513.671.000	2.755.110.753.389	99,84	2.482.936.697.000
Jumlah		15.754.979.596.000	8.642.378.398.086	54,85	12.160.469.922.272

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer Tahun 2015 sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp12.894.962.912.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp5.751.741.852.400,00 atau 44,60%, dengan demikian tahun 2015 penerimaan Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target sebesar Rp7.143.221.059.600 atau 55,40%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2014 yang tercatat

Rp9.279.068.989.723,00, penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun 2015 turun sebesar Rp3.527.327.137.323,00 atau 38,01%.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak diperoleh dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi (PBB Migas)

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp179.671.350.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai sebesar Rp135.610.649.500,00 atau 75,48%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp127.918.162.500,00;
- 2) Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp4.263.939.000,00;
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan ke daerah sebesar Rp3.428.548.000;

Dengan demikian realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi tidak mencapai target sebesar Rp44.060.700.500,00 atau 24,52%.

Apabila realisasi Bagi Hasil PBB tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp117.153.096.984,00, penerimaan bagi hasil PBB tahun 2015 naik sebesar Rp18.457.552.516,00 atau 15,76%.

b. Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan Bagi Hasil PPh Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp12.715.291.562,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp5.616.131.202.900,00 atau 44,17%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp5.378.243.067.450,00;
- 2) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp237.888.135.450,00;

Dengan demikian realisasi penerimaan PPh sampai dengan akhir 31 Desember 2015 tidak mencapai target sebesar Rp7.099.160.359,00 atau 55,83%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp9.161.915.892.739,00, realisasi bagi hasil PPh tahun 2015 turun sebesar Rp3.545.784.689.839,00 atau 38,70%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan PPh Bagi Hasil antara lain:

- 1) Peningkatan koordinasi ekstensifikasi dan intensifikasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan Dirjen Pajak maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi (*Canvassing*) dengan Kanwil DJP untuk peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan.

- 3) Pelaksanaan penjaringan objek pajak pada kawasan tertentu, seperti mal, pusat pertokoan, pusat bisnis dan perdagangan.
- 4) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat (khususnya para Bendaharawan Pemerintah dan Badan Usaha).

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp100.503.013.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp135.525.792.297,00 atau 134,85%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi sebesar Rp130.479.280.618,00;
- b. Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi sebesar Rp3.912.633.200,00;
- c. Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Perikanan sebesar Rp1.016.606.397,00;
- d. Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp117.272.082,00.

Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sampai dengan akhir 31 Desember 2015 melampaui target sebesar Rp35.022.779.297,00 atau 34,85%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp312.478.953.549,00, realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2015 turun sebesar Rp176.953.161.252,00 atau 56,63%.

Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), dilakukan langkah-langkah dan upaya yang intensif, seperti:

- a. Berkoordinasi dengan Departemen Teknis sehingga penerimaan untuk Provinsi DKI Jakarta tidak terlambat diterima.
- b. Melakukan berbagai macam kegiatan yang mendukung seperti memfasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan produksi *lifting* migas dan dana bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta.
- c. Secara intensif telah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka koordinasi perhitungan produksi *lifting* dan penerimaan bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta.
- d. Melakukan pemantauan dan monitoring di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas.
- e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dalam rangka perhitungan *lifting* produksi dari dana bagi hasil SDA yang akan diberikan ke daerah.
- f. Dilakukannya konfirmasi data realisasi penerimaan SDA secara periodik.

3. Dana Alokasi Umum

Tidak terdapat Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2015. Pada Tahun 2014 realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp85.985.282.000,00.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula ditargetkan sebesar Rp2.759.513.671.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp2.755.110.753.389,00 atau 99,84%. Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus per 31 Desember 2015 bersumber dari:

1. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Sertifikasi sebesar Rp1.746.656.471.000,00;
2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.008.454.282.389,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp2.482.936.697.000,00, realisasi penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus naik sebesar Rp272.174.056.389,00 atau 10,96%.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp2.588.642.100.000,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp1.880.682.954.789,00 atau 72,65%. Jumlah tersebut merupakan hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp10.589.130.000,00 dan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sebesar Rp1.870.093.824.789,00. Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat tersebut berasal dari pemberian pinjaman *Japan International Cooperation Agency (JICA)* kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Amandemen *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008.

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2014 Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp389.614.752.674,00, jumlah tersebut merupakan hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp10.133.196.000,00 dan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT Rp379.481.556.674,00.

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2015 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Belanja Daerah dan Transfer adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah.

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

5.1.2.1. Target dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp59.685.552.609.233,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2015 sebesar Rp43.031.322.947.557,00 atau 72,10%, sehingga sisa anggaran di tahun 2015 yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp16.654.229.661.676,00 atau 27,90%.

Selanjutnya apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2015 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2014 yang tercatat sebesar Rp37.799.664.298.459,00 terlihat terjadi peningkatan realisasi di tahun 2015 sebesar Rp5.231.658.649.098,00 atau 13,84%.

Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2015 tergambar pada tabel 5.16.

Tabel 5.16
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2015

No	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6 (5:4)	7
	JENIS BELANJA				
I	Belanja Operasi	40.786.004.983.909	32.415.276.659.037	79,48	27.372.403.799.302
1	Belanja Pegawai	19.505.273.188.832	17.312.344.016.739	88,76	12.604.588.791.793
2	Belanja Barang dan Jasa	16.421.400.772.993	10.633.820.105.891	64,76	12.624.396.750.887
3	Belanja Bunga	46.070.052.873	5.478.639.527	11,89	1.218.528.851
4	Belanja Subsidi	940.000.000.000	659.081.781.344	70,12	-
5	Belanja Hibah	1.785.249.464.211	1.717.428.915.536	96,20	1.462.044.387.771
6	Belanja Bantuan Sosial	2.088.011.505.000	2.087.123.200.000	99,96	680.155.340.000
II	Belanja Modal	18.425.712.578.261	10.244.016.709.208	55,60	10.411.118.390.249
1	Belanja Tanah	7.357.852.305.531	3.451.775.763.772	46,91	1.754.586.883.131
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.218.039.451.093	2.002.190.574.946	62,22	4.062.228.522.758
3	Belanja Gedung dan Bangunan	3.414.624.665.827	2.063.978.323.661	60,45	2.589.956.270.028

No	Uraian	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6 (5:4)	7
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.334.484.447.777	2.685.243.694.385	61,95	1.599.630.901.228
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	100.711.708.033	40.828.352.444	40,54	404.715.813.104
III	Belanja Tak Terduga	72.656.043.103	877.074.802	1,21	2.136.402.124
1	Belanja Tak Terduga	72.656.043.103	877.074.802	1,21	2.136.402.124
IV	Transfer	401.179.003.960	371.152.504.510	92,52	14.005.706.784
1	Transfer / Bantuan Keuangan	401.179.003.960	371.152.504.510	92,52	14.005.706.784
Jumlah (I,II, III, dan IV)		59.685.552.609.233	43.031.322.947.557	72,10	37.799.664.298.459

Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi Belanja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menurut klasifikasi ekonomi, urusan pemerintahan dan kelompok belanja dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah di klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, serta Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Tahun Anggaran 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi

manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2015 dianggarkan Rp40.786.004.983.909,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp32.415.276.659.037,00 atau 79,48%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp8.370.728.324.872,00 atau 20,52%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp19.505.273.188.832,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp17.312.344.016.739,00 atau 88,76%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.192.929.172.093,00 atau 11,24%. Rincian untuk belanja pegawai dapat dilihat pada tabel 5.18 (halaman173).

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp17.312.344.016.739,00 di antaranya berasal dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp13.654.494.376.775,00 dan Belanja Honorarium

Pegawai Honorer / Tidak Tetap sebesar Rp1.434.285.246.117,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp16.421.400.772.993,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp10.633.820.105.891,00 atau 64,76%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp5.787.580.667.102,00 atau 35,24%. Dari jumlah belanja barang dan jasa tersebut, diantaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp800.565.243.723,00 dan belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud sebesar Rp33.797.500,00.

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran SKPD/UKPD, diantaranya adalah:

- 1) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp631.579.701.090,00 diantaranya adalah Belanja Listrik sebesar Rp568.026.681.426,00 dan Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum sebesar Rp48.910.774.100,00.
- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kebersihan sebesar Rp403.841.547.537,00 diantaranya adalah Belanja Jasa Pengolahan

Sampah sebesar Rp306.040.122.959,00 dan Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp21.212.093.600,00.

- 3) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Bina Marga sebesar Rp321.510.937.632,00 diantaranya adalah Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi sebesar Rp211.213.884.724,00 dan Belanja Pemeliharaan Jalan Under Pass sebesar Rp39.459.481.707,00.
- 4) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada BLUD RS Koja sebesar Rp270.584.138.176,00 diantaranya adalah Belanja Operasional BLUD sebesar Rp245.717.492.572,00 dan Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Kontrak Perorangan) sebesar Rp6.653.088.000,00.
- 5) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp93.647.405.920,00 diantaranya adalah Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp61.918.190.340,00 dan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (*Planning*) sebesar Rp5.982.994.745,00.

Pada akun Belanja Barang dan Jasa terdapat komponen Belanja Operasional BLUD yang mencatat seluruh pengeluaran operasional di BLUD yang sudah disahkan maupun yang belum disahkan.

Belanja yang Belum Disahkan merupakan belanja operasional BLUD yang pada akhir Bulan Desember 2015 belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah. Saldo Belanja yang Belum Disahkan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp176.137.294.129,00 dan Rp149.034.535.329,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Belanja Belum Disahkan per 31 Desember 2014	Belanja Belum Disahkan per 31 Desember 2015
1	RSUD Pasar Rebo	22.020.372.294	56.438.880.484
2	BLUD RS Tarakan	39.148.584.356	50.451.282.197
3	BLUD RS Cengkareng	33.472.671.521	35.280.497.137
4	UPK PPUMKMP Pulogadung	16.881.743.513	16.881.743.513
5	RSUD Duren Sawit	-	7.510.554.141
6	RSUD Koja	36.194.859.667	7.160.476.470
7	BLUD lainnya di bawah 3 Miliar Rupiah	1.316.303.978	2.413.860.187
	Jumlah	149.034.535.329	176.137.294.129

Saldo belanja operasional BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung yang belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah per 31 Desember 2015 sama dengan saldo per 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp16.881.743.513,00.

Atas belanja BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung yang belum dilakukan proses pengesahan tersebut, telah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam laporan nomor LHV-140/PW09/3/2013 tanggal 21 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Verifikasi atas Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Unit UPK PPUMKMP Pulogadung Tahun 2010 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut.

Tahun Anggaran	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Belanja Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja yang Tidak Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja Tanpa Bukti Pendukung
2010	7.279.996.932,66	5.259.241.278,66	768.529.772,00	1.252.225.882,00
2011	4.672.272.382,51	2.796.186.961,51	1.579.736.874,00	296.348.547,00
1 Jan-31 Maret 2012	4.557.849.577,00	3.018.294.331,00	1.539.555.246,00	0,00
Jumlah	16.510.118.892,17	11.073.722.571,17	3.887.821.892,00	1.548.574.429,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih melakukan upaya penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan Unit UPK PPUMKMP Pulogadung sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp46.070.052.873,00. Realisasi Belanja Bunga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.478.639.527,00 atau 11,89% yang merupakan pembayaran bunga utang pinjaman kepada pemerintah, dengan demikian sisa anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp40.591.413.346,00 atau 88,11%.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp940.000.000.000,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp659.081.781.344,00 atau 70,12% yang digunakan untuk Belanja Subsidi Kepada BUMD PT Transportasi Jakarta, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp280.918.218.656,00 atau 29,88%.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp1.785.249.464.211,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.717.428.915.536,00 atau 96,20%, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp67.820.548.675,00 atau 3,80%.

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.717.428.915.536,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta	686.953.264.211	670.888.815.536	97,66
2	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	73.450.000.000	69.225.000.000	94,25
3	Belanja Hibah Dana BOS	1.024.846.200.000	977.315.100.000	95,36
	Jumlah	1.785.249.464.211	1.717.428.915.536	96,20

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak

berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp2.088.011.505.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.087.123.200.000,00 atau 99,96%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp888.305.000,00 atau 0,04%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp2.079.621.450.000,00;
2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp7.501.750.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp18.425.712.578.261,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp10.244.016.709.208,00 atau 55,60%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp8.181.695.869.053,00 atau 44,40%.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Tanah

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp7.357.852.305.531,00, Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.451.775.763.772,00 atau 46,91% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.906.076.541.759,00 atau 53,09%.

Realisasi belanja tanah tersebut di antaranya terdapat pada 3 SKPD, yaitu:

1) Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp1.658.769.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.116.883.455.000,00 atau 67,33%. Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:

- a) Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah susun di kelurahan cengkareng barat Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dianggarkan Rp669.946.300.000,00 dan terealisasi Rp668.510.250.000,00 atau 99,79%.
- b) Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Rusun di Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dianggarkan Rp109.945.500.000,00 dan terealisasi Rp109.148.400.000,00 atau 99,28%.
- c) Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Rusun di Jl. Yos Sudarso Raya Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dianggarkan Rp181.440.000.000,00 dan terealisasi Rp120.619.250.000,00 atau 66,48%.

- d) Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah susun di Provinsi DKI Jakarta dianggarkan Rp697.437.500.000,00 dan terealisasi Rp218.605.555.000,00 atau 31,34%.
- 2) Dinas Pertamanan dan Pemakaman
- Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp2.235.830.810.360,00. Realisasinya adalah sebesar Rp1.093.936.509.501,00 atau 48,95%. Belanja modal tersebut digunakan untuk Pembebasan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau di Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Dinas Tata Air
- Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas Tata Air Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp1.734.419.332.325,00 dan terealisasi sebesar Rp827.278.912.044,00 atau 47,70%. Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:
- a) Pembebasan Tanah untuk Waduk, Situ dan Embung di Provinsi DKI Jakarta dianggarkan Rp1.354.664.395.375,00 dan terealisasi Rp746.397.752.163,00 atau 55,10%.
 - b) Pembebasan Tanah untuk Kali/Saluran di Provinsi DKI Jakarta dianggarkan Rp379.754.936.950,00 dan terealisasi Rp80.881.159.881,00 atau 21,30%.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp3.218.039.451.093,00, Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.002.190.574.946,00 atau 62,22% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.215.848.876.147,00 atau 37,78%.

Hampir seluruh SKPD menganggarkan belanja untuk peralatan dan mesin, adapun jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat dianggarkan sebesar Rp924.220.619.844,00. Realisasinya adalah sebesar Rp714.014.950.605,00 atau 77,26%, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Pengadaan Kendaraan Dump Truck Besar pada Dinas Kebersihan dianggarkan sebesar Rp359.490.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp276.607.285.140,00 atau 76,94%;
 - b) Pengadaan Kendaraan Dump Truck Kecil pada Dinas Kebersihan dianggarkan sebesar Rp115.940.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp108.954.775.955,00 atau 93,98%;
 - c) Pengadaan Wheel Loader pada Dinas Kebersihan dianggarkan sebesar Rp81.510.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp66.066.604.500,00 atau 81,05%;
- 2) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor dianggarkan sebesar Rp766.039.957.562,00 Realisasinya adalah sebesar Rp415.136.383.153,00 atau 54,19%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah dianggarkan sebesar Rp62.176.618.560,00 dan terealisasi sebesar Rp61.880.089.600,00 atau 99,52%;
 - b) Pengadaan Kendaraan Truk Arm Roll Besar + Bak Kontainer pada Dinas Kebersihan dianggarkan sebesar Rp61.750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp46.644.045.000,00 atau 75,54%;
 - c) Pengadaan Alat - Alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan (Mobil Crane Loader Sedang, Mobil Crane Loader Kecil, Concrete / Asfalt Cutter, Stamper Kodok, Baby Roller, Genset, Kompresor, dan Jack Hammer) pada Dinas Kebersihan dianggarkan sebesar Rp44.240.073.130,00 dan terealisasi sebesar Rp38.424.000.000,00 atau 86,85%;
- 3) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor dianggarkan sebesar Rp23.952.447.725,00. Realisasinya adalah sebesar Rp16.343.855.600,00 atau 68,23%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Container Sampah pada Sudin Kebersihan Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp4.309.753.800,00 dan terealisasi sebesar Rp2.942.115.000,00 atau 68,27%;
- b) Pengadaan Container 10 m3 dan 6 m3 pada Sudin Kebersihan Jakarta Selatan dianggarkan

sebesar Rp2.581.371.650,00 dan terealisasi sebesar Rp1.630.200.000,00 atau 63,15%;

- c) Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di wilayah Jakarta Timur pada Sudin Kebersihan Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp1.985.670.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.430.000.000,00 atau 72,02%.

- 4) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor dianggarkan sebesar Rp28.295.878.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp2.747.140.000,00 atau 9,71%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Sarana Pengelolaan Tambat Labuh pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp198.880.000,00 atau 13,26%;
- b) Pelayanan Pendidikan Masyarakat Kepulauan Seribu pada Sudin Pendidikan Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp198.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp180.400.000,00 atau 91,11%;
- c) Pelayanan Angkutan Perairan dan Pelabuhan pada Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan dianggarkan sebesar Rp2.455.618.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.272.160.000,00 atau 92,53%;

- 5) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor dianggarkan sebesar Rp2.106.385.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp1.245.066.800,00 atau 59,11%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Hutan Kota dan Hutan Mangrove pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan sebesar Rp191.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp188.100.000,00 atau 98,28%;
 - b) Penanganan Sampah di Taman, Saluran Mikro dan Penghubung pada Sudin kebersihan Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp196.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp169.900.500,00 atau 86,53%;
 - c) Penyelenggaraan peningkatan Pelayanan Kapasitas Kelurahan Cilincing dianggarkan sebesar Rp165.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp165.718.300,00 atau 99,86%;
- 6) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel dianggarkan sebesar Rp21.654.853.126,00. Realisasinya adalah sebesar Rp13.265.404.312,00 atau 61,26%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja (perkakas bengkel kerja) pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp3.176.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.582.800.000,00 atau 81,32%;
- b) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja (Mesin Las) pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta

Barat dianggarkan sebesar Rp2.268.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.822.150.000,00 atau 80,32%;

- c) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja (Mesin Bubut) pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp1.720.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.395.900.000,00 atau 81,13%;

- 7) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan dianggarkan sebesar Rp11.597.971.318,00. Realisasinya adalah sebesar Rp8.346.118.005,00 atau 71,96%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Mesin Potong Rumput dan Chain Shaw pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp197.022.739,00 dan terealisasi sebesar Rp195.580.000,00 atau 99,27%;
- b) Pengadaan Mesin Potong Pohon (chainsaw + polesaw) pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp190.205.163,00 dan terealisasi sebesar Rp183.342.500,00 atau 96,39%;
- c) Pengadaan Sarana Prasarana Pemakaman Jakarta Barat pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp181.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp180.737.700,00 atau 99,58%;

- 8) Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor dianggarkan sebesar Rp20.969.894.890,00.

Realisasinya adalah sebesar Rp10.865.699.715,00 atau 51,82%.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Penyediaan dukungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Selatan pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan sebesar Rp950.455.000,00 dan terealisasi sebesar Rp644.600.000,00 atau 67,82%;
 - b) Peningkatan administrasi Kantor Dinas Pelayanan Pajak pada Dinas Pelayanan Pajak dianggarkan sebesar Rp422.713.500,00 dan terealisasi sebesar Rp319.000.000,00 atau 75,46%;
 - c) Penyediaan dukungan Satlak PTSP Kelurahan di Wilayah Kecamatan Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan sebesar Rp423.775.000,00 dan terealisasi sebesar Rp288.750.000,00 atau 68,14%.
- 9) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor dianggarkan sebesar Rp233.398.179.233,00. Realisasinya adalah sebesar Rp61.408.608.994,00 atau 26,31%
- Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan ME di Gedung Teater Jakarta dan Gedung Graha Bhakti Budaya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dianggarkan sebesar

Rp3.996.701.500,00 dan terealisasi sebesar Rp3.452.629.400,00 atau 86,39%;

- b) Pengadaan Alat Medis dan Non Medis pada BLUD RS Budhi Asih dianggarkan sebesar Rp3.416.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.150.180.000,00 atau 92,20%;
- c) Pelayanan SPGDT dan Dukungan Kesehatan untuk Event Nasional dan Internasional pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp3.168.000.00,00 dan terealisasi sebesar Rp2.502.500.000,00 atau 78,99%.

10) Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan sebesar Rp248.151.456.982,00. Realisasinya adalah sebesar Rp164.083.576.454,00 atau 66,12%

Belanja Modal Pengadaan Komputer di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan sistem pajak online pada Dinas Pelayanan Pajak dianggarkan sebesar Rp49.995.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp46.485.017.700,00 atau 92,98%;
- b) Pengelolaan Data Center dan DRC pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dianggarkan sebesar Rp12.325.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.856.505.000,00 atau 88,08%;
- c) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Teknologi Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak dianggarkan sebesar Rp12.586.659.800,00 dan terealisasi sebesar Rp10.733.800.000,00 atau 85,28%;

11) Belanja Modal Pengadaan Mebeulair dianggarkan sebesar Rp104.387.532.248,00. Realisasinya adalah sebesar Rp56.420.484.304,00 atau 54,05% Belanja Modal Pengadaan Mebeulair pada Dinas Pendidikan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga Pekerjaan Pengadaan Lemari Kelas SD Tahun 2014 Daerah pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp3.139.854.300,00 dan terealisasi sebesar Rp3.139.854.300,00 atau 100,00%;
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan pada RSUD Pasar Minggu dianggarkan sebesar Rp2.445.477.100,00 dan terealisasi sebesar Rp1.969.889.196,00 atau 80,55%;
- c) Pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD dianggarkan sebesar Rp3.852.977.700,00 dan terealisasi sebesar Rp1.810.033.500,00 atau 46,98%.

12) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dianggarkan sebesar Rp12.214.868.868,00. Realisasinya adalah sebesar Rp8.565.594.501,00 atau 70,12%.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Alat Medis dan Non Medis pada BLUD RS Koja dianggarkan sebesar Rp3.413.703.150,00 dan terealisasi sebesar Rp2.700.000.000,00 atau 79,09%;

- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan pada RSUD Pasar Minggu dianggarkan sebesar Rp2.857.508.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.187.680.000,00 atau 76,56%;
 - c) Pengadaan Alat Medis dan Non Medis pada BLUD RS Budhi Asih dianggarkan sebesar Rp1.998.132.571,00 dan terealisasi sebesar Rp1.645.930.000,00 atau 82,37%.
- 13) Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp8.046.882.029,00. Realisasinya adalah sebesar Rp5.709.318.252,00 atau 70,95%.
- Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga di antaranya adalah sebagai berikut:
- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan pada RSUD Pasar Minggu dianggarkan sebesar Rp1.908.632.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.460.800.000,00 atau 76,54%;
 - b) Pengadaan Barang Inventaris Graha Wisata pada Unit Pengelola Graha Wisata dianggarkan sebesar Rp217.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp194.562.500,00 atau 89,56%;
 - c) Peningkatan Administrasi Perkantoran pada Sudin Kesehatan Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp230.868.000,00 dan terealisasi sebesar Rp179.190.000,00 atau 77,62%.
- 14) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio dianggarkan sebesar Rp78.916.712.440,00. Realisasinya adalah sebesar Rp44.985.225.045,00 atau 57,00%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Jakarta Smart City pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dianggarkan sebesar Rp11.102.623.538,00 dan terealisasi sebesar Rp10.441.733.010,00 atau 94,05%;
- b) Pembangunan system Rigging Teater Kecil Gedung Teater Jakarta pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp7.8920.898.598,00 dan terealisasi sebesar Rp6.987.885.719,00 atau 88,56%;
- c) Fasilitasi pelayanan tugas dan fungsi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD dianggarkan sebesar Rp3.207.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.795.306.800,00 atau 87,16%.

15) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dianggarkan sebesar Rp31.093.644.720,00. Realisasinya adalah sebesar Rp15.991.182.807,00 atau 51,43%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Jakarta Smart City pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dianggarkan sebesar Rp5.095.570.480,00 dan terealisasi sebesar Rp4.725.158.620,00 atau 92,73%;
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan pada RSUD Pasar Minggu dianggarkan sebesar Rp4.818.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.453.350.000,00 atau 92,43%;

- c) Pembangunan Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan Kebersihan pada Dinas Kebersihan dianggarkan sebesar Rp4.380.384.891,00 dan terealisasi sebesar Rp2.375.915.079,00 atau 54,24%.

16) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp39.315.236.998,00. Realisasinya adalah sebesar Rp9.998.972.085,00 atau 25,43%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrologian pada UPT Balai Metrologi dianggarkan sebesar Rp4.175.922.001,00 dan terealisasi sebesar Rp3.360.000.000,00 atau 80,46%;
- b) Penyediaan Jasa dan peralatan pendukung penelitian teknis pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan sebesar Rp1.431.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.224.300.000,00 atau 85,53%;
- c) Pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana pendukung operasional penanggulangan bencana daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggarkan sebesar Rp1.122.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.058.813.360,00 atau 94,71%.

17) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran dianggarkan sebesar Rp586.094.130.323,00. Realisasinya adalah sebesar Rp402.346.299.478,00 atau 68,65%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Alat Medis dan Non Medis pada BLUD RS Koja dianggarkan sebesar Rp50.051.773.574,00 dan terealisasi sebesar Rp44.351.612.750,00 atau 88,61%;
- b) Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan Farmasi pada RSUD Pasar Minggu dianggarkan sebesar Rp50.984.540.596,00 dan terealisasi sebesar Rp35.401.093.746,00 atau 69,43%;
- c) Kebutuhan alat kamar operasi 15 Rumah Sakit Umum Kecamatan pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp35.903.982.296,00 dan terealisasi sebesar Rp30.054.775.110,00 atau 83,71%.

18) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp77.381.522.407,00. Realisasinya adalah sebesar Rp50.593.295.836,00 atau 65,38%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan dan Peningkatan Laboratorium pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dianggarkan sebesar Rp7.210.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.063.266.000,00 atau 84,09%;
- b) Pengadaan Sarana Prasarana pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dianggarkan sebesar Rp5.813.878.375,00 dan terealisasi sebesar Rp6.063.266.000,00 atau 84,09%;

c) Pengadaan Alat Medis, Non Medis dan Farmasi pada BLUD RS Pasar Rebo dianggarkan sebesar Rp5.436.585.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.149.743.280,00 atau 94,72%;

19) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan dianggarkan sebesar Rp201.277.380,00. Realisasinya adalah sebesar Rp123.399.000,00 atau 61,31%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan di antaranya adalah sebagai berikut:

Pengadaan Seragam dan Atribut Petugas Dinas Perhubungan dan Petugas Lapangan serta Kelengkapannya pada Dinas Perhubungan dan Transportasi dianggarkan sebesar Rp82.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp77.000.000,00 atau 93,33%;

Peningkatan Administrasi Perkantoran pada Pusat Konservasi Cagar Budaya dianggarkan sebesar Rp8.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.800.000,00 atau 100,00%;

Peningkatan Administrasi Perkantoran pada Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp12.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.650.000,00 atau 97,46%;

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut terdapat belanja sebesar Rp35.232.455.532,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terdapat belanja modal yang diserahkan ke

pihak lain diluar SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp23.838.885.399,00 sehingga tidak menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp3.414.624.665.827,00, Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.063.978.323.661,00 atau 60,45% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.350.646.342.166,00 atau 39,55%.

Realisasi belanja gedung dan bangunan tersebut diantaranya:

1) Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

Menganggarkan sebesar Rp936.743.262.032,00 dengan realisasi sebesar Rp617.793.700.138,00 atau 65,95%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:

- a) Pembangunan Gedung Dinas Teknis Jatibaru dianggarkan sebesar Rp141.617.319.099,00 dan realisasinya sebesar Rp118.774.579.000,00 atau 83,87%;
- b) Pembangunan Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp47.063.293.618,00 dan realisasinya sebesar Rp43.671.934.000,00 atau 92,79%;
- c) Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp39.999.984.328,00 dan realisasinya sebesar Rp36.081.501.780,00 atau 90,20%.

- 2) BLUD RS Koja, Pembangunan Gedung Rumah Sakit dianggarkan sebesar Rp56.141.605.100,00 dan terealisasi Rp54.629.208.000,00 atau 97,31%.
- 3) Dinas Pendidikan
Menganggarkan sebesar Rp602.973.408.512,00 dengan realisasi sebesar Rp418.393.231.568,00 atau 69,39%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:
 - a) Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung Kantor Puslatdikjur Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp31.546.473.377,00 dan realisasinya sebesar Rp28.350.534.000,00 atau 89,87%.
 - b) Penyelesaian Sarana Penunjang SMKN Terpadu Bambu Apus dianggarkan sebesar Rp23.074.971.304,00 dan realisasinya sebesar Rp21.001.233.000,00 atau 91,01%.
 - c) Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SMKN 2 dianggarkan sebesar Rp19.823.929.770,00 dan realisasinya sebesar Rp16.697.704.000,00 atau 84,23%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan tersebut terdapat belanja sebesar Rp7.670.892.911,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terdapat belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp4.827.270.106,00 yang diserahkan ke pihak lain diluar SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp4.334.484.447.777,00,

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.685.243.694.385,00 atau 61,95% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.649.240.753.392,00 atau 38,05%.

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut di antaranya:

1) Dinas Bina Marga

Menganggarkan sebesar Rp1.819.726.459.126,00 dengan realisasi sebesar Rp1.579.706.212.783,00 atau 86,81%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:

- a) Pembangunan Jalan Layang Busway Kapten Tendean - Blok M – Cileduk dianggarkan sebesar Rp999.700.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp993.204.363.119,00 atau 99,35%;
- b) Pembangunan/Peningkatan Jalan-jalan strategis di Prov.DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp245.099.499.500,00 dan realisasinya sebesar Rp218.479.980.735,00 atau 89,14%;
- c) Pembangunan Fly Over Kuningan Sisi Selatan dianggarkan sebesar Rp141.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp134.289.317.500,00 atau 95,24%.

2) Dinas Tata Air

Menganggarkan sebesar Rp592.407.026.973,00 dengan realisasi sebesar Rp217.003.303.173,00 atau 36,63%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:

- a) Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) Dredging and Embankment of Ciliwung-Gubung Sahari Drain dan Waduk Melati Sub Project ICB Package No JUFMP-1

dianggarkan sebesar Rp112.882.214.671,00 dan realisasinya sebesar Rp58.806.761.910,00 atau 52,10%;

b) Pembangunan Parkir Air (Reservoir Air), Sumur Resapan, Imbuhan dan Pengisian (Recharge) Air Tanah dianggarkan sebesar Rp48.103.833.245,00 dan realisasinya sebesar Rp32.977.351.000,00 atau 68,55%;

c) Pembangunan Tanggul A Pantai mendukung NCICD dianggarkan sebesar Rp59.990.479.776,00 dan realisasinya sebesar Rp27.116.041.000,00 atau 45,20%.

3) Dinas Perindustrian dan Energi, Pembangunan sarana perindustrian dan energi dianggarkan sebesar Rp98.446.591.364,00 dan realisasinya sebesar Rp62.812.617.510,00 atau 63,80%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut terdapat belanja sebesar Rp2.035.272.144,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan terdapat belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp24.860.000,00 yang diserahkan ke pihak lain diluar SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional, serta terdapat Uang Muka Kerja sebesar Rp76.190.608.071 pada Dinas Bina Marga dan Dinas Tata Air yang tidak menambah nilai aset jalan, irigasi dan jaringan.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp100.711.708.033,00, Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp40.828.352.444,00 atau 40,54% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp59.883.355.589,00 atau 59,46%.

Realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut diantaranya:

a. Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Menganggarkan sebesar Rp18.528.994.345,00 dengan realisasi sebesar Rp7.685.804.462,00 atau 41,48%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:

- a) Penanganan Segera Pertamanan dan Pemakaman dianggarkan sebesar Rp7.425.207.130,00 dan realisasinya sebesar Rp4.143.391.360,00 atau 55,80%;
- b) Pemeliharaan/ Penataan Taman dan Jalur Hijau 5 Wilayah Kota dianggarkan sebesar Rp4.147.162.140,00 dan realisasinya sebesar Rp1.424.782.529,00 atau 34,36%;
- c) Pembangunan Taman Jalur Hijau dianggarkan sebesar Rp3.575.918.280,00 dan realisasinya sebesar Rp1.178.960.807,00 atau 32,97%;

b. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Menganggarkan sebesar Rp6.194.694.250,00 dengan realisasi sebesar Rp3.529.530.435,00 atau 56,98%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:

- a) Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp1.211.012.000,00 dan realisasinya sebesar Rp970.445.655,00 atau 80,14%;

- b) Pengadaan buku elektronik dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.282.196.080,00 atau 64,11%;
 - c) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp1.287.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp812.400.400,00 atau 63,11%;
- c. Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat Menganggarkan sebesar Rp21.729.157.762,00 dengan realisasi sebesar Rp7.549.701.426,00 atau 34,74%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:
- a) Pemeliharaan/Perbaikan Rutin Jalur Hijau Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp6.704.015.982,00 dan realisasinya sebesar Rp2.734.948.500,00 atau 40,80%;
 - b) Pemeliharaan/Perbaikan Rutin Taman Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp4.495.430.500,00 dan realisasinya sebesar Rp987.146.500,00 atau 21,96%;
 - c) Pemeliharaan/Perbaikan Rutin Jalur Hijau Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp1.123.372.360,00 dan realisasinya sebesar Rp344.831.500,00 atau 30,70%;

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut terdapat belanja sebesar Rp5.469.928.786,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terdapat belanja modal aset tetap lainnya yang diserahkan ke pihak lain

diluar SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1.414.643.215,00 sehingga tidak menambah nilai Aset Tetap Lainnya, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp72.656.043.103,00, Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp877.074.802,00 atau 1,21% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp71.778.968.301,00 atau 98,79%.

4. Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat komponen Transfer yang terdiri dari Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer / Bantuan Keuangan.

Belanja Bantuan Keuangan yang dalam Laporan Keuangan Tahun 2014 disajikan dalam kelompok Belanja Operasi, pada Laporan Keuangan Tahun 2015 disajikan dalam kelompok Transfer / Bantuan Keuangan.

Transfer / Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer / Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp401.179.003.960,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp371.152.504.510,00 atau 92,52%, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp30.026.499.450,00 atau 7,48%. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp371.152.504.510,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp369.674.163.000,00 dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.478.341.510,00.

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp369.674.163.000,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Pemerintah Kota Bogor Jl. Ir. H. Juanda Nomor 1, Kota Bogor	4.500.000.000
2.	Pemerintah Kabupaten Bogor Jl. Raya Tegar Beriman Cibinong, Kab. Bogor	66.482.715.000
3.	Pemerintah Kota Tangerang Jl. Satria Sudirman No.2, Kota Tangerang	100.000.000.000
4.	Pemerintah Kabupaten Tangerang Jl. H. Somawinata No.1 Tigaraksa-Tangerang	17.151.248.000
5.	Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabekjur Gedung Mitra Praja Jl. Sunter Permai Raya No.1 Lt.3 Jakarta Utara 14350	98.148.000.000
6.	Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Gedung Mitra Praja Jl. Sunter Permai Raya No.1 Lt.IV Jakarta Utara 14350	9.400.000.000
7.	Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MPI) Sekretariat Kampus Institut Ilmu Pemerintahan Jln. Ampera Raya, Cilandak Timur Jakarta Selatan	73.992.200.000
Jumlah		369.674.163.000

5.1.2.1.2 Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Menurut Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2015, dapat digambarkan pada Tabel 5.17 berikut ini.

Tabel 5.17
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi Tahun 2014
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	URUSAN WAJIB	57.545.089.436.431	41.382.797.246.958	71,91	36.335.485.314.669
1.	Pendidikan	11.109.042.389.887	9.134.991.256.929	82,23	10.037.423.135.277
2.	Kesehatan	6.703.917.447.677	5.145.232.729.626	76,75	5.477.833.433.698
3.	Pekerjaan Umum	12.393.286.061.142	7.196.616.920.547	58,07	4.772.615.205.912
4.	Perumahan	3.347.554.408.362	1.992.172.927.387	59,51	1.333.711.613.115
5.	Penataan Ruang	245.409.889.829	220.728.243.828	89,94	145.298.177.291
6.	Perencanaan Pembangunan	111.673.137.735	90.366.356.992	80,92	131.940.161.779
7.	Perhubungan	1.123.592.619.721	681.665.734.908	60,67	1.399.052.912.016
8.	Lingkungan Hidup	3.638.129.301.435	2.037.197.080.011	56,00	1.307.842.424.850
9.	Pertanahan	-	-	-	2.166.212.500
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	237.020.533.698	213.991.877.428	90,28	128.321.558.071
11.	Pemberdayaan Perempuan	29.445.382.769	5.647.154.844	19,18	28.501.333.365
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	41.451.539.253	28.931.434.245	69,80	76.257.461.830
13.	Sosial	620.544.663.279	532.894.379.003	85,88	487.404.655.648
14.	Ketenagakerjaan	370.492.462.364	282.845.990.445	76,34	276.052.812.381
15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	266.636.128.550	184.686.374.579	69,27	196.862.290.120
16.	Penanaman Modal	29.243.082.391	26.148.493.992	89,42	16.642.627.210
17.	Kebudayaan	640.500.499.362	463.956.539.402	72,44	688.431.617.345
18.	Pemuda dan Olahraga	408.273.110.817	301.248.535.311	73,79	710.715.187.461
19.	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	74.399.210.947	62.356.897.364	83,81	99.950.894.240
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kepegawaian	15.308.510.588.909	12.176.590.679.477	79,54	8.344.506.247.191
21.	Ketahanan Pangan	44.897.546.172	32.829.720.952	73,12	58.098.392.290
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	264.336.900.116	239.092.977.906	90,45	192.444.854.827
23.	Statistik	449.076.666	136.351.388	30,36	4.719.439.850
24.	Kearsipan	49.534.963.578	5.772.370.417	11,65	41.427.579.913
25.	Komunikasi dan Informatika	308.868.013.136	215.356.028.450	69,72	219.571.771.049
26.	Perpustakaan	177.880.478.636	111.340.191.527	62,59	157.693.315.440
II	URUSAN PILIHAN	2.140.463.172.802	1.648.525.700.599	77,02	1.464.178.983.790
1.	Pertanian	61.551.964.696	38.911.412.531	63,22	73.537.880.016
2.	Kehutanan	21.215.526.150	13.778.261.672	64,94	4.772.465.420
3.	Energi dan Sumberdaya Mineral	1.363.959.684.828	1.072.917.015.791	78,66	686.516.345.259
4.	Pariwisata	216.374.183.364	161.345.940.484	74,57	321.470.075.559
5.	Kelautan dan Perikanan	429.485.642.265	337.215.171.488	78,52	336.424.892.256
6.	Perdagangan	29.029.169.199	10.537.312.815	36,30	14.641.831.711
7.	Industri	18.847.002.300	13.820.585.818	73,33	26.815.493.569
Jumlah (I dan II)		59.685.552.609.233	43.031.322.947.557	72,10	37.799.664.298.459

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Wajib sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.109.042.389.887,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.134.991.256.929,00 atau 82,23%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

Untuk Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.730.828.067.225,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.539.362.878.065,00 atau 88,94%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.111.083.438.572,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp715.934.673.943,00 atau 64,44%.

3) Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.584.943.181,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.001.029.257,00 atau 62,56%.

4) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp126.279.859.233,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp65.445.400.764,00 atau 51,83%.

5) Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Untuk Program Pendidikan Non Formal dan Informal, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.884.238.680,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.962.801.590,00 atau 50,21%.

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.703.917.447.677,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.145.232.729.626,00 atau 76,75%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak

Untuk Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp658.390.900,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp529.838.500,00 atau 80,47%.

2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Untuk Program Pembinaan Upaya Kesehatan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp67.207.454.077,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp51.144.679.769,00 atau 76,10%.

3) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp174.119.618.570,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp131.335.690.543,00 atau 75,43%.

4) Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana

Untuk Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14.463.841.950,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.269.731.525,00 atau 71,00%.

5) Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman

Untuk Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp289.814.372.163,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp208.574.903.988,00 atau 71,97%.

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.393.286.061.142,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.196.616.920.547,00 atau 58,07%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

Untuk Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.095.231.837.011,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.344.666.754.388,00 atau 75,75%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.351.420.309.331,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp936.233.066.411,00 atau 69,28%.

3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp741.197.372.637,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp447.010.088.024,00 atau 60,31%.

4) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

Untuk Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.947.355.002,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.583.251.160,00 atau 52,21%.

5) Program Pengembangan Sistem Drainase

Untuk Program Pengembangan Sistem Drainase, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp651.840.340.674,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp331.711.428.249,00 atau 50,89%.

4. Urusan Perumahan

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perumahan, pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.347.554.408.362,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.992.172.927.387,00 atau 59,51%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penyediaan Perumahan Rakyat

Untuk Program Penyediaan Perumahan Rakyat, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp306.159.819.304,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp216.418.445.909,00 atau 70,69%.

2) Program Pemeliharaan Gedung Pemda

Untuk Program Pemeliharaan Gedung Pemda, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp51.535.211.324,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp34.779.344.727,00 atau 67,49%.

3) Program Pembangunan Gedung Pemda

Untuk Program Pembangunan Gedung Pemda, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp680.110.059.773,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp432.885.616.874,00 atau 63,65%.

4) Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun

Untuk Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun, pada tahun 2015 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp10.846.446.573,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.460.815.960,00 atau 59,57%.

- 5) Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman
- Untuk Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.656.738.836,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.309.228.239,00 atau 58,50%.

5. Urusan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Penataan Ruang pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp245.409.889.829,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp220.728.243.828,00 atau 89,94%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

Untuk Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.980.515.380,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.863.712.060,00 atau 96,08%.

2) Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung

Untuk Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.415.372.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.462.490.000,00 atau 89,88%.

3) Program Perencanaan Tata Ruang

Untuk Program Perencanaan Tata Ruang, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.610.338.250,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.951.027.500,00 atau 78,20%.

4) Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

Untuk Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp329.020.538,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp232.897.500,00 atau 70,79%.

5) Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang

Untuk Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.900.002.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.300.200.000,00 atau 68,43%.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp111.673.137.735,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp90.366.356.992,00 atau 80,92%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur, pada tahun 2015 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp1.773.989.826,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.084.633.179,00 atau 61,14%.

2) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.136.554.775,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.056.471.621,00 atau 49,45%.

3) Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.028.918.375,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp995.019.752,00 atau 49,04%.

4) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.166.124.173,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.354.777.930,00 atau 42,79%.

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan

Untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.336.127.895,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.693.990.243,00 atau 36,72%.

7. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.123.592.619.721,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp681.665.734.908,00 atau 60,67%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18.116.104.096,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.555.235.034,00 atau 80,34%.

2) Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan

Untuk Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp78.791.825.748,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp49.356.779.614,00 atau 62,64%.

3) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan

Untuk Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp107.008.818.269,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp64.705.312.606,00 atau 60,47%.

4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, pada tahun 2015 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp35.743.631.511,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp19.766.072.496,00 atau 55,30%.

- 5) Program Pembangunan Transportasi Perairan
Untuk Program Pembangunan Transportasi Perairan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp59.721.268.193,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.221.099.933,00 atau 15,44%.

8. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.638.129.301.435,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.037.197.080.011,00 atau 56%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Untuk Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.167.724.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.034.320.000,00 atau 88,58%.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman
Untuk Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp59.677.122.235,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp49.583.006.229,00 atau 83,09%.

3) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup

Untuk Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.511.424.619,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.265.309.150,00 atau 76,39%.

4) Program Konservasi Flora dan Fauna

Untuk Program Konservasi Flora dan Fauna, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp35.793.837.938,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.576.206.749,00 atau 68,66%.

5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp126.804.632.986,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp85.013.743.670,00 atau 67,04%.

9. Urusan Pertanahan

Tidak terdapat alokasi dan realisasi Urusan Pertanahan pada tahun 2015. Realisasi Urusan Pertanahan pada tahun 2014 sebesar Rp2.166.212.500,00.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp237.020.533.698,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp213.991.877.428,00 atau 90,28%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan
Untuk Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.909.403.306,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.948.627.458,00 atau 90,30%.
- 2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13.206.081.811,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.298.206.454,00 atau 77,98%.
- 3) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Untuk Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp515.712.262,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp354.295.700,00 atau 68,70%.
- 4) Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Untuk Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp37.391.155.049,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.296.227.879,00 atau 64,98%.
- 5) Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.505.320.766,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.470.571.390,00 atau 58,70%.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp29.445.382.769,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp5.647.154.844,00 atau 19,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak

Untuk Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp893.673.850,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp484.400.940,00 atau 54,20%.

2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Untuk Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp134.937.580,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp51.861.580,00 atau 38,43%.

3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Untuk Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.227.406.935,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp422.651.160,00 atau 34,43%.

4) Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan

Untuk Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp27.189.364.404,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.688.241.164,00 atau 17,24%.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp41.451.539.253,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp28.931.434.245,00 atau 69,80%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.393.590.089,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.820.289.336,00 atau 81,26%.

6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp1.499.058.168,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.152.240.940,00 atau 76,86%.

7) Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Untuk Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.002.919.981,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.890.235.670,00 atau 64,81%.

8) Program Keluarga Berencana

Untuk Program Keluarga Berencana, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.368.551.472,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.478.380.102,00 atau 71,84%.

9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.395.991.720,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp868.591.200,00 atau 62,22%.

13. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Sosial pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp620.544.663.279,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp532.894.379.003,00 atau 85,88%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Untuk Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.149.998.380,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.910.982.018,00 atau 92,24%.
- 2) Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Untuk Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.598.504.314,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.495.162.059,00 atau 86,52%.
- 3) Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Untuk Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp197.740.857.651,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp162.071.665.926,00 atau 81,96%.
- 4) Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial
Untuk Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp30.048.371.214,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp21.616.173.093,00 atau 71,94%.
- 5) Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Untuk Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp43.203.309.091,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.933.776.388,00 atau 57,71%.

14. Urusan Ketenagakerjaan

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp370.492.462.364,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp282.845.990.445,00 atau 76,34%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja

Untuk Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.281.919.302,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.554.320.268,00 atau 86,22%.

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Untuk Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp121.123.949.441,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp69.799.496.489,00 atau 57,63%.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.692.359.035,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.788.794.888,00 atau 48,99%.

4) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.857.384.383,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.157.983.063,00 atau 47,89%.

5) Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian

Untuk Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.099.914.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp509.116.600,00 atau 46,29%.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp266.636.128.550,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp184.686.374.579,00 atau 69,27%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Usaha Koperasi

Untuk Program Peningkatan Usaha Koperasi, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp28.173.556.303,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.681.782.111,00 atau 66,31%.

2) Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi

Untuk Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.783.888.688,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp908.678.761,00 atau 50,94%.

3) Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri

Untuk Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp772.840.565,00 atau 42,94%.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp70.644.993.980,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp27.945.430.207,00 atau 39,56%.

5) Program Peningkatan Pelayanan Kemeterologian

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kemeterologian, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp20.800.730.143,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.210.945.350,00 atau 39,47%.

16. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp29.243.082.391,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp26.148.493.992,00 atau 89,42%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.943.116.945,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.247.372.913,00 atau 82,36%.
- 2) Program Peningkatan Kinerja BUMD
Untuk Program Peningkatan Kinerja BUMD, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.904.977.610,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.281.258.845,00 atau 67,26%.
- 3) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas
Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp49.997.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp30.143.968,00 atau 60,29%.
- 4) Program Peningkatan Investasi
Untuk Program Peningkatan Investasi, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.889.999.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.128.629.036,00 atau 59,72%.
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Untuk Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp651.821.391,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp347.738.250,00 atau 53,35%.

17. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kebudayaan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp640.500.499.362,00

dan telah direalisasikan sebesar Rp463.956.539.402,00 atau 72,44%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp31.167.349.979,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp25.905.617.085,00 atau 83,12%.

2) Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata

Untuk Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.599.200.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.931.166.100,00 atau 74,30%.

3) Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp126.231.806.916,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp93.479.276.195,00 atau 74,05%.

4) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

Untuk Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp11.266.575.378,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.861.513.026,00 atau 69,78%.

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp127.016.227.970,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp81.322.327.452,00 atau 64,03%.

18. Urusan Pemuda dan Olahraga

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp408.273.110.817,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp301.248.535.311,00 atau 73,79%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp94.613.281.590,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp73.016.903.337,00 atau 77,17%.

2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi

Untuk Program Pembinaan Olahraga Prestasi, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp76.376.890.587,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp51.409.763.654,00 atau 67,31%.

3) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Untuk Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, pada tahun 2015 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp23.461.820.397,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.741.441.851,00 atau 67,09%.

4) Program Pengembangan Olahraga

Untuk Program Pengembangan Olahraga, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp26.856.790.533,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.861.981.949,00 atau 62,78%.

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp87.692.900.250,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp54.850.681.540,00 atau 62,55%.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran penetapan sebesar Rp74.399.210.947,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp62.356.897.364,00 atau 83,81%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14.576.924.266,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.208.887.539,00 atau 83,75%.

- 2) Program Penguatan Hubungan Kelembagaan
Untuk Program Penguatan Hubungan Kelembagaan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.492.293.700,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.564.877.400,00 atau 62,79%.
- 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Untuk Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.794.326.410,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.274.443.760,00 atau 47,44%.
- 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
Untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.625.659.325,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.591.241.250,00 atau 46,06%.
- 5) Program Pendidikan Politik Masyarakat
Untuk Program Pendidikan Politik Masyarakat, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.578.083.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.113.687.350,00 atau 43,20%.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp15.308.510.588.909,00 dan serta telah direalisasikan sebesar Rp12.176.590.679.477,00 atau 79,54%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah

Untuk Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp67.431.575.163,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp61.424.526.936,00 atau 91,09%.

2) Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

Untuk Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.063.937.813,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.353.866.893,00 atau 76,82%.

3) Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten

Untuk Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.435.752.817,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.565.657.438,00 atau 74,68%.

4) Program Pendidikan dan Pelatihan

Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp24.439.787.625,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp17.169.469.406,00 atau 70,25%.

5) Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan

Untuk Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp140.630.156.210,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp98.423.100.897,00 atau 69,99%.

21. Urusan Ketahanan Pangan

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp44.897.546.172,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp32.829.720.952,00 atau 73,12%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil tanaman pangan dan hortikultura

Untuk Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil tanaman pangan dan hortikultura, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.175.739.261,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.553.736.262,00 atau 74,23%.

2) Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

Untuk Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.294.255.464,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp929.834.113,00 atau 71,84%.

- 3) Program Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/pemasaran

Untuk Program Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/pemasaran, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.236.574.027,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.005.153.559,00 atau 62,34%.

- 4) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Untuk Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.480.297.939,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.596.871.093,00 atau 65,63%.

- 5) Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura

Untuk Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.634.374.685,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.946.380.846,00 atau 57,29%.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp264.336.900.116,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp239.092.977.906,00 atau 90,45%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp572.439.354,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp461.400.680,00 atau 80,60%.

2) Program Keluarga Berencana

Untuk Program Keluarga Berencana, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.226.228.326,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.733.728.820,00 atau 75,63%.

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Untuk Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.265.829.153,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.983.569.312,00 atau 58,29%.

4) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan

Untuk Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.721.593.283,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.158.899.606,00 atau 55,21%.

5) Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak

Untuk Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp893.673.850,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp484.400.940,00 atau 54,20%.

23.Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp449.076.666,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp136.351.388,00 atau 30,36%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Statistik daerah. Untuk Program Statistik daerah, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp449.076.666,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp136.351.388,00 atau 30,36%.

24.Urusan Kearsipan

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp49.534.963.578,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp5.772.370.417,00 atau 11,65%.

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.200.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp1.241.931.000,00 atau 56,45%.

2) Program Peningkatan Pelayanan Arsip

Untuk Program Peningkatan Arsip, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp799.074.980,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp404.652.917,00 atau 50,64%.

3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Untuk Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.174.545.060,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.125.786.500,00 atau 42,47%.

4) Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah

Untuk Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp36.821.343.538,00 dan tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp308.868.013.136,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp215.356.028.450,00 atau 69,72%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp92.019.996.038,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp66.299.184.166,00 atau 72,05%.
- 2) Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi
Untuk Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.952.100.805,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.522.698.070,00 atau 65,06%.
- 3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Untuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp35.054.843.480,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.435.442.719,00 atau 52,59%.
- 4) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur
Untuk Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.123.200.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp577.800.000,00 atau 51,44%.
- 5) Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik
Untuk Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp88.055.968.126,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp44.986.327.096,00 atau 51,09%.

26. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2015 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp177.880.478.636,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp111.340.191.527,00 atau 62,59%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp33.609.712.386,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp21.123.090.996,00 atau 62,85%.

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp329.992.199,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp190.400.300,00 atau 57,70%.

3) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.219.685.776,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.563.921.694,00 atau 57,30%.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp49.607.476.251,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.771.722.982,00 atau 9,62%.

5) Program Pengembangan Budaya Baca

Untuk Program Pengembangan Budaya Baca, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.013.601.374,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.285.403.444,00 atau 52,32%.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pilihan sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pertanian

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pertanian pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp61.551.964.696,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp38.911.412.531,00 atau 63,22%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan

Untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.963.283.828,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp14.125.894.271,00 atau 61,52%.

2) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Untuk Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.287.739.057,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.475.542.293,00 atau 61,41%.

3) Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura

Untuk Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.230.224.929,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.475.413.199,00 atau 61,12%.

4) Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis

Untuk Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.077.003.062,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.320.229.096,00 atau 61,05%.

2. Urusan Kehutanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kehutanan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21.215.526.150,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.778.261.672,00 atau 64,94%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp874.984.257,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp766.706.045,00 atau 87,63%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14.985.842.584,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.838.552.949,00 atau 72,33%.

3) Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

Untuk Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.039.510.070,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.924.204.163,00 atau 63,31%.

3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.363.959.684.828,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.072.917.015.791,00 atau 78,66%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Untuk Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp565.285.908.096,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp541.539.531.443,00 atau 95,80%.
- 2) Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota
Untuk Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp415.462.211.413,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp283.240.469.969,00 atau 68,17%.
- 3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp264.880.522.487,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp160.479.312.551,00 atau 60,59%.
- 4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi SKPD
Untuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi SKPD, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp397.823.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp179.601.400,00 atau 45,15%.
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp25.902.995.304,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.708.211.272,00 atau 33,62%.

4. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pariwisata pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp216.374.183.364,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp161.345.940.484,00 atau 74,57%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp31.167.349.979,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp25.905.617.085,00 atau 83,12%.

2) Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata

Untuk Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.599.200.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.931.166.100,00 atau 74,30%.

3) Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp126.231.806.916,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp93.319.011.195,00 atau 73,93%.

4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.936.061.965,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.035.593.162,00 atau 61,19%.

5) Program Peningkatan Industri Kepariwisata

Untuk Program Peningkatan Industri Kepariwisata, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp281.981.250,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp59.838.000,00 atau 21,22%.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp429.485.642.265,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp337.215.171.488,00 atau 78,52%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan

Untuk Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.062.421.567,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.924.649.288,00 atau 71,99%.

2) Program Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Untuk Program Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, pada tahun 2015

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp23.516.591.736,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.425.527.025,00 atau 52,84%.

- 3) Program Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
Untuk Program Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya kelautan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp92.627.222.782,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp38.623.589.497,00 atau 41,70%.

6. Urusan Perdagangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perdagangan pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp29.029.169.199,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.537.312.815,00 atau 36,30%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri
Untuk Program Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp772.840.565,00 atau 42,94%.
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Kemetrolagian
Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kemetrolagian, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp20.800.730.143,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp8.210.945.350,00 atau 39,47%.

3) Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.860.804.056,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.207.915.400,00 atau 31,29%.

4) Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan

Untuk Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.567.635.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp345.611.500,00 atau 13,46%.

7. Urusan Industri

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Industri pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18.847.002.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.820.585.818,00 atau 73,33%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kualitas Produk Industri

Untuk Program Peningkatan Kualitas Produk Industri, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.152.874.966,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.129.357.973,00 atau 80,07%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.154.472.193,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.469.751.750,00 atau 68,22%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.265.630.726,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.090.445.773,00 atau 65,28%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp124.599.140,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp71.846.322,00 atau 57,66%.

5) Program Pengembangan dan Pengendalian Industri

Untuk Program Pengembangan dan Pengendalian Industri, pada tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp149.425.275,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp59.184.000,00 atau 39,61%.

5.1.2.1.3 Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja

Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rincian Belanja Daerah menurut kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015, disajikan pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014

(dalam rupiah)

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.980.203.805.168	20.707.205.012.883	90,11	12.631.884.602.347
I	BELANJA PEGAWAI	17.647.037.736.021	15.866.062.897.164	89.91	10.472.324.236.817
	1. Gaji dan Tunjangan	14.304.228.783.021	13.688.201.281.121	95.69	8.295.383.243.409
	2. Tambahan Penghasilan PNS	7.833.000.000	3.137.056.600	40.05	53.664.795.853
	3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	62.701.582.000	62.701.582.000	100.00	45.244.420.000
	4. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	550.000.000.000	477.938.093.998	86.90	447.563.731.011
	5. Biaya Kematian Pegawai	41.429.500.000	35.262.981.460	85.12	36.396.638.794
	6. Biaya Guru NIP 15	38.436.000.000	38.174.300.000	99.32	38.018.850.000
	7. Belanja Penghasilan Lainnya	2.294.429.971.000	1.295.723.824.322	56.47	1.462.455.032.750
	8. Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)	347.978.900.000	264.923.777.663	76.13	93.597.525.000
II	BELANJA BUNGA	46.070.052.873	5.478.639.527	11.89	1.218.528.851
	Bunga Utang Pinjaman	46.070.052.873	5.478.639.527	11.89	1.218.528.851
III	BELANJA SUBSIDI	940.000.000.000	659.081.781.344	70.12	0
	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	940.000.000.000	659.081.781.344	70.12	0
IV	BELANJA HIBAH	1.785.249.464.211	1.717.428.915.536	96.20	1,462,044,387,771
	1. Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	686.953.264.211	670.888.815.536	97.66	640,843,088,382
	2. Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	73.450.000.000	69.225.000.000	94.25	109,411,097,000
	3. Belanja Hibah Dana BOS	1.024.846.200.000	977.315.100.000	95.36	711,790,202,389
	4. Belanja Hibah Operasional Pendidikan (BOP)	-	-	-	-
V	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.088.011.505.000	2.087.123.200.000	99.96	680.155.340.000
	1. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	8.390.055.000	7.501.750.000	89.41	11.489.000.000
	2. Belanja Bantuan Sosial Tidak Terprogram	-	-	-	-
	3. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/ Keluarga /Masyarakat (Penataan Kampung Deret)	-	-	-	-
	4. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)	2.079.621.450.000	2.079.621.450.000	100.00	668,666,340,000
VI	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	401.179.003.960	371.152.504.510	92.52	14.005.706.784,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	399.361.000.000	369.674.163.000	92.57	12.800.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.818.003.960	1.478.341.510	81.32	1.205.706.784,00
VII	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.656.043.103	877.074.802	1.21	2.136.402.124
	Belanja Tidak Terduga	72.656.043.103	877.074.802	1.21	2.136.402.124

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2015		%	Realisasi 2014
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
	BELANJA LANGSUNG	36.705.348.804.065	22.324.117.934.674	60,82	25.167.779.696.112
I	BELANJA PEGAWAI	1.858.235.452.811	1.446.281.119.575	77,83	2.132.264.554.976
	1. Honorarium PNS	-	-	-	503.899.344.403
	2. Honorarium Non PNS	1.801.881.142.811	1.434.285.246.117	79,60	1.608.241.359.105
	3. Uang Lembur	-	-	-	92.507.000
	4. Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota	56.354.310.000	11.995.873.458	21,29	20.031.344.468
II	BELANJA BARANG DAN JASA	16.421.400.772.993	10.633.820.105.891	64,76	12.624.396.750.887
III	BELANJA MODAL	18.425.712.578.261	10.244.016.709.208	55,60	10.411.118.390.249
	Jumlah	59.685.552.609.233	43.031.322.947.557	72,10	37.799.664.298.459

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp9.209.781.909.639,00. Nilai tersebut diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun lalu berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 yang telah diaudit oleh BPK-RI sebesar Rp9.160.897.609.233,00 dan penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat sebesar Rp48.884.300.406.
2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 tercatat sebesar Rp5.454.177.678.915,00 terdiri dari:

a.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	78.999.209.715,00
b.	Pembayaran Pokok Utang	Rp	4.084.644.411,00
c.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	5.371.093.824.789,00
	Jumlah	Rp	5.454.177.678.915,00

Pembentukan dana cadangan sebesar Rp78.999.209.715,00 bukan merupakan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari pencairan APBD Tahun Anggaran 2015, melainkan pendapatan bunga deposito rekening dana cadangan daerah yang menambah nilai Dana

Cadangan. Pendapatan bunga ini diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.371.093.824.789,00 merupakan penyertaan modal kepada:

- 1) PD Dharma Jaya sebesar Rp46.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2701 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PD Dharma Jaya Tahun Anggaran 2015. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka pembibitan dan penggemukan sapi di Nusa Tenggara Timur, pembangunan Tempat Penampungan dan Pemetongan Ayam (TPNA dan TPA) dan alat produksi lainnya, revitalisasi alat produksi dan pengembangan usaha, serta perbaikan manajemen, sistem, dan infrastruktur.
- 2) PD Pal Jaya sebesar Rp70.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2782 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PD Pal Jaya Tahun Anggaran 2015. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka percepatan layanan pengelolaan air limbah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 3) PT Jakarta Propertindo sebesar Rp1.500.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2698 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2015. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka investasi pada proyek properti, infrastruktur, utilitas serta pengembangan bisnis PT Jakarta Propertindo.
- 4) PT Bank DKI sebesar Rp1.000.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2783 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank DKI Tahun Anggaran 2015. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka memperkuat modal PT Bank DKI untuk menjaga rasio kecukupan modal (CAR), ekspansi kredit, pengembangan jaringan layanan,

penyempurnaan teknologi informatika (*core banking system*) dan pertumbuhan *un-organic*.

- 5) PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp2.015.093.824.789,00,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 912 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 908 Tahun 2014 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta yang Bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014, dan Keputusan Gubernur Nomor 2700 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun Anggaran 2015. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka penambahan modal kerja.
- 6) PT Transportasi Jakarta sebesar Rp700.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2699 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Transportasi Jakarta Tahun Anggaran 2015. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem pendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT), pengadaan bus tingkat kawasan Electronic Road Pricing (ERP) dan cadangan likuiditas.
- 7) PT Penjamin kredit Daerah sebesar Rp40.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2744 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Penjamin kredit Daerah Tahun Anggaran 2015. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka membantu akses permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang belum memenuhi persyaratan bank secara teknis, disamping pula untuk meningkatkan layanan perbankan serta mengantisipasi risiko kredit.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran (SAL) Lebih per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp4.933.519.451.750,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

SAL per 31 Desember 2014	9.160.897.609.233,00	
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan		(9.160.897.609.233,00)
Subtotal		0,00
Pendapatan	44.209.238.168.583,00	
Belanja	(43.031.322.947.557,00)	
Surplus	1.177.915.221.026,00	
Penerimaan Pembiayaan	9.209.781.909.639,00	
Pengeluaran Pembiayaan	(5.454.177.678.915,00)	
Pembiayaan Netto	3.755.604.230.724,00	
SiLPA Tahun 2015		4.933.519.451.750,00
Subtotal		4.933.519.451.750,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00
Lain-lain		0,00
SAL per 31 Desember 2015		4.933.519.451.750,00

5.3 Laporan Operasional

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan darisiklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Untuk Laporan Operasional Tahun Anggaran 2015 tidak dibandingkan dengan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2014 karena basis akrual baru diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2015.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2015, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp17.973.356.412.731,00. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari

jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp55.639.786.807.556,00 dikurang dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp37.666.430.394.825,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO kelompok kegiatan operasional sebagai berikut:

5.3.1.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Untuk Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2015 tidak dibandingkan dengan Pendapatan Daerah-LO Tahun Anggaran 2014 karena basis akrual baru diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2015.

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp55.639.786.807.556,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar Rp39.646.968.750.711,00 Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp14.082.313.175.778,00, sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.910.504.881.067,00

Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2015 dapat digambarkan pada Tabel 5.19 berikut ini.

Tabel 5.19
Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan LO
		TA 2015
1	Pendapatan Asli Daerah	39.646.968.750.711,00
2	Pendapatan Transfer	14.082.313.175.778,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.910.504.881.067,00
Jumlah		55.639.786.807.556,00

5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp39.646.968.750.711,00. Secara garis besar gambaran Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.20 dibawah ini.

Tabel 5.20
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2015
1	2	3
1	Pajak Daerah-LO	30.021.691.108.000
2	Retribusi Daerah-LO	414.943.915.696
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	15.363.325.157
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	9.194.970.401.858
Jumlah		39.646.968.750.711

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO disampaikan berikut ini.

1. Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp30.021.691.108,00. Jumlah tersebut merupakan pendapatan berdasarkan Setoran Masa (untuk Pajak *Self Assesment*) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang terbit tahun 2015 dikurangi dengan keputusan pengurangan atau keberatan. Lebih rinci mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 digambarkan pada Tabel 5.21.

Tabel 5.21

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah -LO Tahun Anggaran 2015

No.	Uraian	Pendapatan Pajak Daerah-LO Semester II Tahun Anggaran 2015
1	2	3
1	Pajak Kendaraan Bermotor	6.119.703.400.553
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.685.403.800.610
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.233.223.096.785,00
4	Pajak Air Tanah	112.414.587.931
5	Pajak Hotel	1.416.196.265.048
6	Pajak Restoran	2.145.282.232.463
7	Pajak Hiburan	644.536.884.741
8	Pajak Reklame	747.983.489.791
9	Pajak Penerangan Jalan	729.884.587.778
10	Pajak Parkir	465.894.287.473
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.629.512.760.796
12	Pajak Rokok	475.058.548.175
13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.616.597.165.856
Jumlah		30.021.691.108.000

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterbitkan periode tahun 2015 sebesar Rp6.119.703.400.553,00 yang ditunjukkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PKB - LO
1	2	3
1	NOTICE BAYAR	5.638.242.339.414,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2015	481.461.061.139,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	-
	JUMLAH	6.119.703.400.553,00

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-LO

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diterbitkan periode tahun 2015 sebesar Rp4.685.403.800.610,00. yang ditunjukkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN BBN-KB - LO
1	2	3
1	NOTICE BAYAR	4.685.403.450.610,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2015	350.000,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	-
	JUMLAH	4.685.403.800.610,00

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)-LO

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat setoran masa pajak tahun 2015 dan Surat Ketetapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diterbitkan periode tahun 2015 seluruhnya sebesar Rp1.233.223.096.785,00 yang ditunjukkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PBB-KB - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK BAHAN BAKAR KB	1.232.745.030.713,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2015	478.066.072,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	-
	JUMLAH	1.233.223.096.785,00

d) Pajak Air Tanah-LO

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Air Tanah yang diterbitkan periode tahun 2015 sebesar Rp112.414.587.931,00 yang ditunjukkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH - LO
1	2	3
1	SKPD TERBIT TAHUN 2015	112.416.181.210,00
2	PENGURANGAN/KEBERATAN	1.593.279,00
	JUMLAH	112.414.587.931,00

e) Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat setoran masa pajak tahun 2015 dan Surat Ketetapan Pajak Hotel yang diterbitkan periode tahun 2015 seluruhnya sebesar Rp1.416.196.265.048,00 yang ditunjukkan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK HOTEL - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK PAJAK HOTEL	1.400.901.585.736,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2015	16.332.238.528,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	(1.037.559.216,00)
	JUMLAH	1.416.196.265.048,00

f) Pajak Restoran-LO

Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat setoran masa pajak tahun 2015 dan Surat Ketetapan Pajak Restoran yang diterbitkan periode tahun 2015 seluruhnya sebesar Rp2.145.282.232.463,00 yang ditunjukkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK RESTORAN - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK RESTORAN	2.070.936.600.654,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2015	76.337.034.149,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	(1.991.402.340,00)
	JUMLAH	2.145.282.232.463,00

g) Pajak Hiburan-LO

Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat setoran masa pajak tahun 2015 dan Surat Ketetapan (SKPDKB) Pajak Hiburan yang diterbitkan periode tahun 2015 seluruhnya sebesar Rp644.536.884.741,00 yang ditunjukkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK HIBURAN - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK HIBURAN	582.196.454.178,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2015	64.661.104.133,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	(2.320.673.570,00)
	JUMLAH	644.536.884.741,00

h) Pajak Reklame-LO

Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Reklame yang diterbitkan periode tahun 2015 sebesar Rp747.983.489.791,00 yang ditunjukkan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK REKLAME - LO
1	2	3
1	SKPD TERBIT TAHUN 2015	753.730.625.555,00
2	PENGURANGAN/KEBERATAN	5.747.135.764,00
	JUMLAH	747.983.489.791,00

i) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat setoran masa pajak tahun 2015 dan Surat Ketetapan (SKPDKB)

Penerangan Jalan yang diterbitkan periode tahun 2015 sebesar Rp729.884.587.778,00 yang ditunjukkan sebagaiberikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PPJ - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK PENERANGAN JALAN	729.884.587.778,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2015	-
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	-
	JUMLAH	729.884.587.778,00

j) Pajak Parkir-LO

Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Parkir yang diterbitkan periode tahun 2015 sebesar Rp467.743.606.576,00 yang ditunjukkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK PARKIR - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK PARKIR	459.887.769.939,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2015	8.021.197.885,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN/KOMPENSASI	(165.361.248,00)
	JUMLAH	467.743.606.576,00

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat setoran masa pajak tahun 2015 dan Surat Ketetapan (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diterbitkan periode tahun 2015 sebesar Rp3.629.512.760.796,00 yang ditunjukkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN BPHTB - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA BPHTB	3.628.834.159.852,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2015	678.600.944,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	-
	JUMLAH	3.629.512.760.796,00

l) Pajak Rokok-LO

Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat setoran masa pajak tahun 2015 dan Surat Ketetapan (SKPDKB) Surat Ketetapan Pajak Rokok yang diterbitkan periode tahun 2015 sebesar Rp475.058.548.175,00 yang ditunjukkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK ROKOK - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK ROKOK	475.058.548.175,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2015	-
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	-
	JUMLAH	475.058.548.175,00

m) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diterbitkan periode tahun 2015 sebesar Rp7.616.597.165.856,00 yang ditunjukkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PBB-P2 - LO
1	2	3
1	SPPT TERBIT TAHUN 2015	7.779.282.706.804,00
2	PENGURANGAN/KEBERATAN	162.685.540.948,00
	JUMLAH	7.616.597.165.856,00

2. Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp414.943.915.696,00.

Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tergambar pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Penerimaan Retribusi-LO
1	2	3
1	Retribusi Jasa Umum-LO	52.843.225.346,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	83.304.088.486,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	278.796.601.864,00
Jumlah		414.943.915.696,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan tahun 2015 sebesar Rp52.843.225.346,00

Jika pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO tersebut direkonsiliasi dengan pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA menunjukkan sebagai berikut :

No	Uraian	Total Penerimaan Retribusi-LO
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA 2015	90.398.166.389,00
2	SKRD terbit 2015 yang belum dibayar	5.185.625.250,00
	SKRD terbit 2015	95.583.791.639,00
3	Total Pembayaran Piutang SKRD tahun sebelumnya	32.908.796.550,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2014	9.831.769.743,00
Jumlah		52.843.225.346,00

b. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan Tahun 2015 sebesar Rp83.304.088.486,00.

Jika pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO tersebut direkonsiliasi dengan pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA menunjukkan sebagai berikut :

No	Uraian	Total Penerimaan Retribusi-LO
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA 2015	93.304.141.810,00
2	SKRD terbit 2015 yang belum dibayar	29.834.501.691,00
	SKRD terbit 2015	123.138.643.501,00
3	Total Pembayaran Piutang SKRD tahun sebelumnya	39.811.246.515,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2014	23.308.500,00
Jumlah		83.304.088.486,00

c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan periode Januari s.d. Desember 2015 sebesar Rp278.796.601.864,00.

Setelah dilakukan rekonsiliasi Retribusi Tertentu-LRA menunjukkan sebagai berikut :

No	Uraian	Total Penerimaan Retribusi-LO
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA 2015	275.757.189.864,00
2	SKRD terbit 2015 yang belum dibayar	0,00
	SKRD terbit 2015	275.757.189.864,00
3	Pendapatan Belum Disetor 2015	3.039.412.000,00
	Jumlah	278.796.601.864,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO (Dividen)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO (Dividen) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp15.363.325.157,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya.

Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca.

Sedangkan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca.

Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO (Dividen) Tahun Anggaran 2015 digambarkan pada Tabel 5.23.

Tabel 5.23
Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan-LO (Dividen)
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	PT Kawasan Berikat Nusantara	10.626.074.894
2	PT Asuransi Bangun Askrida	3.852.236.557
3	BP THR Lokasari	885.013.706
Jumlah		15.363.325.157

1. PT Kawasan Berikat Nusantara

Penerimaan dividen dari PT Kawasan Berikat Nusantara tahun 2015 sebesar Rp10.626.074.894,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 29 Juni 2015, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Kawasan Berikat Nusantara atas tahun buku 2014 adalah sebesar Rp10.626.074.894,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 27 Juli 2015, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

2. PT Asuransi Bangun Askrida

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2015 sebesar Rp3.852.236.557,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 12 Mei 2015, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Asuransi Bangun Askrida atas tahun buku 2014 adalah sebesar Rp3.852.236.557,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah

pada tanggal 3 Juni 2015, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

3. BP THR Lokasari

Penerimaan dividen dari BP THR Lokasari tahun 2015 sebesar Rp885.013.706,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 4 September 2015, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari BP THR Lokasari atas tahun buku 2014 adalah sebesar Rp885.013.706,00. Adapun dividen tersebut telah diterima sebagian di Kas Daerah pada tanggal 21 Oktober 2015, yaitu sebesar Rp400.000.000,00.

Selama tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima setoran dividen dari BP THR Lokasari sebesar Rp905.030.000,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3. Setoran tersebut merupakan pembayaran Piutang Dividen tahun 2014 sebesar Rp505.030.000,00 dan sebagian dividen tahun 2015 sebesar Rp400.000.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Uraian	Hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Rp)	Realisasi Setoran Tahun 2015 (Rp)	Kurang Setor (Rp)
1.	Piutang Dividen Tahun 2014	505.030.866	505.030.000	866
2.	Bagian Laba Tahun 2015 (sesuai hasil RUPS)	885.013.706	400.000.000	485.013.706
	Jumlah	1.390.044.572	905.030.000	485.014.572

Dari penjelasan di atas, diketahui terdapat kurang setor dividen yang berasal dari kekurangan setor pembayaran piutang dividen tahun 2014 sebesar

Rp866,00 dan bagian laba tahun 2015 sebesar Rp485.013.706,00, sehingga pada Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015 tercatat Piutang Dividen milik BP THR Lokasari sebesar Rp485.014.572,00.

4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO

Kelompok pendapatan Lain-lain PAD – LO merupakan komponen pendapatan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD – LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp9.194.970.401.858,00. Rincian pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2015, digambarkan pada Tabel 5.24.

Tabel 5.24

Rekapitulasi Pendapatan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO
Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO
1	2	3
1	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	237.668.902.984
2	Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah	34.005.400.486
3	Hasil Lelang Titik Reklame	3.158.662.500
4	Klaim Asuransi Aset	781.745.729
5	Jasa Giro	157.815.291.081
6	Pendapatan Bunga	1.000.799.490.719
7	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	116.355.201.326
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	6.892.175.576
9	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	2.807.826.112.307

No	Uraian	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO
10	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	778.976.597
11	Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah	1.750.488.742.877
12	Nilai Strategis Reklame	21.126.917.628
13	Hasil Kerja Sama Aset Daerah	6.091.172.816
14	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	9.265.017.041
15	Pendapatan Lain-lain	2.139.704.394.641
16	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.256.322.383
17	Pendapatan Sanksi Pajak	250.902.948.171
18	Pendapatan Denda Retribusi	60.711.496.432
19	Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	1.015.267.136
20	Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB	579.326.163.428
Jumlah		9.194.970.401.858

Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Lain-lain PAD-LO Tahun Anggaran 2015, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO merupakan pendapatan atas Rekomendasi HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kompensasi rumah susun.

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp 237.668.902.984,00 yang terdiri dari:

- a. Rekomendasi HGB/HPL sebesar Rp25.389.660.635,00; dan
- b. Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah sebesar Rp212.279.242.349,00. Pendapatan Pendapatan Kompensasi Rusun adalah Pendapatan atas sanksi SP3L untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk uang sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002 tentang ketentuan perhitungan nilai kewajiban penyediaan bangunan rumah susun sederhana/murah yang dikonversi dengan dana oleh para pengembang pemegang SIPPT. Pada tahun 2015 Pemprov DKI Jakarta menetapkan sanksi SP3L senilai Rp212.279.242.349,00 berdasarkan SIPPT.

2. Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah – LO

Pendapatan Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah-LO merupakan pendapatan atas hasil sewa asset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah dan/atau bangunan dan rumah panggung.

Pendapatan Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp34.005.400.486,00 yang terdiri dari:

- a. Sewa tanah dan/ atau bangunan sebesar Rp33.765.102.408,00. Pendapatan Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah-LO dicatat berdasarkan nilai hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah dapat diakui, yaitu dengan memperhitungkan jangka waktu pemanfaatan aset selama tahun berjalan oleh pihak ketiga sesuai masa manfaat yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Jika Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah -LO sebesar Rp33.765.102.408,00 tersebut direkonsiliasi

dengan Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah -
LRA menunjukkan sebagai berikut :

NO	Uraian	Nilai Pendapatan Sewa Aset Daerah (Rp)
1	Pendapatan Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah- (LRA)	47.278.398.675
2	Piutang Per 31 Desember 2014	14.604.440.458
3	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2014	6.970.338.958
4	Piutang Per 31 Desember 2015	14.536.718.693
5	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2015	22.875.263.546
	Pendapatan LO	
6	Dampak Koreksi Piutang Per 31 Des 2014	2.459.350.086
	Pendapatan Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah- (LO)	33.765.102.408

- b.** Sewa rumah panggung sebesar Rp240.298.078,00 merupakan rumah panggung yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

3. Hasil Lelang Titik Reklame – LO

Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp3.158.662.500,00. Yang diakui berdasarkan nilai Surat Perintah Setor atas hasil lelang titik reklame .

Jika Pendapatan Lelang Titik Reklame – LO tersebut direkonsiliasi dengan Pendapatan Lelang Titik Reklame-LRA adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Nilai Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame (Rp)
1	Pendapatan Lelang Titik Reklame - (LRA)	16.328.700.000
2	Piutang Per 31 Desember 2014	2.113.812.500
3	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2014	19.199.878.295
4	Piutang Per 31 Desember 2015	2.871.178.295
5	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2015	15.283.850.000
6	Dampak Koreksi Piutang Per 31 Desember 2014	16.328.700.000
	Pendapatan Lelang Titik Reklame - (LO)	3.158.662.500

4. Klaim Asuransi Aset – LO

Pendapatan dari Klaim Asuransi Aset-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp781.745.729,00. Yang diakui berdasarkan nilai klaim asuransi aset yang menjadi hak pemerintah daerah.

5. Jasa Giro – LO

Pendapatan Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp157.815.291.081,00 yang diakui berdasarkan nilai pendapatan jasa giro atas penempatannya dalam bentuk giro pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2015.

Jika Pendapatan Jasa Giro-LO tersebut direkonsiliasi dengan Pendapatan Jasa Giro -LRA adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Nilai Pendapatan Jasa Giro (Rp)
1	Pendapatan Jasa Giro - (LRA)	157.796.050.966
2	Piutang Per 31 Desember 2014	480.390
3	Pendapatan Belum Diterima Per 31 Desember 2014	679.988
4	Pendapatan Belum Disetor Per 31 Desember 2015	20.400.493
	Pendapatan Jasa Giro - (LO)	157.815.291.081

6. Pendapatan Bunga – LO

Pendapatan Bunga-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.000.799.490.719,00, yang diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana dalam rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2015 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito.

Jika Pendapatan Bunga-LO tersebut direkonsiliasi dengan Pendapatan Bunga-LRA adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Nilai Pendapatan Bunga (Rp)
1	Pendapatan Bunga - (LRA)	1.020.372.682.026
2	Piutang Per 31 Desember 2014	35.097.777.100
3	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2014	-
4	Piutang Per 31 Desember 2015	15.524.585.793
5	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2015	-
	Pendapatan Jasa Giro - (LO)	1.000.799.490.719

7. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) – LO

Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp116.355.201.326,00, diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2015.

Jika Pendapatan Ganti Rugi (TGR)-LO tersebut direkonsiliasi dengan Ganti Rugi (TGR) -LRA adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Nilai Pendapan Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)-LO (Rp)
1	Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi(TGR) - (LRA)	116.361.201.326
2	Piutang Per 31 Desember 2014	16.145.560.786
3	Dampak Koreksi Piutang Per 31 Desember 2014	(964.201.310)
4	Piutang Per 31 Desember 2015	17.103.762.096
	Pendapatan Jasa Giro - (LO)	116.355.201.326

8. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp6.892.175.576,00 merupakan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pembongkaran reklame.

9. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp2.807.826.112.307,00. Pendapatan tersebut berasal dari Berita Acara Serah Terima (BAST) atas penerimaan dalam bentuk aset.

10. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan sebesar Rp778.976.597,00 terdiri dari cicilan uang muka rumah susun sebesar Rp64.722.755,00 dan sewa beli rumah susun sebesar Rp714.253.842,00.

11. Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) – LO

Pendapatan-LO dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.750.488.742.877,00.

Rincian Pendapatan-LO dari BLUD per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan-LO 2015 (Rp)
A	BLUD Pelayanan Kesehatan	1.628.270.975.136
1	RSUD Tarakan	256.691.865.800
2	RSUD Cengkareng	238.046.138.488
3	RSUD Pasar Rebo	213.329.434.375
4	RSUD Koja	209.297.115.136
5	RSUD Budhi Asih	158.339.047.208
6	RSUD Duren Sawit	42.427.066.981
7	BLUD di bawah Dinas Kesehatan	510.140.307.148
B	BLUD di bawah Dinas Perhubungan	37.323.733.019
C	BLUD di bawah Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	38.911.671.240

No	Uraian	Pendapatan-LO 2015 (Rp)
D	BLUD di bawah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Perdagangan	12.338.250.000
E	Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	33.644.113.482
	JUMLAH (A + B + C + D + E)	1.750.488.742.877

Pengakuan awal Pendapatan LO kepada BPJS di tiga RSUD, yaitu RSUD Budhi Asih, RSUD Cengkareng, dan RSUD Koja menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012. Sedangkan pengakuan awal Pendapatan LO kepada BPJAS di tiga RSUD/RSKD lainnya, yaitu RSUD Pasar Rebo, RSUD Tarakan, dan RSKD Duren Sawit menggunakan tarif INA CBG's. Pendapatan LO Tahun 2015 pada tiga RSUD yang menggunakan tarif sesuai dengan Pergub, pada akhir periode telah dilakukan penyesuaian dengan tarif INA CBG's.

12. Nilai Strategis Reklame – LO

Nilai Strategis Reklame – LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp21.126.917.628,00 terdiri dari:

- Nilai Strategis Reklame di Persil Swasta sebesar Rp7.677.867.199,00;
- Nilai Strategis Reklame di Aset Pemda sebesar Rp189.820.988,00; dan
- Nilai Strategis Reklame di Non Aset Pemda sebesar Rp13.259.229.441,00

13. Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO

Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp6.091.172.816,00 merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan

pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Jika Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO tersebut direkonsiliasi dengan Hasil Kerjasama Aset Daerah – LRA adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah - LO (Rp)
1	Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah - LRA	8.200.318.794,00
2	Piutang Per 31 Desember 2014	5.436.594.231
3	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2014	8.570.285.768
4	Piutang Per 31 Desember 2015	3.093.892.396
5	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2015	8.336.729.911
	Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah - LO	6.091.172.816,00

14. Komisi/Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar jam kerja (Premi) – LO

Pendapatan Komisi/Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar jam kerja (Premi)-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp9.265.017.04100, diakui berdasarkan penetapan pendapatan atas Komisi/Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar Jam Kerja (Premi) pada tahun 2015.

Jika Pendapatan Komisi/Sumbangan Jaminan Keselamatan di Luar Jam Kerja (Premi)-LO tersebut direkonsiliasi dengan Pendapatan Komisi/Sumbangan Jaminan Keselamatan di Luar Jam Kerja (Premi)-LRA adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Nilai Pendapatan Komisi/Sumbangan Jaminan Keselamatan di Luar Jam Kerja (Premi)-LO (Rp)
1	Pendapatan Komisi/Sumbangan Jaminan Keselamatan di Luar Jam Kerja (Premi)-(LRA)	9.044.126.408
2	Piutang Per 31 Desember 2014	792.525.157
3	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2014	-
4	Piutang Per 31 Desember 2015	1.013.415.790
5	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2015	-
	Pendapatan Komisi/Sumbangan Jaminan Keselamatan di Luar Jam Kerja (Premi)-(LO)	9.265.017.041

15. Pendapatan Lain-lain-LO

Pendapatan Lain-lain-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp99.673.795.498,00, terdiri dari:

- Pendapatan Lain-lain sebesar Rp99.673.795.498,00, merupakan Pendapatan Lain-lain LRA yang tercatat sebesar Rp101.769.275.861,00 dikurang dengan setoran Piutang Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga tahun 2014 sebesar Rp2.095.480.363,00. Piutang tersebut merupakan piutang kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum untuk Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang yang telah dibayar pada tahun 2015;
- Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp2.039.498.379.884,00, merupakan pendapatan atas laba BUMD dan PT Patungan tahun 2015 yang menggunakan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Laba Tahun 2015	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2015	Jumlah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Penyesuaian Ekuitas	Jumlah
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 x 6	8	9 = 7 + 8
1	PD AM Jaya	0	0	0	100,00%	0	22.810.000.000	22.810.000.000
2	PD PAL Jaya	29.964.764.375	(8.259.836.007)	21.704.928.368	100,00%	21.704.928.368	0	21.704.928.368
3	PT Food Station Tjipinang	9.197.675.332	(2.178.149.412)	7.019.525.920	74,67%	5.241.246.020	0	5.241.246.020
4	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	54.200.788.563	730.785.707	54.931.574.270	50,00%	27.465.787.135	0	27.465.787.135

5	PT Jakarta Tourisindo	1.349.836.598	(150.689.531)	1.199.147.067	99,35%	1.191.360.583	75.895	1.191.436.478
6	PT Transportasi Jakarta	79.414.134.016	0	79.414.134.016	99,47%	78.996.384.758	0	78.996.384.758
7	PT Penjamin Kredit Daerah	807.617.176	0	807.617.176	95,00%	767.236.317	375.000.000	1.142.236.317
	JUMLAH	174.934.816.060	(9.857.889.243)	165.076.926.817		135.366.943.181	23.185.075.895	158.552.019.076

16. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp10.256.322.383,00. Nilai Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO adalah sama dengan nilai Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut.

17. Pendapatan Sanksi Pajak – LO

Pendapatan Sanksi Pajak-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp250.902.948.171,00. Jumlah tersebut merupakan pendapatan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan (SKPD, SKPDKB, STP).

18. Pendapatan Denda Retribusi – LO

Pendapatan Denda Retribusi-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp60.711.496.432,00. Jumlah tersebut merupakan pendapatan sanksi retribusi sesuai dengan ketentuan SKRD.

19. Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Denda Lain-Lain PAD-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.015.267.136,00, terdiri dari:

- a. Denda Keterlambatan Hasil Sewa Aset Daerah sebesar Rp96.499.240,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Denda Keterlambatan Sewa Tanah sebesar Rp41.552.565,00; dan
 - 2) Denda Keterlambatan Sewa Gedung sebesar Rp54.946.675,00.
- b. Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah sebesar Rp703.767.956,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Denda Keterlambatan Pembangunan sebesar Rp679.867.956,00; dan
 - 2) Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi sebesar Rp23.900.000,00.

Jika Pendapatan Lain-Lain-LO sebesar Rp1.015.267.136,00 tersebut direkonsiliasi dengan Pendapatan Lain-Lain-LRA adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Nilai Pendapatan Denda Lain-Lain PAD-LO (Rp)
1	Pendapatan Denda Lain-Lain PAD-(LRA)	800.267.196
2	Piutang Per 31 Desember 2014	100.518.114.851
3	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2014	-
4	Piutang Per 31 Desember 2015	100.749.956.231
5	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2015	-
6	Dampak Koreksi Piutang per 31 Des 2014	16.841.440
	Pendapatan Denda Lain-Lain PAD- (LO)	1.015.267.136

20. Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO

Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO adalah pendapatan atas kompensasi kelebihan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dibayarkan oleh pihak ketiga dalam bentuk penyediaan fasilitas publik. Nilai Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO per 31 Desember 2015 sebesar Rp579.326.163.428 dari PT. Mitra Panca Persada

5.3.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer LO Tahun 2015 disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2015 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan PMK Nomor 249/PMK.07/2015 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015.

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp14.082.313.175.778,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO sebesar Rp11.327.202.422.389,00; dan
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO sebesar Rp2.755.110.753.389,00.

Jika Pendapatan Transfer-LO tersebut direkonsiliasikan dengan Pendapatan Transfer-LRA, digambarkan lebih lanjut sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan -LRA 2015	Piutang Dana Primbangan Per 31 Desember 2015	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2015	Nilai Pendapatan-LO 2015
1	2	3	4	5	6
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.887.267.644.697	5.459.274.194.651	19.339.416.959	11.327.202.422.389
1.1	Bagi Hasil Pajak	5.751.741.852.400	5.385.395.888.600	121.721.000	11.137.016.020.000
a	Pajak Bumi dan Bangunan	135.610.649.500	37.376.168.500	121.721.000	172.865.097.000
b	Pajak Penghasilan	5.616.131.202.900	5.348.019.720.100	0	10.964.150.923.000
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	135.525.792.297	73.878.306.051	19.217.695.959	190.186.402.389
a	Provisi Sumber Daya Hutan	94.308.708	12.528.000	1.297.833	105.556.875
b	Dana Reboisasi	22.963.374	18.000.000	0	40.963.374
c	Pungutan Hasil Perikanan	1.016.606.397	0	228.670.655	787.935.742
d	Pertambangan Minyak Bumi	130.479.280.618	0	18.987.745.471	111.491.535.147
e	Pertambangan Gas Bumi	3.912.633.200	73.847.778.051	0	77.760.411.251

1.3	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	2.755.110.753.389	0	0	2.755.110.753.389
2.1	Dana Penyesuaian	2.755.110.753.389	0	0	2.755.110.753.389
	PENDAPATAN TRANSFER	8.642.378.398.086	5.459.274.194.651	19.339.416.959	14.082.313.175.778

Dana Perimbangan yang belum diterima per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.459.274.194.651,00, hal ini tertuang dalam penjelasan pada akun Piutang Dana Perimbangan.

5.3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.910.504.881.067,00, merupakan pendapatan hibah dalam bentuk uang dan barang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah-Hibah untuk pembangunan MRT sebesar Rp1.870.093.824.789,00;
2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi-Hibah PT Jasa Raharja sebesar Rp10.589.130.000,00;
3. Donasi/Hibah Aset Tetap dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.924.892.409,00;
4. Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI sebesar Rp19.897.033.869,00.

5.3.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah Tahun Anggaran 2015 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip

akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan atas jenis beban. Adapun klasifikasi beban dalam LO terdiri dari 3 kelompok besar yaitu: Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Luar Biasa. Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

Rekapitulasi Beban Tahun Anggaran 2015 digambarkan pada Tabel 5.25

Tabel 5.25
Rekapitulasi Beban Daerah
Tahun Anggaran 2015

No.	Uraian	Total Beban
Beban Operasi		37.295.277.890.315,00
1	Beban Pegawai	17.451.577.953.165,00
2	Beban Persediaan	2.537.304.538.469,00
3	Beban Barang	2.010.889.393.803,00
4	Beban Jasa	3.786.735.915.447,00
5	Beban Pemeliharaan	1.335.308.308.102,00

No.	Uraian	Total Beban
Beban Operasi		37.295.277.890.315,00
6	Beban Perjalanan Dinas	50.471.093.060,00
7	Beban Bunga	5.294.660.335,00
8	Beban Subsidi	659.081.781.344,00
9	Beban Hibah	1.717.428.915.536,00
10	Beban Bantuan Sosial	2.087.123.200.000,00
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.651.850.075.752,00
12	Beban Penyisihan Piutang	437.667.615.684,00
13	Beban Lain-lain	564.544.439.618,00
Beban Transfer		371.152.504.510,00
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	371.152.504.510,00
Jumlah Beban		37.666.430.394.825,00

5.3.1.2.1 Beban Operasi

Beban operasi Tahun 2015 sebesar Rp37.295.277.890.315,00 terdiri dari:

c. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp17.451.577.953.165,00. Beban Pegawai diantaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai. Beban Pegawai tersebut di antaranya terdapat di Dinas Pendidikan sebesar Rp6.760.211.653.668,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.298.089.026.137,00, Satpol PP sebesar Rp704.811.931.983,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan sebesar Rp613.868.634.859,00, dan Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp532.715.839.721,00

d. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.537.304.538.469,00. Beban persediaan merupakan pemakaian atas barang persediaan habis pakai dan penyerahan barang kepada masyarakat. Beban Persediaan tersebut di antaranya terdapat di BLUD RS Tarakan sebesar Rp110.274.996.259,00, BLUD RS Koja sebesar Rp109.490.660.042,00, BLUD RS Cengkareng sebesar Rp96.440.910.423,00, BLUD RS Pasar Rebo sebesar Rp94.955.668.168,00, dan Sudin Pendidikan II - JAKTIM sebesar Rp93.577.234.647,00.

e. Beban Barang

Beban Barang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.010.889.393.803,00. Beban barang merupakan belanja atas barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Beban Barang tersebut di antaranya terdapat di BLUD RS Tarakan sebesar Rp136.447.255.335,00, BLUD RS Cengkareng sebesar Rp118.771.047.437,00, BLUD RS Pasar Rebo sebesar Rp114.373.066.174,00, BLUD RS Koja sebesar Rp111.711.507.605,00, dan BLUD RS Budhi Asih sebesar Rp95.136.620.829,00.

f. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.786.735.915.447. Beban jasa diantaranya terdiri dari beban jasa kantor, beban jasa konsultansi, dan beban sewa. Beban Jasa tersebut di antaranya terdapat di Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sebesar Rp679.374.350.930,00, Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp574.869.627.779,00, Dinas Kebersihan sebesar Rp356.150.924.883,00, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp66.617.271.265,00 dan Sudin Kebersihan Jakarta Timur sebesar Rp54.053.970.319,00.

g. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.335.308.308.102. Beban pemeliharaan terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan tersebut di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp308.369.553.720,00, Sudin Bina Marga Jakarta Selatan sebesar Rp165.419.566.155,00, Sudin Bina Marga Jakarta Timur sebesar Rp136.915.484.154,00, Sudin Pendidikan I Jakarta Timur sebesar Rp105.235.303.186,00, dan Dinas Tata Air sebesar Rp100.389.319.380,00.

h. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp50.471.093.060,00. Beban perjalanan dinas terdiri dari beban perjalanan dinas dan beban pemulangan pegawai. Beban Perjalanan Dinas tersebut di antaranya terdapat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp8.928.896.688,00, Dinas Olah Raga dan Pemuda sebesar Rp7.465.890.962,00, Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekda sebesar Rp4.743.660.360,00, Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp4.219.418.056 dan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp2.788.657.432,00.

i. Beban Bunga

Beban Bunga Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.294.660.335,00 terdapat di PPKD, beban bunga merupakan beban sesuai dengan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

j. Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp659.081.781.344,00 terdapat di PPKD. Beban subsidi

merupakan beban yang ditanggung Pemerintah Provinsi atas selisih tarif tiket Transjakarta dengan tarif sesungguhnya pada Tahun 2015.

k. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.717.428.915.536,00 terdapat di PPKD.

l. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.087.123.200.000,00 terdapat di PPKD. Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat.

m. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Beban Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dilakukan pada tahun 2015 berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.651.850.075.752,00 yang terdiri dari ;

1. Beban Penyusutan sebesar Rp4.620.402.001.322,00, di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp725.279.351.257,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp282.953.972.815,00, Dinas Tata Air sebesar Rp236.297.465.458,00, Dinas Perumahan Dan Gedung Pemda sebesar Rp188.847.663.346,00, dan PPKD sebesar Rp171.685.083.232,00.
2. Beban Amortisasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp31.448.074.430,00 di antaranya terdapat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp10.351.478.711,00, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Rp4.787.486.649,00, Dinas Perindustrian Dan Energi Rp4.770.473.690,00, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Rp3.386.628.057,00.

n. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp437.667.615.684,00. Beban Penyisihan Piutang tersebut diantaranya terdapat di Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp406.993.250.698,00, Dinas Penataan Kota sebesar Rp17.710.539.206,00, BLUD RS Koja sebesar Rp6.473.333.161,00, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Rp3.427.542.102,00, dan PPKD sebesar Rp1.776.465.379,00.

o. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp564.544.439.618,00. Beban Lain-lain tersebut di antaranya terdapat di PPKD sebesar Rp516.090.949.923,00, Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara sebesar Rp11.847.497.522,00, Sudin Penanggulangan Kebakaran

dan Penyelamatan Jakarta Timur sebesar Rp6.274.769.799,00, Pusat Penyimpanan Barang Daerah sebesar Rp4.064.973.606 dan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat sebesar Rp3.962.148.000,00.

Beban Lain-lain di PPKD sebesar Rp516.090.949.923,00 diantaranya berupa Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp442.696.593.866,00 yang merupakan beban atas pengumuman rugi BUMD dan PT Patungan tahun 2015 dengan metode pencatatan ekuitas, dan kejadian lain yang mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan *investee*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Rugi Tahun 2015	% Kepemilikan	Pengakuan Beban atas Pengumuman Rugi	Pengakuan Pendapatan atas Kejadian selain Pengumuman Rugi	Jumlah
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7 = 5 + 6
1	PD Dharma Jaya	2.369.665.859	100,00%	2.369.665.859	-	2.369.665.859
2	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	-	100,00%	-	28.663.115.610	28.663.115.610
3	PD Pasar Jaya	-	100,00%	-	50.186.895.349	50.186.895.349
4	PD PAL Jaya	-	100,00%	-	10.047.925.217	10.047.925.217
5	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	-	38,80%	-	9.126.772.664	9.126.772.664
6	PT Food Station Tjipinang	-	74,67%	-	1.626.082.761	1.626.082.761
7	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	-	50,00%	-	1.029.398.431	1.029.398.431
8	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	-	26,25%	-	172.345.036	172.345.036
9	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	-	72,00%	-	7.989.130	7.989.130
10	PT Bank DKI Jakarta	-	99,97%	-	271.801.842.024	271.801.842.024
11	PT Jakarta Tourisindo	-	99,35%	-	149.711.051	149.711.051
12	PT Mass Rapid Transit Jakarta	62.757.587.374	99,97%	62.741.444.234	260.189.220	63.001.633.454
13	PT Transportasi Jakarta	-	99,36%	-	4.513.217.280	4.513.217.280
	Jumlah	65.127.253.233		65.111.110.093	377.585.483.773	442.696.593.866

5.3.1.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik, sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Belanja Transfer.

Beban Transfer Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp371.152.504.510,00 merupakan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp369.674.163.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.478.341.510,00.

Adapun Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp369.674.163.000,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Pemerintah Kota Bogor Jl. Ir. H. Juanda Nomor 1, Kota Bogor	4.500.000.000
2.	Pemerintah Kabupaten Bogor Jl. Raya Tegar Beriman Cibinong, Kab. Bogor	66.482.715.000
3.	Pemerintah Kota Tangerang Jl. Satria Sudirman No.2, Kota Tangerang	100.000.000.000
4.	Pemerintah Kabupaten Tangerang Jl. H. Somawinata No.1 Tigaraksa-Tangerang	17.151.248.000
5.	Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabekjur Gedung Mitra Praja Jl. Sunter Permai Raya No.1 Lt.3 Jakarta Utara 14350	98.148.000.000
6.	Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Gedung Mitra Praja Jl. Sunter Permai Raya No.1 Lt.IV Jakarta Utara 14350	9.400.000.000
7.	Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Sekretariat Kampus Institut Ilmu Pemerintahan Jln. Ampera Raya, Cilandak Timur Jakarta Selatan	73.992.200.000
Jumlah		369.674.163.000

5.3.2 Kegiatan Non Operasional

Selama tahun 2015, nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp83.836.789.342,00. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Jumlah Surplus Non

Operasional yang tercatat sebesar Rp84.210.305.562,00 dikurang dengan jumlah Defisit Non Operasional yang tercatat sebesar Rp373.516.220,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Surplus/Defisit Non Operasional sebagai berikut:

5.3.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional tahun 2015 merupakan surplus yang diperoleh dari aktivitas penjualan aset non lancar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari Surplus Penjualan Aset Tanah, Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin, dan Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan.

1. Surplus Penjualan Aset Tanah

Selama tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pelepasan hak atas tanah dan badan jalan MHT yang terletak di Jalan Jamblang Kelurahan Duri Selatan senilai Rp2.117.500.000,00 (sesuai dengan SK Gubernur Nomor 258/2015), tanah dan badan jalan MHT yang terletak di Jalan Kebon Sirih Barat IX Kelurahan Kebon Sirih senilai Rp4.149.000.000,00 (sesuai dengan SK Gubernur Nomor 971/2015), pergeseran saluran di Jalan Genteng Ijo Kelurahan Karet Kuningan sebesar Rp5.006.200.000,00 (sesuai SK Gubernur Nomor 2464/2015), tanah dan badan jalan MHT di Jalan H. Cokong Kel Karet sebesar Rp40.903.567.000,00 (sesuai SK Gubernur Nomor 2852/2015), tanah dan badan jalan MHT di Jalan Casablanca sebesar Rp7.802.410.000,00 (sesuai SK Gubernur Nomor 2773/2015), dan pergeseran saluran di Jalan MT Haryono Kav 21 sebesar Rp18.885.000.000,00 (sesuai SK Gubernur Nomor 2851/2015). Atas pembebasan lahan di 6 (enam) lokasi tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp78.863.677.000,00.

2. Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin

Selama tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penjualan 67 unit kendaraan dinas operasional roda empat yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nomor 1295 Tahun

2015 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) sebanyak 67 (Enam Puluh Tujuh) Unit, dan 91 unit kendaraan dinas roda empat dan 7 unit kendaraan dinas operasional roda dua yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) sebanyak 91 (Sembilan Puluh Satu) Unit dan Roda 2 (Dua) sebanyak 7 (Tujuh) Unit.

Atas penjualan kendaraan dinas operasional tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas sebesar Rp4.836.128.784,00. Adapun total harga perolehan kendaraan dinas operasional yang telah dijual tersebut adalah sebesar Rp18.886.971.083,00, dengan total akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp18.255.578.349,00, sehingga nilai buku per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp631.392.734,00.

Jika dibandingkan dengan nilai bukunya, maka nilai penjualan kendaraan dinas operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 mengalami Surplus sebesar Rp4.204.736.050,00, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

No.	Uraian	SK Penghapusan	Harga Penjualan Aset (Rp)	Harga Perolehan Aset (Rp)	Akum. Penyusutan Aset s.d 31 Des 2014 (Rp)	Nilai Buku Aset per 31 Des 2014 (Rp)	Surplus Penjualan Aset (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
1.	Kendaraan Dinas Operasional	No. 1295 Tahun 2015	4.129.658.784	9.776.331.025	9.144.938.291	631.392.734	3.498.266.050
2.	Kendaraan Dinas Operasional	No. 2 Tahun 2016	706.470.000	9.110.640.058	9.110.640.058	0	706.470.000
	Jumlah		4.836.128.784	18.886.971.083	18.255.578.349	631.392.734	4.204.736.050

3. Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan

Selama tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penghapusan gedung dan bangunan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2023 Tahun 2015 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang

Penghapusan Bangunan/Gedung Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun penghapusan dilakukan dengan tujuan untuk dibangun kembali sesuai peruntukannya.

Atas sejumlah gedung dan bangunan yang dihapus tersebut, telah dilakukan penaksiran nilai aset oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yang kemudian ditetapkan sebagai harga penjualan gedung dan bangunan.

Atas penjualan gedung dan bangunan tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami surplus sebesar Rp1.141.892.512,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	SK Penghapusan	Harga Penjualan Aset(Rp)	Harga Perolehan Aset (Rp)	Akum. Penyusutan Aset s.d 31 Des 2014 (Rp)	Nilai Buku Aset per 31 Des 2014 (Rp)	Surplus Penjualan Aset (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
1.	Gedung dan Bangunan	No. 2023 Tahun 2015	357.760.000	7.012.256.056	7.012.256.056	0	357.760.000
2.	Gedung dan Bangunan	No. 188 Tahun 2016	1.018.772.000	15.086.219.627	14.851.730.139	234.489.488	784.282.512
3.	Potongan Bank		(150.000)				(150.000)
	Jumlah		1.376.382.000	22.098.475.683	21.863.986.195	234.489.488	1.141.892.512

5.3.2.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional merupakan defisit yang berasal dari aktivitas penjualan aset non lancar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penghapusan gedung dan bangunan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2023 Tahun 2015 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun penghapusan dilakukan dengan tujuan untuk dibangun kembali sesuai peruntukannya.

Atas sejumlah gedung dan bangunan yang dihapus tersebut, telah dilakukan penaksiran nilai aset oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

(DJKN), yang kemudian ditetapkan sebagai harga penjualan gedung dan bangunan.

Atas penjualan gedung dan bangunan tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami defisit sebesar Rp373.516.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	SK Penghapusan	Harga Penjualan Aset (Rp)	Harga Perolehan Aset (Rp)	Akum. Penyusutan Aset s.d 31 Des 2014 (Rp)	Nilai Buku Aset per 31 Des 2014 (Rp)	Defisit Penjualan Aset (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
1.	Gedung dan Bangunan	No. 2023 Tahun 2015	50.000.000	1.619.324.400	1.538.358.180	80.966.220	(30.966.220)
2.	Gedung dan Bangunan	No. 188 Tahun 2016	71.500.000	591.500.000	177.450.000	414.050.000	(342.550.000)
	Jumlah		121.500.000	2.210.824.400	1.715.808.180	495.016.220	(373.516.220)

5.3.3 Pos Luar Biasa

Selama tahun 2015, terdapat Beban Luar Biasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat sebesar Rp1.582.441.003,00. Adapun Beban Luar Biasa tersebut merupakan realisasi Belanja Tidak Terduga yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp877.074.802,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.2.1.1.3, ditambah dengan Utang Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2015 sebesar Rp705.366.201,00. Keduanya merupakan pengeluaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

Adapun utang sebesar Rp705.366.201,00 tersebut tercatat pada Neraca Dinas Pelayanan Pajak, sedangkan pengakuan bebannya berada di Laporan Operasional PPKD.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2015 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar Rp420.117.547.032.852,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Ekuitas Awal	424.776.006.494.695,00
Koreksi Ekuitas	3.220.007.652.626,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(25.946.813.122.084,00)
Surplus – LO	18.055.610.761.070,00
Ekuitas Akhir	420.104.811.786.307,00

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada neraca awal per 1 Januari 2015 yang disusun berdasarkan basis akrual adalah Rp424.776.006.494.695,00. Nilai ini sama dengan nilai ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang disusun berdasarkan basis kas menuju akrual. Penyesuaian atas nilai ekuitas yang disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual ke dalam basis akrual disajikan sebagai komponen koreksi ekuitas pada tahun berjalan.

2. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada LPE Tahun 2015 adalah sebesar Rp3.220.007.652.626,00, yang terdiri dari:

a. Koreksi Penambahan Ekuitas

Koreksi Penambahan Ekuitas Tahun 2015 adalah sebesar Rp4.102.871.354.386,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kurang Catat Aset Tahun 2014

Koreksi Kurang Catat Aset pada Neraca Tahun 2014 adalah sebesar Rp3.816.941.573.612,00, yang terdiri dari:

- a) Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar Rp968.436.874.096,00, di antaranya terdapat di Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp756.684.712.192,00.
- b) Kurang Catat Persediaan sebesar Rp2.398.671.501,00, di antaranya terdapat di RSUD Pasar Rebo sebesar Rp2.334.413.816,00.
- c) Koreksi Nilai Aset Kemitraan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp2.838.544.284.676,00. Koreksi tersebut merupakan penyesuaian nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk BOT, BTO dan KSO sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2014. Penyesuaian nilai dilakukan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi BAST dari pihak ketiga atas aset yang dikerjasamakan dalam bentuk BOT, BTO dan KSO.
- d) Penerimaan Kas di tahun 2015 atas penjualan aset tetap tahun 2014 sebesar Rp6.840.488.887,00.
- e) Kurang Catat Piutang Tahun 2014 sebesar Rp721.254.452,00 di Unit Pengelola Perpajakan.

2) Koreksi Lebih Catat Utang Tahun 2014 sebesar Rp25.883.411.917,00, di antaranya terdapat di Dinas Perhubungan dan Transportasi sebesar Rp17.920.623.071,00.

3) Pembatalan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas saldo Piutang per 31 Desember 2014 yang piutangnya telah terbayar di tahun 2015 sebesar Rp260.046.368.857,00. Koreksi ekuitas atas pembatalan penyisihan piutang tersebut di antaranya terdapat di Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp250.461.911.561,00 atas pelunasan Piutang Pajak dan di PPKD sebesar Rp6.468.391.796,00 atas Investasi Dalam Dana Bergulir.

b. Koreksi Pengurangan Ekuitas

Koreksi Pengurangan Ekuitas Tahun 2015 adalah sebesar Rp882.863.701.760,00, dengan rincian sebagai berikut

1) Lebih Catat Aset Tahun 2014

Koreksi Lebih Catat Aset pada Neraca Tahun 2014 adalah sebesar Rp644.736.801.668,00, yang terdiri dari:

- a) Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar Rp341.454.446.761,00, di antaranya terdapat di Kantor Pengelola Kawasan Monas sebesar Rp186.360.000.000,00, Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp59.220.558.597,00, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp33.293.294.032,00.
- b) Penyesuaian penyajian Nilai Investasi Tahun 2014 sebesar Rp55.669.603.863,00. Koreksi ini merupakan penyesuaian kembali saldo investasi permanen sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2014 yang telah disajikan kembali (*restated*) dan tercantum dalam Laporan Keuangan *investee* tahun 2015.
- c) Koreksi Aset Tidak Berwujud yang Tidak Memenuhi Kriteria sebesar Rp4.968.226.755,00, di antaranya terdapat di Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan sebesar Rp3.400.440.410,00.
- d) Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2014 sebesar Rp66.613.252.500,00, di antaranya terdapat di BLUD RS Cengkareng dan sebesar Rp20.854.459.371,00 dan koreksi saldo Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset dan Piutang Denda Kerjasama/Pemanfaatan Aset sebesar Rp16.311.858.560,00.
- e) Koreksi pencatatan ganda antara Aset Tetap Lainnya dan Persediaan sebesar Rp11.171.482.995 di Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
- f) Penyesuaian nilai persediaan karena perubahan metode penilaian Persediaan di BLUD RS Pasar Rebo sebesar Rp3.090.006.920,00
- g) Koreksi Saldo Kas di Bank sebesar Rp12.735.246.545,00 pada Kas Ex. BLUD Transjakarta Busway yang tercatat di Dinas

Perhubungan dan Transportasi. Nilai koreksi tersebut merupakan hasil konfirmasi bank pada bulan Mei 2016 atas saldo Kas per 31 Desember 2015.

- h) Koreksi atas saldo Kas Transitoris BLUD tahun 2014 sebesar Rp149.034.535.329,00.

Saldo Kas Transitoris BLUD per 31 Desember 2014 adalah pengeluaran belanja operasional layanan umum yang dikeluarkan dari dana BLUD tahun 2014 dan belum dilakukan pengesahan menjadi Pendapatan dan Belanja LRA tahun 2014. Pada Neraca per 31 Desember 2014 yang disusun berdasarkan basis kas menuju akrual, nilai tersebut disajikan sebagai Aset – Kas dan Ekuitas – Pendapatan Ditangguhkan. Atas pencatatan tersebut dilakukan koreksi pada saldo Ekuitas Awal tahun 2015. Pada laporan keuangan tahun 2015 yang disusun berdasarkan basis akrual, nilai belanja operasional BLUD tahun 2015, baik yang sudah ataupun belum disahkan, disajikan sebagai Beban di Laporan Operasional.

- 2) Kurang Catat Utang Kepada Pemerintah Pusat tahun 2014 sebesar Rp120.308.375.049,00.
- 3) Kurang Catat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp27.621.298.251,00, di antaranya terdapat di Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp26.794.286.897,00.
- 4) Koreksi Pendapatan Pajak – LO (Laporan Operasional) Rp83.528.053.265,00.
- 5) Lebih Catat Pendapatan Tahun 2014 sebesar Rp6.669.173.527,00, di antaranya terdapat di Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp4.169.168.441,00 atas koreksi atas Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda oleh Pihak III tahun 2014 di PPKD sebesar Rp2.459.350.086,00.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan yang disajikan di LPE menyajikan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tahun 2014 sebagai dampak dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua! pada tahun 2015.

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp25.946.813.122.084,00, yang terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp24.737.392.389.270,00, di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp3.764.461.582.766, Dinas Pendidikan sebesar Rp1.310.885.584.846 dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp971.354.766.690.
- b. Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Fasos Fasum sebesar Rp1.100.232.508.224,00.
- c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dijual sebesar Rp41.835.372.724,00.
- d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp67.352.851.866,00, di antaranya terdapat di Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal sebesar Rp13.002.927.810,00, PSBN Cahaya Bathin Rp11.160.318.993,00 dan Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp8.792.701.766,00.

4. Surplus – LO

Surplus–LO per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp18.055.610.761.070,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut;

Pendapatan – LO	55.639.786.807.556,00	
Beban	(37.666.430.394.825,00)	
Surplus Kegiatan Operasional		17.973.356.412.731,00
Surplus Kegiatan Non Operasional		83.836.789.342,00
Beban Luar Biasa		(1.582.441.003,00)
Surplus – LO		18.055.610.761.070,00

5.5 Neraca

5.5.1 Aset

5.5.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

5.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp4.447.646.232.438,00 dan Rp9.069.887.775.249,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Kas Daerah	4.118.062.593.224	8.785.926.290.869
2	Potongan Pajak dan Jamsostek yang belum disetor ke Pemerintah yang merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di PPKD	324.469.034.806	272.029.383.896
3	Kas Transitoris	5.114.604.408	11.932.100.484
Jumlah		4.447.646.232.438	9.069.887.775.249

Dalam rangka pengelolaan kas, selain menyimpan dana dalam bentuk tabungan giro, selama tahun 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendepositokan dana ke 3 (tiga) Bank, yaitu Bank DKI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Adapun rincian dari saldo Kas di Bank per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp4.118.062.593.224,00 dan Rp8.785.926.290.869,00 tersaji pada tabel 5.26.

Tabel 5.26
Kas di Bank
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No	Rekening Bank	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014(Rp)
1	Bank Mandiri (Rek. 123-00-9715820-0)	243.339.078.977	284.365.176.273
2	Bank Mandiri (Rek. 123-00-9815797-9)	11.918.441.408	101.367.247.474
3	Bank Mandiri (Rek. 119-00-0107716-1)	55.184.404	53.823.343
4	Bank Mandiri (Rek. 104-00-9700002-5)	2.548.419.336	2.448.684.559
5	Bank Mandiri (Rek. 104-00-9800029-7)	1.479.541.889	1.421.652.304
6	Bank Mandiri (Rek. 104-00-0438835-6)	0	20.202.341
7	Bank DKI (Rek. 139-02-01605-4)	0	75.413.649.548
8	Bank DKI (Rek. 111-02-11605-9)	7.297.602.011	72.057.844.658
9	Bank DKI (Rek. 201-02-21605-2)	30.162.712.172	134.792.284.837
10	Bank DKI (Rek. 404-02-41605-9)	19.240.873.922	20.798.337.930
11	Bank DKI (Rek. 503-02-31605-2)	30.707.741.643	20.912.964.393
12	Bank DKI (Rek. 101-02-06015-3)	3.430.454.929	89.736.391.118
13	Bank DKI (Rek. 139-02-12174-5)	3.494.801.851	53.458.079.266
14	Bank DKI (Rek. 200-02-02828-2)	5.424.770.554	5.246.981.197
15	Bank DKI (Rek. 200-02-02829-1)	14.702.320.308	14.220.471.803
16	Bank DKI (Rek. 108-16-12680-9)	12.509.601.822	12.099.616.681
17	Bank DKI (Rek. 139-02-01575-9)	64.471.114.553	1.624.424.796.495
18	Bank DKI (Rek. 108-02-61605-1)	58.210.190.548	56.294.408.548
19	Bank DKI (Rek. 140-02-01605-8)	18.755.593.720	0
20	BRI (Rek. 00000019-01-00094-30-5)	269.335.538.660	198.018.234.745

No	Rekening Bank	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014(Rp)
21	BRI (Rek. 00000019-01-00096-30-7)	406.869.853.316	3.779.174.654
22	BRI (Rek. 00000019-01-001271-30-8)	173.703.587.732	14.497.192.783
23	BRI (Rek. 00000190-10-01266-30-3)	0	98.113.782
24	BNI (Rek. 8920644)	264.649.480	261.647.645
25	BNI (Rek. 8920688)	140.519.988	139.059.317
26	Deposito Bank BII (2-259-006061)	0	255.175
27	Deposito Bank DKI (101-25-10831-4)	0	200.000.000.000
28	Deposito Bank DKI (101450)	200.000.000.000	200.000.000.000
29	Deposito Bank DKI (150692)	150.000.000.000	150.000.000.000
30	Deposito Bank DKI (101-25-11158-7)	0	500.000.000.000
31	Deposito Bank DKI (101577)	0	100.000.000.000
32	Deposito Bank DKI (101495)	150.000.000.000	150.000.000.000
33	Deposito Bank DKI (101582)	0	100.000.000.000
34	Deposito Bank DKI (101507)	150.000.000.000	150.000.000.000
35	Deposito Bank DKI (101-25-1108311)	0	500.000.000.000
36	Deposito Bank DKI (101542)	0	200.000.000.000
37	Deposito Bank BRI (0019-01-010134-40-4)	0	400.000.000.000
38	Deposito Bank BRI (0019-01-010133-40-8)	0	400.000.000.000
39	Deposito Bank BRI (0019-01-010613-40-8)	0	200.000.000.000
40	Deposito Bank BRI (0019-01-010756-40-0)	0	300.000.000.000
41	Deposito Bank BRI (0019-01-010841-40-9)	0	150.000.000.000
42	Deposito Bank BRI (0019-01-010922-40-9)	0	150.000.000.000
43	Deposito Bank BRI (0019-01-011142-40-0)	400.000.000.000	400.000.000.000
44	Deposito Bank BRI (0019-01-011314-40-5)	0	450.000.000.000
45	Deposito Bank BRI (0019-01-011315-40-1)	0	110.000.000.000
46	Deposito Bank BRI (0019-01-011441-40-6)	220.000.000.000	220.000.000.000
47	Deposito Bank BRI (0019-01-011682-40-0)	180.000.000.000	180.000.000.000
48	Deposito Bank BRI (0019-01-011876-40-7)	0	400.000.000.000
49	Deposito Bank BRI (0019-01-012995-40-8)	200.000.000.000	0
50	Deposito Bank BRI (0019-01-012994-40-2)	300.000.000.000	0
51	Deposito Bank BRI (0019-01-013133-40-7)	200.000.000.000	0
52	Deposito Bank Mandiri (103-02-0498971-5)	100.000.000.000	100.000.000.000
53	Deposito Bank Mandiri (103-02-0499348-5)	100.000.000.000	100.000.000.000
54	Deposito Bank Mandiri (103-02-0500880-4)	55.000.000.000	55.000.000.000
55	Deposito Bank Mandiri (103-02-0503758-9)	135.000.000.000	135.000.000.000
56	Deposito Bank Mandiri (103-02-0513092-1)	100.000.000.000	0
57	Deposito Bank Mandiri (103-02-0517986-6)	100.000.000.000	0
	Total Saldo Kas di Kas Daerah	4.118.062.593.224	8.785.926.290.869

Saldo Kas di Bank per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.118.062.593.224,00 tersebut tidak termasuk giro yang belum dicairkan oleh pihak ketiga (*outstanding check*) sebesar

Rp109.629.997.821,00 dan saldo di rekening penampungan sebesar Rp1.262.840.820.247,00.

Saldo *outstanding check* per 31 Desember 2015 sebesar Rp109.629.997.821,00 berada di 3 (tiga) rekening Bank sebagai berikut.

No	Rekening Bank	Jumlah (Rp)
1	Bank DKI (Rek. 139-02-01605-4)	7.385.052.605
2	Bank DKI (Rek. 111-0-11605-9)	6.082.807.027
3	Bank DKI (Rek. 303-02-51605-9)	87.893.832.491
4	Bank DKI (Rek. 404-02-41605-9)	174.169.563
5	Bank DKI (Rek. 503-02-31605-2)	6.630.383.658
6	Bank DKI (Rek. 108-02-61605-1)	55.263.047
7	Bank DKI (Rek. 140-02-01605-8)	1.408.489.430
	JUMLAH	109.629.997.821

Sedangkan saldo rekening penampungan per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.262.840.820.247,00 dibuat oleh Bank DKI untuk menjembatani proses pembayaran sebelum diposting ke rekening tujuan.

Sejak tahun 2008 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola Kas Non Anggaran berupa penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Kas Transitoris ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 75 ayat 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran, Pasal 4, menyatakan bahwa Gubernur sebagai Pemegang kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Kepala SKPD/UKPD Pelaksana selaku pemungut Kas Non Anggaran. Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, akun saldo Kas Non Anggaran berubah nomenklatur menjadi Kas Transitoris. Saldo Kas Transitoris per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp5.114.604.408,00 dan

Rp11.932.100.484,00 merupakan penerimaan uang jaminan bongkar reklame dan BP3W Sunter Jakarta Utara. Adapun mutasi saldo Kas Transitoris dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Kas Non Anggaran Tahun 2015			
	Saldo Awal per 31 Desember 2014	Rp	11.932.100.484,00
	Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Bangunan Reklame Tahun 2015	Rp	(6.892.175.576,00)
	Penerimaan Jaminan Tahun 2015	Rp	74.679.500,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2015	Rp	5.114.604.408,00

Saldo Kas Transitoris tersebut belum termasuk Titipan Sewa Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dan Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, dan uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing tercatat sebesar Rp6.095.042.973,00 dan Rp5.989.320.973,00. Rumah ber-SIP adalah rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan. Hal ini untuk menjaga ketertiban umum di bidang perumahan, sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial". Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing tercatat sebesar Rp902.254.860 dan Rp784.754.860,00. Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa merupakan uang yang

dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang diperuntukkan sebagai kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda berperan sebagai fasilitator antara pihak pemilik sah rumah dengan penyewa rumah tersebut.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP dan Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Jatibaru dengan Nomor Rekening 110-02-07691-1 atas nama Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.205.764.787,00 dan Rp1.197.829.165,00 disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Gunung Sahari dengan Nomor Rekening 104-03-00268-2 atas nama Panitia Lelang Hasil Hutan Temuan.

5.5.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp816.807.645.256,00 dan Rp404.746.053.001,00. Saldo kas per 31 Desember 2015 diperoleh dari neraca-neraca SKPD yang merupakan akumulasi sisa uang persediaan sebesar Rp813.781.599.291,00, Jasa Giro di SKPD yang belum disetor sebesar Rp20.400.493,00, Pajak di SKPD yang Belum Disetor ke kas Negara sebesar Rp3.005.645.472,00, dan Uang Titipan sebesar Rp0,00.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2015 tidak termasuk kelebihan pembayaran pajak yang terdapat pada SKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp453.024.193,00, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp397.670.892,00, Kantor Kepegawaian Jakarta Timur Sebesar Rp13.266.515,00, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp811.297.635,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga. Atas kelebihan pembayaran pajak diakui sebagai piutang (atas dasar surat keterangan dari KPP bahwa atas kelebihan tersebut akan dikompensasi pada tahun pajak berikutnya).

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada lampiran 1.

5.5.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp23.308.500,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 merupakan pendapatan yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening BUD sampai dengan akhir periode.

5.5.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp1.017.491.155.074,00 dan Rp984.007.705.203,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Kas Tunai	2.521.825.239	2.961.908.748
2	Kas di Bank	1.012.718.896.555	829.611.721.688
3	Kas Transitoris BLUD	-	149.034.535.329
4	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	871.302.184	561.255.396
5	Uang Muka Pasien RSUD/RSKD	1.366.064.096	1.838.284.042
6	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	13.067.000	-
	Jumlah	1.017.491.155.074	984.007.705.203

Pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis Kas menuju Akrua, terdapat saldo Kas Transito BLUD sebesar Rp149.034.535.329,00. Saldo tersebut merupakan nilai belanja operasional BLUD sampai dengan akhir Bulan Desember 2014 yang belum dilakukan proses pengesahan SP2D ke BUD. Dengan penerapan basis akrual pada Tahun 2015, jumlah kas

transito diakui sebagai koreksi yang berpengaruh terhadap saldo awal ekuitas Tahun 2015.

Pada tahun 2015, akun Kas Transito tidak lagi menyajikan saldo belanja operasional BLUD yang belum dilakukan proses pengesahan SP2D ke BUD, tetapi langsung diakui sebagai beban pada Laporan Operasional.

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp2.521.825.239,00 dan Rp2.961.908.748,00.

Saldo Kas di Bank per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp1.012.718.896.555,00 dan Rp829.611.721.688,00. Kas Tunai dan Kas di Bank karena pengelolaannya bersifat khusus, maka pada akhir Bulan Desember 2015 tidak disetorkan ke kas daerah sehingga dapat digunakan kembali dalam kegiatan operasional pada bulan berikutnya. Kas Tunai dan Kas di Bank tersebut termasuk kas ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway yang tercatat di Dinas Perhubungan. Saldo kas per 31 Desember 2014 pada laporan keuangan ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway adalah sebesar Rp240.778.262.880,00. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Laporan Keuangan setelah Audit tahun 2014.

Dengan dialihkannya status BLUD Pengelola Transjakarta Busway menjadi PT Trans Jakarta per 1 Januari 2015, telah dilakukan penutupan buku BLUD Pengelola Transjakarta Busway Per 31 Desember 2014 dengan saldo kas pada Neraca Penutup per 31 Desember 2014 (*unaudited*) sebesar Rp223.588.141.994,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp17.190.120.886,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Neraca per 31 Desember 2014	Neraca Penutup 31 Desember 2014 (<i>unaudited</i>)	Kenaikan /(Penurunan)
1.	Kas di bank	240.778.262.880	221.524.684.555	(19.253.578.325)
2.	Kas Tunai	-	1.277.635.079	1.277.635.079
3.	Kas Transito BLUD	-	785.822.360	785.822.360
Jumlah		240.778.262.880	223.588.141.994	17.190.120.886

Perbedaan saldo sebesar Rp19.253.578.325 pada Kas di Bank disebabkan adanya (*outstanding check*) yang masih disajikan sebagai Kas di Bank pada laporan keuangan per 31 Desember 2014, belum diperhitungkan sebagai pengurang kas dalam laporan keuangan Tahun 2014.

Perbedaan saldo sebesar Rp1.277.635.079 merupakan nilai kas di bendahara pengeluaran yang belum tercatat pada akun kas tunai. Serta Rp785.822.360 adalah nilai belanja yang telah dibayarkan namun belum dilakukan pengesahan atas belanja BLUD (kas transito BLUD).

Berdasarkan hasil konfirmasi bank yang dilakukan pada akhir bulan Mei 2016 menunjukkan bahwa saldo kas ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway di Bank per 31 Desember 2015 jumlahnya sebesar Rp228.043.016.335,00, sehingga atas perbedaan saldo Kas di Bank dilakukan koreksi pada laporan keuangan tahun 2015. Jumlah tersebut belum termasuk dana yang ada di Bank Mega senilai Rp1.081.198.236,00 karena masih menunggu jawaban konfirmasi bank untuk memastikan kebenaran jumlahnya.

Untuk memastikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Penutup ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway.

b. Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp871.302.184,00 dan Rp561.255.396,00, merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD dan belum disetorkan ke kas negara sampai dengan akhir masa pelaporan.

c. Uang Muka Pasien RSUD/RSKD

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp1.366.064.096,00 dan Rp1.838.284.042,00. Saldo Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	BLUD RS Koja	464.940.539	1.476.746.746
2	BLUD RS Tarakan	31.642.520	41.440.839
3	BLUD RS Cengkareng	446.896.946	128.320.849
4	BLUD RS Pasar Rebo	195.848.991	67.596.108
5	BLUD RS Budhi Asih	225.435.100	116.079.500
6	BLUD RS Duren Sawit	-	8.100.000
7	BLUD RSUD Pasar Minggu - Jaksel	1.300.000	0
	Jumlah	1.366.064.096	1.838.284.042

d. Potongan Non Pajak yang Belum Disetor

Potongan Non Pajak yang Belum Disetor adalah potongan luran Jamsostek pegawai yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2015 yang ada di BLUD RSUD Cengkareng.

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 2.

Jumlah Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2015 tidak termasuk jumlah kas di rekening penampungan di Bank BRI sebagai pelaksanaan program Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang baru dapat dicairkan setelah jumlah klaim diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan, adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	BLUD RS Koja	21.427	17.766.152,00
2	BLUD RS Tarakan	59.425.138	59.188.639,00
3	BLUD RS Cengkareng	94.702.069	134.003.722,00
4	BLUD RS Pasar Rebo	129.294.835	1.086.698.697,00
5	BLUD RS Budhi Asih	0	0,00
6	BLUD RS Duren Sawit	0	482.673,00
Jumlah		283.443.469	1.298.139.883

Jumlah Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2015 juga tidak termasuk Belanja yang Belum Disahkan masing-masing untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2014 sebesar Rp149.034.535.329,00 dan Rp176.137.294.129,00, dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada Pendapatan Lain-lain dan Belanja Barang dan Jasa sub akun Belanja Operasional Layanan Umum.

Belanja yang Belum Disahkan tersebut diantaranya terdiri dari Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengembangan Ekonomi Masyarakat, dan Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah lainnya.

Pada BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung terdapat saldo atas belanja operasional BLUD yang belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah per 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp16.881.743.513,00.

Atas belanja BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung yang belum dilakukan proses pengesahan tersebut, telah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam laporan nomor LHV-140/PW09/3/2013 tanggal 21 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Verifikasi atas Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Unit UPK PPUMKMP Pulogadung Tahun 2010 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Belanja Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja yang Tidak Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja Tanpa Bukti Pendukung
2010	7.279.996.932,66	5.259.241.278,66	768.529.772,00	1.252.225.882,00
2011	4.672.272.382,51	2.796.186.961,51	1.579.736.874,00	296.348.547,00
1 Jan-31 Maret 2012	4.557.849.577,00	3.018.294.331,00	1.539.555.246,00	0,00
Jumlah	16.510.118.892,17	11.073.722.571,17	3.887.821.892,00	1.548.574.429,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih melakukan upaya penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan Unit UPK PPUMKMP Pulogadung sesuai ketentuan yang berlaku.

5.5.1.1.5 Piutang

5.5.1.1.5.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp6.310.691.128.624,00 dan Rp5.459.957.134.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1.	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	50.386.958.545	20.138.230.486
2.	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	238.627.010	238.833.010
3.	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.095.221.225	3.737.829.340
4.	Piutang Pajak Air Tanah	83.087.525.295	73.416.317.820
5.	Piutang Pajak Hotel	17.476.631.388	27.172.627.475
6.	Piutang Pajak Restoran	129.880.233.572	117.185.517.942

	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
7.	Piutang Pajak Hiburan	67.165.075.129	46.304.754.264
8.	Piutang Pajak Reklame	210.655.068.042	220.442.896.236
9.	Piutang Pajak Parkir	2.794.391.418	5.005.935.702
10.	Piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	17.841.149.604	17.914.660.837
11.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan - P2	5.727.070.247.396	4.928.399.531.271
	Jumlah	6.310.691.128.624	5.459.957.134.383

Piutang pajak sebesar Rp6.310.691.128.624,00 adalah hasil gabungan piutang pada Dinas, Suku Dinas dan UPPD di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2014		
	Piutang per 31 Desember 2014	Rp	5.459.957.134.383
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2015 atas Piutang 2014	Rp	(690.328.707.993)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2014	Rp	(62.255.694.374)
	Koreksi	Rp	(34.196.294.035)
	Saldo Piutang Tahun 2014	Rp	4.673.176.437.981
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2015		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	9.291.549.847.317
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2015)	Rp	(7.476.718.825.933)
	Pengurangan Piutang dengan kompensasi	Rp	(5.733.680.642)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2015)	Rp	(171.582.650.099)
	Saldo Piutang Tahun 2015	Rp	1.637.514.690.643
c.	Piutang per 31 Desember 2015 (a+b)	Rp	6.310.691.128.624

Mutasi atas beberapa jenis piutang pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp50.386.958.545,00 dan Rp20.138.230.486,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2014		
	Piutang per 31 Desember 2014	Rp	20.138.230.486
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2015 atas Piutang 2014	Rp	(1.657.975.775)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2014	Rp	-
	Koreksi	Rp	745.828.280
	Saldo Piutang Tahun 2014	Rp	19.226.082.991
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2015		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	481.461.061.139
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2015)	Rp	(450.300.185.585)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2015)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2015	Rp	31.160.875.554
c.	Piutang per 31 Desember 2015 (a+b)	Rp	50.386.958.545

Penyajian piutang PKB merupakan piutang yang berasal lima wilayah Samsat. Piutang PKB tersebut dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sesuai dengan kebijakan akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang piutang pajak, yaitu piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Mekanisme pelayanan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Bersama Menhankam, Mendagri dan Menkeu No.INS/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999, No.6/IMK/014/1999 tanggal 11 Oktober 1999 yang mengatur bahwa dalam pelayanan penerbitan STNK, STCK, TNKB dan Pemungutan PKB, BBN-KB serta SWDKLLJ, SKP dapat diterbitkan apabila wajib pajak terlebih dahulu melakukan pendaftaran (registrasi) dan identifikasi oleh pihak kepolisian. Oleh sebab itu, SKP baru diterbitkan pada saat wajib pajak melakukan pendaftaran ulang kendaraan bermotor. Namun demikian, sistem informasi

SAMSAT Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menyimpan data histori tunggakan wajib pajak, dan atas tunggakan tersebut seluruhnya akan ditagihkan pada saat wajib pajak melakukan daftar ulang.

Piutang PKB tersebut memang tidak disajikan berdasarkan akumulasi sejak diterbitkan SKP, hal tersebut dikarenakan dalam mekanisme yang ada di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, SKP dapat diterbitkan apabila Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan pendaftaran (registrasi) dan identifikasi kendaraan bermotor oleh Pihak Kepolisian. Oleh sebab itu, pada Laporan Piutang PKB Per 31 Desember 2015, SKP dicatat pada masa pajak terhutanganya (SKP terakhir terbit) sehingga tidak terlihat akumulasi atas piutang tersebut. Namun secara sistem, apabila Wajib Pajak tersebut melakukan pendaftaran (registrasi) dan identifikasi, maka akan terlihat histori piutang (tunggakan) yang ia miliki atau tersaji secara akumulasi. Hal tersebut merupakan bentuk pengendalian (*control*) terhadap piutang PKB.

Selain itu, dalam Sistem Informasi PKB hanya dapat mencetak SKP apabila telah dilakukan pembayaran atas piutang (tunggakan) sebelumnya sehingga penyajian piutang Per 31 Desember 2015 tidak dapat disajikan secara akumulasi mengingat belum diterbitkan SKP pada tahun berikutnya.

Sedangkan untuk Wajib Pajak yang belum melakukan pendaftaran (registrasi) dan identifikasi atas kendaraan bermotornya maka akan diklasifikasikan sebagai Wajib Pajak Belum Daftar Ulang (BDU). Jumlah kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang menurut *database* Master SI PKB sebanyak 3.767.560 Kbm yang dibedakan berdasarkan tahun pembuatan yaitu kendaraan yang dibuat sebelum tahun 2000 sebanyak 956.151 KBm dan sesudah tahun 2000

sebanyak 2.811.409 KBm. Nilai Pokok dan denda BDU merupakan nilai terakhir yang dibayar sebelum menjadi BDU. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari pokok pajak dan denda untuk PKB dan BBN-KB sebagai berikut :

Wilayah	Jumlah Kendaraan	PKB Pokok	PKB Denda	BBN Pokok	BBN Denda
	Tahun Buat < 2000	Tahun Buat < 2000	Tahun Buat < 2000	Tahun Buat < 2000	Tahun Buat < 2000
Non Wilayah	11.436	3.792.078.043	648.892.726	600.000	150.000
BARAT	152.815	29.106.607.450	778.128.433	5.689.149.225	72.979.366
PUSAT	100.305	22.191.239.320	624.433.240	2.088.365.000	12.594.790
SELATAN	362.706	62.818.545.383	2.126.820.362	15.991.219.040	208.596.297
TIMUR	182.028	31.360.023.879	853.526.328	3.765.905.075	10.342.834
UTARA	146.861	24.874.807.298	665.494.934	3.793.223.775	24.673.682
Total	956.151	174.143.301.373	5.697.296.023	31.328.462.115	329.336.969

Wilayah	Jumlah Kendaraan	PKB Pokok	PKB Denda	BBN Pokok	BBN Denda
	Tahun Buat > 2000	Tahun Buat > 2000	Tahun Buat > 2000	Tahun Buat > 2000	Tahun Buat > 2000
Non Wilayah	34.692	19.197.347.402	1.854.780.081	-	-
BARAT	609.962	209.342.903.700	3.743.123.932	366.729.875.450	77.390.066
PUSAT	338.749	175.403.416.895	3.464.653.387	299.828.700.225	511.315.728
SELATAN	670.954	331.074.237.840	6.613.957.088	485.465.797.550	386.879.557
TIMUR	680.755	234.781.318.850	4.347.768.692	458.901.340.650	155.464.746
UTARA	476.297	172.493.937.150	2.879.797.050	320.129.777.700	150.486.030
Total	2.811.409	1.142.293.161.837	22.904.080.230	1.931.055.491.575	1.281.536.127

Mutasi Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp4.095.221.225,00 dan Rp3.737.829.340,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2014		
	Piutang per 31 Desember 2014	Rp	3.737.829.340
	Saldo Piutang Tahun 2014	Rp	3.737.829.340
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2015		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	478.066.072
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2015)	Rp	(120.674.187)
	Saldo Piutang Tahun 2015	Rp	357.391.885
c.	Piutang per 31 Desember 2015 (a+b)	Rp	4.095.221.225

Mutasi Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp83.087.525.295,00 dan Rp73.416.317.820,00, berikut ini rincian mutasi piutangnya:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2014		
	Piutang per 31 Desember 2014	Rp	73.416.317.820
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2015 atas Piutang 2014	Rp	(4.181.458.840)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2014	Rp	(90.274.611)
	Koreksi	Rp	(1.668.319.726)
	Saldo Piutang Tahun 2014	Rp	67.476.264.643
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2015		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	112.416.181.210
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2015)	Rp	(96.803.327.279)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2015)	Rp	(1.593.279)
	Saldo Piutang Tahun 2015	Rp	15.611.260.652
c.	Piutang per 31 Desember 2015 (a+b)	Rp	83.087.525.295

Mutasi Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp17.476.631.388,00 dan Rp27.172.627.475,00, berikut ini rincian mutasi piutangnya:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2014		
	Piutang per 31 Desember 2014	Rp	27.172.627.475
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2015 atas Piutang 2014	Rp	(9.181.412.738)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2014	Rp	(528.870.106)
	Koreksi	Rp	(2.233.232.686)
	Saldo Piutang Tahun 2014	Rp	15.229.111.945
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2015		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	16.332.238.528
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2015)	Rp	(13.047.159.869)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2015)	Rp	(1.037.559.216)
	Saldo Piutang Tahun 2015	Rp	2.247.519.443
c.	Piutang per 31 Desember 2015 (a+b)	Rp	17.476.631.388

Mutasi Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp129.880.233.572,00 dan Rp117.185.517.942,00, berikut ini rincian mutasi piutangnya:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2014		
	Piutang per 31 Desember 2014	Rp	117.185.517.942
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2015 atas Piutang 2014	Rp	(18.886.928.234)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2014	Rp	(1.561.080.405)
	Koreksi	Rp	(8.416.559.162)
	Saldo Piutang Tahun 2014	Rp	88.320.950.141
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2015		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	76.337.034.149
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2015)	Rp	(32.786.348.378)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2015)	Rp	(1.991.402.340)
	Saldo Piutang Tahun 2015	Rp	41.559.283.431
c.	Piutang per 31 Desember 2015 (a+b)	Rp	129.880.233.572

Mutasi Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp67.165.075.129,00 dan Rp46.304.754.264,00, berikut ini rincian mutasi piutangnya:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2014		
	Piutang per 31 Desember 2014	Rp	46.304.754.264
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2015 atas Piutang 2014	Rp	(9.279.065.785)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2014	Rp	(290.595.239)
	Koreksi	Rp	(1.681.998.513)
	Saldo Piutang Tahun 2014	Rp	35.053.094.727
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2015		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	64.661.104.134
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2015)	Rp	(30.228.450.162)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2015)	Rp	(2.320.673.570)
	Saldo Piutang Tahun 2015	Rp	32.111.980.402
c.	Piutang per 31 Desember 2015 (a+b)	Rp	67.165.075.129

Mutasi Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp210.655.068.042,00 dan Rp220.442.896.236,00, berikut ini rincian mutasi piutangnya:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2014		
	Piutang per 31 Desember 2014	Rp	220.442.896.236
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2015 atas Piutang 2014	Rp	(80.016.737.723)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2014	Rp	(3.395.558.960)
	Koreksi	Rp	(21.845.900.858)
	Saldo Piutang Tahun 2014	Rp	115.184.698.696
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2015		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	753.730.625.555
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2015)	Rp	(652.513.120.445)
	Pengurang piutang dengan kompensasi	Rp	(2.366.616.265)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2015)	Rp	(3.380.519.498)
	Saldo Piutang Tahun 2015	Rp	95.470.369.347
c.	Piutang per 31 Desember 2015 (a+b)	Rp	210.655.068.042

Mutasi Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.794.391.418,00 dan Rp5.005.935.702,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2014		
	Piutang per 31 Desember 2014	Rp	5.005.935.702
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2015 atas Piutang 2014	Rp	(1.973.199.955)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2014	Rp	(654.090.525)
	Koreksi	Rp	(273.801.084)
	Saldo Piutang Tahun 2014	Rp	2.104.844.138
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2015		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	6.171.878.782
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2015)	Rp	(5.316.970.254)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2015)	Rp	(165.361.248)
	Saldo Piutang Tahun 2015	Rp	689.547.280
c.	Piutang per 31 Desember 2015 (a+b)	Rp	2.794.391.418

Mutasi Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp17.841.149.604,00 dan Rp17.914.660.837,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2014		
	Piutang per 31 Desember 2014	Rp	17.914.660.837
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2015 atas Piutang 2014	Rp	(716.708.698)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2014	Rp	-
	Koreksi	Rp	(35.403.479)
	Saldo Piutang Tahun 2014	Rp	17.162.548.660
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2015		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	678.600.944
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2015)	Rp	-
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2015)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2015	Rp	678.600.944
c.	Piutang per 31 Desember 2015 (a+b)	Rp	17.841.149.604

Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Pada tahun 2013 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Piutang PBB P2 merupakan hasil pelimpahan wewenang untuk pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Piutang tersebut diakui berdasarkan Berita sesuai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP dengan Kepala UPPD sesuai kewenangan wilayahnya. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing

sebesar Rp5.727.070.247.396,00 dan Rp4.928.399.531.271,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2014		
	Piutang per 31 Desember 2014	Rp	4.928.399.531.271
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2015 atas Piutang 2014	Rp	(564.435.220.245)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2014	Rp	(55.735.224.528)
	Koreksi	Rp	1.213.299.193
	Saldo Piutang Tahun 2014	Rp	4.309.442.385.691
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2015		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	7.779.282.706.804
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2015)	Rp	(6.195.602.239.774)
	Pengurang Piutang dengan Kompensasi	Rp	(3.367.064.377)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2015)	Rp	(162.685.540.948)
	Saldo Piutang Tahun 2015	Rp	1.417.627.861.705
c.	Piutang per 31 Desember 2015 (a+b)	Rp	5.727.070.247.396

Pengurangan Piutang dari penerimaan pembayaran diakui berdasarkan bukti setor yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak. Rincian lebih lanjut atas mutasi Piutang Pajak disajikan dalam lampiran 3.

Dalam rangka penerapan pelaporan akuntansi berbasis akrual dan sebagai upaya untuk meminimalisir piutang PBB-P2 yang tidak tertagih karena ketidakakuratan penerbitan SPPT PBB-P2 khususnya terhadap Piutang PBB-P2 hasil pelimpahan Direktorat Jendral Pajak yang dilimpahkan per 1 Januari 2013, pada tanggal 28 Agustus 2015 Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemutakhira Objek PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan Instruksi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemutakhira Objek PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) selaku unit yang mengelola PBB-P2 yang berkoordinasi dengan Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka menunjang pelaksanaan instruksi tersebut.

Sebagaimana isi dalam instruksi tersebut, setiap UPPD diminta untuk :

1. melakukan pemutakhiran melalui peneliti lapangan terhadap minimal 300 objek PBB-P2 yang telah memiliki hutang PBB-P2 sejak 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut;
2. mengelompokan dan mengkategorikan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) sesuai dengan kode kategori yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kode Kategori Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu sebagai berikut :

Kode Kategori	Uraian
1	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dan secara nyata ada dan ditemukan lokasinya
2	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan
3	Objek PBB-P2 yang telah memiliki 2 (dua) atau lebih NOP sehingga SPPT PBB-PB2 nya diterbitkan pada tahun pajak yang sama (satu objek pajak memiliki NOP ganda)
4	Objek PBB-P2 yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA, dll
5	Objek PBB-P2 yang secara nyata telah menjadi sarana prasarana utilitas/ yang telah dibebaskan dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah
6	Objek PBB-P2 yang bermasalah/disengketakan kepemilikannya oleh beberapa pihak

Hasil pelaksanaan instruksi sebagaimana dimaksud angka 4 belum mempengaruhi penyajian Laporan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2015, dan hingga saat ini masih dalam proses tindak lanjut

Klasifikasi umur piutang (*aging*) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PAJAK	KRITERIA KUALITAS PIUTANG PAJAK DAERAH				JUMLAH
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
1	HOTEL	2.247.519.443	2.956.693.410	1.634.283.149	10.638.135.386	17.476.631.388
2	RESTORAN	41.559.283.431	11.545.395.797	8.686.004.355	68.089.549.990	129.880.233.572
3	HIBURAN	32.111.980.402	4.561.146.702	4.519.079.388	25.972.868.637	67.165.075.129
4	REKLAME	95.470.369.347	46.714.924.911	53.584.509.947	14.885.263.838	210.655.068.043
5	PAT	15.611.260.652	12.119.982.202	28.940.844.499	26.415.437.942	83.087.525.295
6	PARKIR	689.547.280	99.823.861	474.015.199	1.531.005.078	2.794.391.418
7	BPHTB	678.600.944	495.941.800	371.093.157	16.295.513.703	17.841.149.604
8	PBB-P2	1.417.627.861.705	1.600.822.918.053	747.570.470.593	1.961.048.997.044	5.727.070.247.395
9	BBN-KB	-	94.000	103.867.000	134.666.010	238.627.010
10	PKB	31.160.875.554	5.945.445.980	8.369.565.520	4.911.071.491	50.386.958.545
11	PBB-KB	357.391.800	-	3.737.829.425	-	4.095.221.225
12	PPJ	-	-	-	-	-
JUMLAH		1.637.514.690.558	1.685.262.366.716	857.991.562.232	2.129.922.509.119	6.310.691.128.624

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp3.575.059.028.308,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp6.310.691.128.624,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp2.735.632.100.316,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PAJAK	PIUTANG PAJAK PER 31 DESEMBER 2015	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH BERDASARKAN KRITERIA				PENYISIHAN	NET REALIZABLE VALUE PIUTANG PAJAK PER 31 DESEMBER 2015
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7	9 = 3-8
1	HOTEL	17.476.631.388	11.237.597	295.669.341	817.141.575	8.689.589.779	9.813.638.292	7.662.993.096
2	RESTORAN	129.880.233.572	207.796.417	1.154.539.580	4.343.002.177	60.184.821.663	65.890.159.837	63.990.073.735
3	HIBURAN	67.165.075.129	160.559.902	456.114.670	2.259.539.694	24.009.847.986	26.886.062.252	40.279.012.877
4	REKLAME	210.655.068.042	477.351.847	4.671.492.491	26.792.254.974	1.798.237.571	33.739.336.883	176.915.731.159
5	PAT	83.087.525.295	78.056.303	1.211.998.220	14.470.422.250	26.209.373.628	41.969.850.401	41.117.674.894
6	PARKIR	2.794.391.418	3.447.736	9.982.385	237.007.600	1.005.281.361	1.255.719.082	1.538.672.336
7	BPHTB	17.841.149.604	3.393.005	49.594.180	185.546.578	15.788.634.847	16.027.168.610	1.813.980.994
8	PBB-P2	5.727.070.247.396	7.088.139.309	160.082.291.805	373.785.235.296	1.990.489.972.902	2.531.445.639.312	3.195.624.608.084
9	BBN-KB	238.627.010	-	9.400	51.933.500	134.769.010	186.711.910	51.915.100
10	PKB	50.386.958.545	155.804.378	594.544.598	4.184.782.760	1.611.980.372	6.547.112.108	43.839.846.437
11	PBB-KB	4.095.221.225	1.786.959	-	1.868.914.670	-	1.870.701.629	2.224.519.596
12	PPJ	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		6.310.691.128.624	8.187.573.453	168.526.236.670	428.995.781.074	2.129.922.509.119	2.735.632.100.316	3.575.059.028.308

5.5.1.1.5.2 Piutang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan obyeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2015 dan 2014

masing-masing sebesar Rp31.195.082.860,00 dan Rp78.689.895.378,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	1.249.583.586	33.879.539.886
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	7.793.183.800	15.986.860.628
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	22.152.315.474	28.823.494.864
	Jumlah	31.195.082.860	78.689.895.378

2) Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.249.583.586,00 di antaranya piutang di SKPD Dinas Penataan Kota sebesar Rp970.743.336,00 dengan jumlah terbesar yaitu piutang atas Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota dan Pengukuran Situasi Tanah dan Dinas Kebersihan sebesar Rp276.240.250,00 yaitu piutang atas Retribusi Penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan (LIPAB).

3) Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp7.793.183.800,00 antara lain terdapat di SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp4.909.385.000,00 yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII dengan rincian piutang pemakaian penginapan periode 2007-2008 sebesar Rp4.041.985.000,00 dan piutang pemakaian penginapan periode 2012 sebesar Rp867.400.000,00, Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro serta Perdagangan sebesar Rp2.823.929.000,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian Tempat Usaha Dilokasi Sementara Usaha Mikro dan terdapat di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp59.869.800,00 yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

4) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp22.152.315.474,00 terdapat di SKPD Dinas Penataan Kota dengan retribusi sebesar Rp19.191.640.013,00 yaitu Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan dan Retribusi Pengawasan Pembangunan dan terdapat di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.960.675.461,00 yaitu piutang atas Retribusi Pengawasan Pembangunan, Retribusi Izin Undang-undang Gangguan, Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Retribusi Izin Trayek.

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2015 dan 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp8.677.068.395,00 dan Rp68.746.427.781,00, jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp22.518.014.465,00 dan Rp9.943.467.597,00. Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Tabel 5.27
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
Per 31 Desember 2015

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	792.491.386,00	4.853.717,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	4.490.104.994,00	9.356.268.265,00
3	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	17.235.418.085,00	582.345.615,00
	Jumlah	22.518.014.465,00	9.943.467.597,00

5.5.1.1.5.3 Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp356.383.764.220,00 dan Rp233.460.046.307,00. Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.28
Saldo Piutang BLUD
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	1.062.215.500	1.400.614.750
2	Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	4.980.000	22.435.000
3	Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452	1.944.556.802
4	Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
5	Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	28.104.300.997	27.271.180.217
6	Piutang BLUD RSUD dan RSKD	302.837.407.777	202.068.779.525
7	Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	664.800.000	636.675.000
8	Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I	11.361.478.169	-
9	Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II	1.230.225.416	-
10	Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III	10.281.296.896	0
11	Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	21.819.501	21.819.501
	Jumlah	356.383.764.220	233.460.046.307

1) Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat

Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.062.215.500,00 dan Rp1.400.614.750,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

2) Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta

Saldo Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta dengan nilai per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp4.980.000,00 dan Rp22.435.000,00, diantaranya adalah piutang biaya pendidikan keperawatan.

3) Piutang BLUD Pengelola Perpustakaan

Saldo Piutang BLUD Pengelola Perpustakaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp721.254.452,00 dan Rp1.944.556.802,00 diantaranya adalah piutang operator penyedia jasa parkir.

4) Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda

Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang sewa *tenant* di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Olah Raga dan Pemuda.

5) Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung

Saldo Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp28.104.300.997,00 dan Rp27.271.180.217,00. Piutang tersebut merupakan saldo piutang UPK PPUMKMP Pulogadung. Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan

Pulogadung per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar sebagai berikut:

Tabel 5.29
Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Piutang Sewa SKH	2.681.582.000	1.678.665.220
2	Piutang Sewa Barak Kerja	-	39.796.000
3	Piutang Sewa Ruang Pamer	-	130.000.000
4	Piutang PHU dari KSO (Tanah 1,5 Ha)	-	20.342.000.000
5	Piutang PHU dari KSO (Tanah 0,394 Ha)	-	3.285.850.000
6	Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO Jatinegara Baru	23.726.018.000	98.168.000
7	Piutang Kavling Siap Bangun	11.596.540	11.596.540
8	Piutang Sarana Kerja dan Hunian	1.440.000	1.440.000
9	Piutang PBB Pengusaha	25.712.109	25.712.109
10	Piutang Pra Operasional Business Center	1.274.052.348	1.274.052.348
11	Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah	80.000.000	80.000.000
12	Piutang Karyawan	303.900.000	303.900.000
	Jumlah	28.104.300.997	27. 271.180.217

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.

6) Piutang BLUD RSUD dan RSKD

Saldo Piutang BLUD RSUD dan RSKD per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp302.837.407.777,00 dan Rp202.068.779.525,00, diantaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

Rincian saldo Piutang BLUD RSUD dan RSKD per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.30
Piutang BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	BLUD RS Koja	61.694.670.689	42.767.251.818
2	BLUD RS Tarakan	92.925.883.371	53.433.868.394
3	BLUD RS Cengkareng	56.522.214.613	46.857.448.828
4	BLUD RS Pasar Rebo	50.204.168.245	40.868.156.753
5	BLUD RS Budhi Asih	32.860.899.017	12.912.609.593
6	BLUD RS Duren Sawit	4.243.949.730	5.229.444.139
7	BLUD RSUK 5 wilayah kota administrasi	4.385.622.112	-
	Jumlah	302.837.407.777	202.068.779.525

Piutang BLUD RSUD dan RSKD sebagian besar merupakan piutang kepada BPJS. Piutang tagihan kepada BPJS di RSUD dan RSKD adalah nilai tagihan pelayanan kesehatan berdasarkan tarif INA CBG's yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014. Piutang pelayanan kesehatan RSUD dan RSKD kepada BPJS per 31 Desember 2015 terdiri dari jumlah klaim yang telah diverifikasi namun belum dibayarkan oleh BPJS dan jumlah klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS. Jumlah piutang kepada BPJS di RSUD dan RSKD per 31 Desember 2015 dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)		
		Piutang Telah Diverifikasi BPJS	Piutang Dalam Proses Verifikasi BPJS	Piutang Kepada BPJS
1	BLUD RS Koja	52.839.130.798	7.712.300	52.846.843.098
2	BLUD RS Tarakan	42.590.705.389	49.795.808.100	92.386.513.489
3	BLUD RS Cengkareng	35.094.967.778	17.760.003.649	52.854.971.427
4	BLUD RS Pasar Rebo	43.435.873.339	-	43.435.873.339
5	BLUD RS Budhi Asih	21.242.849.700	5.378.702.900	26.621.552.600
6	BLUD RS Duren Sawit	3.892.954.489	-	3.892.954.489
	Jumlah	199.096.481.493	72.942.226.949	272.038.708.442

7) Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Saldo Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp664.800.000,00 dan Rp636.675.000,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

8) Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun

Saldo Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun per 31 Desember 2015 sebesar Rp22.873.000.481,00 adalah piutang sewa rumah susun yang masing-masing tercatat di BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I sebesar Rp11.361.478.169,00, BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II sebesar Rp1.230.225.416,00, dan BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III sebesar Rp10.281.296.896,00.

9) Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway

Saldo Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway per 31 Desember 2014 sebesar Rp21.819.501,00 adalah piutang atas kehilangan sebagian hasil penjualan tiket yang terjadi pada tahun 2007. Pada Tahun 2015 BLUD Pengelola Transjakarta Busway beralih menjadi Perseroan Terbatas maka piutangnya dialihkan pengelolaannya ke Dinas Perhubungan dan Transportasi.

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2015 dan 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp316.381.409.651,00 dan Rp228.358.262.800,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp40.002.354.569,00 dan Rp5.101.783.507,00. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Rincian Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	7.759.203	7.003.075
2	Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	112.175	112.175
3	Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452	-
4	Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	71.030.418
5	Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	26.797.727.992	-
6	Piutang BLUD RSUD dan RSKD	10.752.836.240	5.020.345.366
7	Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	127.500.000	3.183.375
8	Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun	1.501.069.897	-
9	Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	-	109.098
10	Piutang BLUD Pengelola ERP	109.098	-
	Jumlah	40.002.354.569	5.101.783.507

5.5.1.1.5.4 Piutang Dana Transfer

Piutang Dana Transfer Tahun Anggaran 2015 berasal dari saldo Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV TA 2015 untuk Provinsi DKI Jakarta yang belum diterima dari Kementerian

Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Direktorat Dana Perimbangan.

Jumlah alokasi bagi hasil Triwulan IV TA 2015 diatur dalam PMK Nomor 249/PMK.07/2015 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015, PMK Nomor 250/PMK.07/2015 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan PMK Nomor 259/PMK.07/2015 tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.

Penundaan dana transfer dari Kementerian Keuangan diatur dalam Surat Direktur Dana Perimbangan Nomor S.12/PK.2/2016 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 14 Januari 2016.

Selanjutnya, pagu Triwulan IV 2015 yang ditunda penyalurannya tersebut, akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dana bagi hasil pajak yang akan diusulkan untuk dapat dianggarkan dalam APBN/APBN Perubahan Tahun 2016 dan disalurkan ke daerah.

Piutang Dana Perimbangan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp5.459.274.194.651,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak – PBB Migas Rp36.170.485.500,00;
2. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak – Biaya Pemungutan PBB Migas Rp1.205.683.000,00;
3. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak – PPh Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25 dan Pasal 29 Rp374.463.240.550,00;
4. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak – PPh Pasal 21 Rp4.973.556.479.550,00;

5. Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – SDA Hutan Rp30.528.000,00; dan
6. Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – SDA Pertambangan Gas Bumi Rp73.847.778.051,00.

5.5.1.1.5.5 Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp17.103.762.096,00 dan Rp16.145.560.786,00.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR. Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah, yang belum diakui sebagai piutang.

Untuk kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penuntutan tercatat sebesar Rp11.563.606.646,00, untuk kasus pencatatan terdapat 5 kasus dengan nilai sebesar Rp48.596.576,00, kasus penghapusan sebanyak 6 kasus dengan nilai sebesar Rp34.341.525,00 dan informasi kerugian daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 561 kasus sebesar Rp147.190.288.587,00 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp122.905.374.226,00, sehingga sisa potensi kerugian menjadi sebesar Rp24.284.914.361,00.

Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 657 kasus sebesar Rp19.970.111.022,00 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp17.123.050.478,00, sehingga sisa kerugian menjadi sebesar Rp2.847.060.544,00.

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tak Tertagih

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp11.905.435.359,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.103.762.096,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tak Tertagih sebesar Rp5.198.326.737,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah Piutang (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Kasus Badan Peradilan	-	-	-	900.648.727	900.648.727
2	Kasus Kehilangan Mobil	-	72.410.425	119.100.000	493.534.514	685.044.939
3	Kasus Kehilangan Motor	-	-	10.600.000	12.755.625	23.355.625
4	Kasus Ketekoran Kas	10.777.084.641	-	1.702.051.701	1.304.399.600	13.783.535.942
5	Kasus Lain-lain	-	-	9.200.000	-	9.200.000
6	Kasus P3D	-	-	-	88.695.279	88.695.279
7	Kasus Walikota Jaksel	-	-	393.181.816	-	393.181.816
8	Kasus Wisma Jaya Raya	-	-	-	1.220.099.767	1.220.099.767
	Jumlah Piutang TGR (I)	10.777.086.641	72.410.425	2.234.133.517	4.020.133.513	17.103.762.096
	Persentase Penyisihan (II)	0.5%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II)	53.885.423	7.241.043	1.117.066.759	4.020.133.513	5.198.326.738
	Sisa Piutang	10.723.199.218	65.169.382	1.117.066.758	-	11.905.435.358

5.5.1.1.5.6 Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan

Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sama, yaitu sebesar Rp971.534.331,00.

Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas operasional yang diperkirakan dapat tertagih dalam jangka waktu 12 bulan.

Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan

Nilai Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat

direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp966.676.659,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp971.534.331,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tak Tertagih sebesar Rp4.857.672,00. Adapun Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan seluruhnya tergolong dalam kualitas piutang lancar, sehingga menggunakan persentase penyisihan sebesar 5%.

5.5.1.1.5.7 Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset

Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp20.501.789.384,00 dan Rp39.240.912.984,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Piutang Sewa Aset Daerah	14.536.718.693,00	14.604.440.458,00
2	Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset (BOT/BTO)	3.093.892.396,00	5.436.594.231,00
3	Piutang Titik Reklame	2.871.178.295,00	19.199.878.295,00
	Jumlah	20.501.789.384,00	39.240.912.984,00

Piutang sewa aset daerah merupakan hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.

Piutang kerjasama pemanfaatan aset merupakan hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Build, Operate, Transfer (BOT) atau Build, Transfer, Operate (BTO).

Piutang Titik Reklame merupakan hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.

Mutasi Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset tersaji pada lampiran 4.

Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih

Sejak tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan penyisihan piutang tak tertagih atas Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp19.908.345.706,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp20.501.789.384,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih sebesar Rp593.443.678,00. Nilai Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Sewa Aset Daerah	9.368.984.673	5.167.734.020	0	0	14.536.718.693
2	Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset (BOT/BTO)	3.093.892.396	0	0	0	3.093.892.396
3	Piutang Titik Reklame	2.871.178.295	0	0	0	2.871.178.295
	Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I)	15.334.055.364	5.167.734.020	0	0	20.501.789.384
	Persentase Penyisihan (II)	0,5%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II)	76.670.276	516.773.402	-	-	593.443.678
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	15.257.385.088	4.650.960.618	-	-	19.908.345.706

5.5.1.1.5.8 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp100.749.956.231,00 dan Rp100.518.114.851,00. Saldo

tersebut merupakan piutang atas pengenaan denda kepada mitra kerjasama yang terlambat memenuhi kewajibannya membayar uang sewa dan kontribusi.

Rincian saldo Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset – Sewa	13.888.569.863	12.252.109.999
2	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset – BOT/BTO	86.861.386.368	88.266.004.852
	JUMLAH	100.749.956.231	100.518.114.851

Mutasi Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset tersaji dalam lampiran 4.

Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Tak Tertagih

Sejak tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan penyisihan piutang tak tertagih atas Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp100.157.623.387,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp100.749.956.231,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Tak Tertagih sebesar Rp592.332.844,00.

5.5.1.1.5.9 Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN

Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp44.114.013.599,00 dan Rp46.499.582.131,00. Selama tahun 2015 terdapat penerimaan dari PT Bank DKI atas hasil tagih Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN sebesar Rp2.385.568.532,00, sehingga

nilai Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp44.114.013.599,00.

Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN tersebut timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN dengan nilai sebesar Rp205.509.066.572,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Pebruari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit ex BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

5.5.1.1.5.10 Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp3.674.517.300,00 dan Rp3.632.571.620,00.

Rincian piutang akrual bunga deposito Dana Cadangan Daerah di 4 (empat) rekening bank pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 5.31 berikut.

Tabel 5.31
Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan
Per 31 Desember 2015

(dalam rupiah)						
No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2016	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Bunga Akrual Des (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25- 00625-0	14-Dec-15	2.042.348.649
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25- 00666-7	25-Dec-15	55.676.748
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25- 00679-9	11-Dec-15	1.172.474.112
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25- 00680-2	16-Dec-15	404.017.791
Jumlah						3.674.517.300

Atas saldo Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut merupakan perhitungan akrual atas bunga deposito

per 31 Desember 2015, dimana seluruhnya telah diterima di Januari 2016 sesuai dengan tanggal jatuh tempo bunga deposito, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

5.5.1.1.5.11 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp847.774.593.344,00 dan Rp176.698.039.421,00 yang terdiri dari:

No.	JENIS PIUTANG LAINNYA	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1.	Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan	485.014.572	505.030.866
2.	Piutang Jasa Giro	-	480.390
2.	Piutang Bunga Deposito	11.850.068.493	31.465.205.480
3.	Piutang Sanksi Pajak	127.794.691.906	127.794.691.906
4.	Piutang Denda Retribusi	4.601.240.773	7.335.317.989
5.	Piutang Tunjangan	4.419.140.000	4.419.140.000
6.	Piutang Tagihan Listrik dan Air	-	2.290.167.270
7.	Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	1.675.259.235	2.095.480.363
8.	Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi	1.013.415.790	792.525.157
9.	Piutang Pendapatan Kompensasi Rusun	116.609.599.146	-
10.	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB	579.326.163.429	-
	Jumlah	847.774.593.344	176.698.039.421

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan

Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp485.014.572,00 dan Rp505.030.866,00.

Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp485.014.572,00 merupakan bagi hasil atas laba tahun buku 2014 milik BP THR Lokasari yang sudah ditetapkan melalui akta notaris hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Tahun 2015, namun sampai dengan 31 Desember 2015 belum disetor ke kas

daerah. Sedangkan saldo PiutangDividen/Kontribusi Perusahaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp505.030.866,00 merupakan piutang dividen BP THR Lokasari yang pada tahun 2015 sudah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp305.030.000,00. Rincian realisasi bagian laba BUMD dan PT Patungan selama tahun 2015 dapat dilihat pada CaLK nomor 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

b. Piutang Jasa Giro

Piutang Jasa Giro per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp480.390,00. Piutang Jasa Giro per 31 Desember 2014 merupakan hak jasa giro Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari 2 (dua) rekening deposito yang telah dicairkan pada tanggal 30 Desember 2014. Pada periode tahun 2015 jasa giro tersebut telah disetorkan oleh Bank DKI ke rekening Kas Daerah, sehingga Piutang Jasa Giro per 31 Desember 2015 menjadi nihil.

c. Piutang Bunga Deposito

Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp11.850.068.493,00 dan Rp31.465.205.480,00. Rincian Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.850.068.493,00 dapat dilihat pada tabel 5.32 berikut.

Tabel 5.32

Perhitungan Piutang Bunga Deposito

Per 31 Desember 2015

No	Nama Bank	No Rekening	Jatuh Tempo	Jangka Waktu Akrua		Suku Bunga	Nilai Deposito (Rp)	Piutang Bunga (Rp)
2	Bank DKI	101450	27-Jan-16	4	hari	7,75%	200.000.000.000	169.863.014
3	Bank DKI	150692	4-Jan-16	27	hari	7,75%	150.000.000.000	859.931.507
4	Bank DKI	101495	25-Jan-16	6	hari	7,75%	150.000.000.000	191.095.890
5	Bank DKI	101507	4-Jan-16	27	hari	7,75%	150.000.000.000	859.931.507
28	Bank BRI	0019-01-011142-40-0	04-Jan-16	27	hari	7,75%	400.000.000.000	2.293.150.685

No	Nama Bank	No Rekening	Jatuh Tempo	Jangka Waktu Akrua		Suku Bunga	Nilai Deposito (Rp)	Piutang Bunga (Rp)
31	Bank BRI	0019-01-011441-40-6	07-Jan-16	24	hari	7,75%	220.000.000.000	1.121.095.890
32	Bank BRI	0019-01-011682-40-0	05-Jan-16	26	hari	7,75%	180.000.000.000	993.698.630
35	Bank BRI	0019-01-012995-40-8	19-Jan-16	12	hari	7,75%	200.000.000.000	509.589.041
36	Bank BRI	0019-01-012994-40-2	19-Jan-16	12	hari	7,75%	300.000.000.000	764.383.562
38	Bank BRI	0019-01-013133-40-7	05-Jan-16	26	hari	7,75%	200.000.000.000	1.104.109.589
39	Bank Mandiri	103-02-0498971.5	20-Jan-16	11	hari	7,75%	100.000.000.000	233.561.644
40	Bank Mandiri	103-02-0499348.5	04-Jan-16	27	hari	7,75%	100.000.000.000	573.287.671
41	Bank Mandiri	103-02-0500880-4	01-Jan-16	30	hari	7,75%	55.000.000.000	350.342.466
42	Bank Mandiri	103-02-0503758-9	11-Jan-16	20	hari	7,75%	135.000.000.000	573.287.671
43	Bank Mandiri	103-02-0513092-1	01-Jan-16	30	hari	7,75%	100.000.000.000	636.986.301
44	Bank Mandiri	103-02-0517986-6	02-Jan-16	29	hari	7,75%	100.000.000.000	615.753.425
		JUMLAH					2.740.000.000.000	11.850.068.493

Atas saldo Piutang Bunga Deposito tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut merupakan perhitungan akrual atas bunga deposito per 31 Desember 2015, dimana seluruhnya telah diterima di Januari 2016 sesuai dengan tanggal jatuh tempo bunga deposito, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

d. Piutang Sanksi Pajak

Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sama yaitu sebesar Rp127.794.691.906,00. Dinas Pelayanan Pajak sedang melakukan inventarisasi kembali piutang sanksi pajak, sehingga belum ada perubahan atas saldo piutang sanksi pajak per 31 Desember 2014. Dinas Pelayanan Pajak belum mengelompokkan klasifikasi umur piutang (aging) sanksi pajak dan melakukan pencadangan piutang sanksi pajak tak tertagih. Piutang sanksi pajak per 31 Desember 2015 berdasarkan jenis pajak dan unit pemungutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	UNIT PEMUNGUT	JENIS PIUTANG SANKSI PAJAK												
		PBB-P2	REKLAME	RESTORAN	PAT	HIBURAN	HOTEL	PKB	BPHTB	PARKIR	PBB-KB	BBN-KB	PPJ	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (3+...+14)
1	Dinas Pelayanan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.118.331	-	18.191.136.978	19.491.255.309
2	Satuan Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT)	-	-	-	-	-	-	14.381.377.425	-	-	-	34.001.250	-	14.415.378.675
3	Suku Dinas Pelayanan Pajak Barat I	194.553.502	48.928.412	323.412.836	-	32.591.119	30.179.967	-	-	1.578.374	-	-	-	631.244.210
4	Suku Dinas Pelayanan Pajak Barat II	24.832.370.915	1.387.903.489	210.828.756	475.127.326	122.840.990	57.251.763	-	-	18.128.519	-	-	-	27.104.451.758
5	Suku Dinas Pelayanan Pajak Pusat I	3.210.674.671	22.564.613	4.848.113.030	159.747.000	161.016.797	1.276.061.519	-	2.678.262.524	19.994.870	-	-	-	12.376.435.024
6	Suku Dinas Pelayanan Pajak Pusat II	-	-	671.095.660	-	652.338.626	1.010.093.141	-	-	579.491.409	-	-	-	2.913.018.835
7	Suku Dinas Pelayanan Pajak Selatan I	-	67.635.780	221.347.864	-	22.726.408	40.247.755	-	519.610.597	-	-	-	-	871.568.404
8	Suku Dinas Pelayanan Pajak Selatan II	-	59.130	211.777.253	2.335.353	1.324.459.087	16.287.553	-	-	34.547.034	-	-	-	1.589.465.410
9	Suku Dinas Pelayanan Pajak Timur I	43.799.092.245	494.577.164	1.236.654	1.270.422.416	211.433.507	2.092.811	-	-	-	-	-	-	45.778.854.797
10	Suku Dinas Pelayanan Pajak Timur II	-	92.254.345	742.247.166	65.189.391	12.538.861	349.161.060	-	364.618.076	13.328.362	-	-	-	1.639.337.261
11	Suku Dinas Pelayanan Pajak Utara I	-	31.251.636	483.516.282	-	51.931.694	5.937.271	-	-	4.244.052	-	-	-	576.880.935
12	Suku Dinas Pelayanan Pajak Utara II	-	91.543.966	172.940.167	67.732.914	31.050.590	5.937.271	-	34.382.361	3.214.020	-	-	-	406.801.289
JUMLAH		72.036.691.332	2.236.718.535	7.886.515.667	2.040.554.400	2.622.927.680	2.793.250.111	14.381.377.425	3.596.873.558	674.526.640	1.300.118.331	34.001.250	18.191.136.978	127.794.691.906

e. Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp4.601.240.773,00 dan Rp7.335.317.989,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha	-	1.861.002.505
2	Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu	4.601.240.773	5.474.315.484
	Jumlah	4.601.240.773	7.335.317.989

Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp4.601.240.773,00 terdapat di SKPD Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp3.825.044.081,00 atas Denda Retribusi lebih debit air bawah tanah dan di SKPD Dinas Penataan Kota sebesar Rp719.693.217,00 atas Denda Retribusi Pengawasan Pembangunan, dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp56.503.475,00 atas Denda Retribusi Pengawasan Pembangunan dan Retribusi Izin Undang-undang Gangguan.

f. Piutang Tunjangan

Piutang Tunjangan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sama, yaitu sebesar

Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00 dan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.

g. Piutang Tagihan Listrik dan Air

Piutang Tagihan Listrik dan Air per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.290.167.270,00.

h. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.675.259.235,00 dan Rp2.095.480.363,00

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.675.259.235,00 merupakan kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara atas transaksi belanja yang dilakukan oleh SKPD. Nilai tersebut dapat dipindahbukukan atau dikompensasikan/diperhitungkan ke dalam kewajiban penyetoran pajak pada tahun 2016 sesuai dengan surat jawaban Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.

Rincian dari Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	397.670.892,00
2	Kantor Kepegawaian - Jaktim	13.266.515,00
3	Kota Administrasi Jakarta Selatan	453.024.193,00
4	Dinas Pendidikan	811.297.635,00
	Jumlah	1.675.259.235,00

Sedangkan saldo Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.095.480.363,00 merupakan piutang kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum untuk Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang yang telah dibayar pada tahun 2015.

i. Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi

Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.013.415.790,00 dan Rp792.525.157,00. Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi merupakan piutang atas pendapatan Bagi Hasil Premi Asuransi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012.

j. Piutang Sanksi SP3L

Piutang Sanksi SP3L per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp116.609.599.146,00.

Piutang Sanksi SP3L adalah piutang atas sanksi Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/ Lahan (SP3L) untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk uang sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002 tentang ketentuan perhitungan nilai kewajiban penyediaan bangunan rumah susun sederhana/murah yang dikonversi dengan dana oleh para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sanksi SP3L senilai Rp115.548.280.930,00, atas nilai tersebut telah diterima pembayaran di tahun 2015 sebesar Rp11.215.284.595,00. Disamping itu, terdapat juga piutang atas sanksi SP3L yang berasal dari penetapan sebelum tahun 2015, yaitu sebesar Rp12.276.602.807,00 dan telah dicatat sebagai koreksi ekuitas.

Dengan demikian, maka saldo Piutang Sanksi SP3L per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp116.609.599.146,00. Adapun nilai Piutang Sanksi SP3L tersebut tercatat pada Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Nilai Piutang Sanksi SP3L per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp113.496.196.362,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp116.609.599.146,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp3.113.402.784,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		Nilai Piutang	Penyisihan Piutang					Piutang Netto
		Nomor	Tanggal		Lancar	Kurang Lancar (Surat Teguran I)	Diragukan (Surat Teguran II)	Macet (Surat Teguran III)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6 = (0,5% x 5)	7 = (10% x 5)	8 = (50% x 5)	9 = (100% x 5)	10 = (6+7+8+9)	11 = (5-10)
1	PT Srinursamsu Tjiptaningrum	473/-1.711.534	09/04/2012	1.065.965.250	5.329.826	-	-	-	5.329.826	1.060.635.424
2	PT Indosiar Visual Mandiri	1247/-1.711.534	19/09/2012	3.016.202.027	-	301.620.203	-	-	301.620.203	2.714.581.824
3	Saudara Erdi Bachtiar	282/-1.711.534	11/03/2013	2.242.615.200	-	224.261.520	-	-	224.261.520	2.018.353.680
4	PT Graha Rayhan Tri Putra	2358/-1.711.534	29/09/2014	4.102.559.900	-	-	2.051.279.950	-	2.051.279.950	2.051.279.950
5	PT Trimex Sarana Trisula	4195/-1.711.534	08/12/2015	17.831.615.175	89.158.076	-	-	-	89.158.076	17.742.457.099
6	PT Zaman Bangun Perwita	4051/-1.711.534	26/10/2015	6.844.304.880	34.221.524	-	-	-	34.221.524	6.810.083.356
7	PT Sahid Inti Dinamika q.q Ny. Yuliah Sukamdani	4155/-1.711.534	19/11/2015	901.236.577	4.506.183	-	-	-	4.506.183	896.730.394
8	PT Sadini Arianda	3951/-1.711.534	30/09/2015	5.967.296.632	29.836.483	-	-	-	29.836.483	5.937.460.149
9	PT Aneka Sakti Bakti (PT Asaba)	4237/-1.711.534	17/12/2015	3.233.022.291	16.165.111	-	-	-	16.165.111	3.216.857.180
10	PT Djarum	4236/-1.711.534	17/12/2015	12.112.067.100	60.560.336	-	-	-	60.560.336	12.051.506.765
11	PT Duta Regency Karunia	4234/-1.711.534	17/12/2015	6.774.030.108	33.870.151	-	-	-	33.870.151	6.740.159.957
12	PT Sintesis Kreasi Bersama	4232/-1.711.534	17/12/2015	9.347.977.133	46.739.886	-	-	-	46.739.886	9.301.237.247
13	PT Wahana Karya Cemerlang	4235/-1.711.534	17/12/2015	550.777.500	2.753.888	-	-	-	2.753.888	548.023.613
14	PT Sentracakrawala Pusaka	920/-1.711.534	03/09/2015	6.904.105.909	34.520.530	-	-	-	34.520.530	6.869.585.379
15	PT Lestari Kirana Persada	174/-1.711.534	16/02/2015	2.937.992.400	14.689.962	-	-	-	14.689.962	2.923.302.438
16	PT Citra Mas Pertama	4247/-1.711.534	18/12/2015	32.777.831.064	163.889.155	-	-	-	163.889.155	32.613.941.909
Jumlah				116.609.599.146	536.241.110	525.881.723	2.051.279.950	-	3.113.402.783	113.496.196.363

k. Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan)

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp579.326.163.429,00, merupakan piutang atas PT. Mitra Panca Persada dalam bentuk penyediaan fasilitas publik berupa pembangunan *fly over* di kawasan semanggi. Merupakan akun tambahan/baru pada LKPD audited yang dicatat di Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) yang sejalan dengan tata ruang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 251

Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai KLB.

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp576.429.532.612,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp579.326.163.429,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp2.896.630.817,00.

5.5.1.1.6 Penyisihan Piutang Tak tertagih

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi telah diatur Kebijakan Akuntansi yang di dalamnya mengatur tentang penyisihan piutang tak tertagih. Tujuan dari penyisihan ini adalah agar piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net relizable value*).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2015 dan 2014 sebagaimana dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebelumnya, seluruhnya masing-masing sebesar Rp2.819.233.776.112,00 dan Rp2.604.153.666.109,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih	2.735.632.100.316	2.579.100.761.179
2	Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	22.518.014.465	9.943.467.597
3	Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih	40.002.354.569	5.101.783.507
4	Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tak Tertagih	5.198.326.738	5.175.429.900
5	Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	4.857.672	-
6	Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	593.443.678	-
7	Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	592.332.844	-
8	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lainnya	14.692.345.830	4.832.223.926
	Jumlah	2.819.233.776.112	2.604.153.666.109

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Pajak Tak tertagih sebesar Rp2.735.632.100.316,00 terdiri dari:

- a) Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.547.112.108,00;
- b) Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp186.711.910,00;
- c) Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp1.870.701.629,00;
- d) Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp41.969.850.401,00;
- e) Penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp9.813.638.292,00;
- f) Penyisihan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp65.890.159.837,00;
- g) Penyisihan Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp26.886.062.252,00;
- h) Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp33.739.336.882,00;
- i) Penyisihan Piutang Pajak Parkir sebesar Rp1.255.719.083,00;
- j) Penyisihan Piutang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp16.027.168.610,00; dan
- k) Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp2.531.445.639.312,00.

2. Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih sebesar Rp22.518.014.465,00 terdiri dari:

- a) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp792.491.386,00;
- b) Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp4.490.104.994,00; dan

- c) Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp17.235.418.085,00.
- 3. Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih sebesar Rp40.002.354.569,00 terdiri dari:
 - a) Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp7.759.203,00;
 - b) Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta sebesar Rp112.175,00;
 - c) Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perpustakaan sebesar Rp721.254.452,00
 - d) Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda sebesar Rp93.985.512,00;
 - e) Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung sebesar Rp26.797.727.992,00;
 - f) Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp10.752.836.240,00;
 - g) Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp127.500.000,00;
 - h) Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I sebesar Rp1.084.995.293,00;
 - i) Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II sebesar Rp35.175.269,00;
 - j) Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III sebesar Rp380.899.335,00; dan
 - k) Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway sebesar Rp109.098,00.
- 4. Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tak Tertagih sebesar Rp5.198.326.738,00;
- 5. Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan sebesar Rp4.857.672,00;
- 6. Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih sebesar Rp593.443.678,00;

7. Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Tak Tertagih sebesar Rp592.332.844,00;
8. Penyisihan Piutang Tak tertagih Lainnya sebesar Rp14.692.345.830,00 terdiri dari:
 - a) Penyisihan Piutang Denda Retribusi sebesar Rp4.260.820.891,00;
 - b) Penyisihan Piutang Tunjangan sebesar Rp4.419.140.000,00;
 - c) Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp2.351.338,00;
 - d) Penyisihan Piutang Sanksi SP3L sebesar Rp3.113.402.784,00; dan
 - e) Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB sebesar Rp2.896.630.817,00.

5.5.1.1.7 Aset Lancar Lainnya

Aset Lancar Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp158.298.034.978,00 dan Rp228.768.215.755,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Belanja Dibayar di Muka – Asuransi Dibayar di Muka	21.994.670.871,00	11.482.165.550,00
2	Belanja Dibayar di Muka – Sewa Dibayar di Muka	2.561.430.200,00	40.910.959,00
3	Uang Muka Kerja- Uang Muka Kerja di SKPD	133.414.843.537,00	217.008.616.905,00
4	Uang Muka Kerja- Uang Muka Kerja di BLUD	327.090.370,00	236.522.341.,00
Jumlah		158.298.034.978,00	228.768.215.755,00

Belanja Dibayar di Muka – Asuransi Dibayar di Muka sebesar Rp21.994.670.871,00 terdiri dari asuransi gedung dan kendaraan yang dikelola oleh BPKD sebesar Rp21.063.896.410,00, asuransi akibat bencana (tumbangnya pohon-pohon milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp590.833.334,00, dan

asuransi kendaraan parkir di Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan sebesar Rp339.941.127,00.

Belanja Dibayar di Muka – Sewa Dibayar di Muka sebesar Rp2.561.430.200,00 terdapat di Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp2.515.817.700,00 dan Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan sebesar Rp45.612.500,00.

Uang Muka Kerja di SKPD sebesar Rp133.414.843.537,00 terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp87.854.000.366,00 atas beberapa kegiatan di Bidang Jembatan, dan di Dinas Tata Air sebesar Rp45.560.843.171,00 atas kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Uang Muka Kerja di BLUD sebesar Rp327.090.370,00 terdapat di BLUD RS Tarakan sebesar Rp147.512.370,00 dan di BLUD RS Pasar Rebo sebesar Rp179.578.000,00.

Selain nilai piutang yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI masih memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga sebagai berikut :

1. Potensi penerimaan aset atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT). SIPPT diterbitkan sejak Tahun 1971 yang diberikan kepada Badan dan/atau Perusahaan Real Estate dan/atau perusahaan properti dan atau Developer dan/atau yayasan dan/atau Perorangan untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta.

Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya

- a. SIPPT yang tidak mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan aset fasos fasum

- b. SIPPT mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan aset fasos fasum
- c. SIPPT hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan aset fasos fasum

Jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2016 adalah sebanyak 2992 yang terdiri dari SIPPT efektif sebesar 2626

Sejak Tahun 2009 sampai dengan 2015 pemberian SIPPT harus dilengkapi dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pemegang SIPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah PPK yang telah diterbitkan sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebanyak 260 PPK. Dalam PPK tersebut diatur bentuk kewajiban yang harus diserahkan, waktu penyerahan dan jumlah luasan kewajiban yang harus diserahkan, tanpa menyebutkan nilai dalam satuan rupiah tertentu.

Sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima kewajiban dari pemegang SIPPT dan dicatat sebagai penerimaan fasos fasum dalam laporan operasional dan asetnya dicatat sebagai aset fasos fasum dalam kelompok aset lainnya untuk fasos fasum yang belum diserahkan sebagai aset tupoksi di SKPD sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan nomor 5.5.1.5.5

Dengan diterimanya aset fasos fasum tersebut masih terdapat potensi penerimaan aset dari para pemegang SIPPT yang belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan per 31 Desember 2015.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan pemenuhan kewajiban aset fasos fasum, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya perbaikan penatausahaan aset dalam rangka pengelolaan aset fasos fasum melalui:

- a. Kegiatan rekonsiliasi secara periodik atas pemenuhan aset fasos dan fasum, dilakukan dengan

membandingkan data jumlah SIPPT yang diterbitkan dengan jumlah kewajiban yang sudah diserahkan.

- b. Melakukan penagihan kepada Pengembang/pemilik SIPPT yang belum melakukan kewajibannya
- c. Melakukan identifikasi dan updating atas database Kewajiban fasos fasum
- d. Pengembangan Sistem Informasi terintegrasi yang dimulai dari penerbitan SIPPT sampai dengan pencatatan penerimaan aset fasos fasum.

Atas kewajiban SIPPT yang belum diserahkan ke Pemrop DKI Jakarta tersebut belum diakui dan dicatat di neraca, karena belum memenuhi kualifikasi untuk dicatat sebagai aset karena belum terdapat nilai yang pasti. Nilai aset baru diketahui secara pasti pada saat BAST sesuai dengan hasil appraisal yang dituangkan dalam BAST, serta tingkat ketertagihannya yang belum pasti.

Jumlah potensi penerimaan pemenuhan kewajiban fasos fasum yang belum diserahkan oleh pemegang SIPPT dalam bentuk tanah dengan menggunakan pendekatan nilai NJOP tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam temuan SPI BPK RI maka terdapat potensi penerimaan senilai Rp156.470.290.771.750,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kewajiban	Luas (m ²)	Nilai (Rp)	Persentase(%)
Marga Jalan	10.625.722	107.207.930.113.850	68,95
Penghijauan Taman	1.217.139	10.603.671.169.000	6,78
Penghijauan Taman Umum	1.942.569	7.099.323.921.500	4,54
Sarana Pendidikan	440.984	5.392.243.897.500	3,45
Lain-Lain	2.613.553	26.167.121.669.900	16,72
Total	16.844.967	156.470.290.771.750	100

Nilai tersebut diatas baru merupakan nilai potensi yang secara pasti baru dapat ditentukan pada saat berita acara serah terima fasos fasum ditandatangani yaitu sebesar nilai wajar yang tercantum dalam BAST, sehingga sangat

mungkin jumlahnya dapat berbeda dengan nilai potensi tersebut diatas.

2. Potensi penerimaan atas sanksi Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), yaitu :

- a. Sanksi SP3L adalah sanksi yang dikenakan kepada pihak ketiga yang membebaskan lahan lebih dari 5.000m² atau kurang dari 5.000m² namun berada di jalan protokol sebelum SP3L terbit, maka dikenakan sanksi SP3L, ketentuan ini diatur dalam SK Gubernur Nomor 640 Tahun 1992, kecuali yang terdapat dalam SK Gubernur Nomor 134 Tahun 2011 tentang Pengecualian Pengenaan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan.
- b. Bentuk kewajiban dari sanksi SP3L adalah :
 - 1) Membiayai dan membangun sampai siap huni Rumah Susun Murah (RSM) beserta. Fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat secara komersial yang lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 2) Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 3) Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- c. Kewajiban membangun RSM tersebut dapat dikonversi dalam bentuk satuan nilai uang sebagaimana diatur dalam SK Gub Nomor 1934 tahun 2002.
- d. Pemegang SIPPT yang terkena kewajiban berdasarkan SK Gubernur Nomor 540 Tahun 1990 sampai dengan

Desember 2015 adalah sebanyak 229 SIPPT. Sedangkan pemegang SIPPT yang terkena Sanksi SP3L berdasarkan SK Gubernur Nomor 640 Tahun 1992 sampai dengan Desember 2015 adalah sebanyak 514 SIPPT.

- e. Perhitungan nilai konversi dilakukan oleh Tim Perhitungan Nilai Konversi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1185 Tahun 2011. Tim telah melakukan proses konversi kewajiban dan sampai dengan posisi 31 Desember 2015, telah terbit Ijin Konversi sebanyak 87 Surat Persetujuan, dan yang telah menyelesaikan pembayaran sebanyak 73 Surat Persetujuan.
- f. Pada Tahun 2015 telah diterima ke Kas Daerah atas 34 Pemegang SIPPT senilai Rp210.771.385.078,00.
- g. Jumlah potensi atas ijin konversi yang belum diselesaikan pemegang SIPPT sebanyak 14 ijin konversi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp116.609.599.146,00.

5.5.1.1.8 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp750.543.243.114,00 dan Rp633.043.730.336,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2015 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan. Khusus persediaan obat-obatan pada BLUD RSUD dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2015 merupakan akumulasi jumlah persediaan yang tercatat pada Neraca SKPD, diantaranya adalah:

- a. Persediaan pada Dinas Perumahan Gedung dan Pemda sebesar Rp72.798.993.178,00.
- b. Persediaan pada Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp42.922.818.260,00 diantaranya komponen penerangan Jalan Umum di Dinas Perindustrian dan Sudin yang sudah tidak dimanfaatkan senilai Rp3.103.399.250,00.
- c. Persediaan pada Sudin Perindustrian dan Energi – Jaksel sebesar Rp37.039.744.673.
- d. Persediaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp23.954.389.800,00, diantaranya adalah alat tulis kantor, cetakan umum, dan alat listrik.
- e. Persediaan pada Sudin Perindustrian dan Energi – Jakut sebesar Rp23.702.612.694.
- f. Persediaan pada Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp23.503.623.539,00, diantaranya adalah alat tulis kantor, cetakan khusus, dan cetakan umum.
- g. Persediaan pada Unit Pengelolaan Anjungan dan Informasi sebesar Rp21.199.018.247,00.
- h. Persediaan pada Dinas Kebersihan sebesar Rp18.428.817.952,00, diantaranya adalah alat tulis kantor, alat kebersihan dan bahan pembersih, suku cadang kendaraan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan karena kendaraannya sudah tidak dipergunakan lagi di Dinas Kebersihan, Sudin Kebersihan Jakarta Pusat dan Jakarta Timur senilai Rp1.042.582.460,00.

Pada Neraca per 31 Desember 2015 terdapat persediaan ex UP Transjakarta yang belum diserahkan kepada Dinas Perhubungan senilai Rp1.781.634.780.

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 5.

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp22.508.090.659.786,00 dan Rp16.101.293.405.632,00.

5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kelompok pembiayaan, diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan yang dimanfaatkan secara bergulir. Adapun maksud dan tujuan dari penyediaan dan pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat kelurahan, meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan, dan menciptakan lapangan kerja.

Nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp897.187.591.237,00. Rekapitulasi Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2014 tergambar pada tabel 5.33.

Tabel 5.33
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2014

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2013)	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	885.873.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	0
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	0	11.314.522.622	11.314.522.622
IV	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III)	436.351.583.078	460.836.008.159	897.187.591.237
V	Saldo Kas dan Bank	983.012.914	330.224.578.136	331.207.591.050
VI	Dana di Pemanfaat	427.710.732.633	130.611.430.023	558.322.162.656
VII	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (V+VI)	428.693.745.547	460.836.008.159	889.529.753.706
VIII	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (IV-VII)	7.657.837.531	0	7.657.837.531

Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB)) untuk periode 2001 sampai dengan 2007, dan UPT Dana Bergulir untuk periode 2008 sampai dengan sekarang.

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh BPMPKB secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1561/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan PPMK Dalam Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003 sampai dengan 2007, mengatur bahwa pelaksanaan PPMK secara fungsional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang BPMPKB) Provinsi/Kotamadya/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan (Dewan Kelurahan).

Dalam pengelolaan dana bergulir PPMK terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Oleh sebab itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir PPMK, dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dibentuk UPT Dana Bergulir dibawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang secara khusus mengelola dan menyalurkan Dana Bina Ekonomi PPMK kepada

masyarakat. Sehingga sejak tahun 2008, pengelolaan dana bergulir tidak lagi ditangani oleh Dewan Kelurahan melalui koordinasi BPMPKB. Selain itu, dalam pengelolaan dana bergulir PPMK terdapat selisih sebesar Rp7.657.837.531,00 yang belum menjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Pada tahun 2015, nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir tercatat sama dengan saldo per 31 Desember 2015, yaitu sebesar Rp897.187.591.237,00. Tidak terdapat mutasi atas nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir selama tahun 2014, hanya saja terdapat pergerakan pada saldo Kas dan Bank di UPT Dana Bergulir karena adanya dana yang disalurkan dari UPT Dana bergulir ke KJK PEMK sebesar Rp4.863.000.000,00, serta terdapat dana yang dikembalikan dari KJK PEMK ke UPT Dana Bergulir sebesar Rp12.003.021.031,00, sehingga saldo Kas dan Bank di UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp123.471.408.992,40 dan saldo Dana di Pemanfaat menjadi sebesar Rp337.364.599.167,00 sebagaimana tersaji pada tabel 5.34.

Tabel 5.34
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2015

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2013)	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	885.873.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	0
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	0	11.314.522.622	11.314.522.622
IV	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III)	436.351.583.078	460.836.008.159	897.187.591.237
V	Saldo Kas dan Bank	983.012.914	337.364.599.167	338.347.612.081

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2013)	TOTAL
VI	Dana di Pemanfaat	427.710.732.633	123.471.408.992	551.182.141.625
VII	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (V+VI)	428.693.745.547	460.836.008.159	889.529.753.706
VIII	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (IV-VII)	7.657.837.531	0	7.657.837.531

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK periode 2001 sampai dengan 2007 di BPMPKB per 31 Desember 2015 sebesar Rp436.351.583.078,00, yaitu dana awal sebesar Rp560.895.943.615,00 dikurangi dana yang sudah dialihkan ke UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00. Pengalihan dana dari Bina Ekonomi PPMK ke rekening UPT Dana Bergulir tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dari Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana Bergulir PEMK.

Selama tahun 2015 tidak terdapat terdapat penambahan hasil penarikan dana di pemanfaat yang dikelola Bina Ekonomi PPMK, sehingga saldo kas dan bank di Bina Ekonomi PPMK tidak berbeda dengan tahun yang lalu, yaitu sebesar Rp983.012.914,00, dan sisa dana di pemanfaat Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2015 tetap sebesar Rp435.368.570.164,00, sebagaimana tersaji pada tabel 5.35.

Tabel 5.35

Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK BPMPKB
Per 31 Desember 2015

(dalam rupiah)			
No	Uraian	Jumlah	
1	Dana di Pemanfaat – Meninggal Dunia	Rp	4.387.726.959
2	Dana di Pemanfaat – Bangkrut	Rp	43.102.284.762
3	Dana di Pemanfaat – Pindah Alamat	Rp	8.415.019.717
4	Dana di Pemanfaat – Enggan Mengembalikan	Rp	331.596.449.381
5	Dana di Pemanfaat – Penyalahgunaan Pengelola	Rp	13.698.243.589
6	Data TidakLengkap/ Tidak Diketahui Pemanfaatnya	Rp	26.511.008.225
7	Saldo Belum Terjelaskan	Rp	7.657.837.531
Jumlah		Rp	435.368.570.164

Nilai investasi yang tercatat pada UPT Dana Bergulir periode 2008 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp460.836.008.159,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan alokasi 30% dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digulirkan kembali sebesar Rp11.314.522.622,00. Dari nilai investasi sebesar Rp460.836.008.159,00 tersebut, tercatat sebesar Rp123.471.408.992,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp337.364.599.167,00 merupakan saldo kas dan bank di UPT Dana Bergulir.

Pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2015 perihal Pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Nomor 246 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2015, saat ini UPT Dana Bergulir telah dihentikan operasionalnya dan dalam masa penyelesaian peralihan tugas.

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan kebijakan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih. Penyisihan ini dilakukan agar nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp487.325.068.059,00 dan Rp493.793.459.855,00, sehingga nilai bersih (*netto*) Dana Bergulir per 31 Desember 2015 dan 2014 menjadi sebesar Rp409.862.523.178,00 dan

Rp403.394.131.382,00. Adapun daftar umur Piutang Dana Bergulir dan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih berdasarkan dana yang masih ada di pemanfaat disajikan dalam tabel 5.36.

Tabel 5.36
Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Per 31 Desember 2015

No	Uraian	0-1 Tahun	1-2 Tahun	2-5 Tahun	> 5 Tahun	Akumulasi Penyisihan
		5%	10%	50%	100%	
I	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	22.127.750.071	11.203.953.667	80.988.482.952	10.231.222.302	124.551.408.992
II	Penyisihan	110.638.750	1.120.395.367	40.494.241.476	10.231.222.302	51.956.497.895
III	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK	0	0	0	435.368.570.164	435.368.570.164
IV	Penyisihan	0	0	0	435.368.570.164	435.368.570.164
V	Total Akumulasi Penyisihan Dana BergulirTakTertagih	110.638.750	1.120.395.367	40.494.241.476	445.599.792.466	487.325.068.059

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah.

Pada pembentukan perusahaan daerah dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan yang selanjutnya pemerintah menyertakan modalnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang disetorkan oleh pemerintah kedalam penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari peraturan daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp22.098.228.136.608,00 dan Rp15.697.899.274.250,00 dan dengan ikhtisar perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah dalam lampiran 6.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 metode yaitu:

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ringkasan penjelasan investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode ekuitas dan metode biaya.

a. Investasi dengan Metode Ekuitas

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp21.756.966.959.608,00 dan Rp15.356.638.097.250,00. Dengan rincian dalam tabel 5.37 sebagai berikut:

Tabel 5.37
Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

No.	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2015 Nilai Investasi (Rp)	31 Desember 2014 Nilai Investasi (Rp)
1	2	4	5	6
Perusahaan Daerah (BUMD)				
1.	PDAM Jaya	100%	0	0
2.	PD Dharma Jaya	100%	70.432.916.065,00	31.290.376.574,00
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	100%	1.046.058.060.401,00	996.313.841.000,00
4.	PD Pasar Jaya	100%	509.599.788.856,00	546.145.326.811,00
5.	PD PAL Jaya	100%	516.175.438.571,00	435.957.138.720,00
	Jumlah		2.142.266.203.893,00	2.009.706.683.105,00
PT Patungan				
1.	PT Pembangunan Jaya	38,80%	1.942.067.255.754,00	1.619.697.432.096,00
2.	PT Food Station Tjipinang	74,67%	49.234.489.310,00	51.784.025.304,00
3.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	161.799.741.564,00	151.413.977.298,00
4.	PT Delta Djakarta, Tbk.	26,25%	222.250.087.306,00	198.713.889.941,00
5.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.	72,00%	1.211.045.540.918,00	1.093.370.327.584,00
6.	PT Ratax Armada	28,00%	0,00	26.323.830,00
7.	PT Jakarta Propertindo	99,98%	4.322.661.011.016,00	2.836.036.293.236,00
8.	PT Bank DKI Jakarta	99,97%	5.884.333.774.627,00	4.355.118.692.024,00
9.	PT Jakarta Tourisindo	99,35%	484.300.436.222,00	484.908.999.744,00
10.	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,97%	3.759.293.639.511,00	1.807.668.373.052,00
11.	PT Transportasi Jakarta	99,36%	1.481.923.171.895,00	693.537.815.322,00
12.	PT Penjamin Kredit Daerah	95,00%	95.791.607.592,00	54.655.264.714,00
	Jumlah		19.614.700.755.715,00	13.346.931.414.145,00
	Jumlah PMP dengan Metode Ekuitas		21.756.966.959.608,00	15.356.638.097.250,00

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) PDAM Jaya

Investasi pada PDAM disajikan sebesar nol rupiah karena PDAM memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PDAM Unaudited tahun 2015 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp1.222.200.913.567,00.

PDAM Jaya tahun 2015 menyetorkan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp22.810.000.000,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3. Selain itu, terdapat mutasi tambah saldo investasi sebesar Rp22.810.000.000,00 sehingga saldo investasi menjadi nihil, diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional.

2) PD Dharma Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2013, yaitu sebesar Rp31.290.376.574,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp39.142.539.491,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang sebesar Rp4.487.794.650,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2014 pada Laporan Keuangan PD Dharma Jaya *Unaudited* 2015;
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp46.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Dharma Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2701 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Dharma Jaya Tahun Anggaran 2015. Adapun penyertaan modal kepada PD Dharma Jaya tahun 2015 diberikan dalam rangka pembibitan dan penggemukan sapi di Nusa Tenggara Timur, pembangunan Tempat Penampungan dan Pemetongan Ayam (TPNA dan TPA) dan alat produksi lainnya, revitalisasi alat produksi dan pengembangan usaha, serta perbaikan manajemen, siste, dan infrastruktur; dan

c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp2.369.665.859,00 yang merupakan pengumuman rugi PD Dharma Jaya Tahun 2015 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2015. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp70.432.916.065,00.

3) PD Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2014, yaitu sebesar Rp996.313.841.000,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp49.744.219.401,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp16.506.318.355,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2014 pada Laporan Keuangan PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi) *Audited* 2015;

b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp79.332.405.154,00 yang merupakan pengumuman laba PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2015 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) *Audited* 2015. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;

c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp17.431.388.498,00 yang merupakan penyetoran

dividen PD Pembangunan Sarana Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 969 tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1; dan

- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp28.663.115.610,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2015, yaitu berupa kewajiban imbalan kerja, jasa produksi, dana sosial dan dana pensiun.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp1.046.058.060.401,00.

4) PD Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2014, yaitu sebesar Rp546.145.326.811,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp36.545.537.955,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp25.882.484.537,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2014 setelah disajikan kembali pada Laporan Keuangan PD Pasar Jaya *Audited* 2015;
- d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp70.050.447.686,00 yang merupakan pengumuman laba PD Pasar Jaya Tahun 2015 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2015. Pengumuman laba

ini juga diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;

- e. terdapat mutasi tambah sebesar Rp51.619.600,00 untuk mengakui pendapatan lain-lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PD Pasar Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2015, yaitu berupa koreksi saldo laba;
- f. terdapat mutasi kurang sebesar Rp30.578.225.355,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1833 tahun 2015 tanggal 4 September 2015, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1; dan
- g. terdapat mutasi kurang sebesar Rp50.186.895.349,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Pasar Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2015, yaitu berupa dana cadangan DLU, cadangan DHT, cadangan jasa produksi, dan pembinaan lingkungan dan sosial.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp509.599.788.856,00.

5) PD PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2014, yaitu sebesar Rp435.957.138.720,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp80.218.299.851,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp70.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD PAL Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2782 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PD Pal Jaya Tahun Anggaran 2015. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka percepatan layanan pengelolaan air limbah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp29.967.921.193,00 yang merupakan pengumuman laba PD PAL Jaya Tahun 2015 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2015. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.788.089.210,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2015, yaitu berupa bunga deposito dan jasa giro cadangan umum dan koreksi pembukuan;
- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp11.489.785.335,00 yang merupakan penyetoran dividen PD PAL Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1149 tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1; dan
- e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp10.047.925.217,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2015, yaitu berupa

pembayaran jasa produksi dan pembentukan dana pensiun, pendidikan dan sosial.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp516.175.438.571,00.

6) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2014, yaitu sebesar Rp1.619.697.432.096,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp322.369.823.658,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp3.727.281.172,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2014 setelah disajikan kembali pada Laporan Keuangan PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi) *Audited* 2015;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp325.873.182.693,00 yang merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Tahun 2015 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) *Audited* 2015, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 38,80%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah sebesar Rp21.496.132.457,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambahan ekuitas PT Pembangunan Jaya berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) *Audited* 2015, yaitu berupa

penyesuaian efek dilusi yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian pada entitas anak;

d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp19.600.000.000,00 merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 12 Juni 2015, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Pembangunan Jaya atas tahun buku 2014 adalah sebesar Rp19.600.000.000,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 10 Juli 2015, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1; dan

e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp9.126.772.664,000 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas berupa dividen yang dibagikan kepada pemilik saham seri C berdasarkan Laporan Keuangan PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi) Audited 2015.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp1.942.067.255.754,00.

7) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2014, yaitu sebesar Rp51.784.025.304,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp2.549.535.994,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp4.497.896.485,00 yang merupakan pengumuman laba PT Food Station Tjipinang Tahun 2015 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2015, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 74,67%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp156.170.568,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang merupakan bagian dividen untuk swasta yang telah ditetapkan di RUPS;
- c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp5.577.520.286,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 7 Juli 2015, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Food Station Tjipinang atas tahun buku 2014 adalah sebesar Rp5.577.520.286,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 20 November 2015, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1; dan
- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.626.082.761,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Food Station Tjipinang berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2015, yaitu berupa tantiem pengurus, bonus karyawan, dan pajak dividen.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp49.234.489.310,00.

8) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2014, yaitu sebesar Rp151.413.977.298,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp10.385.764.266,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp10.736.085.904,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2014 setelah disajikan kembali pada Laporan Keuangan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Audited 2015;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp28.536.349.778,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2015 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2015, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp6.385.101.177,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang

- dituangkan dalam akta notaris tanggal 7 Juli 2015, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) atas tahun buku 2014 adalah sebesar Rp6.385.101.177,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 31 Juli 2015, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1; dan
- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.029.398.431,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2015, yaitu berupa pendapatan komprehensif lainnya dan dana program PKBL/ *Corporate Social Responsibility*.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp161.799.741.564,00.

9) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2014, yaitu sebesar Rp198.713.889.941,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp23.536.197.365,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp1.074.565.389,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2014 setelah disajikan kembali pada Laporan Keuangan PT Delta Djakarta (Konsolidasi) Audited 2015;

- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp50.007.191.790,00 yang merupakan pengumuman laba PT Delta Djakarta Tahun 2015 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2015, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 26,25%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp25.224.084.000,00 merupakan penyetoran dividen PT Delta Djakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 11 Juni 2015, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Delta Djakarta atas tahun buku 2014 adalah sebesar Rp25.224.084.000,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 22 Juli 2015, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1; dan
- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp172.345.036,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Delta Djakarta berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2015, yaitu berupa pendapatan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp222.250.087.306,00.

10) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2014, yaitu sebesar Rp1.093.370.327.584,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp117.675.213.334,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp16.856.409.274,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2014 setelah disajikan kembali pada Laporan Keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol (Konsolidasi) Audited 2015;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp209.419.611.673,00 yang merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Ancol 2015 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2015, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 72,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp74.879.999.935,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya Ancol kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 8 Juni 2015, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Pembangunan Jaya Ancol atas tahun buku 2014 adalah sebesar Rp74.879.999.935,00. Adapun

dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 9 September 2015, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1; dan

- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp7.989.130,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2015, yaitu berupa pendapatan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp1.211.045.540.918,00.

11) PT Ratax Armada

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Ratax Armada dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2013, yaitu sebesar Rp26.323.830,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp26.323.830,00 terjadi karena Laporan Keuangan PT Ratax Armada Unaudited tahun 2014 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.594.253,00, sehingga nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah. Atas mutasi kurang tersebut diakui sebagai koreksi akuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

12) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2014, yaitu sebesar

Rp2.836.036.293.236,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp1.486.624.717.780,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp44.821.243,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2014 pada Laporan Keuangan PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi) Unaudited 2015;
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.500.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2698 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2015. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka investasi pada proyek properti, infrastruktur, utilitas serta pengembangan bisnis PT Jakarta Propertindo;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp19.602.156.480,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Propertindo 2015 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Unaudited 2015, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;
- d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp67.382.543,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan; dan

- e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp33.000.000.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Propertindo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 23 Juni 2015, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Jakarta Propertindo atas tahun buku 2014 adalah sebesar Rp33.000.000.000,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 21 September 2015, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp4.322.661.011.016,00.

13) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2014, yaitu sebesar Rp4.355.118.692.024,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp1.529.215.082.603,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp14.997.881.547,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2014 setelah disajikan kembali pada Laporan Keuangan PT Bank DKI Jakarta Audited 2015;
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 merupakan tambahan

penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Bank DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2783 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank DKI Tahun Anggaran 2015. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka memperkuat modal PT Bank DKI untuk menjaga rasio kecukupan modal (CAR), ekspansi kredit, pengembangan jaringan layanan, penyempurnaan teknologi informatika (*core banking system*) dan pertumbuhan *un-organic*;

- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp231.741.035.201,00 yang merupakan pengumuman laba PT Bank DKI Jakarta 2015 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2015, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,97%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;
- d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp110.396.249,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan dan diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;
- e. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp847.284.414.724,00 yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2015, yaitu berupa kenaikan revaluasi aset tetap dan pengukuran kembali imbalan pasti, dan diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;
- f. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp263.121.040.000,00 yang merupakan penyetoran

dividen PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 10 April 2015, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Bank DKI Jakarta atas tahun buku 2014 adalah sebesar Rp263.121.040.000,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 7 Desember 2015, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1; dan

g. terdapat mutasi kurang sebesar Rp271.801.842.024,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2015, yaitu berupa rugi komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp5.884.333.774.627,00.

14) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2014, yaitu sebesar Rp484.908.999.744,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp608.563.522,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp1.341.071.634,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Tourisindo Tahun 2015 berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2015, dikalikan

dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,35%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;

- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp75.895,00 yang merupakan penyesuaian nilai investasi per 31 Desember 2015 sesuai dengan nilai ekuitas PT Jakarta Tourisindo yang tercantum dalam Laporan Keuangan Audited tahun 2015;
- c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp1.800.000.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Tourisindo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 7 Mei 2015, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Jakarta Tourisindo atas tahun buku 2014 adalah sebesar Rp1.800.000.000,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 4 Juni 2015, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1; dan
- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp149.711.051,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Jakarta Tourisindo Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2015, yaitu berupa biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp484.300.436.222,00.

15) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2014, yaitu sebesar Rp1.807.668.373.052,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp1.951.625.266.459,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp1.028.004.184,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2014 setelah disajikan kembali pada Laporan Keuangan PT Mass Rapid Transit Jakarta Audited 2015;
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.015.093.824.789,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta yang bersumber dari APBD sebesar Rp145.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2700 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun Anggaran 2015, dan bersumber dari pendapatan dana hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp1.870.093.824.789,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 5.1.4. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka penambahan modal kerja;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp561.079.308,00 merupakan pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2015, yaitu pendapatan komprehensif lainnya;

- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp62.741.444.234,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2015 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited tahun 2015, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,97%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional; dan
- e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp260.189.220,00 merupakan penyesuaian nilai investasi per 31 Desember 2015 sesuai dengan nilai ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta yang tercantum dalam Laporan Keuangan Audited tahun 2015.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp3.759.293.639.511,00.

16) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2014, yaitu sebesar Rp693.537.815.322,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp788.385.356.573,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp768.832.832,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2014 setelah disajikan kembali pada

Laporan Keuangan PT Transportasi Jakarta Jakarta Audited 2015;

- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp700.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2699 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Transportasi Jakarta Tahun Anggaran 2015. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem pendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT), pengadaan bus tingkat kawasan Electronic Road Pricing (ERP) dan cadangan likuiditas;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp93.592.878.180,00 yang merupakan pengumuman laba PT Transportasi Jakarta Tahun 2015 berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2015, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,36%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional;
- d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp74.528.505,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Transportasi Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2015, yaitu berupa pendapatan komprehensif lainnya; dan
- e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp4.513.217.280,00 yang merupakan penyesuaian nilai investasi per 31 Desember 2015 sesuai dengan nilai ekuitas PT Transportasi Jakarta yang tercantum dalam Laporan Keuangan Audited tahun 2015.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp1.481.923.171.895,00. Nilai investasi pada PT Transportasi Jakarta tersebut belum termasuk aset eks UP Transjakarta yang masih dalam proses inbreng dan dicatat pada Laporan Keuangan Dinas Perhubungan.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta, saat ini tengah dilakukan penilaian kembali atas aset eks UP Trans Jakarta oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bis Trans Jakarta, halte Trans Jakarta, dan aset lainnya berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas operasional dan perlengkapan/inventaris kantor. Adapun tujuan dari penilaian kembali aset adalah untuk menjamin keterandalan nilai aset yang akan dijadikan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Transportasi Jakarta.

17) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2014, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2014, yaitu sebesar Rp54.655.264.714,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp41.136.342.878,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp40.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Penjamin Kredit Daerah sesuai dengan

Keputusan Gubernur Nomor 2744 Tahun 2015 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Penjamin kredit Daerah Tahun Anggaran 2015. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka membantu akses permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang belum memenuhi persyaratan bank secara teknis, disamping pula untuk meningkatkan layanan perbankan serta mengantisipasi risiko kredit;

- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp761.342.878,00 yang merupakan pengumuman laba PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2015 berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2015, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 95,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Operasional; dan
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp375.000.000,00 yang merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp95.791.607.592,00.

Penilaian penyertaan modal yang menggunakan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan 20% sampai 50% yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%), PT Pembangunan Jaya (konsolidasi) (38,80%), PT Delta Jakarta Tbk (26,25%), dan PT Ratax Armada (28,00%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki

tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee.
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

b. Investasi dengan Metode Biaya

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sama, yaitu sebesar Rp341.261.177.000,00, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel 5.38.

Tabel 5.38
Penyertaan Modal dengan Metode Biaya
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Nama	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1.	PT Kawasan Berikat Nusantara	26,85%	209.692.695.000,00	209.692.695.000,00
2.	PT Cemani Toka	27,42%	27.059.360.000,00	27.059.360.000,00
3.	PT Pakuan International	1,94%	1.345.900.000,00	1.345.900.000,00
4.	PT Grahasahari Suryajaya	8,08%	3.951.000.000,00	3.951.000.000,00
5.	PT Asuransi Bangun Askrida	5,99%	8.680.000.000,00	8.680.000.000,00
6.	PT Jakarta International Expo	13,14%	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
7.	PT Rumah Sakit Haji Jakarta	51,00%	51.157.222.000,00	51.157.222.000,00
Jumlah PMP dengan Metode Biaya			341.261.177.000,00	341.261.177.000,00

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan Investasi yang menggunakan metode biaya:

- 1) Penilaian penyertaan modal menggunakan metode biaya dengan persentase kepemilikan diatas 20% yaitu pada PT Cemani Toka (27,42%) dan PT Kawasan Berikat

Nusantara (26,85%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki tingkat pengaruh yang signifikan pada perusahaan tersebut.

- 2) Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas saham PT RS Haji Jakarta sebesar 51% sesuai dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 73 tanggal 14 Desember 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT RS Haji Jakarta.

Penilaian penyertaan pada PT RS Haji Jakarta menggunakan metode biaya. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan masih dalam sengketa.

Sengketa tersebut terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan pergantian Direksi PT Rumah Sakit Haji Jakarta antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang 51% saham dan Kementerian Agama RI/Badan Pengelola Dana Abadi Umat selaku pemegang 42% saham. Sisa Kepemilikan 7% saham pada PT RS Haji Jakarta oleh Kopkar RS Haji Jakarta (Kopkar Usaha Pratama) selaku pemegang 6% saham dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (a.n Drs. H. Mubarak) selaku pemegang 1% saham. Sejak adanya sengketa di PT RS Haji Jakarta maka RS Haji Jakarta untuk sementara dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI dengan menunjuk dr. Mulya A. Hasjmy, dkk berdasarkan Surat Tugas Nomor 334/Menkes/IV/2008 tanggal 4 April 2008 dan secara *de facto* PT RS Haji Jakarta dalam keadaan tidak aktif.

Status kepemilikan PT RS Haji Jakarta saat ini masih dalam upaya penyelesaian permasalahan Badan Hukum dan Kelembagaan PT RS Haji Jakarta. Pada tanggal 12 Mei 2013, melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan:

- a) Mahkamah Agung RI Nomor 1177/K/Pdt/2011 Tanggal 23 Agustus 2011;
- b) Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 450/Pdt/2009/PTDKI Tanggal 13 Agustus 2010;
- c) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2009.

Namun sampai saat ini belum ada putusan atas Peninjauan Kembali tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kesepakatan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menghibahkan seluruh saham RS Haji Jakarta milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (51%) dengan nilai buku Rp51.157.222.000,00 kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dijadikan Teaching Hospital UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengajuan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Gubernur Nomor 44/-1.822.4 tanggal 17 Januari 2014. Adapun pengajuan permohonan tersebut telah dijawab oleh Ketua DPRD melalui surat nomor 35/-1.822.4 pada tanggal 14 Januari 2016 yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya dapat menyetujui untuk menghibahkan saham sebesar 51% milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di RS Haji Jakarta kepada Kementerian Agama RI dengan didahului Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 desember 2014 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Tanah	284.068.689.312.488	273.519.641.092.661
2	Peralatan dan Mesin	18.986.813.894.851	17.190.097.083.385
3	Gedung dan Bangunan	24.169.792.568.590	17.384.759.492.812
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	32.306.882.017.848	29.731.234.210.492
5	Aset Tetap Lainnya	1.422.710.645.797	1.361.719.093.920
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.629.578.816.582	2.795.093.551.102
	Jumlah	363.584.467.256.156	341.982.544.524.372

Daftar mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2015 tersaji pada lampiran 7.

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2015 dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp49.655.729.118.282,00 yang terdiri dari:

1. Tanah	Rp	31.213.169.202.962 ,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	3.166.866.627.994,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	9.817.780.922.058,00
4. Jalan. Irigasi dan Jaringan	Rp	3.707.237.465.081,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	155.157.192.858,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp	1.595.517.707.329,00
P Jumlah	Rp	49.655.729.118.282,00

Penambahan aset tetap selama Tahun Anggaran 2015 diperoleh dari:

- i. Penambahan aset tetap dari Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp10.244.016.709.208,00 terdiri dari:

1. Tanah	Rp	3.451.775.763.772,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	2.002.190.574.946,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	2.063.978.323.661,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.685.243.694.385,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	40.828.352.444,00
Jumlah	Rp	10.244.016.709.208,00

Penambahan aset tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanah, diantaranya terdapat di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp1.116.883.455.000,00, Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp1.093.936.509.501,00 dan Dinas Tata Air sebesar Rp827.278.912.044,00
2. Peralatan dan Mesin, di antaranya terdapat di Dinas Kebersihan sebesar Rp623.821.118.092,00, RSUD Pasar Minggu sebesar Rp164.467.847.882,00 dan Pusat Penyimpanan Barang Daerah sebesar Rp116.991.946.080,00.
3. Gedung dan Bangunan, di antaranya terdapat di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp617.793.700.138,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp418.393.231.568,00. Dan Dinas Kesehatan sebesar Rp207.112.200.000,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp1.579.706.212.783,00, Dinas Tata Air sebesar Rp217.003.303.173,00 dan

Sudin Bina Marga Jakarta Utara sebesar Rp148.237.655.281,00.

5. Aset Tetap Lainnya, di antaranya terdapat di Dinas Pertamanan dan pemakaman sebesar Rp7.685.804.462,00, Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat sebesar Rp7.549.701.426 dan Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur sebesar Rp4.545.195.502,00

- j. Penambahan Aset Tetap dari Kapitalisasi Non Belanja Modal sebesar Rp800.565.243.723,00 berasal dari

1. Tanah	Rp	547.404.410,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	14.541.796.348,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	72.824.106.078,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	712.623.336.887,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	24.200.000,00
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	4.400.000,00
Jumlah	Rp	800.565.243.723,00

Penambahan aset tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanah, diantaranya terdapat di Dinas Perumahan dan gedung Pemda sebesar Rp374.217.410,00, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp120.285.000,00 dan Dinas perhubungan dan Transportasi sebesar Rp47.322.000,00
2. Peralatan dan Mesin, di antaranya terdapat di Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan Jakarta Timur sebesar Rp2.813.844.000,00, Dinas Kebersihan sebesar Rp2.253.162.612,00 dan Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp1.562.808.830,00
3. Gedung dan Bangunan, di antaranya terdapat di Dinas Perumahan dan Gedung pemda sebesar

Rp16.250.477.895,00, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Pusat Promosi UMKM sebesar Rp11.688.715.100,00 dan Dinas Pendidikan Rp9.288.331.615,00.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, di antaranya terdapat di, Dinas Bina Marga sebesar Rp296.700.361.228,00 , Sudin Bina Marga Jaksel sebesar Rp115.791.311.632,00 dan Sudin Bina Marga Jakarta barat sebesar Rp83.119.406.455,00
 5. Aset Tetap Lainnya, terdapat di PBSI Bangun Daya 1 sebesar Rp24.200.000,00
 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdapat di Dinas olah Raga dan Pemuda sebesar Rp4.400.000,00
- k. Penambahan Aset Tetap dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.924.892.409,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	2.536.832.318,00
2. Aset Tetap Lainnya	Rp	7.388.060.091,00
Jumlah	Rp	9.924.892.409,00

1. Peralatan dan Mesin antara lain terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp760.092.000,00 hibah dari Kementerian Kesehatan, Pusat Penyimpanan barang sebesar Rp360.400.000,00 dan Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp264.660.000,00
2. Aset Tetap Lainnya, terdapat di Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebesar Rp7.385.560.091,00 dan PSBN Cahaya Bathin sebesar Rp2.500.000,00

Aset hibah tersebut belum termasuk Aset Tetap Tanah serta Gedung dan Bangunan dari Kepolisian RI kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperuntukan

sebagai Depo Lansir MRT. Aset hibah terdiri atas tanah seluas 8.518 m² dengan sertifikat nomor 230, tanah seluas 6.221 m² dengan sertifikat nomor 231 dan bangunan seluas 1.660 m² yang terletak di Jalan Ciputat Raya No. 41, Lebak Bulus, Cilandak. Hibah tersebut dituangkan dalam BAST Sementara No. BA/1718/XI/2012/SSARPRAS dan BAST Sementara No. 4450/-076.25 tanggal 21 November 2012 sementara Berita Acara Serah Terima Aset Definitif masih menunggu selesainya surat persetujuan hibah dari Menteri Keuangan RI.

- I. Penambahan Kurang Catat Transfer Antar SKPD sebelum tahun 2015 sebesar Rp15.022.324.923,00. Penambahan tersebut merupakan koreksi pencatatan pada SKPD/UKPD atas aset tetap yang sudah dicatat sebagai transfer keluar di SKPD/UKPD lain sebelum tahun 2015. Rincian penambahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peralatan dan Mesin	Rp	9.531.291.397,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	5.475.083.526,00
3. Aset Tetap Lainnya	Rp	15.950.000,00
Jumlah	Rp	<u>15.022.324.923,00</u>

Penambahan Aset Tetap Kurang Catat Transfer Antar SKPD sebelum tahun 2015 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat di Pusat Penyimpanan Barang Daerah sebesar Rp3.355.867.500,00, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp1.328.310.590,00 dan di Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan sebesar Rp880.875.120,00

2. Gedung dan Bangunan, terdapat di Kelurahan Cikoko sebesar Rp5.475.083.526,00
 3. Aset Tetap Lainnya, terdapat di Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat sebesar Rp15.950.000,00
- m. Penambahan Aset Tetap karena Transfer antar SKPD sebesar Rp24.007.870.026.414,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah	Rp	20.459.311.249.060,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	1.069.938.887.025,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	2.283.999.184.257,00
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	130.148.139.527,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	64.472.566.545,00
Jumlah		Rp 24.007.870.026.414,00

Penambahan Aset Tetap dari transfer antar SKPD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanah, diantaranya terdapat di Kantor Pengelola Kawanan Monas sebesar Rp19.639.023.950.000,00 Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebesar Rp254.639.052.000,00 dan di Kantor Pengelolaan Aset Daerah Jakarta Utara sebesar Rp243.154.750.000,00
2. Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat di Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebesar Rp104.894.714.239,00, sebesar Sudin Kebersihan Jakarta Timur sebesar Rp73.704.734.048 dan di Sudin Kebersihan Jakarta Selatan sebesar Rp68.244.688.562,00
3. Gedung dan Bangunan, diantaranya terdapat di Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebesar Rp817.254.974.339,00, RSUD Pasar Minggu sebesar Rp357.450.898.040,00 dan di

Kantor Pengelolaan Aset Jakarta Pusat sebesar Rp206.959.950.766,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, diantaranya terdapat di Kantor Pengelola Kawasan Monas sebesar Rp98.565.058.292,00, Sudin Tata Air - Kep. Seribu sebesar Rp14.084.134.520,00 dan di Dinas Tata Air sebesar Rp8.431.343.616,00
 5. Aset Tetap Lainnya, diantaranya terdapat di Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebesar Rp24.679.823.018,00, Kantor Pengelolaan Monas sebesar Rp11.454.634.464,00 dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta pusat sebesar 10.356.547.979,00
- n. Penambahan Aset Tetap dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp39.452.322.112,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	6.263.516.930,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	1.680.943.814,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	27.439.627.006,00
4. Jalan, jaringan dan Instalasi	Rp	540.009,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	2,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	4.067.694.351,00
Jumlah	Rp	39.452.322.112,00

Penambahan Aset Tetap dari Koreksi Kurang Catat Nilai tersebut diantaranya terdapat pada :

1. Tanah, terdapat di Dinas Perhubungan dan Transportasi sebesar Rp3.242.568.930,00, Badan Pegelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.919.000.000,00 dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp101.948.000,00.
2. Peralatan dan Mesin, antara lain terdapat di BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat sebesar Rp1.393.810.206,00, Kantor Keluarga Berencana –

Jaktim sebesar Rp230.024.560,00, Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta sebesar Rp42.159.386,00

3. Gedung dan Bangunan, antara lain terdapat di Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebesar Rp25.024.644.850,00, Sudin Pendidikan II Jakarta Timur sebesar Rp1.459.529.750,00 dan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp433.564.634,00.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdapat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp540.000,00 dan di Sudin Perhubungan – Kep. Seribu sebesar Rp9,00
5. Aset Tetap Lainnya, terdapat di Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta sebesar Rp2,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp2.500.770.579,00, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp1.535.102.860,00, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp20.482.000,00 dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Rp11.338.900,00
- g. Penambahan Aset Tetap dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp844.175.028.311,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	781.094.738.000,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	10.966.720.507,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	47.380.934.000,00
4. Aset Tetap Lainnya	Rp	4.732.635.804,00
Jumlah	Rp	844.175.028.311,00

Penambahan Aset Tetap karena Koreksi Kurang Catat Barang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset Tanah, antara lain terdapat pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp756.366.210.000,00, Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp9.931.550.000,00 dan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp7.900.075.000,00
2. Peralatan dan Mesin, antara lain terdapat pada Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp3.192.489.410,00, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.085.358.078,00 dan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp607.932.772,00
3. Gedung dan Bangunan, antara lain terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp43.759.560.000,00, Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp1.810.560.000,00 dan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp996.595.000,00
4. Aset Tetap Lainnya, antara lain terdapat pada Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp3.874.101.000,00 dan Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakpus sebesar Rp858.534.804,00

Untuk penambahan aset tanah karena kurang catat barang pada Dinas Pertamanan sebesar Rp756.366.210.000,00 merupakan Tanah yang berasal BAST 4918/1992 dari PT Duta Pertiwi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanah seluas 659.430 m² yang terletak di kelurahan tegal alur yang di catat berdasarkan NJOP tahun Tahun 2015 dan masih tercatat di aset fasos fasum dengan nilai perolehan Rp305.975.520.000,00

- h. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai sebesar Rp1.700.958.572.735,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	141.784.000,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	1.585.458.577.000,00
3. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	115.358.211.735,00
Jumlah	Rp	1.700.958.572.735,00

Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanah, terdapat pada Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp77.564.00,00 dan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur sebesar Rp64.220.000,00
 2. Gedung dan Bangunan antara lain terdapat pada Dinas pendidikan sebesar Rp364.793.991.845,00, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp219.243.678.731,00 dan Dinas Olah Raga dan Pemuda sebesar Rp202.466.869.483,00
 3. Jalan, jaringan dan Irigasi terdapat Dinas Bina Marga sebesar Rp114.581.239.735,00 dan pada Sudin Bina Marga Jakarta Barat sebesar Rp776.972.000,00
- i. Penambahan Aset Tetap Pengadaan dari Dana Operasional BLUD sebesar Rp35.775.427.390,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	30.499.413.365,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	3.778.406.457,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.241.897.568,00
4. Aset Tetap Lainnya	Rp	255.710.000,00
Jumlah	Rp	35.775.427.390,00

Penambahan Aset Tetap karena Pengadaan dari Dana Operasional BLUD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin, antara lain terdapat pada Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp4.469.236.000,00, BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - Jakpus sebesar Rp3.627.495.892,00 dan BLUD RS Cengkareng Rp2.162.101.303,00
2. Gedung dan Bangunan, antara lain terdapat pada BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan – Jakarta barat sebesar Rp713.913.760.00, Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp675.837.760,00 dan pada BLUD Puskesmas Kec. Pancoran Jakarta Selatan sebesar Rp568.975.426,00
3. Jalan, Jaringan dan Irigasi, antara lain terdapat pada BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Jakarta barat sebesar Rp442.907.500,00, Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp395.464.700,00 dan BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari Jakarta Barat sebesar Rp169.441.900,00
4. Aset tetap lainnya terdapat pada BLUD Puskesmas Kec. Senen Jakarta Pusat sebesar Rp210.210.000,00 Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp29.475.000,00 dan pada BLUD RS Cengkareng sebesar Rp16.025.000,00
- j. Penambahan Aset Tetap dari hutang pada pihak ketiga sebesarRp20.739.659.941,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	47.404.500,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	20.154.124.259,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	178.190.064,00
4. Aset Tetap Lainnya	Rp	322.255.118,00
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	37.686.000,00
Jumlah	Rp	20.739.659.941,00

1. Tanah, terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp47.404.500,00
 2. Gedung dan Bangunan, terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp.19.929.615.062,00 dan pada Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III sebesar Rp224.509.127,00
 3. Jalan, Jaringan dan Irigasi terdapat pada Sudin Tata Air Jakarta Timur sebesar Rp178.190.064,00
 4. Aset Tetap Lainnya terdapat pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat sebesar Rp204.887.150,00 dan pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan sebesar Rp117.367.968,00
 5. Kontruksi Dalam pengerjaan terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp37.686.000,00,
- k. Penambahan Aset Tetap karena reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp62.412.205.108,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	8.329.912.038,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	15.435.213.600,00
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.796.663.235,00
4. Aset Tetap Lainnya	Rp	36.850.416.235,00
Jumlah	Rp	62.412.205.108,00

1. Peralatan dan Mesin, antara lain terdapat pada Sudin Tata Air Jakarta Pusat sebesar Rp4.291.650.000,00, Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat sebesar Rp1.925.000.000 dan Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebesar Rp854.000.000,00.
2. Gedung dan Bangunan, antara lain terdapat pada Sudin Kesehatan Jakarta Selatan sebesar Rp12.067.078.146,00, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebesar Rp1.075.158.575,00 dan Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan – Jakarta Barat sebesar Rp569.643.900,00
3. Jalan, Jaringan dan Irigasi terdapat pada Sudin Kesehatan Jakarta Barat sebesar Rp1.308.553.603,00, UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sebesar Rp370.947.804,00, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat sebesar Rp57.500.850,00
4. Aset tetap lainnya, antara lain terdapat pada Dinas Sosial sebesar Rp32.959.425.666,00, Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Barat sebesar Rp2.676.738.538,00 dan Sudin Perhubungan Jakarta Timur sebesar Rp395.050.500,00
- I. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap sebesar Rp948.264.892,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	865.998.500,00
2. Aset Tetap Lainnya	Rp	82.266.392,00
Jumlah	Rp	948.264.892,00

1. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap pada Peralatan dan

Mesin, antara lain terdapat pada Sudin Perhubungan Jakarta Selatan sebesar Rp474.000.000,00, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp183.308.500,00 dan pada Kelurahan Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur sebesar Rp103.450.000,00

2. Aset Tetap Lainnya, terdapat pada Kelurahan Petojo Utara – Jakarta Pusat sebesar Rp82.266.392,00

m. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Belum Validasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp10.146.706.196.229,00. Aset belum validasi merupakan aset tetap pada Dinas Pendidikan yang belum selesai diverifikasi pada sensus Tahun 2013. Pada Tahun 2015 telah dilakukan sensus ulang dengan hasil sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	6.510.087.216.290,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	14.311.190.179,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	3.622.000.519.700,00
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	122.490.000,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	184.780.060,00
Jumlah	Rp	10.146.706.196.229,00

Penambahan Aset tetap dari Reklasifikasi Aset belum validasi menjadi Aset Tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanah, antara lain terdapat pada Dinas pendidikan sebesar Rp6.483.494.846.290,00, Sudin Pendidikan II Jakarta Pusat sebesar Rp12.869.100.000,00 dan Sudin Pendidikan II Jakarta Timur sebesar Rp8.236.870.000,00.
2. Peralatan dan Mesin, antara lain terdapat pada Sudin Pendidikan II Jakarta Utara sebesar Rp8.589.553.415,00, Sudin Pendidikan II Jakarta

Timur sebesar Rp3.229.254.764,00 dan pada Sudin Pendidikan I Jakarta Timur sebesar Rp1.496.468.000,00

3. Gedung dan Bangunan, antara lain terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.545.288.958.626,00, Sudin Pendidikan I Jakarta Selatan sebesar Rp42.368.496.942,00 dan Sudin Pendidikan II Jakarta Pusat sebesar Rp20.056.246.150,00

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi, antara lain terdapat pada Sudin Pendidikan II Jakarta Pusat sebesar Rp113.241.000,00 dan Sudin Pendidikan II Jakarta Utara sebesar Rp9.249.000,00

5. Aset Tetap Lainnya antara lain terdapat pada Sudin Pendidikan II Jakarta Pusat sebesar Rp183.580.060,00 dan pada Sudin Pendidikan II Jakarta Utara sebesar Rp1.200.000,00.

n. Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Modal 2015 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.495.299.347.210,00 antara lain terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp909.378.679.481,00, Dinas Perumahan dan gedung pemda Rp431.265.819.005,00 dan pada Dinas Pendidikan Rp53.599.239.723,00

o. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap sebesar Rp60.687.000,00 terdapat pada Kelurahan Gunung Sahari Selatan – Jakpus Rp60.687.000,00

p. Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset Tetap sebesar Rp12.984.584.057,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	3.900.126.000,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	1.412.380.557,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	7.672.077.500,00
Jumlah	Rp	12.984.584.057,00

1. Tanah, terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp3.900.126.000,00.

2. Peralatan dan Mesin, terdapat pada Dinas Kebersihan sebesar Rp1.393.760.005,00 dan Dinas Perhubungan dan Transportasi 18.620.552,00

3. Gedung dan Bangunan terdapat pada Dinas Perhubungan dan Transportasi sebesar Rp7.672.077.500,00

q. Penambahan Aset Tetap karena Koreksi Penambahan Lain-Lain sebesar Rp218.817.626.630,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Gedung dan Bangunan	Rp	62.184.745.024,00
2. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	60.524.301.671,00
3. Aset Tetap Lainnya	Rp	167,00
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	96.108.579.768,00
Jumlah	Rp	218.817.626.630,00

1. Gedung dan Bangunan, antara lain terdapat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp62.143.269.824,00 dan Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara sebesar Rp41.475.200,00.

2. Jalan, Jaringan dan Instalasi, antara lain terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp40.020.122.950,00 dan Dinas Tata Air sebesar Rp20.504.178.721,00 berupa Penambahan dari Uang Muka Kerja

3. Aset Tetap Lainnya, antara lain terdapat pada Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp166,0 berupa hewan yang lahir pada tahun 2015 dan pada UP Konservasi dan Cagar Budaya sebesar Rp1,00

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan antara lain terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp96.108.579.768,00 adalah penambahan uang muka kerja.

2. Pengurangan Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp28.053.806.386.498,00 terdiri dari:

1. Tanah	Rp	20.664.120.983.135,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	1.370.149.816.528,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	3.032.747.846.280,00
4. Jalan. Irigasi dan Jaringan	Rp	1.131.589.657.725,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	94.165.640.981,00
6. Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp	1.761.032.441.849,00
Jumlah	Rp	28.053.806.386.498,00

Pengurangan aset tetap selama Tahun Anggaran 2015 diperoleh dari

a. Pengurangan Aset Tetap karena penghapusan sebesar Rp93.965.742.079,00 terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin	Rp	10.067.760.958,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	83.877.353.371,00
3. Jalan Jaringan dan Irigasi	Rp	20.627.750,00
Jumlah	Rp	93.965.742.079,00

1. Penghapusan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin antara lain terdapat pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah sebesar Rp9.776.331.025,00 dan pada Kelurahan Kemayoran Rp150.223.502,00.

2. Gedung dan Bangunan, antara lain terdapat pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur sebesar Rp19.536.000.000,00 dan Biro Umum sebesar Rp11.232.880.852,00.
3. Jalan, Jaringan dan Irigasi terdapat pada Kantor Keluarga Berencana Jakarta Pusat sebesar Rp20.627.750,00.

b. Pengurangan Aset Tetap berasal dari Belanja Modal Tahun 2015 yang diserahkan Ke Pihak Lain/ Masyarakat sebesar Rp24.014.798.242,00

1. Peralatan dan Mesin	Rp	17.748.024.921,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	4.827.270.106,00
3. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp.	24.860.000,00
4. Aset Tetap Lainnya	Rp.	1.414.643.215,00
Jumlah	Rp	24.014.798.242,00

Pengurangan Aset Tetap berasal dari Belanja Modal Tahun 2015 yang diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD, aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat. Pengurangan tersebut diantaranya terdapat pada:

1. Peralatan dan Mesin terdapat pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur sebesar Rp5.411.819.799,00 dan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat sebesar Rp3.099.198.000,00
2. Gedung dan Bangunan, antara lain terdapat pada Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jaktim sebesar Rp2.248.888.429,00 dan Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jaksel sebesar Rp2.027.435.677,00

3. Jalan, Jaringan dan Instalasi terdapat pada Kelurahan Cilincing - Jakut sebesar Rp14.520.000,00 dan Kelurahan Kebon Melati - Jakpus sebesar Rp10.340.000,00
 4. Sedangkan untuk Aset tetap lainnya terdapat pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakbar sebesar Rp358.886.205,00 dan Kelurahan Kedoya Utara - Jakbar sebesar Rp198.132.000,00
- c. Pengurangan Aset Tetap yang diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD (Selain Dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2015) sebesar Rp11.459.976.952,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. Peralatan dan Mesin | Rp | 11.262.429.868,00 |
| 2. Aset Tetap Lainnya | Rp | 197.547.084,00 |
| Jumlah | Rp | 11.459.976.952,00 |
1. Pengurangan aset tetap tersebut pada Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat di Pusat Penyimpanan Barang Daerah sebesar Rp4.064.973.66,00 dan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara sebesar Rp3.099.198.000,00.
 2. Aset Tetap Lainnya, diantaranya terdapat di Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp88.207.084,00 dan di Kelurahan Kebon Kosong - Jakpus sebesar Rp56.265.000,00
- d. Pengurangan Aset Tetap karena Kurang Catat Transfer. Pengurangan tersebut merupakan koreksi pencatatan pada SKPD/UKPD atas aset tetap yang sudah dicatat sebagai transfer masuk di SKPD/UKPD lain sebelum tahun 2015. Rincian pengurangan tersebut adalah sebagai berikut terdapat pada peralatan dan mesin sebesar Rp9.943.170.306,00. Pengurangan aset tetap

tersebut terjadi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan sebesar Rp8.496.677.500,00 dan Pusat Penyimpanan Barang Daerah sebesar Rp990.653.705,00.

- e. Pengurangan Aset Tetap yang berasal dari Transfer antar SKPD sebesar Rp24.023.434.927.542,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah	Rp	20.448.072.944.060,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	1.096.038.332.955,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	2.286.525.862.015,00
4. Jalan Jaringan dan Instalasi	Rp	130.133.478.727,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	62.664.309.785,00
Jumlah	Rp	24.023.434.927.542,00

Pengurangan aset tetap karena transfer antar SKPD tersebut diantaranya pada:

1. Tanah, terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp19.936.834.522.000,00 dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp255.821.052.000,00.
2. Peralatan dan mesin terdapat pada Dinas Kebersihan sebesar Rp286.942.101.254,00 dan Satpol PP sebesar Rp185.603.420.101,00.
3. Gedung dan Bangunan terdapat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp821.450.572.339,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp357.450.898.040.00.
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi, terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp98.550.397.492,00 dan Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kep. Seribu sebesar Rp14.084.134.520,00.
5. Aset Tetap Lainnya terdapat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp29.313.121.568,00 dan

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar
Rp12.857.567.613,00

- f. Reklasifikasi yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2015 yang belum siap digunakan di ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.495.299.347.210,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Gedung dan Bangunan	Rp	584.423.380.300,00
2. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	910.875.966.910,00
Jumlah	Rp	495.299.347.210,00

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp431.265.819.005,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp53.599.239.723,00.

2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan antara lain terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp909.378.679.481,00 dan Kantor Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan sebesar Rp1.447.831.429,00.

- g. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2015 yang di Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp5.023.564.234,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	3.821.045.433,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	268.297.700,00
3. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	795.678.400,00
4. Aset Tetap Lainnya	Rp	138.542.701,00
Jumlah	Rp	5.023.564.234,00

Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi ke persediaan tersebut di atas diantaranya:

- a. Peralatan dan Mesin, terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar

Rp544.900.400,00 dan Satpol PP sebesar Rp483.330.000,00.

- b. Gedung dan Bangunan, terdapat pada Sudin Perhubungan - Jakbar sebesar Rp263.682.100,00 dan Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp3.366.000,00.
- c. Jalan, Jaringan dan Instalasi terdapat pada Sudin Tata Air Jakarta Selatan sebesar Rp792.297.000,00 dan Sudin Perhubungan Jakarta Barat sebesar Rp3.366.000,00.
- d. Aset Tetap Lainnya, terdapat pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp63.635.851,00 dan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur sebesar Rp40.030.650,00.
- h. Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2015 yang reklas ke Ekstrakomtabel karena tidak memenuhi nilai batas kapitalisasi sebesar Rp44.273.632.684,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	30.250.458.644,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	7.417.775.211,00
3. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	1.274.012.744,00
4. Aset Tetap Lainnya	Rp	5.331.386.085,00
Jumlah	Rp	44.273.632.684,00
- 1. Pengurangan Aset Tetap tersebut di atas untuk Peralatan dan Mesin antara lain terdapat pada RSUD Pasar Minggu sebesar Rp6.883.225.120,00 dan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur sebesar Rp6.090.860.478,00 dan

2. Aset Gedung dan Bangunan, terdapat pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Barat sebesar Rp4.915.301.893,00 dan Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur sebesar Rp1.516.212.023,00
 3. Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi, antara lain terdapat pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Barat sebesar Rp1.078.793.567,00 dan pada Unit Pengelola Museum Senirupa sebesar Rp79.750.000,00
 4. Aset Tetap Lainnya, terdapat pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Barat sebesar Rp4.947.785.235,00 dan Kelurahan Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat sebesar Rp103.359.300,00
- i. Reklasifikasi Aset Tetap yang di peroleh sebelum tahun 2015 Ke Persediaan karena tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sebesar Rp14.881.319.513,00, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. Peralatan dan Mesin | Rp | 11.281.471.393,00 |
| 2. Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 11.058.630,00 |
| 3. Aset Tetap Lainnya | Rp | 3.490.204.210,00 |
| 4. Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp | 98.585.280,00 |
| Jumlah | Rp | 14.881.319.513,00 |

Reklasifikasi Aset Tetap ke Persediaan terdiri dari:

- a. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin antara lain terdapat pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat sebesar Rp6.037.583.533,00 dan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat sebesar Rp4.200.185.000,00.

- b. Reklasifikasi atas Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung sebesar Rp11.058.630,00
- c. Reklasifikasi atas Aset Tetap Lainnya antara lain terdapat pada Kantor Perpustakaan Arsip Daerah Jakarta Pusat sebesar Rp1.896.594.139,00 dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp1.434.785.022,00
- d. Reklasifikasi atas Konstruksi Dalam Pengerjaan terjadi pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp98.585.280,00
- j. Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel yang diperoleh sebelum tahun 2015 karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset sebesar Rp2.815.600.505,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	2.353.958.061,00
2. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	46.757.326,00
3. Aset Tetap Lainnya	Rp	414.885.118,00
Jumlah	Rp	2.815.600.505,00

Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel terdiri dari

1. Peralatan dan Mesin, antara lain terdapat pada BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk – Jakarta Barat sebesar Rp359.885.826,00 dan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat sebesar Rp241.492.500,00.
2. Reklasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi, antara lain terdapat pada UP Konservasi dan Cagar Budaya sebesar Rp15.730.000,00 dan UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing sebesar Rp12.020.250,00.

3. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya, antara lain terdapat pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat sebesar Rp204.887.150,00 dan Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan sebesar Rp117.367.968,00.
- k. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai ke lima golongan aset tetap sebesar Rp1.700.958.572.735,00 antara lain terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp364.793.991.845,00, Dinas Perumahan Dan Gedung Pemda sebesar Rp219.243.678.731,00 dan Dinas Olah Raga dan Pemuda sebesar Rp202.466.869.483,00
- l. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp119.154.983.628,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	116.757.298.319,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	1.918.985.629,00
3. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	333.635.520,00
4. Aset Tetap Lainnya	Rp	145.064.160,00
Jumlah	Rp	119.154.983.628,00

Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat di atas terdiri dari:

1. Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat pada BLUD RS Tarakan sebesar Rp11.156.179.402,00 dan pada Dinas Kebersihan sebesar Rp10.255.191.607,00
2. Gedung dan Bangunan, diantaranya terdapat pada Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jakut sebesar Rp915,760,000.00 dan Sudin Kebersihan – Jaktim sebesar Rp438.000.000,00

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan antara lain terdapat pada Sudin Kebersihan – Jaktim sebesar Rp332.148.320,00 dan Kelurahan Serdang sebesar Rp1.487.200,00,00
4. Aset Tetap Lainnya terdapat pada Kelurahan Gelora - Jakpus sebesar 66.591.600,00 dan PSBD Budi Bhakti Cengkareng sebesar Rp62.160.000,00

m. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp22.895.736.469,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Peralatan dan Mesin	Rp	20.796.039.989,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	5.300.000,00
3. Aset Tetap Lainnya	Rp	2.094.396.480,00
Jumlah	Rp	22.895.736.469,00

Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud di atas terdiri dari

1. Peralatan dan Mesin, diantaranya terdapat pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan sebesar Rp12.644.167.686,00, Dinas Pelayanan Pajak Rp6.542.387.500,00 dan Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat sebesar Rp339.075.000,00
2. Gedung dan Bangunan, terdapat pada Kelurahan Slipi Jakarta Barat sebesar Rp5.300.000,00
3. Aset Tetap Lainnya terdapat pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp2.094.396.480,00

n. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp62.412.205.108,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	991.097.075,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	1.697.138.531,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	39.396.851.331,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	5.265.026.847,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	15.062.091.324,00
Jumlah	Rp	62.412.205.108,00

Reklasifikasi Antar Aset Tetap terdiri dari

1. Tanah, antara lain terdapat pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sebesar Rp843.999.575,00 dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp147.097.50000
2. Peralatan dan Mesin, antara lain terdapat pada BLUD RS Duren Sawit sebesar Rp334.489.678,00 dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sebesar Rp231.159.000,00
3. Gedung dan Bangunan, antara lain terdapat pada Dinas Sosial sebesar Rp32.959.425.666,00 dan Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Barat sebesar Rp3.985.292.141
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi, antara lain terdapat pada Sudin Tata Air Jakarta Pusat sebesar Rp4.291.650.000,00 dan Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta sebesar Rp290.133.222,00
5. Aset Tetap Lainnya, antara lain terdapat pada Sudin Kesehatan Jakarta Selatan sebesar Rp12.067.078.146,00, Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat sebesar Rp1.925.000.000,00 dan Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jakbar sebesar Rp569.643.900,00.

- o. Koreksi Atas Belanja Modal TA 2014 (Temuan, Denda, dll) sebesar Rp7.430.395.428,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	620.640.043,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	2.896.814.927,00
3. Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp	3.904.622.105,00
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	8.318.353,00
Jumlah	Rp	7.430.395.428,00

Koreksi Atas Belanja Modal TA 2014 (Temuan, Denda, dll) terdiri dari koreksi:

1. Peralatan dan Mesin, yang terdapat pada BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp436.308.844,00, Biro Umum sebesar Rp178.659.525,00, dan Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Jaktim sebesar Rp2.005.000,00
2. Gedung dan Bangunan yang terdapat pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebesar Rp2.768.048.330,00, Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I sebesar Rp54.070.600,00, dan Dinas Olah Raga dan Pemuda sebesar Rp41.475.200,00
3. Jalan, Jaringan dan Instalasi sebesar Rp3.904.622.105,00 terdapat pada Dinas Bina Marga
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.318.353,00 terdapat pada Sudin Kesehatan – Jakarta Utara.

- p. Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp26.533.062.022,00 merupakan hasil koreksi kesalahan pencatatan pada SKPD/UKPD dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin	Rp	646.141.194,00
2. Gedung dan Bangunan	Rp	2.128.002.522,00
3. Aset Tetap Lainnya	Rp	307.163.306,00
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	23.451.755.000,00
Jumlah	Rp	26.533.062.022,00

Koreksi Lebih Catat Nilai tersebut terdiri dari koreksi:

1. Peralatan dan Mesin, antara lain terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp307.344.384,00 Kantor Keluarga Berencana – Jaktim sebesar Rp195.774.810,00 dan Kelurahan Duri Selatan Jakarta Barat sebesar Rp164.564.384,00
2. Gedung dan Bangunan, terdapat pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Ninformal dan Informal sebesar Rp1.459.529.750,00 dan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp668.472.768,00 dan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp4,00
3. Aset Tetap Lainnya, terdapat pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp307.163.292,00 dan Unit Pengelola Museum Kesenjajaran Jakarta Rp14,00
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp23.451.755.000,00.

q. Koreksi Lebih Catat Barang sebesar
Rp270.133.023.320,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	209.301.700.000,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	10.165.902.977,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	11.978.493.233,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	14.660.800,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp	2.903.462.713,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	35.768.803.597,00
Jumlah		Rp 270.133.023.320,00

Koreksi lebih catat barang tersebut di atas terdiri atas:

1. Tanah, antara lain terdapat pada Kantor Pengelola Kawasan Monas sebesar Rp186.360.000.000,00 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp17.782.000.000,00
2. Peralatan dan Mesin, antara lain terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.864.328.031,00 dan Badan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp2.795.126.722,00
3. Gedung dan Bangunan, terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp11.978.493.233,00
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi, terdapat pada Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan sebesar Rp14.660.800,00
5. Aset tetap lainnya, terdapat pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp2.903.462.713
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp35.768.803.597,00

- r. Pengurangan Aset Tetap karena koreksi pengurangan lain-lain sebesar Rp119.176.328.521,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	5.755.242.000,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp	26.700.002.936,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp	7.083.459.935,00
2. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	78.889.271.966,00
3. Aset Tetap Lainnya	Rp	1.944.800,00
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	746.406.884,00
Jumlah	Rp	119.176.328.521,00

Pengurangan aset tetap tersebut terdiri atas:

1. Tanah, terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp5.755.242.000,00
2. Peralatan dan Mesin, antara lain terdapat pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan sebesar Rp9.008.737.071,00 dan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara sebesar Rp8.748.299.522,00
3. Gedung dan Bangunan, antara lain terdapat pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp1.648.512.800,00
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi, antara lain terdapat pada Dinas Tata Air sebesar Rp45.560.843.171,00 dan Dinas Bina Marga sebesar Rp30.626.764.900,00.
5. Aset Tetap Lainnya, terdapat pada Sudin Perhubungan Jakarta Barat sebesar Rp1.944.800,00.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdapat pada UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sebesar Rp492.567.884,00 dan Unit Pengelola Perpustakaan sebesar Rp253.839.000,00

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun Anggaran 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014 (Audited)	2,795,093,551,102.00
Penambahan:	
Hutang Pihak Ke-3	37.686.000,00
Kapitalisasi Belanja Non Modal	4.400.000,00
Reklasifikasi Dari Belanja Modal 2015 Ke KDP	1.495.299.347.210
Kurang Catat Nilai	4.067.694.351,00
Lain-lain	96.108.579.768,00
Jumlah Penambahan	1.595.517.707.329,00
Pengurangan:	
KDP Sudah Selesai Dilaksanakan	1.700.958.572.735,00
Lebih catat Nilai	23.451.755.000,00
Reklasifikasi Aset Tetap Ke Persediaan (Selain Belanja Modal Tahun 2015)	98.585.280,00
Kurang Catat Barang	35.768.803.597,00
Koreksi Atas Belanja Modal TA 2014 (Temuan, Denda, dll)	8.318.353,00
Lain-lain	746.406.884,00
Jumlah Pengurangan	1.761.032.441.849,00
Saldo per 31 Desember 2015	2,629,578,816,582

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang signifikan terdapat di SKPD Dinas Bina Marga sebesar Rp1,121.910.814.385,00 dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp574.469.947.930,00.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2015 tersebut sudah termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, di antaranya Museum Sejarah Jakarta, Museum

Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang 45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan Museum M.H. Thamrin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencatat aset bersejarah (heritage assets) yang sudah tercatat dalam sensus barang daerah di beberapa SKPD. Aset bersejarah tersebut dicatat dalam akun aset tetap.

Selain aset tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sebanyak 34 sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 8.409.321,00m², dengan rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 18.

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang mewakili Negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan atau badan milik Negara.

Lahan dengan bersertifikasi HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2015 tersebut termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan karena masih menunggu penyelesaian proses penilaian dan penerbitan Peraturan Daerah inbreng kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan BUMD PT Transjakarta akan menginbrengkan/menyerahkan aset BLUD Transjakarta sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transjakarta, setelah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Independen.

Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan inventaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbreng). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Optimalisasi Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2008, telah melakukan proses sertifikasi tanah.

Dalam tahun 2015 telah menerima 2 Sertifikat Hak Pakai yaitu Jalan Tb Simatupang RT.009/02 seluas 2979m² dan Jalan Palmerah Barat No. 3 RT 001/002 seluas 4.571 m².

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya penyelesaian atas aset tanah yang bermasalah pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung diantaranya:

1. 16 bidang tanah seluas 503.824 m² masih dalam proses di tingkat pengadilan negeri;

2. 10 bidang tanah seluas 339.427 m² dalam proses di tingkat pengadilan tinggi;
3. 11 bidang tanah seluas 563.220,99 m² dalam proses di tingkat kasasi di Mahkamah Agung;
4. 9 bidang tanah seluas 165.257,72 m² dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Perkara sengketa tanah dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung di antaranya merupakan sengketa tanah di Meruya Selatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Portanigra. Perkara tersebut telah diputus sampai dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor 570 K/Pdt/1999 Tanggal 31 Maret 2000 dan Nomor 2863 K/Pdt/1999 Tanggal 26 Juni 2001 yang memenangkan pihak PT Portanigra.

Sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 guna dilakukan pengosongan atas tanah seluas ± 78 ha milik PT Portanigra yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan.

Upaya hukum atas perkara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Upaya hukum Perlawanan (*derden verzet*) atas penetapan eksekusi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan Perlawanan terhadap PT Portanigra melalui Pengadilan untuk membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van*

gewijsde) yang menguatkan putusan pengadilan tinggi bahwa penetapan eksekusi tidak berkekuatan dan tidak mengikat menurut hukum.

2. Upaya hukum menggugat PT Portanigra atas Perkara Kepemilikan Tanah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan gugatan kepemilikan tanah terhadap PT Portanigra dan telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 yang menyatakan PT Portanigra adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 291.422 m² yang terletak di wilayah Kelurahan Meruya Selatan khususnya di dalam Komplek Perumahan kavling DKI seluas 248.162 m², di dalam Komplek Perumahan Taman Villa Meruya pengembang PT Surya Putra Perkasa seluas 33.620 m² dan di daerah Gondang Meruya Selatan seluas 9.640 m². Putusan tersebut juga menyatakan menghukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ganti rugi materiil sebesar Rp291.422.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada PT Portanigra secara tunai dan sekaligus.

Atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI karena putusan tersebut bertentangan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang memenangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam gugatan perlawanan.

Selanjutnya, telah dilakukan penyerahan memori Peninjauan Kembali nomor 132/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. Jo. No.2971 K/Pdt/2010 tanggal 5 Juli 2013 dan sudah dilakukan persidangan umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Juni 2013 dengan novum (bukti baru) berupa :

1. Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010
2. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata nomor 1284 K/PDT/2009. Jo. No. 168/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juli 2010.

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali tersebut. Sambil menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 69 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Selain pemasalahan tersebut di atas, saat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disusun, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga atas pencatatan Aset Tetap Tanah yang tercatat pada Laporan Keuangan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Tahun 2015.

Tuntutan Perdata tersebut dari TOETI NZ SOEKARNO dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m² dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain; 1) pencatatan

Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum; 2) kerugian materil karena adanya penahanan penundaan pembayaran senilai Rp.200.000.000.000,00; 3) *Lost Opportunity* senilai Rp.500.000.000,00; dan 4) kerugian immateril Rp.800.000.000,00

Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah senilai Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah seluas 2.742.827,31 m², di antaranya seluas 101.395 m² digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m² yang digugat.

Adapun tuntutan keperdataan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m² yang terdiri dari 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m², SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m² dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m².

Atas tuntutan/gugatan keperdataan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya hukum dan mengambil tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam upaya pemulihan hak-hak dan pengamanan Aset Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan peningkatan akuntabilitas penatausahaan aset tetap sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 187 Tahun 2015 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

5.5.1.3.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015. Mekanisme

perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan pertama kali yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2015. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

Penyusutan atas Aset Tetap pertama kali memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari penyusutan Aset tetap sampai dengan Tahun 2014, dan beban penyusutan sebagai beban tahun 2015. Nilai Buku Aset tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2015			31 Desember 2014
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	284.068.689.312.488	-	284.068.689.312.488	273.519.641.092.661,00
Peralatan dan Mesin	18.986.813.894.851	(8.720.575.513.975)	10.266.238.380.876	17.190.097.083.385,00
Gedung dan Bangunan	24.169.792.568.590	(9.252.509.523.776)	14.917.283.044.814	17.384.759.492.812,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.306.882.017.848	(11.208.289.041.206)	21.098.592.976.642	29.731.234.210.492,00
Aset Tetap Lainnya	1.422.710.645.797	(51.204.150)	1.422.659.441.647	1.361.719.093.920,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.629.578.816.582	-	2.629.578.816.582	2.795.093.551.102,00
Jumlah	363.584.467.256.156	(29.181.425.283.107)	334.403.041.973.049	341.982.544.524.372,00

5.5.1.4 Dana Cadangan

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Tujuan Dana Cadangan Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai

pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak terduga tahun berjalan. Selain itu Dana Cadangan Daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta.

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp967.216.539.301,00. Selama tahun 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan Dana Cadangan, namun terdapat penambahan nilai Dana Cadangan sebesar Rp78.999.209.715,00 yang berasal dari penerimaan bunga deposito rekening Dana Cadangan, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp1.046.215.749.016,00.

Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah per 31 Desember 2015 tersaji dalam tabel 5.39 sebagai berikut.

Tabel 5.39
Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah
Per 31 Desember 2015

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2014	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Saldo Awal 31 Des 2014	Bunga Jatuh Tempo Jan-Jun 2015	Saldo Dana Cadangan 31 Desember 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00625-0	14-Dec-15	540.665.580.388	44.006.777.872	584.672.358.260
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00666-7	25-Dec-15	41.752.143.355	3.407.885.645	45.160.029.000
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Dec-15	263.609.182.381	21.692.851.550	285.302.033.931
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00680-2	16-Dec-15	121.189.633.177	9.891.694.648	131.081.327.825
Jumlah						967.216.539.301	78.999.209.715	1.046.215.749.016

5.5.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp45.653.550.146.654,00 dan Rp51.430.409.936.269,00 dengan rincian dalam tabel 5.40 sebagai berikut:

Tabel 5.40
Aset Lainnya

Per 31 Desember 2015 dan 2014

ASET LAINNYA	31 Desember 2015	31 Desember 2014
1. Tagihan Penjualan Angsuran	50.949.015.300,00	56.147.710.109,00
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	959.380.303,00
3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	6.554.369.249.425,00	3.578.851.777.917,00
4. Aset Tidak Berwujud	97.444.900.937,00	191.045.494.586,00
5. Aset Lain-Lain	40.223.272.327.802,00	47.603.405.573.354,00
6. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(278.165.572.423,00)	0,00
7. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(994.319.774.387,00)	0,00
Jumlah Aset Lainnya	45.653.550.146.654,00	51.430.409.936.269,00

5.5.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2015 sebesar Rp50.949.015.300,00 dan 2014 sebesar Rp56.147.710.109,00.

5.5.1.5.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp964.201.310,00. Adapun saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2014 merupakan bagian dari akun Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang dikelompokkan sebagai Aset Lainnya karena jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun. Sedangkan saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2015 disajikan nihil karena sudah

diklasifikasikan kembali sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi di kelompok Aset Lancar.

5.5.1.5.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp6.554.369.249.425,00 dan Rp3.578.851.777.917,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1	Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	3.050.991.629.572,00	339.015.103.572,00
2	Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.122.210.704.808,00	995.642.946.132,00
3	Kerjasama Operasi (KSO)	268.354.876.000,00	268.354.876.000,00
4	Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	2.112.812.039.045,00	1.975.838.852.213,00
	Jumlah	6.554.369.249.425,00	3.578.851.777.917,00

Nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan akumulasi aset kemitraan pihak ketiga berdasarkan hasil dari sensus aset kerjasama yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan penerimaan aset tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Seluruh Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk BOT, BTO dan KSO dicatat dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, sebagaimana disajikan dalam lampiran 9.

Penambahan aset kemitraan dengan pihak ketiga periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dicatat sebesar nilai perolehan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk aset yang dikerjasamakan atau diserahterimakan.

Nilai aset kerjasama hasil sensus tahun 2009 berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008 tentang tatacara penilaian dan penetapan nilai barang daerah dalam rangka Sensus Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. Penilaian tanah yang diperoleh sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tahun 2007

tanah tersebut atau tanah disekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; sedangkan untuk Penilaian tanah yang pengadaanya dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan;

- b. Penilaian kendaraan bermotor untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dilakukan berdasarkan nilai NJKB Tahun 2007 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, sedangkan untuk penilaian kendaraan berdasarkan bukti pembelian/perolehan;
- c. Penilaian Gedung dan Bangunan untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti perolehan; dan
- d. Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk perolehan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan.

Atas kerjasama sebagian aset tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh SKPD seperti pemanfaatan ruang untuk ATM, pemanfaatan ruang melalui pinjam pakai kepada organisasi masyarakat antara lain Korpri, Dharma Wanita, Bawaslu, Kadin, dan Koperasi Karyawan, dinilai sebesar Rp 0,00 karena

sudah dicatat sebagai satu kesatuan aset di SKPD Pengguna Barang.

Mutasi Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 naik sebesar Rp2.975.517.471.508,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi nilai Aset Bangun Guna Serah (BOT), Bangun Serah Guna (BTO), dan Kerjasama Operasi (KSO)

Pada Tahun 2015 dilakukan penyesuaian nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk BOT, BTO dan KSO sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2014, berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi BAST dari pihak ketiga atas aset yang dikerjasamakan dalam bentuk BOT,BTO dan KSO. Penyesuaian nilai aset BOT,BTO dan KSO sebagai berikut:

- i. Aset Kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Tiara Kasih, dilakukan koreksi penambahan nilai sebesar Rp570.605.100,00 berdasarkan BAST tanggal 23 Juni 2003 dan 06 Mei 2005 yaitu sebesar Rp.6.254.605.100,00.
- ii. Aset Kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Tunas Muda, dilakukan koreksi pengurangan nilai sebesar Rp1.775.958.724,00 berdasarkan BAST tanggal 26 September 2002 sebesar Rp.4.403.361.276,00.
- iii. Aset Kerjasama dengan PT Fajar Setia Mandiri (Jakarta Timur) dilakukan koreksi penambahan sebesar Rp4.161.734.400,00 berdasarkan BAST bulan Juni 2006 sebesar Rp. 4.883.444.400,00.
- iv. Aset Kerjasama dengan Yayasan Patmos koreksi penambahan sebesar Rp1.633.967.000,00 berdasarkan BAST tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp.4.090.967.000,00.

- v. Aset Kerjasama dengan Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia, dilakukan koreksi pengurangan sebesar Rp3.838.260.000,00 berdasarkan BAST tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp.6.600.000.000,00.
- vi. Aset Kerjasama dengan PT Pesona Marga Mandiri, dilakukan koreksi pengurangan sebesar Rp.4.771.680.000,00 berdasarkan BAST tahun 2005 sebesar Rp.10.482.000.000,00.
- vii. Aset Kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Katolik Mardi Luhur, dilakukan koreksi pengurangan sebesar Rp1.328.928.000,00 berdasarkan BAST tanggal 06 Mei 2005 sebesar Rp.4.170.342.000,00.
- viii. Aset Kerjasama dengan Yayasan Bukit Sion koreksi pengurangan sebesar Rp.5.030.437.648,00 berdasarkan BAST tanggal 09 November 2012 sebesar Rp12.609.562.352,00.
- ix. Aset Kerjasama dengan PT Gamma Investa Lestari, dilakukan koreksi penambahan sebesar Rp12.242.300.000,00 berdasarkan BAST tanggal 13 Mei 2005 sebesar Rp.101.658.000.000,00.
- x. Aset Kerjasama dengan PT Wahana Cipta Sejahtera, dilakukan terdapat penambahan sebesar Rp1.226.000.000,00 berdasarkan BAST tanggal 19 Mei 2008.
- xi. Aset Kerjasama dengan Yayasan Tugasku, dilakukan koreksi penambahan sebesar Rp.9.757.760.000,00 berdasarkan BAST tanggal 11 November 2004 sebesar Rp12.000.000.000,00.
- xii. Aset Kerjasama dengan PT Wahana Cipta Sejahtera, dilakukan terdapat penambahan sebesar Rp1.226.000.000,00 berdasarkan BAST tanggal 19 Mei 2008.
- xiii. Aset Kerjasama dengan Koreksi Pencatatan PT Langgeng Ayom Lestari, terdapat koreksi

penambahan nilai aset tanah sebesar Rp88.379.355.000,00 dan aset gedung sebesar Rp44.701.292.300,00.

- xiv. Aset Kerjasama dengan Yayasan Darul Ma'arif terdapat dilakukan penambahan sebesar Rp1.209.491.600,00 berdasarkan BAST tanggal 06 Oktober 2015.
- xv. Aset Kerjasama dengan PT. Bakrie Investindo terdapat koreksi penambahan nilai tanah sebesar Rp2.145.532.764.000,00
- xvi. Aset Kerjasama dengan PT. Dharma Alumas Sakti terdapat koreksi penambahan nilai tanah sebesar Rp574.484.800.000 dan nilai bangunan sebesar Rp282.112.000,00
- xvii. Aset Kerjasama dengan PT. Pacific Prima Buana Mas terdapat koreksi penurunan nilai tanah sebesar Rp5.406.000.000,00
- xviii. Aset Kerjasama dengan PT. Hotel Cikini Realty terdapat koreksi penurunan nilai tanah sebesar Rp4.143.150.000,00
- xix. Aset Kerjasama dengan Yayasan Tugasku terdapat koreksi penurunan nilai bangunan sebesar Rp23.100.000.000,00
- xx. Aset Kerjasama dengan Yayasan Al Muhajirin Kelapa Gading terdapat koreksi penambahan nilai bangunan sebesar Rp3.822.720.000,00

b. Penambahan PKS Baru Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya

Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa umum dan pinjam pakai, diantaranya merupakan kerjasama pemanfaatan atas aset yang diperoleh dari fasos-fasum. Berikut rincian penambahan PKS:

- i. PT Bumi Bintang Bersatu dalam bentuk sewa umum atas sebidang tanah dan bangunan yang berasal dari Fasos Fasum, dengan nilai tanah sebesar Rp44.078.850.000,00 dan bangunan sebesar Rp6.349.550.000,00;
- ii. Yayasan Tanimbar Lestari dalam bentuk sewa umum atas sebidang tanah dan bangunan yang berasal dari Fasos Fasum, dengan nilai tanah sebesar Rp1.087.020.000,00 dan bangunan sebesar Rp92.630.000,00;
- iii. Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah dalam bentuk sewa umum atas sebidang tanah yang berasal dari Fasos Fasum, dengan nilai tanah sebesar Rp1.887.600.000,00;
- iv. Yayasan Abdi Karya dalam bentuk sewa umum atas sebidang tanah yang berasal dari Fasos Fasum, dengan nilai tanah sebesar Rp2.172.360.000,00;
- v. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah dalam bentuk sewa umum atas tanah yang berasal dari Fasos Fasum, diperuntukkan dengan nilai tanah sebesar Rp1.868.660.000,00;
- vi. Yayasan Harapan Bangsa dalam bentuk sewa umum atas sebidang tanah dan bangunan yang berasal dari Fasos Fasum, diperuntukkan bagi Sarana Pendidikan dengan nilai tanah sebesar Rp323.328.000,00 dan nilai bangunan sebesar Rp1.394.873.232,00;
- vii. Yayasan Bait El Indonesia dalam bentuk sewa umum atas sebidang tanah dan bangunan yang berasal dari Fasos Fasum, dengan nilai tanah sebesar Rp34.408.200.000,00 dan nilai bangunan sebesar Rp2.632.490.315,00;
- viii. Yayasan Pendidikan Cengkareng 1 dalam bentuk sewa umum, berupa bangunan yang berasal dari fasos fasum dengan nilai sebesar Rp23.375.289.300,00;

- ix. Yayasan Pendidikan Rasa Sayang Mandiri dalam bentuk Sewa Umum berupa sebidang tanah yang berasal dari fasos fasum dengan nilai sebesar Rp4.074.336.000,00;
- x. Yayasan Haleluya Jakarta dalam bentuk Pinjam Pakai, berupa sebidang tanah dan bangunan yang berasal dari fasos fasum dengan nilai tanah sebesar Rp1.346.796.000,00 dan nilai bangunan sebesar Rp2.499.130.379;
- xi. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Pinjam Pakai, berupa 7 unit kendaraan Operasional dengan sebesar Rp2.635.500.000,00;
- xii. Koordinasi Dakwah Islam Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Pinjam Pakai atas 3 (tiga) unit minibus dengan total nilai aset sebesar Rp500.103.324,00 sesuai dengan Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 11/-077.323 tanggal 16 Februari 2015;
- xiii. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta (BAZIS) dalam bentuk Pinjam Pakai atas 6 (enam) unit minibus dengan total nilai aset sebesar Rp1.064.324.282,00 sesuai dengan Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 13/-077.323 tanggal 25 Februari 2015;
- xiv. Markas Besar Tentara Republik Indonesia Staff Intelijen dalam bentuk Pinjam Pakai, berupa 4 unit kendaraan Operasional dengan nilaisebesar Rp1.506.000.000,00;
- xv. Yayasan Kanker dalam bentuk pinjam pakai, berupa 2 unit kendaraan Operasional dengan nilai sebesar Rp333.086.250,00;
- xvi. Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk pinjam pakai, berupa 1 unit kendaraan Operasional dengan nilaisebesar Rp376.500.000,00;

- xvii. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk pinjam pakai, berupa 2 unit kendaraan Operasional dengan nilaisebesar Rp284.959.750,00;
 - xviii. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta dalam bentuk pinjam pakai, berupa 1 unit kendaraan Operasional dengan nilaisebesar Rp376.500.000,00;
 - xix. Komite Intelijen Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk pinjam pakai, berupa 4 unit kendaraan Operasional dengan nilaisebesar Rp1.506.000.000,00;
 - xx. Korpri dalam bentuk pinjam pakai, berupa 2 unit kendaraan Operasional dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00;
 - xxi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk pinjam pakai, berupa 2 unit kendaraan Operasional dengan nilaisebesar Rp753.000.000,00; dan
 - xxii. Bawaslu dalam bentuk pinjam pakai, berupa 1 unit kendaraan Operasional dengan nilai sebesar Rp376.500.000,00.
- c. Transfer Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya ke SKPD
- Selain penambahan perjanjian kerjasama baru, terdapat mutasi kurang atas aset kemitraan dengan pihak ketiga senilai Rp360.400.000,00 yang disebabkan oleh berakhirnya masa perjanjian dalam bentuk pinjam pakai kendaraan dinas operasional. Adapun kendaraan tersebut telah dikembalikan oleh Majelis Ulama Indonesia ke Pusat Penyimpanan Barang Daerah.

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015, termasuk Aset Tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga). Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur ProvinsiDKI

Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan pertama kali yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2015. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

Penyusutan atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pertama kali memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sampai dengan Tahun 2014, dan beban penyusutan sebagai beban tahun 2015. Nilai Buku Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2015		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	5.618.155.884.399	-	5.618.155.884.399
Peralatan dan Mesin	10.983.208.626	8.093.728.551	2.889.480.075
Gedung dan Bangunan	552.721.629.590	270.071.843.872	282.649.785.718
Jumlah	6.181.860.722.615	278.165.572.423	5.903.695.150.192

5.5.1.5.4 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp207.181.898.336,00 dan Rp191.045.494.586,00.

Aset Tidak Berwujud di antaranya terdiri dari aplikasi sistem informasi yang dibangun untuk menunjang kegiatan operasional dan kegiatan pelayanan masyarakat, serta buku

digital yang digunakan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

5.5.1.5.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi pertama kali dilakukan pada Aset Tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Nilai yang dapat diamortisasi pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2015. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penetapan masa manfaat aset tidak berwujud pada amortisasi pertama kali adalah 5 (lima) tahun kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud, amortisasi dilakukan selama masa manfaat tercantum dalam dokumen perolehan aset.

Amortisasi atas Aset Tidak berwujud pertama kali memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari Amortisasi Aset Tidak berwujud sampai dengan Tahun 2014, dan beban amortisasi sebagai beban tahun 2015. Nilai Buku Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2015 dan 2014 pada entitas akuntansi penggabung dapat disajikan sebagai berikut:

No.	SKPD	31 Desember 2015			31 Desember 2014
		Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku	Harga Perolehan
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51.760.363.554	(21.514.767.704)	30.245.595.850	51.710.016.554
2.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	23.951.913.246	(17.797.654.459)	6.154.258.787	21.879.236.766
3.	Dinas Perindustrian Dan Energi	23.852.368.450	(11.848.037.940)	12.004.330.510	23.853.868.300
4.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Kehumasan	18.910.861.226	(8.185.177.699)	10.725.683.527	18.167.315.855

No.	SKPD	31 Desember 2015			31 Desember 2014
		Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku	Harga Perolehan
5.	Dinas Pelayanan Pajak	16.907.132.197	(9.066.460.785)	7.840.671.412	10.803.779.601
6.	Dinas Perhubungan Dan Transportasi	14.380.681.749	(9.784.198.833)	4.596.482.916	13.987.699.049
7.	Kota Administrasi Jakarta Utara	8.828.181.766	(8.813.389.766)	14.792.000	8.848.844.066
8.	Dinas Penataan Kota	7.039.659.673	(4.197.756.975)	2.841.902.698	7.826.756.863
9.	Dinas Pendidikan	5.664.384.700	(2.265.753.880)	3.398.630.820	5.713.142.200
10.	SKPD dengan nilai Aset Tidak Berwujud < Rp5 Miliar	29.066.549.571	(9.443.997.154)	19.622.552.417	28.254.835.332
	Jumlah	200.362.096.132	(102.917.195.195)	97.444.900.937	191.045.494.586

5.5.1.5.6 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp40.223.272.327.802,00 dan Rp47.603.405.573.354,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.41.

Tabel 5.41
Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2015 dan 2014

ASET LAIN-LAIN	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1. Aset Rusak Berat	709.243.641.668	622.938.807.168
2. Aset Belum Validasi	14.517.766.519.533	24.664.472.715.762
3. Aset yang belum ditetapkan statusnya	135.809.000	135.809.000
4. Aset Lain-Lain – BLUD	3.548.392.265	3.548.392.265
5. Kas Dikonsinyasikan	131.470.023.862	125.724.781.862
6. Aset Fasos Fasum	24.840.502.577.896	22.173.252.162.900
7. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	108.531.052	108.531.052
8. Aset BP THR Lokasari	13.224.373.345	13.224.373.345
9. Aset Tetap yang belum ditetapkan statusnya	7.272.459.181	-
Jumlah	40.223.272.327.802	47.603.405.573.354

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

a. Aset Rusak Berat

Aset Rusak Berat adalah barang-barang kondisi rusak berat yang akan/diusulkan oleh SKPD untuk dihapus/diperbaiki kembali. Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp709.243.641.668,00 dan Rp622.938.807.168,00. Penambahan Aset Rusak Berat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan selama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp122.005.463.320,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan Aset Rusak Berat selama Tahun Anggaran 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Rusak Berat karena Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar nilai Rp2,00.
- b. Penambahan Aset Rusak Berat karena Transfer antar SKPD sebesar Rp2.802.732.390,00.
- c. Penambahan Aset Rusak Berat karena reklas antar aset sebesar Rp30.285.000,00 dari aset tidak berwujud ke aset rusak berat.
- d. Penambahan Aset Rusak Berat reklasifikasi aset tetap jadi rusak berat Rp119.154.983.628,00.
- e. Penambahan Aset Rusak Berat karena penambahan aset lain-lain Rp17.462.300,00.

2. Pengurangan Aset Rusak Berat selama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp35.700.628.820,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pengurangan Aset Rusak Berat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengurangan Aset Rusak Berat karena penghapusan sebesar Rp22.624.885.116,00,

- b. Pengurangan Aset Rusak Berat karena transfer antar SKPD adalah sebesar Rp3.892.364.049,00,
- c. Pengurangan Aset Rusak Berat karena rusak berat jadi aset tetap Rp948.264.892,00 antara lain terdapat pada Sudin Perhubungan Jakarta Selatan sebesar Rp474.000.000,00 UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp183.308.500,00 dan pada Kelurahan Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur sebesar Rp103.450.000,00.
- d. Pengurangan Aset Rusak Berat karena reklasifikasi antar aset dari aset rusak berat ke aset tidak berwujud Rp30.285.000,00
- e. Pengurangan Aset Rusak Berat sebesar Rp7.957.860.763,00,00 merupakan hasil koreksi lain-lain.
- f. Pengurangan Aset Rusak Berat sebesar Rp246.969.000,00 merupakan koreksi pencatatan ganda/salah catat.

b. Aset Belum Validasi

Saldo Aset Belum Validasi per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp14.517.766.519.533,00 dan Rp24.664.472.715.762. Telah terkoreksi pengurangan aset belum validasi yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan 4 Suku Dinas Pendidikan dengan menambah aset ke dalam Aset Tetap, yaitu terhadap aset tanah dan aset gedung dan bangunan.

Reklasifikasi Aset Belum Validasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp10.146.706.196.229,00 diantaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.028.783.804.916,00

dan Sudin Pendidikan I Jakarta Selatan sebesar Rp43.364.410.942,00.

1) Tanah	Rp 6.510.087.216.290,00
2) Peralatan dan Mesin	Rp 14.311.190.179,00
3) Gedung dan Bangunan	Rp 3.622.000.519.700,00
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 122.490.000,00
5) Aset Tetap Lainnya	Rp 184.780.060,00
Total	<u>Rp 10.146.706.196.229,00</u>

c. Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp135.809.000,00. Aset tersebut diantaranya merupakan aset atas kehilangan kendaraan dinas operasional yang belum ditetapkan dalam keputusan majelis TGR.

d. Aset Lain-lain BLUD

Saldo Aset Lain-Lain BLUD per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sama, masing-masing sebesar Rp3.548.392.265,00. Aset ini terdapat di BLUD UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan rincian sebagai berikut:

1) HAKKI Batik Betawi	Rp 240.230.000,00
2) Pengamanan Aset	Rp 1.106.500.000,00
3) Master Plan dan Sisdur	<u>Rp 2.201.662.265,00</u>
Jumlah	<u>Rp 3.548.392.265,00</u>

e. Kas Dikonsinyasikan

Kas Dikonsinyasikan per 31 Desember 2015 dan 2014 yaitu sebesar Rp131.470.023.862,00 dan Rp125.724.781.862,00. Kas dikonsinyasikan sebesar Rp131.470.023.862,00 terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp5.745.242.000,00, Dinas Tata Air sebesar Rp121.292.513.862,00 dan UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp4.432.268.000,00. Kas Dikonsinyasikan pada Dinas Bina Marga adalah kas yang dikonsinyasikan ke

pengadilan pada kegiatan pembebasan pengadaan tanah. Sebelum tahun 2015, Dinas Bina Marga dan Dinas Tata Air masih tergabung dalam Dinas Pekerjaan Umum. Di tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum dibagi menjadi Dinas Bina Marga dan Dinas Tata Air. Kas dikonsinyasikan pada Dinas Bina Marga tidak ada, karena tercatat seluruhnya di Dinas Tata Air. Selama tahun 2015 terdapat penambahan Kas dikonsinyasikan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp5.745.242.000. Sedangkan Kas dikonsinyasikan per 31 Desember 2015 dan 2014 pada Dinas Tata Air dan UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang sama yaitu sebesar Rp121.292.513.862,00 dan Rp4.432.268.000,00. Nilai kas dikonsinyasikan pada Dinas Tata Air sebesar Rp121.292.513.862,00 diantaranya sebesar Rp11.069.824.878,00 telah selesai perkaranya melalui putusan Mahkamah Agung No.2549 K/Pdt/2006 tanggal 15 November 2007 dan uang yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diserahkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi No.03/Con/2005/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Januari 2008, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir surat-surat kepemilikan tanah belum diserahkan kepada Dinas Tata Air.

f. Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum)

Aset Fasos Fasum adalah aset yang diperoleh dari pihak ketiga untuk kepentingan umum yang masih tercatat di PPKD belum didistribusikan ke masing-masing SKPD.

Saldo aset fasos fasum per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp22.173.252.162.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanah	Rp19.647.411.467.255,00
2) Peralatan dan Mesin	Rp 60.200.812.484,00
3) Gedung dan Bangunan	Rp 529.744.693.033,00
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 1.918.501.648.878,00
5) Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 17.393.541.250,00</u>
Total	<u>Rp22.173.252.162.900,00</u>

Aset fasos fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT. Berdasarkan data Dinas Tata Ruang dan Pertanahan jumlah Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang telah diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

- 1) SIPPT yang diterbitkan sejak Januari 1971 sampai dengan Desember 2015 sejumlah 2992 SIPPT.
- 2) Dari 2992 SIPPT yang terbit, terdiri dari :
 - a) SIPPT efektif sejumlah 2626 diantaranya telah terjadi penyempurnaan sejumlah 314 dan pengalihan sejumlah 365.
 - b) SIPPT Pencabutan sejumlah 366.

Mutasi penambahan dan pengurangan aset fasos fasum pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
Tanah	2.532.744.819.307	95.147.276.000
Peralatan dan Mesin	17.177.670.558	1.412.380.558
Gedung dan Bangunan	247.748.122.442	44.016.040.726
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.155.500.000	-
Aset Tetap Lainnya		-
Total	2.807.826.112.307	140.575.697.284

Dengan demikian saldo aset fasos fasum per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp24.840.502.577.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanah	Rp22.085.009.010.532,00
2) Peralatan dan Mesin	Rp 75.966.102.484,00
3) Gedung dan Bangunan	Rp 733.476.774.749,00
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 1.928.657.148.879,00
5) Aset Tetap Lainnya	<u>Rp 17.393.541.251,00</u>
Total	<u>Rp24.840.502.577.896,00</u>

Mutasi tambah aset fasos fasum pada tahun 2015 berasal dari penerimaan aset fasos fasum sebanyak 42 BAST yang terdiri dari 39 BAST yang berasal dari kewajiban pihak ketiga dan 3 BAST yang berasal dari Hibah dan CSR, dengan total nilai aset senilai Rp2.807.826.112.307,00. Rincian penerimaan aset fasos fasum pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pihak Ketiga	Jenis Aset	Rincian Objek Aset	Nilai Aset
	Kewajiban Pihak Ketiga			
1	PT. KENCANA GRAHA MANDIRI	Jalan Irigasi Jaringan	Konstruksi Marga Jalan dan Pedestrian	1.078.200.000,00
		Jalan Irigasi Jaringan	Tangga JPO Tosari, sisi The City Tower	1.001.400.000,00
		Peralatan dan Mesin	Lift Penumpang	540.490.000,00
		Aset Tetap Lainnya	Penataan Taman	225.422.460,34
2	PT. LESTARI KIRANA PERSADA	Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Umum (PHU)	826.875.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	8.386.875.000,00
3	PT. WIKA REALTY	Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	16.865.820.000,00
4	PT. BINAKARYA JAYA ABADI	Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	847.080.000,00
5	PT. NITRASANATA DHARMA	Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	2.953.125.000,00
6	PT. MARS MULTI MANDIRI	Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	6.975.185.000,00
7	PT. PROSPERO REALTY	Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	2.716.455.000,00
8	PT.PYRAMYD REALTY INDONESIA	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	15.924.090.000,00
9	PT. BINAKARYA AGUNG PROPERTINDO	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	3.224.280.000,00
10	PT. JAKARTA LAND	Tanah	Tanah Masjid	88.516.680.000,00
			Bangunan Masjid	22.195.532.587,00
		Tanah	Tanah Marga jalan (Mjl)	101.237.640.000,00
11	PT. BANGUN KUNINGAN INDAH	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	29.322.360.000,00
		Tanah	Tanah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT)	1.013.805.000,00
12	PT. OLEOS KIRANA	Tanah	Tanah Pengganti	870.400.000,00

No	Nama Pihak Ketiga	Jenis Aset	Rincian Objek Aset	Nilai Aset
		Gedung dan Bangunan	Pagar BRC	54.909.528,85
		Gedung dan Bangunan	Tiang kolom Beton	
13	YAYASAN PENDIDIKAN CENGKARENG	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Sekolah	23.375.289.300,00
14	PT. MANDIRI CIPTA GEMILANG	Tanah	Tanah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT)	36.548.335.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	68.008.375.000,00
15	PT. ALMARON PERKASA	Tanah	Tanah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT)	117.379.500.000,00
		Tanah	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (MDT)	77.652.750.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	306.972.750.000,00
16	PT. MULIA KARYA GEMILANG	Tanah	Tanah Pengganti	79.853.485.000,00
17	PT. DAKSAWIRA PERDANA	Tanah	Tanah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT)	3.081.420.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	15.860.250.000,00
18	PT. LINTAS CIPTA DEVELOPMENT	Tanah	Tanah Suka (SUK)	3.688.320.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	22.935.040.000,00
19	PT. ANEKA ELOK	Gedung dan Bangunan	Bangunan Sekolah Dasar	2.499.130.378,83
20	PT. JALADRI KARTIKA PAKCI	Gedung dan Bangunan	Tower 9 (100 Unit)	19.296.000.000,00
		Gedung dan Bangunan	Tower 10 (100 Unit)	19.296.000.000,00
		Gedung dan Bangunan	Tower 11 (100 Unit)	19.296.000.000,00
		Gedung dan Bangunan	Tower 12 (100 Unit)	19.296.000.000,00
		Gedung dan Bangunan	Bangunan Gardu PLN	117.300.000,00
		Jalan Irigasi Jaringan	Perkerasan Halaman / Jalan Lingkungan	4.767.000.000,00
		Aset Tetap Lainnya	Taman	292.900.000,00
		Gedung dan Bangunan	Pagar Halaman	441.500.000,00
		Peralatan dan Mesin	Mekanikal Elektrikal	7.737.100.000,00
21	PT. MUARA WISESA SAMUDRA	Gedung dan Bangunan	Blok A	19.242.000.000,00
		Gedung dan Bangunan	Blok B	19.242.000.000,00
		Gedung dan Bangunan	Blok C	19.242.000.000,00
		Gedung dan Bangunan	Blok D	19.242.000.000,00

No	Nama Pihak Ketiga	Jenis Aset	Rincian Objek Aset	Nilai Aset
		Gedung dan Bangunan	Bangunan Gardu PLN 1	38.500.000,00
		Gedung dan Bangunan	Bangunan Gardu PLN 2	32.100.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Pompa	61.300.000,00
		Jalan Irigasi Jaringan	Jalan Lingkungan	4.310.300.000,00
		Aset Tetap Lainnya	Taman	419.300.000,00
		Gedung dan Bangunan	Pagar	338.500.000,00
		Peralatan dan Mesin	Mekanikal Elektrikal	7.487.700.000,00
22	PT. PRASTO PROPERTINDO	Tanah	Tanah	64.153.125.000,00
23	KSO PT. PELAKSANA JAYA MULIA DAN PT. ALAM JAYA PERKASA	Tanah	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (MDT)	49.006.245.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	50.452.995.000,00
24	PT. LAHAN ADYA BUMI	Gedung dan Bangunan	Bangunan Sosial Budaya / Balai Warga Blok E-4	1.742.662.887,00
		Gedung dan Bangunan	Bangunan Lapangan Basket, Blok B-3	899.436.800,00
25	PT. ARUNA KIRANA Q.Q. PT. MADARA SWARNA	Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	118.390.350.000,00
26	YAYASAN DARUL MA'ARIF DAAIMA	Gedung dan Bangunan	Bangunan Masjid (2 Lantai)	2.797.818.600,00
27	PT. NIRWANA DWIPRADITA (PT. NAKIA DWIPRADITA)	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor	7.672.077.500,00
			Peralatan Penunjang Komponen Uji	18.620.552,95
28	PT. UNITED TRACTORS.TBK	Tanah	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (MDT)	12.755.505.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	136.259.025.000,00
29	PT. CHITALAND PERKASA	Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (PHT)	11.882.700.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	79.680.105.000,00
30	PT. SATWIKA PERMAI INDAH	Tanah	Tanah Sarana Pendidikan (SPD)	21.015.383.000,00
		Gedung dan Bangunan	Bangunan Sarana Pendidikan (SPD)	27.916.000.000,00
31	PT. CEMPAKA SURYA KENCANA	Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	124.515.545.000,00
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (PHT)	502.957.140.000,00
32	PT. SIMPRUK ARTERI REALTY	Tanah	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (MDT)	34.041.630.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	71.394.300.000,00

No	Nama Pihak Ketiga	Jenis Aset	Rincian Objek Aset	Nilai Aset
33	PT. BINAKARYA BANGUN PROPERTINDO	Tanah	Tanah Suka (SUK)	714.615.000,00
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (PHT)	7.564.854.000,00
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Umum (PHU)	4.537.302.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	16.848.810.000,00
34	PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA	Tanah	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	22.129.860.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	73.881.885.000,00
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	29.261.500.000,00
35	PT. RASUNA SETIABUDI RAYA	Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (PHT)	4.065.138.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (MJL)	33.553.520.000,00
36	PT. GUDANG GARAM	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	6.346.160.000,00
37	PT. OLEOS KIRANA UTAMA	Tanah	Tanah Pengganti	3.891.101.440,00
			Pemagaran Pagar BRC	317.587.400,00
		Tanah	Penanaman Lahan Fasos Fasum (PHU)	
38	PT. COLORAMA JAYA TRADING CO. LTD	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	4.367.475.000,00
39	PT MENJANGAN SAKTI	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	797.685.000,00
Total dari Kewajiban Pihak Ketiga				2.768.654.926.435
1	PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	Peralatan dan Mesin	Kendaraan Pengangkut Sampah	1.393.760.005,00
2	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI	Tanah	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	20.443.200.000,00
		Tanah	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	14.930.400.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	35.892.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	34.782.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	57.025.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	35.729.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	23.178.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	23.178.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	22.781.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	35.708.000,00

No	Nama Pihak Ketiga	Jenis Aset	Rincian Objek Aset	Nilai Aset
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	67.234.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	35.121.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	55.584.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	22.384.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	22.401.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	35.664.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	35.664.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	75.772.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	55.584.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	55.584.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	55.584.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	55.584.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	55.584.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	55.584.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	75.135.000,00
		Gedung dan Bangunan	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	75.135.000,00
33	KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA	Tanah	Tanah Kantor Pemerintahan	1.246.370.867,00
	TOTAL DARI HIBAH DAN CSR			39.171.185.872,00
	TOTAL KESELURUHAN			2.807.826.112.307,00

Rekapitulasi mutasi tambah tersebut berdasarkan jenis aset adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Jumlah
Tanah	2.532.744.819.307,00
Peralatan dan Mesin	17.177.670.558,00
Gedung dan Bangunan	247.748.122.442,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.155.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00
Total	2.807.826.112.307,00

Mutasi tambah sebesar Rp2.807.826.112.307,00 diantara terdapat penambahan aset bangunan gedung rumah susun yang merupakan kewajiban atas Persetujuan Prinsip reklamasi Nomor 541/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 atas nama PT. Jaladri Kartika Pakci sebesar Rp90.539.800.000,00 dan Persetujuan Prinsip reklamasi Nomor 542/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014 atas nama PT. Muara Wisesa Samudra sebesar Rp89.655.700.000,00.

Atas aset fasos fasum tersebut, pada tahun 2015 telah didistribusikan ke SKPD Pengguna dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

- a. Aset fasos fasum yang telah terbit SK Penggunaannya, sehingga dicatat sebagai aset tetap di SKPD yaitu:

No	No. SK Penggunaan	Nama SKPD	Nama Pihak Ketiga	Peruntukan Aset	Nilai
1	1594/2015	Dinas Kebersihan	PT Pelabuhan Indonesia II	Dumper Truck	278.752.001,00
			PT Pelabuhan Indonesia II	Dumper Truck	278.752.001,00
			PT Pelabuhan Indonesia II	Dumper Truck	278.752.001,00
			PT Pelabuhan Indonesia II	Dumper Truck	278.752.001,00
			PT Pelabuhan Indonesia II	Dumper Truck	278.752.001,00
2	2881/2015	Dinas Perhubungan	PT Nakia Dwipradita	Bangunan Gedung	7.672.077.500,00
				Peralatan Penunjang Komponen Uji	18.620.553,00
3	2309/2015	Walikota Jakarta Timur	PerumPerumnas	Tanah Pemerintah Blok D.1	3.900.126.000,00
		TOTAL			12.984.584.058,00

- b. Aset fasos fasum yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga dicatat sebagai aset kerjasama yaitu:

No	Nama Pihak Ketiga	Tanggal PKS	Jenis Aset	Nilai
1	Yayasan Pendidikan Da'Wah Islam Al-Falah	08/04/2015	Tanah	1.887.600.000,00
2	Yayasan Bait-El Indonesia	26/01/2015	Gedung dan Bangunan	2.525.600.000,00
3	Yayasan Bait-El Indonesia	26/01/2015	Tanah	28.566.000.000,00
4	Yayasan Bait-El Indonesia	26/01/2015	Tanah	5.842.200.000,00
5	Yayasan Bait-El Indonesia	26/01/2015	Gedung dan Bangunan	106.890.315,46
6	Yayasan Pendidikan Rasa Sayang Mandiri	26/10/2015	Tanah	1.123.848.000,00
7	Yayasan Pendidikan Rasa Sayang Mandiri	26/10/2015	Tanah	2.950.488.000,00
8	Yayasan Abdi Karya (Yadika)	26/02/2015	Tanah	2.172.360.000,00
9	Yayasan Haleluya Jakarta	18/11/2015	Tanah	1.346.796.000,00
10	Yayasan Haleluya Jakarta	18/11/2015	Gedung dan Bangunan	2.499.130.378,83
11	Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah	26/02/2015	Tanah	1.868.660.000,00
12	Yayasan Harapan Bangsa	27/01/2015	Tanah	323.328.000,00
13	Yayasan Harapan Bangsa	27/01/2015	Gedung dan Bangunan	956.851.951,03
14	Yayasan Harapan Bangsa	27/01/2015	Gedung dan Bangunan	438.021.280,71
15	Yayasan Harapan Bangsa	27/01/2015	Gedung dan Bangunan	23.375.289.300,00
16	PT Bumi Bintang Bersatu	02/07/2014	Tanah	44.078.850.000,00
			Bangunan	6.349.550.000,00
17	Yayasan Tanimbar	23/12/2013	Tanah	1.087.020.000,00
			Gedung dan Bangunan	92.630.000,00
	TOTAL			127.591.113.226,00

Rekapitulasi mutasi kurang tersebut berdasarkan jenis aset adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Jumlah
Tanah	91.247.150.000,00
Peralatan dan Mesin	0,00
Gedung dan Bangunan	36.343.963.226,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00
Total	127.591.113.226,00

Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan pertama kali yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2015. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

Penyusutan atas Aset Tetap pertama kali memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari penyusutan Aset tetap sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp836.024.015.059, dan beban penyusutan sebagai beban tahun 2015 sebesar Rp143.283.772.285. Nilai Buku Aset tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2015			31 Desember 2014
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	22.085.009.010.532	-	22.085.009.010.532	19.647.411.467.255
Peralatan dan Mesin	75.966.102.484	(23.941.500.007)	52.024.602.477	60.200.812.484
Gedung dan Bangunan	733.476.774.749	(205.206.055.136)	528.270.719.613	529.744.693.033
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.928.657.148.879	(750.160.232.202)	1.178.496.916.677	1.918.501.648.878
Aset Tetap Lainnya	17.393.541.251	(15.011.987.042)	2.381.554.209	17.393.541.250
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
Jumlah	<u>24.840.502.577.896</u>	<u>(994.319.774.387)</u>	<u>23.846.182.803.508</u>	<u>22.173.252.162.900</u>

g. Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya

Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp108.531.052,00 yang merupakan saldo kas operasional BLUD yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di BLUD Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

h. Aset di BP THR Lokasari

Aset di BP THR Lokasari merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh BP THR Lokasari, Aset di BP THR Lokasari per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sama, masing-masing sebesar Rp13.224.373.345,00. Nilai yang tercatat menggunakan posisi ekuitas pada laporan keuangan BP THR Lokasari per 31 Desember 2014. Mutasi ekuitas pada laporan keuangan BP THR Lokasari per 31 Desember 2014 sebesar Rp394.171.935,00 dapat dirinci sebagai berikut:

a.	Saldo Ekuitas per 31 Desember 2013	Rp12.830.201.410,00
b.	Penambahan: Laba tahun 2014	Rp1.180.018.275,00
c.	Pengurangan:	
	- Setoran Dividen (Rp316.241.500,00) Ke Pemprov DKI	
	- Jasa Produksi (Rp216.583.500,00)	
	- PBB (Rp9.664.490,00)	
	- PPh Pasal 4 (2) (Rp197.256.850,00)	
	- CSR (Rp46.100.000,00)	
	Total Pengurangan	<u>(Rp394.171.935,00)</u>
	Saldo Ekuitas per 31 Desember 2014	Rp13.224.373.345,00

Rincian ekuitas BP THR Lokasari per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

a.	Modal Awal (Berupa Aset Tanah, Gedung, GOR, dll)	Rp6.146.300.000,00
b.	Penyertaan Modal Pemerintah (SK Gubernur No. 1163/2005 tanggal 20 Juni 2005)	Rp5.000.000.000,00
c.	Penambahan Modal	Rp346.720.180,00
d.	Saldo Laba (Saldo Laba s.d. tahun 2013)	Rp1.731.353.275,00
	Jumlah	Rp13.224.373.345,00

Saat ini BP THR Lokasari sedang dalam proses perubahan status menjadi BUMD atau UPT yang menerapkan PPK BLUD di bawah Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk sementara nilai penyertaan pada BP THR Lokasari tercatat di kelompok Aset Lain-Lain.

5.5.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp956.577.417.224,00 dan Rp577.594.425.006,00, rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.42

Tabel 5.42
Kewajiban
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	758.869.632.554,00	577.594.425.006,00
2.	Kewajiban Jangka Panjang	197.707.784.670,00	0,00
JUMLAH		956.577.417.224,00	577.594.425.006,00

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp758.869.632.554,00 dan Rp577.594.425.006,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 dapat dilihat pada Tabel 5.43 berikut ini:

Tabel 5.43
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1.	Utang PFK di PPKD	324.469.034.806,00	272.029.383.896,00
2.	Utang PFK di SKPD	4.132.085.856,00	30.577.381.245,00
3.	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang-Bunga	0,00	183.979.192,00
4.	Bagian Lancar Utang Jk. Panjang-Pokok	0,00	4.084.644.411,00
5.	Pendapatan Diterima Di Muka	82.396.090.395,00	19.492.721.268,00
6.	Utang Belanja Pegawai	157.429.357.293,00	3.400.887.570,00
7.	Belanja yang masih harus dibayar – TAL	747.924.806,00	6.494.146.647,00
8.	Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD	63.239.308.201,00	51.704.008.153,00
9.	Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak	4.686.258.162,00	6.104.955.893,00

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
	Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS		
10	Utang Belanja BLUD	65.304.595.501,00	112.673.016.826,00
11	Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD	50.645.006.925,00	58.640.105.981,00
12	Utang Belanja Lainnya	0,00	277.093.440,00
13	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.819.970.609	11.932.100.484,00
	Jumlah	758.869.632.554,00	577.594.425.006,00

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rincian Kewajiban Jangka Pendek.

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di PPKD

Utang PFK di PPKD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) di tahun 2015, namun sampai dengan akhir periode 31 Desember 2015 belum disetor ke Kas Negara. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK di PPKD per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp324.469.034.806,00 dan Rp272.029.383.896,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.44 berikut ini:

Tabel 5.44

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di PPKD
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1.	Utang PPh Pusat	151.781.498.238,00	56.206.651.953,00
2.	Utang PPN Pusat	170.919.080.474,00	214.899.733.855,00
3.	Utang Jamsostek	776.296.094,00	722.281.605,00
4.	Utang Asuransi	992.160.000,00	200.238.963,00
5.	Utang Taperum	0,00	14.000,00
6.	Utang Taspen	0,00	220.172,00
7.	Utang Askes	0,00	92.704,00

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
8.	Utang Potongan Tabungan Hari Tua	0,00	150.644,00
	Jumlah	324.469.034.806,00	272.029.383.896,00

b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di SKPD

Utang PFK di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum disetor ke Kas Negara.

Utang PFK di SKPD per 31 Desember 2015 dan 2014, masing-masing sebesar Rp4.132.085.856,00 dan Rp30.577.381.245,00 dengan rincian pada Tabel 5.45.

Tabel 5.45
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di SKPD
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	1.801.024.215,00	3.067.128.296,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	255.199.602,00	484.600.434,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	240.140.838,00	555.657.734,00
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 26	-	197.727,00
5.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	95.040,00	22.497.360.884,00
6.	Utang Pemotongan PPN	1.822.559.161,00	3.886.331.855,00
7.	Utang PFK Lainnya	13.067.000,00	86.104.315,00
	Jumlah	4.132.085.856,00	30.577.381.245,00

Utang PFK di SKPD tiga terbesar terdapat pada Sudin Tata Air – Jakarta Timur Rp1.065.849.264,00, BLUD RS Pasar Rebo Rp557.832.487,00 dan Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal Rp325.873.372,00 dengan rincian pada Tabel 5.46.

Tabel 5.46
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD Tiga Terbesar
Per 31 Desember 2015

No.	Jenis Pajak	Sudin Tata Air – Jakarta Timur (Rp)	BLUD RS Pasar Rebo (Rp)	Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	0,00	411.770.810,00	325.873.372,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	130.361.689,00	17.359.848,00	0,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	57.482.345,00	444.194,00	0,00
4.	Utang Pemotongan PPN	878.005.230,00	128.257.635,00	0,00
	Jumlah	1.065.849.264,00	557.832.487,00	325.873.372,00

Utang PFK Lainnya sebesar 13.067.000,00 adalah Utang PFK Lainnya di BLUD RS Cengkareng berupa potongan asuransi BPJS non pns yg blm dibayar.

Rincian lebih lanjut Utang PFK di SKPD disajikan dalam lampiran 10.

5.5.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Bunga

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp183.979.192,00. Utang bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 merupakan perhitungan akrual atas belanja bunga yang timbul dari perjanjian pinjaman dengan nomor OECF IP–414 SLA–876. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan *Jakarta Solid Waste Management Improvement Project* dengan jangka waktu 15 tahun yang telah berakhir pada tanggal 15 Februari 2015, sehingga saldo Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2015 menjadi nihil.

b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.084.644.411,00. Saldo ini merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas perjanjian nomor OECF IP-414 SLA-876 untuk pembiayaan *Jakarta Solid Waste Management Improvement Project* yang telah berakhir pada tanggal 15 Februari 2015, sehingga saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok per 31 Desember 2015 menjadi nihil.

5.5.2.1.3 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp82.396.090.395,00 dan Rp19.492.721.268,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp19.339.416.959,00, merupakan lebih bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), yang diatur dalam PMK Nomor 259/PMK.07/2015 tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, dapat dirinci sebagai berikut ;
- Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Pajak – PBB Migas Rp121.721.000,00;
 - Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – SDA Hutan Rp1.279.833,00;
 - Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – SDA Hasil Perikanan Rp228.670.655,00; dan

- Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – SDA Pertambangan Minyak Bumi Rp18.987.745.471,00.
- b. Pendapatan diterima di muka atas sewa aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp22.875.263.546,00 seperti tersaji pada lampiran 11.
- c. Pendapatan diterima dimuka atas kontribusi BOT/BTO sebesar Rp8.336.729.911,00 seperti tersaji pada lampiran 12,
- d. Pendapatan diterima dimuka hasil lelang titik reklame atas aset Pemda sebesar Rp15.283.850.000,00 seperti tersaji pada lampiran 13,
- e. Pendapatan Diterima di Muka BLUD sebesar Rp1.555.283.283,00 merupakan Uang Muka Pasien RSUD,
- f. Pendapatan Pajak Diterima di Muka sebesar Rp802.104.064,00, dan
- g. Pendapatan Retribusi Diterima di Muka sebesar Rp14.203.442.632,00,

5.5.2.1.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing Rp342.052.450.888,00 dan Rp239.294.214.510,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47

Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2015 dan 2014

Rekening	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
Utang Belanja Pegawai	157.429.357.293,00	3.400.887.570,00
Utang Belanja TALI	747.924.806,00	6.494.146.647,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD	63.239.308.201,00	51.704.008.153,00
Utang Belanja Gakin, SKTM Gizi Buruk, dan JPK PNS	4.686.258.162,00	6.104.955.893,00
Utang Belanja BLUD	65.304.595.501,00	112.673.016.826,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	50.645.006.925,00	58.640.105.981,00
Utang Belanja Lainnya	0,00	277.093.440,00
Jumlah	342.052.450.888,00	239.294.214.510,00

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp157.429.357.293,00 dan Rp3.400.887.570,00. Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2015 terdiri dari utang PPh 21 sebesar Rp149.916.438.952,00 dan utang Tunjangan Pegawai sebesar Rp149.916.438.952,00. Utang PPh 21 merupakan utang kewajiban PPh 21 atas Tunjangan Kinerja Daerah Tahun 2015 yang belum dibayarkan di 31 SKPD, yaitu di antaranya adalah utang PPh 21 di Dinas Kesehatan Rp62.026.472.530,00, Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp9.130.244.066,00, dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp7.792.422.055,00. Utang belanja pegawai secara rinci disajikan pada lampiran 14.

b. Utang Belanja TALI

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp747.924.806,00 dan Rp6.494.146.647,00.

c. Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp51.704.008.153,00 dan selama Tahun 2015 terjadi penambahan Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD sebesar Rp65.920.193.143,00 sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp117.624.201.296,00. Dari jumlah tersebut, utang yang dapat dibayarkan pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp53.003.082.424,00 sehingga Saldo Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp63.239.308.201,00 atau naik sebesar Rp11.535.300.048,00 dari Saldo Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD Tahun 2014.

Saldo Utang Kepada Pihak ketiga di SKPD per 31 Desember 2015 sebesar Rp63.239.308.201,00 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Utang kepada Pihak Ketiga di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp23.262.576.052,00, yang diantaranya utang atas Pembangunan Masjid Raya Jakarta (Fisik), Pembangunan Gedung Kantor UPPD Ciracas (Fisik) dan Pembangunan Gedung Pemda Daan Mogot Jakarta Barat (Fisik). Hal tersebut dikarenakan Belum proses SPP/Tidak ada pengajuan pembayaran s.d. tanggal 31 Desember 2015.
- 2) Utang kepada Pihak Ketiga di Dinas Tata Air sebesar Rp17.703.301.203,00 yang di antaranya merupakan utang atas kegiatan Pelaksanaan pengerukan Waduk Sunter Utara, Pelaksanaan pengerukan situ RW Dongkal, Pelaksanaan pengerukan situ mangga bolong. Hal tersebut karena belum ada tagihan dari pihak ke-3.
- 3) Utang Kepada Pihak Ketiga di Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat sebesar Rp6.488.905.438,00, yang diantaranya utang atas kegiatan Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec. Senen (Jl. Kramat Sentiong Mesjid, Kramat Lontar, Kramat Sentiong, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1H, Kali Baru Barat, Kepu 6, Angsana, Kali Baru Timur 6, Kali Baru Timur 4), Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Johar baru dan cempaka putih (Jl. Tendean, johar baru4, johar baru utara 2/6, Galur Selatan, Rawa Tengah, Galur Jaya, Rawa Selatan1, Bacang, Sayuti, Pramuka Jayasari, Rawasari Barat 8/9, Cempaka putih timur 17, cempaka warna, cempaka Putih 2A/2B/2C/ 2D/2J/2H, Mardani3, Cempaka1), Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Jl. Kota Bumi Ujung, Martapura 1/2, Dukuh Pinggir 3/4/5,

Kebon Sayur, Kebon Melati, Lontar Sawah, Jati Bunder, Kebon Pala³, Kampung Bali 30/32/33). Hal tersebut tidak dapat dibayarkan karena belum masuk dalam anggaran tahun 2015.

Rincian lebih lanjut Utang kepada pihak ketiga di SKPD disajikan dalam lampiran 14.

Akun Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD tersebut tidak termasuk potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Portanigra atas putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 sebesar Rp391.422.000.000,00 dan potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Dharma Winata Karya.

Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Portanigra atas lahan sengketa di Kelurahan Meruya Selatan merujuk pada CaLK 5.1.4.3.

Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Dharma Winata Karya terjadi karena adanya lahan sengketa di Kelurahan Papanggo. Pada tahun 1992 Pemerintah DKI Jakarta melakukan Kerjasama dengan PT Super Progress atas lokasi di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas ± 144.240 m² untuk pembangunan perumahan. PT Dharma Winata Karya sebagai penggarap sebagian tanah tersebut kemudian menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Putusan PTUN Nomor 063/G/1993/ij/PTUN-jkt tanggal 24 Januari 1994 jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 52/B/1994/PTTUN.JKT tanggal 29 Juli 1994 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 113K/TUN/1994 tanggal 20 Juli 1995 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 08/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang

amar keputusannya antara lain menghukum Tergugat I (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) untuk menerbitkan/mengeluarkan SIPPT atas tanah sengketa.

Menunjuk kepada keputusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan Kejaksaan Tinggi sebagai pengacara negara Provinsi DKI Jakarta dengan membuat Surat Kuasa Khusus.

Surat Kuasa Khusus Nomor 206/1.711.37 tanggal 11 Maret 2014 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Penerima Kuasa untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tanah seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ atas nama PT Dharma Winata Karya;

Sebagai tindaklanjut Surat Kuasa Khusus Nomor 206/1.711.37 tanggal 11 Maret 2014 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengirim surat Nomor B-7418/O.1/Gs/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 Perihal tindak lanjut penyelesaian ganti kerugian terhadap PT Dharma Winata Karya. Dengan pokok surat merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjuk tim penilai.

Selain itu masih terdapat potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst jo Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 dengan amar putusan menolak Peninjauan Kembali Dinas Perumahan dan memerintahkan Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) memberikan ganti rugi sebesar Rp.4.730.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah kepada

Penggugat (473 KK), Atas kasus Perkara pembebasan tanah seluas $\pm$ 2,4 Ha di wilayah Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dibangun Rumah Susun Milik (Rusunami) sebanyak 6 Blok (200 unit/blok);

Biro hukum akan mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari bukti baru/novum dalam rangka upaya hukum.

d. Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS

Saldo Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS merupakan Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat di Dinas Kesehatan.

Saldo Utang Belanja kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp4.686.258.162,00 dan Rp6.104.955.893,00. Rincian Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS disajikan pada Tabel 5.48.

Tabel 5.48
Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS)
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1.	Utang Gakin, SKTM, dan Gizi Buruk	4.626.372.236,00	3.330.801.432,00
2.	Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS	59.885.926,00	2.774.154.461,00
Jumlah		4.686.258.162,00	6.104.955.893,00

Saldo tersebut merupakan tagihan dari 20 lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mutasi sebagai berikut:

Utang per 31 Desember 2014	Rp	6.104.955.893,00
Jumlah klaim yang diajukan tahun 2015	Rp	22.922.561.775,00
Pembayaran tahun 2015	Rp	(18.270.814.358,00)
Koreksi	Rp	(3.111.071.494,00)
Pengurangan atas utang yang tidak layak klaim (Selisih Paket Pelayanan Esensial/Katastropik)	Rp	(2.959.373.654,00)
Utang per 31 Desember 2015	Rp	4.686.258.162,00

Rincian utang kepada lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015 disajikan pada pada tabel 5.49.

Tabel 5.49
Rincian Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Per 31 Desember 2015

No.	Lembaga Medis	Utang JPK Gakin (Rp)	Utang JPK PNS (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PMI DKI Jakarta	4.017.900.000	-	4.017.900.000
2.	St Carolus	245.729.437	-	245.729.437
3.	Fatmawati	113.113.351	-	113.113.351
4.	IA Hermina Jatinegara	67.909.612	-	67.909.612
5.	Jakarta	58.158.970	-	58.158.970
6.	Sari Asih Cileduk	-	32.938.868	32.938.868
7.	Sukmul	32.258.878	-	32.258.878
8.	Pertamina Jaya	31.642.765	-	31.642.765
9.	Pelni	19.277.466	-	19.277.466
10.	Dr. Suyoto	-	15.133.284	15.133.284
11.	Medirossa	-	11.368.774	11.368.774
12.	Pusat Pertamina	8.657.722	-	8.657.722
13.	Tangerang (RSUD)	7.187.000	-	7.187.000
14.	Budi Jaya	6.977.000	-	6.977.000
15.	Pantai Indah Kapuk	4.765.000	-	4.765.000
16.	Port Medical Center	4.248.000	-	4.248.000
17.	Sulianti Suroso	3.989.551	-	3.989.551
18.	RSIA Evasari	3.511.484	-	3.511.484
19.	Resti Mulya	1.046.000	-	1.046.000
20.	Bhayangkara Sespimma Polri	-	445.000	445.000
Jumlah		4.626.372.236	59.885.926	4.686.258.162

e. Utang Belanja BLUD

Utang Belanja BLUD merupakan utang-utang pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja BLUD per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp65.304.595.501,00 dan Rp112.673.016.826,00.

Saldo Utang Belanja BLUD per 31 Desember 2015 terdiri dari:

Tabel 5.50
Utang Belanja BLUD
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014(Rp)
1.	Utang Belanja BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	623.974.135,00	526.778.984,00
2.	Utang Belanja BLUD RSUD dan RSKD	64.175.543.212,00	103.678.727.607,00
3.	Utang Belanja BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	505.078.154,00	8.467.510.235,00
	Jumlah	65.304.595.501,00	112.673.016.826,00

Utang Belanja BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp64.175.543.212,00 terdiri dari:

a)	RSUD Kepulauan Seribu	Rp	13.925.750,00
b)	RSU Kec. Kemayoran	Rp	6.048.000,00
c)	RSU Kec. Johar Baru	Rp	2.750.000,00
d)	RSU Kec. Pademangan	Rp	34.924.250,00
e)	RSU Kec. Jagakarsa	Rp	47.641.000,00
f)	RSU Kec. Kramat Jati	Rp	3.355.569,00
g)	BLUD RS Koja	Rp	23.655.381.431,00
h)	BLUD RS Cengkareng	Rp	19.709.917.147,00
i)	BLUD RS Budhi Asih	Rp	20.686.306.545,00
j)	BLUD RS Duren Sawit	Rp	15.293.520,00
	Jumlah	Rp	64.175.543.212,00

f. Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD

Penyajian akun ini merupakan konversi dari laporan keuangan BLUD versi Standar Akuntansi Keuangan ke laporan keuangan versi Standar Akuntansi Pemerintahan.

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp50.645.006.925,00 dan Rp58.640.105.981,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) BLUD RS Tarakan

Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Tarakan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp31.468.213.526,00 dan Rp0,00. Utang tersebut merupakan utang kepada pedagang besar farmasi.

2) BLUD RS Pasar Rebo

Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Pasar Rebo per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp18.977.913.399,00 dan Rp12.742.236.201,00. Utang tersebut merupakan utang kepada pedagang besar farmasi dan rekanan RSUD Pasar Rebo.

3) BLUD RS Cengkareng

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Cengkareng per 31 Desember 2014 yaitu Rp20.694.256.477,00 pada Tahun 2015 direklasifikasi sebagai Utang Jangka Panjang di BLUD.

4) Dinas Perhubungan

Utang kepada Pihak Ketiga di Dinas Perhubungan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp25.203.613.303,00. Utang pada tahun 2014 yang merupakan Utang kepada operator Busway, dan Imbalan Pasca Kerja Karyawan

yang terdapat di BLUD Transjakarta Busway sudah dibayarkan pada tahun 2015.

5) Kantor Pengelola Taman Mergasatwa Ragunan

Utang Kepada Pihak Ketiga di Kantor Pengelola Taman Mergasatwa Ragunan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp198.880.000,00 dan Rp0,00. Utang tersebut merupakan jasa pengobatan (*general check up*) untuk karyawan.

g. Utang Belanja Lainnya

Utang Belanja Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing Rp0,00 dan Rp277.093.440,00.

5.5.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp5.819.970.609,00 dan Rp11.932.100.484,00. Utang tersebut merupakan utang jaminan bongkar bangunan reklame sebesar Rp5.114.604.408,00 dan utang restitusi pajak sebesar Rp705.366.201,00.

5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp197.707.784.670,00 dan Rp0,00. Rincian Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 2014 dapat dilihat pada Tabel 5.51 berikut ini:

Tabel 5.51
Kewajiban Jangka Panjang
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1.	Utang Dalam Negeri	169.192.675.455,00	0,00
2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	28.515.109.215,00	0,00
	Jumlah	197.707.784.670,00	0,00

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rincian Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.2.2.1 Utang Dalam Negeri

5.5.2.2.1.1 Utang Kepada Pemerintah Pusat

Saldo Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp169.192.675.455,00 dan Rp0,00. Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun dana pinjaman tersebut telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp120.308.375.049,00 pada tahun 2014, dan sebesar Rp48.884.300.406,00 pada tahun 2015. Jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman dimulai pada tahun 2017, yaitu setiap tanggal 1 Maret dan 1 September, sehingga tidak terdapat penyajian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015. Sedangkan untuk pembayaran bunga pinjaman sudah mulai jatuh tempo pada tahun 2015.

5.5.2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya

5.5.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang di BLUD

Besaran Utang Jangka Panjang di BLUD pada tahun 2015 dan 2014 adalah Rp28.515.109.215,00 dan 0,00. Saldo tersebut dimiliki oleh RSUD Cengkareng sebesar Rp20.694.256.477,00 dan RSUD Pasar Rebo sebesar Rp7.820.852.738,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. RSUD Cengkareng

Utang Jangka Panjang di BLUD pada RSUD Cengkareng adalah reklasifikasi dari utang kepada

Pihak Ketiga di BLUD RS Cengkareng. Utang Jangka Panjang di BLUD per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp20.694.256.477,00 dan 0,00. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RSUD Cengkareng adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52

Rincian Utang Jangka Panjang di RSUD Cengkareng
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1.	Imbalan Pasca Kerja Karyawan	17.843.628.539,00	0,00
2.	Bagi Hasil Optik	0,00	0,00
3.	Utang Lain (Eks. PT RS. Cengkareng)	2.850.627.938,00	0,00
	JUMLAH	20.694.256.477,00	0,00

b. RSUD Pasar Rebo

Utang Jangka Panjang di BLUD pada RSUD Pasar Rebo besarnya pada tahun 2015 dan 2014 adalah Rp7.820.852.738,00 dan 0,00. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RSUD Pasar Rebo adalah sebagai berikut:

Tabel 5.53

Rincian Utang Jangka Panjang di RSUD Pasar Rebo
Per 31 Desember 2015 dan 2014

No	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
1.	Imbalan Pasca Kerja Karyawan	7.165.379.494,00	0,00
2.	Penghargaan Masa Bakti	655.473.244,00	0,00
	JUMLAH	7.820.852.738,00	0,00

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Penyajian akun Ekuitas tahun 2015 berbeda dengan penyajian di tahun-tahun sebelumnya, dimana Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Perubahan ini dikarenakan mulai tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menggunakan basis akrual pada penyusunan Laporan Keuangan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2015 di Neraca sebesar Rp420.104.811.786.307,00 adalah nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2015.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada neraca awal per 1 Januari 2015 yang disusun berdasarkan basis akrual adalah Rp424.776.006.494.695,00. Nilai ini sama dengan nilai ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang disusun berdasarkan basis kas menuju akrual. Penyesuaian atas nilai ekuitas yang disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual ke dalam basis akrual disajikan sebagai komponen koreksi ekuitas pada tahun berjalan.

2. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada LPE Tahun 2015 adalah sebesar Rp3.369.042.187.955,00, yang terdiri dari:

a. Koreksi Penambahan Ekuitas

Koreksi Penambahan Ekuitas Tahun 2015 adalah sebesar Rp4.102.871.354.386,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kurang Catat Aset Tahun 2014 sebesar Rp3.816.941.573.612,00,
- 2) Koreksi Lebih Catat Utang Tahun 2014 sebesar Rp25.883.411.917,00

- 3) Pembatalan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas saldo Piutang per 31 Desember 2014 yang piutangnya telah terbayar di tahun 2015 sebesar Rp260.046.368.857,00.
- b. Koreksi Pengurangan Ekuitas
- Koreksi Pengurangan Ekuitas Tahun 2015 adalah sebesar Rp882.863.701.760,00 dengan rincian sebagai berikut
- 1) Lebih Catat Aset Tahun 2014 sebesar Rp644.736.801.668,00.
 - 2) Kurang Catat Utang Kepada Pemerintah Pusat tahun 2014 sebesar Rp120.308.375.049,00.
 - 3) Kurang Catat Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp27.621.298.251,00.
 - 4) Koreksi Pendapatan Pajak – LO (Laporan Operasional) Rp83.528.053.265,00.
 - 5) Lebih Catat Pendapatan Tahun 2014 sebesar Rp6.669.173.527,00.

Penjelasan lebih rinci dari Koreksi Ekuitas disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan poin 5.4 tentang Laporan Perubahan Ekuitas.

- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
- Koreksi atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan yang disajikan di LPE menyajikan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tahun 2014 sebagai dampak dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua pada tahun 2015.
- Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp25.946.813.122.084,00, yang terdiri dari:

- 1) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp24.737.392.389.270,00,
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Fasos Fasum sebesar Rp1.100.232.508.224,00.
- 3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dijual sebesar Rp41.835.372.724,00.
- 4) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp67.352.851.866,00.

d. Surplus – LO

Surplus–LO per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp18.055.610.761.070,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	55.639.786.807.556,00	
Beban	(37.666.430.394.825,00)	
Surplus Kegiatan Operasional		17.973.356.412.731,00
Surplus Kegiatan Non Operasional		83.836.789.342,00
Beban Luar Biasa		(1.582.441.003,00)
Surplus – LO		18.055.610.761.070,00

5.6 Laporan Arus Kas

Fungsi Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2015.

Berikut disajikan secara rinci Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2015.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup, untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang, tanpa mengandalkan sumber

pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Penetapan Arus Kas per 31 Desember 2015, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp42.247.081.167.123,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp32.738.421.937.943,00. Sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.508.659.229.180,00.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Penyesuaian, Pendapatan Hibah, dan (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan dalam tabel 5.54 sebagai berikut:

Tabel 5.54
Arus Kas Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

(dalam rupiah)			
No.	Uraian	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)
1	2		
1	ARUS KAS MASUK :		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	29.076.926.598.506,00	27.050.949.023.586,00
b.	Penerimaan Retribusi daerah	459.459.498.063,00	515.162.936.406,00
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	527.280.486.037,00	465.979.962.538,00
d.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	3.530.447.056.431,00	3.226.559.653.992,00
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.751.741.852.400,00	9.279.068.989.723,00
f.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	135.525.792.297,00	312.478.953.549,00
g.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	0,00	85.985.282.000,00
h.	Penerimaan Dana Penyesuaian	2.755.110.753.389,00	2.482.936.697.000,00
i.	Penerimaan Hibah	10.589.130.000,00	10.133.196.000,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	42.247.081.167.123,00	43.429.254.694.794,00
2	ARUS KAS KELUAR :		
a.	Pembayaran Pegawai	17.312.344.016.739,00	12.604.588.791.793,00
b.	Pembayaran Barang	10.584.935.805.485,00	12.582.041.265.502,00

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)
c.	Pembayaran Bunga	5.478.639.527,00	1.218.528.851,00
d.	Pembayaran Subsidi	659.081.781.344,00	0,00
e.	Pembayaran Hibah	1.717.428.915.536,00	1.462.044.387.771,00
f.	Pembayaran Bantuan Sosial	2.087.123.200.000,00	680.155.340.000,00
g.	Pembayaran Bantuan Keuangan	371.152.504.510,00	14.005.706.784,00
h.	Pembayaran Tak Terduga	877.074.802,00	2.136.402.124,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	32.738.421.937.943,00	27.346.190.422.825,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II)	9.508.659.229.180,00	16.083.064.271.969,00

1. Arus Kas Masuk

a. Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp29.076.926.598.506,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.025.977.574.920,00 atau 7,49% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp27.050.949.023.586,00.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp459.459.498.063,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp55.703.438.343,00 atau 10,81% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp515.162.936.406,00.

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp527.280.486.037,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp61.300.523.499,00 atau 13,16% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp465.979.962.538,00.

d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp3.530.447.056.431,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp303.887.402.439,00 atau 9,42% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp3.226.559.653.992,00.

Arus kas masuk Lain-lain PAD per 31 Desember 2015 termasuk pendapatan bunga dari Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah sebesar Rp78.999.209.715,00, sebagaimana dijelaskan CaLK 5.1.1.1.4.7 tentang Pendapatan Bunga.

e. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp5.751.741.852.400,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.527.327.137.323,00 atau 38,01% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp9.279.068.989.723,00.

f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp135.525.792.297,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp176.953.161.252,00 atau 56,63% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp312.478.953.549,00.

g. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat nihil. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp85.985.282.000,00 atau 100% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014.

h. Penerimaan Dana Penyesuaian

Arus kas masuk dari Dana Penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp2.755.110.753.389,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp272.174.056.389,00 atau 10,96% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp2.482.936.697.000,00.

Arus kas masuk dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus per 31 Desember 2015 bersumber dari:

1. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Sertifikasi sebesar Rp1.746.656.471.000,00; dan
2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.008.454.282.389,00.

i. Penerimaan Hibah

Arus kas masuk dari Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp10.589.130.000,00 merupakan hibah dari PT Jasa Raharja. Arus kas masuk dari Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tidak termasuk Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sebesar Rp1.868.130.616.881,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.1.2, dikarenakan Pendapatan Hibah tersebut disalurkan langsung kepada PT Mass Rapid Transit tanpa

melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tersebut berasal dari pemberian pinjaman *Japan International Cooperation Agency (JICA)* kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp10.133.196.000,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 naik sebesar Rp455.934.000,00 atau 4,50%.

2. Arus Kas Keluar

a. Pembayaran Pegawai

Belanja Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2015.

Arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp17.312.344.016.739,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.a. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.707.755.224.946,00 atau 37,35% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp12.604.588.791.793,00.

b. Pembayaran Barang

Belanja Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Arus kas keluar Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp10.584.935.805.485,00. Arus kas

keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.997.105.460.017,00 atau 15,87% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp12.582.041.265.502,00.

c. Pembayaran Bunga

Belanja Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman.

Arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp5.478.639.527,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.260.110.676,00 atau 349,61% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp1.218.528.851,00.

d. Pembayaran Subsidi

Arus kas keluar Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp659.081.781.344,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d, sedangkan arus kas keluar Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 adalah nihil.

e. Pembayaran Hibah

Belanja Hibah merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp1.717.428.915.536,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.e. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp255.384.527.765,00 atau 17,47% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja

Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp1.462.044.387.771,00.

f. Pembayaran Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2015.

Arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp2.087.123.200.000,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.f. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.406.967.860.000,00 atau 206,86% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp680.155.340.000,00.

g. Pembayaran Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya.

Arus kas keluar Belanja Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp371.152.504.510,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.g. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp357.146.797.726,00 atau 2.550,01% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp.14.005.706.784,00.

h. Pembayaran Tak Terduga

Arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp877.074.802,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar

Rp1.259.327.322,00 atau 58,95% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp2.136.402.124,00.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2014, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat yaitu ditunjukkan oleh pengadaan Belanja Modal sebesar Rp10.411.118.390.249,00 dan penjualan aset sebesar Rp15.564.309.197,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2015 Arus kas keluar belanja modal sebesar Rp10.244.016.709.208,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.2 dan penjualan aset sebesar Rp92.063.176.671,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.1.1.4.1.

Arus Kas Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap. Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Investasi selama Tahun 2014 dan periode yang berakhir 31 Desember 2015, sebagai berikut:

Tabel 5.55
Arus Kas Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)
1	2	3	3
1	ARUS KAS MASUK :		
a.	Penjualan atas Tanah	78.888.677.000,00	210.000.000,00
b.	Penjualan atas Brandgang	0,00	3.550.000.000,00
c.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	7.617.870.887,00	11.642.922.097,00
d.	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.556.628.784,00	161.387.100,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	92.063.176.671,00	15.564.309.197,00
2	ARUS KAS KELUAR :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan	78.999.209.715,00	73.101.911.062,00
b.	Perolehan Tanah	3.451.775.763.772,00	1.754.586.883.131,00
c.	Perolehan Peralatan dan Mesin	2.002.190.574.946,00	4.062.228.522.758,00
d.	Perolehan Gedung dan Bangunan	2.063.978.323.661,00	2.589.956.270.028,00
e.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.685.243.694.385,00	1.599.630.901.228,00
f.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	40.828.352.444,00	404.715.813.104,00
g.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.501.000.000.000,00	4.033.500.000.000,00
h.	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	4.819.060.710,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	13.824.015.918.923,00	14.522.539.362.021,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (I-II)	(13.731.952.742.252,00)	(14.506.975.052.824,00)

1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2015 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan Penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset Lainnya yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas Daerah sebesar Rp92.063.176.671,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp15.564.309.197,00.

2. Arus Kas Keluar

a. Pembentukan Dana Cadangan

Sebagaimana telah diungkapkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, arus kas masuk yang diperoleh dari bunga deposito Dana Cadangan Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp78.999.209.715,00, diakui

sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dikeluarkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada pos Pembentukan Dana Cadangan (menambah Pokok Dana Cadangan). Sedangkan arus kas masuk yang diperoleh dari bunga deposito Dana Cadangan Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp73.101.911.062,00.

b. Perolehan Aset Tetap

Arus Kas Keluar berupa Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah aset dan akan menambah aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2015 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh aset tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp10.244.016.709.208,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp10.411.118.390.249,00.

c. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada BUMD, PT Patungan, dan Badan Pengelola (BP).

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Patungan sebesar Rp4.033.500.000.000,00.

Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.501.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) PT Mass Rapid Transportation	Rp	145.000.000.000,00
2) PT Bank DKI	Rp	1.000.000.000.000,00
3) PT Jakarta Propertindo	Rp	1.500.000.000.000,00
4) PD Dharma Jaya	Rp	46.000.000.000,00
5) PD PAL Jaya	Rp	70.000.000.000,00
6) PT Transportasi Jakarta	Rp	700.000.000.000,00
7) PT Penjamin Kredit Daerah	Rp	40.000.000.000,00

Penyertaan Modal pada PT MRT Jakarta sebesar RP145.000.000.000,00 tidak termasuk penyertaan modal yang sumber dananya berasal dari hibah Pemerintah Pusat untuk kegiatan PT MRT Jakarta sebesar Rp1.868.130.616.881,00. Sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.1.2, dikarenakan Pendapatan Hibah tersebut disalurkan langsung kepada PT MRT Jakarta tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat tersebut dianggarkan dan dicatat dalam pos pengeluaran pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.3.

d. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat nihil dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sebesar Rp4.819.060.710,00.

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan berasal dari Penerimaan Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara TA 2014) Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, dijelaskan pada Tabel 5.56 sebagai berikut:

Tabel 5.56
Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)
1	2	3	3
1	ARUS KAS MASUK :		
a.	Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2014)	374.971.318.364,00	456.708.189.369,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	374.971.318.364,00	456.708.189.369,00
2	ARUS KAS KELUAR :		
a.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	4.084.644.411,00	8.169.288.822,00
b.	Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Semester I TA.2015)	813.781.599.291,00	374.971.318.364,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	817.866.243.702,00	383.140.607.186,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (I-II)	(442.894.925.338,00)	(73.567.582.183,00)

1. Arus Kas Masuk

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2015, arus kas masuk dari Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA 2014) sebesar Rp374.971.318.364,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp456.708.189.369,00.

2. Arus Kas Keluar

a. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Lembaga-Lembaga Keuangan. Arus kas keluar Pembayaran Utang Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp8.169.288.822,00 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp4.084.644.411,00 yang merupakan pembayaran Utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan nomor OECF IP-414 SLA-876 yang digunakan untuk Pembiayaan Jakarta Solid Waste Management Improvement Project pada Dinas Kebersihan yang diberikan pada tahun 1996.

b. Belanja Dibayar di Muka

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 arus kas keluar Belanja Dibayar di Muka atau sisa kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 tercatat sebesar Rp813.781.599.291,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp374.971.318.364,00.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

1. Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan

Penerimaan Uang Jaminan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp74.679.500,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp967.244.261,00.

2. Penerimaan dan Pengeluaran Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 terdapat penerimaan dan pengeluaran jasa giro rekening Kas Non Anggaran sebesar Rp399.754.105,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 terdapat penerimaan dan pengeluaran jasa giro rekening Kas Non Anggaran sebesar Rp459.869.244,00.

3. Penerimaan dan Pengeluaran PFK

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 jumlah penerimaan dan pengeluaran PFK masing-masing sebesar Rp368.891.709.589,00 dan Rp316.452.058.679,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 jumlah penerimaan dan pengeluaran PFK masing-masing sebesar Rp2.195.517.949.604,00 dan sebesar Rp2.081.441.143.565,00.

Tabel 5.57
Perhitungan Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2015

(dalam rupiah)

No	Jenis Potongan	Penerimaan PFK per 31 Desember 2015	Pengeluaran PFK Per 31 Desember 2015
1.	PPN	28.086.875.987,00	72.067.529.368,00
2.	PPh Pasal 21	14.294.051.883,00	(82.110.235.732,00)
3.	PPh Pasal 22	716.660.890,00	10.371.354.562,00
4.	PPh Pasal 23	1.521.224.788,00	4.415.387.896,00
5.	PPh Pasal 4 ayat 2	5.169.615.072,00	(6.549.800.378,00)
6.	Jamsostek	290.661.646,00	236.647.157,00
7.	Asuransi	4.238.600.000,00	3.446.678.963,00
8.	Dana Pensiun	146.518.637.056,00	146.518.857.228,00
9.	Askes	61.691.672.994,00	61.691.765.698,00
10.	Tabungan Hari Tua	100.249.089.273,00	100.249.239.917,00
11.	Taperum	6.114.620.000,00	6.114.634.000,00
	Jumlah	368.891.709.589,00	316.452.058.679,00

5.6.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 terjadi penurunan kas bersih sebesar Rp4.622.241.542.811,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp1.763.683.754.065,00. Saldo awal kas di BUD tahun 2015 sebesar Rp9.069.887.775.249,00, sehingga atas kenaikan yang terjadi maka saldo akhir kas di BUD/Kas Daerah per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp4.447.646.232.438,00.



BAB VI

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2015 AUDITED**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI

NON KEUANGAN

Informasi Non Keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain adalah :

a. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka kedudukan Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 (tujuh) meter di atas permukaan laut, luas wilayah adalah 7.659,02 km² terdiri dari darat seluas 661,52 km² termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu dan luas lautan 6.997,50 km². Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kodya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Di sebelah utara kota Jakarta membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang $\pm$ 35 km, yang menjadi bermuaranya 13 sungai dan 2 buah kanal. Batas wilayah Provinsi DKI Jakarta, di sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah Otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya

dilaksanakan menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk Kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 32 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

- 1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
- 2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom.

b. Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017. Selain bertugas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Dalam hal ini, yang menjadi Urusan Wajib mencakup:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan Rakyat
- 5) Penataan Ruang;
- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pertanahan
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 12) Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS);
- 13) Sosial;
- 14) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 16) Penanaman Modal;
- 17) Kebudayaan;
- 18) Pemuda dan Olahraga;
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20) Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah;
- 21) Ketahanan Pangan;
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 23) Statistik
- 24) Kearsipan
- 25) Komunikasi dan Informatika.
- 26) Perpustakaan

Selanjutnya yang menjadi Urusan Pilihan mencakup

- 1) Pertanian
- 2) Kehutanan
- 3) Energi dan Sumberdaya Mineral
- 4) Pariwisata

- 5) Kelautan dan Perikanan
- 6) Perdagangan
- 7) Industri.

c. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017, yang telah diundangkan pada tanggal 26 Februari 2008 dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1, yang bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui langkah-langkah seperti, 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2013-2017 yaitu :

1) Visi;

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 adalah **“JAKARTA BARU, KOTA MODERN YANG TERTATA RAPI, MENJADI TEMPAT HUNIAN YANG LAYAK DAN MANUSIAWI, MEMILIKI MASYARAKAT YANG BERKEBUDAYAAN, DAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”.**”

Visi pembangunan jangka menengah diatas dapat dijelaskan bahwa Kota Jakarta adalah:

- a. Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
- b. Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
- c. Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera.
- d. Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

2) Misi;

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain;
- c. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota;
- d. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota;
- e. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

3) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, maka Pemerintah

Daerah akan melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah.

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2013 difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain: banjir, genangan, banjir rob, transportasi, permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Jakarta memerlukan upaya yang menerus dan berkesinambungan didukung sumberdaya yang memadai. Alokasi pendanaan untuk bidang infrastruktur banjir, transportasi, permukiman, pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas. Disisi lain, upaya untuk mengefisienkan belanja pemerintahan daerah perlu terus dilakukan sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan kota. Upaya penanganan banjir, genangan dan banjir rob serta pembenahan sistem transportasi yang berbasis angkutan massal akan dilaksanakan secara menerus dan menjadi prioritas dalam periode pembangunan lima tahun kedepan (2013-2017).

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta , dituangkan melalui kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Rencana Program Pembangunan Daerah.

Rencana Strategi Pembangunan Daerah antara lain :

- a) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota;
- b) Mengembangkan jejaring kerjasama nasional, regional dan internasional;
- c) Menerapkan sistem manajemen mutu pada setiap layanan publik;
- d) Membangun, meningkatkan dan memelihara semua infrastruktur ekonomi/ sosial kota yang strategis;
- e) Meningkatkan efisiensi dan kinerja belanja, diversifikasi dan optimalisasi pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan daerah dan kemitraan strategis pemerintah dengan swasta;
- f) Membentuk birokrasi yang efektif;
- g) Menjamin akses layanan publik untuk keluarga miskin;
- h) Menetapkan kinerja dan menuangkan dalam bentuk *performance agreement contract* antara pimpinan dan bawahan secara berjenjang.

Rencana Program Pembangunan Daerah antara lain :

- a) Program *dedicated*, yaitu seperti pengendalian banjir, pembangunan perhubungan dan transportasi, penanggulangan polusi, peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan budaya keragaman, penerapan kaidah "*good governance*" dan pengelolaan bencana.
- b) Program menurut urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.
- c) Program Kewilayahan yaitu kerjasama wilayah Jabodetabekjur, program kerjasama provinsi se Jawa-Bali, pengembangan kawasan, implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2010 pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21.

Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- a) Pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
- b) Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
- c) Keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
- d) Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- e) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.
- b) Dana Perimbangan, terdiri dari:

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi :

- a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
- b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
- c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi :

- a) Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial), belanja modal dan belanja tak terduga;
- b) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan;
- c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain :

- a) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah;

- b) Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;
- c) Melakukan efisiensi belanja;
- d) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).
- e) Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;
- f) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
- g) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

d. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan amanat undang-undang dan juga tuntutan kebutuhan, akibat tidak semua sumber daya dapat diperoleh dari daerah sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lama menjalin kerjasama antar daerah (dalam negeri) maupun antar kota/*sister cities* (kota di luar negeri) untuk berbagai keperluan dalam segala bidang.

1) Kerjasama Antar Daerah/Kota

Kerjasama DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Bodetabekjur) dalam bentuk;

- i. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Bodetabekjur
Setiap tahun dialokasikan anggaran bantuan keuangan diantaranya untuk harmonisasi antar kawasan dan kepentingan pembangunan Provinsi DKI Jakarta (keterpaduan, keserasian

dan keseimbangan), seperti untuk mengurangi banjir, meningkatkan laju pergerakan orang dan barang, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan lain sebagainya.

ii. Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP)

Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur), yang didirikan sejak tahun 1976 (saat itu masih meliputi Jabotabek) telah mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensimplikasikan program/kegiatan kerjasama pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.

Kerjasama pembangunan ini telah berkembang pesat, kelembagaannya telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kerjasama di wilayah Jabodetabekjur, dalam aturan kelembagaan kerjasama BKSP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan memberi kontribusi dana untuk pembiayaan operasional sekretariat. Kontribusi dimaksud sesuai ketentuan diberikan dalam bentuk bantuan hibah yang digunakan untuk kegiatan operasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi program/kegiatan kerjasama di wilayah Jabodetabekjur.

2) Kerja Sama Provinsi DKI Jakarta Dengan Provinsi seJawa-Bali

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbang Reg) Jawa-Bali Tahun 2015 dilaksanakan di Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri oleh 7 Provinsi seJawa-Bali, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Pada acara tersebut seluruh Gubernur se Jawa-Bali diminta untuk memberikan paparan dengan tema “Meningkatkan Penyediaan dan Perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) serta Upaya Penanganan Sampah Guna Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Pulau Jawa dan Bali”.

Adapun isu-isu strategis yang dirumuskan dalam Musrenbang Regional se Jawa-Bali Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Persebaran dan pemerataan penduduk yang tidak seimbang antara desa dengan kota;
- 2) Meningkatnya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman dan kegiatan industri;
- 3) Masih terdapat Ketimpangan pendapatan antar wilayah di Pulau Jawa dan Bali;
- 4) Munculnya kawasan-kawasan kumuh dan persoalan-persoalan sosial di perkotaan sebagai akibat dari besarnya urbanisasi tenaga kerja tidak terampil dari desa ke perkotaan;
- 5) Belum optimalnya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam hal: tata ruang, penggunaan lahan, degradasi hutan, penyediaan air baku, kualitas air permukaan, penurunan air tanah, dan terjadinya berbagai bencana alam;
- 6) Belum terpenuhinya perumahan dan permukiman yang layak dan memadai bagi penduduk Pulau Jawa dan Bali;
- 7) Masih rendahnya perilaku, budaya dan persepsi masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;
- 8) Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam hal pengelolaan sampah terpadu;
- 9) Masih rendahnya penegakan hukum dalam pengelolaan sampah;

- 10) Terbatasnya ketersediaan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- 11) Belum terintegrasinya penanganan dampak perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan dan tata ruang.

Pada Musrenbang Regional seJawa-Bali tersebut direkomendasikan perlunya upaya-upaya strategi dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup di Wilayah Jawa dan Bali, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dukungan pembiayaan bagi penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) dan pengelolaan sampah;
- 2) Pemulihan dan pelestarian fungsi ekosistem dan rehabilitasi kerusakan lingkungan melalui pola kemitraan dan mediasi dengan berbagai pihak;
- 3) Pemerintah Pusat perlu menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Provinsi seJawa dan Bali;
- 4) Optimalisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan mengutamakan potensi sumberdaya lokal, teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan dampak kerusakan lingkungan;
- 5) Peningkatan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
- 6) Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam disertai dengan penegakan hukum yang tepat;
- 7) Peningkatan kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam membantu kualitas lingkungan hidup;
- 8) Pelaksanaan reboisasi terhadap lahan yang kritis sebagai suatu bentuk usaha pengendalian agar memiliki nilai yang ekonomis;
- 9) Penyediaan hunian yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- 10) Penyelarasan program pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional secara profesional dan proporsional;

- 11) Pengembangan program prioritas berdasarkan kaidah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 12) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui regulasi yang komprehensif.
- 13) Peningkatan peran swasta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) dan pengelolaan sampah;
- 14) Pengembangan kerja sama untuk mendorong peningkatan investasi swasta dalam pengelolaan sampah;
- 15) Pembentukan Gugus Tugas di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam penyelesaian masalah penyediaan lahan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional.

Dan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung hasil Musrenbang Regional seJawa-Bali tersebut, ditandatangani “Deklarasi Jakarta” berupa kesepakatan untuk dilaksanakan bersama dan dianggarkan dalam APBD masing-masing Provinsi berupa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan dan mengintegrasikan kebijakan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) serta pengelolaan sampah.
- 2) Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan dalam ketersediaan dan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) serta pengelolaan sampah.
- 4) Meminta pemerintah pusat untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan dan

perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) serta pengelolaan sampah

Pada tahun 2016 mendatang, Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai Tuan Rumah penyelenggaraan Musrenbang Regional se Jawa-Bali Tahun 2016.

3) Kerjasama Antar Kota (Luar Negeri)

A. Program *Sister City*

Memorandum of Understanding dengan 21 kota di seluruh dunia (Jeddah, Seoul, Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, Beijing, Berlin, Arkansas, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi, Istanbul, Maputo, Kyiv, Moskow, Al Qud's As Shareef, Pyongyang dan Budapest). Terdapat 8 kota yang memiliki hubungan *sister city* yang tergolong sangat aktif yaitu Seoul, Rotterdam, Tokyo, Beijing, Berlin Bangkok, Moscow, Pyongyang dan Budapest. Adapun program kerja sama *sister city* selama tahun 2015 yaitu:

- a. Seoul, Korea Selatan. Perencanaan Kota, Transportasi Kota, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Masyarakat, Olahraga dan Pemuda. Kegiatan yang dilakukan berupa:
 - 1) *Seoul Vacation Training Project*
 - 2) *Training for Public Officials*
 - 3) Enjoy Jakarta Basket Ball Tournament
 - 4) Bantuan finansial, obat-obatan dan tenaga medis untuk korban bencana Tsunami Aceh
 - 5) *Hi Seoul Festival*
 - 6) *Seoul Sport Exchange Program*
 - 7) Program beasiswa tugas belajar Master (S2) Seoul dan *University of Seoul*
 - 8) *Brother Sister Project*
 - 9) Seminar dan konferensi internasional tentang perubahan cuaca, persampahan dan air limbah
 - 10) *Seoul Training Workshop for Municipal Officials of Foreign Cities*

- b. Rotterdam, Belanda. Transportasi Kota, Pembangunan Kawasan Kota Tua, Sunda Kelapa
 - 1) Kerjasama Kepelabuhan antara LA Port dan PT Pelindo II
 - 2) MoA bidang Water Management berupa pelatihan pegawai
 - 3) Pelatihan bagi operator Kapal Keruk (Dredging) bagi Dinas PU
 - 4) Kerjasama dalam rangka hibah dua unit kapal keruk, pada tahun
 - 5) MoA tentang Urban Water Management
 - 6) Pengiriman peserta Batch ke 1-3 untuk pelatihan dan magang di Rotterdam (DUTEP)
 - 7) Kunjungan Walikota Rotterdam ke Jakarta dan sebaliknya
- c. Tokyo, Jepang. Manajemen Kota, Pemuda dan Olahraga, Seni dan Budaya, Ketenagakerjaan
 - 1) Partisipasi Tokyo pada Enjoy Jakarta Basetball Tournament
 - 2) Partisipasi Tokyo pada Jakarta International 10k
 - 3) Partisipasi Jakarta pada Tokyo Youth Football Tournament (U-14)
 - 4) Partisipasi Jakarta pada Tokyo Half Marathon
 - 5) Kerjasama dengan Clean Authority Tokyo 23 (CAT23) dalam bidang pengelolaan sampah
 - 6) Kerjasama Saling Promosi Pariwisata Jakarta - Tokyo
- d. Beijing, RRT. Administrasi Perkotaan, Industri Kecil dan Menengah, Olahraga, Pariwisata, pendidikan, ekonomi dan perdagangan
 - 1) Bantuan obat-obatan untuk korban banjir di Jakarta
 - 2) Partisipasi Beijing pada Enjoy Jakarta Basketball Tournament
 - 3) Partisipasi Jakarta pada pelatihan Bahasa China
 - 4) Pengiriman atlet senam, atletik dan renang
 - 5) Kunjungan DPRD Jakarta - Beijing
 - 6) Partisipasi Jakarta pada World Tourism Cities Federation (WTCF), tahun 2015
 - 7) Beijing City Youth Program Exchange Camp, tahun 2015
 - 8) Pengiriman Atlet Tenis Meja, tahun 2015

- e. Berlin, Jerman. Perencanaan Kota, Angkutan Umum Kota, Air Minum, Limbah
 - 1) Penjajagan untuk pengiriman tenaga ahli Berlin selama 1 bulan pada tahun 2016
- f. New South Wales, Australia. Ekonomi dan Perdagangan, Perencanaan Kota, Pariwisata, dan Kebun Binatang
 - 1) Melakukan pertukaran satwa (Jerapah) guna memperkaya keanekaragaman satwa di TMR.
 - 2) Perpanjangan MoU sekaligus Kunjungan Wakil Gubernur ke Pemerintah Provinsi NSW
- g. Bangkok, Thailand. Ekonomi Perdagangan, Tata Kota, Pariwisata, Kemacetan, Manajemen SDM, Pemerintahan
 - 1) Partisipasi remaja pada Bangkok Sister City Youth Program, pada tahun 2015"
- h. Moscow, Rusia. Arsitektur, Tata Kota, Pertamanan, Olahraga, Kebudayaan, Transportasi, Pariwisata, Perdagangan, Investasi, Legislatif
 - 1) Pertemuan antara Dubes Federasi Rusia, Mr. Mikhail Y. Galuzin, dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2015"
- i. Pyongyang, Korea Utara. Ekonomi, Perdagangan, Manajemen Kota, Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga

Rencana pengiriman satwa ke Korean Central Zoo, sejak tahun 2015 dilakukan proses penandatanganan kerjasama pertukaran satwa tersebut
- j. Budapest, Hungaria. Manajemen Perkotaan, Pariwisata, Kebudayaan, Ekonomi, Legislatif
 - 1) Pelaksanaan Workshop Pengelolaan Air di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta, bekerjasama dengan Kedubes Hungaria di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta

- 2) Penyusunan draft MoU Kerjasama Pertukaran Satwa antara Taman Margasatwa Ragunan dan Sosto Zoo yang berakhir pada Februari 2015

B. Keanggotaan Organisasi Internasional Di Tahun 2015

No.	Organisasi Internasional	Ruang Lingkup Organisasi
1.	UCLG dan METROPOLIS	Pemerintah Daerah
2.	CITYNET	Manajemen Pemukiman
3.	WEGO	<i>e-Government</i>
4.	ANMC 21	Manajemen Krisis, Lingkungan dan Pengembangan Industri
5.	C40	Perubahan Iklim
6.	ASEM MEETING OF GOVERNORS AND MAYORS	Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya
7.	ASEAN CAPITALS GOVERNORS/MAYORS MEETING	Ekonomi, Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan dan Kebudayaan

C. Kerjasama Teknik Luar Negeri

Realisasi program kerjasama teknik luar negeri Tahun 2015:

a. Bahasa

Mengikuti Beijing *Chinese-Language Learning Workshop* di Beijing

b. E- Government

1) Mengikuti *e-Government Workshop* di Seoul

2) Mengikuti *Wego meeting* di Rusia

c. Informatika

Mengikuti *International Open Data Conference* di Ottawa

d. Kebersihan

Mengikuti *International Solid Waste Association Beacon Conference* di Kuala Lumpur

e. Pengelolaan Kebun Binatang

Mengikuti kongres pengelola kebun binatang *International Congress On Zookeeping* di Leipzig

f. Kepemudaan

Mengikuti *Executive Council Meeting Asean-Japan Friendship Association For The 21st Century (Ajafa-21)* di Jepang

g. Kepramukaan

Mengikuti Jambore Pramuka Dunia di Yamaguchi

h. Kesehatan

1) Mengikuti *International Conference On Fixed Combination In The Treatment Of Hypertension, Dyslipidemia And Diabetes Mellitus* di Jerman

2) Mengikuti pertemuan *Fast Track Cities Working Together Toward Social Transformation And Ending Aids* di Mumbai

i. Lingkungan Hidup

1) Mengikuti *Culmination Meeting Pan-Asia Risk Reduction* di Bangkok

2) Mengikuti *ICLEI World Congress* di Seoul

3) Mengikuti *Workshop Cities Clean Air Partnership* di Washington DC

j. Olah raga

1) Mengikuti turnamen olah raga *Tokyo International Youth* di Tokyo

2) Mengikuti turnamen olah raga *Bayeruth Open Table Tennis Paragames* di Jerman

3) Mengikuti *OCA Executive Board Meeting* di Teheran

4) Mengikuti turnamen olah raga *Special Olympics World Summer Games* di Los Angeles

5) Mengikuti turnamen olah raga *Asia Junior Exchange Games* di Tokyo

k. Pariwisata

1) Mengikuti pameran dagang *International Trade Fair For Tourism And Travel* di Rusia

2) Mengikuti *Pacific Asia Travel Association* di Bangalore

l. Pembangunan Kota

1) Mengikuti pertemuan para Kepala Daerah Asem *Meeting For Governors And Mayors* di Bangkok

- 2) Mengikuti *Executive Bureau Meeting UCLG-ASPAC Meeting* di Makati
 - 3) Mengikuti *forum internasional 3R Forum Asia Pacific* di Maladewa
- m. Pemerintahan
- Mengikuti *Chengdu Summer Program For Civil Servants* di Chengdu
- n. Penanggulangan Kebakaran
- 1) Mengikuti pertemuan pimpinan *UI Fire Service Leadership Meeting* di Hongkong
 - 2) Mengikuti konferensi *Critical Communications Asia* di Kuala Lumpur
 - 3) Mengikuti *International Fire Conference And Exhibition* di Kuala Lumpur
- o. Penanggulangan Banjir
- Mengikuti *International Course MTCP International Course on Flood Mitigation and Stormwayer Management* di Malaysia
- p. Penanggulangan Bencana
- Mengikuti *ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise* di Kedah
- q. Peranan Wanita
- Mengikuti *Safe Cities Global Stakeholders Planning Forum* di India
- r. Perhubungan
- Mengikuti Seminar *Rigid Pavement* di Australia
- s. Perkotaan
- Mengikuti pertemuan *International Cities For Life Global Meeting* di Colombia
- t. Tata Kota
- Mengikuti *ESRI Asia Pacific User Conference* di Hongkong
- u. Teknologi Informatika
- 1) Mengikuti pameran *ASIAN Smart City Leaders Luncheon, The IOT Show* di Singapura

- 2) Mengikuti pertemuan bidang teknik informatika *IBM Connect-Executive Xchange* di Singapura
- v. Transportasi
 - 1) Mengikuti *C40 Bus Rapid Transit (BRT) Network Workshop* di Buenos Aires
 - 2) Mengikuti capacity building bidang transportasi *Counterpart Training For Technical Cooperation Project on Training Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Phase 2* di Jepang
- w. Transportasi dan Pembangunan Perkotaan
Mengikuti workshop *Sustainable Mobility and Urban Regeneration* di Seoul

e. Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Perlunya keterpaduan tata ruang wilayah selain karena amanat undang-undang, juga karena adanya kesadaran dan kebutuhan bahwa suatu daerah tidak bisa berkembang secara sendiri, terutama bila terdapat urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang secara nyata saling berhubungan dengan daerah lain, seperti tata air (sistem drainase), jalan, perumahan, kehutanan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks yang lebih luas, maka kesatuan tata ruang wilayah antar daerah sebagai salah satu wujud nyata implementasi Negara Kesatuan.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek yang pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006, yang kini telah berkembang menjadi Jabodetabekjur, dapat dijadikan potensi untuk pengembangan konsep Megapolitan.

f. Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak menjadi strategi penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu. Seluruh kebijakan dan langkah strategis ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hak-hak anak. RPTRA dibangun dalam rangka menyediakan ruang publik terpadu ramah anak yang dilengkapi fasilitas fisik, berfungsi sebagai sarana pemberian layanan dan kegiatan terutama bagi anak dan warga, sehingga RPTRA menjadi tempat tumbuh dan kembang anak, tempat kegiatan sosial warga setempat, sekaligus menambah ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah. RPTRA merupakan pusat pembelajaran, pelatihan, pengembangan dan rujukan dari berbagai kelompok kegiatan (Poktan) yang mendukung terpenuhinya 31 (tiga puluh satu) indikator Kota Layak Anak.

Dasar Hukum Pembentukan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA):

- a. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 349 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, dan
- b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Dalam RPTRA setidaknya terdapat fasilitas dengan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Permainan edukatif indoor dan outdoor yang aman dan ramah anak,
- b. Olahraga dan kesehatan ibu anak seperti Posyandu, Ruang Laktasi, Konsultasi tumbuh kembang anak, lansia, dan sebagainya,
- c. Pendidikan masyarakat seperti BKB PAUD, Pojok Baca, Perpustakaan, Papan Informasi, Penerapan Jam Belajar, Panggung interaktif serta penyediaan sarana wifi/internet,
- d. Ruang Terbuka Hijau, mencakup taman yang indah, taman obat-obatan dan lain-lain,
- e. Kebersihan seperti tempat sampah terpilah dan sarana cuci tangan, toilet bersih, dan ramah anak.

Program dan kegiatan RPTRA terintegrasi dengan 10 Program pokok PKK yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar manusia termasuk anak-anak meliputi :

- a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,
- b. Gotong Royong,
- c. Pangan,
- d. Sandang,
- e. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- f. Pendidikan dan Keterampilan
- g. Kesehatan
- h. Pengembangan Kehidupan Berkomunitas
- i. Pelestarian Lingkungan Hidup, dan
- j. Perencanaan Hidup Sehat.

Kesepuluh program pokok PKK ini pada dasarnya bersinergi dengan 31 indikator pemenuhan hak-hak anak yang sekaligus menjadi dasar dalam upaya Jakarta Menuju Kota Layak Anak dengan RPTRA sebagai wadah konkretnya.

Program Unggulan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari :

- a. Keluarga
- b. BKB-PAUD
- c. Hatinya PKK
- d. Perkuatan Posyandu, dan
- e. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UP2K

Kelima program inti dari Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta ini akan menjadi ruh dari seluruh aktivitas di RPTRA. Dengan adanya sinergi yang positif antara kegiatan di RPTRA dengan 10 Program Pokok PKK dan lima program unggulan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta maka langkah menuju dan menjadi kota yang ramah serta layak untuk anak segera terwujud di wilayah DKI Jakarta. Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta memberikan penguatan SDM dalam pengelolaan RPTRA, mulai dari tingkat kelurahan, kota sampai dengan provinsi.

Dalam kelanjutannya, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dan SKPD terkait beserta Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta menggandeng Perguruan Tinggi dan CSR perusahaan yang ada di DKI Jakarta menjadi satu tim terpadu untuk mendukung terwujudnya RPTRA baik secara fisik ataupun non fisik mulai dari penyediaan lokasi, kelengkapan, sarana prasarana, pembinaan SDM pengelola RPTRA sampai dengan aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dasar melibatkan PKK Provinsi DKI Jakarta adalah Permendagri 1/2013 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK.

RPTRA dilengkapi berbagai fasilitas, pada tahap awal dibangun dengan menggunakan dana CSR perusahaan di atas lahan aset pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Operasional dan Pemeliharaan RPTRA menjadi domain

dari TP PKK Provinsi DKI Jakarta, SKPD/UKPD, serta CSR. Berbagai bentuk dukungan dalam pengembangan RPTRA baik berupa sumbangan fisik dan non fisik diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Gubernur. Selanjutnya, masyarakat dilibatkan secara aktif agar RPTRA menjadi milik masyarakat, berkelanjutan dan mandiri. Dengan demikian RPTRA menjadi milik bersama masyarakat yang harus dimanfaatkan, dijaga dan dilindungi.

RPTRA dikelola oleh pengelola yang ditetapkan dengan SK Gubernur dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan. Pada tingkat Provinsi DKI Jakarta, dibentuk pengurus RPTRA Provinsi pada tingkat Kota/Kabupaten dibentuk pengurus RPTRA Kota/Kabupaten, dan pada tingkat Kelurahan dibentuk Pengurus RPTRA Kelurahan.

Kemudian untuk pelaksanaan teknis RPTRA dibentuk Pelaksanaan Kegiatan RPTRA. Kepengurusan RPTRA dilaksanakan secara kolegal. Artinya proses pengambilan keputusan dalam rapat pengurus diusahakan semaksimal mungkin dengan musyawarah mufakat setelah mendengarkan seluruh pendapat pengurus. Kedepan, RPTRA akan diupayakan dibangun di setiap Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Besar harapan bahwa RPTRA akan menjadi pusat aktivitas masyarakat khususnya anak, sehingga upaya pemenuhan hak-hak anak dapat dipantau dan ditingkatkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan pelayanan publik merencanakan membangun sebanyak 195 lokasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sebagaimana dalam Lampiran 17. Pembangunan RPTRA dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut :

- a. Tahap I sebanyak 6 lokasi RPTRA Seluruhnya telah diresmikan pada tahun 2015;
- b. Tahap II sebanyak 58 lokasi RPTRA. Dari jumlah tersebut telah diresmikan pada tahun 2015 sebanyak 5 RPTRA. Sisanya sebanyak 53 lokasi RPTRA dibangun pada tahun 2016 dan sampai dengan april

2016 telah diresmikan sebanyak 18 Lokasi RPTRA. 35 Lokasi RPTRA lainnya telah selesai dibangun dan menunggu jadwal peresmian pada tahun 2016;

- c. Tahap III Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan membuat RPTRA sebanyak 131 lokasi RPTRA yang direncanakan selesai pada tahun 2017.

g. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2015 dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

1) Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

2) Tugas Pembantuan yang Diterima

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan.

2.1 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana

Untuk tahun 2015, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari 5 Kementerian yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Dalam Negeri. Nilai keseluruhan yang diterima sebesar Rp. 40,45 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 15,88 milyar atau 39,27persen. Pada tahun 2014 yang lalu Dana TP yang diterima Rp. 41,99 milyar

dengan realisasi sebesar Rp. 31,10 milyar atau 74,07 persen. Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Pertanian, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (APBN-P) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)
Tahun Anggaran 2015

NO	Kementerian	SKPD Pelaksana	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4:3)
1	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta	9.137.000.000	8.954.656.000	98,00
2	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta	1.096.085.000	747.087.000	68,16
3	Kementerian Pertanian	Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	525.540.000	459.000.000	87,34
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	8.534.498.000	5.723.511.100	67,06
5	Kemeterian Dalam Negeri	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		Kota Adm. Jakarta Pusat	2.992.181.000	0	0,00
		Kota Adm. Jakarta Utara	3.100.945.000	0	0,00
		Kota Adm. Jakarta Selatan	4.525.075.000	0	0,00
		Kota Adm. Jakarta Timur	5.259.885.000	0	0,00
		Kota Adm. Jakarta Barat	4.352.199.000	0	0,00
		Kab. Adm. Kepulauan Seribu	927.455.000	0	0,00
JUMLAH			40.450.863.000	15.884.254.100	39,27
<i>Sumber : Biro Tata Pemerintahan 2016</i>					

2.2 Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan realisasi pelaksanaannya dari tiap-tiap Kementerian pemberi dana Tugas Pembantuan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kementerian Pertanian

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
 - a) Program Pemenuhan Pangkal Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
 - b) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal

- 3) Realisasi :
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Kasmavet dan pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Serta Penatausahaan Barang Milik Negara
- b. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 1) SKPD pelaksana: Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Program:
 - a) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - b) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
 - 3) Realisasi
 - a) Jumlah Standart dan Sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, kapal penangkapan ikan dihasilkan dan pengembangan kampung nelayan yang mandiri, indah, tangguh dan maju.
 - b) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
- c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 1) SKPD pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Program

Penyiapan kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
 - 3) Realisasi
 - a) Terselenggaranya administrasi pengelolaan keuangan
 - b) Terselenggaranya pemindahan keluarga ke lokasi transmigrasi
 - c) Tersebar nya informasi ketransmigrasian di DKI Jakarta
 - d) Terselenggaranya kesepakatan kerjasama antar Daerah

d. Kementerian Kesehatan

1) SKPD pelaksana : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

2) Program

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

3) Realisasi :

a) Bantuan Operasional Kesehatan

b) Perencanaan BOK

c) Dokumen Monitoring dan Evaluasi BOK

d) Laporan Kegiatan / Sosialisasi / Pembinaan

2.3 Tugas Pembantuan yang Diberikan

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 4 disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat Provinsi. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat Provinsi.

Sesuai dengan peraturan dimaksud, Provinsi DKI Jakarta tidak dibagi lagi dalam wilayah kota dan kabupaten selain hanya sebagai wilayah administratif. Dengan demikian, dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta tidak dilakukan alokasi penugasan dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

3) Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga.

Adapun penyelenggaraan Dekonsentrasi pada tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1 Instansi Pemberi Dekonsentrasi dan Instansi Pelaksana

Untuk tahun 2015 Provinsi DKI Jakarta menerima dana dekonsentrasi dari 14 Kementerian dan 3 Badan sebagai berikut :

- a) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- b) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- c) Badan Perpustakaan Nasional
- d) Badan Arsip Nasional
- e) Kementerian Dalam Negeri
- f) Kementerian Kesehatan
- g) Kementerian Kelautan dan Perikanan
- h) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- i) Kementerian Pertanian
- j) Kementerian Perindustrian
- k) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- l) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- m) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- n) Kementerian Sosial
- o) Kementerian Negara Koperasi dan UKM
- p) Kementerian Perdagangan
- q) Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
- r) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 128,169miliar dengan realisasi sebesar Rp. 92,816miliar atau 72,42persen. Pada tahun

2014 yang lalu Dana Dekonsentrasi yang diterima sebesar Rp. 169,40milyar dengan realisasi sebesar Rp. 112,11miliar atau 66,18 persen. Secara rinci Dana Dekonsentrasi yang diterima tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 6.2
Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2015

NO	Kementerian	SKPD Pelaksana	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4:3)
1	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah Prov. DKI Jakarta	537,077,000	429,099,000	79.90
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	7,137,936,000	97,857,550	1.37
2	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	Badan Pemberdayaan Masy. Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. DKI Jakarta	27,851,366,000	20,773,823,196	74.59
3	Kementerian Pertanian	Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	11,583,862,000	9,172,367,013	79.18
4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	1,200,000,000	1,035,750,290	86.31
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	6,969,139,000	5,189,080,244	74.46
6	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Energi Prov. DKI Jakarta	1,300,000,000	1,123,777,775	86.44
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta	20,834,385,000	16,084,068,622	77.20
8	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta	9,871,151,000	5,277,968,160	53.47
9	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta	7,074,886,000	5,446,812,250	76.99
10	Kementerian Sosial	Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta	16,129,304,000	15,593,463,120	96.68
11	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Prov. DKI Jakarta	5,516,060,000	2,639,868,938	47.86
12	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Prov. DKI Jakarta	1,809,665,000	1,519,874,599	83.99
13	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	Dinas Olah Raga dan Pemuda Prov. DKI Jakarta	6,076,019,000	5,399,117,348	88.86
14	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. DKI Jakarta	2,151,020,000	2,136,818,200	99.34
15	Arsip Nasional RI	Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	196,340,000	163,618,000	83.33
16	PPN/Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	799,291,000	0	0.00
17	Perpustakaan Nasional RI	Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	248,480,000	184,232,000	74.14
18	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Prov. DKI Jakarta	883,862,000	548,897,600	62.10
JUMLAH			128,169,843,000	92,816,493,905	72.42
Sumber : Biro Tata Pemerintahan 2016					

3.2 Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
Program dan realisasi pelaksanaannya dari tiap-tiap Kementerian pemberi dana Dekonsentrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

1) SKPD pelaksana : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. DKI Jakarta

2) Program :

a) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

b) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

3) Realisasi :

a) Provinsi yang difasilitasi dalam peningkatan pengarusutamaan gender

b) Provinsi yang difasilitasi dalam peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak

c) Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Provinsi

d) Kesertaan ber- KB di Provinsi

e) Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga di Provinsi

f) Advokasi dan Penggerakan di Provinsi

g) Kerjasama dengan Mitra Kerja

h) Pengelolaan data dan informasi pembangunan KKB di Provinsi

i) SDM yang terdidik dan terlatih di Provinsi

j) Penelitian Kependudukan dan KB Provinsi

k) Dokumen Perencanaan Program KKB di Provinsi

l) Monitoring, Evaluasi dan pembinaan Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB di Provinsi

m) Dukungan Operasional PPLKB, PLKB dan IMP

n) Penguatan Jejaring mekanisme Operasional program KKB di Lini Lapangan

b. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- 1) SKPD pelaksana: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program: Program Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Realisasi :
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang di Daerah (Untuk Kegiatan APBN tidak dilaksanakan dikarenakan duplikasi kegiatan dengan kegiatan APBD)

c. Badan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

- 1) SKPD pelaksana : Badan Perpustakaan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
Program Pengembangan
- 3) Realisasi :
Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum

d. Badan Arsip Nasional Republik Indonesia

- 1) SKPD Pelaksana : Badan Arsip Nasional Republik Indonesia
- 2) Program :
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
- 3) Realiasi :
Peserta Penyelenggaraan Diklat sebanyak 40 Orang

e. Kementerian Dalam Negeri

- 1) SKPD pelaksana : Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Biro Tata Pemerintahan)
- 2) Program
 - a) Program Bina Administrasi Kewilayahan
 - b) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3) Realisasi :
 - a) Laporan Provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan Pemerintahan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di

Wilayah Provinsi, Rapat Fokorpimda dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1436 H dan Menyambut Hari Natal 2015 dan Tahun Baru 2016, Rapat Pemerintahan Umum dalam rangka Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Rapat Tim Kesekretariatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan Rapat Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Wilayah Provinsi;

- b) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi, Kota dan Kabupaten (Untuk Kegiatan APBN tidak dilaksanakan karena duplikasi kegiatan dengan kegiatan APBD)

f. Kementerian Pertanian, Lingkugnan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

1) SKPD Pelaksana : Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

2) Program dan Kegiatan :

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
- c) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
- d) Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian
- e) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
- f) Program Peningkatan Daya Saing, Usaha dan Produk Kelautan dan Pertanian
- g) Program Pengawasan penamfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- h) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan
 - i) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - j) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
 - k) Program Dukugnan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
 - l) Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
 - m) Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 - n) Program Pengembangan SDM Keluatan dan Perikanan
 - o) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
- 3) Realisasi :
- a) Presentase Capaian Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - b) Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui pemberdayaan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar, ditingkat masyarakat, serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan
 - c) Pengedalian, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis/PHMSZ (dosis)
 - d) Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan
 - e) Meningkatkan Produksi tanaman pangan
 - f) Lokasi pengembangan dan pembinaan, promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri, Eksportir hasil perikanan berskala UMKM yang dibina dalam rangka peningaktan kemampuan dan daya saing dan ragam olahan bernilai tambah,Dokumen pelaporan lokasi sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Produksi hasil perikanan, serta Dokumen

pelaporan penguatan promosi dan sistem informasi peluang usaha dan investasi

- g) Terwujudnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP, Meningkatkan Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP, meningkatnya efektifitas pangan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
- h) Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk tanaman Hortikultura yang aman konsumsi berdaya saing dan berkelanjutan
- i) Meningkatkan Produksi Perikanan tangkap dan Kesejahteraan nelayan berbasis kelestarian SDI
- j) Meningkatkan reformasi birokrasi dan lingkungan KKP
- k) Meningkatkan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian, kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian, kompetensi aparatur fungsional pertanian, ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahaan muda, kemandirian kelembagaan petani dan pemerintah dibidang SDM Pertanian
- l) Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Penerapan sistem Perkarantinaan ikan, penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- m) SDM KP Memiliki Kompetensi sesuai kebutuhan
- n) Meningkatkan penataan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau - pulau kecil secara berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat

g. Kementerian Perindustrian

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

3) Realisasi :

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II, Daerah Pengembang Industri melalui Dekonsentrasi (1 Daerah)

h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1) SKPD pelaksana : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

2) Program :

- a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknisnya Lainnya Sekretariat Kemendikbud RI
- b) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- c) Pendidikan dasar dan menengah

3) Realisasi :

- a) Manajemen pengendalian dana dekonsentrasi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi
- c) Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, evaluasi dan Monitoring Dekonsentrasi
- d) Lembaga PAUD Baru
- e) Alat Permainan Edukatif
- f) Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Evaluasi dan Monitoring Dekonsentrasi
- g) Dokumen Kebijakan Data dan Informasi PAUD
- h) Dokumen Rencana, Program dan Anggaran PAUDNI
- i) Dokumen Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

i. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1) SKPD pelaksana : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

2) Program :

Program Pengembangan Kepariwisata

3) Realisasi :

- a) Terselenggaranya Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata di Destinasi Pariwisata

- b) Meningkatnya Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan masyarakat
 - c) Terselenggaranya Pengembangan Segmen pasar personel
- j. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 1) SKPD pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Program:
 - a) Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
 - b) Program peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian kerja
 - c) Program pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jamsostek
 - d) Program perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan sistem pengawasan Ketenagakerjaan
 - 3) Realisasi:
 - a) Terselenggaranya pendampingan masyarakat pada kelompok usaha di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan
 - b) Terselenggaranya Jejaring Networking dan Pembinaan Penempatan tenaga kerja AKAD
 - c) Terjalinnya Koordinasi lintas sektor dalam penanganan TKI bermasalah Non prosedural di DKI Jakarta
 - d) Tersalurkannya bantuan sarana usaha bagi Tenaga Kerja Mandiri untuk berwirausaha di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat
 - e) Terlaksanannya pendampingnya masyarakat oleh tenaga kerja sarjana pada kelompok usaha di Wilayah DKI Jakarta
 - f) Terselenggaranya penyusunan laporan IPK dari 5 (lima) Wilayah Kota
 - g) Terselenggaranya administrasi pengelolaan keuangan
 - h) Meningkatnya SDM yang memahami Hubungan Industrial

- i) Meningkatnya Organisasi Pekerja/Buruh yang diberdayakan
- j) Meningkatnya Pengusaha, Pekerja/SP/SB yang memahami tata cara pembentukan LKS Biparit
- k) LKS Biparit yang diberdayakan yang berfungsi dengan baik
- l) Meningkatnya Pelaku HI yang memahami pengupahan
- m) Meningkatnya Perjanjian bersama (PB) yang dihasilkan oleh mediator HI dalam penyelesaian perselisihan HI
- n) Terselenggaranya Pelayanan Mediasi Hubungan Industrial yang semakin baik melalui peningkatan sarana dan prasarana
- o) Meningkatnya Pelaku HI yang memahami pencegahan dan penyelesaian Hubungan Industrial
- p) Meningkatnya Pelaku HI yang memahaami peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh
- q) Meningkatnya Pengusaha dan SP/SB yang mendapatkan bimbingan teknis pembuatan PK, PP dan PKB
- r) Meningkatnya Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman tentang kesetaraan di tempat kerja
- s) Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran yang efektif dan tepat sasaran
- t) Tersediannya data HI yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan Ketenagakerjaan bidang HI
- u) Terselenggaranya kegiatan pelayanan teknis administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggan.
- v) Meningkatnya Pelaku HI yang memahami program jaminan sosial
- w) Terselenggaranya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan Perusahaan di lima Wilayah Kota Jakarta
- x) Pembina SDM K3 di Perusahaan

- y) Pembina SMK3 di Perusahaan
- z) Terlaksananya Penerapan Norma Perlindungan Pekerja Anak/pendataan Pekerja Anak di Lima Wilayah Kota.

k. Kementerian Sosial

- 1) SKPD pelaksana: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program:
 - a) Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial
 - b) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
 - c) Program Rehabilitas Sosial
 - d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 3) Realisasi:
 - a) Adanya dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban akuntansi keuangan
 - b) Meningkatnya Lembaga Sosial yang mendapat pemberdayaan sosial
 - c) Meningkatnya KUBE yang mendapat bantuan
 - d) Terlaksananya pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya penanggulangan NAPZA
 - e) Termotivasinya penyandang disabilitas dalam beraktifitas dan berkarya
 - f) Terpenuhinya pemberian motivasi pengetahuan dan keterampilan kepada BWBLP dan Kelompok ODHA
 - g) Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar terhadap anak
 - h) Terbentuknya lansia potensial yang dapat diberdayakan melalui UEP
 - i) Terbantunya korban bencana alam
 - j) Tersediannya pemetaan daerah rawan bencana sosial
 - k) Terbantunya korban tindak kekerasan dan pekerja migran

- l) Terlaksananya Program Keluarga harapan tk. Kabupaten atau Kota
- m) Terpantaunya pengawasan dan penyelenggaraan UGB/PUB
- n) Terseleksinya data calon lembaga pelaksanaan askesos
- o) Terlaksananya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan;

I. Kementerian Koperasi dan UMKM

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Koperasi dan UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
Program peningkatan Daya Saing UMKM
- 3) Realisasi :
 - a) Terselenggaranya Pameran Produk KUKM
 - b) Terlaksananya Pemberdayaan Koperasi
 - c) Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi
 - d) Terlaksananya Monev
 - e) Terlaksananya Bimtek
 - f) Terlaksananya Diklat Penyuluhan Koperasi
 - g) Terlaksananya Pelatihan SDM
 - h) Terlaksananya IUMK

m. Kementerian Perdagangan

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Koperasi dan UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
 - a) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
 - b) Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
- 3) Realisasi :
 - a) Terselenggaranya Pasar Murah di 5 Wilayah
 - b) Terlaksananya Partisipasi di Pangan Nusa Regional dan Pameran Pangan Nusa Nasional
 - c) Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi
 - d) Tersedianya Laporan harian harga bahan pokok dan laporan harga mingguan barang strategis

- e) Terlaksananya Partisipasi Pameran di Daerah
- f) Tertanganinya Data Pengaduan Konsumen
- g) Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan perlindungan konsumen
- h) Terlaksananya Pengawasan Produk SNI wajib dan distribusi GKR, B2 dan pupuk bersubsidi
- i) Terlaksananya Koordinasi Ekspor dan Impor pusat dengan daerah
- j) Terlaksananya Koordinasi pelaku usaha
- k) Tersedianya Penerbitan angka pengenalan impor
- l) Tersedianya Penerbitan surat Keterangan asal
- m) Terlaksananya Partisipasi Pameran Lombok Ekspo dan Nusantara Ekspo
- n) Terlaksananya Diklat Ekspor untuk UKM
- o) Terlaksananya Edukasi Publik tentang masyarakat Ekonomi ASEAN
- p) Administrasi Kegiatan Dekonsentrasi

n. Kementerian Pemuda dan Olahraga

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
 - a) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
 - b) Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda;
 - c) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - d) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan;
 - e) Pengembangan Kepramukaan;
 - f) Peningkatan Wawasan Pemuda;
 - g) Pengembangan Olahraga Layanan Khusus;
 - h) Pengembangan Sentra Kelolahragaan;
 - i) Pengembangan Pembibitan Olahragawan;
 - j) Pengembangan Tenaga Keolahragaan

3) Realisasi :

- a) Meningkatnya Pemuda Kader yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda (UU No. 40/2009 Psl. 27 Ayat 3)
- b) Meningkatnya Pemuda Kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawan, dan kepeloporan pemuda
- c) Meningkatnya Pemuda Kader yang difasilitasi dalam pengembangan Kepemimpinan Pemuda
- d) Meningkatnya Pengelola organisasi kepelajaran kemahasiswaan, dan kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan program pelayanan kepemudaan
- e) Meningkatnya Organisasi Kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi
- f) Tersusunnya Dokumen Laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan kepramukaan yang disusun tepat waktu
- g) Meningkatnya Pemuda Kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan , lingkungan , sosial dan hukum
- h) Peserta olahraga usia dini dan lansia, olahraga penyandang cacat dan olahraga di lembaga permasyarakatan
- i) Peserta Festival dan invitasi olahraga tradisional
- j) PPLP/PPLM yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembang
- k) Peserta pemanduan bakat cabang olahraga unggulan
- l) Fasiltiasi penyelenggaraan Kejuaraan olahraga junior/pelajar/ bertaraf regional, nasional dan International

m) Pelatih dan Instruktur , wasit dan juri , tenaga pendidikan dan pendukung yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan

o. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- 1) SKPD Pelaksana : Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
Program Pengembangan Perumahan
- 3) Realisasi :
Laporan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas kelembagaan pelaku penyediaan perumahan.



BAB VII

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2015 AUDITED**

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2015, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1745 Tahun 2015 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 709 UKPD/SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi dan 52 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi pengabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dari setiap entitas akuntansi tersebut kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi Laporan Keuangan Gabungan SKPD.

Laporan Keuangan Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi sebagai entitas akuntansi, kecamatan dan kelurahan di bawahnya. Laporan Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai entitas akuntansi, suku dinas, Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada di bawahnya. Laporan Keuangan Badan merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi dan

kantor-kantor yang ada di bawahnya. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai entitas akuntansi dan biro-biro yang ada di bawahnya. Selain itu ada beberapa SKPD yang tidak melakukan penggabungan laporan keuangan karena hanya terdiri dari satu entitas akuntansi, yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Inspektorat, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penanaman Modal dan Promosi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dan BLUD rumah sakit. Khusus untuk PPKD, sebagai entitas pelaporan selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas. Laporan keuangan dari 52 SKPD entitas akuntansi penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian target keuangan Tahun Anggaran 2015 didasarkan pada target pendapatan sebesar Rp56.309.238.000.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp44.209.238.168.583,00 atau 78,51%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp384.937.607.918,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp43.824.300.560.665,00.

Di sisi lain capaian anggaran belanja dan transfer pada Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp59.685.552.609.233,00. Realisasi belanja dan transfer sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp43.031.322.947.557,00 atau 72,10%, sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp16.654.229.661.676,00 atau 27,90%. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp5.231.658.649.098,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 yaitu sebesar Rp37.799.664.298.459,00. Dari kondisi tersebut dapat digambarkan bahwa di Tahun 2015 terjadi surplus sebesar

Rp1.177.915.221.026,00, surplus ini disebabkan realisasi pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja. Sedangkan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp9.459.467.609.233,00 dan terealisasi sebesar Rp9.209.781.909.639,00 atau 97,36%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp6.083.153.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.454.177.678.915,00 atau 89,66%. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp618.325.786.134,00 jika dibandingkan dengan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2014 yaitu sebesar Rp3.137.278.444.590,00.

Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp4.933.519.451.750,00 dikarenakan Realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp1.177.915.221.026,00 dan pembiayaan neto sebesar Rp3.755.604.230.724,00. SiLPA Tahun Anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar Rp4.227.378.157.483,00 jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp9.160.897.609.233,00.

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2015.

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



BASUKI T. PURNAMA



LAMPIRAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2015 AUDITED**

**DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2015**

No.	NAMA SKPD/UKPD	Sisa Uang Persediaan	Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	Pajak di SKPD yang Belum Disetor	Uang Titipan	Kas di Bendahara Pengeluaran 6=3+4+5
1	2	3	4	4	5	
1	Sekretariat DPRD	-	-	72.067.599,00	-	72.067.599,00
2	Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekda	62.238.901,00	-	4.776.368,00	-	67.015.269,00
3	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	180.000,00	-	-	-	180.000,00
4	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	283.870,00	-	-	-	283.870,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA	3.444.670.974,00	-	248.689.629,00	-	3.693.360.603,00
6	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I	-	360.298,00	-	-	360.298,00
7	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah II	-	63.182,00	-	-	63.182,00
8	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III	-	490.857,00	-	-	490.857,00
9	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	575.861.293.881,00	-	-	-	575.861.293.881,00
10	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKPUS	46.000,00	-	-	-	46.000,00
11	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKSEL	4.406.251,00	-	175.211.198,00	-	179.617.449,00
12	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKTIM	2.218.832.182,00	-	4.145.060,00	-	2.222.977.242,00
13	DINAS BINA MARGA	197.019.965.407,00	-	29.183.453,00	-	197.049.148.860,00
14	Sudin Bina Marga - JAKTIM	973.906.867,00	-	14.245.138,00	-	988.152.005,00
15	DINAS TATA AIR	8.750.271.088,00	-	180.761.878,00	-	8.931.032.966,00
16	Sudin Tata Air - JAKPUS	62.823.143,00	-	-	-	62.823.143,00
17	Sudin Tata Air - JAKTIM	3.483.143.788,00	-	1.065.849.264,00	-	4.548.993.052,00
18	DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI	2.607.840.576,00	-	183.409.633,00	-	2.791.250.209,00
19	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	70.000,00	-	-	-	70.000,00
20	UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	-	-	9.581.450,00	-	9.581.450,00
21	Unit Pengelola Angkutan Sekolah	811.335.050,00	-	1.697.800,00	-	813.032.850,00
22	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	6.371.875.713,00	-	12.036.435,00	-	6.383.912.148,00
23	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas	18.330.776,00	-	-	-	18.330.776,00
24	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	3.088.200,00	-	-	-	3.088.200,00
25	Unit Pengelola Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	117.057.540,00	-	15.027.794,00	-	132.085.334,00
26	Sudin Perhubungan - JAKPUS	7.991.000,00	-	-	-	7.991.000,00
27	Sudin Perhubungan - JAKUT	124.480.068,00	-	11.407.750,00	-	135.887.818,00
28	DINAS KESEHATAN	422.009.519,00	-	-	-	422.009.519,00
29	Rumah Sakit Umum Kec. Mampang Prapatan	-	320.404,00	-	-	320.404,00
30	Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	421.100,00	-	-	-	421.100,00
31	BLUD Puskesmas Kec. Menteng - Jarkpus	-	264.462,00	-	-	264.462,00
32	BLUD Puskesmas Kec. Senen - Jarkpus	-	555.749,00	-	-	555.749,00
33	BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - Jarkpus	-	-	2.043.500,00	-	2.043.500,00
34	BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - Jarkpus	1.917.914,00	-	-	-	1.917.914,00
35	BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - Jakbar	13.882.496,00	-	360.000,00	-	14.242.496,00
36	BLUD Puskesmas Kec. Palmerah - Jakbar	-	128.434,00	-	-	128.434,00
37	BLUD Puskesmas Kec. Tambora - Jakbar	-	350.417,00	-	-	350.417,00
38	BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - Jakbar	-	269.169,00	-	-	269.169,00
39	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - Jarksel	-	578.944,00	-	-	578.944,00
40	BLUD Puskesmas Kec. Pesangrahan - Jarksel	-	255.873,00	-	-	255.873,00
41	BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - Jarksel	-	382.050,00	-	-	382.050,00
42	BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - Jarksel	1.441.500,00	-	-	-	1.441.500,00
43	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - Jarksel	-	191.856,00	-	-	191.856,00
44	BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - Jarksel	-	125.485,00	-	-	125.485,00
45	BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - Jarksel	130.000,00	-	-	-	130.000,00
46	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - Jaktim	-	246.937,00	-	-	246.937,00
47	BLUD Puskesmas Kec. Cipayang - Jaktim	12.903.000,00	-	-	-	12.903.000,00
48	BLUD Puskesmas Kec. Matraman - Jaktim	-	116.567,00	27.841.046,00	-	27.957.613,00
49	BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - Jaktim	-	-	46.875,00	-	46.875,00
50	Sudin Kesehatan - Jaktim	18.842.036,00	-	2.742.836,00	-	21.584.872,00
51	BLUD RS Koja	-	1.117.769,00	-	-	1.117.769,00
52	BLUD RS Tarakan	-	2.027.175,00	-	-	2.027.175,00
53	BLUD RS Pasar Rebo	5.103.359,00	2.256.654,00	-	-	7.360.013,00
54	BLUD RS Duren Sawit	-	5.138.176,00	-	-	5.138.176,00
55	DINAS PENDIDIKAN	280.972.390,00	-	-	-	280.972.390,00
56	Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin	147.761.781,00	-	-	-	147.761.781,00
57	Sudin Pendidikan I - JAKBAR	57.867.610,00	-	15.164.222,00	-	73.031.832,00
58	Sudin Pendidikan II - JAKBAR	-	-	55.495.886,00	-	55.495.886,00
59	Sudin Pendidikan I - JAKSEL	1.329.212.313,00	-	-	-	1.329.212.313,00
60	Sudin Pendidikan II - JAKSEL	1.424.582.078,00	-	-	-	1.424.582.078,00
61	Sudin Pendidikan I - JAKTIM	3.120.000,00	-	-	-	3.120.000,00
62	Sudin Pendidikan II - JAKTIM	1.957.350.375,00	-	-	-	1.957.350.375,00
63	Gelanggang Olahraga Ragunan	-	-	46.838.040,00	-	46.838.040,00
64	Gelanggang Olahraga Cendrawasih	126.087.670,00	-	-	-	126.087.670,00
65	Gelanggang Remaja Jakarta Utara	-	-	38.905.638,00	-	38.905.638,00
66	Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakut	3.132.436,00	-	-	-	3.132.436,00
67	DINAS SOSIAL	13.420.477,00	-	194.772.224,00	-	208.192.701,00
68	Sudin Sosial - Jakut	73.876.808,00	-	-	-	73.876.808,00
69	Sudin Sosial - Jarksel	94.324.031,00	-	-	-	94.324.031,00
70	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jakut	-	-	332.640,00	-	332.640,00

No.	NAMA SKPD/UKPD	Sisa Uang Persediaan	Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	Pajak di SKPD yang Belum Disetor	Uang Titipan	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	4	5	6=3+4+5
71	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jaktim	913.809,00	-	9.958.605,00	-	10.872.414,00
72	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	2.739.300,00	-	-	-	2.739.300,00
73	Satpol PP - Kab. Adm Kep. Seribu	903.447,00	-	27.654.314,00	-	28.557.761,00
74	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	1.826.607.676,00	-	-	-	1.826.607.676,00
75	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan	296.358.798,00	15.917,00	1.050.455,00	-	297.425.170,00
76	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jaksel	1.602.200,00	-	-	-	1.602.200,00
77	BADAN PEMBINAAN BUMD DAN PENANAMAN MODAL	-	-	325.873.372,00	-	325.873.372,00
78	Pusat Penyimpanan Barang Daerah	10.362.273,00	-	16.227.430,00	-	26.589.703,00
79	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah - Jakbar	4.093.250,00	-	-	-	4.093.250,00
80	Sudin Pelayanan Pajak - Jakpus	-	-	1.365.050,00	-	1.365.050,00
81	Kantor Lingkungan Hidup - Jakpus	11.535.719,00	-	-	-	11.535.719,00
82	Sudin Kebersihan - Jakut	1,00	-	-	-	1,00
83	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	20.507.150,00	-	20.507.150,00
84	Unit Pengelola Graha Wisata	44.199.366,00	-	-	-	44.199.366,00
85	Pusat Pelatihan Seni Budaya	16.617,00	3.462.466,00	2.355.453,00	-	5.834.536,00
86	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	15.905,00	-	7.696.161,00	-	7.712.066,00
87	Unit Pengelola Museum Seni	-	-	12.619.841,00	-	12.619.841,00
88	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jakut	78.684.976,00	-	-	-	78.684.976,00
89	KANTOR PENGELOLA TAMAN MERGASATWA RAGUNAN	-	914.341,00	-	-	914.341,00
90	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara	144.326.775,00	-	-	-	144.326.775,00
91	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jakut	8.456.157,00	-	-	-	8.456.157,00
92	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jaktim	36.068.270,00	-	-	-	36.068.270,00
93	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakbar	-	-	2.185.000,00	-	2.185.000,00
94	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi	277.023,00	767.311,00	-	-	1.044.334,00
95	BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	653.264,00	-	-	-	653.264,00
96	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA	43.320.000,00	-	-	-	43.320.000,00
97	Kecamatan Menteng - Jakpus	49.029.450,00	-	-	-	49.029.450,00
98	Kelurahan Menteng - Jakpus	15.591.797,00	-	-	-	15.591.797,00
99	Kelurahan Pegangsaan - Jakpus	10.642.910,00	-	50.000,00	-	10.692.910,00
100	Kelurahan Cikini - Jakpus	55.255.236,00	-	-	-	55.255.236,00
101	Kelurahan Kebon Sirih - Jakpus	24.282.656,00	-	16.217.388,00	-	40.500.044,00
102	Kelurahan Petojo Utara - Jakpus	38,00	-	-	-	38,00
103	Kelurahan Duri Pulo - Jakpus	1.075.097.957,00	-	-	-	1.075.097.957,00
104	Kelurahan Kamal Muara - Jakut	59.448,00	-	-	-	59.448,00
105	Kecamatan Pademangan - Jakut	-	-	165.848,00	-	165.848,00
106	Kelurahan Ancol - Jakut	6.362.731,00	-	6.005.504,00	-	12.368.235,00
107	Kelurahan Sunter Agung - Jakut	5.320.000,00	-	-	-	5.320.000,00
108	Kelurahan Tugu Selatan - Jakut	66.715.324,00	-	-	-	66.715.324,00
109	Kelurahan Koja - Jakut	19.003.913,00	-	-	-	19.003.913,00
110	Kelurahan Lagoa - Jakut	73.609.928,00	-	-	-	73.609.928,00
111	Kecamatan Kelapa Gading - Jakut	-	-	9.104.904,00	-	9.104.904,00
112	Kelurahan Sukapura - Jakut	1.710.000,00	-	30.028.209,00	-	31.738.209,00
113	Kelurahan Marunda - Jakut	4.650.000,00	-	-	-	4.650.000,00
114	Kelurahan Cilincing - Jakut	-	-	8.872.475,00	-	8.872.475,00
115	Kelurahan Sempur Timur - Jakut	79.652.000,00	-	-	-	79.652.000,00
116	Kelurahan Duri Kepa - Jakbar	131.021.368,00	-	-	-	131.021.368,00
117	Kelurahan Kedoya Utara - Jakbar	127.252.080,00	-	-	-	127.252.080,00
118	Kelurahan Rawa Buaya - Jakbar	-	-	15.268.450,00	-	15.268.450,00
119	Kelurahan Pegadungan - Jakbar	8.719.745,00	-	-	-	8.719.745,00
120	Kelurahan Semanan - Jakbar	21.371.605,00	-	-	-	21.371.605,00
121	Kelurahan Wijaya Kesuma - Jakbar	259.206.690,00	-	19.803.977,00	-	279.010.667,00
122	Kelurahan Kemanggisan - Jakbar	-	-	3.569.873,00	-	3.569.873,00
123	Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakbar	145.970.998,00	-	7.930.906,00	-	153.901.904,00
124	Kelurahan Tanah Sereal - Jakbar	3.902.423,00	-	-	-	3.902.423,00
125	Kelurahan Pekojan - Jakbar	11.936.900,00	-	36.052.750,00	-	47.989.650,00
126	Kota Administrasi Jakarta Selatan	216.754.890,00	-	-	-	216.754.890,00
127	Kelurahan Cipulir - Jaksel	11.624.350,00	-	-	-	11.624.350,00
128	Kelurahan Ciganjur - Jaksel	2.942.500,00	-	-	-	2.942.500,00
129	Kelurahan Tegal Parang - Jaksel	749.033,00	-	-	-	749.033,00
130	Kelurahan Pulo - Jaksel	3.277.000,00	-	-	-	3.277.000,00
131	Kelurahan Karet Kuningan - Jaksel	-	-	183.313,00	-	183.313,00
132	Kelurahan Menteng Atas - Jaksel	190.629.476,00	-	2.379.843,00	-	193.009.319,00
133	Kelurahan Manggarai - Jaksel	17.177.130,00	-	-	-	17.177.130,00
134	Kelurahan Gandaria Selatan - Jaksel	9.525.000,00	-	-	-	9.525.000,00
135	Kota Administrasi Jakarta Timur	260.335.639,00	-	-	-	260.335.639,00
136	Kecamatan Ciracas - Jaktim	-	-	2.053.005,00	-	2.053.005,00
137	Kelurahan Lubang Buaya - Jaktim	50,00	-	-	-	50,00
138	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	9.872.968,00	-	-	-	9.872.968,00
139	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	36.482,00	-	-	-	36.482,00
140	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	95.893.052,00	-	-	-	95.893.052,00
141	Kelurahan Pisangan Baru - Jaktim	9.750.000,00	-	6.040.440,00	-	15.790.440,00
142	Kecamatan Pulogadung - Jaktim	5.027,00	-	-	-	5.027,00

No.	NAMA SKPD/UKPD	Sisa Uang Persediaan	Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	Pajak di SKPD yang Belum Disetor	Uang Titipan	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	4	5	6=3+4+5
143	Kelurahan Jati - Jaktim	-	-	582.800,00	-	582.800,00
144	Kelurahan Kayu Putih - Jaktim	55.512.103,00	-	-	-	55.512.103,00
145	Kecamatan Cakung - Jaktim	9,00	-	1.169.600,00	-	1.169.609,00
146	Kelurahan Penggilingan - Jaktim	8.400.000,00	-	40.000,00	-	8.440.000,00
147	Kelurahan Cakung Timur - Jaktim	4.672.000,00	-	-	-	4.672.000,00
148	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	243.137.378,00	-	-	-	243.137.378,00
149	Kelurahan P. Panggang - Kep. Seribu	1.314.423,00	-	-	-	1.314.423,00
150	Kelurahan P. Kelapa - Kep. Seribu	590,00	-	-	-	590,00
	SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	813.781.599.291,00	20.400.493,00	3.005.645.472,00	-	816.807.645.256,00

**DAFTAR SALDO KAS DAN SETARA KAS BLUD
PER 31 DESEMBER 2015**

No	Nama SKPD/UKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/K	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	Kas dan Setara Kas BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I	-	22.586.940.667,00	-	-	-	22.586.940.667,00
2	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah II	-	12.216.008.640,00	-	-	-	12.216.008.640,00
3	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III	-	26.062.237.607,00	-	-	-	26.062.237.607,00
4	DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI	-	240.778.262.880,00	-	-	-	240.778.262.880,00
5	Unit Pengelola Perparkiran	45.970.550,00	32.853.518.099,00	-	-	-	32.899.488.649,00
6	BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	29.926.699,00	6.599.650.283,00	-	-	-	6.629.576.982,00
7	BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta	444.988,00	1.013.560.687,00	-	-	-	1.014.005.675,00
8	RSUD Kepulauan Seribu	551.000,00	40.435.750,00	-	-	-	40.986.750,00
9	RSUD Pasar Minggu	14.122.800,00	40.823.247,00	-	1.300.000,00	-	56.246.047,00
10	Rumah Sakit Umum Kec. Kemayoran	18.763.626,00	525.276.067,00	-	-	-	544.039.693,00
11	Rumah Sakit Umum Kec. Sawah Besar	13.161.644,00	96.208.242,00	-	-	-	109.369.886,00
12	Rumah Sakit Umum Kec. Cempaka Putih	4.379.000,00	185.401.740,00	-	-	-	189.780.740,00
13	Rumah Sakit Umum Kec. Johar Baru	39.479.119,00	277.570.713,00	-	-	-	317.049.832,00
14	Rumah Sakit Umum Kec. Koja	29.561.307,00	270.668.073,00	-	-	-	300.229.380,00
15	Rumah Sakit Umum Kec. Cilincing	18.696.182,00	730.733.173,00	-	-	-	749.429.355,00
16	Rumah Sakit Umum Kec. Pademangan	5.571.911,00	342.866.971,00	-	-	-	348.438.882,00
17	Rumah Sakit Umum Kec. Kembangan	12.610.000,00	619.599.277,00	-	-	-	632.209.277,00
18	Rumah Sakit Umum Kec. Kalideres	2.029.121,00	912.971.078,00	-	-	-	915.000.199,00
19	Rumah Sakit Umum Kec. Jagakarsa	12.146.600,00	1.046.728.351,00	-	-	-	1.058.874.951,00
20	Rumah Sakit Umum Kec. Tebet	29.058.140,00	1.002.472.567,00	-	-	-	1.031.530.707,00
21	Rumah Sakit Umum Kec. Mampang Prapatan	9.313.457,00	467.970.660,00	-	-	-	477.284.117,00
22	Rumah Sakit Umum Kec. Pesanggrahan	28.450.095,00	627.118.637,00	-	-	-	655.568.732,00
23	Rumah Sakit Umum Kec. Kramat Jati	9.826.762,00	575.666.844,00	410.886,00	-	-	585.904.492,00
24	Rumah Sakit Umum Kec. Ciracas	8.538.152,00	817.148.302,00	-	-	-	825.686.454,00
25	BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)	-	5.878.633.835,00	263.925,00	-	-	5.878.897.760,00
26	BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - Jakpus	1.800.871,00	9.936.601.918,00	-	-	-	9.938.402.789,00
27	BLUD Puskesmas Kec. Menteng - Jakpus	783.000,00	5.050.385.315,00	-	-	-	5.051.168.315,00
28	BLUD Puskesmas Kec. Senen - Jakpus	3.188.229,00	7.919.059.790,00	-	-	-	7.922.248.019,00
29	BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - Jakpus	13.673.101,00	4.179.105.726,00	-	-	-	4.192.778.827,00
30	BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - Jakpus	3.757.606,00	11.731.415.539,00	-	-	-	11.735.173.145,00
31	BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - Jakpus	2.968.952,00	8.047.896.434,00	26.941.696,00	-	-	8.077.807.082,00
32	BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - Jakpus	3.446.483,00	2.740.512.187,00	-	-	-	2.743.958.670,00
33	BLUD Puskesmas Kec. Gambir - Jakpus	8.255.938,00	4.900.577.782,00	-	-	-	4.908.833.720,00
34	BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - Jakut	14.730.296,00	13.800.227.436,00	-	-	-	13.814.957.732,00
35	BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - Jakut	676.000,00	7.415.111.548,00	-	-	-	7.415.787.548,00
36	BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - Jakut	16.961.801,00	20.505.484.987,00	-	-	-	20.522.446.788,00
37	BLUD Puskesmas Kec. Koja - Jakut	16.832.000,00	24.282.543.823,00	-	-	-	24.299.375.823,00
38	BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - Jakut	8.548.809,00	2.379.412.142,00	-	-	-	2.387.960.951,00
39	BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - Jakut	127.700.372,00	20.125.141.509,00	-	-	-	20.252.841.881,00
40	BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - Jakbar	8.031.456,00	7.223.774.981,00	-	-	-	7.231.806.437,00
41	BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - Jakbar	7.322.771,00	14.050.169.537,00	-	-	-	14.057.492.308,00
42	BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - Jakbar	11.116.250,00	18.250.837.258,00	-	-	-	18.261.953.508,00
43	BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - Jakbar	14.501.388,00	11.451.747.486,00	13.174.118,00	-	-	11.479.422.992,00
44	BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - Jakbar	11.686.867,00	4.248.786.467,00	130.000,00	-	-	4.260.603.334,00
45	BLUD Puskesmas Kec. Palmerah - Jakbar	16.704.889,00	10.992.991.153,00	-	-	-	11.009.696.042,00
46	BLUD Puskesmas Kec. Tambora - Jakbar	351.907.732,00	9.079.435.526,00	-	-	-	9.431.343.258,00
47	BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - Jakbar	7.207.231,00	3.580.534.725,00	-	-	-	3.587.741.956,00
48	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - Jaksel	11.270.258,00	10.542.188.194,00	-	-	-	10.553.458.452,00
49	BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - Jaksel	11.116.051,00	10.857.562.013,00	-	-	-	10.868.678.064,00
50	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - Jaksel	10.242.630,00	16.625.019.435,00	151.200,00	-	-	16.635.413.265,00
51	BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - Jaksel	29.253.613,00	12.741.856.126,00	-	-	-	12.771.109.739,00
52	BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - Jaksel	33.529.815,00	5.372.605.435,00	-	-	-	5.406.135.250,00
53	BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - Jaksel	6.793.609,00	3.705.368.678,00	-	-	-	3.712.162.287,00
54	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - Jaksel	3.649.500,00	2.279.218.852,00	-	-	-	2.282.868.352,00
55	BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - Jaksel	572.748,00	2.930.632.325,00	-	-	-	2.931.205.073,00
56	BLUD Puskesmas Kec. Tebet - Jaksel	9.138.499,00	8.713.150.680,00	-	-	-	8.722.289.179,00
57	BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - Jaksel	3.890.975,00	7.697.455.147,00	-	-	-	7.701.346.122,00
58	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - Jaktim	9.584.503,00	8.739.996.396,00	-	-	-	8.749.580.899,00
59	BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - Jaktim	1.361.076,00	13.448.019.943,00	-	-	-	13.449.381.019,00
60	BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - Jaktim	8.072.672,00	9.829.894.968,00	-	-	-	9.837.967.640,00

No	Nama SKPD/UKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/K	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	Kas dan Setara Kas BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8
61	BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - Jaktim	26.707.503,00	10.371.199.221,00	40.402.306,00	-	-	10.438.309.030,00
62	BLUD Puskesmas Kec. Makasar - Jaktim	12.154.175,00	14.614.033.415,00	-	-	-	14.626.187.590,00
63	BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - Jaktim	3.296.000,00	12.863.882.304,00	-	-	-	12.867.178.304,00
64	BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - Jaktim	6.067.000,00	15.449.890.184,00	-	-	-	15.455.957.184,00
65	BLUD Puskesmas Kec. Matraman - Jaktim	488.000,00	9.068.582.352,00	2.405.793,00	-	-	9.071.476.145,00
66	BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - Jaktim	63.313.750,00	13.214.682.268,00	-	-	-	13.277.996.018,00
67	BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - Jaktim	27.242.004,00	20.172.793.902,00	-	-	-	20.200.035.906,00
68	BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu	-	669.059.755,00	-	-	-	669.059.755,00
69	BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu	2.011.500,00	330.634.897,00	-	-	-	332.646.397,00
70	BLUD RS Koja	434.655.338,00	24.760.157.578,00	182.647.105,00	464.940.539,00	-	25.842.400.560,00
71	BLUD RS Tarakan	22.984.506,00	23.915.088.210,00	-	31.642.520,00	-	23.969.715.236,00
72	BLUD RS Cengkareng	147.110.491,00	71.716.611.089,00	-	446.896.946,00	13.067.000	72.323.685.526,00
73	BLUD RS Pasar Rebo	222.821.824,00	26.346.754.372,00	557.832.487,00	195.848.991,00	-	27.323.257.674,00
74	BLUD RS Budhi Asih	56.424.537,00	14.457.409.709,00	-	225.435.100,00	-	14.739.269.346,00
75	BLUD RS Duren Sawit	21.785.326,00	16.445.874.370,00	-	-	-	16.467.659.696,00
76	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	-	2.147.432.393,00	-	-	-	2.147.432.393,00
77	Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	-	26.129.714.462,00	-	-	-	26.129.714.462,00
78	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	6.186.258,00	757.678.427,00	2.150.000,00	-	-	766.014.685,00
79	KANTOR PENGELOLA TAMAN MERGASATWA RAGUNAN	345.697.883,00	30.079.470.341,00	44.792.668,00	-	-	30.469.960.892,00
	SALDO KAS DAN SETARA KAS BLUD	2.521.825.239,00	1.025.454.143.100,00	871.302.184,00	1.366.064.096,00	13.067.000,00	1.030.226.401.619,00

**REKAPITULASI DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2015**

JENIS PIUTANG PAJAK	PIUTANG UNTUK SPPT/SKDP TERBIT SEBELUM TAHUN 2015					PIUTANG UNTUK SPPT/SKDP TERBIT TAHUN 2015					PIUTANG AKHIR S.D 31 DESEMBER 2015
	PIUTANG PAJAK PER 31 DES 2014	PEMBAYARAN S.D 31 DESEMBER 2015	KEPUTUSAN KEBERATAN S.D 31 DESEMBER 2015	KOREKSI S.D 31 DESEMBER 2015	SISA PIUTANG PER 31 DESEMBER 2014	PIUTANG TH BERJALAN S.D 31 DESEMBER 2015 (SKPD TERBIT)	PEMBAYARAN TH BERJALAN S.D 31 DESEMBER 2015	PENGURANG PIUTANG DENGAN KOMPENSASI	KEPUTUSAN KEBERATAN TH BERJALAN S.D 31 DESEMBER 2015	SISA PIUTANG TAHUN BERJALAN S.D 31 DESEMBER 2015	
1	2	3	4	5	6=2-3-4-5	7	8	9	10	11=7-8-9-10	12 = 6+11
HOTEL	27.172.627.475	9.181.412.738	528.870.106	2.233.232.686	15.229.111.945	16.332.238.528	13.047.159.869	-	1.037.559.216	2.247.519.443	17.476.631.388
RESTORAN	117.185.517.942	18.886.928.234	1.561.080.405	8.416.559.162	88.320.950.141	76.337.034.149	32.786.348.378	-	1.991.402.340	41.559.283.431	129.880.233.572
HIBURAN	46.304.754.264	9.279.065.785	290.595.239	1.681.998.513	35.053.094.727	64.661.104.134	30.228.450.162	-	2.320.673.570	32.111.980.402	67.165.075.129
REKLAME	220.442.896.236	80.016.737.723	3.395.558.960	21.845.900.858	115.184.698.696	753.730.625.555	652.513.120.445	2.366.616.265	3.380.519.498	95.470.369.347	210.655.068.043
P A T	73.416.317.820	4.181.458.840	90.274.611	1.668.319.726	67.476.264.643	112.416.181.210	96.803.327.279	-	1.593.279	15.611.260.652	83.087.525.295
PARKIR	5.005.935.702	1.973.199.955	654.090.525	273.801.084	2.104.844.138	6.171.878.782	5.316.970.254	-	165.361.248	689.547.280	2.794.391.418
BPHTB	17.914.660.837	716.708.698	-	35.403.479	17.162.548.660	678.600.944	-	-	-	678.600.944	17.841.149.604
PBB-P2	4.928.399.531.271	564.435.220.246	55.735.224.528	(1.213.299.193)	4.309.442.385.691	7.779.282.706.804	6.195.602.239.774	3.367.064.377	162.685.540.948	1.417.627.861.705	5.727.070.247.396
BBN-KB	238.833.010	-	-	206.000	238.627.010	350.000	350.000	-	-	-	238.627.010
PKB	20.138.230.486	1.657.975.775	-	(745.828.280)	19.226.082.991	481.461.061.139	450.300.185.585	-	-	31.160.875.554	50.386.958.545
PBB-KB	3.737.829.340	-	-	-	3.737.829.340	478.066.072	120.674.187	-	-	357.391.885	4.095.221.225
PPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total	5.459.957.134.383	690.328.707.993	62.255.694.374	34.196.294.035	4.673.176.437.981	9.291.549.847.317	7.476.718.825.933	5.733.680.642	171.582.650.099	1.637.514.690.643	6.310.691.128.624

**DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM BENTUK SEWA PER 31 DESEMBER 2015**

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET				DENDA PIUTANG SEWA ASET			
			Mulai	Berakhir	Saldo Audited 31-12-2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2015	Saldo Audited 31-12-2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PT Happyday Utama Indonesia	1.500.000.000	23-Dec-13	22-Dec-18	-	275.000.000	275.000.000	-	15.625.000		15.625.000	-
2	Nusantara Sejahtera Raya	1.060.000.000	19-Aug-14	18-Aug-19	-	250.000.000	250.000.000	-	-			-
3	PT Panca Permata Istana Pasar Baru	4.496.856.804	16-Jul-12	15-Jul-17	1.150.740.152	931.508.142	894.085.607	1.188.162.687	215.723.894			215.723.894
4	PT Lingkar Seni Indonesia	5.000.000.000	10-Mar-13	9-Mar-18	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-			-
5	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	5.000.000	26-May-14	25-May-19	-	1.000.000	1.000.000	-	-	50.000	50.000	-
6	Yayasan Gandhi Memorial International School (GMIS)	2.000.000.000	13-Jan-14	12-Jan-19	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-			-
7	Yayasan Pendidikan Elka	1.650.000.000	23-Mar-13	23-Mar-18	-	330.000.000	330.000.000	-	-			-
8	Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara	625.000.000	19-Oct-13	18-Oct-18	-	125.000.000	125.000.000	-	-			-
9	PT Prima Indo Bahari	876.218.235	15-Jun-14	14-Jun-19	-	175.243.647	175.243.647	-	-			-
10	Prima Alto Sejahtera	2.367.579.043	2-Mar-10	1-Mar-15	1.414.005.656	88.373.387		1.502.379.043	75.118.952			75.118.952
11	UD Matahari Terbit	84.556.394	5-May-10	5-Apr-15	12.624.770	6.312.384	18.937.154	(0)	946.858		946.858	(0)
12	Yayasan Al-Amanah Sunter Agung	275.000.000	9-Jan-14	8-Jan-19	-	55.000.000	55.000.000	-	-			-
13	PT Pembangunan Jaya Ancol	1.643.957.703	5-Apr-15	4-Apr-20	-	291.632.179	291.632.179	-		3.181.442		3.181.442
14	Koperasi Pegawai Dinas Perikanan (SPBU)	981.593.198	16-Feb-11	17-Feb-16	-	219.836.502	219.836.502	-	-			-
15	PD Sumber Alam	225.483.718	16-Feb-11	16-Feb-16	-	50.499.078	50.499.078	-	-	2.524.954	2.524.954	-
16	PT Bank DKI (34 Bangunan Kantor)	14.300.660.100	31-May-11	30-May-16	-	3.183.696.297	3.183.696.297	-	-	160.137.985		160.137.985
17	PT Bank DKI (38 lokasi utk 41 ruang ATM)	3.120.130.953	7-Jul-11	6-Jul-16	-	698.780.997	698.780.997	-	27.494.604	36.410.896		63.905.500
18	PT Bank DKI (22 kantor kecamatan)	2.609.622.450	7-Jul-11	6-Jul-16	275.683.015	860.131.335	1.135.814.350	(0)	27.568.301	28.637.968		56.206.269
19	PT Astra Daihatsu Motor	298.765.927	3-Jan-11	2-Jan-16	-			-	-			-
20	Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI)	25.000.000	18-Oct-11	17-Oct-16	-	5.000.000	5.000.000	-	-			-
21	PT Alam Segar Jaya	719.293.062	28-Feb-12	27-Feb-17	-	151.973.642	151.973.642	0	-			-
22	Yayasan Ancol Barat	160.784.300	12-Apr-12	11-Apr-17	-	32.156.860	32.156.860	-	-			-
23	PT Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation	990.000.000	12-Apr-12	11-Apr-15	-	412.500.000	412.500.000	-	-			-
24	Yayasan Harapan Bangsa (3 unit SD)	507.338.366	15-Jun-12	14-Jun-17	-	107.191.500	107.191.500	-	-			-
25	Yayasan Harapan Bangsa (TK dan SD)	338.225.578	27-Jan-15	26-Jan-20	-	63.600.000	63.600.000	-	-			-
26	PT Wiradharma Sportindo	563.709.296	8-Nov-12	7-Nov-17	124.726.667	93.633.333		218.360.000	6.198.880	5.671.933		11.870.813
27	Koperasi Puteri Salju	208.572.440	22-Nov-12	21-Nov-17	3.464.433	38.108.567	41.573.000	0	415.732	2.103.594	2.078.650	440.676
28	RS Atmajaya	25.000.000	29-Aug-13	29-Aug-18	1.666.667	8.333.333	10.000.000	(0)	265.000	10.000	275.000	-
29	Kajima Waskita (KAWA)	496.110.320	2-Sep-14	31-Dec-15	-	496.110.320	496.110.320	-	-			-
30	PT Rukun Gaya Baru	650.000.000	12-Aug-09	10-Aug-14	-	130.000.000	130.000.000	-	-			-
31	Yayasan Jemaat Sungai Yordan	125.000.000	5-Jul-12	4-Jul-17	-			-	-			-
32	Gereja Tiberias Indonesia	375.000.000	14-May-12	13-May-15	-			-	-			-
33	PT Nata Sempurna Abadi	75.000.000	4-Apr-05	3-Apr-10	60.000.000			60.000.000	158.160.000			158.160.000

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET				DENDA PIUTANG SEWA ASET			
			Mulai	Berakhir	Saldo Audited 31-12-2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2015	Saldo Audited 31-12-2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Koperasi Karyawan Bina Sejahtera BP3W Kodya Jakarta Utara	42.750.000	30-May-05	29-May-10	-			-	718.200			718.200
35	Yayasan Mahatma Gading	1.266.767.531	28-Oct-13	27-Oct-18	636.720.000	238.203.200	874.923.200	-	4.457.040	8.277.360	12.734.400	-
36	Yayasan Al - Hidayah	40.000.000	14-Mar-13	14-Mar-18	-	5.000.000	5.000.000	-	-			-
37	PT KMC Indonesia	400.000.000	25-Apr-14	25-Apr-19	-	80.000.000	80.000.000	-	-			-
38	Koperasi Pembina Profesi dan Olahraga Perairan (KPPPO)	430.400.000	19-Jun-14	18-Jun-19	-	86.080.000	86.080.000	-	-			-
39	Yayasan Masjid Raya Al-Musyawaharah	545.000.000	14-Oct-14	13-Oct-19	-	100.000.000	100.000.000	-	-			-
40	Koperasi Perikanan Mina Jaya	97.282.208	14-Oct-14	13-Oct-19	-	13.780.000	13.780.000	-	-	316.940	316.940	-
41	Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya	30.000.000	31-Oct-14	30-Oct-19	-			-	-			-
42	PT Flora Hijau Permai	120.000.000	14-Jul-03	13-Jul-08	48.000.000			48.000.000	-			-
43	Kadin Jakarta Barat	40.000.000	22-Feb-08	21-Feb-13	28.000.000			28.000.000	39.692.000			39.692.000
44	Yayasan Pusat Pelatihan E&P	500.000.000	18-Sep-13	17-Sep-18	-	168.540.000	168.540.000	-	-			-
45	Yayasan Pusat Pelatihan E&P	828.844.687	24-Aug-13	23-Aug-18	-	165.375.000	165.375.000	-	-			-
46	PT Antilope Madju Puri Indah	1.806.415.004	30-Nov-13	29-Nov-18	-	686.717.993	686.717.993	-	-	16.420.805	16.420.805	-
47	Palang Merah Indonesia Jakarta Barat	50.000.000	18-Sep-13	19-Sep-18	-	10.000.000	10.000.000	-	-			-
48	Yayasan Pendidikan Cengkareng 1	1.050.000.000	18-Aug-14	18-Aug-19	-	1.050.000.000	1.050.000.000	-	-			-
49	Yayasan Pendidikan Kemurnian	563.708.802	23-Apr-13	22-Apr-18	-	112.360.000	112.360.000	-	-			-
50	PT Petross Gas	3.718.465.786	31-Mar-15	30-Mar-20	-	659.642.446	659.642.446	-	-			-
51	Yayasan Suhargo Gondokusumo	530.000.000	25-Jun-12	24-Jun-17	-			-	-			-
52	Yayasan Muslim Bojong Indah	30.000.000	19-Apr-12	18-Apr-17	-	5.000.000	5.000.000	-	-			-
53	Yayasan Pendidikan Citra Kasih (Blok bl. 11-12	855.000.000	12-Apr-12	11-Apr-17	-	355.000.000	355.000.000	-	-	4.400.000		4.400.000
54	PT Davalty Mugitama Gasindo	2.395.764.506	15-Mar-12	14-Mar-17	-	506.181.800	506.181.800	-	-			-
55	Yayasan Pendidikan Islam Al Huda	45.000.000	29-Apr-08	28-Apr-11	15.000.000			15.000.000	40.080.000			40.080.000
56	PT Petroleum Sukses	882.950.000	27-Apr-06	26-Apr-11	706.360.000			706.360.000	1.587.721.190			1.587.721.190
57	Pentrago Fertila Utama	500.000.000	23-Oct-07	23-Oct-12	500.000.000			500.000.000	944.000.000			944.000.000
58	Yayasan Diannanda (TK)	253.643.183	20-Nov-12	19-Nov-17	-			-	-			-
59	Yayasan Jemaat Gereja Kristen Kedoya Jakarta Barat	175.000.000	14-Nov-12	14-Nov-17	-	70.000.000	70.000.000	-	-	1.645.000		1.645.000
60	Alfa Indah Sportindo	546.411.042	15-Mar-12	14-Mar-17	-	77.416.040	77.416.040	-	-			-
61	PT Alita Praya Mitra	802.200.000	23-Nov-07	21-Feb-12	204.030.000			204.030.000	120.971.760			120.971.760
62	Perusahaan Umum Damri	2.500.000.000	1-Nov-12	1-Nov-17	-	500.000.000	500.000.000	-	-			-
63	Yayasan Tanimbar Lestari	136.370.930	5-May-12	8-May-17	-			-	-			-
64	Ikrar Anugerah Perkasa	385.000.000	12-Sep-12	11-Sep-17	175.000.000	130.000.000		305.000.000	11.250.000	4.000.000		15.250.000
65	Koperasi Pegawai Dinas Pariwisata	125.000.000	30-Dec-08	29-Nov-13	100.000.000			100.000.000	126.575.000	36.500.000		163.075.000
66	Koperasi Pegawai Dinas Koperasi & UKM	30.000.000	14-Jul-08	13-Jul-13	12.000.000			12.000.000	12.978.000			12.978.000
67	PT Multi Kontrol Nusantara	602.228.090	14-Dec-14	13-Dec-19	-	220.076.176	220.076.176	-	-	5.341.655	5.341.655	-
68	Yayasan Putera Bahagia	1.157.559.375	14-Jun-14	13-Jun-19	-	231.511.875	231.511.875	-	-	1.157.559		1.157.559
69	CV Kandang Mas	180.386.975	29-Dec-10	28-Dec-15	-	40.399.263		40.399.263	-	2.019.963		2.019.963
70	Himpunan Penyayang Binatang	30.000.000	30-Jun-11	29-Jun-16	-			-	-			-
71	PT Safari Persada	986.491.268	7-Jul-11	6-Jul-16	486.343.900	325.147.368		811.491.268	29.527.890	11.046.673		40.574.563
72	PT Asri Karya Indah Pesona	620.080.226	1-Jan-12	31-Dec-16	-	134.942.113	134.942.113	-	-			-
73	Yayasan Pantara	112.741.859	8-Aug-12	7-Aug-17	30.563.333	13.108.667	43.672.000	0	-	2.183.600	2.183.600	-

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET				DENDA PIUTANG SEWA ASET			
			Mulai	Berakhir	Saldo Audited 31-12-2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2015	Saldo Audited 31-12-2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	PT Griya Berlian	3.190.000.000	29-Nov-12	28-Nov-17	(0)	54.583.333		54.583.333	10.625.000	9.680.000		20.305.000
75	CV Satu Nafas	500.000.000	3-Jul-08	2-Jul-13	350.000.000			350.000.000	325.400.000			325.400.000
76	Koperasi Taman Marga Satwa Ragunan	1.268.345.916	1-Jan-12	31-Dec-16	-			-	-			-
77	PT Harco Jaya Abadi	2.500.000.000	1-Jun-11	31-May-16	-			-	-			-
78	CV Virgini	986.491.268	4-Apr-12	3-Apr-17	-			-	-			-
79	PT Figurkarya Semesta	507.338.366	10-Dec-12	10-Dec-17	95.400.000	101.124.000	95.400.000	101.124.000	9.270.000	5.056.200	9.270.000	5.056.200
80	PD Pembangunan Sarana Jaya	1.200.000.000	4-Apr-05	4-Apr-10	-	400.000.000	400.000.000	-	720.000			720.000
81	Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga	37.500.000	13-Oct-06	12-Oct-11	-			-	735.000			735.000
82	PT Harkat Abadi Sukses				100.000.000		100.000.000	-	-			-
83	Yayasan Nawami Bhakti	375.000.000	15-Oct-12	15-Oct-17	-	75.000.000	75.000.000	-	4.200.000		4.200.000	-
84	PT Harco Jaya Abadi	2.100.000.000	1-Jun-06	30-May-11	-			-	1.000.000		1.000.000	-
85	PT Aksara Andalan Prima Lokasi Kp. Rambutan	4.246.908.500	21-Apr-08	21-Apr-13	3.167.725.100		2.000.000.000	1.167.725.100	4.782.495.324	1.382.366.362		6.164.861.686
86	PT T. Energy (PKS Lama)	2.700.000.000	1-Dec-08	30-Nov-13	-			-	313.981.463		115.465.177	198.516.286
87	PT T. Energy (PKS Baru)	1.832.055.212	1-Dec-13	1-Dec-18	-	1.034.670.000		1.034.670.000	-	45.160.440		45.160.440
88	Yayasan Perguruan Rakyat	750.000.000	2-Feb-14	1-Feb-19	-	150.000.000	150.000.000	-	-	600.000	600.000	-
89	Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya	150.000.000	25-Apr-13	24-Apr-18	-	90.000.000	90.000.000	-	-	90.000		90.000
90	Yayasan Dharma Siswa	250.000.000	27-Apr-13	26-Apr-18	-	50.000.000	50.000.000	-	-			-
91	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia	32.500.000	25-May-11	24-May-16	-			-	-			-
92	PT Bank BNI (Persero) Tbk	375.000.000	1-Jun-09	31-May-14	-	150.000.000	150.000.000	-	375.000			375.000
93	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.202.960.000	7-Jun-14	6-Jun-19	-			-	-	16.841.440		16.841.440
94	Yayasan Rumah Bersalin Bidara Mulia	100.000.000	16-Jun-14	15-Jun-19	-	24.851.000	24.851.000	-	-			-
95	PT Bianglala Metropolitan	2.189.585.000	13-Jan-11	12-Jan-16	437.917.000	437.917.000		875.834.000	21.895.850	21.895.850		43.791.700
96	Kadin Jakarta Timur	125.000.000	13-Sep-11	12-Sep-16	35.416.667	39.583.333		75.000.000	13.825.000		10.075.000	3.750.000
97	Yayasan Baitul Muhajirin	30.000.000	1-Jan-13	31-Dec-18	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	250.000	250.000	500.000	-
98	PT Paljaya Bumi Utama	1.250.000.000	18-Jan-06	18-Jan-11	1.000.000.000			1.000.000.000	2.179.750.000			2.179.750.000
99	Yayasan Nurmala Hikmah	56.370.930	1-Jun-11	1-Jun-16	-			-	17.500		17.500	-
100	Yayasan Nurmala Hikmah	56.370.871	1-Jun-11	1-Jun-16	6.947.593	17.587.337	24.534.930	0	595.508		595.508	-
101	PT Hyunwoo Trading Indonesia	1.111.600.000	5-May-08	4-May-13	1.111.600.000			1.111.600.000	1.068.914.560			1.068.914.560
102	PT BNI (Persero) Tbk (Cabut Jatinegara)	425.000.000	1-Apr-11	31-Mar-16	318.750.000		318.750.000	-	21.250.000		21.250.000	-
103	Koperasi Karyawan RSUD Pasar Rebo	842.181.687	1-Jan-12	31-Dec-16	398.688.840		398.688.840	-	23.781.492		23.781.492	-
104	Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (DPP PAMMI)	50.000.000	29-Apr-14	28-Apr-19	-	10.000.000	10.000.000	-	-			-
105	PT Satria Cipta Perkasa	2.252.972.568	13-May-14	12-May-19	-	287.000.000		287.000.000	20.580.000	21.525.000		42.105.000
106	Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa	112.741.859	18-Sep-13	17-Sep-18	7.066.667	36.605.333	43.672.000	(0)	1.060.000		1.060.000	-
107	Yayasan Al-Muhsinin Alfa Indah	550.000.000	24-Jul-06	23-Jul-18	-	100.000.000	100.000.000	-	1.200.000		1.200.000	-
108	PT Bumi Bintang Bersatu	700.000.000	2-Jul-14	1-Jul-19	-	130.000.000	130.000.000	-	-			-
109	Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat "Wijaya Kusuma"	55.000.000	8-Aug-14	7-Aug-19	-			-	-			-
110	PT Swadaya Niaga Jaya (Smesco's)	22.500.000.000	10-Apr-15	9-Apr-20	-	3.375.000.000	3.375.000.000	-	-	6.000.000		6.000.000
111	Swadaya Panduarta	500.000.000	30-Oct-14	30-Oct-19	-	100.000.000	100.000.000	-	4.700.000	(1.300.000)	3.400.000	-

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET				DENDA PIUTANG SEWA ASET			
			Mulai	Berakhir	Saldo Audited 31-12-2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2015	Saldo Audited 31-12-2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	Yayasan Al Muhajirin Pondok Kopi	422.781.972	17-Nov-14	16-Nov-19	-	79.500.000		79.500.000	-	3.498.000		3.498.000
113	PT Mac Sarana Djaya	528.150.000			-	528.150.000	528.150.000	-	-	5.175.870	5.175.870	-
114	PT Indosat Tbk	1.070.000.000			-	1.070.000.000	1.070.000.000	-	-			-
115	Yayasan Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah	175.000.000				140.000.000	140.000.000					-
116	PT Tunas Dipta Persada	4.350.000.000			1.585.000.000		160.000.000	1.425.000.000	-			-
117	PT Setia Utama Island	5.590.000.000	18-Dec-14	17-Dec-19	-	1.118.000.000		1.118.000.000		30.186.000		30.186.000
118	PT Gagas Energi Indonesia	572.432.513	1-Sep-13	1-Sep-15		572.432.513	572.432.513	-		10.303.785		10.303.785
119	PT PLN Persero	145.139.715	4-Feb-15	3-Feb-20		145.139.715	145.139.715	-				-
120	Yayasan Abdi Karya (Yadika)	2.222.665.229	26-Feb-15	25-Feb-20		394.292.812	394.292.812	-				-
121	PT Holcim Beton	5.500.000.000	8-Apr-15	7-Apr-20		5.500.000.000	5.500.000.000	-				-
122	PT Swarna Jaya Sejahtera	100.000.000	11-Mar-15	10-Mar-20		100.000.000	100.000.000	-				-
123	Yayasan Pendidikan Dakwah Islam Al-Falah	25.000.000	8-Apr-15	7-Apr-20		5.000.000	5.000.000	-				-
124	Yayasan Bait-el Indonesia	425.000.000	30-Aug-11	29-Aug-16		340.000.000	227.500.000	112.500.000				-
125	UD Lautan Mutiara	2.254.837.184	23-Apr-14	22-Apr-19		824.000.000	824.000.000	-		2.544.000		2.544.000
126	Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara	25.000.000	5-May-15	4-May-20		5.000.000	5.000.000	-				-
127	PT Balats Dwi Tunggal	325.859.614	26-May-15	25-May-17		325.859.614	325.859.614	-				-
128	Yayasan Diannanda (SD)	1.710.857.713	26-Sep-13	27-Sep-18		966.222.600	966.222.600	-				-
129	Yayasan Pendidikan Pelita Harapan	3.750.000.000	1-Jul-15	30-Jun-20		3.750.000.000	3.750.000.000	-				-
130	Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	400.000.000	31-Jan-13	30-Jan-18		240.000.000	240.000.000	-		12.000.000	12.000.000	-
131	PT Surya Jaya Mandiri	110.000.000	9-Jul-15	8-Jul-20		110.000.000	110.000.000	-				-
132	PT Jamkrida Jakarta	31.373.624	1-Jul-15	30-Jun-17		15.686.812	15.686.812	-				-
133	Yayasan Meek Nusantara	27.000.000	27-Jul-15	26-Jun-18		27.000.000	27.000.000	-				-
134	Yayasan Rasa Sayang Mandiri	310.040.112	26-Oct-15	25-Oct-20		155.000.000	155.000.000	-				-
135	Yayasan Al-Ikhwan Meruya	56.370.930	29-Oct-15	28-Oct-20		10.000.000	10.000.000	-				-
136	Yayasan Haleluya Jakarta	1.691.127.888	18-Nov-15	17-Nov-20		300.000.000	300.000.000	-				-
137	Yayasan Pelita Bangsa	2.333.333.340	23-Dec-15	22-Dec-20		2.333.333.340	2.333.333.340	-				-
138	PT Bank DKI (22 ATM dan Loker)	11.000.000	6-Oct-15	5-Oct-20		11.000.000	11.000.000	-		550.000		550.000
139	PT Bank DKI (58 ATM dan Loker)	29.000.000	28-Dec-15	27-Dec-20		29.000.000	29.000.000	-		87.000		87.000
140	PT Majuan Masittah Latief					99.000.000	99.000.000	-				-
141	Yayasan Pendidikan Karya Kasih					25.249.540	25.249.540	-				-
142	PT Jakarta Infrastruktur Propertindo					2.959.473.805	2.959.473.805	-				-
143	PT Senopati					946.857.720	946.857.720	-				-
144	PT Ave Indonesia					214.824.014	214.824.014	-				-
145	Gedung PKK Melati Jaya					47.188.000	47.188.000	-				-
146	RM TIM/BPKAD					4.750.000	4.750.000	-				-
147	RM TIM/BPKAD					11.275.000	11.275.000	-				-
148	RM TIM/BPKAD					33.885.000	33.885.000	-				-
149	RM TIM/BPKAD					6.325.000	6.325.000	-				-
150	KIOS TIM/BPKAD					2.850.000	2.850.000	-				-

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET				DENDA PIUTANG SEWA ASET			
			Mulai	Berakhir	Saldo Audited 31-12-2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2015	Saldo Audited 31-12-2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	RES TIM/BPKAD					6.325.000	6.325.000	-				-
152	RES TIM/BPKAD					3.175.000	3.175.000	-				-
153	RES TIM /BPKAD					13.550.000	13.550.000	-				-
154	RES TIM MUSI INDAH/BPKAD					2.925.000	2.925.000	-				-
155	PT Putraraja Perkasa					45.000.000	45.000.000	-				-
156	RES TIM/BPKAD					3.075.000	3.075.000	-				-
157	RES LANI TIM /BPKAD					1.900.000	1.900.000	-				-
158	Sewa Gedung Aset					11.000.000	11.000.000	-				-
159	PT Bank DKI					297.236.109	297.236.109	-				
TOTAL PIUTANG					14.604.440.458	47.564.506.374	47.632.228.140	14.536.718.693	12.252.109.998	1.904.548.274	268.088.409	13.888.569.863

**DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM BENTUK BOT/BTO PER 31 DESEMBER 2015**

No.	Pihak Ketiga	Thn	Jangka Waktu	Nilai Kontribusi PKS	Piutang Pokok	Mutasi 2015		Piutang Pokok	Piutang Denda	Mutasi 2015		Piutang Denda
		PKS	PKS	BOT/BTO	Per 31 Des 2014	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2015	Per 31 Des 2014	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PT. Kempas Indah Indonesia	1997	1999 s/d 2024	910.000.000	-			-	-			-
2	PT. Duta Pertiwi Tbk	1997	1997 s/d 2017	460.000.000	-			-	-			-
3	PT. Duta Pertiwi Tbk	1999	1999 s/d 2029	1.450.000.000	-			-	-			-
4	PT. Rointa Eka Jaya	2001	2001 s/d 2031	1.250.000.000	-			-	14.400.000			14.400.000
5	PT. Duta Masa Nusa	2003	2006 s/d 2031	2.000.000.000	500.000.000			500.000.000	-			-
6	PT. Duta Pertiwi Tbk	2003	2004 s/d 2029	1.500.000.000	-			-	-			-
7	PT. Gading Raya Propertindo	2004	2004 s/d 2029	3.500.000.000	-			-	-			-
8	PT. Hotel Cikini Raya	2006	2008 s/d 2032	6.150.000.000	1.350.000.000		1.350.000.000	-	454.500.000		454.500.000	-
9	PT. Grand Indonesia	2009	2008 s/d 2035	53.074.000.000	-	366.500.000	366.500.000	-	-			-
10	PT. Jaya Real Property	2011	2012 s/d 2037	6.957.000.000	-	135.000.000	135.000.000	-	-			-
11	PT. Fajar Setia Mandiri	2002	2003 s/d 2023	2.218.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-	123.050.000		40.700.000	82.350.000
12	PT. AGB Tuna (Coldstorage)	2004	2004 s/d 2024	600.000.000	-			-	73.150.000			73.150.000
13	Yayasan Al-Muhajirin	2005	2005 s/d -	-	-			-	-			-
14	PT. Gamma Investa Lestari	2006	2005 s/d 2030	1.500.000.000	-	60.000.000	60.000.000	-	-			-
15	Gereja Protestan Minahasa	2006	2006 s/d -	-	-			-	-			-
16	PT. AGB Tuna (Pabrik Es)	2006	2006 s/d 2026	450.000.000	-			-	48.700.000		11.000.000	37.700.000
17	PT. Duta Pertiwi Tbk	2008	2006 s/d 2031	7.453.280.000	42.000.000	210.000.000	252.000.000	-	-			-
18	PT. Gerak Maju Abadi	1997	1997 s/d 2017	5.315.000.000	500.000.000		500.000.000	-	239.725.000		239.725.000	-
19	PT. Bina Citra Tataswati	2000	2002 s/d 2040	200.000.000	-			-	-			-
20	Yayasan Tunas Muda	2000	2000 s/d 2025	911.281.328	-	50.000.000	50.000.000	-	-			-
21	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	2001	2001 s/d 2026	562.500.000	-			-	-			-
22	Yayasan Katolik Mardi Luhur	2001	2001 s/d 2026	911.281.326	186.215.168	44.564.832		230.780.000	224.103.785	47.569.748		271.673.533
23	PT. Pesona Marga Mandiri	2003	2004 s/d 2029	7.494.152.500	98.816.667	296.450.000	98.816.667	296.450.000	190.044.050	30.237.900	137.552.800	82.729.150
24	Yayasan Patmos	2003	2006 s/d 2031	2.629.958.657	-	80.525.500	80.525.500	-	-			-
25	Yay. Pusat Pelatihan E&P	2003	2006 s/d 2031	2.446.290.730	-	77.812.273	77.812.273	-	-			-
26	Gereja Bethel Jemaat Ecclesia	2005	2005 s/d -	-	-			-	-			-
27	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	2006	2008 s/d 2033	6.929.568.694	5.000.000	80.850.000		85.850.000	142.165.000	10.429.650		152.594.650
27	PT. Langgeng Ayom Lestari	1990	1991 s/d 2021	2.605.000.000	-	250.000.000	250.000.000	-	-			-
28	Yay. Sapta Nawami Bhakti	1992	1992 s/d 2012	351.779.690	-			-	-			-
29	PT. Dharma Alumas Sakti	1992	1997 s/d 2044	22.271.759.150	-	183.181.021	183.181.021	-	60.075.198.282	6.044.974		60.081.243.256
30	PT. Bakrie Investindo	1992	1997 s/d 2044	18.237.500.000	-	150.000.000	150.000.000	-	23.977.383.262			23.977.383.262
31	PT. Pasific Bangun Mas	2001	2001 s/d 2026	700.000.000	-			-	116.600.000			116.600.000
32	PT. Perwita Margasakti	2003	2003 s/d 2028	2.500.000.000	-	82.000.000	82.000.000	-	21.000.000		1.500.000	19.500.000
33	PT. Metropolitan Kentjana	2008	2006 s/d 2031	24.912.000.000	-	771.000.000	771.000.000	-	20.752.000			20.752.000
34	PT. Perwita Margasakti	2010	2010 s/d 2035	5.220.000.000	-			-	1.200.000	1.608.000	108.000	2.700.000
35	Yayasan Tugasku	1998	2004 s/d 2024	1.250.950.000	700.000.000	3.599.800.000	4.299.800.000	-	-			-
36	Yay. Pend. Pemb. Bangsa	2003	2003 s/d 2028	-	-			-	-			-
37	PT. Fajar Setia Mandiri	2003	2003 s/d 2023	1.600.000.000	133.750.000	96.250.000	170.000.000	60.000.000	263.868.000	71.195.000		335.063.000
38	PT. Pasific Prima Buana Mas	2004	2004 s/d 2029	250.000.000	-			-	2.209.915.473		679.867.956	1.530.047.517
39	PT. Wahana Cipta Sejahtera	2004	2004 s/d 2029	2.350.000.000	-			-	6.750.000		6.750.000	-
40	PT. Wahana Cipta Sejahtera	2006	2006 s/d 2031	3.000.000.000	-	500.000.000	500.000.000	-	63.500.000			63.500.000
41	Yayasan Darul Ma'arif	2006	2006 s/d -	-	-			-	-			-
42	PT. AAP				4.302.396			4.302.396	-			-
43	Eks. Unit Komp. Aloca PT. TDP	JP	30 Tahun		540.000.000			540.000.000	-			-
44	Eks. PDUK		30 Tahun		400.000.000			400.000.000	-			-
45	T. Kav No.I.C.2	JT	25 Tahun		525.000.000			525.000.000	-			-
46	Tanah Kavling Blok III A (PT. MML)	JT	30 Tahun		1.510.000			1.510.000	-			-
47	Tanah Kav Blok II/J.14 (Eks. PD.P)	JT	30 Tahun		450.000.000			450.000.000	-			-
	JUMLAH			202.121.302.075	5.436.594.231	7.133.933.626	9.476.635.461	3.093.892.396	88.266.004.852	167.085.272	1.571.703.756	86.861.386.368

**REKAPITULASI PENDAPATAN DAN PIUTANG SEWA PEMANFAATAN TITIK REKLAME
PER 31 DESEMBER 2015**

No	Nama Perusahaan	Jenis Sarana	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per 31 Desember 2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d 31 Desember 2015	Keterangan
1	PT. Nindhotama Kharisma	JPO	Jl. MH. Thamrin dpn Gedung BII, Kebon Kacang, Jakarta Pusat	341.500.000	0			0	Lunas 14 Mei 2014
2	PT. Caesar	Bahu Jalan	Jl. Tol Pluit Tomang / Jl. Latumenten, Jakarta Barat	170.000.000	170.000.000			170.000.000	Titik B-6A; SK Nomor 46/SK/BPKD/PPTR/X/09 tanggal 6-10-2009
3	PT. Billy Sinar Pratama	JPO	Jl. Daan Mogot dpn Suzuki Motor Ex. Kymco Motor, Jakarta Barat	39.500.000	39.500.000			39.500.000	SK Nomor 145/SK/BPKD-PPTR/III/2010 tanggal 11-03-2010
4	PT. Ditadini Neo Swara	Halte Busway Bagian Dalam	Koridor 1 (19 unit)	25.000.000	25.000.000			25.000.000	SPS Nomor 177/SPS/BPKD-PPTR/IV/2010 tanggal 23-04-2010
5	PT. Starindo Pola Abadi	Halte Bus Reguler	Jl. Mayjen Sutoyo dpn UKI, Jakarta Timur	25.741.000	25.741.000			25.741.000	
6	PT. Garis Mediatama	JPO	Jl. HR. Rasuna Said dpn Depkes, Jakarta Selatan	157.500.000	157.500.000			157.500.000	SPS Nomor 158/SPS/BPKD-PPTR/III/2010 tanggal 19-03-2010
7	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO	Jl. Mampang Prapatan dpn Imigrasi, Kec.Mampang Prapatan, Jaksel	372.000.670	186.000.335			186.000.335	Tahap I Lunas 6 Sept 2011
8	PT. Dinamika Mitra Internusa	Pos Polisi	Jl. Matraman Raya-Slamet Riyadi, Kec.Matraman Jak Timur	68.000.670	34.000.335			34.000.335	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
9	PT. Dinamika Mitra Internusa	Pos Polisi	Jl. Bekasi Barat samping Fly Over, Kec.Jatinegara Jak Timur	27.000.670	13.500.335			13.500.335	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
10	PT. Dinamika Mitra Internusa	Titik S-9B	Jl. Panglima Polim_Jl.Sambas, Kec.Keb Baru, Jak Sel	400.000.670	200.000.335			200.000.335	Tahap I Lunas 6 Sept 2011
11	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO	Jl. Warung Jati Barat depan Hotel Jati Padang, Kec.Ps Minggu Jak Sel	226.000.670	113.000.335			113.000.335	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
12	PT. Puri Anugerah Utama	Pos Polisi	Jl. S.Parman-Jl.Palmerah, Kec.Palmerah Jak Barat	105.000.670	52.500.335			52.500.335	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
13	PT. Simpati Advertising	JPO	Samping Pasar raya Blok M, Jl. Sultan Iskandrsyah Melawai, Jakarta Selatan	6.690.450	6.690.450			6.690.450	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek

Lampiran 4.3

No	Nama Perusahaan	Jenis Sarana	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per 31 Desember 2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d 31 Desember 2015	Keterangan
14	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. Kramat Raya depan Rivoli/Xerox, Senen, Jakarta Pusat	254.589.000	127.294.500			127.294.500	Tahap I Lunas 27 Feb 2012
15	PT. Semarak Tata Pariwara	JPO	Jl. Salemba Raya depan UI, Senen, Jakarta Pusat	22.100.000	22.100.000			22.100.000	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
16	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. Kramat Raya depan Gd YAI/CTC, Senen, Jakarta Pusat	289.900.000	289.900.000			289.900.000	Belum dibayar
17	PT. Semarak Tata Pariwara	JPO	Jl. Salemba Raya dpn Carolus, Senen, Jakarta Pusat	22.100.000	22.100.000			22.100.000	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
18	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. HayamWuruk depan Htl Jayakarta, Taman Sari, Jakarta Barat	285.500.000	142.750.000			142.750.000	Tahap I Lunas 27 Feb 2012
19	PT. Caesar	Titik B1B	Jl Letjen S.Parman Palmerah, Jakarta Barat	472.600.000	236.300.000			236.300.000	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
20	PT. Caesar	Titik B1A	Jl Letjen S.Parman Palmerah, Jakarta Barat	472.600.000	236.300.000			236.300.000	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
21	PT. Caesar	Titik P7B	Jl, HR Rasuna/Latuharhari, Menteng Jakarta Pusat	945.000.000	472.500.000			472.500.000	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
22	PT. Mida Jaya	Titik B10A	Jl. Arjuna/Jl Tol Jakarta-Merak, Kec. Grogol Petamburan Jak-Bar	122.000.000	122.000.000			122.000.000	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
23	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. Warung buncit raya dpn Grha Inti Fauji, Kec Ps Minggu, Jak Sel	353.000.670	176.500.335			176.500.335	Tahap I Lunas 25 Januari 2012 dikeluarkan 2x SPS
24	PT. Puri Anugrah Utama	JPO	Jl. Matraman Raya dpn BCA, Kec. Matraman Jak-Sel	280.067.000	0			0	Lunas 20 Mei 2014
25	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO	Jl. Casablanca depan Halte SD/Pemakaman, Kec.Tebet Jak-Sel	200.900.000	0			0	Lunas 25 Agustus 2014
26	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Four Season Kec.Setiabudi Jak-Sel	1.551.000.000	1.551.000.000		1.551.000.000	0	SPS No. 5247/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
27	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Kedubes Turki Kec.Setiabudi Jak-Sel	1.610.000.000	1.610.000.000		1.610.000.000	0	SPS No. 5246/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
28	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Depkes Kec.Setiabudi Jak-Sel	1.850.900.000	1.850.900.000		1.850.900.000	0	SPS No. 5248/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
29	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Indorama Kec.Setiabudi Jak-Sel	1.967.000.000	1.967.000.000		1.967.000.000	0	SPS No. 5243/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014

Lampiran 4.3

No	Nama Perusahaan	Jenis Sarana	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per 31 Desember 2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d 31 Desember 2015	Keterangan
30	PT. Unggul Dian Perkasa	JPO	Jl. Jend. Sudirman depan Ratu Plaza Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	3.500.000.000	3.500.000.000		3.500.000.000	0	SPS No. 5244/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
31	PT. Insite Media	JPO	Jl. Jend. Sudirman depan Polda Metro Jaya Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	5.849.800.000	5.849.800.000		5.849.800.000	0	SPS No. 5249/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
32	PT. Prisma Harapan	JPO	Jl. HR. Rasuna Said dpn Pasar Festival, Kec.Setiabudi Jak-Sel	2.101.000.000	0			0	Lunas 30 Desember 2014
				5.684.292.140	19.199.878.295	0	16.328.700.000	2.871.178.295	

**DAFTAR STOCK OPNAME PERSEDIAAN DI SKPD
PER 31 DESEMBER 2015**

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
1	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA	72.798.993.178,00
2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	42.922.818.260,00
3	Sudin Perindustrian dan Energi - Jaksel	37.039.744.673,00
4	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	23.954.389.800,00
5	Sudin Perindustrian dan Energi - Jakut	23.702.612.694,00
6	DINAS PELAYANAN PAJAK	23.503.623.539,00
7	Unit Pengelola Anjungan dan Informasi	21.199.018.247,00
8	DINAS KEBERSIHAN	18.428.817.952,00
9	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	17.514.066.403,00
10	Sudin Perindustrian dan Energi - Jakpus	16.025.016.173,00
11	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB	15.531.274.402,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.410.396.514,00
13	BLUD RS Koja	14.386.394.161,00
14	BLUD RS Tarakan	13.469.742.802,00
15	BLUD RS Pasar Rebo	12.558.969.446,00
16	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	11.957.987.859,00
17	Sudin Kebersihan - Jaktim	11.012.305.910,00
18	BLUD RS Budhi Asih	10.840.364.359,00
19	BLUD RS Cengkareng	10.606.538.229,00
20	Sudin Perindustrian dan Energi - Jakbar	10.104.846.062,00
21	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jaktim	9.324.528.400,00
22	Sudin Perindustrian dan Energi - Jaktim	8.191.839.452,00
23	Sudin Kebersihan - Jakut	8.003.500.841,00
24	BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	7.807.264.237,00
25	Sudin Kebersihan - Jakbar	7.614.419.678,00
26	DINAS KESEHATAN	7.266.171.212,00
27	Sudin Kebersihan - Jakpus	6.638.920.411,00
28	BLUD Puskesmas Kec. Tambora - Jakbar	5.493.398.074,00
29	BLUD Puskesmas Kec. Koja - Jakut	4.922.150.101,00
30	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	4.686.800.774,00
31	BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - Jaktim	4.603.449.067,00
32	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	4.527.124.875,00
33	BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - Jakut	4.503.464.311,00
34	BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - Jakpus	4.264.299.981,00
35	BLUD RS Duren Sawit	3.933.769.560,00
36	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jaksel	3.870.940.843,00
37	BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.715.882.247,00
38	BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - Jakut	3.634.652.736,00
39	BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - Jaktim	3.557.959.700,00
40	BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - Jakut	3.553.860.030,00
41	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - Jaktim	3.523.817.772,00
42	BLUD Puskesmas Kec. Senen - Jakpus	3.510.308.667,00
43	BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - Jaktim	3.437.601.331,00
44	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.382.610.133,00
45	BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - Jakbar	3.375.575.323,00
46	BLUD Puskesmas Kec. Gambir - Jakpus	3.305.083.676,00
47	BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - Jaktim	3.284.599.790,00
48	BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - Jakut	3.220.410.347,00
49	BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - Jakbar	3.210.797.971,00
50	KANTOR PENGELOLA TAMAN MERGASATWA RAGUNAN	3.207.276.475,00
51	BLUD Puskesmas Kec. Palmerah - Jakbar	3.204.397.110,00
52	RSUD Pasar Minggu	3.176.372.772,00
53	BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - Jaksel	3.160.999.444,00
54	BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - Jakpus	3.111.870.300,00
55	BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - Jakpus	3.079.187.286,00
56	BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - Jakbar	3.008.972.087,00
57	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - Jaksel	2.874.795.362,00
58	Sudin Kesehatan - Jaksel	2.787.163.005,00
59	BLUD Puskesmas Kec. Menteng - Jakpus	2.682.709.074,00
60	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	2.661.592.222,00
61	BLUD Puskesmas Kec. Makasar - Jaktim	2.600.147.407,00
62	BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - Jaksel	2.583.433.208,00
63	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.582.419.538,00
64	UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	2.577.555.806,00
65	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	2.548.957.594,00
66	DINAS SOSIAL	2.523.065.440,00
67	BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - Jakbar	2.425.228.927,00
68	BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - Jakbar	2.392.083.293,00

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
69	Sudin Kebersihan - Jaksel	2.318.303.169,00
70	BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - Jaktim	2.284.344.417,00
71	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas	2.283.241.991,00
72	Unit Pengelola Perparkiran	2.271.977.429,00
73	BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - Jakpus	2.266.870.532,00
74	DINAS BINA MARGA	2.210.782.380,00
75	BLUD Puskesmas Kec. Tebet - Jaksel	2.166.364.794,00
76	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - Jaksel	2.124.927.794,00
77	BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - Jakbar	2.048.941.462,00
78	BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - Jaktim	2.040.234.358,00
79	Kota Administrasi Jakarta Barat	2.032.828.380,00
80	BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - Jaksel	2.009.648.350,00
81	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.905.415.461,00
82	BLUD Puskesmas Kec. Matraman - Jaktim	1.865.213.477,00
83	Rumah Sakit Umum Kec. Kramat Jati	1.849.422.865,00
84	BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - Jaksel	1.765.307.548,00
85	Rumah Sakit Umum Kec. Kemayoran	1.739.162.515,00
86	Kantor Keluarga Berencana - Jakbar	1.703.088.540,00
87	BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	1.701.427.048,00
88	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	1.677.077.327,00
89	Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian	1.664.528.250,00
90	Sudin Kesehatan - Jakbar	1.602.272.415,00
91	Sudin Kesehatan - Jakut	1.600.510.992,00
92	BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - Jakut	1.594.663.603,00
93	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.535.706.140,00
94	UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng	1.476.683.175,00
95	BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - Jaksel	1.451.326.090,00
96	Kota Administrasi Jakarta Timur	1.446.223.747,00
97	DINAS PENATAAN KOTA	1.438.687.136,00
98	BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - Jakpus	1.434.858.189,00
99	UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	1.419.890.767,00
100	Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekda	1.412.595.797,00
101	UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung	1.391.393.870,00
102	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan	1.374.824.297,00
103	Unit Pengelola Museum Seni	1.361.115.656,00
104	BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - Jaktim	1.338.411.471,00
105	KANTOR PENGELOLA KAWASAN MONAS	1.306.021.181,00
106	Sudin Perindustrian dan Energi - Kep. Seribu	1.287.914.251,00
107	BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - Jaksel	1.259.111.405,00
108	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - Jaksel	1.249.924.457,00
109	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA	1.190.726.800,00
110	Pusat Penyimpanan Barang Daerah	1.184.279.008,00
111	Rumah Sakit Umum Kec. Tebet	1.109.144.946,00
112	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jakpus	1.086.841.470,00
113	Sudin Kesehatan - Jakpus	1.048.768.245,00
114	BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)	1.042.467.850,00
115	INSPEKTORAT	1.030.703.113,00
116	Kantor Keluarga Berencana - Jakpus	1.014.042.934,00
117	Rumah Sakit Umum Kec. Pesanggrahan	999.637.349,00
118	Sudin Tata Air - JAKSEL	993.323.130,00
119	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN	961.993.924,00
120	Rumah Sakit Umum Kec. Ciracas	948.933.364,00
121	Kantor Keluarga Berencana - Jaksel	943.833.493,00
122	Kantor Keluarga Berencana - Jaktim	929.197.224,00
123	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	913.359.900,00
124	DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI	892.694.376,00
125	Biro Umum	889.026.894,00
126	BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu	858.455.986,00
127	Sudin Kesehatan - Jaktim	854.247.197,00
128	Kota Administrasi Jakarta Utara	830.267.170,00
129	Rumah Sakit Umum Kec. Cempaka Putih	821.716.843,00
130	Rumah Sakit Umum Kec. Jagakarsa	809.084.981,00
131	Sekretariat DPRD	793.856.259,00
132	Planetarium dan Observatorium	753.344.010,00
133	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel	680.470.604,00
134	Rumah Sakit Umum Kec. Sawah Besar	665.080.664,00
135	Kota Administrasi Jakarta Pusat	663.653.430,00
136	PSAA Putra Utama 3	657.822.352,00
137	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKSEL	648.766.905,00
138	Kantor Keluarga Berencana - Jakut	647.077.331,00
139	SATPOL PP	629.637.558,00
140	PSTW Budi Mulia 1	624.726.457,00
141	Kota Administrasi Jakarta Selatan	622.855.846,00
142	UP Konservasi dan Cagar Budaya	620.865.850,00

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
143	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jakbar	618.341.213,00
144	BADAN PEMBINAAN BUMD DAN PENANAMAN MODAL	590.975.988,00
145	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	558.978.201,00
146	DINAS PENDIDIKAN	557.958.050,00
147	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jakut	538.414.533,00
148	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	488.961.368,00
149	Sudin Penataan Kota - JAKSEL	479.227.453,00
150	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	471.515.556,00
151	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKTIM	465.413.988,00
152	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	438.197.601,00
153	UPT Balai Metrologi	436.826.885,00
154	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jaktim	418.124.800,00
155	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	400.686.646,00
156	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	382.777.498,00
157	PSBI Bangun Daya 1	377.893.917,00
158	Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya	364.491.613,00
159	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Kep. Seribu	358.600.777,00
160	Sudin Bina Marga - JAKUT	354.614.700,00
161	Sudin Perhubungan - JAKBAR	345.867.354,00
162	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jaktim	319.601.299,00
163	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	316.088.270,00
164	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jaksel	312.988.616,00
165	Unit Pengelola Graha Wisata	307.208.529,00
166	BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu	304.124.119,00
167	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKUT	297.586.809,00
168	Kelurahan Cakung Barat - Jaktim	297.464.900,00
169	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	284.452.386,00
170	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	277.055.410,00
171	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakut	276.502.851,00
172	Rumah Sakit Umum Kec. Kembangan	275.327.590,00
173	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	273.958.800,00
174	Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	252.012.210,00
175	Sudin Penataan Kota - JAKUT	248.649.500,00
176	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jakpus	247.053.135,00
177	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Kep. Seribu	244.119.080,00
178	PSTW Budi Mulia 4	243.381.776,00
179	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah II	243.083.027,00
180	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakbar	242.532.180,00
181	Sudin Penataan Kota - JAKTIM	240.116.503,00
182	Biro Kesejahteraan Sosial	232.120.794,00
183	Kelurahan Cililitan - Jaktim	231.209.660,00
184	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKTIM	227.225.900,00
185	BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta	226.034.150,00
186	Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta	223.070.375,00
187	PSBR Taruna Jaya	215.272.833,00
188	Gelanggang Olahraga Sunter	208.763.652,00
189	Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	203.038.088,00
190	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kep.Seribu	199.911.880,00
191	Sudin Tata Air - JAKUT	198.652.306,00
192	Sudin Bina Marga - JAKSEL	198.537.830,00
193	Unit Pengelola Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	198.116.262,00
194	Kantor Lingkungan Hidup - Jaktim	194.187.397,00
195	Pusat Pelatihan Seni Budaya	190.284.921,00
196	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKPUS	189.444.980,00
197	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jaktim	182.936.386,00
198	Sudin Penataan Kota - JAKPUS	179.236.055,00
199	Kelurahan Grogol Selatan - Jaksel	173.416.020,00
200	Kecamatan Koja - Jakut	169.013.350,00
201	PSBL Harapan Sentosa 3	168.861.940,00
202	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jakbar	164.958.750,00
203	Biro Hukum	164.070.471,00
204	Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah - Kep. Seribu	160.627.665,00
205	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaktim	157.247.000,00
206	Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jaksel	153.185.902,00
207	Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	153.046.113,00
208	Kantor Pengelolaan Aset Daerah - Jaksel	151.970.724,00
209	Kelurahan Tugu Utara - Jakut	149.270.110,00
210	Sudin Tata Air - JAKPUS	148.127.289,00
211	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jakut	143.500.588,00
212	PSAA Balita Tunas Bangsa	137.533.609,00
213	Kelurahan Rawajati - Jaksel	135.819.145,00
214	Sudin Perhubungan - JAKTIM	134.880.303,00
215	Kantor Pengelolaan Aset Daerah - Jakut	133.502.572,00
216	Kantor Lingkungan Hidup - Jakpus	132.020.240,00

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
217	Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim	129.499.294,00
218	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	129.450.800,00
219	Rumah Sakit Umum Kec. Koja	128.695.063,00
220	Sudin Pelayanan Pajak - Jakut	126.613.052,00
221	Sudin Kesehatan - Kep. Seribu	124.187.220,00
222	Rumah Sakit Umum Kec. Kalideres	121.867.672,00
223	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las	121.115.775,00
224	PSBD Budi Bhakti	119.271.031,00
225	Kecamatan Pademangan - Jakut	119.078.363,00
226	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara	118.480.963,00
227	Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel	117.304.660,00
228	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jakut	117.278.037,00
229	Kelurahan Pulo Gadung - Jaktim	116.002.935,00
230	Gelanggang Remaja Jakarta Utara	115.667.410,00
231	Sudin Sosial - Jakpus	114.410.020,00
232	PSBN Cahaya Bathin	114.313.557,00
233	Kecamatan Cilincing - Jakut	113.349.281,00
234	Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	113.291.970,00
235	Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	112.712.405,00
236	Kantor Perencanaan Pembangunan - Jaksel	111.345.000,00
237	Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur	110.569.745,00
238	Kelurahan Kebon Pala - Jaktim	109.338.185,00
239	Kecamatan Cengkareng - Jakbar	106.496.065,00
240	Kelurahan Gandaria Utara - Jaksel	106.137.845,00
241	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah - Jakut	103.810.109,00
242	Sudin Perhubungan - JAKUT	103.721.700,00
243	Kelurahan Cilincing - Jakut	103.367.880,00
244	Sudin Bina Marga - JAKTIM	102.798.500,00
245	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKBAR	102.434.352,00
246	Kelurahan Cipulir - Jaksel	101.633.070,00
247	Kelurahan Rawa Badak Selatan - Jakut	100.787.402,00
248	Kecamatan Pulogadung - Jaktim	100.326.996,00
249	Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan	99.626.450,00
250	Sudin Bina Marga - JAKPUS	99.359.205,00
251	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jakbar	97.989.980,00
252	Sudin Pendidikan I - JAKBAR	96.898.120,00
253	Kelurahan Cilandak Barat - Jaksel	95.884.665,00
254	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jaksel	95.590.110,00
255	Kelurahan Lagoa - Jakut	94.989.400,00
256	Sudin Pelayanan Pajak - Jakbar	94.741.308,00
257	Kelurahan Klender - Jaktim	94.194.700,00
258	Kelurahan Gambir - Jakpus	91.972.474,00
259	Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	91.595.906,00
260	Kelurahan Karang Anyar - Jakpus	91.279.980,00
261	Kelurahan Kedoya Utara - Jakbar	89.705.000,00
262	Biro Perekonomian	89.340.625,00
263	PSP Bhakti kasih	89.322.915,00
264	Sudin Pelayanan Pajak - Jakpus	88.605.777,00
265	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jaktim	88.598.185,00
266	Unit Industri Kerajinan dan Tekstil	87.916.800,00
267	Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakbar	87.118.500,00
268	Kantor Pengelolaan Aset Daerah - Jakpus	87.012.120,00
269	Kelurahan Kramat Jati - Jaktim	86.894.720,00
270	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jakpus	86.289.640,00
271	Kantor Pengelolaan Aset Daerah - Jakbar	85.346.500,00
272	PSAA Putra Utama 2	85.177.044,00
273	Kelurahan Kembangan Utara - Jakbar	84.252.670,00
274	Kelurahan Kramat Pela - Jaksel	80.288.010,00
275	Kelurahan Kebon Manggis - Jaktim	80.129.150,00
276	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKTIM	80.030.663,00
277	Kelurahan Kebon Jeruk - Jakbar	78.967.050,00
278	Kelurahan Utan Panjang - Jakpus	78.854.380,00
279	Biro Tata Pemerintahan	78.356.680,00
280	Kelurahan Pademangan Timur - Jakut	77.742.170,00
281	Kelurahan Kalisari - Jaktim	76.953.140,00
282	Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	75.837.050,00
283	Satpol PP - Jakut	75.516.100,00
284	Kecamatan Ciracas - Jaktim	74.994.860,00
285	PSTW Budi Mulia 3	74.845.100,00
286	Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	74.070.205,00
287	Kelurahan Grogol Utara - Jaksel	72.924.434,00
288	PSBI Bangun Daya 2	72.812.520,00
289	Kelurahan Palmerah - Jakbar	72.687.905,00
290	Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Jakbar	71.683.435,00

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
291	Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	70.086.749,00
292	Kecamatan Palmerah - Jakbar	69.805.450,00
293	Kelurahan Duri Kupa - Jakbar	69.749.027,00
294	Unit Pengelola Angkutan Sekolah	69.127.025,00
295	Kelurahan Cilandak Timur - Jaksel	69.044.175,00
296	Kantor Pengelolaan Aset Daerah - Jaktim	68.813.710,00
297	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKUT	68.771.890,00
298	Kelurahan Pulo Gebang - Jaktim	66.968.110,00
299	RSUD Kepulauan Seribu	66.409.070,00
300	Kelurahan Tanah Sereal - Jakbar	66.065.933,00
301	Kelurahan Maphar - Jakbar	66.065.933,00
302	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah - Jaksel	65.952.799,00
303	Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakut	65.675.468,00
304	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	65.543.480,00
305	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi	65.116.500,00
306	Kelurahan Dukuh - Jaktim	64.789.450,00
307	Kelurahan Kalibata - Jaksel	64.401.745,00
308	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jakpus	63.912.040,00
309	Kantor Lingkungan Hidup - Jaksel	63.395.092,00
310	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	63.025.750,00
311	Sudin Pelayanan Pajak - Jaktim	62.766.635,00
312	Kelurahan Menteng Atas - Jaksel	61.940.831,00
313	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKSEL	61.496.820,00
314	PSTW Budi Mulia 2	61.042.630,00
315	Sudin Pelayanan Pajak - Jaksel	60.720.166,00
316	Kelurahan Pondok Kelapa - Jaktim	60.486.200,00
317	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jakpus	60.402.375,00
318	Kelurahan Jati Pulo - Jakbar	60.289.433,00
319	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jakut	60.235.586,00
320	Rumah Sakit Umum Kec. Pademangan	59.916.860,00
321	Kelurahan Cikoko - Jaksel	59.811.180,00
322	Kelurahan Cipete Utara - Jaksel	59.588.210,00
323	Kecamatan Kelapa Gading - Jakut	58.956.353,00
324	Sudin Pendidikan I - JAKUT	58.890.545,00
325	Kelurahan Ujung Menteng - Jaktim	58.868.580,00
326	Sudin Bina Marga - JAKBAR	58.164.700,00
327	Kelurahan Tegal Parang - Jaksel	56.111.550,00
328	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKBAR	55.925.525,00
329	Rumah Sakit Umum Kec. Mampang Prapatan	55.519.453,00
330	Kecamatan Johar Baru - Jakpus	55.211.640,00
331	Rumah Sakit Umum Kec. Johar Baru	55.051.748,00
332	Kecamatan Jatinegara - Jaktim	54.551.468,00
333	Kelurahan Cakung Timur - Jaktim	54.264.155,00
334	Kelurahan Kamal Muara - Jakut	54.120.385,00
335	Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	54.077.705,00
336	Kelurahan Pluit - Jakut	54.045.436,00
337	Kelurahan Kelapa Gading Timur - Jakut	53.575.741,00
338	Kelurahan Tanjung Priok - Jakut	53.128.130,00
339	Kelurahan Palmeriam - Jaktim	52.803.806,00
340	Gelanggang Remaja Jakarta Timur	52.604.348,00
341	Kelurahan Susukan - Jaktim	51.712.760,00
342	Kelurahan Kebon Sirih - Jakpus	51.368.020,00
343	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah - Jaktim	51.337.571,00
344	Sudin Perhubungan - JAKSEL	51.137.700,00
345	Kecamatan Kemayoran - Jakpus	51.092.560,00
346	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKSEL	51.082.409,00
347	Kelurahan Jatipadang - Jaksel	51.014.660,00
348	PSBL Harapan Sentosa 2	50.994.664,00
349	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	50.971.525,00
350	Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus	48.704.931,00
351	Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel	48.322.379,00
352	Kelurahan Pisangan Timur - Jaktim	48.114.858,00
353	Kelurahan Rawamangun - Jaktim	47.957.703,00
354	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah - Jakbar	47.700.384,00
355	Kelurahan Bambu Apus - Jaktim	47.239.280,00
356	Gelanggang Olahraga Rawamangun	47.167.291,00
357	Kelurahan Pisangan Baru - Jaktim	46.639.240,00
358	PSAA Putra Utama 1	46.546.555,00
359	Kelurahan Tanah Tinggi - Jakpus	46.325.136,00
360	Kelurahan Malaka Sari - Jaktim	46.046.300,00
361	Kelurahan Semper Barat - Jakut	46.012.702,00
362	Kelurahan Rambutan - Jaktim	45.896.400,00
363	Kecamatan Pancoran - Jaksel	45.504.913,00
364	Satpol PP - Jaktim	44.473.000,00

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
365	Kelurahan Kebagusan - Jaksel	43.626.000,00
366	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	43.597.950,00
367	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jaktim	43.124.853,00
368	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jaktim	43.088.870,00
369	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jakut	42.444.490,00
370	Kantor Lingkungan Hidup - Jakbar	42.029.350,00
371	PSBK Harapan Jaya	41.737.655,00
372	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jakbar	40.556.600,00
373	PSBKW Harapan Mulya	40.106.438,00
374	Kelurahan Bangka - Jaksel	39.855.750,00
375	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	39.724.685,00
376	Kecamatan Cilandak - Jaksel	39.657.050,00
377	Kelurahan Kampung Rawa - Jakpus	38.945.488,00
378	Sudin Perhubungan - JAKPUS	38.485.324,00
379	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jaktim	38.421.728,00
380	Unit Pengelola Rumah Potong Hewan	37.977.680,00
381	Kecamatan Matraman - Jaktim	37.489.221,00
382	Kelurahan Sukabumi Selatan - Jakbar	37.475.625,00
383	Kelurahan Ceger - Jaktim	36.478.750,00
384	Kelurahan Batu Ampar - Jaktim	36.304.528,00
385	Kelurahan Rawa Barat - Jaksel	35.721.730,00
386	Kelurahan Pasar Minggu - Jaksel	35.547.446,00
387	Kelurahan Selong - Jaksel	35.411.970,00
388	Kecamatan Cipayung - Jaktim	34.573.145,00
389	Kecamatan Tebet - Jaksel	34.312.630,00
390	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakpus	34.200.199,00
391	Kelurahan Kebayoran Lama Utara - Jaksel	33.882.420,00
392	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Kep. Seribu	33.367.380,00
393	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jakut	33.275.000,00
394	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan	33.124.575,00
395	Kelurahan Kebon Melati - Jakpus	33.074.250,00
396	Kelurahan Sungai Bambu - Jakut	32.921.310,00
397	Kelurahan Gunung - Jaksel	32.605.700,00
398	Kelurahan Rawa Terate - Jaktim	32.436.320,00
399	Kelurahan Melawai - Jaksel	31.886.580,00
400	Kelurahan Warakas - Jakut	31.795.115,00
401	Kelurahan Penggilingan - Jaktim	31.697.490,00
402	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jaksel	31.125.820,00
403	Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakpus	31.021.800,00
404	Kelurahan Cawang - Jaktim	30.937.060,00
405	Sudin Penataan Kota - JAKBAR	30.895.788,00
406	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jaksel	30.784.490,00
407	Kelurahan Cipayung - Jaktim	30.338.660,00
408	Kelurahan Gondangdia - Jakpus	30.265.000,00
409	Kelurahan Rorotan - Jakut	30.201.628,00
410	Kantor Perencanaan Pembangunan Kab. Adm - Kep. Seribu	29.986.000,00
411	UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender	29.270.925,00
412	Kelurahan Pondok Ranggon - Jaktim	29.247.460,00
413	Kelurahan Meruya Selatan - Jakbar	29.200.498,00
414	Kecamatan Duren Sawit - Jaktim	29.165.825,00
415	Kelurahan Ancol - Jakut	28.930.264,00
416	Kecamatan Cakung - Jaktim	28.821.842,00
417	Sudin Pendidikan II - JAKBAR	28.769.320,00
418	Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	28.583.858,00
419	Kelurahan Gunung Sahari Utara - Jakpus	28.536.850,00
420	Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin	28.403.000,00
421	Kelurahan Keagungan - Jakbar	28.359.595,00
422	Sudin Pendidikan II - JAKTIM	28.232.699,00
423	Kelurahan Jelambar - Jakbar	28.218.465,00
424	Kelurahan Pondok Kopi - Jaktim	28.080.580,00
425	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Kep. Seribu	27.575.020,00
426	Kelurahan Rawa Badak Utara - Jakut	27.190.873,00
427	Kecamatan Tambora - Jakbar	27.187.517,00
428	Kelurahan Sunter Jaya - Jakut	27.174.840,00
429	Kantor Perencanaan Pembangunan - Jakpus	26.946.000,00
430	Kecamatan Gambir - Jakpus	26.789.180,00
431	Kelurahan Jatinegara Kaum - Jaktim	26.649.150,00
432	Kelurahan Kuningan Barat - Jaksel	26.606.250,00
433	Kelurahan Cipinang Melayu - Jaktim	26.554.200,00
434	Gelanggang Remaja Jakarta Barat	26.090.755,00
435	Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	25.375.400,00
436	Kelurahan Papanggo - Jakut	25.369.410,00
437	Kelurahan Tugu Selatan - Jakut	25.345.122,00
438	Kelurahan Manggarai Selatan - Jaksel	25.342.075,00

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
439	Kelurahan Meruya Utara - Jakbar	25.208.590,00
440	Kecamatan Makasar - Jaktim	25.169.210,00
441	Kelurahan Pegangsaan Dua - Jakut	24.962.545,00
442	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jakpus	24.848.252,00
443	Kelurahan Kuningan Timur - Jaksel	24.727.780,00
444	Kelurahan Tambora - Jakbar	24.665.650,00
445	Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	24.467.190,00
446	Kelurahan Ciganjur - Jaksel	24.268.080,00
447	Kelurahan Pasar Manggis - Jaksel	24.231.900,00
448	Kelurahan Kapuk Muara - Jakut	24.187.026,00
449	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan - Jaksel	24.120.300,00
450	Kelurahan Kebon Bawang - Jakut	24.116.180,00
451	Kelurahan Bendungan Hilir - Jakpus	24.108.336,00
452	Kelurahan Manggarai - Jaksel	23.933.800,00
453	Kelurahan Semper Timur - Jakut	23.424.700,00
454	Gelanggang Olahraga Cendrawasih	23.406.000,00
455	Kelurahan Utan Kayu Selatan - Jaktim	22.994.160,00
456	Kelurahan Petamburan - Jakpus	22.709.170,00
457	Kelurahan Kebon Kacang - Jakpus	22.486.475,00
458	Kelurahan Kebon Baru - Jaksel	21.813.110,00
459	Kantor Kepegawaian - Jaktim	21.383.890,00
460	Satpol PP - Jaksel	21.289.355,00
461	Kelurahan Angke - Jakbar	21.255.850,00
462	PSPP Khusnul Khotimah	21.039.920,00
463	Kelurahan Kelapa Dua - Jakbar	20.645.000,00
464	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	20.246.600,00
465	Kelurahan Sukabumi Utara - Jakbar	20.199.400,00
466	Kelurahan Kembangan Selatan - Jakbar	20.032.900,00
467	Kelurahan Joglo - Jakbar	19.910.147,00
468	Kelurahan Pondok Bambu - Jaktim	19.851.633,00
469	Kelurahan Gelora - Jakpus	19.610.965,00
470	Pusat Pengembangan Manajemen Sekolah	19.352.650,00
471	Kelurahan Duren Tiga - Jaksel	19.284.058,00
472	Kelurahan Gedong - Jaktim	19.225.635,00
473	Kelurahan Marunda - Jakut	19.019.248,00
474	Kelurahan Karet Tengsin - Jakpus	18.667.000,00
475	Kelurahan Pondok Pinang - Jaksel	18.595.306,00
476	Kelurahan Jatinegara - Jaktim	18.219.066,00
477	Kantor Lingkungan Hidup - Kab Adm Kep. Seribu	17.763.500,00
478	Kecamatan Tanah Abang - Jakpus	17.668.000,00
479	Kelurahan Bungur - Jakpus	17.471.025,00
480	Kelurahan Paseban - Jakpus	17.386.771,00
481	Satpol PP - Jakbar	17.324.791,00
482	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan	17.184.200,00
483	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	16.995.990,00
484	Kelurahan Kelapa Gading Barat - Jakut	16.810.600,00
485	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jakbar	16.607.500,00
486	Kelurahan Karet Kuningan - Jaksel	16.445.500,00
487	Kantor Kepegawaian - Jakbar	16.414.200,00
488	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jaksel	16.336.320,00
489	Kelurahan Kemanggis - Jakbar	16.301.582,00
490	Kelurahan Sunter Agung - Jakut	16.160.736,00
491	Kecamatan Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu	16.157.972,00
492	Kelurahan Johar Baru - Jakpus	16.120.786,00
493	Kelurahan Rawa Buaya - Jakbar	16.104.000,00
494	Kelurahan Ciracas - Jaktim	16.015.340,00
495	Kelurahan Pondok Labu - Jaksel	16.012.260,00
496	Kecamatan Setiabudi - Jaksel	15.870.000,00
497	Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu	15.817.200,00
498	Kelurahan Kota Bambu Selatan - Jakbar	15.806.780,00
499	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jakpus	15.758.543,00
500	Gelanggang Olahraga Ragunan	15.651.695,00
501	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat	15.631.900,00
502	Kecamatan Senen - Jakpus	15.458.893,00
503	Kelurahan Malaka Jaya - Jaktim	15.194.969,00
504	Kelurahan Karet Semanggi - Jaksel	15.154.825,00
505	Kelurahan Kramat - Jakpus	14.813.700,00
506	Kelurahan Krukut - Jakbar	14.667.400,00
507	Kelurahan Senayan - Jaksel	14.659.590,00
508	Kelurahan Kampung Bali - Jakpus	14.515.554,00
509	Kelurahan Kwitang - Jakpus	14.461.700,00
510	Kelurahan Ulujami - Jaksel	14.313.300,00
511	Kelurahan Pinangsia - Jakbar	14.308.800,00
512	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur	13.806.100,00

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
513	Kelurahan Lenteng Agung - Jaksel	13.327.490,00
514	Kantor Kepegawaian - Jakut	13.244.550,00
515	Kelurahan Cempaka Putih Barat - Jakpus	13.192.740,00
516	Kelurahan P. Panggang - Kep. Seribu	13.125.360,00
517	Kelurahan Duri Utara - Jakbar	13.060.300,00
518	Kelurahan Guntur - Jaksel	12.957.780,00
519	Kelurahan Wijaya Kesuma - Jakbar	12.915.560,00
520	Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar	12.894.250,00
521	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKPUS	12.829.388,00
522	Kelurahan Taman Sari - Jakbar	12.764.800,00
523	Kelurahan Kali Anyar - Jakbar	12.304.459,00
524	Kelurahan Pegangsaan - Jakpus	12.254.272,00
525	Kecamatan Kembangan - Jakbar	12.010.240,00
526	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	11.728.600,00
527	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jakut	11.703.450,00
528	Kelurahan Sukapura - Jakut	11.673.250,00
529	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	11.590.128,00
530	Kelurahan Srengseng - Jakbar	11.530.750,00
531	Kelurahan Setu - Jaktim	11.521.180,00
532	Kantor Lingkungan Hidup - Jakut	11.505.724,00
533	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah - Jakpus	11.500.204,00
534	Kelurahan Tengah - Jaktim	11.477.650,00
535	Kelurahan Bale Kambang - Jaktim	11.425.590,00
536	Kelurahan Pademangan Barat - Jakut	11.377.200,00
537	Kelurahan Glodok - Jakbar	11.318.780,00
538	Kelurahan Pejagalan - Jakut	11.249.480,00
539	Kelurahan Grogol - Jakbar	10.892.310,00
540	Kelurahan Cengkareng Barat - Jakbar	10.874.000,00
541	Sudin Tata Air - JAKTIM	10.697.280,00
542	Kelurahan Ragunan - Jaksel	10.512.700,00
543	Kelurahan Makasar - Jaktim	10.484.917,00
544	PSBG Belaian Kasih	10.458.776,00
545	Kelurahan Kamal - Jakbar	10.330.860,00
546	Kecamatan Penjaringan - Jakut	10.295.500,00
547	Kelurahan Pekayon - Jaktim	10.211.366,00
548	Kelurahan Pejaten Barat - Jaksel	10.201.280,00
549	Kelurahan Utan Kayu Utara - Jaktim	10.086.362,00
550	Kelurahan Karet - Jaksel	10.037.990,00
551	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jakut	9.860.560,00
552	Kelurahan Kali Baru - Jakut	9.790.418,00
553	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	9.720.700,00
554	Kelurahan Duri Kosambi - Jakbar	9.604.155,00
555	Kantor Kepegawaian - Kep. Seribu	9.479.586,00
556	Kelurahan Kenari - Jakpus	9.454.000,00
557	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III	9.410.000,00
558	Sudin Sosial - Jakut	9.378.500,00
559	Sudin Sosial - Jakbar	9.363.200,00
560	Kelurahan Serdang - Jakpus	9.305.848,00
561	Kelurahan Kedoya Selatan - Jakbar	9.305.340,00
562	Kelurahan Slipi - Jakbar	9.269.386,00
563	Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	9.144.245,00
564	Kelurahan Cempaka Putih Timur - Jakpus	9.144.060,00
565	Kelurahan Lebak Bulus - Jaksel	8.964.142,00
566	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jakbar	8.896.800,00
567	Kelurahan Pela Mampang - Jaksel	8.851.590,00
568	Kelurahan Kartini - Jakpus	8.822.220,00
569	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jaktim	8.758.590,00
570	Kelurahan Tanjung Barat - Jaksel	8.425.000,00
571	Kelurahan Pesanggrahan - Jaksel	8.358.680,00
572	Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan	8.258.345,00
573	Kelurahan Kapuk - Jakbar	8.220.715,00
574	Kelurahan Cipinang Besar Utara - Jaktim	8.185.870,00
575	Kelurahan Gandaria Selatan - Jaksel	8.155.290,00
576	Kantor Kepegawaian - Jaksel	8.118.440,00
577	Kelurahan Tebet Barat - Jaksel	7.889.027,00
578	Kelurahan Munjul - Jaktim	7.825.609,00
579	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jakbar	7.721.363,00
580	Kelurahan Setia Budi - Jaksel	7.715.300,00
581	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I	7.606.500,00
582	Kelurahan Cikini - Jakpus	7.526.750,00
583	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Kep. Seribu	7.385.321,00
584	Kelurahan Tegal Alur - Jakbar	7.179.500,00
585	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal	7.134.568,00
586	Kelurahan Bukit Duri - Jaksel	7.117.000,00

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
587	Kelurahan Tanjung Duren Utara - Jakbar	6.981.100,00
588	Kecamatan Kalideres - Jakbar	6.960.010,00
589	Kelurahan Pengadegan - Jaksel	6.951.758,00
590	Kelurahan Cijantung - Jaktim	6.810.210,00
591	Kelurahan Duri Selatan - Jakbar	6.779.190,00
592	Kelurahan Petogogan - Jaksel	6.699.610,00
593	Satpol PP - Kab. Adm Kep. Seribu	6.683.996,00
594	Kelurahan Pulo - Jaksel	6.588.500,00
595	Kelurahan Duren Sawit - Jaktim	6.547.360,00
596	Kelurahan Cengkareng Timur - Jakbar	6.411.500,00
597	Kecamatan Sawah Besar - Jarkus	6.303.858,00
598	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Kep. Seribu	6.272.500,00
599	Kelurahan Krendang - Jakbar	6.232.600,00
600	Kelurahan Menteng - Jarkus	6.230.800,00
601	Kelurahan Jembatan Lima - Jakbar	6.176.610,00
602	Kelurahan Tebet Timur - Jaksel	6.055.910,00
603	Kelurahan Pasar Baru - Jarkus	5.992.965,00
604	Kelurahan Harapan Mulia - Jarkus	5.916.900,00
605	Kelurahan Cipete Selatan - Jaksel	5.893.800,00
606	Kelurahan Kelapa Dua Wetan - Jaktim	5.885.440,00
607	Kelurahan Kebon Kelapa - Jarkus	5.772.360,00
608	Kelurahan Gunung Sahari Selatan - Jarkus	5.719.450,00
609	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jaksel	5.634.744,00
610	Kelurahan Baru - Jaktim	5.589.650,00
611	Kelurahan Mampang Prapatan - Jaksel	5.584.931,00
612	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jakbar	5.461.080,00
613	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKPUS	5.454.000,00
614	PSAA Putra Utama 4	5.357.836,00
615	Kelurahan Cipinang - Jaktim	5.313.891,00
616	Kecamatan Menteng - Jarkus	5.031.000,00
617	Kelurahan Duri Pulo - Jarkus	4.883.563,00
618	Kelurahan Menteng Dalam - Jaksel	4.764.761,00
619	Kelurahan Lubang Buaya - Jaktim	4.700.280,00
620	Kelurahan Tomang - Jakbar	4.672.800,00
621	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	4.650.700,00
622	Sudin Pendidikan I - JAKTIM	4.428.600,00
623	Kelurahan Halim Perdana Kusuma - Jaktim	4.292.281,00
624	Kelurahan Kemayoran - Jarkus	4.289.450,00
625	Kelurahan Cilangkap - Jaktim	4.219.500,00
626	Sudin Pendidikan II - JAKUT	4.132.150,00
627	Kantor Kepegawaian - Jarkus	4.070.000,00
628	Kelurahan Pekojan - Jakbar	4.059.000,00
629	Kelurahan Kalideres - Jakbar	4.003.589,00
630	PSBL Harapan Sentosa 1	3.916.938,00
631	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jaksel	3.865.650,00
632	Kelurahan Petojo Selatan - Jarkus	3.684.800,00
633	Kelurahan Senen - Jarkus	3.671.060,00
634	Sudin Sosial - Jaksel	3.668.830,00
635	Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu	3.654.800,00
636	Kelurahan Mangga Besar - Jakbar	3.639.000,00
637	Kelurahan Cideng - Jarkus	3.596.220,00
638	Kelurahan Pancoran - Jaksel	3.475.626,00
639	Kelurahan Pegadungan - Jakbar	3.424.300,00
640	Kelurahan Koja - Jakut	3.322.550,00
641	Kelurahan Petukangan Selatan - Jaksel	3.319.500,00
642	Kelurahan Cibubur - Jaktim	3.263.150,00
643	Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	3.255.494,00
644	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jakbar	3.175.966,00
645	Sudin Pendidikan I - JAKSEL	3.149.960,00
646	Kelurahan Bidara Cina - Jaktim	3.105.025,00
647	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jarkus	3.060.640,00
648	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jaksel	2.672.500,00
649	Kelurahan Mangga Dua Selatan - Jarkus	2.549.305,00
650	Kelurahan Sumur Batu - Jarkus	2.329.950,00
651	Kelurahan Semanan - Jakbar	2.282.896,00
652	Kelurahan Kayu Putih - Jaktim	2.250.875,00
653	Kelurahan Tidung - Kep. Seribu	2.153.494,00
654	Kantor Perencanaan Pembangunan - Jakbar	2.143.075,00
655	Kelurahan Bintaro - Jaksel	2.048.750,00
656	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jakut	2.009.700,00
657	Kelurahan Cipedak - Jaksel	2.009.200,00
658	Pusat Budidaya dan Konservasi Laut	1.974.720,00
659	Pusat Data dan Informasi	1.954.992,00
660	Kelurahan Kayu Manis - Jaktim	1.914.550,00

No.	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
661	Kelurahan Pejaten Timur - Jaksel	1.907.000,00
662	Kecamatan Taman Sari - Jakbar	1.874.400,00
663	Kelurahan Srengseng Sawah - Jaksel	1.863.070,00
664	Sudin Pendidikan I - JAKPUS	1.847.250,00
665	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jakpus	1.706.200,00
666	Kelurahan P. Harapan - Kep. Seribu	1.656.956,00
667	Kelurahan Kebon Kosong - Jakpus	1.619.800,00
668	Kelurahan P. Kelapa - Kep. Seribu	1.450.550,00
669	Kelurahan Cempaka Baru - Jakpus	1.449.755,00
670	Kelurahan Galur - Jakpus	1.375.220,00
671	Kelurahan Rawasari - Jakpus	1.206.000,00
672	Satpol PP - Jakpus	1.177.000,00
673	Kelurahan Petukangan Utara - Jaksel	1.140.450,00
674	Sudin Penataan Kota - Kep. Seribu	1.118.370,00
675	Kelurahan Jagakarsa - Jaksel	1.069.500,00
676	Sudin Tata Air - Kep. Seribu	992.200,00
677	Kelurahan Petojo Utara - Jakpus	836.880,00
678	Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Adm - Kep. Seribu	789.500,00
679	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKBAR	385.000,00
680	Kelurahan Jati - Jaktim	193.000,00
681	Kelurahan Tangki - Jakbar	116.850,00
682	PPKD	-
683	DPRD Propinsi	-
684	DINAS TATA AIR	-
685	Sudin Tata Air - JAKBAR	-
686	Sudin Perhubungan - Kep. Seribu	-
687	Rumah Sakit Umum Kec. Cilincing	-
688	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKUT dan Kep.Seribu	-
689	Pusat Perencanaan, Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional	-
690	Sudin Pendidikan II - JAKPUS	-
691	Sudin Pendidikan II - JAKSEL	-
692	Sudin Pendidikan - Kep. Seribu	-
693	Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jaktim	-
694	Sudin Sosial - Jaktim	-
695	Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	-
696	Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Pusat Promosi UMKM	-
697	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Kep.Seribu	-
698	Kantor Perencanaan Pembangunan - Jakut	-
699	Kantor Perencanaan Pembangunan - Jaktim	-
700	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat	-
701	Kelurahan Penjaringan - Jakut	-
702	Kelurahan Kedaung Kali Angke - Jakbar	-
703	Kelurahan Jelambar Baru - Jakbar	-
704	Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakbar	-
705	Kelurahan Jembatan Besi - Jakbar	-
706	Kelurahan Roa Malaka - Jakbar	-
707	Kelurahan Pinang Ranti - Jaktim	-
708	Kelurahan P. Untung Jawa - Kep. Seribu	-
	JUMLAH PERSEDIAAN	750.543.243.114,00

**IKHTISAR PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH (PMP)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2015**

(28.018.793)

70.404.897.272

No.	Perusahaan Daerah	Lapkeu Tahun	Tahun Penyertaan	Dasar Hukum	Bentuk Penyertaan	Modal	Tambahan Modal Disetor	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% PMP Prov DKI Jakarta	Nilai PMP per 31 Desember 2014			
												Cost Method	Equity Method	Tambahan Modal Disetor (dari APBD TA 2014 dan Konversi cadangan/laba ditahan menjadi modal/saham)	Jumlah (Audited)
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (11 x 12)	15	16
1	PD AM Jaya	Unaudited 2015	1992	Perda No. 13/1992	Lainnya	323.364.100.112	-	(19.763.747.232)	(1.525.801.266.447)	(1.222.200.913.567)	100,00%	-	-		-
2	PD Dharma Jaya	Unaudited 2015	1985	Perda No.20/2010	Lainnya	95.048.793.423	-	18.373.233.473	(42.989.110.830)	70.432.916.065	100,00%	-	24.432.916.065	46.000.000.000	70.432.916.065
3	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	Audited 2015	1982	Perda No. 6/1990	Lainnya	939.002.770.836	-	-	107.055.289.565	1.046.058.060.401	100,00%	-	1.046.058.060.401		1.046.058.060.401
4	PD Pasar Jaya	Audited 2015	1982	Perda No. 2/2009	Lainnya	497.175.929.310	6.383.572.267	(70.055.087.787)	76.095.375.066	509.599.788.856	100,00%	-	509.599.788.856		509.599.788.856
5	PD PAL Jaya	Unaudited 2015	1991	Perda No. 14/1997	Lainnya	447.752.401.828	-	-	68.423.036.743	516.175.438.571	100,00%	-	446.175.438.571	70.000.000.000	516.175.438.571
Jumlah Penyertaan Modal Pada BUMD						2.302.343.995.509	6.383.572.267	(71.445.601.546)	(1.317.216.675.903)	920.065.290.326		-	2.026.266.203.893	116.000.000.000	2.142.266.203.893
6	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2015	1961	Akta No.256-265/2005	Saham	3.117.000.000	117.594.956.000	373.996.198.000	4.510.603.270.000	5.005.311.424.000	38,80%	-	1.942.067.255.754	-	1.942.067.255.754
7	PT Food Station Tjipinang	Audited 2015	1972	RUPS 26-08-1991	Saham	300.000.000	47.500.000.000	-	18.139.048.183	65.939.048.183	74,67%	-	49.234.489.310		49.234.489.310
8	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2015	1973	Akta No.77/19-02-2009	Saham	200.000.000.000	-	(308.642.159)	123.908.125.287	323.599.483.128	50,00%	-	161.799.741.564	-	161.799.741.564
9	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2015	1970	Laporan Keuangan th. 2005	Saham	16.013.181.000	19.015.656.000	-	811.526.592.000	846.555.429.000	26,25%	-	222.250.087.306	-	222.250.087.306
10	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2015	1991	Akta No. 13/1-04-2004	Saham	400.000.000.000	36.709.233.000	-	1.245.298.462.077	1.682.007.695.077	72,00%	-	1.211.045.540.918	-	1.211.045.540.918
11	PT Ratax Armada	Unaudited 2014	1971	Akta No. 23/11-05-99	Saham	5.500.000.000	-	-	(7.554.594.253)	(2.054.594.253)	28,00%	-	-	-	-
12	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2015	2002	Akta No. 13/05-06-03	Saham	363.945.000.000	111.967.695.000	(13.540.307.041)	665.444.651.830	1.127.817.039.789	26,85%	209.692.695.000	-	-	209.692.695.000
13	PT Cemani Toka	Audited 2015	1971	Akta No. 5/7-07-99	Saham	112.968.859.000	-	(9.581.410.140)	(13.556.748.802)	89.830.700.058	27,42%	27.059.360.000	-	-	27.059.360.000
14	PT Pakuan International	Audited 2010	1971	-	Saham	50.000.000.000	236.600.000	2.039.534.252	(13.416.224.197)	38.859.910.055	1,94%	1.345.900.000	-	-	1.345.900.000
15	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2012	1992	Akta No. 172/20-07-1992	Saham	48.870.000.000	592.242.795.672	-	(492.478.235.868)	148.634.559.804	8,08%	3.951.000.000	-	-	3.951.000.000
16	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2015	1989	Akta No. 1192/25-7-05	Saham	199.040.000.000	-	(1.141.985.664)	378.642.189.719	576.540.204.055	4,45%	8.680.000.000	-	-	8.680.000.000
17	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	Unaudited 2015	1997	Akta No. 293/30-06-05	Saham	2.246.730.231.000	1.500.000.000.000	-	576.604.277.464	4.323.334.508.464	99,98%	-	2.822.661.011.016	1.500.000.000.000	4.322.661.011.016
18	PT Bank DKI Jakarta	Audited 2015	1999	Akta No. 12/14-01-10	Saham	3.931.159.000.000	1.000.000	547.291.000.000	1.407.380.000.000	5.885.831.000.000	99,97%	-	4.884.333.774.627	1.000.000.000.000	5.884.333.774.627
19	PT Jakarta International Expo	Audited 2007	2004	Akta Hibah No. 67/22-07-2004	Saham	300.000.000.000	-	-	(9.652.573.230)	290.347.426.770	13,14%	39.375.000.000	-	-	39.375.000.000
20	PT Jakarta Tourisindo	Audited 2015	2004	Akta No. 6/17-09-04	Saham	462.011.000.000	-	-	25.454.722.694	487.465.722.694	99,35%	-	484.300.436.222	-	484.300.436.222
21	PT RS Haji Jakarta ⁽⁴⁾	Unaudited 2015	2004	Perda No. 12/2004	Saham	100.308.278.000	-	-	(46.960.021.385)	53.348.256.615	51,00%	51.157.222.000	-	-	51.157.222.000
22	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Audited 2015	2008	Perda No. 4 Tahun 2008	Saham	1.943.785.000.000	2.015.224.949.914	1.125.764.810	(199.874.822.947)	3.760.260.891.777	99,97%		1.744.199.814.722	2.015.093.824.789	3.759.293.639.511
23	PT Transportasi Jakarta	Audited 2015	2014	Perda No. 4 Tahun 2014	Saham	360.000.000.000	1.050.000.000.000	75.012.142	81.464.792.926	1.491.539.805.068	99,36%		781.923.171.895	700.000.000.000	1.481.923.171.895
24	PT Penjamin Kredit Daerah	Audited 2015	2013	Perda No.13 Tahun 2013	Saham	100.000.000.000	-	-	833.271.149	100.833.271.149	95,00%		55.791.607.592	40.000.000.000	95.791.607.592
Jumlah Penyertaan Modal Pada PT Patungan						10.843.747.549.000	5.490.492.885.586	899.955.164.200	9.061.806.182.647	26.296.001.781.433		341.261.177.000	14.359.606.930.926	5.255.093.824.789	19.955.961.932.715
	JUMLAH					13.146.091.544.509	5.496.876.457.853	828.509.562.654	7.744.589.506.744	27.216.067.071.759		341.261.177.000	16.385.873.134.819	5.371.093.824.789	22.098.228.136.608

**DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Saldo per 31 Desember 2014	273.519.641.092.661	17.190.097.083.385	17.384.759.492.812	29.731.234.210.492	1.361.719.093.920	2.795.093.551.102	341.982.544.524.372
Mutasi Penambahan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Tahun Anggaran 2015	3.451.775.763.772	2.002.190.574.946	2.063.978.323.661	2.685.243.694.385	40.828.352.444	-	10.244.016.709.208
Kapitalisasi Belanja Non Modal	547.404.410	14.541.796.348	72.824.106.078	712.623.336.887	24.200.000	4.400.000	800.565.243.723
Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	-	2.536.832.318	-	-	7.388.060.091	-	9.924.892.409
Kurang Catat Transfer Antar SKPD Sebelum Tahun 2015	-	9.531.291.397	5.475.083.526	-	15.950.000	-	15.022.324.923
Transfer Antar SKPD	20.459.311.249.060	1.069.938.887.025	2.283.999.184.257	130.148.139.527	64.472.566.545	-	24.007.870.026.414
Koreksi Kurang Catat Nilai	6.263.516.930	1.680.943.814	27.439.627.006	540.009	2	4.067.694.351	39.452.322.112
Koreksi Kurang Catat Barang	781.094.738.000	10.966.720.507	47.380.934.000	-	4.732.635.804	-	844.175.028.311
Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	141.784.000	-	1.585.458.577.000	115.358.211.735	-	-	1.700.958.572.735
Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	-	30.499.413.365	3.778.406.457	1.241.897.568	255.710.000	-	35.775.427.390
Hutang Pihak Ke-3	47.404.500	-	20.154.124.259	178.190.064	322.255.118	37.686.000	20.739.659.941
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	-	8.329.912.038	15.435.213.600	1.796.663.235	36.850.416.235	-	62.412.205.108
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	-	865.998.500	-	-	82.266.392	-	948.264.892
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	6.510.087.216.290	14.311.190.179	3.622.000.519.700	122.490.000	184.780.060	-	10.146.706.196.229
Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap	-	60.687.000	-	-	-	-	60.687.000
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Belum Validasi	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Dari Belanja Modal 2015 Ke KDP	-	-	-	-	-	1.495.299.347.210	1.495.299.347.210
Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	3.900.126.000	1.412.380.557	7.672.077.500	-	-	-	12.984.584.057
Hasil Tukar Guling	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi Penambahan Lain-lain	-	-	62.184.745.014	60.524.301.671	167	96.108.579.768	218.817.626.620
Total Penambahan Aset Tetap	31.213.169.202.962	3.166.866.627.994	9.817.780.922.058	3.707.237.465.081	155.157.192.858	1.595.517.707.329	49.655.729.118.282
Mutasi Pengurangan							
Penghapusan Tahun 2015	-	10.067.760.958	83.877.353.371	20.627.750	-	-	93.965.742.079
Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Belanja Modal Tahun 2015	-	17.748.024.921	4.827.270.106	24.860.000	1.414.643.215	-	24.014.798.242
Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD (Selain Dari Belanja Modal Tahun 2015)	-	11.262.429.868	-	-	197.547.084	-	11.459.976.952
Kurang Catat Transfer Antar SKPD Sebelum Tahun 2015	-	9.943.170.306	-	-	-	-	9.943.170.306
Transfer Antar SKPD	20.448.072.944.060	1.096.038.332.955	2.286.525.862.015	130.133.478.727	62.664.309.785	-	24.023.434.927.542
Aset Belum Validasi	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2015 KE KDP	-	-	584.423.380.300	910.875.966.910	-	-	1.495.299.347.210

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2015 Ke Persediaan	-	3.821.045.433	268.297.700	795.678.400	138.542.701	-	5.023.564.234
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2015 Ke Ekstrakomtabel	-	30.250.458.644	7.417.775.211	1.274.012.744	5.331.386.085	-	44.273.632.684
Reklasifikasi Aset Tetap Ke Persediaan (Selain Belanja Modal Tahun 2015)	-	11.281.471.393	-	11.058.630	3.490.204.210	98.585.280	14.881.319.513
Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal Tahun 2015)	-	2.353.958.061	-	46.757.326	414.885.118	-	2.815.600.505
Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	-	-	-	-	-	1.700.958.572.735	1.700.958.572.735
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	-	116.757.298.319	1.918.985.629	333.635.520	145.064.160	-	119.154.983.628
Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	-	20.796.039.989	5.300.000	-	2.094.396.480	-	22.895.736.469
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	991.097.075	1.697.138.531	39.396.851.331	5.265.026.847	15.062.091.324	-	62.412.205.108
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Belum Validasi	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Yang Ditukar Guling/Ruislag	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi Kurang Volume Pekerjaan, Temuan, Denda dll atas Belanja Modal 2015	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi Atas Belanja Modal TA 2014 (Temuan, Denda, dll)	-	620.640.043	2.896.814.927	3.904.622.105	-	8.318.353	7.430.395.428
Koreksi Lebih Catat Nilai	-	646.141.194	2.128.002.522	-	307.163.306	23.451.755.000	26.533.062.022
Koreksi Lebih Catat Barang	209.301.700.000	10.165.902.977	11.978.493.233	14.660.800	2.903.462.713	35.768.803.597	270.133.023.320
Koreksi Pengurangan Lain-Lain	5.755.242.000	26.700.002.936	7.083.459.935	78.889.271.966	1.944.800	746.406.884	119.176.328.521
Total Pengurangan	20.664.120.983.135	1.370.149.816.528	3.032.747.846.280	1.131.589.657.725	94.165.640.981	1.761.032.441.849	28.053.806.386.498
Saldo	284.068.689.312.488	18.986.813.894.851	24.169.792.568.590	32.306.882.017.848	1.422.710.645.797	2.629.578.816.582	363.584.467.256.156
Akumulasi Penyusutan s.d 2014	-	6.274.814.731.261	8.321.903.868.751	8.359.659.606.069	568.700	-	22.956.378.774.781
Beban Penyusutan 2015	-	1.583.344.072.396	865.344.818.989	1.466.043.103.766	-	-	3.914.731.995.151
Saldo Akumulasi Penyusutan s.d 2015	-	7.858.158.803.657	9.187.248.687.740	9.825.702.709.835	568.700	-	26.871.110.769.932

**DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2015**

NO	SKPD	KDP Per 31 Desember Th 2014	Penambahan KDP Tahun 2015	Pengurangan KDP Tahun 2015	Jumlah Akumulasi KDP Tahun 2015	Prosentase Prestasi Fisik Pekerjaan	Jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA 2016	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA (GABUNGAN)	362.488.224.936	431.323.987.005	219.342.264.011	574.469.947.930			
	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA	362.488.224.936	431.323.987.005	219.342.264.011	574.469.947.930			
2	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN (GABUNGAN)	8.245.634.233	11.338.900	-	8.256.973.133			
	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	8.020.994.618	11.338.900	-	8.032.333.518			
	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakut	224.639.615	-	-	224.639.615			
3	DINAS BINA MARGA (GABUNGAN)	241.904.120.790	1.005.536.715.249	115.358.211.735	1.132.082.624.304			
	DINAS BINA MARGA	231.004.794.871	1.005.487.259.249	114.581.239.735	1.121.910.814.385			
	Sudin Bina Marga Jakpus	580.005.000	-	-	580.005.000			
	Sudin Bina Marga Jakbar	1.752.797.250	49.456.000	776.972.000	1.025.281.250			
	Sudin Bina Marga Jaksel	8.566.523.669	-	-	8.566.523.669			
4	DINAS TATA AIR (GABUNGAN)	198.566.724.527	-	-	198.566.724.527			
	DINAS TATA AIR	197.503.449.344	-	-	197.503.449.344			
	Sudin Tata Air - Jakpus	456.716.183	-	-	456.716.183			
	Sudin Tata Air - Jakbar	4.350.000	-	-	4.350.000			
	Sudin Tata Air - Jaktim	330.000.000	-	-	330.000.000			
	Sudin Tata Air - Kep. Seribu	272.209.000	-	-	272.209.000			
5	DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI (GABUNGAN)	120.137.495.410	11.952.300.020	253.839.000	131.835.956.430			
	DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI	80.178.405.125	-	-	80.178.405.125			
	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	15.781.293.530	11.952.300.020	-	27.733.593.550			
	Unit Pengelola Perparkiran	253.839.000	-	253.839.000	-			
	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan	23.846.125.315	-	-	23.846.125.315			
	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	77.832.440	-	-	77.832.440			
6	DINAS KESEHATAN (GABUNGAN)	194.348.667.774	2.500.770.579	194.310.473.725	2.538.964.628			
	DINAS KESEHATAN	144.086.771.590	2.500.770.579	146.587.542.169	-			
	Sudin Kesehatan - Jakpus	8.407.716.750	-	7.511.745.375	895.971.375			
	Sudin Kesehatan - Jakut	11.131.507.920	-	11.131.507.920	-			
	Sudin Kesehatan - Jakbar	10.474.555.250	-	10.360.527.750	114.027.500			
	Sudin Kesehatan - Jaksel	1.359.378.190	-	451.490.725	907.887.465			
	Sudin Kesehatan - Jaktim	18.760.933.074	-	18.267.659.786	493.273.288			
	Sudin Kesehatan - Kep. Seribu	127.805.000	-	-	127.805.000			
7	BLUD RS Koja	159.690.605.600	-	159.690.605.600	-			
8	BLUD RS Tarakan	-	11.292.919.226	-	11.292.919.226			
9	BLUD RS Pasar Rebo	639.021.873	-	-	639.021.873			
10	BLUD RS Budhi Asih	141.520.006.175	-	141.520.006.175	-			
11	BLUD RS Duren Sawit	477.732.800	10	-	477.732.810			

NO	SKPD	KDP Per 31 Desember Th 2014	Penambahan KDP Tahun 2015	Pengurangan KDP Tahun 2015	Jumlah Akumulasi KDP Tahun 2015	Prosentase Prestasi Fisik Pekerjaan	Jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA 2016	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	DINAS PENDIDIKAN (GABUNGAN)	589.621.197.490	53.599.239.723	364.793.991.845	278.426.445.368			
	DINAS PENDIDIKAN	589.621.197.490	53.599.239.723	364.793.991.845	278.426.445.368			
13	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA (GABUNGAN)	208.235.691.423	21.126.392.000	202.466.869.483	26.895.213.940			
	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	207.868.195.873	21.126.392.000	202.466.869.483	26.527.718.390			
	Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Sunter	49.758.500	-	-	49.758.500			
	Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakbar	317.737.050	-	-	317.737.050			
14	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB (GABUNGAN)	2.442.238.175	-	2.442.238.175	-			
	Kantor Keluarga Berencana - Jaksel	2.442.238.175	-	2.442.238.175	-			
15	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (GABUNGAN)	444.950.327	-	32.659.000	412.291.327			
	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	368.511.327	-	-	368.511.327			
	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pak-Tim	76.439.000	-	32.659.000	43.780.000			
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	262.922.000	-	-	262.922.000			
	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	262.922.000	-	-	262.922.000			
17	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (GABUNGAN)	16.868.490.525	-	15.544.963.626	1.323.526.899			
	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.059.974.811	-	160.282.037	899.692.774			
	UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	492.567.884	-	492.567.884	-			
	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	265.559.500	-	-	265.559.500			
	Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan	1.127.434.465	-	1.026.071.090	101.363.375			
	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	13.857.392.615	-	13.857.392.615	-			
	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jaksel	8.650.000	-	8.650.000	-			
	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jaktim	56.911.250	-	-	56.911.250			
18	DINAS PELAYANAN PAJAK (GABUNGAN)	1.575.080.000	14.520.470.102	-	16.095.550.102			
	DINAS PELAYANAN PAJAK	1.575.080.000	14.520.470.102	-	16.095.550.102			
19	DINAS KEBERSIHAN (GABUNGAN)	1.705.461.800	-	1.705.461.800	-			
	Sudin Kebersihan - Jaktim	1.705.461.800	-	1.705.461.800	-			
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (GABUNGAN)	162.829.972.684	-	131.109.278.366	31.720.694.318			
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	156.732.484.996	-	131.045.058.366	25.687.426.630			
	Unit Pengelola Anjungan dan Informasi	5.931.037.688	-	-	5.931.037.688			
	Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki		-	-	-			
	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jaktim	64.220.000	-	64.220.000	-			
	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Kep. Seribu	102.230.000	-	-	102.230.000			
21	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	32.854.600	1.447.831.429	-	1.480.686.029			
22	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH (GABUNGAN)	39.684.040.500	2.852.152.550	-	42.536.193.050			
	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	39.595.298.000	2.852.152.550	-	42.447.450.550			
	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel	88.742.500	-	-	88.742.500			
23	Kota Administrasi Jakarta Pusat (GABUNGAN)	136.818.347.865	1.535.102.860	138.353.450.725	-			
	Kota Administrasi Jakarta Pusat	136.818.347.865	1.535.102.860	138.353.450.725	-			
24	Kota Administrasi Jakarta Utara (GABUNGAN)	6.461.699.697	12.033.287.174	-	18.494.986.871			
	Kota Administrasi Jakarta Utara	6.461.699.697	12.033.287.174	-	18.494.986.871			
25	Kota Administrasi Jakarta Barat (GABUNGAN)	59.220.558.597	-	59.220.558.597	-			
	Kota Administrasi Jakarta Barat	59.220.558.597	-	59.220.558.597	-			

NO	SKPD	KDP Per 31 Desember Th 2014	Penambahan KDP Tahun 2015	Pengurangan KDP Tahun 2015	Jumlah Akumulasi KDP Tahun 2015	Prosentase Prestasi Fisik Pekerjaan	Jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA 2016	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Kota Administrasi Jakarta Selatan (GABUNGAN)	10.434.580.484	25.785.200.502	9.571.205.486	26.648.575.500			
	Kota Administrasi Jakarta Selatan	10.434.580.484	25.785.200.502	9.571.205.486	26.648.575.500			
27	Kota Administrasi Jakarta Timur (GABUNGAN)	45.902.041.417	-	5.316.364.500	40.585.676.917			
	Kota Administrasi Jakarta Timur	45.902.041.417	-	5.316.364.500	40.585.676.917			
28	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu (GABUNGAN)	84.535.189.400	-	-	84.535.189.400			
	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	84.535.189.400	-	-	84.535.189.400			
	Jumlah	2.795.093.551.102	1.595.517.707.329	1.761.032.441.849	2.629.578.816.582			

**DAFTAR ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA BOT, BTO, DAN KSO
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2015**

No	Nama Pihak Ketiga	Lokasi	Jenis Aset	Nilai Aset	Nilai Bangunan	Nilai Aset Kerjasama BTO	Nilai Aset Kerjasama BOT	Nilai Aset Kerjasama KSO	Keterangan
1	2	3	4	6	5	7	8	9	9
I	BPMP								
1	PT. Bakrie Investindo	Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan	Tanah	2.155.516.125.000,00	41.990.830.572,00	-	2.197.506.955.572,00	-	-
2	PT. Metropolitan Kencana	JPO & JPO Multiguna PIM I dan PIM 2	Jembatan	-	32.924.000.000,00	-	-	-	-
3	PT. Langgeng Ayom Lestari	Pengelolaan Lingkungan Terminal Blok M	Tanah Terminal	537.964.575.000,00	47.701.292.300,00	585.665.867.300,00	-	-	Bangunan belum diserahkan
4	PT. Gerak Maju Abadi	Pengelolaan Gd. Pertokoan Jl. Blustro	Gedung	18.243.975.000,00	-	-	18.243.975.000,00	-	-
5	PT. Duta Pertiwi	JPU Gd JICT dengan Gd. Dusit Mangga dua JP	Jembatan	-	-	-	-	-	-
6	PT. Duta Pertiwi	JPU Harco Madu & Gedung Mangga dua Jl. Aquarium Jakarta Pusat	Jembatan	-	20.127.253.186,90	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
7	PT. Duta Pertiwi	Jembatan/Bangunan Multiguna Mangdu	Jembatan	-	50.409.075.784,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
8	PT. Kempas Indah Indonesia		Jembatan	-	-	-	-	-	-
9	PT. Rointa Eka Jaya	JPO Grosir Tanah Abang & Pertokoan	Jembatan	-	20.092.540.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
10	PT. Pacific Bangun Mas*	JPO Pasar Cipulir Jaksel	Jembatan	-	14.624.400.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
11	PT. Dharma Alumas Sakti	Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan	Gedung	577.563.000.000,00	17.321.632.000,00	-	594.884.632.000,00	-	Bangunan belum diserahkan
12	PT. Bina Citra Tataswati*	JPO Pertokoan Glodok	Jembatan	-	9.768.000.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
13	PT. Bumi Grafika jaya	Pengembangan BUMD DKI Jaya, Tanah dan Bangunan Jl. MT. Haryono Luas 12.127 M	Tanah	48.508.000.000,00	-	-	48.508.000.000,00	-	-
14	PT. Pacific Prima Buana Mas	Jl. Bekasi Barat Raya, Rawa Bunga Jaktim Nomor Aset 01.11.04.01 Luas 5300M2	Tanah Bangunan Toko dan SRO	24.406.500.000,00	-	-	24.406.500.000,00	-	-
15	PT. AGB Tuna	Pelelangan Ikan Muare Angke Pluit Jakarta Utara Luas 2800 M2	Tanah	22.806.000.000,00	-	-	22.806.000.000,00	-	-
16	PT. AGB Tuna	Jl. Dermaga Kav.I Pluit Penjaringan Jakarta Utara 3234 m2	Tanah	5.087.082.000,00	-	-	5.087.082.000,00	-	-
17	PT. Gading Raya Propertindo*	Pengelolaan JPO beserta fasilitasnya/ Pasar Ragional Tanah Abang Blok A Seluas 5858M	Jembatan	71.438.310.000,00	123.467.608.000,00	-	71.438.310.000,00	-	Bangunan belum diserahkan
18	PT. Duta Masa Nusa*	JPO Jl. Karel ST, Tubun & PS Kebon Jati Tnh Abang Blok D luas tanah 8310,52M	Jembatan	-	28.782.859.949,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
19	PT. Perwita Margasakti*	JPO Mal Ambassador Kuningan, Jembatan 1.338M dan 1.662M	Jembatan	-	46.794.087.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
20	PT. Hotel Cikini Realty*	Pembangunan Hotel Cikini Raya luas 5.115 M2 dengan Nomor Aset 01.11.04.08.00001	Tanah	49.334.175.000,00	70.000.000.000,00	-	49.334.175.000,00	-	Bangunan belum diserahkan
21	PT. Grand Indonesia*	Jembatan Multiguna di Jl. Teluk Betung Kel. Kebon Melati Kec.Tanah Abang Jak-Pus.	Jembatan Multiguna	-	222.000.000.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
JUMLAH I				3.510.867.742.000,00	746.003.578.791,90	585.665.867.300,00	3.032.215.629.572,00	-	-
II	Dinas Perhubungan (KSO)								
1	PT. Suar Andika WU	Tempat Uji KIR di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan	Tanah	-	-	-	-	-	-
2	PT. Nakia Dwipradita	Tempat uji KIR di Kedaung Angke Jakarta Barat Luas 23.350 m2	Tanah	21.388.600.000,00	-	-	-	21.388.600.000,00	
BP LIP									
1.	PT. Cakra Sarana Persada	Pengembangan dan Pembangunan Proyek Lingkungan Permukiman dalam Areal Kerja BP LIP	Tanah	246.966.276.000,00	-	-	-	246.966.276.000,00	
JUMLAH II				268.354.876.000,00	-	-	-	268.354.876.000,00	

No	Nama Pihak Ketiga	Lokasi	Jenis Aset	Nilai Aset	Nilai Bangunan	Nilai Aset Kerjasama	Nilai Aset Kerjasama	Nilai Aset Kerjasama	Keterangan
1	2	3	4	6	5	BTO 7	BOT 8	KSO 9	9
III	BPKD (Eks Biro Perlengkapan)								
1	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	Perumahan Taman Semanan Kalideres Jakbar	Tanah Sekolah	6.223.392.000,00	6.254.605.100,00	12.477.997.100,00	-	-	-
2	Yayasan Pendidikan Tunas Muda*	Tanah seluas 2.149m2 Kedoya Selatan	Tanah Sekolah	9.896.145.000,00	4.403.361.276,00	14.299.506.276,00	-	-	-
3	PT. Fajar Setia Mandiri (Jaktim)*	Tanah Seluas 2.000 m2 Jl. DI Penjaitan Jatinegara Jakarta Timur	Tanah SPBU	7.128.225.000,00	4.883.444.400,00	12.011.669.400,00	-	-	-
4	PT. Fajar Setia Mandiri (Jakut)	Tanah Seluas 3.088 m2 Jl. Danau Sunter Selatan Sunter Jaya Tg.Priok Jakut	Tanah SPBU	11.564.560.000,00	4.313.800.000,00	15.878.360.000,00	-	-	-
5	Yayasan Patmos	Tanah di Taman Meruya ilir Blok E7 Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah	5.880.000.000,00	4.090.967.000,00	9.970.967.000,00	-	-	-
6	Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia	Tanah di Perumahan Permata Buana Blok L4 Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah	10.387.500.000,00	6.600.000.000,00	16.987.500.000,00	-	-	-
7	PT. Pesona Marga Mandiri	Pembangunan Pengelolaan Kios Petak Psr Pagi luas 3300m,Jl. Petak Baru Pasar pagi	Tanah	16.813.500.000,00	10.482.000.000,00	27.295.500.000,00	-	-	-
8	Yayasan Pendidikan Katolik Mardi Luhur*	Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A9 Joglo Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah	5.309.436.000,00	4.170.342.000,00	9.479.778.000,00	-	-	-
9	Yayasan Bukit Sion*	Tanah Seluas 5,180 m2 di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok.G.VII.Srengseng Kembangan Jakbar	Tanah Sekolah	21.522.900.000,00	-	34.132.462.352,00	-	-	-
10	PT. Gama Investa Lestari	Komplek Bola Basket Internasional Kelapa Gading Jakarta Utara	Tanah	195.432.825.000,00	101.658.000.000,00	297.090.825.000,00	-	-	-
11	PT. Wahana Sejahtera	Tanah Terminal Transit Cillilitan	Tanah	17.550.000.000,00	1.226.000.000,00	-	18.776.000.000,00	-	-
12	Yayasan Tugasku	Jl. Pulo Mas Jaya Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jaktim seluas 4000 M2	Tanah	12.400.000.000,00	12.000.000.000,00	24.400.000.000,00	-	-	-
13	Gereja Protestan Minahasa Sidang Yeremia Jakarta	Sarana Ibadah di Blok HF 4 Kel. Kelapa gading Barat Jakarta Utara.	Gereja	19.329.075.000,00	1.465.000.000,00	20.794.075.000,00	-	-	-
14	Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading*	Sarana Ibadah di Jl. Pendet RW 07 Kel. Kelapa gading Timur Jakarta Utara.	Masjid	9.504.000.000,00	14.928.320.000,00	24.432.320.000,00	-	-	-
15	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ecclesia*	Sarana Ibadah di Kompleks Taman Semanan Indah Blok NA No.1 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat.	Gereja	6.039.936.000,00	3.080.986.780,00	9.120.922.780,00	-	-	-
16	Yayasan Pendidikan Pembangunan Bangsa*	Sarana Pendidikan di Jl. Swadaya Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.	Sekolah	3.675.936.000,00	-	3.675.936.000,00	-	-	-
17	Yayasan Darul Ma'arif*	Sarana Ibadah di Jl. Lembah Aren Blok K3 Kavling DKI Kel.Pondok Kelapa Jakarta Timur.	Masjid	1.699.200.000,00	2.797.818.600,00	4.497.018.600,00	-	-	-
18	PT. Jaya Real Property	Jembatan Penyebrangan Multiguna di Daerah Senen Jakarta Pusat	Tanah Jalan	-	19.011.075.000,00		-	-	-
JUMLAH III				360.356.630.000,00	201.365.720.156,00	536.544.837.508,00	18.776.000.000,00	-	
JUMLAH I + II + III				4.139.579.248.000,00	947.369.298.947,90	1.122.210.704.808,00	3.050.991.629.572,00	268.354.876.000,00	
TOTAL ASET KERJASAMA BOT, BTO DAN KSO								4.441.557.210.380,00	

**DAFTAR UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) DI SKPD
PER 31 DESEMBER 2015**

No.	NAMA SKPD/UKPD	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	Utang Pemunggutan Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa 1	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	Utang Pemunggutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Utang PFK Lainnya	Jumlah Utang PFK di SKPD
1	2	3	4	5	7	8	9	10 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
1	PPKD	242.071.200	-	-	-	-	-	242.071.200
2	Sekretariat DPRD	31.714.890	4.546.549	35.056.160	-	750.000	-	72.067.599
3	Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekda	-	310.616	2.394.980	-	2.070.772	-	4.776.368
4	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA	75.857.475	19.060.489	4.224.000	-	149.547.665	-	248.689.629
5	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKSEL	41.019.351	2.292.915	20.919.822	-	110.979.110	-	175.211.198
6	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKTIM	540.660	-	-	-	3.604.400	-	4.145.060
7	DINAS BINA MARGA	29.183.453	-	-	-	-	-	29.183.453
8	Sudin Bina Marga - JAKTIM	5.965.598	1.079.940	-	-	7.199.600	-	14.245.138
9	DINAS TATA AIR	108.644.903	7.707.228	7.294.580	-	57.115.167	-	180.761.878
10	Sudin Tata Air - JAKTIM	-	130.361.689	57.482.345	-	878.005.230	-	1.065.849.264
11	DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI	150.677.250	1.021.650	11.108.697	-	20.602.036	-	183.409.633
12	UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	1.098.000	921.250	1.307.200	-	6.255.000	-	9.581.450
13	Unit Pengelola Angkutan Sekolah	-	-	-	-	1.697.800	-	1.697.800
14	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	-	8.235.300	734.400	-	3.066.735	-	12.036.435
15	Unit Pengelola Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	2.621.260	90.225	1.796.218	-	10.520.091	-	15.027.794
16	Sudin Perhubungan - JAKUT	835.000	4.947.750	-	-	5.625.000	-	11.407.750
17	Rumah Sakit Umum Kec. Kramat Jati	-	-	68.481	-	342.405	-	410.886
18	BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)	-	-	-	-	263.925	-	263.925
19	BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - Jakpus	2.043.500	4.464.908	-	-	22.476.788	-	28.985.196
20	BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - Jakbar	-	-	2.195.686	-	10.978.432	-	13.174.118
21	BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - Jakbar	130.000	-	60.000	-	300.000	-	490.000
22	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - Jaksel	60.000	-	91.200	-	-	-	151.200
23	BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - Jaktim	34.760	500.348	5.851.664	-	34.015.534	-	40.402.306
24	BLUD Puskesmas Kec. Matraman - Jaktim	5.846.810	977.324	3.489.192	-	19.933.513	-	30.246.839
25	BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - Jaktim	46.875	-	-	-	-	-	46.875
26	Sudin Kesehatan - Jaktim	-	59.400	426.956	-	2.256.480	-	2.742.836
27	BLUD RS Koja	181.601.162	468.443	-	-	577.500	-	182.647.105
28	BLUD RS Cengkareng	-	-	-	-	-	13.067.000	13.067.000
29	BLUD RS Pasar Rebo	411.770.810	17.359.848	444.194	-	128.257.635	-	557.832.487
30	Sudin Pendidikan I - JAKBAR	5.625.000	1.052.336	851.310	-	7.635.576	-	15.164.222
31	Sudin Pendidikan II - JAKBAR	19.725.000	3.946.226	3.242.040	-	28.582.620	-	55.495.886
32	Gelanggang Olahraga Ragunan	3.175.000	6.143.959	2.415.294	-	35.103.787	-	46.838.040
33	Gelanggang Remaja Jakarta Utara	13.554.500	1.876.540	2.005.421	-	21.469.177	-	38.905.638
34	DINAS SOSIAL	73.865.168	12.131.506	29.486.791	-	79.288.759	-	194.772.224
35	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jakut	-	-	-	95.040	237.600	-	332.640
36	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jaktim	1.577.375	600.000	990.990	-	6.790.240	-	9.958.605
37	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	-	-	-	-	2.150.000	-	2.150.000
38	Satpol PP - Kab. Adm Kep. Seribu	8.983.550	2.565.210	-	-	16.105.554	-	27.654.314
39	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan	735.000	-	-	-	315.455	-	1.050.455
40	BADAN PEMBINAAN BUMD DAN PENANAMAN MODAL	325.873.372	-	-	-	-	-	325.873.372
41	Pusat Penyimpanan Barang Daerah	-	-	1.628.596	-	14.598.834	-	16.227.430
42	Sudin Pelayanan Pajak - Jakpus	591.790	-	285.760	-	487.500	-	1.365.050
43	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	165.600	-	20.341.550	-	20.507.150
44	Pusat Pelatihan Seni Budaya	200.000	150.050	136.363	-	1.869.040	-	2.355.453
45	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	7.258.311	59.895	-	-	377.955	-	7.696.161
46	Unit Pengelola Museum Seni	11.794.249	825.592	-	-	-	-	12.619.841
47	KANTOR PENGELOLA TAMAN MERGASATWA RAGUNAN	4.875.000	5.614.158	896.549	-	33.406.961	-	44.792.668
48	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakbar	-	285.000	-	-	1.900.000	-	2.185.000
49	Kelurahan Pegangsaan - Jakpus	50.000	-	-	-	-	-	50.000
50	Kelurahan Kebon Sirih - Jakpus	4.932.500	1.965.768	-	-	9.319.120	-	16.217.388
51	Kecamatan Pademangan - Jakut	22.500	143.348	-	-	-	-	165.848
52	Kelurahan Ancol - Jakut	1.087.112	-	-	-	4.918.392	-	6.005.504
53	Kecamatan Kelapa Gading - Jakut	935.000	1.427.160	-	-	6.742.744	-	9.104.904
54	Kelurahan Sukapura - Jakut	-	2.974.213	-	-	27.053.996	-	30.028.209
55	Kelurahan Cilincing - Jakut	2.320.031	-	4.498.154	-	2.054.290	-	8.872.475
56	Kelurahan Rawa Buaya - Jakbar	6.180.000	457.500	2.115.500	-	6.515.450	-	15.268.450
57	Kelurahan Wijaya Kesuma - Jakbar	7.171.050	-	653.400	-	11.979.527	-	19.803.977
58	Kelurahan Kemanggis - Jakbar	1.920.000	829.064	-	-	820.809	-	3.569.873
59	Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakbar	5.757.250	139.029	-	-	2.034.627	-	7.930.906
60	Kelurahan Pekoja - Jakbar	676.500	2.046.850	33.329.400	-	-	-	36.052.750
61	Kelurahan Karet Kuningan - Jaksel	-	23.513	52.000	-	107.800	-	183.313
62	Kelurahan Menteng Atas - Jaksel	30.000	103.643	-	-	2.246.200	-	2.379.843
63	Kecamatan Ciracas - Jaktim	170.000	464.505	-	-	1.418.500	-	2.053.005
64	Kelurahan Pisangan Baru - Jaktim	70.000	4.968.665	1.001.775	-	-	-	6.040.440
65	Kelurahan Jati - Jaktim	66.000	-	516.800	-	-	-	582.800
66	Kecamatan Cakung - Jaktim	-	-	923.320	-	246.280	-	1.169.600
67	Kelurahan Penggilingan - Jaktim	40.000	-	-	-	-	-	40.000
SALDO PERHITUNGAN		1.801.024.215	255.199.602	240.140.838	95.040	1.822.559.161	13.067.000	4.132.085.856

**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS PEMANFAATAN ASET DALAM BENTUK SEWA
PER 31 DESEMBER 2015**

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2015	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2015
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
1	YAY. PENDIDIKAN ELKA	Tanah dan Bangunan berupa 15 Unit Gedung Sekolah Perum Kelapa Gading Permai dan Perum Sunter Hijau, Jak-Utr (Sarana Pendidikan)		25/04/2014	5 Tahun 23/03/2013 s.d 22/03/2018	3	27.500.000	82.500.000
2	Yayasan The Gandhi Memorial Internasional School	Tanah Jalan Parang Tritis VI Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara (Sarana Pendidikan)	-	26/03/2014	5 Tahun 13/01/2014 s.d 12/01/2019	36	27.777.778	1.000.000.000
3	PT. Prima Indo Bahari	Tanah Areal Kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara (Coldstorage)	1547/2014 29/09/2014	31/10/2014	5 tahun 15/06/2014 s.d 14/06/2019	6	14.603.637	87.621.824
4	PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL	Tanah dan Bangunan Gedung BP Pantura, Jl. Lodan Timur Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara (Perluasan Kantor DUFAN dan Kegiatan Lainnya)	748/2015 05/05/2015	01/07/2015	5 Tahun 05/04/2015 s.d 04/04/2020	3	24.302.682	72.908.045
5	KOPERASI PEGAWAI DINAS PERIKANAN	Tanah Di Areal Pasar Ikan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara (SPBU)	121/2011 25/1/2011	16/2/2011	5 Tahun 16/2/2011 s.d 15/2/2016	2	18.319.709	36.639.417
6	PT. ASTRA DAIHATSU	Berupa Ruang Publik (Udara) Jalan Gaya Motor Kel. S. Bambu Kec. Tj. Priok Jakarta Utara (Jembatan Penyebrangan Barang)	539/2011 04/08/2011	07/06/2011	5 Tahun 01/03/2011 s.d 01/02/2016	0	5.575.940	-
7	PT. ALAM SEGAR JAYA	Tanah Pasar Ikan Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara (Coldstorage dan Gudang Barang atau Mesin)	1977/2011 20/12/2011	28/2/2012	5 Tahun 28/2/2012 s.d 27/2/2017	2	12.664.470	25.328.940

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2015	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2015
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
8	YAY. ANCOL BARAT	Tanah Parang Tritis IX Blok B4 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara (Sarana Pendidikan)	165/2012 27/1/2012	04/12/2012	5 Tahun 04/12/2012 s.d. 04/11/2017	3	2.679.738	8.039.215
9	PT. OBAYASHI KONTR. JOIN OPERASION	Tanah Jl. Ketel No. 1, Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara (Tempat menyimpan alat berat)	1011/2015 08/06/2015		1 Tahun 12/04/2015 s.d. 11/04/2016	3	34.375.000	103.125.000
10	PT. PETROSS GAS	Tanah Jln. Perintis Kemerdekaan JT Jln. Lingkar Luar Cengkareng JB (SPBG)	71/2015 16/01/2015	26/02/2015	5 Tahun 31/03/2015 s.d. 3/30/20	3	54.970.204	164.910.612
11	YAYASAN SUHARGO GONDOKUSUMO	Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Perum Taman Surya Blok MM Kel. Pegadungan Kalideres Jakarta Barat (Sarana Pendidikan)	842/2012 29/5/2012	25/6/2012	5 Tahun 25/6/2012 s.d. 24/6/2017	18	8.833.333	159.000.000
12	YAYASAN MUSLIM BOJONG INDAH	Tanah dan Bangunan Masjid Jalan Belimbing Raya Blok B.5 Komp. Perum Bojong Indah Jak-Bar (Sarana Ibadah)	1576/2012 11/07/2012	19/4/2012	5 Tahun 19/4/2012 s.d. 18/4/2017	4	416.667	1.666.667
13	PT. DAVALTI MUGI UTAMA GASINDO	Tanah Jl. Daan Mogot NO. 94-95 Kel. Kali Angke Kec. Cengkareng Jakarta Barat (SPBG)	1215/2012 13/08/2012	19/10/2012	5 Tahun 15/03/2012 s.d. 14/03/2017	2	42.181.817	84.363.633
14	HIMPUNAN PENYAYANG BINATANG	Sebagian Tanah dan Bangunan Jl. Harsono RM. No. 10 Ragunan Jakarta Selatan	880/2011 13/06/2011	30/6/2011	5 Tahun 30/6/2011 s.d. 29/6/2016	6	500.000	3.000.000
15	PT. ASRI KARYA	Tanah dan Bangunan Kolom Renang dan Lapangan Tennis Perumahan Bintaro Jaya Sektor 1 Kel. Bintaro Kec. Pasanggrahan Jakarta Selatan (Sarana Olahraga)	608/2012	16/5/2012	5 Tahun 01/01/2012 s.d. 31/12/2016	0	11.572.706	6

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2015	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2015
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
16	YAYASAN PERGURUAN RAKYAT	Tanah dan Bangunan Sekolah Jl. Lampiri Raya No. 28 Kel. Pd. Kelapa Kec. D. Sawit Jakarta Timur (Sarana Pendidikan)		19/06/2014	5 Tahun 02/02/2014 s.d 01/02/2019	1	12.500.000	12.500.000
17	YAY. DHARMA SISWA	Tanah dan Bangunan Sekolah Blok B Perumahan Pulo Gebang Permai, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung Jakarta Timur (Sarana Pendidikan)			5 Tahun 27/04/2013 s.d 26/04/2018	4	4.166.667	16.666.667
18	PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA	Tanah dan Bangunan Eks. BP7 Jl. Pisangan Baru Timur No. 25A Jakarta Timur (Sarana Kesehatan)	510/2011 07/04/2011	25/5/2011	5 Tahun 25/5/2011 s.d 24/5/2016	5	541.667	2.708.333
19	PT. BANK MANDIRI	Tanah dan Bangunan Kantor BP2TKI Jakarta Timur (Kantor Cabang Mandiri)		10/12/2014	5 Tahun 07/06/2014 s.d 06/06/2019	41	20.049.333	822.022.667
20	PT Lingkar Seni Indonesia	Tanah dan Bangunan Ex. Kantor Imigrasi Jl. Teuku Umar No. 1, Menteng Jakarta Pusat (Galeri Budaya dan Kunstring)		29/11/2012	5 Tahun 10/03/2013 s.d 09/03/2018	2	83.333.333	166.666.667
21	GEREJA TIBERIAS	Tanah Jl. Kelapa Nias Raya HT 60 Kelapa Gading (Sarana Ibadah/Gereja)		28/08/2013	5 Tahun 14/05/2012 s.d 13/05/2017	16	6.250.000	100.000.000
22	YAYASAN JEMA'AT SUNGAI JORDAN	Tanah Jl. Danau Indah Kelurahan Sunter Jaya Kec. Tj. Priok		15/09/2014	5 TAHUN 13/11/2012 s.d 12/11/2017	18	2.083.333	37.500.000
23	KOPERASI PEMBINA PROFESI DAN OLAHRAGA PERAIRAN (KPPPOP)	Tanah Jl. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok		19/06/2014	5 TAHUN 19/06/2014 s.d 18/06/2019	6	7.173.333	43.040.000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2015	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2015
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
24	PT KMC INDONESIA	Tanah		25/04/2014	5 TAHUN	4	6.666.667	26.666.667
		Jl. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Agung			25/04/2014			
		Kec. Tanjung Priok			s.d			
					25/04/2019			
25	Yayasan Al Hikmah Sunter Jaya	Tanah dan Bangunan			5 TAHUN	46	416.667	19.166.667
		Jl. Agung Timur 8 Blok O2, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok		31/10/2014	31/10/2014			
					s.d			
					30/10/2019			
26	MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA PURI INDAH	Tanah	1421/2014	26/02/2014	5 Tahun	44	2.916.667	128.333.333
		Jl. Pulau Pantara IV Blok N2 Perum Permata Buana, Kel. Kembangan Utara	11/09/2014		11/09/2014			
					s.d			
					10/09/2019			
27	YAYAYASAN PUTERA BAHAGIA	Tanah dan Bangunan	1689/2014		5 Tahun	6	19.292.656	115.755.938
		Desa Palasari Kec. Pacet, Jawa barat	27/10/2014	11/12/2014	14/06/2014			
					s.d			
					13/06/2019			
28	DPP PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU DANGDUT INDONESIA (DPP PAMMI)	Sebagian Gedung Nyi Ageng Serang		29/04/2014	5 Tahun	4	833.333	3.333.333
					29/04/2014			
					s.d			
					28/04/2019			
29	PT. ALFA INDAH SPORTINDO	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga	1583/2012	11/07/2012	5 Tahun	3	77.416.040	232.248.120
		Kompleks Perum Taman Alfa Indah Blok A. 10 Joglo Jakarta Barat (sarana Olahraga)	10/01/2012		11/07/2012			
					s.d			
					31/5/2017			
30	PERUSAHAAN UMUM DAMRI	Sebagian Tanah Eks Pool Depo K			5 Tahun	4	41.666.667	166.666.667
		Jl. Daan Mogot Pesing 94-95		22/11/2013	01/11/2012			
		Kedaung Angke, Jakarta Barat			s.d			
		Pool Busway Koridor I dan Koridor 8			31/10/2017			
31	Yayasan Tanimbar Lestari	Tanah dan Gedung	1494/2013	23/12/2013	5 Tahun	16	993.637	15.898.191
		Blok F/5 Perumahan Citra Garden 1	25/09/2013		05/05/2012			
		Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat			s.d			
		Sekolah TK			04/05/2017			

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2015	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2015
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
32	Yayasan Pendidikan Nurmala Hikmah	Tanah dan Bangunan	315/2014		5 Tahun	5	1.022.286	5.111.431
		Komp. Perumahan Karyawan DKI Jkt	06/03/2014	29/04/2014	01/06/2011			
		RT. 011, RW. 002, Kel. Pondok Kelapa			s.d			
		Duren Sawit, Jakarta Timur			01/06/2016			
33	Happyday Utama Indonesia	Tanah dan Bangunan	182/2014	30/04/2014	5 Tahun	0	29.166.667	-
		Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Kel. Kebon Pala	04/02/2014		23/12/2013			
		Kec. Gambir, Jakarta Pusat			s.d			
		Restoran			22/12/2018			
34	Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa	Tanah dan Bangunan	540/2014	19/06/2014	5 Tahun	9	1.872.667	16.854.000
		Komp. Perumahan Karyawan DKI Jkt	04/04/2014		18/09/2013			
		Blok M, Kel. Pondok Kelapa			s.d			
		Kec. Duren Sawit Jakarta Timur			17/09/2018			
		Balai Pertemuan Warga						
35	PT. T Energy	Sebagian Tanah	293/2014	10/11/2014	5 Tahun		27.895.833	-
		Terminal Bus Pinang Ranti Jl. Raya	18/08/2014		01/12/2013			
		Pondok Gede Jakarta Timur			s.d			
		SPBG			01/12/2018			
36	Yayasan Al-Amanah Sunter Agung	Tanah dan Bangunan	1363/2014	31/10/2014	5 Tahun	0	4.583.333	-
		Jl. Sunter Karya Selatan IV, Blok H RT.02	26/08/2014		09/01/2014			
		RW. 13 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung			s.d			
		Priok, Jakarta Utara			08/01/2019			
		Sarana Pendidikan						
37	PT. Antilope Madju Puri Indah	Tanah dan Bangunan	1691/2014	10/12/2014	5 Tahun	10	29.858.491	298.584.908
		Pasar Puri Indah Jakarta Barat	27/10/2014		30/11/2013			
		Pasar			s.d			
					29/11/2018			
38	Koperasi Putri Salju	Tanah	1260/2012	22/11/2012	5 Tahun	0	3.464.417	-
		Areal Pasar Ikan Muara Angke	23/08/2012		22/11/2012			
		Jakarta Utara			s.d			
					21/11/2017			
39	PT. Gagas Energi Indonesia	Tanah	1690/2014	09/01/2015	2 Tahun	0	24.546.054	-
		Lahan Parkir Taman Irti Monas			01/09/2013			
		Jl. Medan Merdeka Selatan			s.d			
		Jakarta Pusat			01/09/2015			
		SPBG						
40	PT. PLN Persero	Sebagian Lahan	69/2015	04/02/2015	5 Tahun	49	2.418.995	118.530.767
		Jl. Sriwijaya Raya No. 47, Kel. Selong	16/01/2015		04/02/2015			
		Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan			s.d			
		Gardu PLN			03/02/2020			

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2015	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2015
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
41	Yayasan Abdi Karya	Tanah	59/2015	26/02/2015	5 Tahun	2	32.857.734	65.715.469
		Blok EE4, Perumahan Taman Ratu Indah	14/01/2015		26/02/2015			
		Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk			s.d			
		Jakarta Barat			25/02/2020			
		Sarana Pendidikan						
42	PT. Holcim Beton	Sebagian Tanah	418/2015	08/04/2015	5 Tahun	51	91.666.667	4.675.000.000
			19/03/2015		08/05/2015			
					s.d			
					07/05/2020			
43	Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya	Tanah dan Bangunan	2019/2014	04/02/2015	5 TAHUN	4	2.500.000	10.000.000
		RT. 001 RW 02, Kelurahan Ceger	26/11/2014		25/04/2013			
		Kecamatan Cipayung Jakarta Timur			S.D			
					24/04/2018			
44	PT. Nusantara Sejahtera Raya	Sebagian Tanah dan Bangunan	303/2015	1737/-076.11	5 TAHUN	8	19.583.333	156.666.667
		Kompleks Taman Ismail Marzuki	27-Feb-15	05/05/2015	19/08/2014			
		Jl. Cikini Raya No. 73 kel. Cikini Kec.			S.D			
		Menteng Jakarta Pusat			18/08/2019			
		(Bioskop)						
45	RS. Atmajaya	Tanah dan Bangunan	735/2013		5 TAHUN	8	416.667	833.333
		Rusunawa Penjaringan Jakarta Utara	06/05/2013	29/08/2013	29/08/2013			
		(Balkesmas)			s.d			
					29/08/2018			
46	PT. Balats Dwi Tunggal	Sebagian Tanah	646/2015		2 TAHUN	17	13.577.484	230.817.227
		Jl. Gerbang Pemuda No. 1, Kel. Gelora	23-Apr-15	26/05/2015	26/05/2015			
		Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat			s.d			
		(Restauran)			25/05/2017			
47	Yayasan Pendidikan Citra Kasih	Tanah dan Bangunan	1748/2012	19/04/2012	5 Tahun	4	16.666.667	166.666.667
		Perum Citra 5 Ext. Blok B.I. 11-12	01/12/2012		12/04/2012			
		Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jak-bar			s.d			
		(Sarana Pendidikan)			11/04/2017			
48	Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara	Tanah dan Bangunan	592/2015	05/05/2015	5 Tahun	4	416.667	1.666.667
		Jalan Melur I/4 Rt.006/013, Kel. Koja,	15/04/2015		05/05/2015			
		Kec. Koja, Kota Administrasi Jakut			s.d			
		(Kantor)			04/05/2020			
49	Yayasan Diannanda	Tanah dan Bangunan (SD)	590/2015		5 Tahun	9	28.417.717	255.759.450
		Blok N-3, Perumahan Citra Garden II,	15/04/2015	08/06/2015	26/09/2015			
		Kelurahan Pegadungan, Kec. Kalideres			s.d			
		Kota Administrasi Jakarta Barat			27/09/2015			

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2015	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2015
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
50	Yayasan Pelita Harapan	Tanah dan Bangunan	725/2015		5 Tahun	54	62.500.000	3.375.000.000
		Perumahan Daan Mogot Baru, Blok Na-1	30/04/2015	17/06/2015	01/07/2015			
		Kelurahan Kali Deres, Kec. Kalideres,			s.d			
		Kota Administrasi Jakarta Barat			30/06/2019			
51	Jamkrida	Sebagian Bangunan BPBUMDPM	724/2015	2593/-076.35	2 TAHUN	6	1.307.234	7.843.406
			30/04/2015	01/07/2015	01/07/2015			
					s.d			
					01/07/2017			
52	PT Surya Jaya Mandiri	Sebagian Bangunan (TPO)	1137/2015	2712/-1.754.12	5 TAHUN	54	1.833.333	99.000.000
		Sebagian Bangunan Tempat Penyeberangan	19-Jun-15	09/07/2015	09/07/2015			
		Orang (Tpo) Kota Yang Terletak Di Jalan			s.d			
		Pintu Besar Utara, Kelurahan Pinangisia			08/07/2020			
		Kecamatan Taman Sari						
53	Yayasan Al-Muhsinin Alfa Indah	Tanah dan Bangunan	535/2014	19/06/2014	5 TAHUN	7	8.333.333	58.333.333
		Perumahan Taman Alfa Indah Blok G1	04-Apr-14		23/07/2013			
		Kel. Joglo, Kec. Kembangan			s.d			
		Kota Adm. Jakarta Barat			23/07/2018			
54	Yayasan Rumah Bersalin Bidara	Tanah	966/2015		5 TAHUN	6	1.666.667	10.000.000
		Jalan Otista Raya Nomor 64	27/05/2015	29/07/2015	16/06/2014			
		Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara			s.d			
		Kota Administrasi Jakarta Timur			15/06/2019			
55	Yayasan Al-Hidayah	Tanah	542/2014	19/06/2014	5 TAHUN	2	416.667	833.333
		Jl. Tari Klasik Rt. 005 Rw. 08	04-Apr-14		14/03/2013			
		Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading			s.d			
		Kota Adm Jakarta Utara			14/03/2018			
56	Yayasan Pendidikan Kemurnian	Tanah dan Bangunan	541/2014	19/06/2014	5 TAHUN	4	9.363.333	37.453.333
		Perumahan Citra Garden II, Blok B6	04-Apr-14		23/04/2013			
		Dan Blok A3, Kota Adm. Jakarta Barat			s.d			
					22/04/2018			
57	Palang Merah Indonesia (PMI)	Tanah dan Bangunan	817/2014	12/08/2014	5 TAHUN	9	833.333	7.500.000
	Cabang Jakarta Barat	Jl. Kamal Raya, Kel. Cengkareng Timur	13-Mei-14		18/09/2013			
		Kota Adm. Jakarta Barat			s.d			
					19/09/2018			
58	PT Bank DKI (ATM)	Tanah dan Bangunan 5 Wilayah Kota	511/2011	07/07/2011	5 TAHUN	6	58.231.750	349.390.499
			07-Apr-11		07/07/2011			
					s.d			
					06/07/2016			
59	PT Bank DKI (Pelayanan Terpadu)	Tanah dan Bangunan 5 Wilayah Kota	606/2011	07/07/2011	5 TAHUN	6	48.704.017	292.224.100
			21-Apr-11		07/07/2011			
					s.d			
					06/07/2016			

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2015	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2015
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
60	PT Bank DKI (Kantor Operasional)	Tanah Dan Bangunan Yg Tersebar Di 34 Bangunan Kantor	392/2011 07-Mar-11	31/05/2011	5 TAHUN 31/05/2011 s.d 30/05/2016	5	266.896.642	1.334.483.208
61	UD Lautan Mutiara	Sebagian Tanah dan Keseluruhan Bangunan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara	645/2015 23-Apr-15	12/06/2015	5 TAHUN 23/04/2014 s.d 22/04/2019	4	35.333.333	141.333.333
62	RS Atmajaya	Tanah dan Bangunan Rusunawa Penjaringan Jakarta Utara	735/2013 06/05/2013	29/08/2013	5 TAHUN 29/08/2013 s.d 29/08/2018	8	416.667	3.333.333
63	Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia	Tanah Jalan Pulau Tidung Perumahan Permata Buana Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan	1207/2013 25/07/2013	18/09/2013	5 TAHUN 18/09/2013 s.d 17/09/2018	9	14.045.000	126.405.000
64	Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah	Tanah Komplek Perumahan Karyawan Pemerintah DKI Jakarta Blok M Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur Masjid	336/2015 05/03/2015	1377/-076.25 08/04/2015	5 TAHUN 08/04/2015 s.d 07/04/2020	3	416.667	1.250.000
65	Yayasan Pendidikan Cengkareng 1	Tanah dan Bangunan Kawasan Rumah Susun Cengkareng No. 2 Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	1726/2015 26/08/2015	3924/-076.11 01/10/2015	5 TAHUN 18/08/2014 s.d 18/08/2019	44	17.500.000	770.000.000
66	Yayasan Sapta Nawami Bhakti	Tanah dan Bangunan Jl. Harsono Rm Nomor 28, Kel. Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan	569/2013 16/03/2013	27/06/2013	5 TAHUN 15/10/2012 s.d 15/10/2017	10	6.250.000	62.500.000
67	Yayasan Masjid Raya Al-Musyawaharah	Tanah dan Bangunan Jl. Raya Boulevard Kelapa Gading Blok B-2 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara	1359/2014 26/08/2014	14/10/2014	5 TAHUN 15/10/2012 s.d 15/10/2017	9	8.333.333	75.000.000
68	Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolosis Indonesia (PPTI)	Tanah Tanah di Areal Pasar Ikan Muara Angke	1241/2011 19-Agust-11	18/10/2011	5 TAHUN 18/10/2011 s.d 17/10/2016	10	416.667	4.166.667

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2015	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2015
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
69	Yayasan Pendidikan Rasa Sayang Mandiri	Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan	1862/2015	4335/-076.76	5 TAHUN	10	4.583.333	45.833.333
		Perumahan Taman Ratu, Blok F-7	04/09/2015	26/10/2015	26/10/2015			
		Dan Blok F-13 No. 2, Kelurahan Duri Kepa			s.d			
		Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi JakBar			25/10/2020			
70	Yayasan Meek Nusantara	Sebagian Bangunan	2027/2015	3923/-076.73	3 TAHUN	30	750.000	22.500.000
		Jalan Marunda Pulo Rt 003 Rw 007,	25-Sep-15	01/10/2015	27/07/2015			
		Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara			s.d			
					26/06/2018			
71	Dewan Kerajinan Nasional Provinsi DKI Jakarta (Dekranasda)	Sebagian Bangunan	516/2014	26/05/2014	5 TAHUN	5	83.333	416.667
		Lantai Dasar Blok G Gedung Balaikota	04-Apr-14		26/05/2014			
		Provinsi DKI Jakarta			s.d			
					25/05/2019			
72	Yayasan Al-Ikhwan Meruya	Tanah	1927/2015	4405/-076.25	5 TAHUN	10	833.333	8.333.333
		Taman Meruya Ilir Utara, Blok I-8	10-Sep-15	29/10/2015	29/10/2015			
		Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan			s.d			
		Jakarta Barat			28/10/2020			
73	Swadaya Panduartha	Tanah	1420/2014	30/10/2014	5 TAHUN	10	8.333.333	83.333.333
		Jl. Kumala Artha Gading Blok D-11	11-Sep-14		30/10/2014			
		Kota Adm. Jakarta Utara			s.d			
					30/10/2019			
74	PD Sumber Alam	Tanah	120/2011	16/02/2011	5 TAHUN	2	4.208.257	8.416.513
		Areal Pasar Ikan Muara Angke Jak-Ut	25-Jan-11		16/02/2011			
					s.d			
					16/02/2016			
75	Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	Sebagian Ruangan	250/2015	08/04/2015	5 TAHUN	1	6.666.667	6.666.667
		Gedung Dinas Teknis Abdul Muis,	16-Feb-15		31/01/2013			
		Kantor Samsat Jakarta Pusat dan Utara,			s.d			
		Kantor Samsat Kota Administrasi Jakbar			30/01/2018			
		dan Jaktim						
76	Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara	Tanah dan Bangunan	1358/2014	31/10/2014	5 TAHUN	10	10.416.667	104.166.667
		Perumahan Taman Pegangsaan Indah Dan	26-Agust-14		19/10/2013			
		Perumahan Gading Griya Lestari			s.d			
		Kec. Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara			18/10/2018			
77	Yayasan Harapan Bangsa	Tanah dan Bangunan	1920/2014	27/01/2015	5 TAHUN	13	5.150.000	66.950.000
		Blok A.6, Perumahan Citra 3 Ekstension,	19-Nop-14		27/01/2015			
		Kelurahan Pegadungan, Kec. Kalideres,			s.d			
		Kota Adm. Jakarta Barat			26/01/2020			
78	Koperasi Perikanan Mina Jaya	Sebagian Tanah	1294/2014	14/10/2014	5 TAHUN	9	1.148.333	10.335.000
		Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke	18/08/2014		14/10/2014			
		Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jak-Ut			s.d			
					13/10/2019			

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2015	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2015
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
79	Yayasan Pelita Bangsa	Tanah dan Bangunan Perumahan Citra 5, Blok E-7 Citra Garden City, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat	2512/2015 19/11/2015	23/12/2015	5 TAHUN 23/12/2015 s.d 22/12/2020	60	38.888.889	2.333.333.340
80	PT Bank DKI (22 ATM dan Locket)	Sebagian Tanah dan Bangunan 22 Kelurahan di 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	1278/2015 09-Jul-15	06/10/2015	5 TAHUN 06/10/2015 s.d 05/10/2020	57	183.333	10.450.000
81	PT Bank DKI (58 ATM dan Locket)	Sebagian Tanah dan Bangunan 58 Kelurahan di 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta	2054/2015 30/09/2015	28/12/2015	5 TAHUN 28/12/2015 s.d 27/12/2020	60	483.333	29.000.000
82	PT Multi Kontrol Nusantara	Sebagian Bangunan Gedung Nyi Ageng Serang	613/2015 21/04/2015	15/07/2015	5 TAHUN 14/12/2014 s.d 13/12/2019	12	9.436.923	113.243.081
83	PT Bank DKI	Sebagian Bangunan yang terletak di Jalan Suryopranoto	11/01/2015		5 TAHUN	12	24.769.676	297.236.109
84	PT. Indosat, Tbk.	Menara telekomunikasi Gedung Balai Agung Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat	190/2011 10/02/2011	75/PKS/BPKD-PKA/III/2011 31/03/2011	5 TAHUN 31/03/2011 s.d 31/03/2016	3	7.046.366	21.139.099
85	PT. MAC Sarana Djaya	Menara telekomunikasi RSUD Pasar Rebo Jl. Raya Condet No. 30 Jakarta Timur	1500/2013 25/09/2013	- 23/12/2013	5 TAHUN 23/12/2013 s.d 23/12/2018	36	8.333.333	300.000.000
86	PT. MAC Sarana Djaya	Menara telekomunikasi Terminal Pulogebang Jl. Sejajar Tol Cakung Timur Kel Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur	1725/2013 06/11/2013	- 23/12/2013	5 TAHUN 23/12/2013 s.d 23/12/2018	36	9.166.667	330.000.000
87	PT. MAC Sarana Djaya	Menara telekomunikasi Gedung Lama & Gedung Baru DPRD Prov DKI Jakarta Jl. Kebon Sirih Kel Gambir Kec Gambir Jakarta Pusat	1726/2013 06/11/2013	- 23/12/2013	5 TAHUN 23/12/2013 s.d 23/12/2018	36	10.416.667	375.000.000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2015	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2015
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
88	PT. Indosat, Tbk.	Menara telekomunikasi	1976/2013	-	5 TAHUN	12	8.333.333	100.000.000
		Gedung Walikota Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno Jakarta Timur	19/12/2013	17/03/2014	17/03/2014			
					s.d 21/12/2016			
89	PT. Indosat, Tbk.	Menara telekomunikasi	1917/2013	-	5 TAHUN	11	8.951.001	98.461.006
		Gedung Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca No.9 Jakarta Selatan	12/12/2013	11/03/2014	11/03/2014			
					s.d 23/11/2016			
90	PT. XL Axiata, Tbk.	Menara telekomunikasi	1318/2012	-	5 TAHUN	2	8.333.333	16.666.667
		Gedung Balaikota Blok G Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat	29/08/2012	22/11/2012	22/11/2012			
					s.d 17/02/2016			
91	PT. XL Axiata, Tbk.	Menara telekomunikasi	1317/2012	-	5 TAHUN	2	8.333.333	16.666.667
		Gedung Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat Jl. Raya Kembangan No. 2 Jakarta Barat	23/08/2012	22/11/2012	22/11/2012			
					s.d 17/02/2016			
92	PT. Solusindo Kreasi Pratama	Menara telekomunikasi	1882/2011	-	5 TAHUN	9	6.250.000	56.250.000
		SMK 29 Jl. Prof. Joko Sutono Kel. Petogogan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan	20/12/2011	02/02/2012	02/02/2012			
					s.d 13/10/2016			
93	PT. XL Axiata, Tbk.	Menara telekomunikasi	1320/2012	-	5 TAHUN	2	8.333.333	16.666.667
		Gedung Balaikota Blok B Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat	06/09/2012	22/11/2012	22/11/2012			
					s.d 17/02/2016			
94	PT. XL Axiata, Tbk.	Menara telekomunikasi	1319/2012	-	5 TAHUN	2	8.333.333	16.666.667
		Gedung Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno Pulo Gadung Cakung Jakarta Timur	29/08/2012	22/11/2012	22/11/2012			
					s.d 17/02/2016			
95	PT. MAC Sarana Djaya	Menara telekomunikasi	2253/2014	-	5 TAHUN	36	8.802.500	316.890.000
		Bangunan Kantor Walikota Jakarta Utara Jl. Yos Sudarso No. 27-29 Jakarta Utara	24/12/2014	15/01/2015	15/01/2015			
					s.d 23/12/2018			

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2015	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2015
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
96	PT. Indosat, Tbk.	Menara telekomunikasi	257/2015	1888/-076.25 & 1962/D00-D0IEA/LGL/15	5 TAHUN	33	8.916.667	294.250.000
		Lahan SMPN 240 Jl. H. Raya No. 16 B Gandaria Jakarta Selatan	17/02/2015	13/05/2015	13/05/2015			
					s.d			
					06/10/2018			
97	PT. Indosat, Tbk.	Menara telekomunikasi	251/2015	1856/-076.76 & 1961/D00-D0IEA/LGL/15	5 TAHUN	33	8.916.667	294.250.000
		Bangunan SMKN 35 Jl. Kerajinan No. 42 Jakarta Barat	16/02/2015	12/05/2015	12/05/2015			
					s.d			
					06/10/2018			
98	PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo	Menara telekomunikasi	103/2015	1657/-1.795.131 & 002/JIP/P/IV/2015	5 TAHUN	9	9.864.913	88.784.214
		Bangunan Kantor Walikota Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno Jakarta Timur	27/01/2015	27/04/2015	27/04/2015			
					s.d			
					30/09/2016			
99	PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo	Menara telekomunikasi	104/2015	1656/-1.795.131 & 003/JIP/P/IV/2015	5 TAHUN	3	9.864.913	29.594.738
		Bangunan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Jl. Abdul Muis Nomor 66 Jakarta Pusat	27/01/2015	27/04/2015	27/04/2015			
					s.d			
					23/03/2016			
100	PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo	Menara telekomunikasi	105/2015	1655/-1.795.131 & 004/JIP/P/IV/2015	5 TAHUN	9	9.864.913	88.784.214
		Bangunan Kantor Walikota Jakarta Barat Jl. Raya Kembangan Jakarta Barat	27/01/2015	27/04/2015	27/04/2015			
					s.d			
					30/09/2016			
101	PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo	Menara telekomunikasi	106/2015	1658/-1.795.131 & 005/JIP/P/IV/2015	5 TAHUN	19	9.864.913	187.433.341
		Lahan SMUN 3 Jl. Setiabudi II Jakarta Selatan	27/01/2015	27/04/2015	27/04/2015			
					s.d			
					08/08/2017			
102	PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo	Menara telekomunikasi	564/2015	2741/-076.36 & 006/JIP/P/IX/2015	5 TAHUN	7	9.864.913	69.054.389
		Bangunan Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya Nomor 9 Jakarta Selatan	10/04/2015	10/07/2015	10/07/2015			
					s.d			
					03/08/2016			

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2015	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2015
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				
103	PT. Indosat, Tbk.	Menara telekomunikasi	1665/2015	4033/-076.25 & 2644/D00-D01EA/LGL/15	5 TAHUN	24	15.780.962	378.743.088
		Lahan Gudang Pulomas Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur	18/08/2015	07/10/2015	07/10/2015			
					s.d 16/12/2017			
104	PT. AVe Indonesia	Menara telekomunikasi	1095/2015	3607/-076.36 & 02/mou/BPKD/IX/15	5 TAHUN	8	17.902.001	143.216.008
		Bangunan Kantor Walikota Jakarta Selatan Blok B dan Blok C Jl. Prapanca Raya Nomor 9 Jakarta Selatan	11/06/2015	11/09/2015	11/09/2015			
					s.d 10/09/2020			
JUMLAH								22.875.263.545

**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KONTRIBUSI BOT/BTO
PER 31 DESEMBER 2015**

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	KONTRIBUSI TAHUN 2015	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2014
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	PT. Duta Pertiwi	BOT Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar JakPus (JPO antara Gedung Dusit Mangga Dua & Mal Mangga Dua)	PKS Tgl 8 Oktober 1997	20 Tahun	16.000.000	22	1.333.333	29.333.333
2	PT. Duta Pertiwi	BOT Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar JakPus (JPO beserta fasilitas pertokoan antara Gedung ITC dan Gedung Mal Mangga Dua)	PKS No. 65 Tahun 1999 Tgl 13 September 1999	30 Tahun	31.666.667	164	2.638.889	432.777.782
3	PT Rointa Eka Jaya	BOT Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus (Jembatan Multiguna antara Blok B Pasar Tanah Abang dengan Pertokoan di sisi Timur Jln. Fakhruddin)	PKS No. 27 Tahun 2001 Tgl 30 Maret 2001	30 Tahun	41.666.667	180	3.472.222	625.000.000
4	PT. Duta Pertiwi	BOT Jln. Aquarium Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar JakPus (jembatan multiguna antara Gedung Harcomas Mangga Dua dengan Mal Mangga Dua)	PKS Tgl 14 Mei 2003 Addendum Tgl 30 Agustus 2005	25 Tahun	60.000.000	168	5.000.000	840.000.000
5	PT. Gading Raya Propertindo	BOT Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus (jembatan multiguna antara Blok A & Bangunan Sisi Timur & bangunan sisi utara Pasar Tn. Abang JakPus)	PKS Tgl 27 Oktober 2004	25 Tahun	140.000.000	166	11.666.667	1.936.666.667
6	PT. Grand Indonesia	BOT Jln. Teluk Betung Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang JakPus (jembatan multiguna antara Hotel Indonesia & Eks Hotel Wisata - 7 lantai & 2 basement)	PKS Tgl 4 Mei 2009	28 Tahun	366.500.000	0	30.541.667	-

**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KONTRIBUSI BOT/BTO
PER 31 DESEMBER 2015**

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	KONTRIBUSI TAHUN 2015	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2014
1	2	3	4	5	7	8	9	10
7	PT. Fajar Setia Mandiri	BTO Jln. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok JakUtara (stasiun pengisian bahan bakar umum)	PKS No. 1500/073.511 Tgl 10 Mei 2002	20 Tahun	100.000.000	5	8.333.333	41.666.667
8	PT. AGB Tuna (cold storage)	BOT Jln. Dermaga Kavling I (Muara Angke) Kel. Pluit Kec. Penjaringan JakUtara (pembangunan & pengelolaan Cold Storage beserta sarana pelengkapanya)	PKS Tgl 28 Feb 2004	20 Tahun	30.000.000	98	2.500.000	245.000.000
9	PT. AGB Tuna (pabrik es)	BOT Jln. Pelelangan (Muara Angke) Kel. Pluit Kec. Penjaringan JakUtara (pembangunan & pengelolaan pabrik es beserta sarana pelengkapanya)	PKS Tgl 21 November 2006	20 Tahun	22.500.000	131	1.875.000	245.625.000
10	PT. Duta Pertiwi	BOT Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar JakPus (JPO antara Gedung Dusit Mangga Dua & Mal Mangga Dua)	PKS Tgl 13 Maret 2008	25 Tahun	252.000.000	0	21.000.000	-
11	PT. Gerak Maju Abadi	BOT Jl. Blustru, Kelurahan Glodok Jakarta Barat (Gedung Pertokoan & Fasilitas Parkir)	PKS Tgl 21 Juli 1997	20 Tahun	265.750.000	19	22.145.833	420.770.833
12	Yay. Patmos	BTO Perumahan Taman Meruya Ilir (Utara) Blok E.7 Kec. Kembangan Jakarta Barat (sarana pendidikan)	PKS No. 210/073.551 Tgl 6 Pebruari 2003 Addendum No. 25/AK/BP/VI/2006 Tgl 1 Juni 2006	25 Tahun	80.525.500	2	6.710.458	13.420.917
13	Yay. Pusat Pelatihan E & P	BTO Jl. Pulau Sebaru Perumahan Permata Buana Blok L4, Kec. Kembangan Jakarta Barat (sarana pendidikan)	PKS No. 130/073.511 Tgl 28 Januari 2003 BAST Bangunan Tgl. 8 Pebruari 2006	25 Tahun	77.812.274	2	6.484.356	12.968.712

**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KONTRIBUSI BOT/BTO
PER 31 DESEMBER 2015**

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	KONTRIBUSI TAHUN 2015	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2014
1	2	3	4	5	7	8	9	10
14	PT. Langgeng Ayom	BOT Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan. (Pengelolaan Kawasan Terminal Blok M)	PKS tahun 1990 Addendum Tgl 18 Juli 2012	30 Tahun	250.000.000	12	20.833.333	250.000.000
15	PT. Pasific Bangun Mas	BOT Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan (Jembatan Multiguna Antara Pasar Cipulir dengan Cipulir Plaza)	PKS No. 40 Tahun 2001 Tgl 1 Mei 2001	25 Tahun	28.000.000	124	2.333.333	289.333.333
16	PT. Perwita Margasakti	BOT Jln. Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi JakSel (jembatan multiguna antara Mal Ambassador & ITC Kuningan Jaksel)	PKS Tgl 12 April 2010	25 Tahun	82.000.000	2	6.833.333	13.666.667
17	PT. Perwita Margasakti	BOT Jln. Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi JakSel (jembatan multiguna antara Mal Ambassador & ITC Kuningan Jaksel)	PKS Tgl 8 Oktober 2003	25 Tahun	100.000.000	153	8.333.333	1.275.000.000
18	PT. Wahana Cipta Sejahtera	BOT Jl. Letjen Sutoyo Kav.76/ Jl. Dewi Sartika (Eks Terminal Cililitan) Jakarta Timur (Jembatan Multiguna Antara Gedung Pertokoan (Bangunan A) & Gedung Parkir (Bangunan B))	PKS Tgl 7 April 2004	25 Tahun	94.000.000	159	7.833.333	1.245.500.000
19	PT. Wahana Cipta Sejahtera	BOT Jl. Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur	PKS Tgl 13 Juli 2006 BAST Tgl 19 Mei 2008	25 Tahun	100.000.000	48	8.333.333	400.000.000
20	PT. Metropolitan Kentjana Tbk	BOT Antara Pondok Indah Mal I & II Jl.Metro Pondok Indah Kec. Keb lama Jaksel (Jembatan Multiguna)	PKS Tgl 4 April 2008	25 Tahun	735.000.000	0	61.250.000,00	-

**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KONTRIBUSI BOT/BTO
PER 31 DESEMBER 2015**

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	KONTRIBUSI TAHUN 2015	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2014
1	2	3	4	5	7	8	9	10
21	PT. Gamma Investa Lestari	BTO Kompleks Bola Basket Internasional Sport Mall di Jl. Raya Kelapa Nias Blok HF 3 Kel. Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. (Sarana Olahraga)	PKS No. 15/AK/BP/III/2006 Tanggal 24 Maret 2006	25 Tahun	60.000.000	4	5.000.000	20.000.000
JUMLAH								8.336.729.911

**PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA HASIL LELANG TITIK REKLAME ATAS ASET PEMDA
PER 31 DESEMBER 2015**

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Masa Manfaat	Tanggal PKS	Jangka Waktu Pemanfaatan Aset		Nilai SPS	Sewa Titik Lelang yang Telah Diakui per 31 Des 2015	Sisa Bulan yang Belum Digunakan oleh Pihak Ketiga	Sewa Titik Lelang Diterima Dimuka per 31 Des 2015
					Awal	Akhir				
1	PT. Magna Astro Prontonusa	Jl. HR. Rasuna Said depan Four Season Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)		PKS dalam proses		1.551.000.000	0 Bulan	24 Bulan	1.551.000.000
2	PT. Magna Astro Prontonusa	Jl. HR. Rasuna Said depan Kedubes Turki Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)		PKS dalam proses		1.610.000.000	0 Bulan	24 Bulan	1.610.000.000
3	PT. Magna Astro Prontonusa	Jl. HR. Rasuna Said depan Depkes Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)		PKS dalam proses		1.850.900.000	0 Bulan	24 Bulan	1.850.900.000
4	PT. Magna Astro Prontonusa	Jl. HR. Rasuna Said depan Indorama Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)		PKS dalam proses		1.967.000.000	0 Bulan	24 Bulan	1.967.000.000
5	PT. Unggul Dian Perkasa	Jl. Jend. Sudirman depan Ratu Plaza Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	730 hari (2 tahun)	17/03/2015	27 Mei 2015	26 Mei 2017	3.500.000.000	7 Bulan	17 Bulan	2.479.166.667
6	PT. Insite Media	Jl. Jend. Sudirman depan Polda Metro Jaya Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	730 hari (2 tahun)	10/02/2015	22 April 2015	21 April 2017	5.849.800.000	8 Bulan	16 Bulan	3.899.866.667
7	PT. Prisma Harapan	Jl. HR. Rasuna Said dpn Pasar Festival, Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)	01/09/2015	10 Nopember 2015	09 Nopember 2017	2.101.000.000	2 Bulan	22 Bulan	1.925.916.667
	JUMLAH						18.429.700.000			15.283.850.000

**DAFTAR UTANG PEGAWAI
PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2015**

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	Ket.
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
				PEMBAYARAN	KOREKSI		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
A.	UTANG PEGAWAI						
1	Sekretariat DPRD		686.086.991,00			686.086.991,00	
2	Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekda	1.471.999.257,00	4.304.427.930,00	1.471.999.257,00		4.304.427.930,00	
						4.269.427.930,00	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Khusus (PPh) Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja Th. 2015 (28 UKPD termasuk Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta) Tahun Anggaran 2016 Rp 4.269.427.930
						35.000.000,00	Tunjangan TKD
3	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA		320.100.000,00			320.100.000,00	
						55.000.000	Alokasi anggaran APBD P Th. 2015. tidak cukup waktu untukk pencairan dana karena kegiatan s.d akhir desember 2015 masih berjalan , bank dki ngasih waktu untuk pencairan sd. 30 desember 2015
						66.000.000	
						33.000.000	
						77.000.000	
						4.620.000	
						39.600.000	berkas daftar transpot yg diserahkan dari rusun jatinegara kaum tercecer dan tidak ditemukan karena harus melalui beberapa tahapan
						3.300.000	
						41.580.000,00	
4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN		1.345.019.327,00			1.345.019.327,00	Tunjangan Khusus (PPh)/ Tunjangan PPh Gaji dan tunjangan Kinerja PPh bulan Desember 2015 jml 465 org
5	DINAS BINA MARGA		1.887.266.286,00			1.887.266.286,00	
						35.513.500,00	Belanja Tunjangan Kinerja Daerah (Kekurangan TKD Tahap 2) bulan april
						71.895.054,00	Belanja Tunjangan Kinerja Daerah (Kekurangan TKD Tahap 2) bulan mei
						44.063.261,00	Belanja Tunjangan Kinerja Daerah (Kekurangan TKD Tahap 2) bulan juli
						86.608.410,00	Belanja Tunjangan Kinerja Daerah (Kekurangan TKD Tahap 2) bulan agustus
						23.427.359,00	Belanja Tunjangan Kinerja Daerah (Kekurangan TKD Tahap 2) bulan september
						11.033.987,00	Belanja Tunjangan Kinerja Daerah (Kekurangan TKD Tahap 2) bulan November
						1.614.724.715,00	Belanja Tunjangan PPh bulan Desember, Pembayaran Kekurangan PPh bulan Desember 2015 Dinas Bina Marga Prov. DKI Jakarta RP. 1.614.724.715
6	DINAS TATA AIR		497.532.470,00			497.532.470,00	Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	Ket.
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
				PEMBAYARAN	KOREKSI		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
7	DINAS PENATAAN KOTA	16.486.890,00	3.252.291.759,00	16.486.890		3.252.291.759,00	
						3.059.206.374	utang PPh bulan Desember 2015 SDPK Jkt Pusat, SDPK Jkt Utara dan SDPK Jkt Barat. Jml Peg: 250 , Pembayaran PPh bulan Desember 2015 SDPK Jkt Pusat, SDPK Jkt Utara dan SDPK Jkt Barat. Jml Peg: 250 Rp3.059.206.374
						102.540.920,00	Tunjangan Kinerja bulan april 2015
						90.544.465,00	tunjangan kinerja bulan mei 2015
8	DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI	2.126.473.980	5.840.529.850,00	2.126.473.980		5.840.529.850,00	
9	DINAS KESEHATAN		62.026.472.530,00			62.026.472.530,00	
						61.226.664.428	(PPH 21) bulan Desember 2015 Pegawai Dinas Kesehatan, Pembayaran Tunjangan Khusus (PPH 21) bulan Desember 2015 Pegawai Dinas Kesehatan Prov.DKI Jakarta dan Jajarannya Rp. 61.226.664.428 (Dibayar Februari)
						721.907.141	Tunjangan Kinerja
						77.900.961	Belanja Gaji
10	BLUD RS Duren Sawit		17.437.089,00			17.437.089,00	
11	DINAS PENDIDIKAN	1.964.164.559,00	178.853.271,00	1.964.164.559,00		178.853.261,00	
						3.245.702,00	Belanja Gaji Guru-guru sltp 192 kec. Cipayung jaktim
						175.607.559,00	Tunjangan Kinerja TKD BULAN OKTOBER 2015
12	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA		320.073.408,00			320.073.408,00	Utang TUNJANGAN PPH 21 BULAN DESEMBER 2015 , PEMBARAYAN KEKURANGAN TUNJANGAN PPH 21 BULAN DESEMBER 2015 Rp320.073.408
13	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		1.277.786.497,00			1.277.786.497,00	
						758.308.000	Utang PPh Pasal 21 Badan Diklat Bulan Desember 2015, Pembayaran Kekurangan PPh Pasal 21 Badan Diklat Bulan Desember 2015 Rp758.308.000
						519.478.497	Utang PPh Pasal 21 Bulan Desember 2015, Pembayaran Kekurangan PPh Pasal 21 Bulan Desember 2015 Rp519.478.497
14	DINAS SOSIAL		4.521.386.220,00			4.521.386.220,00	Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja
15	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	40.074.368	137.887.462,00	40.074.368		137.887.462,00	
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	8.142.427,00	3.868.556.793,00	8.142.427,00		3.885.993.882,00	
						1.249.838.403,00	hutang pph bulan desember,Dibayarkan PPH Bulan Desember 2015 RP 1.249.838.403
						1.421.817.750,00	Perkiraan TKD Perkiraan 20%
						1.194.565.492,00	Utang TKD Tahap 2 Desember 2015 belum dibayar TA 2015
		17.437.089,00	17.437.089,00	17.437.089,00		17.437.089,00	PNS Pemprov DKI Jakarta
		51.721.000,00		51.721.000,00		-	
		353.012.271,00		353.012.271,00		-	
			2.335.148,00			2.335.148,00	Pembayaran BPJS
17	SATPOL PP		6.095.909.934,00			6.095.909.934,00	Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		4.206.494.531,00			4.206.494.531,00	utang PPh bulan Desember 2015 PNS Dinas Dukcapil Prov. DKI Jakarta sesuai daftar: 540 PNS

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	Ket.
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
				PEMBAYARAN	KOREKSI		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI		1.362.892.388,00			1.362.892.388,00	
20	BADAN PEMBINAAN BUMD DAN PENANAMAN MODAL		325.873.372,00			325.873.372,00	Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja
21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21.077.285	6.460.435,00	21.077.285		6.460.435,00	
22	INSPEKTORAT		2.258.923.880,00			2.258.923.880,00	hutang pph bulan desember 2015,Pembayaran Kekurangan PPH Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bulan Desember 2015 RP. 2.258.923.880
23	BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		885.177.275,00			885.177.275,00	utang Kekurangan PPH TKD PNS BPLHD Provinsi DKI Jakarta Bulan Desember 2015 Jumlah Pegawai 195 Jiwa
24	DINAS KEBERSIHAN		7.541.900.826,00			7.541.900.826,00	
						413.272.157	Tunjagan Kinerja
						7.128.628.669	Tunjangan Khusus (PPh) / Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja
25	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		2.091.660.912,00			2.091.660.912,00	Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja
26	KANTOR PENGELOLA KAWASAN MONAS		377.419.042,00			377.419.042,00	UTANG PPH BULAN DESEMBER 2015 KANTOR PENGELOLA MONAS
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		910.399.297,00			910.399.297,00	
						896.923.297	Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja
						13.476.000	
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.963.725,00	7.926.768.854,00	2.963.725,00		7.926.768.854,00	
						1.180.000,00	an. Heri Rubianto
						7.925.588.854,00	dana Premi jkk dan jkm PNS Daerah bulan juli s/d Desember 2015
29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		9.130.244.066,00			9.130.244.066,00	Utang PPh Pasal 21 bulan Desember 2015 sebanyak 678 pegawai sesuai daftar listing
30	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN		1.601.965.302,00			1.601.965.302,00	
						1.556.799.735	Utang PPH 21 BLN DESEMBER 2015 PEG DISKOMINFOMAS ,PBYR KEKURANGAN PPH 21 BLN DESEMBER 2015 PEG DISKOMINFOMAS Rp. 1.556.799.735
						45.165.567	utang TKD
31	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi		269.405.362,00			269.405.362,00	utang PPH 21 BLN DESEMBER 2015
32	BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		7.792.422.055,00			7.792.422.055,00	utang PPh Bulan Desember 2015 BPTSP
33	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA		822.254.749,00			822.254.749,00	
34	Kelurahan Tanjung Priok - Jakut		2.280.000,00			2.280.000,00	
						1.680.000	kewajiban / utang belanja pegawai(non), berupa operasional petugas jumantik triwulan IV
						600.000	kewajiban / utang belanja pegawai(non), berupa operasional Posyandu Triwulan IV
35	Kota Administrasi Jakarta Barat		6.384.935.932,00			6.384.935.932,00	Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja
36	Kota Administrasi Jakarta Timur		6.925.677.498,00			6.925.677.498,00	Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja
37	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu		28.583.700,00			28.583.700,00	PNS Pemprov DKI Jakarta
38	Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan	16.486.890,00		16.486.890,00			PNS Pemprov DKI Jakarta
39	Sudin PU Tata Air - Jak Ut	716.850.000,00		716.850.000,00			PNS Pemprov DKI Jakarta
	JUMLAH	6.806.889.741,00	157.429.357.293,00	6.806.889.741,00	-	157.429.357.293,00	

**DAFTAR UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DI SKPD
PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2015**

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
B	Utang Kepada Pihak Ke Tiga							
1	Dinas Pekerjaan Umum (Dinas Bina Marga)	65.010.000				65.010.000		PT. Arga Bhuana Cipta Consultant
		58.719.000				58.719.000		PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati
		59.607.900				59.607.900		PT. Cinipta Triutama Jaya
		196.945.690				196.945.690		PT. Pahala Milik Abadi
		113.935.580				113.935.580		CV. Tri Cahaya Arta
		151.550.520				151.550.520		CV. Bonansa Naga Jaya
		51.909.000				51.909.000		CV. Madju Prima Jaya
		196.807.864				196.807.864		PT. Kinviodela Gumilang
		166.624.029				166.624.029		CV. Henpriz
		194.307.993				194.307.993		PT. Tamena Efando Berkarya
		196.035.873				196.035.873		PT. Philamelia Berkat
			49.148.000	49.148.000		-	PT. GIRI AWAS	Peningkatan Jalan di Wilayah Kecamatan Tamansari(Konsultan Perencanaan)
			49.296.500	49.296.500		-	PT. Marga Sarana Bhumi	Peningkatan Jalan di Wilayah Kecamatan Tambora (Konsultan Perencanaan)
			49.582.500	49.582.500		-	PT. INASA SAKHA KIRANA	Peningkatan Jalan di wilayah Kec. Grogol Petamburan (Konsultasi Perencanaan)
			49.368.000	49.368.000		-	PT. DELLASONTA MOULDING INTERNASIONAL	Peningkatan Jalan di wilayah Kecamatan Palmerah (Konsultan Perencanaan)
			49.566.000	49.566.000		-	PT.ANDRA CIPTA CONSULT	PeningkatanJalan di Wilayah Kec. Kebon Jeruk(Konsultan Perencanaan)
			49.192.000	49.192.000		-	PT. GEMPAR KONSULTAN	Peningkatan Jalan di Wilayah Kec. Kembangan(Konsultan Perencanaan)
			49.313.000	49.313.000		-	PT. DORESTI JAYA	Peningkatan Jalan di Wilayah Kecamatan Cengkareng(konsultan Perencanaan)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
			49.505.500	49.505.500		-	PT. YASMIN MEDIE	Peningkatan jalan di wilayah Kec. Kalideres (Konsultan Perencanaan)
			48.169.000	48.169.000		-	PT. MITRA DAERAH NUSANTARA	Peningkatan Trotoar wilayah Kec. Tamansari (Konsultan Perencanaan)
			48.191.000	48.191.000		-	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Pennkatan Trotoar wilayah Kec. Tambora (konsultan Perencanaan)
			47.861.000	47.861.000		-	PT. DARAKA SOLUSI TAMA	Peningkatan trotoar wil.Kec. Grogol petamburan(Konsultan Perencanaan)
			49.456.000	49.456.000		-	PT. NABELA KATYA ABADI	Peningkatan trotoar wil. Kec. Palmerah (Konsultan Perencanaan)
			47.954.500	47.954.500		-	PT. BINA INDEX CONSULT	Peningkatan trotoar wil. kec. KebonJeruk(Konsultan Perencanaan)
			48.169.000	48.169.000		-	PT. BINA INDEX CONSULT	Peningkatan trotoar wil. Kec. Kembangan (KonsultanPerencanaan)
			48.169.000	48.169.000		-	PT. PROPERINDO JASATAMA	Peningkatan trotoar wil. Kec. Cengkareng (konsultan Perencanaan)
			48.103.000	48.103.000		-	PT. PROPERINDO JASATAMA	PeningkatanTrotoar wil. Kec kalideres (Konsultan Perencanaan)
			49.197.500	49.197.500		-	PT. PRESTASI MULTI KREASI	Pemeliharaan berkala berat jalan kec. Tambora (konsultanPerencanaan)
			49.494.500	49.494.500		-	PT. ASIA JULI PRADANA	Pemeliharaan berkala berat jalan di kec. Tamansari (Konsultan Perencanaan)
			49.791.500	49.791.500		-	PT, BINA MITRA WAHANA	Pemeliharaan Berkala berat jalan di kec. Grogol petamburan (Konsultan Perencanaan)
			49.610.000	49.610.000		-	PT. BEKASI TATA JAYA	Pemeliharaan Berkala berat jalan di kec.Palmerah (Konsultan Perencanaan)
			49.395.500	49.395.500		-	PT. BINA MITRA WAHANA	Pemeliharaan Berkala berat jalan di kec.Kebon jeruk (Konsultan Perencanaan)
			48.889.500	48.889.500		-	PT. TABIR PRATAMA CONSULTANT	Pemeliharaan Berkala berat jalan di kec.Kembangan(Konsultan Perencanaan)
			49.109.500	49.109.500		-	PT. ALSYI PRATAMA CONSUL	Pemeliharaan Berkala berat jalan di kec. Cengkareng(Konsultan Perencanaan)
			48.889.500	48.889.500		-	PT. PRESTASI MULTI KREASI	Pemeliharaan Berkala berat jalan di kec.Kalideres (Konsultan Perencanaan)
			48.147.000	48.147.000		-	PT. MOMEN PRIMA TERTIER	Perbaikan Jalan Lingkungan / Orang/ Saluran Kec. Kembangan(Konsultan Perencanaan)
			48.917.000	48.917.000		-	PT. MOMEN PRIMA TERTIER	Perbaikan Jalan Lingkungan / Orang/ Saluran Kec. Kebon jerek(Konsultan Perencanaan)
			49.538.500	49.538.500		-	PT. KARSA PERSADA MULIA	Perbaikan Jalan Lingkungan / Orang/ Saluran Kec.cengkareng(Konsultan Perencanaan)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
			49.610.000	49.610.000		-	PT. KARSA PERSADA MULIA	Perbaikan Jalan Lingkungan / Orang/ Saluran Kec. Kalideres(Konsultan Perencanaan)
			48.147.000	48.147.000		-	PT. SEKEPAR BILIKON	Perbaikan Jalan Lingkungan / Orang/ Saluran Kec.grogol petamburan (Konsultan Perencanaan)
			48.147.000	48.147.000		-	PT.SEKEPAR BILIKON	Perbaikan Jalan Lingkungan / Orang/ Saluran Kec.Palmerah (Konsultan Perencanaan)
			48.147.000	48.147.000		-	PT. LOGARITMA PRIMA UTAMA	Perbaikan Jalan Lingkungan / Orang/ Saluran Kec. Tambora (Konsultan Perencanaan)
			48.917.000	48.917.000		-	PT. LOGARITMA PRIMA UTAMA	Perbaikan Jalan Lingkungan / Orang/ Saluran Kec. Tamansari(Konsultan Perencanaan)
			16.500.000	16.500.000		-	CV, CIPTA KARYA BERSAMA	Sewa Fotocopy selama 5 bulan
		60.082.875		60.082.875		-		PT. Dwi Eltis Konsultan
		39.013.425		39.013.425		-		PT. Daya Cipta Dianrancana
		68.259.070		68.259.070		-		PT. Jasakons Putra Utama
		14.795.000		14.795.000		-		PT. Delima Laksana Tata
		25.742.072		25.742.072		-		PT. Dwi Eltis Konsultan
		932.561.891		932.561.891		-		PT. Asa Jaya Amalia
		25.551.895		25.551.895		-		PT. Gihon Wahana Cipta
		36.811.000		36.811.000		-		PT. Dua Ribu Satu Pangripta
		36.811.000		36.811.000		-		PT. Dua Ribu Satu Pangripta
		1.617.103.500		1.617.103.500		-		PT. Asagolan Sejahtera
		36.894.000		36.894.000		-		PT. Kencana Biru Engineering
		36.894.000		36.894.000		-		PT. Kencana Biru Engineering
		1.367.292.000		1.367.292.000		-		PT. Asagolan Sejahtera
		1.366.470.000		1.366.470.000		-		PT. Rosa Lisca

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		36.729.000		36.729.000		-		PT. Abdi Nusa Kreasi
		36.729.000		36.729.000		-		PT. Abdi Nusa Kreasi
		36.663.000		36.663.000		-		PT. Miko Cordaniel
		36.663.000		36.663.000		-		PT. Miko Cordaniel
		875.688.000		875.688.000		-		PT. Asagolan Sejahtera
		1.192.524.125		1.192.524.125		-		PT. Wibawa Tata Rizky
		13.811.000		13.811.000		-		CV. Fortuna Konsulindo
		13.811.000		13.811.000		-		CV. Fortuna Konsulindo
		13.811.000		13.811.000		-		PT. Sava Bintang Padang
		13.811.000		13.811.000		-		PT. Sava Bintang Padang
		17.894.250		17.894.250		-		PT. Daffa Brother Cons
		18.321.000		18.321.000		-		PT. Abdi Nusa Kreasi
		18.438.750		18.438.750		-		PT. Sekepar Bilikon
		18.141.750		18.141.750		-		PT. Sugitec Indotama
		47.553.000		47.553.000		-		PT. Andira Karya Rusada
		47.982.000		47.982.000		-		PT. Bina Mitra Wahana
		48.378.000		48.378.000		-		PT. Sugitec Indotama
		47.718.000		47.718.000		-		PT. Daffa Brother Cons
		47.982.000		47.982.000		-		PT. Bina Mitra Wahana
		47.982.000		47.982.000		-		PT. Arencos Centra
		4.145.043.375		4.145.043.375		-		PT. Bangun Makmur Utama
		36.811.000		36.811.000		-		PT. Bagastama Persada
		13.811.000		13.811.000		-		PT. Bagastama Persada
		36.894.000		36.894.000		-		PT. Eltra Wiratma Konsultan
		36.894.000		36.894.000		-		PT. Eltra Wiratma Konsultan
		1.105.677.750		1.105.677.750		-		PT. Rosa Lisca
		36.300.000		36.300.000		-		PT. Arencos Sentra
		36.003.000		36.003.000		-		PT. Arencos Sentra
		291.398.250		291.398.250		-		PT. Tungkir Jaya
		13.811.000		13.811.000		-		PT. Giri Awas
		443.959.125		443.959.125		-		PT. Malaka Jaya Indah
		13.811.000		13.811.000		-		PT. Giri Awas
		49.203.000		49.203.000		-		PT. Marina Widya Karsa
		49.203.000		49.203.000		-		PT. Marina Widya Karsa
		190.984.000		190.984.000		-		CV. Tri Cahaya Artha

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		191.924.000		191.924.000		-		PT. Melia Utama Pande
		192.141.000		192.141.000		-		PT. Kapezta Multi Mandiri
		145.910.000		145.910.000		-		PT. Runggu Prima Jaya
		76.813.000		76.813.000		-		PT. Cahaya Erna Abadi
		192.141.000		192.141.000		-		PT. Hosindo Indah Perkasa
		168.850.000		168.850.000		-		PT. Runggu Prima Jaya
		44.000.000		44.000.000		-		CV. Empat Petulai
		44.000.000		44.000.000		-		PT. Sisarti Baksya Asasta
		48.000.000		48.000.000		-		CV. Empat Petulai
		44.000.000		44.000.000		-		PT. Sisarti Baksya Asasta
		46.000.000		46.000.000		-		PT. Marga Sarana Bhumi
		46.000.000		46.000.000		-		CV. Empat Petulai
		45.000.000		45.000.000		-		PT. Muara Consult
		48.000.000		48.000.000		-		PT. Marga Sarana Bhumi
		46.000.000		46.000.000		-		PT. Muara Consult
		46.000.000		46.000.000		-		PT. Marga Sarana Bhumi
		46.000.000		46.000.000		-		PT. Muara Consult
		46.000.000		46.000.000		-		PT. Sisarti Baksya Asasta

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		46.000.000		46.000.000		-		PT. Marga Sarana Bhumi
		46.000.000		46.000.000		-		PT. Muara Consult
		46.000.000		46.000.000		-		CV. Empat Petulai
		46.000.000		46.000.000		-		PT. Sisarti Baksya Asasta
	Sudin Bina Marga - JAKBAR		36.652.000			36.652.000	PT. CAKRA GATRA UTAMA	Peningkatan trotoar wilayah kec. Kebonjeruk (pengawasan)
			42.941.800			42.941.800	PT.JAGAD ALAM SEMESTA	Peningkatan trotoar wilayah Kec. Tambora
			49.412.000			49.412.000	PT. NABELA KARYA ABADI	Pemeliharaan berkala berat jalan di kec. Kalideres (pengawasan)
						-		
	Sudin Bina Marga - JAKPUS		948.554.138			948.554.138	PT. Probicindo Tunggal Taruna	Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Kebon Kacang 32/36/37/39, Administasi Negara, Kota Bumi, Martapura, Talang Betutu Ujung, Plaju, Sungai Gerong,Palembang, Batu Raja, Martapura Dalam, Tmn Kebon Sirih, Bendungan Jati Luhur, Petamburan)
			640.171.977			640.171.977	PT. Lampiri Djaya Abadi	Pemeliharaan Jalan (Layer Hotmix) Kec. Kemoyoran dan sawah besar (jl. Tembaga2, cempakasari 1, cempaka baru tengah 1/2 cempaka baru e3, taruna jaya 1/2, Flamboyan , lapangan pors 4/6, serdang baru 12, E Raya,
			1.519.630.788			1.519.630.788	PT. Probicindo Tunggal Taruna	Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Johar baru dan cempaka putih (jl. Tendean, johar baru4, johar baru utara 2/6, Galur Selatan, Rawa Tengah, Galur Jaya, Rawa Selatan1, Bacang, Sayuti, Pramuka Jayasari, Rawasari Barat 8/9, Cempaka putih timur 17, cempaka warna, cempaka Putih 2A/2B/2C/ 2D/2J/2H, Mardani3, Cempaka1)
			2.001.723.660			2.001.723.660	PT. Intan Sari Manik Perkasa	Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec. Senen (Jl. Kramat Sentiong Mesjid, Kramat Lontar, Kramat Sentiong, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1H, Kali Baru Barat, Kepu 6, Angsana, Kali Baru Timur 6, Kali Baru Timur 4)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
			1.378.824.875			1.378.824.875	CV. Arjuna Haranggaol Mandiri	Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Jl. Kota Bumi Ujung, Martapura 1/2, Dukuh Pinggir 3/4/5, Kebon Sayur, Kebon Melati, Lontar Sawah, Jati Bunder, Kebon Pala3, Kampung Bali 30/32/33)
						-		
	Sudin Bina Marga - JAKSEL		361.240.000	-		361.240.000	PT.SAPINDO ODORMA PUTRA	Perbaikan Jalan Lingkungan /Orang /SaluranKec. Pesanggrahan (Jasa Konsultan PekerjaanSaluran)
						-		
	Dinas Tata Air		60.082.875			60.082.875	PT. Dwi Eltis Konsultan	Penanggulangan sampah di rumah pompa pengendali banjir DKI Jakarta, Inlet Waduk Sunter III (PHB Layar), Inlet Waduk Tomang, Inlet Waduk Rumah Tomang Barat, Inlet Rumah Pompa Bendungan Melayu, Inlet Pompa Bimoli (Pengawasan)
			39.013.425			39.013.425	PT. Daya Cipta Dianrancana	Pengerukan Waduk Pluit (Pengawasan)
			68.259.070			68.259.070	PT. Jasakons Putra Utama	Pembangunan Pompa Waduk Pluit Tengah (Pengawasan)
			14.795.000			14.795.000	PT. Delima Laksana Tata	Peningkatan saluran Jl. Kapuk Poglar (penyelesaian Kampung Teko) (Pengawasan)
			25.742.072			25.742.072	PT. Dwi Eltis Konsultan	Perbaikan perkuatan tebing dan pengerukan Kali Utan Kayu (Pengawasan)
			932.561.891			932.561.891	PT. Asa Jaya Amalia	Pemeliharaan Situ-Situ dan Waduk Retensi di Provinsi DKI Jakarta (Fisik)
			25.551.895			25.551.895	PT. Gihon Wahana Cipta	Pemeliharaan Situ-Situ dan Waduk Retensi di Provinsi DKI Jakarta (Pengawasan)
			36.811.000			36.811.000	PT. Dua Ribu Satu Pangripta	Pengawasanpengerukan waduk Kelapa Dua Wetan & RW Dongkal
			36.811.000			36.811.000	PT. Dua Ribu Satu Pangripta	Pengawasan Dumping site
			1.617.103.500			1.617.103.500	PT. Asagolan Sejahtera	Pelaksanaan pengerukan situ Kodamar
			36.894.000			36.894.000	PT. Kencana Biru Engineering	Pengawasan Pengerukan Situ Kodamar & K. IKIP
			36.894.000			36.894.000	PT. Kencana Biru Engineering	Pengawasan Dumping site
			1.367.292.000			1.367.292.000	PT. Asagolan Sejahtera	Pelaksanaan pengerukan situ RW Dongkal
			1.366.470.000			1.366.470.000	PT. Rosa Lisca	Pelaksanaan pengerukan situ mangga bolong
			36.729.000			36.729.000	PT. Abdi Nusa Kreasi	Pengawasan Pengerukan situ mangga bolong
			36.729.000			36.729.000	PT. Abdi Nusa Kreasi	Pengawasan Dumping site
			36.663.000			36.663.000	PT. Miko Cordaniel	Pengawasan Pengerukan Kali Cipinang

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
			36.663.000			36.663.000	PT. Miko Cordaniel	Pengawasan Dumping site
			875.688.000			875.688.000	PT. Asagolan Sejahtera	Pelaksanaan pengerukan Kali IKIP
			1.192.524.125			1.192.524.125	PT. Wibawa Tata Rizky	Pelaksanaan pengerukan Kali Semongol
			13.811.000			13.811.000	CV. Fortuna Konsulindo	Pengawasan Pengerukan Kali Semongol
			13.811.000			13.811.000	CV. Fortuna Konsulindo	Pengawasan Dumping site
			13.811.000			13.811.000	PT. Sava Bintang Padang	Pengawasan Pengerukan Waduk Setiabudi Timur
			13.811.000			13.811.000	PT. Sava Bintang Padang	Pengawasan Dumping site
			17.894.250			17.894.250	PT. Daffa Brother Cons	Pengawasan Pengerukan waduk Tomang Barat
			18.321.000			18.321.000	PT. Abdi Nusa Kreasi	Pengawasan Dumping site
			18.438.750			18.438.750	PT. Sekepar Bilikon	Pengawasan Pengerukan Waduk Sunter Selatan
			18.141.750			18.141.750	PT. Sugitec Indotama	Pengawasan Dumping site
			47.553.000			47.553.000	PT. Andira Karya Rusada	Pengawasan Pengerukan Kali Sodetan Sekretaris
			47.982.000			47.982.000	PT. Bina Mitra Wahana	Pengawasan Dumping site
			48.378.000			48.378.000	PT. Sugitec Indotama	Pengawasan Pengerukan Kali Grogol
			47.718.000			47.718.000	PT. Daffa Brother Cons	Pengawasan Dumping site
			47.982.000			47.982.000	PT. Bina Mitra Wahana	Pengawasan Pengerukan Kali Mookervart
			47.982.000			47.982.000	PT. Arenco Centra	Pengawasan Dumping site
			4.145.043.375			4.145.043.375	PT. Bangun Makmur Utama	Pelaksanaan pengerukan Waduk Sunter Utara
			36.811.000			36.811.000	PT. Bagastama Persada	Pengawasan Pengerukan Waduk Sunter Utara
			13.811.000			13.811.000	PT. Bagastama Persada	Pengawasan Dumping site
			36.894.000			36.894.000	PT. Eltra Wiratma Konsultan	Pengawasan Pengerukan Kali Pademangan
			36.894.000			36.894.000	PT. Eltra Wiratma Konsultan	Pengawasan Dumping site
			1.105.677.750			1.105.677.750	PT. Rosa Lisca	Pelaksanaan pengerukan Kali Duri
			36.300.000			36.300.000	PT. Arenco Sentra	Pengawasan Pengerukan Kali Duri
			36.003.000			36.003.000	PT. Arenco Sentra	Pengawasan Dumping site
			291.398.250			291.398.250	PT. Tungkir Jaya	Pelaksanaan pengerukan Waduk Setiabudi Barat
			13.811.000			13.811.000	PT. Giri Awas	Pengawasan Dumping site
			443.959.125			443.959.125	PT. Malaka Jaya Indah	Pelaksanaan pengerukan Waduk Setiabudi Barat
			13.811.000			13.811.000	PT. Giri Awas	Pengawasan Dumping site
			49.203.000			49.203.000	PT. Marina Widya Karsa	Pengawasan Cakung Drain
			49.203.000			49.203.000	PT. Marina Widya Karsa	Pengawasan Dumping site
			190.984.000			190.984.000	CV. Tri Cahaya Artha	Sewa Dump Truk untuk Angkut Lumpur Buang ke Ancol Timur (PLTU) Hasil Pengerukan Waduk Pluit

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
			191.924.000			191.924.000	PT. Melia Utama Pande	Sewa Dump Truk untuk Angkut Lumpur Buang ke Ancol Timur (PLTU) Hasil Pengerukan Spill Way Waduk Pluit
			192.141.000			192.141.000	PT. Kapezta Multi Mandiri	Sewa Dump Truk untuk Angkut Lumpur Buang ke Ancol Timur (PLTU) Hasil Pengerukan Kali Pakin
			145.910.000			145.910.000	PT. Runggu Prima Jaya	Sewa Dump Truk untuk Angkut Lumpur Buang ke Ancol Timur (PLTU) Hasil Pengerukan Waduk Pluit
			76.813.000			76.813.000	PT. Cahaya Erna Abadi	Sewa Dump Truk untuk Angkut Lumpur Buang ke Ancol Timur (PLTU) Hasil Pengerukan Spill Way Waduk Pluit
			192.141.000			192.141.000	PT. Hosindo Indah Perkasa	Sewa Dump Truk untuk Angkut Lumpur Buang ke Ancol Timur (PLTU) Hasil Pengerukan Kali Pakin
			168.850.000			168.850.000	PT. Runggu Prima Jaya	Sewa Dump Truk untuk Angkut Lumpur Buang ke Ancol Timur (PLTU) Hasil Pengerukan Kali Angke Budha Suci
			44.000.000			44.000.000	CV. Empat Petulai	Embung di Jl. Kramat Jati
			44.000.000			44.000.000	PT. Sisarti Baksya Asasta	Embung di Jl. Sejuk
			48.000.000			48.000.000	CV. Empat Petulai	Embung di Jl. Penggilingan
			44.000.000			44.000.000	PT. Sisarti Baksya Asasta	Embung di Jl. Cendrawasih
			46.000.000			46.000.000	PT. Marga Sarana Bhumi	Embung di Kampung Bambu Kuning
			46.000.000			46.000.000	CV. Empat Petulai	Embung di Jl. Lebak Bulus III
			45.000.000			45.000.000	PT. Muara Consult	Pembebasan Tanah untuk Embung di Jl. Tanjung Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur (Kajian Teknis)
			48.000.000			48.000.000	PT. Marga Sarana Bhumi	Pembebasan Tanah Waduk di Jl. Lapangan Tembak Rt. 01/07 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur (Kajian Teknis)
			46.000.000			46.000.000	PT. Muara Consult	Pembebasan Tanah Untuk Embung di Jln. Penganten Ali 3 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur (Kajian Teknis)
			46.000.000			46.000.000	PT. Marga Sarana Bhumi	Pembebasan Tanah Untuk Embung diKel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan (Kajian Teknis)
			46.000.000			46.000.000	PT. Muara Consult	Pembebasan Lahan Untuk Waduk di RW 03 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur (Kajian Teknis)
			46.000.000			46.000.000	PT. Sisarti Baksya Asasta	Pembebasan Tanah Untuk Embung di Jl. Pondok Gede Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur
			46.000.000			46.000.000	PT. Marga Sarana Bhumi	Pembebasan Tanah Untuk Embung di Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
			46.000.000			46.000.000	PT. Muara Consult	Pembebasan Tanah Untuk Embung di Pinang Ranti Kel. Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur
			46.000.000			46.000.000	CV. Empat Petulai	Pembebasan Tanah Untuk Embung di Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur
			46.000.000			46.000.000	PT. Sisarti Baksya Asasta	Pembebasan Tanah Untuk Embung di Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat
			35.854.500			35.854.500	KJPP Kampianus roman, SE	Konsultan Appraisal Pembebasan Tanah Waduk Pondok Rangun III kel. Cilangkap, kec. Cipayung
			16.621.000			16.621.000	KJPP Kampianus roman, SE	Konsultan Appraisal Pembebasan Tanah Embung di jl. Cendrawasih, Kel. Cibubur kec. Ciracas
			115.719.000			115.719.000	CV. HASANAH	Pengadaan Papan tanda larangan dan Pagar di lokasi waduk kp. Rambutan 1
			38.659.000			38.659.000	CV. SANTIKA JAYA ABADI	Pengadaan papan tanda larangan dan Pagar di lokasi waduk Lebak Bulus
			195.140.000			195.140.000	PT. PERMATA ELANG SAKTI	Service Berat Pompa (service berat pompa untuk perbaikan pompa gedung 1 pompa sunter utara)
			88.218.000			88.218.000	PT.ABDIKA KREASI MANDIRI	1.03.08.042 Peninggian Lantai rumah trafo pompa gate poglar
			118.315.000			118.315.000	CV. YUAFAMA MANDIRI	1.03.08.039 service berat pompa (service berat pompa untuk perbaikan pompa no-2 dan pompa apung di pompa waduk grogol)
			599.279.600			599.279.600	PT. MELIA HUTAMA PANDE	1.03.08.021 Pengadaan bahan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan sarana dan prasaran infrastruktur Darainase Aliran Barat
						-		
3	Sudin PU Jalan Jakarta Selatan	196.581.280		196.581.280		-		CV. Arjuna Haranggaol Mandiri
						-		
4	Sudin PU Jalan Jakarta Pusat	948.554.138		948.554.138		-		PT. Probicindo Tunggal Taruna
		640.171.977		640.171.977		-		PT. Paesa Pasindo Engineering
		1.519.630.788		1.519.630.788		-		PT. Lampiri Djaya Abadi

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		1.378.824.875		1.378.824.875		-		PT. Probicindo Tunggal Taruna
		2.001.723.660		2.001.723.660		-		PT. Intan Sari Manik Perkasa
5	Sudin PU Tata Air Jakarta Timur	48.344.178				48.344.178		PT. Aksa Lestari Sejati
		119.524.356				119.524.356		CV. Jadi Jaya Bersama
		223.214.093				223.214.093		CV. Fortito Barito
		59.729.468				59.729.468		PT. Artaguna Mandiri
		226.276.875				226.276.875		PT. Jabat Jaya Utama
		50.140.140				50.140.140		CV. Mitra Pahae
		72.785.962				72.785.962		CV. Putra Siampudan
		105.913.552				105.913.552		PT. Ciamossad Irani Prima
		395.413.978				395.413.978		PT. Lampung Tegar Cemerlang
		148.908.881				148.908.881		PT. Lampung Tegar Cemerlang
		35.189.722				35.189.722		PT. Gihon Wahana Cipta
		11.539.299				11.539.299		PT. Kencana Biru Engineering
		196.585.306				196.585.306		PT. KARANG UNARANG JAYA

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		5.565.409				5.565.409		PT. Pratiwi Adhiguna Konsultan
			178.190.064			178.190.064	1.877.321.283	CV. MITRA ABADI SENTOSA
						-		
8	Dinas Perhubungan	3.600.000				3.600.000		Dinas Pekerjaan Umum
		3.600.000				3.600.000		Dinas Pekerjaan Umum
		1.210.000				1.210.000		PT. Andalusia Konsulindo
		1.950.000				1.950.000		Dinas Pekerjaan Umum
		50.000.000				50.000.000		Dinas Tata Ruang
		3.600.000				3.600.000		Dinas Pekerjaan Umum
		50.000.000				50.000.000		Sugeng W,M.Widigdo & Rekan
		50.000.000				50.000.000		Sugeng W,M.Widigdo & Rekan
		12.364.000				12.364.000		PT. Alfriz Auliatama
		24.519.000				24.519.000		CV. Galuh
		12.364.000				12.364.000		PT. Andalusia Konsulindo
		29.305.500				29.305.500		CV. Cipta Sukses Raya
		38.875.375				38.875.375		PT. Hardja Moekti Consultant
		27.014.250				27.014.250		PT. Bahana Nusantara
9	UPT. Terminal Angkutan Jalan	998.136.650		998.136.650		-		PT. Idee Murni
		27.027.000		27.027.000		-		PT. Alfriz Auliatama

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
			11.806.000.000	5.962.030.000		5.843.970.000	PT. SARTONIA AGUNG	Penyelesaian Revitalisasi TB Klender
			146.300.000	73.881.500		72.418.500	PT. BUMI MADANI	Pengawasan Penyelesaian Revitalisasi TB. Klender
			143.660.000			143.660.000	CV. APIK KARYA	Pengawasan Penyelesaian Revitalisasi TB. Rawamangun
	UP. Angkutan Perairan dan Kepelabuhan		59.166.000			59.166.000	PT. Sae Petroleum Indonesia	Belanja Bahan Bakar Minyak Gas
						-		
10	UP. Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor	9.454.500		9.454.500		-		PT. Herpes Pertoma Mulia
		18.591.100		18.591.100		-		PT. Saritama Purnama
11	Sudin Pendidikan II - JAKUT		49.183.000			49.183.000	PT. CENTRUM CIKINI CREASI	Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan 007/ Perawatan Berat Gedung SDN CILINCING 06/12
13	Dinas Sosial		36.471.000			36.471.000	PT. ADHIKARA MITRACIPTA	Belanja Jasa Konsultasi pengawasan Rehab Panti Sosial Bina Insani (PSBI) Bangun Daya 1
14	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan		105.602.550			105.602.550	CV. PAGA RAYA	Penanganan Jaminian Pengujian Mutu
			24.915.000			24.915.000	CV. SUNDUNG DILANGIT	Penanganan Jaminian Pengujian Mutu
			14.000.000			14.000.000	PT. KINGLAB INDONESIA	Pengadaan Sarana Prasarana
16	Sudin Kesehatan Jaktim	80.355.000		80.355.000		-	PT. PANCORAN TIRTA SIUSA	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan Mekanikal El
			67.458.372	67.458.372		-	PT AETRA AIR	BELANJA AIR
			15.240.000			15.240.000	PT. HUDA TATA SARANA	NENJA Konsultasi Perencanaan
17	Sudin Kesehatan - Jakbar	-	52.822.000			52.822.000	CV. ANUGERAH MULTI KREASI	SPM sudah diinput SKPD , Berkas terselip di KASDA tidak ada tanda terima dan Tidak tercatat di BKU
	Kelurahan Semper Timur - Jakut		96.602.000			96.602.000	SALMI AZIS	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan PPSU Kel. Semper Timur
18	Kecamatan Kalideres - Jakarta Barat		107.220.872			107.220.872	CV. MARSINDO CEMERLANG	1.20.32 Program KebijakanPengelolaan keuangan dan Aset Daerah, 045. Perawatan Jalan . Jl. Gang utama Rw 01. Kel seman
19	Puskesmas Kec. Johar Baru - Jakpus	239.875.845		239.875.845		-		PT. Zalfa Mandiri
20	Dinas Pendidikan	45.349.507				45.349.507		PT Rendi Narumiris Jaya

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		48.437.440				48.437.440		PT Citra Abadi Persada
		32.098.740				32.098.740		CV Alpin Sejahtera Sentosa
		32.400.500				32.400.500		CV Kasih Sinar Abadi
		38.824.360				38.824.360		PT Borisdo Jaya
		46.340.420				46.340.420		PT Mena Rohipasibrave
		57.323.185				57.323.185		PT Solusi Datama Tafuji
		31.500.400				31.500.400		PT Sriayu Multi Kreasi
		32.570.000				32.570.000		CV Panior Girestarti
		38.890.375				38.890.375		CV Feradi Rejeki
		28.525.000				28.525.000		CV Mega Surya Abadi
		38.243.212				38.243.212		CV Rapina Rejeki
		54.750.000				54.750.000		PT Anpridis Morangta
		54.950.000				54.950.000		PT Reva Mustika Karya
		44.911.500				44.911.500		CV Achmad Jaya
		43.246.155				43.246.155		CV Gok Uli Rejeki
		40.621.500				40.621.500		CV Charissa Sejati
		44.804.250				44.804.250		PT Abrooro Haya
		48.930.623				48.930.623		PT Surya Menara Indah
		22.132.815				22.132.815		CV Wannu Star
		53.500.000				53.500.000		CV Lima Putri Jaya
		47.745.727				47.745.727		PT Revalino Agung Pratama
		69.516.960				69.516.960		PT Karunia Lautan Semesta Alam
		26.019.000				26.019.000		CV Anugerah Indah Maha Karya
		69.975.000				69.975.000		PT Bintang Jaya Kreasi
		115.432.000				115.432.000		PT Bintang Jaya Kreasi
		66.293.190				66.293.190		PT Karya Mavoli
		68.820.000				68.820.000		PT Genta Cipta Abadi
		3.139.854.300		3.139.854.300		-		CV. Kencana Pratama
20	Kelurahan Jatinegara - Jaktim		2.249.100			2.249.100	BPJS	BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 70 Orang PPSU Bulan Desember 2015

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		-				-		CV. Alvin Sejahtra Sentosa
		-				-		PT. Martua Jaya Megah
21	Dinas Pelayanan Pajak	-	334.664.330			334.664.330		
		2.197.283		2.197.283				PT. Medco Saran Kalibaru
23	Dinas Perumahan	28.196.844		28.196.844		-		PT. Lesindo Utama Sakti
		150.032.300		150.032.300		-		PT. Elite Permai Metal Work
		394.868.100		394.868.100		-		PT. Karya Mentari Seroja
			2.567.842.040			2.567.842.040	PT. BANGUN KHARISMA PRIMA	Pembangunan Mess dan GOR TNI AU di Halim (Fisik)
			17.851.100			17.851.100	PT. WAHANA CIPTA BANGUN WISMA	PembangunanMess dan GOR TNI AU di Halim (Pengawasan)
			4.113.500.000			4.113.500.000	PT.AGUNG SERBA TULEN	Pembangunan Gedung Pemda Daan Mogot Jakarta Barat (Fisik)
			31.618.125			31.618.125	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Pembangunan Gedung Pemda Daan Mogot Jakarta Barat (Pengawasan)
			602.455.600			602.455.600	PT.HALAHATI NAPOSOBULUNG	Rehab Asrama AURI Halim Perdana Kusuma (Fisik)
			7.570.350			7.570.350	PT. ROHIM KHOIRUL CIPTA SENTOSA	Rehab Asrama AURI Halim Perdana Kusuma (Pengawasan)
			4.730.000.000			4.730.000.000	PT. KARTIKA EKAYASA	Pembangunan Gedung Kantor UPPD Ciracas (Fisik)
			84.397.500			84.397.500	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Pembangunan Gedung Kantor UPPD Ciracas (Pengawasan)
			1.940.673.500			1.940.673.500	PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG	Pembangunan Gedung Kantor UPPD Kec. Mampang Prapatan (Fisik)
			38.937.250			38.937.250	PT. SEWUN INDO KONSULTAN	Pembangunan Gedung Kantor UPPD kec. Mampang Prapatan (Pengawasan)
			252.170.504			252.170.504	PT.ERA BANGUN JAYA ABADI	Pembangunan Gedung KPUD Jakarta Utara (Fisik)
			8.084.175			8.084.175	PT.GALIH KARSA UTAMA	Pembangunan Gedung KPUD Jakarta Utara (Pengawasan)
			7.156.771.100			7.156.771.100	PT.TOTALINDO EKA PERSADA	Pembangunan Masjid Raya Jakarta (Fisik)
			46.572.500			46.572.500	PT.ELSADAI SERVO CONS	Pembangunan Masjid Raya Jakarta (pengawasan)
			49.071.000			49.071.000	4 CIPTA KOSULTAN	Rehab Total Kantor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pengawasan)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
			52.151.000			52.151.000	4 CIPTA KONSULTAN	Perluasan Gedung PMI Jakarta Timur
			37.686.000			37.686.000	KJPP DAMIANUS AMBUR & REKAN	Belanja Jasa Konsultasi Penilai/ Appraisal Muara Baru, Kel, Penjaringan, Kec. Penjaringan- Jakarta Utara
			47.404.500			47.404.500	KJPP DAMIANUS AMBUR & REKAN	Belanja Jasa Konsultasi Penilai/ Appraisal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rusun di Kel. Cengkareng Barat, kec. Cengkareng - Jakarta Barat
			1.453.600.000			1.453.600.000	PT. DAKSIANA PERSADA (KSO)-PT.ROSA LISCA	Pematangan Tanah dan Turap Lokasi Rusun Rawa Bebek - Jakarta Timur
			24.219.408			24.219.408	PT. SEWUN INDO KONSULTAN	Pematangan Tanah dan Turap Lokasi Rusun Rawa Bebek - Jakarta Timur
							23.262.575.652	
24	Sudin Perumahan Jakarta Timur	48.623.972		48.623.972		-		PT. Visicom
		95.000.000		95.000.000		-		CV. Tira Kurnia Mandiri
		69.359.942		69.359.942		-		PT. Mafir Sentosa Lestari
						-		
25	Sudin Perumahan Jakarta Barat	306.180.140		306.180.140		-		PT. Herlin Lariamegah
		188.214.279		188.214.279		-		PT. Suminta Rejeki Jaya Persada
		189.437.975		189.437.975		-		CV. Nurani Cipta Mandiri
		187.089.674		187.089.674		-		CV. Putra Karya
		188.855.301		188.855.301		-		PT. Vidora Triatma
		158.289.423		158.289.423		-		PT. Rajimmy Bersaudara
		168.535.775		168.535.775		-		CV. Gunung Ardilawet Abadi
		181.597.905		181.597.905		-		PT. Patupa Bahana
		184.528.668		184.528.668		-		CV. Ditha Kasih Mandiri
		167.036.814		167.036.814		-		CV. Pelita Bintang Timur
		191.092.924		191.092.924		-		CV. Gunung Berlian

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		190.944.017		190.944.017		-		PT. Wira Basa
26	Sudin Perumahan Jakarta Selatan	135.194.045		135.194.045		-		CV. Bonansa Naga Jaya
		166.088.418		166.088.418		-		CV. Rezky Utama
		152.565.158		152.565.158		-		CV. Artha Prima Indah
		173.256.348		173.256.348		-		CV. Mega Surya Abadi
		177.600.000		177.600.000		-		PT. Rajimmy Bersaudara
		166.280.764		166.280.764		-		PT. Philamelia Berkat
		186.975.000		186.975.000		-		CV. Pelita Bintang Timur
		175.078.000		175.078.000		-		PT. Mitra Niaga Abadi
		83.283.000		83.283.000		-		CV. Luluhon Rejeki
32	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan	93.489.000				93.489.000	PT. GIANT SOLID MANDIRI	Pengadaan Audio VisualKtr. Walikota Jakarta Selatan
		114.444.000				114.444.000	PT.SINAR PROTEKSINDO	Perawatan AC. Gd, Sayap Belakang Ktr. Walikota
		957.495.000		957.495.000		-	PT. BUMI PERMAI RAYA	Pemb. Gd. Ktr. Lurah Melawai TerminIV
	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III		224.509.197			224.509.197	PT. FITRI Utama Mandiri	Pelaksanaan Fisik Perbaikan Rumah Susun Cakung Barat Blok C dan D
	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat		86.657.650			86.657.650	CV. GRAND PERMATA MULANA	050. Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Taman Sudin Pertamanan dan Pemakausdur Kecil
			119.843.500			119.843.500	CV. WAHANA PRIMA ABADI	050. Pemeliharaan / Perbaikan Rutin Taman sudin dan Pemakaman Jakarta Pusat- Penyulaman Tanaman Hias di Jalur Hijau Tepian Air jl. Guning Sahari (jl. Kartini sd. Rel Kereta Api)
	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan		81.334.880			81.334.880	CV. HASANAH	Pemeliharaan / Perbaikan Rutin sarana dan Prasarana Taman di Wilayah Jakarta selatan sesuai dengan SPK no. 1975/-1.795.22 Tanggal, 29 April 2015
			36.033.088			36.033.088	CV. HASANAH	Pemeliharaan /Perbaikan Rutun Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan sesuai dengan SPK No. 2615/1.795.22 tanggal 6 mei 2015

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
33	Dinas Kebersihan	174.376.125		174.376.125		-		CV. Utama Gabe Mandiri
		265.663.354		265.663.354		-		KJPP Immanuel Johnny & Rekan
34	Pusat Pelatihan Kerja Jakarta Selatan	29.964.000		29.964.000		-		PT. Heleria Karya Persada
		37.455.000		37.455.000		-		PT. Indo Security Service
35	Pusat Pelatihan Kerja Jakarta Barat	4.297.495.000		4.297.495.000		-		PT. Buiran Maligas Jaya
36	Kecamatan Kalideres	107.220.872		107.220.872		-		CV. Marsindo Cemerlang
37	Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional	3.239.977.302		3.239.977.302		-		PT. Garuda Abdi Satyatama
38	Biro Umum	119.087.736		119.087.736		-		PT. Cipta Kreasi Bangsa
		35.890.248		35.890.248		-		PT. Guci Emas Pratama
		94.968.324				94.968.324		PT. Sinmar Eklesia Sejahtera
		105.382.726		105.382.726		-		CV. Putra Pede
		114.975.387		114.975.387		-		PT. Sinmar Eklesia Sejahtera
		88.740.280				88.740.280		PT. Sinmar Eklesia Sejahtera
		100.931.670				100.931.670		PT. Solusi Jaya Utama
		192.958.997				192.958.997		PT. Arimanda Persada
		47.469.044				47.469.044		PT. Hosea Jaya Lestari
		36.180.100				36.180.100		PT. Solusi Jaya Utama
		38.091.361				38.091.361		PT. Media Solusindo Pratama
		85.162.000				85.162.000		PT. Media Solusindo Pratama
		180.531.126				180.531.126		PT. Media Solusindo Pratama
			1.377.092.624,00	1.377.092.624		-	BPJS	Iuran Wajib BPJS Tahun 2014 (Bag.Keuangan Setda)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
39	Dinas Koperasi UMKM dan Pedagangan	44.495.000				44.495.000		Kantor jasa penilai Febriman Siregar & Rekan
		44.495.000				44.495.000		Kantor jasa penilai Publik Tri Kurniawan, Zarifin, Pardomuan,Nazir & Rekan
			2.335.148			2.335.148	BPJS	
			751.186.125			751.186.125		Utang Pesangon Pegawai Eks UPDB PEMK Tahun 2015
			14.650.000			14.650.000		Utang Jasa Akuntan Penyusun Laporan Penutup UPDB PEMK per 31 Des 2015
40	Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah	158.400.000				158.400.000		PT. Metro Security Delta 311
		143.902.000		143.902.000		-		PT. Putra Sugapa Bersaudara
		29.960.000		29.960.000		-		CV. Ganesa Putra Metro
		249.414.000		249.414.000		-		PT. Torpana Nusantara Indah
		181.823.400		181.823.400		-		CV. Bina Kreasi Mandiri
		157.850.000				157.850.000		PT. Metro Security Delta 311
		98.014.412		98.014.412		-		PT. Ady Karya Raya Nusantara
		186.457.776		186.457.776		-		CV. Asiamas Adhi Persada
		186.457.776		186.457.776		-		PT. Arira Sanggigi Raya
		131.277.435		131.277.435		-		CV. Setia Bhakti
		186.457.776		186.457.776		-		PT. Aliani Setia Abadi
		173.575.711		173.575.711		-		PT. Yanti Record
		186.535.193		186.535.193		-		CV. Billy Utama
		186.402.584		186.402.584		-		PT.Anugrah Putri Abadi Kinasih

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		186.488.830		186.488.830		-		CV. Naura Pratama Mandiri
		45.950.000				45.950.000		Tenaga Ahli BPKP
		55.775.000				55.775.000		Tenaga Ahli BPKP
		13.200.000		13.200.000		-		CV. R Plus
		22.000.000		22.000.000		-		CV. Putri Inovasi
		30.800.000		30.800.000		-		CV. Marsinar
		13.200.000		13.200.000		-		CV. Eka Cita
		49.500.000		49.500.000		-		Tenaga Ahli
	Badan Pelayanan Satu Pintu		2.056.800			2.056.800	PT. Setiawan Kumalagiri	Belanja sewa mesin foto kopi kelurahan di wilayah kecamatan Cempaka Putih
			15.345.000			15.345.000	PT. Setiawan Kumalagiri	Belanja sewa mesin foto kopi kecamatan Kemayoran
			23.760.000			23.760.000	PT. Mahaza Mitra Solusi	Belanja sewa mesin foto kopi kelurahan di wilayah kecamatan kepulauan seribu selatan
	-		7.141.200			7.141.200	PT. Setiawan Kumalagiri	Belanja sewa mesin foto kopi kecamatan Senen
			7.500.000			7.500.000	PT. Setiawan Kumalagiri	Belanja sewa mesin foto kopi kelurahan di wilayah kecamatan Cempaka Putih
			28.670.400			28.670.400	PT. Setiawan Kumalagiri	Belanja sewa mesin foto kopi BPTSP
			29.000.400			29.000.400	PT. Kurnia Agung Rezeki	Belanja modal alat pendingin kecamatan Tebet
			19.874.580			19.874.580	CV. Manggala Jaya Mandiri	Belanja alat tulis kantor kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
			216.150			216.150	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kecamatan Kembangan
			14.520.000			14.520.000	PT. Mahaza Mitra Solusi	Belanja sewa mesin foto kopi Kantor PTSP Jakarta Timur
			12.546.600			12.546.600	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kecamatan Kebayoran Ba
			47.960.000			47.960.000	CV. Manggala Jaya Mandiri	Belanja alat tulis kantor kelurahan di wilayah kecamatan Pasar Rebo
			7.920.000			7.920.000	PT. Mahaza Mitra Solusi	Belanja sewa mesin foto kopi kecamatan cilincing
			50.920.320			50.920.320	CV. Manggala Jaya Mandiri	Belanja alat tulis kantor kecamatan Matraman
			3.109.046			3.109.046	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kelurahan di wilayah kecamatan menteng
			215.600			215.600	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kecamatan Cengkareng

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2014	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2015			UTANG PER 31 DESEMBER 2015	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
			746.454			746.454	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kelurahan di wilayah kecamatan menteng
			22.088.000			22.088.000	PT. Kurnia Agung Rezeki	Belanja modal alat pendingin kelurahan di wilayah kecamatan Pesanggrahan
			28.891.500			28.891.500	CV. Richardo	Belanja modal filling kabinet kelurahan di wilayah kecamatan Sawah Besar
			7.920.000			7.920.000	PT. Mahaza Mitra Solusi	Belanja sewa mesin foto kopi kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
			1.740.000			1.740.000	PT. Bhinneka Mentaridimensi	Belanja alat tulis kantor kantor PTSP Kep. Seribu
			9.818.600			9.818.600	PT. Kurnia Agung Rezeki	Belanja modal alat pendingin kelurahan di wilayah kecamatan Johar Baru
			308.000			308.000	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kecamatan Grogol Petamburan
			23.067.000			23.067.000	PT. Kurnia Agung Rezeki	Belanja alat pendingin kecamatan Pancoran
			67.806.200			67.806.200	CV. Manggala Jaya Mandiri	Belanja alat tulis kantor kelurahan di wilayah kecamatan Pulo Gadung
			8.536.000			8.536.000	CV. Rhema Makmur	Belanja alat tulis kantor kecamatan Mampang Prapatan
			14.520.000			14.520.000	PT. Dekana Langit Biru	Belanja modal papan visual kantor PTSP Jakarta Barat
			4.088.700			4.088.700	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kecamatan sawah besar
						-		
41	BLUD Puskesmas Kecamatan Kramat Jati	4.718.047		4.718.047				PT. Arah Environmental Indonesia
42	Sekrertariat Daerah	1.377.092.624		1.377.092.624				BPJS Kesehatan
JUMLAH B		51.704.008.153	65.920.193.143	53.003.082.424	-	63.239.308.201		

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA
PER 31 DESEMBER 2015

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Hak Minoritas	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	(Dalam Ribuan Rupiah)		
																	Kepemilikan Daerah		
																	Cost Method	Equity Method	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (16 X 17)	20 (18 + 19)
1	Bidang Perbankan																		
1.	PT Bank DKI	Audited 2015	12.541.060.000	25.845.346.000	251.201.000	38.637.607.000	32.033.111.000	718.665.000	32.751.776.000	-	3.931.159.000	1.000	547.291.000	1.407.380.000	5.885.831.000	99,97%		5.884.333.775	5.884.333.775
	Sub Total 1		12.541.060.000	25.845.346.000	251.201.000	38.637.607.000	32.033.111.000	718.665.000	32.751.776.000	-	3.931.159.000	1.000	547.291.000	1.407.380.000	5.885.831.000		-	5.884.333.775	5.884.333.775
2	Bidang Asuransi																		
1.	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2015	1.883.011.361	189.178.648	2.978.645	2.075.168.654	1.403.288.954	67.281.676	1.470.570.630		199.040.000	-	(1.141.986)	378.642.190	576.540.204	4,45%	8.680.000		8.680.000
	Sub Total 2		1.883.011.361	189.178.648	2.978.645	2.075.168.654	1.403.288.954	67.281.676	1.470.570.630	-	199.040.000	-	(1.141.986)	378.642.190	576.540.204		8.680.000	-	8.680.000
3	Bidang Konstruksi																		
1.	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	Unaudited 2015	3.562.359.724	1.857.346.988	-	5.419.706.712	395.236.209	388.145.867	783.382.076	312.990.127	2.246.730.231	1.500.000.000	-	576.604.277	4.323.334.508	99,98%		4.322.661.011	4.322.661.011
2.	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2015	5.742.741.869	7.342.912.911	-	13.085.654.780	4.661.351.533	1.212.214.347	5.873.565.880		3.117.000	117.594.956	373.996.198	4.510.603.270	5.005.311.424	38,80%		1.942.067.256	1.942.067.256
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	Audited 2015	477.291.053	842.608.834	-	1.319.899.887	94.605.840	209.789.815	304.395.654		939.002.771	-	-	107.055.290	1.046.058.060	100,00%		1.046.058.060	1.046.058.060
	Sub Total 3		9.782.392.646	10.042.868.733	-	19.825.261.379	5.151.193.582	1.810.150.028	6.961.343.610	312.990.127	3.188.850.002	1.617.594.956	373.996.198	5.194.262.837	10.374.703.993		-	7.310.786.327	7.310.786.327
4	Bidang Jasa Lainnya																		
1.	PT Jakarta International Expo	Audited 2007	19.597.963	1.317.961.793	-	1.337.559.756	43.977.931	1.003.234.399	1.047.212.329		300.000.000	-	-	(9.652.573)	290.347.427	13,14%	39.375.000		39.375.000
2.	PDAM Jaya	Unaudited 2015	688.286.936	149.762.604	-	838.049.540	971.396.041	1.088.854.413	2.060.250.454		323.364.100	-	-	(1.545.565.014)	(1.222.200.914)	100,00%			-
3.	PD PAL Jaya	Unaudited 2015	390.356.930	149.256.740	1.042.446	540.656.116	16.340.320	8.143.514	24.483.835		447.752.402	-	-	68.423.037	516.175.439	100,00%		516.175.439	516.175.439
4.	PD Pasar Jaya	Audited 2015	1.033.194.368	3.363.273.068	-	4.396.467.436	378.609.728	3.541.715.850	3.920.325.578		497.175.929	6.383.572	(70.055.088)	76.095.375	509.599.789	100,00%		509.599.789	509.599.789
5.	PT Panjin Kredit Daerah	Audited 2015	100.823.487	365.290	-	101.188.777	355.506	-	355.506		100.000.000	-	833.271	-	100.833.271	95,00%		95.791.608	95.791.608
	Sub Total 4		2.232.259.685	4.980.619.495	1.042.446	7.213.921.626	1.410.679.525	5.641.948.176	7.052.627.701	-	1.668.292.431	6.383.572	(69.221.817)	(1.410.699.175)	194.755.012		39.375.000	1.121.566.835	1.160.941.835
5	Bidang Perdagangan																		
1.	PT Food Station Tipinang	Unaudited 2015	88.165.174	36.641.981	1.136.149	125.943.304	33.596.657	23.234.252	56.830.909		300.000	47.500.000	-	18.139.048	65.939.048	74,67%		49.234.489	49.234.489
2.	PD Dharma Jaya	Unaudited 2015	62.829.979	45.689.030		108.519.009	33.518.573	4.579.378	38.097.951		95.048.793	-	18.373.233	(42.989.111)	70.432.916	100,00%		70.432.916	70.432.916
	Sub Total 5		150.995.154	82.331.011	1.136.149	234.462.314	67.115.230	27.813.630	94.928.860	-	95.348.793	47.500.000	18.373.233	(24.850.063)	136.371.964		-	119.667.405	119.667.405
6	Bidang Pariwisata																		
1.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Audited 2015	613.108.865	2.517.068.246	-	3.130.177.111	519.711.023	821.928.327	1.341.639.350	106.530.066	400.000.000	36.709.233		1.245.298.462	1.682.007.695	72,00%		1.211.045.541	1.211.045.541
2.	PT Jakarta Tourindo	Audited 2015	34.005.207	512.311.234	-	546.316.441	9.034.500	49.816.219	58.850.718		462.011.000	-	-	25.454.723	487.465.723	99,35%		484.300.436	484.300.436
3.	PT Grahasahari Survajaya	Audited 2012	15.127.244	328.529.635	-	343.656.879	127.627.509	67.394.810	195.022.319		48.870.000	592.242.796	-	(492.478.236)	148.634.560	8,08%	3.951.000		3.951.000
4.	PT Pakuan International	Audited 2010	820.579	37.187.456	3.149.640	41.157.675	374.485	1.923.279	2.297.764		50.000.000	236.600	2.039.534	(13.416.224)	38.859.910	1,94%	1.345.900		1.345.900
	Sub Total 6		663.061.896	3.395.096.570	3.149.640	4.061.308.106	656.747.516	941.062.634	1.597.810.151	106.530.066	960.881.000	629.188.629	2.039.534	764.858.725	2.356.967.888		5.296.900	1.695.345.977	1.700.642.877
7	Bidang Kawasan Industri																		
1.	PT Jakarta Industrial Estate Puloqadung	Audited 2015	206.385.508	179.551.679	-	385.937.187	57.661.011	4.676.692	62.337.704		200.000.000	-	(308.642)	123.908.125	323.599.483	50,00%	-	161.799.742	161.799.742
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2015	525.769.675	1.203.562.525	-	1.729.332.200	401.133.571	200.381.589	601.515.160		363.945.000	111.967.695	(13.540.307)	665.444.652	1.127.817.040	26,85%	209.692.695		209.692.695
	Sub Total 7		732.155.183	1.383.114.204	-	2.115.269.387	458.794.583	205.058.281	663.852.864	-	563.945.000	111.967.695	(13.848.949)	789.352.777	1.451.416.523		209.692.695	161.799.742	371.492.437
8	Bidang Angkutan Darat																		
1.	PT Ratax Armada	Unaudited 2014	135.826	3.385.949		3.521.775	253.635	5.322.734	5.576.369		5.500.000	-	-	(7.554.594)	(2.054.594)	28,00%	-	-	-
2.	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Audited 2015	395.307.527	3.768.693.061	-	4.164.000.588	201.743.135	201.996.561	403.739.696		1.943.785.000	2.015.224.950	1.125.765	(199.874.823)	3.760.260.892	99,97%	-	3.759.293.640	3.759.293.640
3.	PT Transportasi Jakarta	Audited 2015	1.481.866.122	100.679.999		1.582.546.121	87.729.231	3.277.084	91.006.316		360.000.000	1.050.000.000	75.012	81.464.793	1.491.539.805	99,36%	-	1.481.923.172	1.481.923.172
	Sub Total 8		395.443.353	3.772.079.010	-	4.167.522.363	289.726.001	210.596.380	500.322.381	-	2.309.285.000	3.065.224.950	1.200.777	(125.964.624)	5.249.746.103		-	5.241.216.811	5.241.216.811
9	Bidang Aneka Industri																		
1.	PT Delta Diakarta, Tbk	Audited 2015	902.006.833	136.315.083	-	1.038.321.916	140.419.495	4.828.094	145.247.589	3.066.052	16.013.181	19.015.656	-	811.526.592	846.555.429	26,25%	-	222.250.087	222.250.087
2.	PT Cemani Toka	Audited 2015	295.017.079	68.770.290		363.787.369	261.717.861	12.238.808	273.956.669		112.968.859	-	(2.869.839)	(20.268.320)	89.830.700	27,42%	27.059.360	-	27.059.360
	Sub Total 9		1.197.023.912	205.085.373	-	1.402.109.285	402.137.356	17.066.902	419.204.258	3.066.052	128.982.040	19.015.656	(2.869.839)	791.258.272	936.386.129		27.059.360	222.250.087	249.309.447
10	Bidang Rumah Sakit																		
1.	PT RS Haji Jakarta	Unaudited 2015	48.329.134	68.034.930	12.299.475	128.663.538	15.717.828	59.597.454	75.315.282		100.308.278	-	-	(46.960.021)	53.348.257	51,00%	51.157.222	-	51.157.222
	Sub Total 10		48.329.134	68.034.930	12.299.475	128.663.538	15.717.828	59.597.454	75.315.282	-	100.308.278	-	-	(46.960.021)	53.348.257		51.157.222	-	51.157.222
	Total Seluruh Bidang Industri		29.625.732.322	49.963.753.973	271.807.356	79.861.293.651	41.888.511.574	9.699.240.162	51.587.751.736	422.586.246	13.146.091.545	5.496.876.458	855.818.152	7.717.280.917	27.216.067.072	-	341.261.177	21.756.966.960	22.098.228.137

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Setelah pajak
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
1	Bidang Perbankan								
1.	PT Bank DKI	Audited 2015	3.678.100.000	(1.454.832.000)	2.223.268.000	122.017.000	(2.003.031.000)	-	342.254.000
	Sub Total 1		3.678.100.000	(1.454.832.000)	2.223.268.000	122.017.000	(2.003.031.000)	-	342.254.000
2	Bidang Asuransi								
1.	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2015	1.831.256.161	(1.596.095.443)	235.160.718	1.919.559	(17.374.740)	(37.611.656)	182.093.881
	Sub Total 2		1.831.256.161	(1.596.095.443)	235.160.718	1.919.559	(17.374.740)	(37.611.656)	182.093.881
3	Bidang Konstruksi								
1.	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	Unaudited 2015	471.887.253	(378.362.060)	93.525.193	111.320.447	(156.276.817)	(43.248.656)	5.320.167
2.	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2015	2.244.102	(816.779)	1.427.323	148.340	(282.714)	(74.565)	1.218.384
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	Audited 2015	119.699.196	(12.450.988)	107.248.209	20.290.270	(45.652.879)	(2.553.195)	79.332.405
	Sub Total 3		593.830.552	(391.629.826)	202.200.726	131.759.057	(202.212.410)	(45.876.416)	85.870.956
4	Bidang Jasa Lainnya								
1.	PT Jakarta International Expo	Audited 2007	136.690.927	(127.448.089)	9.242.838	259.482	(8.501.489)		1.000.832
2.	PD AM Jaya	Unaudited 2015	2.613.664.721	(2.405.605.578)	208.059.144	58.499.716	(136.754.902)	(33.827.828)	95.976.130
3.	PD PAL Jaya	Unaudited 2015	55.990.120	(36.262.575)	19.727.546	20.344.555	(119.082)	(9.988.255)	29.964.764
4.	PD Pasar Jaya	Audited 2015	577.574.907	(107.535.114)	470.039.793	54.246.590	(415.890.123)	(24.751.434)	83.644.826
4.	PT Penjamin Kredit Daerah	Audited 2015	4.031.064	(3.236.492)	794.572	964	-	(5.878)	789.658
	Sub Total 4		3.387.951.740	(2.680.087.848)	707.863.892	133.351.308	(561.265.596)	(68.573.394)	211.376.210
5	Bidang Perdagangan								
1.	PT Food Station Tjipinang	Unaudited 2015	537.421.113	(526.675.852)	10.745.261	2.311.266	(1.801.044)	(2.057.807)	9.197.675
2.	PD Dharma Jaya	Unaudited 2015	2.828.034	(2.727.265)	100.769	265.828	(195.247)	-	171.350
	Sub Total 5		540.249.147	(529.403.117)	10.846.030	2.577.094	(1.996.291)	(2.057.807)	9.369.025
6	Bidang Pariwisata								
1.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Audited 2015	540.165.259	(119.719.453)	420.445.806	30.299.498	(72.145.533)	(89.179.850)	289.419.921
2.	PT Jakarta Tourisindo	Audited 2015	126.263.363	(123.856.649)	2.406.714	850.094	(395.378)	(1.511.594)	1.349.837
3.	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2012	29.471.298	(29.153.103)	318.195	-	(20.590.891)	(2.741.229)	(23.013.924)
4.	PT Pakuan International	Audited 2010	3.674.178	(5.243.660)	(1.569.482)	97.737	(57.106)	-	(1.528.851)
	Sub Total 6		699.574.098	(277.972.865)	421.601.233	31.247.329	(93.188.908)	(93.432.673)	266.226.982
7	Bidang Kawasan Industri								
1.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2015	131.879.950	(33.741.730)	98.138.221	19.329.610	(48.704.111)	(11.691.020)	57.072.700
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2015	235.328.355	(130.412.273)	104.916.082	3.529.281	(18.691.983)	(33.224.755)	56.528.626
	Sub Total 7		367.208.306	(164.154.003)	203.054.303	22.858.892	(67.396.094)	(44.915.775)	113.601.325
	Jumlah dipindahkan		11.098.170.004	(7.094.175.102)	4.003.994.902	445.730.239	(2.946.465.038)	(292.467.722)	1.210.792.380

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Setelah pajak
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
	Jumlah pindahan		11.098.170.004	(7.094.175.102)	4.003.994.902	445.730.239	(2.946.465.038)	(292.467.722)	1.210.792.380
8	Bidang Angkutan Darat								
1.	PT Ratax Armada	Unaudited 2014	1.591.567	(3.740.272)	(2.148.705)	97	-	-	(2.148.608)
2.	PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta	Audited 2015	-	(63.667.034)	(63.667.034)	18.829.278	(17.919.831)	-	(62.757.587)
3.	PT Transportasi Jakarta	Audited 2015	150.006.630	(58.178.279)	91.828.351	25.179.442	(867.436)	(21.940.128)	94.200.230
	Sub Total 8		151.598.197	(125.585.585)	26.012.612	44.008.818	(18.787.267)	(21.940.128)	29.294.034
9	Bidang Aneka Industri								
1.	PT Delta Djakarta, Tbk	Audited 2015	699.506.819	(233.153.268)	466.353.551	23.939.843	(240.095.652)	(58.152.543)	192.045.199
2.	PT Cemani Toka	Audited 2015	65.020.000	(49.051.137)	15.968.863	489.639	(4.211.295)	(3.590.629)	8.656.578
	Sub Total 9		764.526.819	(282.204.405)	482.322.414	24.429.482	(244.306.947)	(61.743.172)	200.701.777
10	Bidang Rumah Sakit								
1.	PT RS Haji Jakarta	Unaudited 2015	174.555.294	(187.964.351)	(13.409.057)	2.610.861	(319.147)	-	(11.117.343)
	Sub Total 10		174.555.294	(187.964.351)	(13.409.057)	2.610.861	(319.147)	-	(11.117.343)
	Total Seluruh Bidang Industri		12.188.850.313	(7.689.929.443)	4.498.920.871	516.779.400	(3.209.878.399)	(376.151.022)	1.429.670.849

DAFTAR LOKASI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) PER 31 DESEMBER 2015

NO	Kabupaten/ Kota	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	LUAS	CSR	PENDAMPING	PERUNTUKAN
LOKASI TAHAP I								
1	Jakarta Utara	Tanjung Priok	Sungai Bambu	Jl. Jati Raya Rw 06	3.838	PT. PEMBANGUNAN JAYA dan PT. TMMIN	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA	
2	Jakarta Selatan	Cilandak	Gandaria Selatan	Jl. Bahari Raya Rt 009 Rw 07	1.000	PT. PEMBANGUNAN JAYA	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA	
3	Jakarta Pusat	Gambir	Cideng	Jl. Makian No. 1 Rt 002/ 005	2.583	PT. PEMBANGUNAN JAYA	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA	
4	Jakarta Barat	Kembangan	Kembangan Utara	Jl. Gang Kompas Rt 001 Rw 01	3.250	PT. GAJAH TUNGGAL	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA	
5	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan	Untung Jawa	Pulau Untung Jawa	2.204	PT. PEMBANGUNAN JAYA	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA	
6	Jakarta Timur	Kramat Jati	Cililitan	Jl. Buluh Rt 10 Rw 16	2.642	PT. PEMBANGUNAN JAYA	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA	
LOKASI TAHAP II								
1	Jakarta Pusat	Gambir	Petojo Selatan	Jl Taman Tanah Abang 3	1.054	PT. AGUNG SEDAYU	UNV INDONESIA	KDB 60%
2	Jakarta Pusat	Gambir	Duri Pulo	Taman Duri Pulo Jl Petojo Barat V	2.027	YAYASAN BAKTI BARITO	UNV INDONESIA	KDB 60%
3	Jakarta Pusat	Tanah Abang	Karet Tengsin	Jl Karet Pasar Baru Barat I	800	PT. INTILAND DEVELOPMENT, Tbk	UNV INDONESIA	Zona Rumah Susun
4	Jakarta Pusat	Menteng	Pegangsaan	Jalan Taman Amir Hamzah No. 1 Rt 01 Rw 04	3.988	YAYASAN BAKTI BARITO	UNV INDONESIA	KDB 0%

NO	Kabupaten/ Kota	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	LUAS	CSR	PENDAMPING	PERUNTUKAN
5	Jakarta Pusat	Johar Baru	Tanah Tinggi	Jl Kramat Pulo Gundul RW 13	1.189	PT. DJARUM (bibli.com)	UNV INDONESIA	Zona Perumahan
6	Jakarta Pusat	Johar Baru	Tanah Tinggi	Rusun Kelurahan Tanah Tinggi	987	PT. SUMMARECON AGUNG	UNV INDONESIA	Zona Rumah Susun
7	Jakarta Pusat	Kemayoran	Serdang	Jl Taman Krida RW 1 Kel Serdang	639	PT. AGUNG SEDAYU	UNV INDONESIA	Zona Perum KDB 60%
8	Jakarta Pusat	Kemayoran	Harapan Mulia	Taman Kebon Bibit Harapan Mulia	3.446	PT. AGUNG SEDAYU	UNV INDONESIA	Zona Taman Kota Pelay Umum dan Sosial
9	Jakarta Pusat	Sawah Besar	Karanganyar	Jl Karang anyar Utara Raya, RW 09 depan kecamatan Sawah Besar	5.000	PT. AGUNG PODOMORO LAND, Tbk	UNV INDONESIA	KDB 0%
10	Jakarta Pusat	Sawah Besar	Mangga Dua Selatan	Jl Mangga Besar XIII	5.000	PT. AGUNG SEDAYU	UNV INDONESIA	KDB 0%
11	Jakarta Pusat	Sawah Besar	Pasar Baru	Jl. Krekot RW 02	5.000	PT. AGUNG PODOMORO LAND, Tbk	UNV INDONESIA	KDB 0%
12	Jakarta Pusat	Menteng	Pegangsaan	Jalan Borobudur No. 9 Rt 09 Rw 02 (Taman Borobudur)	13.331	PT. PENDAWA PROPERTI INDONESIA	UNV INDONESIA	(digunakan RPTRA 1750 KDB 0)
13	Jakarta Utara	Pademangan	Pademangan Timur	Bawah Tol Ancol	1.551	PT. SUMMARECON AGUNG	UNV MERCU BUANA	KDB 0%
14	Jakarta Utara	Penjaringan	Pejagalan	Jl. Pluit Mas Utara	5.000	YAYASAN DHARMA SUCI	UNV BUNDA MULIA	KDB 0%
15	Jakarta Utara	Penjaringan	Penjaringan	Jl. Wacung RW 16	4.741	PT. GROGOL INDAH	UNV MERCU BUANA	KDB 0%
16	Jakarta Utara	Penjaringan	Penjaringan	Rusun Muara Baru	1.290	PT. AGUNG PODOMORO LAND, Tbk	UNV MERCU BUANA	KDB 50%
17	Jakarta Utara	Cilincing	Marunda	Kluster Blok A Rusun Marunda	2.777	PT. NESTLE & GREEN WORLD	UNV MERCU BUANA	KDB 0%
18	Jakarta Utara	Cilincing	Sukapura	Jl. Manunggal Juang Rw 07	1.145	PT. SUMMARECON AGUNG	UNV NEGERI JAKARTA	Perumahan
19	Jakarta Utara	Koja	Rawa Badak Utara	Jl. Inspeksi RW 03,08, 09	2.000	PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR, Tbk	UNV NEGERI JAKARTA	KDB 5%

NO	Kabupaten/ Kota	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	LUAS	CSR	PENDAMPING	PERUNTUKAN
20	Jakarta Utara	Tanjung Priok	Sunter Jaya	RT 005, 006, 013 RW 05	3.513	PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk	Tidak Perlu Pendamping	KDB 30%
21	Jakarta Utara	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	Jl. H Oyar RW 02	1.500	PT. SUMMARECON AGUNG	UNV NEGERI JAKARTA	KDB 60%
22	Jakarta Utara	Cilincing	Semper Barat	Jl. Bengawan Solo RW 01	2.388	PT. INTILAND DEVELOPMENT, Tbk	UNV MERCU BUANA	KDB 50%
23	Jakarta Barat	Cengkareng	Rawa Buaya	RT 005 RW 04	678	PT. INTILAND DEVELOPMENT, Tbk	UNV MERCU BUANA	Zona Taman Kota dan Lingkungan
24	Jakarta Barat	Kalideres	Pegadungan	Perumahan Citra Garden 2 Blok M3	788	PT. CIPUTRA DEVELOPMENT, Tbk	UNV MERCU BUANA	Zona Sarana Pendidikan (30%)
25	Jakarta Barat	Kalideres	Kalideres	Perumahan Citra Garden 1 Blok C6	3.401	PT. CIPUTRA DEVELOPMENT, Tbk	UNV MERCU BUANA	Zona Sarana Pendidikan (30%)
26	Jakarta Barat	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	RT 002 RW 01	2.374	PT. DJARUM (bibli.com)	UNV TRISAKTI	Zona Taman Kota dan Lingkungan
27	Jakarta Barat	Kembangan	Kembangan Selatan	RT 001 RW 08	2.304	PT. METROPOLITAN KENCANA, Tbk	UNV TRISAKTI	Zona Taman Kota dan Lingkungan
28	Jakarta Barat	Kembangan	Meruya Utara	SMPN 215 RT 017/04	4.994	PT. METROPOLITAN KENCANA, Tbk	UNV TRISAKTI	Zona Taman Kota dan Lingkungan
29	Jakarta Barat	Tambora	Krendang	Jalan Krendang Selatan No. 21 Rt 05 RW 07	2.692	PT. DJARUM (bibli.com)	UNV TRISAKTI	Zona Taman Kota dan Lingkungan
30	Jakarta Barat	Cengkareng	Duri Kosambi	Rusun Pesakih JL. Daan Mogoot		PT. HARAPAN GLOBAL NIAGA	UNV TRISAKTI	Usulan Lokasi Baru
31	Jakarta Barat	Cengkareng	Cengkareng Timur	SDN Ceng Tim 21	1.651	PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk	Tidak Perlu Pendamping	Tidak banjir
32	Jakarta Barat	Kembangan	Meruya Selatan	SDN 04, Jl. H. Saaba RT 007/03	2.028	PT. DJARUM (bibli.com)	UNV TRISAKTI	Tidak banjir
33	Jakarta Barat	Kembangan	Meruya Selatan	Jl H, Saaba, Komplek Karyawan Walikota Jakarta Barat, RW 03	2.172	belum ada CSR	UNIV TRISAKT	
34	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	Cipete Utara	Jl. Vila Sawo RT 005/02	2.416	PT. AGUNG SEDAYU	UNV HAMKA	Zona Perumahan

NO	Kabupaten/ Kota	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	LUAS	CSR	PENDAMPING	PERUNTUKAN
35	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	Jl. Inpres Manunggal RT 004/02	2.030	PT. ALFA GOLDLAND REALTY	UNV PEMB JAYA	Zona Perumahan KDB Sedang-Tinggi
36	Jakarta Selatan	Cilandak	Lebak Bulus	Jl. Mawar/Jl. Batan RT 008/02	1.108	PT. MOUNT SCOPUS INDONESIA	UNV HAMKA	KDB 0%
37	Jakarta Selatan	Cilandak	Lebak Bulus	Rumah Pintar Jl. H, Gandun RT 007/08	980	PT. INDOLAND INTI PERKASA	UNV HAMKA	Zona Perumahan
38	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	Kebagusan	Jl. Baung III RT 005/02	1.800	PT. NESTLE INDONESIA	Tidak Perlu Pendamping	Zona Perumahan
39	Jakarta Selatan	Jagakarsa	Ciganjur	Rumah Dinas Guru Jl. Pasir RT 001/06	6.500	PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk	Tidak Perlu Pendamping	Zona Perumahan
40	Jakarta Selatan	Tebet	Menteng Dalam	Jl. Rasamala III RT 003/13 (Eks SD Menteng Dalam)	1.588	PT. ALFA GOLDLAND REALTY	UNV HAMKA	Zona Perumahan
41	Jakarta Selatan	Setiabudi	Menteng Atas	Jl. Saharjo Komp AKABRI RT 001/08	857	PT. ELITE PRIMA HUTAMA	UNV HAMKA	KDB 0%
42	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	Pesanggrahan	Jl. H, Gari RT 001 RW 03	700	PT. ARTISAN WAHYU	UNV PEMB JAYA	KDB
43	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	Bintaro	Perum Vila Anggrek RW 12 RT 08	2.800	PT. METROPOLITAN KENCANA, Tbk	UNV PEMB JAYA	KDB
44	Jakarta Selatan	Pesanggrahan	Bintaro	Jl. Bintaro Permai III RW 09 RT 002	1.000	PT. CIPUTRA DEVELOPMENT, Tbk	UNV PEMB JAYA	KDB
45	Jakarta Selatan	Pasar Minggu	Pejaten Timur	Jl. Kemuning RW 07	1.108	PT. JAFPA COMFEED INDONESIA, Tbk	UNIV PEMB JAYA	KDB
46	Jakarta Timur	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	Rusun Cipinang Besar Selatan	3.451	PT. AGUNG PODOMORO LAND, Tbk	UNV NEGERI JAKARTA	Zona Pemerintah Daerah (40%)
47	Jakarta Timur	Cakung	Penggilingan	Jl. Rengas Blok I	1.675	PT. CIPUTRA DEVELOPMENT, Tbk	UNV NEGERI JAKARTA	Zona Pelay Umum & sos (KDB 40%)
48	Jakarta Timur	Cakung	Cakung Barat	Rusun Tipar Cakung	2.500	PT. SUMMARECON AGUNG	UNV IBNU CHALDUN	Zona Perumahan Vetikal (40%)
49	Jakarta Timur	Cakung	Jatinegara	Rusun Pulo Jahe	1.094	PT. CIPUTRA DEVELOPMENT, Tbk	UNV IBNU CHALDUN	KDB 60%

NO	Kabupaten/ Kota	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	LUAS	CSR	PENDAMPING	PERUNTUKAN
50	Jakarta Timur	Cakung	Pulo Gebang	Rusun Pulo Gebang	3.642	PT. SUMMARECON AGUNG	UNV NEGERI JAKARTA	Zona Rumah Susun
51	Jakarta Timur	Matraman	Utan Kayu Utara	Jl. Galur Sari belakang SMPN 07	2.394	PT. INDOFOOD CPB SUKSES MAKMUR, Tbk	UNV IBNU CHALDUN	Zona Pemerintah Daerah (55%)
52	Jakarta Timur	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	Jl. Swadaya II RW 06	2.500	PT. BINTANG TOEDJOE	UNV IBNU CHALDUN	Zona Perumahan Vertikal (55%)
53	Jakarta Timur	Kramat Jati	Tengah	Jl GiriKencana RW 03	3.219	PT. INDOLAKTO	UNV NEGERI JAKARTA	KDB 40%
54	Jakarta Timur	Cipayung	Cilangkap	Belakang Kantor Lurah Cilangkap	5.818	PT. SINAR MAS	UNV NEGERI JAKARTA	Zona Jalur Hijau
55	Jakarta Timur	Makasar	Kebon Pala	Jl. Kamboja	4.609	PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk	Tidak Perlu Pendamping	Zona Perumahan KDB Sedang-Tinggi (60%)
56	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	Pulau Panggang	Pulau Pramuka	1.000	PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk	Tidak Perlu Pendamping	
57	Jakarta Utara	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	Belakang Kantor Lurah Cilangkap	2.224	SWADAYA MASYARAKAT	Tidak Perlu Pendamping	Zona Jalur Hijau
58	Jakarta Barat	Tambora	Angke	Kalijodo	2.000	Sinar Mas Land	-	Zona Perumahan KDB Sedang-Tinggi (60%)
LOKASI TAHAP III								
1	Direncanakan akan ada 131 Lokasi, Data Masih di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta							

DAFTAR REKAPITULASI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) YANG TELAH DIRESMIKAN PER 31 DESEMBER 2015

No	Nama RPTRA	Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Luas	Sumber Dana Pembangunan	Tanggal Peresmian
Walikota Jakarta Pusat							
1	RPTRA Kenanga	Jl. Makian No. 1 Rt 002/ 005	Gambir	Cideng	2.583	CSR PT. PEMBANGUNAN JAYA	30 Mei 2015
2	RPTRA Intiland Teduh	Jl Karet Pasar Baru Barat I	Tanah Abang	Karet Tengsin	800	CSR PT. INTILAND DEVELOPMENT, Tbk	30 Desember 2015
3	RPTRA Melati Duri Pulo	Taman Duri Pulo Jl Petojo Barat V	Gambir	Duri Pulo	2.027	CSR YAYASAN BAKTI BARITO	20 Januari 2016
4	RPTRA Borobudur	Jalan Borobudur No. 9 Rt 09 Rw 02 (Taman Borobudur)	Menteng	Pegangsaan	1.750	CSR PT. PENDAWA PROPERTI INDONESIA	5 Februari 2016
5	RPTRA Amir Hamzah	Jalan Taman Amir Hamzah No. 1 Rt 01 Rw 04	Menteng	Pegangsaan	3.988	CSR YAYASAN BAKTI BARITO	26 Februari 2016
6	RPTRA Pulo Gundul	Jl Kramat Pulo Gundul RW 13	Johar Baru	Tanah Tinggi	2.028	CSR blibli.com	17 Maret 2016
7	RPTRA Tanah Abang	Jl Taman Tanah Abang 3	Gambir	Petojo Selatan	1.054	CSR PT. AGUNG SEDAYU	24 Maret 2016
Walikota Jakarta Utara							
1	RPTRA Sungai Bambu	Jl. Jati Raya Rw 06	Tanjung Priok	Sungai Bambu	3.838	CSR PT. PEMBANGUNAN JAYA dan PT. TMMIN	13 Mei 2015
2	RPTRA Sunter Jaya Berseri	RT 005, 006, 013 RW 05	Tanjung Priok	Sunter Jaya	3.513	CSR PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk	18 Desember 2015
3	RPTRA NKRI	Jl. Kelapa Lilin VIII	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	2.224	Swadaya Masyarakat RW12	1 April 2016
4	RPTRA DHARMA SUCI	Jl. Pluit Mas Utara	Penjaringan	Pejagalan	5.000	CSR YAYASAN DHARMA SUCI	6 April 2016
Walikota Jakarta Barat							
1	RPTRA Kembangan	Jl. Gang Kompas Rt 001 Rw 01	Kembangan	Kembangan Utara	3.250	CSR PT. GAJAH TUNGGAL	5 Juni 2015
2	RPTRA Meruya Utara	SMPN 215 RT 017/04	Kembangan	Meruya Utara	4.994	CSR PT. METROPOLITAN KENCANA, Tbk	29 Desember 2015
3	RPTRA Krendang	Jalan Krendang Selatan No. 21 Rt 05 RW 07	Tambora	Krendang	2.692	CSR blibli.com	3 Februari 2016
4	RPTRA Kedoya Utara	Jl. Taman Cosmos RT 002 RW 01	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	2.374	CSR blibli.com	3 Februari 2016
5	RPTRA Cengkareng Timur Berseri	Jl. Kayu Besar Outer Ringroad Rt. 012/011	Cengkareng	Cengkareng Timur	1.651	CSR PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk	18 Februari 2016
6	RPTRA Duri Kosambi	Rusun Pesakih JL. Daan Mogoot	Cengkareng	Duri Kosambi	2.000	CSR PT. HARAPAN GLOBAL NIAGA	5 Maret 2016

No	Nama RPTRA	Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Luas	Sumber Dana Pembangunan	Tanggal Peresmian
7	RPTRA Kembangan Selatan	RT 001 RW 08	Kembangan	Kembangan Selatan	2.304	CSR PT. METROPOLITAN KENCANA, Tbk	10 Maret 2016
8	RPTRA Meruya Selatan	SDN 04, Jl. H. Saaba RT 007/03	Kembangan	Meruya Selatan	1.189	CSR blibli.com	17 Maret 2016
Walikota Jakarta Selatan							
1	RPTRA Bahari	Jl. Bahari Raya Rt 009 Rw 07	Cilandak	Gandaria Selatan	1.000	CSR PT. PEMBANGUNAN JAYA	21 Mei 2015
2	RPTRA Permai	Jl. Bintaro Permai III RW 09 RT 002	Pesanggrahan	Bintaro	1.000	CSR PT. CIPUTRA DEVELOPMENT, Tbk	30 Desember 2015
3	RPTRA Anggrek Bintaro	Perum Vila Anggrek RW 12 RT 08	Pesanggrahan	Bintaro	2.800	CSR PT. METROPOLITAN KENCANA, Tbk	20 Januari 2016
4	RPTRA Puspita	Jl. H, Gari RT 001 RW 03	Pesanggrahan	Pesanggrahan	700	CSR PT. ARTISAN WAHYU	10 Februari 2016
5	RPTRA Saharjo Mentas	Jl. Saharjo Komp AKABRI RT 001/08	Setiabudi	Menteng Atas	857	CSR PT. ELITE PRIMA HUTAMA	8 Maret 2016
Walikota Jakarta Timur							
1	RPTRA Cililitan	Jl. Buluh Rt 10 Rw 16	Kramat Jati	Cililitan	2.642	CSR PT. PEMBANGUNAN JAYA	22 Oktober 2015
2	RPTRA Pulogebang Indah	Rusun Pulo Gebang	Cakung	Pulo Gebang	3.642	CSR PT. SUMMARECON AGUNG	23 Desember 2015
3	RPTRA Kebon Pala Berseri	Jl. Kamboja	Makasar	Kebon Pala	4.609	CSR PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk	28 Januari 2016
4	RPTRA Cipinang Besar Utara	Jl. Swadaya II RW 06	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	2.500	CSR PT. BINTANG TOEDJOE	30 Maret 2016
Kepulauan Seribu							
1	RPTRA Amterdam	Kepulauan Seribu Selatan	Untung Jawa	Pulau Untung Jawa	2.204	CSR PT. PEMBANGUNAN JAYA	10 Oktober 2015

**DAFTAR SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN LAHAN
YANG BERATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2015**

NO.	NOMOR SERTIFIKAT	KELURAHAN	LUAS (m²)
1	HPL No. 1	Ancol	4.779.120,00
2	HPL No. 12	Ancol	536.823,00
3	HPL No. 1	Pluit	208.665,00
4	HPL No. 2	Pluit	752.000,00
5	HPL No. 3	Pluit	20.100,00
6	HPL No. 9	Pluit	2.230,00
7	HPL No. 1	Kamal Muara	178.020,00
8	HPL No. 16	Kamal Muara	5.628,00
9	HPL No. 3	Penjaringan	13.590,00
10	HPL No. 1	Cideng	13.395,00
11	HPL No. 1	Cikini	2.221,00
12	HPL No. 1	Mangga Dua Selatan	134.442,00
13	HPL No. 2	Mangga Dua Selatan	14.790,00
14	HPL No. 3	Mangga Dua Selatan	907,00
15	HPL No. 4	Mangga Dua Selatan	333,00
16	HPL No. 1	Karet Tengsin	4.014,00
17	HPL No. 3	Kebon Kacang	1.262,00
18	HPL No. 1	Sunter Jaya	139.145,00
19	HPL No. 6	Ancol	124.289,00
20	HPL No. 1	Semper Barat	4.770,00
21	HPL No. 1	Papanggo	144.240,00
22	HPL No. 1	Glodok	10.480,00
23	HPL No. 1	Wijaya Kusuma	86.074,00
24	HPL No. 1	Taman Sari	1.230,00
25	HPL No. 2	Taman Sari	2.198,00
26	HPL No. 1	Tangki	54.395,00
27	HPL No. 1	Karet Kuningan	160.920,00
28	HPL No. 00001	Penggilingan	371.480,00
29	HPL No. 1	Penggilingan	60.319,00
30	HPL No. 2	Penggilingan	272.569,00
31	HPL No. 4	Jatinegara	29.070,00
32	HPL No. 10	Jatinegara	151.797,00
33	HPL No. 11	Jatinegara	40.605,00
34	HPL No. 1	Kayu Putih	88.200,00

